



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2022

Perubahan RPD

Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat
2023-2026





GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa diperlukan dokumen rencana pembangunan yang akan digunakan Pj Gubernur Papua Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah tahun 2023-2026;

b. bahwa penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya berimplikasi pada berkurangnya cakupan wilayah Provinsi Papua Barat menjadi 7 kabupaten, sehingga perlu ada penyesuaian dalam cakupan analisis dan target-target pembangunan sesuai dengan perkembangan wilayah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6831);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Barat.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat yang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Papua Barat dan DPRPB yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
26. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluar, dan hasil terhadap rencana dan standar.
29. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 3

(1) Sistematika RPD terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum
- BAB III Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV Permasalahan Dan Isu Strategis
- BAB V Tujuan Dan Sasaran
- BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas
- BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX Penutup

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV

PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidakpastian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *eksisting*;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan dan pemekaran Daerah.

Pasal 7

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat, maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat 2023-2026. Dokumen ini disusun sebagai pedoman Pj Gubernur Papua Barat untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di Tahun 2022.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. Oleh karena itu penyusunan Dokumen RPD Provinsi Papua Barat dalam arah kebijakannya tetap mengedepankan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dengan berbasis kontekstual pembangunan Provinsi Papua Barat.



Kita semua mengharapkan agar implementasi kebijakan pembangunan daerah Provinsi Papua Barat 2023-2026 memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Papua barat kepada publik/ masyarakat di Provinsi Papua Barat. Terima Kasih.

Manokwari, _____
Pj GUBERNUR PAPUA BARAT,





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-8
1.3.1	Keterhubungan RPD dan RPJPD Papua Barat 2012-2025.....	I-9
1.3.2	Keterhubungan RPD dan RPJM Nasional 2020-2024	I-9
1.3.3	Keterhubungan RPD Papua Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat 2013-2033.....	I-11
1.3.5	Keterhubungan RPD dengan Renstra OPD	I-12
1.3.6	Keterhubungan RPD dengan RKPD	I-13
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	I-14
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN	I-14
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.4	Wilayah Rawan Bencana	II-19
2.1.5	Kondisi Demografi	II-22
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-26
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-26
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-36
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-46
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-47
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-47
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	II-166
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-190
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-190
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-192



2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-193
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-195
2.5	EVALUASI RPJMD PAPUA BARAT 2017-2022	II-198
2.6	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM).....	II-206
2.7.	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)	II-208
2.7.1.	Keterkaitan SDGs dengan RPJMD	II-208
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	kinerja keuangan masa lalu	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-14
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-21
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-28
3.3.1	Arah Kebijakan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.....	III-28
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-33
3.3.4	Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua	III-38
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT.....	IV-1
4.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-16
4.1.3	Urusan Pilihan	IV-35
4.1.4	Urusan Pemerintahan Penunjang.....	IV-42
4.2	ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT	IV-49
4.2.1	Isu Strategis Internasional.....	IV-49
4.2.2	Isu Kebijakan Nasional.....	IV-54
4.2.3	Isu Strategis Wilayah Papua Barat	IV-60
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	V-1
5.1	PENDAHULUAN.....	V-1
5.1.1	Sinkronisasi sasaran RPJMD tahun 2023-2026 dengan sasaran RPJPD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2025.	V-1
5.1.2	Sinkronisasi target kinerja RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan sasaran pokok pembangunan nasional.....	V-3
5.1.3	Sinkronisasi target kinerja RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan RIPP	V-4



5.2	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	V-6
5.2.1	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial.....	V-6
5.2.2	Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif.....	V-7
5.2.3	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru.....	V-7
5.2.4	Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan serta Berkelanjutan.....	V-7
5.2.5	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta Pelayanan Publik.....	V-8
5.2.6	Tujuan 6: Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Daya Tahan Masyarakat Provinsi Papua Barat	V-8
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-5
6.2.1	Tema Pembangunan	VI-5
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan	VI-9
6.2.3	Arah Pembangunan Kewilayahan	VI-19
6.3	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	VI-22
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1	KERANGKA PENDANAAN	VII-1
7.2	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	KAIDAH IMPLEMENTASI	IX-1
9.2	PEDOMAN TRANSISI.....	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Daratan Papua Barat.....	II-1
Tabel II.2	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat, 2022	II-2
Tabel II.3	Jumlah Kampung Menurut Letak Geografis, 2021.....	II-3
Tabel II.4	Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten.....	II-4
Tabel II.5	Banyaknya Kampung Menurut Kondisi Topografi, 2021	II-4
Tabel II.6	Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat.....	II-8
Tabel II.7	Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat	II-9
Tabel II.8	Luas Areal Air Tanah (Ground Water) di Papua Barat	II-10
Tabel II.9	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG di Provinsi Papua Barat, 2022	II-12
Tabel II.10	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP I.....	II-15
Tabel II.11	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP II.....	II-17
Tabel II.12	Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP IV.....	II-18
Tabel II.13	Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Papua Barat	II-19
Tabel II.14	Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Berdasarkan Kab/Kota, 2021 ..	II-20
Tabel II.15	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km ² Menurut Kab/Kota Hasil Sensus Tahun 2022.....	II-24
Tabel II.16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kab/Kota, 2022....	II-24
Tabel II.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Papua Barat Tahun 2022.....	II-25
Tabel II.18	Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)	II-25
Tabel II.19	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Juta Rupiah).....	II-29
Tabel II.20	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tanpa Migas Kabupaten di Papua Barat (Milyar Rupiah).....	II-29
Tabel II.21	Laju Pertumbuhan Total PDRB Menurut Kab/Kota di Papua Barat (%).....	II-30
Tabel II.22	Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022	II-31



Tabel II.23	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022 ..	II-32
Tabel II.24	Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022	II-33
Tabel II.25	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (Rp 000) 2018-2022	II-34
Tabel II.26	Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Papua Barat.....	II-35
Tabel II.27	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota, 2018-2022	II-35
Tabel II.28	Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2022.....	II-36
Tabel II.29	Angka Melek Huruf Usia 15+ di Papua Barat Sebelum Pemekaran Tahun 2016-2021	II-37
Tabel II.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2018-2022 (%)	II-45
Tabel II.31	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten (jiwa), 2022	II-46
Tabel II.32	Angka Partisipasi Sekolah, Provinsi Papua Barat, 2021	II-61
Tabel II.33	Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019.....	II-62
Tabel II.34	Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat.....	II-70
Tabel II.35	Rumah Sakit yang Berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Papua Barat.....	II-70
Tabel II.36	Jumlah Posbindu di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019	II-73
Tabel II.37	Jumlah dan Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019.....	II-76
Tabel II.38	Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	II-78
Tabel II.39	Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	II-86
Tabel II.40	Perbandingan Persentase TSR Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021.....	II-92
Tabel II.41	Perkembangan <i>Annual Paracite Incidence</i> (API) per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 - 2021	II-98
Tabel II.42	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten di Papua Barat.....	II-102
Tabel II.43	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Papua Barat 2018-2022.....	II-103
Tabel II.44	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, 2018-2022....	II-103



Tabel II.45	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Papua Barat, 2022.....	II-104
Tabel II.46	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak.....	II-104
Tabel II.47	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama, 2022	II-105
Tabel II.48	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Atap Rumah Terluas, 2022	II-105
Tabel II.49	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Dinding Rumah Terluas, 2022	II-106
Tabel II.50	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Lantai Rumah Terluas, 2022	II-106
Tabel II.51	Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2021	II-108
Tabel II.52	Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Kejadian Perkelahian Massal di Wilayahnya	II-110
Tabel II.53	Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Papua Barat per Kabupaten Menurut Agama, 2022	II-114
Tabel II.54	Jumlah Tempat Ibadah per Kabupaten Menurut Agama di Papua Barat, 2022.....	II-115
Tabel II.55	Persentase Keluarga yang Menerima Bantuan Pangan NonTunai Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2022.	II-115
Tabel II.56	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022.....	II-116
Tabel II.57	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2021	II-117
Tabel II.58	Persentase Keluarga Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018-2022.	II-117
Tabel II.59	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022.....	II-118
Tabel II.60	Perbandingan Cakupan Jaminan Sosial Antara Wilayah dengan Cakupan Terendah (Pegunungan Arfak) dan Wilayah dengan Cakupan Tertinggi (Kaimana), 2022.....	II-118
Tabel II.61	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2022 (%)	II-119
Tabel II.62	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022	II-119
Tabel II.63	Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten	II-122
Tabel II.64	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	II-123



Tabel II.65	APM SD, SMP dan SMA berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran, 2018-2021	II-123
Tabel II.66	Perbandingan APS Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2022	II-123
Tabel II.67	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dan Provinsi Papua Barat	II-124
Tabel II.68	Rata-rata Konsumsi Protein dan Kalori Per Kapita Sehari di Papua Barat 2016-2021.....	II-125
Tabel II.69	Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan, Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran, Maret 2021	II-126
Tabel II.70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Papua Barat 2016-2021	II-128
Tabel II.71	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017 - 2021.....	II-129
Tabel II.72	Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat 2017-2021 (%)	II-130
Tabel II.73	Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat, 2017-2021 (%)	II-130
Tabel II.74	Rasio Pasangan yang berakte nikah di Papua Barat, 2017-2021 (%)	II-131
Tabel II.75	Persentase penduduk berumur 0-17 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran di Papua Barat tahun 2018-2021	II-131
Tabel II.76	Persentase penduduk berumur 0-4 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran di Papua Barat tahun 2018-2021	II-131
Tabel II.77	Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	II-133
Tabel II.78	Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Papua Barat....	II-133
Tabel II.79	Rekapitulasi Jumlah Kabupaten, Distrik dan Kampung di Papua Barat Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM)	II-134
Tabel II.80	Jumlah Kampung Penerima dan Alokasi Dana Desa (Ribu Rupiah) di Papua Barat Tahun 2016-2020	II-135
Tabel II.81	Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)	II-138
Tabel II.82	Cakupan Kampung/Kelurahan yang Sudah dan Belum Melakukan Pendataan SAIK+ (per 19 Maret 2023).....	II-138
Tabel II.83	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%).....	II-139
Tabel II.84	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2020 (%)....	II-139
Tabel II.85	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta KB Aktif (jiwa)	II-140
Tabel II.86	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 2018-2020 (%)	II-140
Tabel II.87	Metode KB yang Digunakan oleh PUS (%).....	II-140

Tabel II.88	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Papua Barat 2016-2020	II-141
Tabel II.89	Jumlah Angkutan Darat Berdasarkan Jenis Angkutan Darat di Papua Barat.....	II-142
Tabel II.90	Jumlah Penerbangan dan Penumpang Udara di Papua Barat Tahun 2017-2020.....	II-142
Tabel II.91	Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat....	II-143
Tabel II.92	Kunjungan Kapal Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kegiatan di Papua Barat	II-143
Tabel II.93	Jumlah Angkutan Barang yang Melalui Dermaga Pelabuhan/Transportasi Udara di Papua Barat di Tahun 2017-2020	II-143
Tabel II.94	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel di Papua Barat, 2017-2022	II-144
Tabel II.95	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet), 2017-2022 ...	II-145
Tabel II.96	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet	II-145
Tabel II.97	Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019 dan 2020	II-145
Tabel II.98	Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)	II-147
Tabel II.99	Cakupan Kampung/Kelurahan yang Sudah dan Belum Melakukan Pendataan SAIK+ (per 19 Maret 2023)	II-147
Tabel II.100	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Papua Barat (unit), 2017	II-148
Tabel II.101	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	II-148
Tabel II.102	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	II-149
Tabel II.103	Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua Barat dan Indonesia 2015-2018.....	II-149
Tabel II.104	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	I I-151
Tabel II.105	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tujuan Utama Berolahraga dan Jalur/Wadah Utama Dalam Berolahraga, 2018	II-152
Tabel II.106	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga Tahun 2018.....	II-152
Tabel II.107	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat.....	II-154



Tabel II.108	Hasil Kinerja Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Papua Barat (%).....	II-155
Tabel II.109	Tiga Tipe Kepemimpinan Yang Dianut di Dua Wilayah Adat Papua Barat.....	II-157
Tabel II.110	Bentuk Bentuk Kearifan Lokal di Provinsi Papua barat	II-159
Tabel II.111	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat 2018 ...	II-163
Tabel II.112	Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017 - 2021.....	II-164
Tabel II.113	Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Papua Barat, 2017-2021 (%)	II-165
Tabel II.114	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Perairan Umum Daratan, 2019.....	II-170
Tabel II.115	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya, 2019	II-170
Tabel II.116	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB Papua Barat 2016-2020 (%)	II-171
Tabel II.117	Jumlah Akomodasi, Rata-rata Lama Menginap, Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Papua Barat 2017-2020.....	II-172
Tabel II.118	Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi Usaha Akomodasi Tahun 2020	II-172
Tabel II.119	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2020 (ton).....	II-173
Tabel II.120	Produksi Perkebunan (ton), 2020.....	II-174
Tabel II.121	Populasi Ternak & Unggas di Papua Barat Tahun 2020 (ekor).....	II-174
Tabel II.122	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (ha) Tahun 2020.	II-175
Tabel II.123	Rata-Rata Emisi Tahunan dari Deforestasi, Degradasi, dan Serapan dari Reforestasi di Provinsi Papua Barat pada Periode 2006-2012 dan 2012-2020	II-176
Tabel II.124	Luasan Arahkan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan.....	II-178
Tabel II.125	Luasan Indeks Biogeofisik Emisi di Papua Barat	II-181
Tabel II.126	Luasan Indeks Biogeofisik Serapan di Papua Barat	II-181
Tabel II.127	Luasan Indeks Biogeofisik Kebakaran di Provinsi Papua Barat....	II-183
Tabel II.128	Luasan Tipologi Kelembagaan KPH di Provinsi Papua Barat	II-185
Tabel II.129	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan, 2022 (%)	II-185
Tabel II.130	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Papua Barat 2019.....	II-186
Tabel II.131	Banyaknya Pemakaian Bahan Bakar Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019.....	II-187
Tabel II.132	Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Provinsi Papua Barat Tahun 2019	II-187
Tabel II.133	Sebaran Kawasan dan jumlah KK Transmigrasi di Papua Barat, 2023	II-189

Tabel II.134	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	II-191
Tabel II.135	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020	II-191
Tabel II.136	Perkembangan Rasio Ketergantungan di Papua Barat, 2022	II-197
Tabel II.137	Rekapitulasi Evaluasi RPJMD Papua Barat 2017-2022	II-198
Tabel II.138	Evaluasi Capaian RPJMD Papua Barat 2017-2022	II-200
Tabel II.139	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target SPM Provinsi Berdasarkan Urusan	II-206
Tabel II.140	Keserasian Indikator Pembangunan terhadap SDGs.....	II-209
Tabel III.1	Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021 (Rp Juta).....	III-5
Tabel III.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp Juta)	III-5
Tabel III.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-8
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp Juta)	III-10
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat	III-12
Tabel III.6	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016-2019 (Rp Juta)	III-13
Tabel III.7	Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2020	III-15
Tabel III.8	Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2020 .	III-18
Tabel III.9	Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-20
Tabel III.10	Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2017-2021 (Rp juta)	III-21
Tabel III.11	Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat.....	III-21
Tabel III.12	Surplus/Defisit Riil APBD Papua Barat, 2017-2021 (Rp juta)	III-22
Tabel III.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Papua Barat (Rp Juta) .	III-23
Tabel III.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-23
Tabel III.15	Ruang Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021 (Rp Juta).....	III-25
Tabel III.16	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Papua Barat (Rp Juta)	III-28
Tabel III.17	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2023-2026 (Rp).....	III-35
Tabel III.18	Kerangka Pengalokasian DBH Sumber Daya Alam Papua Barat, 2023-2026	III-39
Tabel III.19	Kerangka Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Barat Tahun 2023-2026.....	III-40



Tabel III.20	Kerangka Pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus Tahun 2023-2026	III-40
Tabel IV.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Barat.....	IV-2
Tabel IV.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Barat.....	IV-7
Tabel IV.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat.....	IV-10
Tabel IV.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Barat	IV-12
Tabel IV.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Barat	IV-13
Tabel IV.6	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Barat	IV-15
Tabel IV.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Barat.....	IV-16
Tabel IV.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Barat.....	IV-18
Tabel IV.9	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat	IV-20
Tabel IV.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Barat.....	IV-21
Tabel IV.11	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat.....	IV-22
Tabel IV.12	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Barat	IV-24
Tabel IV.13	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Barat	IV-26
Tabel IV.14	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Barat	IV-27



Tabel IV.15	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Barat.....	IV-28
Tabel IV.16	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Barat.....	IV-29
Tabel IV.17	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Barat.....	IV-31
Tabel IV.18	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Barat.....	IV-32
Tabel IV.19	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat.....	IV-33
Tabel IV.20	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Barat	IV-34
Tabel IV.21	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Barat.....	IV-35
Tabel IV.22	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Barat.....	IV-36
Tabel IV.23	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Barat.....	IV-37
Tabel IV.24	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Barat	IV-39
Tabel IV.25	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Barat.....	IV-40
Tabel IV.26	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Barat.....	IV-41
Tabel IV.27	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Barat	IV-42
Tabel IV.28	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Barat	IV-43
Tabel IV.29	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Barat.....	IV-44
Tabel IV.30	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Barat	IV-45
Tabel IV.31	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat.....	IV-46



Tabel IV.32	Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat.....	IV-48
Tabel IV.33	Pemetaan Kabupaten di Provinsi Papua Barat berdasarkan Pendekatan Pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan	IV-54
Tabel IV.34	Prioritas Wilayah di Papua Barat	IV-55
Tabel V.1	Sinkronisasi Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 dengan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026	V-2
Tabel V.2	Perbandingan antara target capaian indikator makro pembangunan pada RPD Papua Barat dan RPJMN 2020-2024...	V-4
Tabel V.3	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan RIPPP	V-5
Tabel V.4	Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.....	V-9
Tabel VI.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Papua Barat 2023-2026	VI-1
Tabel VI.2	Keselaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Papua Barat 2023-2026	VI-9
Tabel VI.3	Prioritas Kewilayahan Implementasi Program RPD 2023-2026	VI-21
Tabel VI.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-23
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat 2023-2026 (Rp).....	VII-2
Tabel VII.2	Indikasi Plafon Belanja OPD Berdasarkan Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.....	VII-3
Tabel VII.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Daerah Daerah Papua Barat 2023-2026.	VII-4
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.....	VIII-3
Tabel VIII.2	Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Papua Barat 2023-2026	VIII-6





DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tahapan Penyusunan RPD Papua Barat Tahun 2024-2026	I-4
Gambar I.2	Alur Keterhubungan Antar Dokumen.....	I-8
Gambar I.3	Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selama Periode 2006-2025.....	I-9
Gambar I.4	Alur Keterhubungan Dokumen RPD Papua Barat 2023-2026 dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033	I-12
Gambar I.5	Alur Keterhubungan Dokumen RPD Papua Barat 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	I-13
Gambar I.6	Keterhubungan RPD dan RKPD	I-13
Gambar II.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat.....	II-2
Gambar II.2	Peta Topografi Provinsi Papua Barat.....	II-3
Gambar II.3	Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat.....	II-5
Gambar II.4	Peta Tektonik Indonesia	II-5
Gambar II.5	Peta Seismisitas Indonesia (1 Januari – 29 Desember 2022)	II-6
Gambar II.6	Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat	II-7
Gambar II.7	Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat	II-7
Gambar II.8	Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat.....	II-10
Gambar II.9	Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat.....	II-11
Gambar II.10	Peta Curah Hujan Provinsi Papua Barat.....	II-12
Gambar II.11	Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Barat, 2019	II-13
Gambar II.12	Peta Risiko Bencana Per Ancaman di Papua Barat, 2021	II-20
Gambar II.13	Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota, 2018-2023 (jiwa).....	II-23
Gambar II.14	Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat, 2010-2022.....	II-26
Gambar II.15	Rata-rata Pertumbuhan IPM per Tahun, 2010-2022 (%)	II-27
Gambar II.16	Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat Menurut Dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, 2010-2022	II-27
Gambar II.17	IPM Menurut Gender dan IPG Papua Barat 2010-2022.....	II-28
Gambar II.18	IPM Menurut Gender dan IPG Kabupaten di Papua Barat, 2022	II-29



Gambar II.19	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin, per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022.....	II-37
Gambar II.20	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022	II-38
Gambar II.21	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019-2022.....	II-39
Gambar II.22	Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022 ..	II-39
Gambar II.23	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Barat, 2020-2022 ...	II-40
Gambar II.24	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019-2022.....	II-40
Gambar II.25	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022	II-41
Gambar II.26	Perbandingan Capaian AHH Rata-Rata Kabupaten di Papua Barat dengan Nasional	II-41
Gambar II.27	AHH Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022	II-42
Gambar II.28	AHH Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022	II-42
Gambar II.29	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita menurut Indeks TB/U, BB/U dan TB/BB di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	II-44
Gambar II.30	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Papua Barat (jiwa), 2022	II-46
Gambar II.31	Jenis dan Prporosi Pendidikan Pra Sekolah di Papua Barat sebelum Pemekaran tahun 2021 (%)	II-48
Gambar II.32	Perkembangan Jumlah TK dan RA di Papua Barat, 2018-2021	II-48
Gambar II.33	Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru TK/RA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	II-49
Gambar II.34	Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Siswa pada Tingkat PAUD di Provinsi Papua Barat 2022	II-49
Gambar II.35	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat PAUD di Provinsi Papua Barat 2022	II-50
Gambar II.36	Perkembangan Jumlah SD dan MI di Papua Barat, 2018-2022.	II-51
Gambar II.37	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-51
Gambar II.38	Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-52

Gambar II.39	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022	II-52
Gambar II.40	Perkembangan Jumlah SMP dan MTs di Papua Barat, 2018-2022	II-53
Gambar II.41	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-53
Gambar II.42	Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-54
Gambar II.43	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022	II-54
Gambar II.44	Perkembangan Jumlah SMA dan MA di Papua Barat, 2018-2022	II-55
Gambar II.45	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022	II-56
Gambar II.46	Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022	II-56
Gambar II.47	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022	II-57
Gambar II.48	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-58
Gambar II.49	Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2022.....	II-58
Gambar II.50	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2022	II-59
Gambar II.51	Jumlah Peserta Didik pada Tiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin, Provinsi Papua Barat, 2021	II-60
Gambar II.52	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019.....	II-61
Gambar II.53	Rata-Rata APK dari 7 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2018-2021.....	II-62
Gambar II.54	APK Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	II-63
Gambar II.55	Rata-Rata APM dari 7 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2018-2021.....	II-63
Gambar II.56	APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021.....	II-64
Gambar II.57	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten, 2022	II-65

Gambar II.58	Peringkat Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran, Tahun Penilaian 2021	II-65
Gambar II.59	Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Barat	II-66
Gambar II.60	Distribusi Puskesmas Setiap Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	II-67
Gambar II.61	Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	II-67
Gambar II.62	Rasio Puskesmas per Distrik Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022.....	II-68
Gambar II.63	Rasio Puskesmas Pembantu per Puskesmas Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	II-68
Gambar II.64	Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019.....	II-70
Gambar II.65	Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019.....	II-72
Gambar II.66	Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019.....	II-73
Gambar II.67	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Provinsi Papua Barat, 2021	II-74
Gambar II.68	Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	II-75
Gambar II.69	Rasio Dokter Spesialis terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019	II-76
Gambar II.70	Rasio Tenaga Perawat terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021.....	II-77
Gambar II.71	Rasio Tenaga Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021.....	II-77
Gambar II.72	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019.....	II-79
Gambar II.73	Jumlah dan Persentase Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat Tahun 2019.....	II-80
Gambar II.74	Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019	II-80
Gambar II.75	Rata-Rata Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Barat, 2018- 2022	II-81
Gambar II.76	Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022	II-81
Gambar II.77	Jumlah Ibu Bersalin dan Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019	II-82
Gambar II.78	Jumlah Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2019	II-83

Gambar II.79	Jumlah Kematian Anak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019.....	II-83
Gambar II.80	Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019	II-84
Gambar II.81	Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019	II-85
Gambar II.82	Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	II-87
Gambar II.83	Persentase Balita BB Kurang Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022	II-88
Gambar II.84	Persentase Balita TB Pendek Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022	II-88
Gambar II.85	Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	II-90
Gambar II.86	Persentase KEK pada Wanita Hamil dan Wanita Tidak Hamil Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	II-90
Gambar II.87	Persentase TC Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	II-92
Gambar II.88	Perkembangan Positivity Rate HIV di Papua Barat (Pra-Pemekaran), 2017 - 2021.....	II-93
Gambar II.89	Indeks Kemahalan Konstruksi 34 Provinsi di Indonesia, 2021 (pembagian wilayah sebelum penetapan UU No. 29 Tahun 2022)	II-102
Gambar II.90	Kondisi Jalan Berdasarkan Kab/Kota di Papua Barat 2022 (km)	II-103
Gambar II.91	Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021	II-108
Gambar II.92	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021	II-109
Gambar II.93	Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran Tahun 2020 dan 2021.....	II-111
Gambar II.94	Perkembangan IDI Papua Barat Pra-Pemekaran dan Nasional 2009-2020	II-111
Gambar II.95	Perkembangan Indeks Aspek IDI Papua Barat Pra-Pemekaran 2009-2020	II-112
Gambar II.96	Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020	II-113
Gambar II.97	Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Agama, 2022	II-114

Gambar II.98	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-120
Gambar II.99	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022	II-121
Gambar II.100	Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2021.....	II-121
Gambar II.101	Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021.....	II-122
Gambar II.102	Peta Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Tahun 2020	II-124
Gambar II.103	Sinergi Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	II-137
Gambar II.104	Skema Penyelenggaraan SAIK+	II-137
Gambar II.105	Skema Penyelenggaraan SAIK+	II-146
Gambar II.106	Capaian Pembangunan Pemuda Papua Barat Tahun 2018	II-150
Gambar II.107	Peta Bahasa Papua Barat oleh SIL Internasional.....	II-157
Gambar II.108	Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional.....	II-161
Gambar II.109	Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018	II-162
Gambar II.110	Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat	II-166
Gambar II.111	Peta dan Persentase Luasan Arahkan Optimasi Pemanfaatan Kawasan	II-178
Gambar II.112	Peta Luasan Indeks Biogeofisik Emisi	II-180
Gambar II.113	Peta dan Persentase Luasan Indeks Biogeofisik Serapan.....	II-182
Gambar II.114	Peta dan Persentase Luasan Indeks Biogeofisik Kebakaran.....	II-182
Gambar II.115	Peta dan Persentase Tipologi Kelembagaan KPH di Provinsi Papua Barat.....	II-184
Gambar II.116	Persentase Pengusaha IMK Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, serta Persentase Jenis Kesulitan Usaha IMK	II-188
Gambar II.117	Peta Lokasi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat, 2023	II-189
Gambar II.118	Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet....	II-192
Gambar II.119	Jumlah Tindak Pidana dan <i>Crime Rate</i> Papua Barat Sebelum Pemekaran 2012-2020	II-194
Gambar II.120	Perbandingan Jumlah Kejahatan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021	II-194
Gambar II.121	Perkembangan Jumlah Kasus Kriminal dan Persentase Penyelesaiannya di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021	II-195

Gambar II.122	Persentase Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan, 2020	II-196
Gambar II.123	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Papua Barat 2017-2022.....	II-199
Gambar II.124	Capaian SPM Per Bidang Provinsi Papua Barat 2020	II-208
Gambar III.1	Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-6
Gambar III.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-8
Gambar III.3	Komposisi Belanja Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-11
Gambar III.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021	III-12
Gambar III.5	Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat.....	III-27
Gambar III.6	Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Provinsi Papua Barat 2017-2021.....	III-28
Gambar IV.1	Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-51
Gambar IV.2	Kesesuaian Indikator SDGs dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022.....	IV-51
Gambar IV.3	Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan Wilayah Papua dalam RPJMN 2020-2024	IV-54
Gambar IV.4	Perbandingan Skema Dana Otonomi Khusus: Sebelum dan Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus ...	IV-58
Gambar IV.5	Visi, Misi dan Dimensi Pembangunan dalam RIPP dan RAPP	IV-60
Gambar IV.6	Isu Strategis Pembangunan dan Isu Strategis lintas Sektor (Cross Cutting) Papua Barat 2023-2026.....	IV-61
Gambar V.1	Tahapan Agenda Pembangunan Jangka Panjang dalam RPJPD Papua Barat 2012-2025.....	V-1
Gambar V.2	Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024	V-4
Gambar VI.1	Tema Pembangunan Daerah Papua Barat Tahun 2023-2026....	VI-6
Gambar VI.2	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah di Papua Barat.....	VI-20





BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maksud dan tujuan penyusunan RPD hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah Papua Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah Papua Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan pula di Provinsi Papua Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Hingga tahun 2022 Provinsi Papua Barat telah 22 tahun sebagai wilayah otonom baru berdasarkan pemekaran wilayah Propinsi Irian Jaya Barat pada saat itu.

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Barat telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat baik dalam peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sampai dengan



kepemimpinan periode 2017-2022 telah berhasil mengimplementasikan dan mewujudkan Visi “Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat” melalui RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. Dapat dilihat dari perkembangan Indikator makro pembangunan daerah Papua Barat yang mengalami laju pertumbuhan signifikan. Sehingga momentum pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan selama 5 tahun ini harus tetap terjaga dan berkelanjutan.

Sementara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat akan mengikuti Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah melaksanakan pemilukada serentak secara Nasional di tahun 2024. Maka hal ini berimplikasi pada Provinsi Papua Barat tidak memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, yang mana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih akan menjadi dasar penyusunan RPJMD sehingga akan terjadi kekosongan dokumen RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2023 s.d. 2026. Untuk itu diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 yang akan digunakan Pj Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di Tahun 2022.

Perkembangan penting lainnya adalah adanya penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya melalui UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menetapkan Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi baru dengan enam kabupaten di dalamnya. Provinsi Papua Barat Daya semula adalah bagian dari Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, maka wilayah Papua Barat menjadi berkurang 6 kabupaten sehingga perlu ada penyesuaian dalam cakupan analisis dan target-target pembangunan sesuai dengan perkembangan wilayah.

Dalam penyusunan RPD, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-





Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain itu, proses penyusunan RPD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - a. **Pendekatan Holistik-Tematik:** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. **Pendekatan Integratif:** dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. **Pendekatan Spasial:** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022 perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Proses serta tahapan penyusunan RPD Papua Barat 2023-2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana ditampilkan dalam Gambar I.1.

1. **Persiapan penyusunan RPD**, yang meliputi :



- a. pembentukan tim penyusun RPD;
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD;
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
2. **Penyusunan rancangan RPD**, dengan memperhatikan :
- a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
 - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025
 - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022
3. **Konsultasi Publik**, dalam rangka : menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, termasuk DPRD
4. **Penyusunan rumusan Rancangan Akhir RPD**, yang meliputi :
- a. Penyempurnaan Rancangan Menjadi Rancangan Akhir
 - b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - c. Fasilitasi Ranperkada tentang RPD;
 - d. Konsultasi rancangan akhir RPD ke Gubernur.
5. **Penetapan RPD**, meliputi :
- a. Penyempurnaan rancangan akhir RPD sesuai hasil konsultasi;
 - b. Penetapan RPD;
 - c. Penyampaian RPD kepada DPRD;
 - d. Verifikasi dan Penetapan Renstra.

Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RPD Papua Barat Tahun 2024-2026



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- 
- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6831);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



- 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

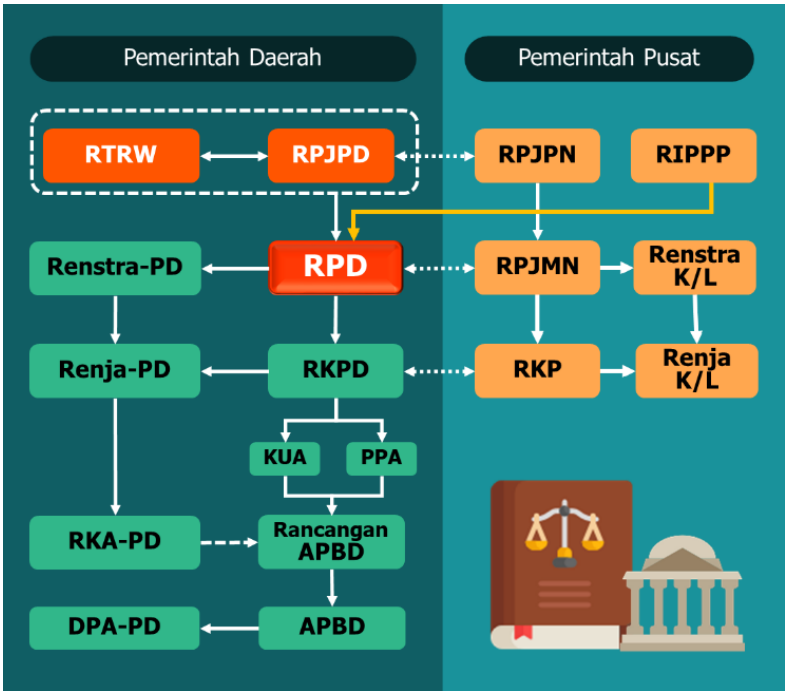


- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 2016 No 91).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya disajikan dalam Gambar I.2.

Gambar I.2 Alur Keterhubungan Antar Dokumen



1.3.1 Keterhubungan RPD dan RPJPD Papua Barat 2012-2025

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPD Papua Barat 2023-2026 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat. Amanat agenda pembangunan tahap ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025, adalah mewujudkan Provinsi Papua Barat sejahtera berdasarkan perekonomian wilayah, serta perwujudan masyarakat Papua Barat yang sejahtera secara ekonomi dan sosial. Berikut ini adalah pentahapan agenda pembangunan daerah Provinsi Papua Barat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat pada 2006-2025 dalam Gambar I.3.

Gambar I.3 Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selama Periode 2006-2025



Sumber: Perda No 18 Tahun 2012 tentang RPJPD Papua Barat 2012-2025

1.3.2 Keterhubungan RPD dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 memperhatikan tema pembangunan dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tema pembangunan yang dikemukakan dalam RPJMN Tahun 2020-2026 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dengan agenda utama pembangunan, yaitu:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,





memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

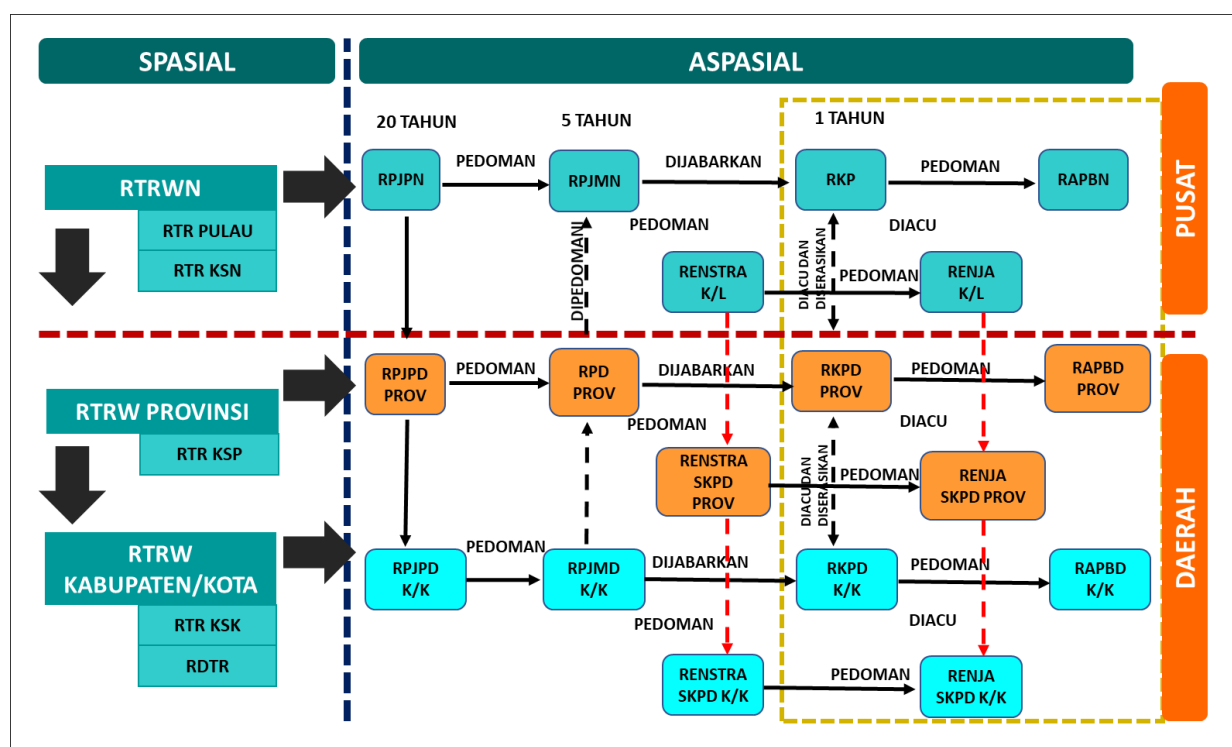
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
 - 3) Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

1.3.3 Keterhubungan RPD Papua Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat 2013-2033

Penyusunan RPD Papua Barat 2023-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan

dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi penting dilakukan karena pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam periode pembangunan tahun 2023-2026 kebijakan umum pembangunan hijau berkelanjutan diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua Barat, terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar I.4 Alur Keterhubungan Dokumen RPD Papua Barat 2023-2026 dan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033



Sumber: Kemendagri, 2017

1.3.5 Keterhubungan RPD dengan Renstra OPD

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat.

Gambar I.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPD Papua Barat 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

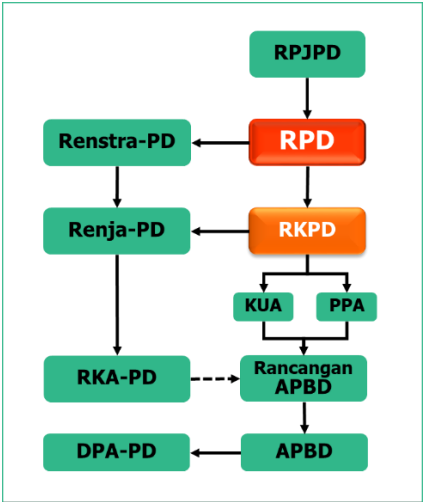


Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.6 Keterhubungan RPD dengan RKPD

Pelaksanaan RPD Provinsi Papua Barat setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar I.6 Keterhubungan RPD dan RKPD





1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPD Papua Barat 2023-2026 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat 4 (empat) tahun ke depan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPD Papua Barat 2023-2026, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat 2017-2022.
2. Menelaah kinerja keuangan tahun 2017-2022 dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk tahun 2023-2026.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2016-2021.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Provinsi Papua Barat.
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026.
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah.
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pembangunan Provinsi Papua Barat beserta target untuk tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat disusun dalam 9 bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maksud dan tujuan penyusunan RPD hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar penentuan target pembangunan RPD Papua Barat 2023-2026. Selain itu, bab ini memuat evaluasi capaian RPJMD Papua Barat





2017-2022, evaluasi capaian penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM); serta evaluasi capaian SDG's.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah.

Bab ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan provinsi Papua Barat berdasarkan kelompok urusan, isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu sektoral lainnya dalam pembangunan Papua Barat.

Bab V. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 yang didasarkan pada isu strategis pembangunan Papua Barat, agenda RPJPD Papua Barat, draft RTRW Papua Barat, RPJMN dan draft RIPPP.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua Barat 2013-2026 sesuai dengan permasalahan dan dinamika isu strategis pembangunan yang berkembang.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

Bab ini mengemukakan gambaran distribusi penggunaan kapasitas fiskal daerah ke dalam berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kerangka urusan bidang kewenangan yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab ini mengemukakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu hierarki tujuan, sasaran dan program yang berwujud kedalam indikator kinerja outcome jangka menengah dari masing masing program dalam RPD Papua Barat 2023-2026.

Bab IX Penutup.

Bab ini menjelaskan kaidah implementasi dan pedoman transisi RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar penentuan target pembangunan RPD Papua Barat 2023-2026

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Papua Barat terletak di antara 0,71°-4,33° Lintang Selatan dan 131,58°-135,09° Bujur Timur. Secara administratif Provinsi Papua Barat berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Samudera Pasifik;
- b. sebelah selatan : Laut Banda;
- c. sebelah timur : Teluk Cendrawasih dan Provinsi Papua Tengah;
- d. sebelah barat : Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku.

Pada awal pembentukannya (4 Oktober 1999), Provinsi Papua Barat terdiri atas 13 kabupaten/kota. Namun pasca pemekaran Provinsi Papua Barat Daya pada 8 Desember 2022, Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, yaitu: Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak (lihat Tabel II.1 dan Gambar II.1).

Tabel II.1 Luas Wilayah Daratan Papua Barat

No	Kabupaten	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
1	Fakfak	9.736,55	16,15
2	Kaimana	17.849,22	29,61
3	Teluk Wondama	4.847,34	8,04
4	Teluk Bintuni	19.943,29	33,09
5	Manokwari	2.763,02	4,58
6	Manokwari Selatan	1.837,10	3,05
7	Pegunungan Arfak	3.298,81	5,47
Provinsi Papua Barat		60.275,33	100,00

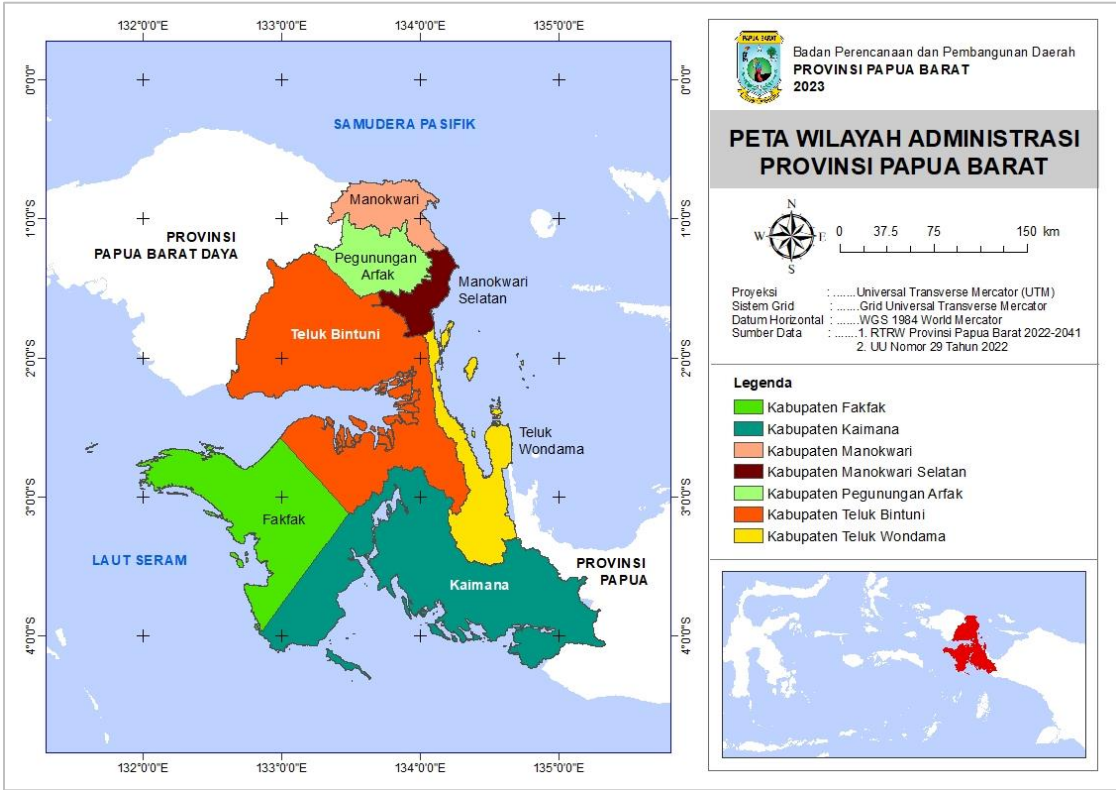
Sumber: BPS Papua Barat, dalam “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023”

Dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan terdapat 86 distrik yang terdiri dari 969 kampung/kelurahan. Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas (19.943,29 km² atau 33,09% dari luas wilayah provinsi), serta memiliki jumlah distrik terbanyak yaitu 24 distrik dengan 262



kampung/kelurahan. Adapun Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten dengan luas terkecil (1.837,10 km² atau 3,05% dari luas wilayah provinsi), dengan 6 distrik dan 57 kampung. Rincian jumlah distrik, kampung dan kelurahan di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Tabel II.2.

Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat, 2022

No	Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)	Ibu Kota Kabupaten	Distrik	Kampung/ Kelurahan
1	Fakfak	295	Fakfak	17	149
2	Kaimana	303	Kaimana	7	86
3	Teluk Wondama	218	Rasiey	13	76
4	Teluk Bintuni	128	Bintuni	24	262
5	Manokwari	3	Manokwari	9	173
6	Manokwari Selatan	67	Ransiki	6	57
7	Pegunungan Arfak	47	Ullong	10	166
Papua Barat				86	969

Sumber: BPS Papua Barat, dalam “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023”

Secara umum, kondisi wilayah Provinsi Papua Barat meliputi wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan), pesisir dan kepulauan. Wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan) di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, sedangkan wilayah yang memiliki kawasan pesisir adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Manokwari (lihat Tabel II.3).

Tabel II.3 Jumlah Kampung Menurut Letak Geografis, 2021

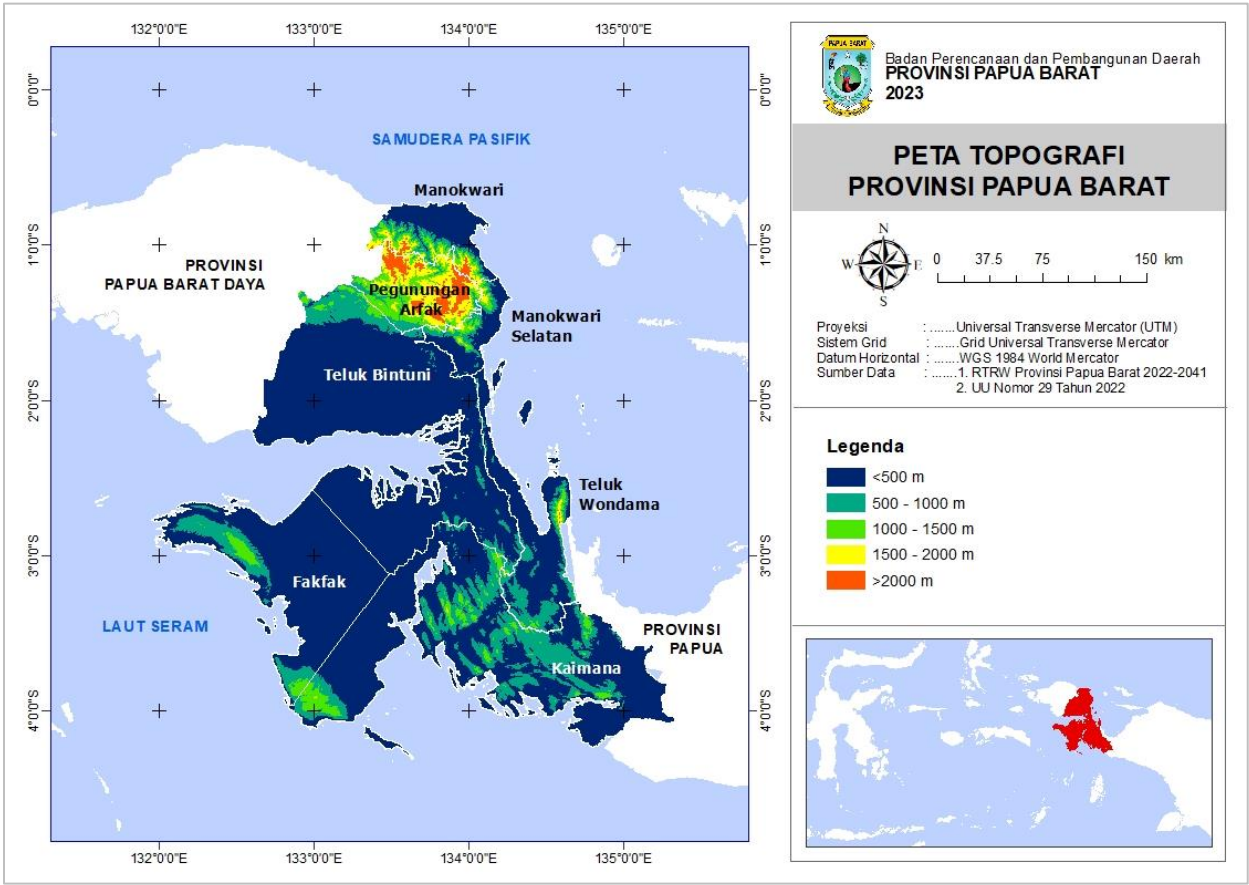
No	Kabupaten	Letak Geografis Kampung	
		Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
1	Fakfak	98	51
2	Kaimana	58	28
3	Teluk Wondama	62	14
4	Teluk Bintuni	35	227
5	Manokwari	58	115
6	Manokwari Selatan	17	40
7	Pegunungan Arfak	0	166
Papua Barat		328	641

Sumber: BPS Papua Barat, dalam “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023”

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, dari wilayah dataran rendah hingga pegunungan. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah perbukitan (kelas ketinggian 100-1.000 m). Berdasarkan Tabel II.4 dan Gambar II.2 diketahui bahwa wilayah tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ketinggian 135-2882 mdpl. Wilayah dengan dataran rendah yang cukup luas tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni.

Gambar II.2 Peta Topografi Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023



Daerah perbukitan pada umumnya tersebar di Kabupaten Kaimana, dan Teluk Wondama. Sedangkan Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, merupakan kawasan yang didominasi oleh pegunungan. Secara rinci, ketinggian masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Tabel II.4.

Tabel II.4 Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	Ketinggian (mdpl)
1	Fakfak	0 - 1.444
2	Kaimana	0 - 1.663
3	Teluk Wondama	0 - 2.172
4	Teluk Bintuni	0 - 2.389
5	Manokwari	0 - 2.940
6	Manokwari Selatan	0 - 2.682
7	Pegunungan Arfak	135 - 2.882

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

Berdasarkan kondisi topografi kampung, sebagian kampung di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 berada di wilayah lereng/puncak dengan jumlah sebanyak 685 kampung. Sementara itu, jumlah kampung yang berada pada wilayah lembah adalah sebanyak 29 kampung, sedangkan kampung yang berada di dataran berjumlah 255 kampung (lihat Tabel II.5).

Tabel II.5 Banyaknya Kampung Menurut Kondisi Topografi, 2021

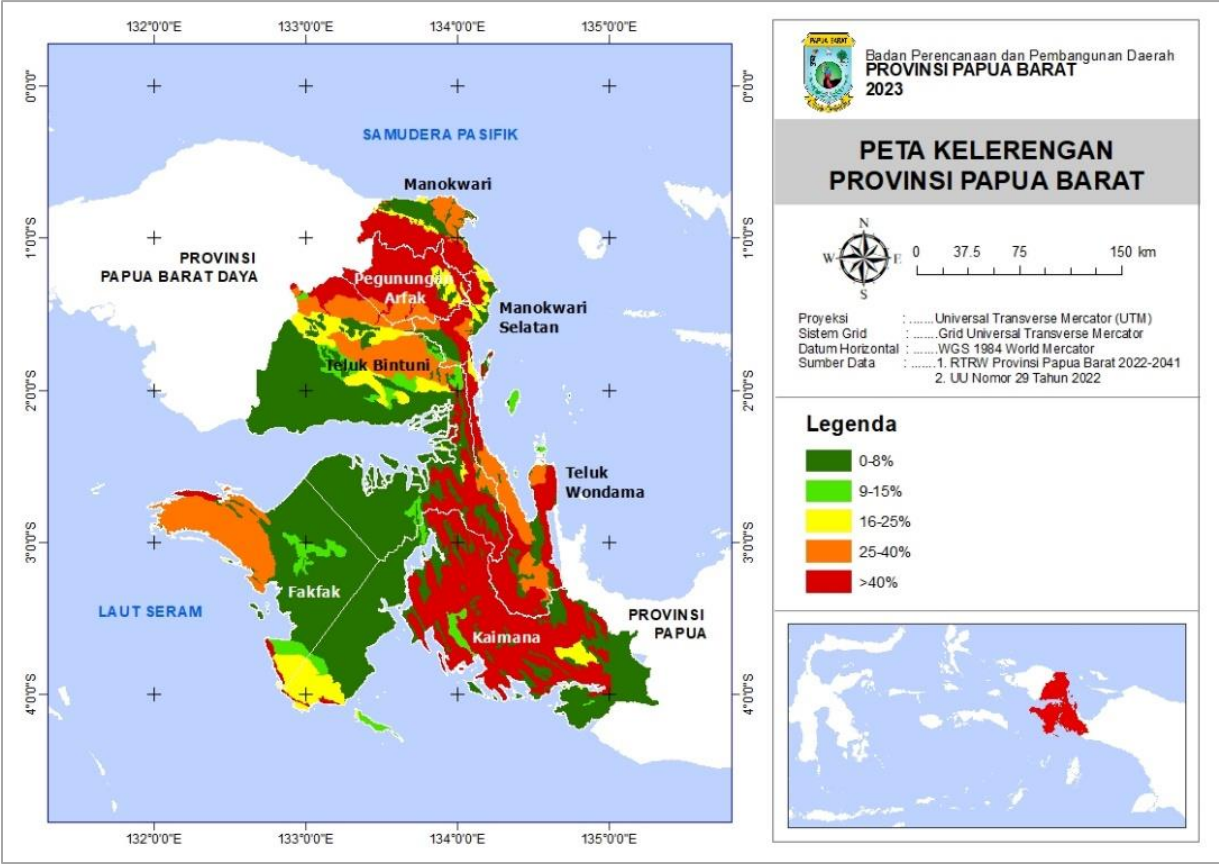
No	Kabupaten	Kondisi Topografi		
		Lereng/Puncak	Lembah	Dataran
1	Fakfak	135	5	9
2	Kaimana	80	0	6
3	Teluk Wondama	2	0	74
4	Teluk Bintuni	138	19	105
5	Manokwari	145	1	27
6	Manokwari Selatan	38	1	18
7	Pegunungan Arfak	147	3	16
Papua Barat		685	29	255

Sumber: BPS Papua Barat, dalam “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023”

Ditinjau dari segi kelerengan (lihat Gambar II.3), sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan bergunung sangat curam). Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi di samping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor.



Gambar II.3 Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat

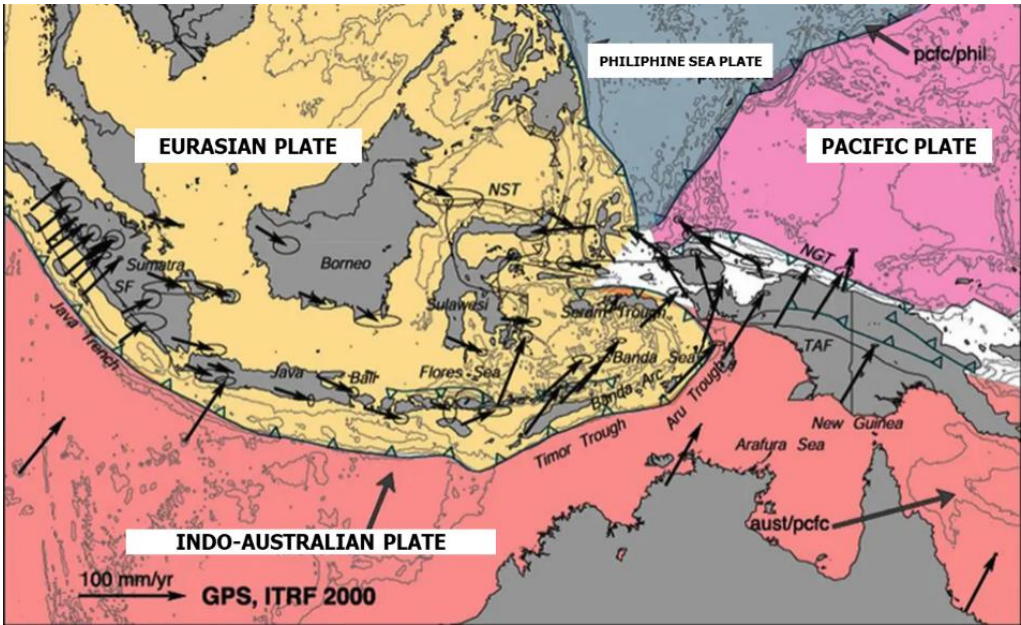


Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Papua Barat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kondisi geologi umum yang dijumpai di Indonesia bagian timur. Daerah ini merupakan daerah interaksi antara **dua lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik** (lihat Gambar II.4).

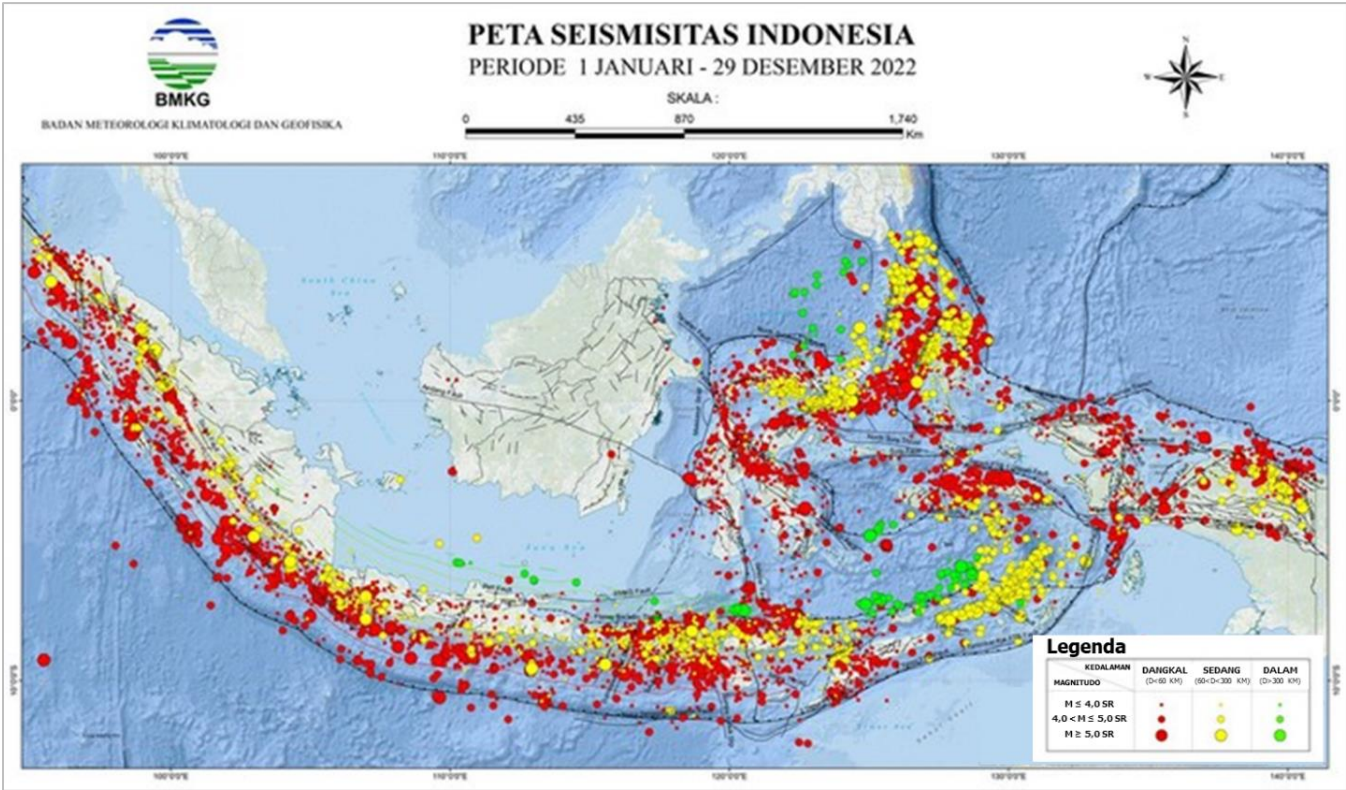
Gambar II.4 Peta Tektonik Indonesia



Sumber: BMKG, 2018 (website: www.bmkg.go.id, diakses pada 12 Maret 2023)

Daratan Papua New Guinea dan Pegunungan Central Range, secara umum diasumsikan sebagai lokasi tipe dari busur kepulauan oseanik aktif–tumbukan kontinen (Dewey dan Bird, 1970). Wilayah Provinsi Papua Barat sangat berpotensi terhadap gempa tektonik dan kemungkinan diikuti oleh gelombang tsunami. Terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik (lihat Gambar II.5).

Gambar II.5 Peta Seismisitas Indonesia (1 Januari – 29 Desember 2022)

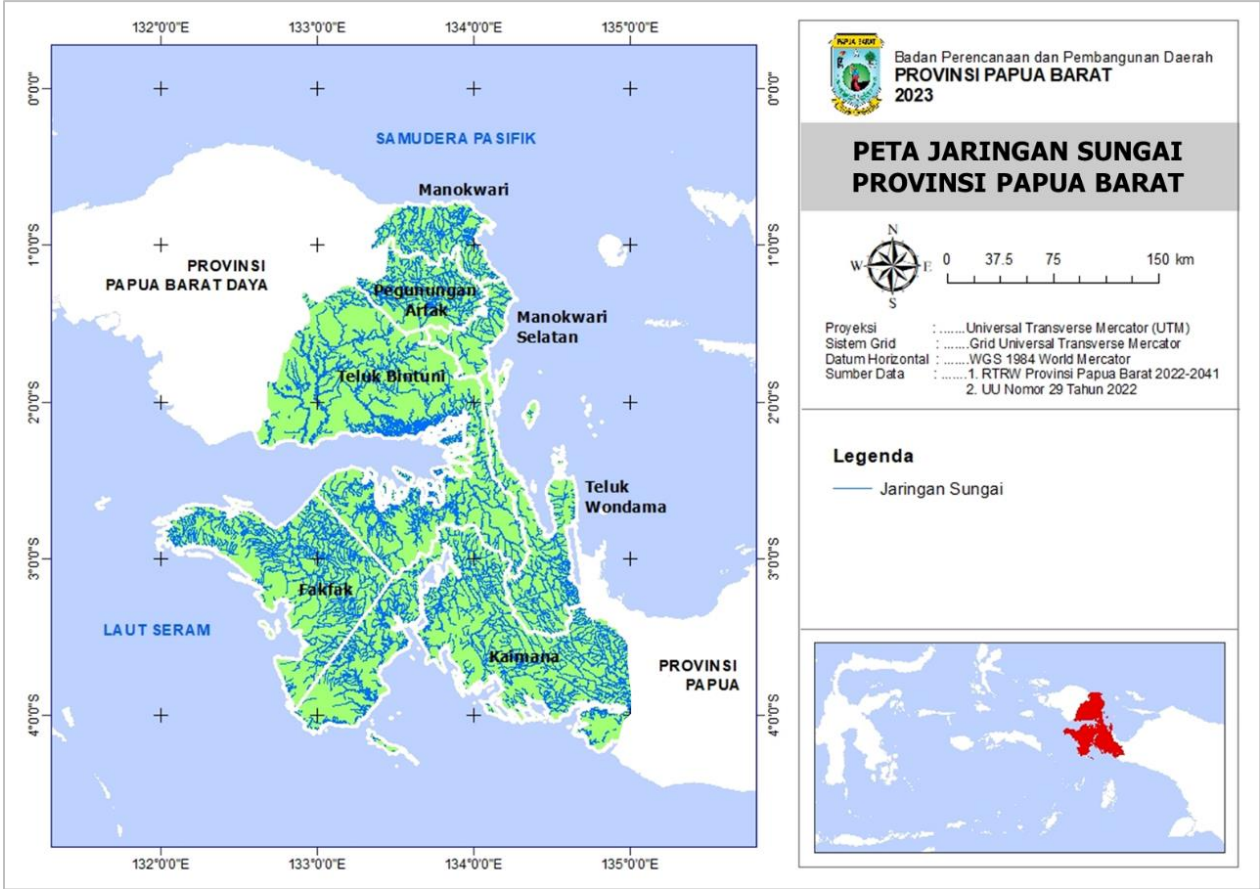


Sumber: BMKG, 2022

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

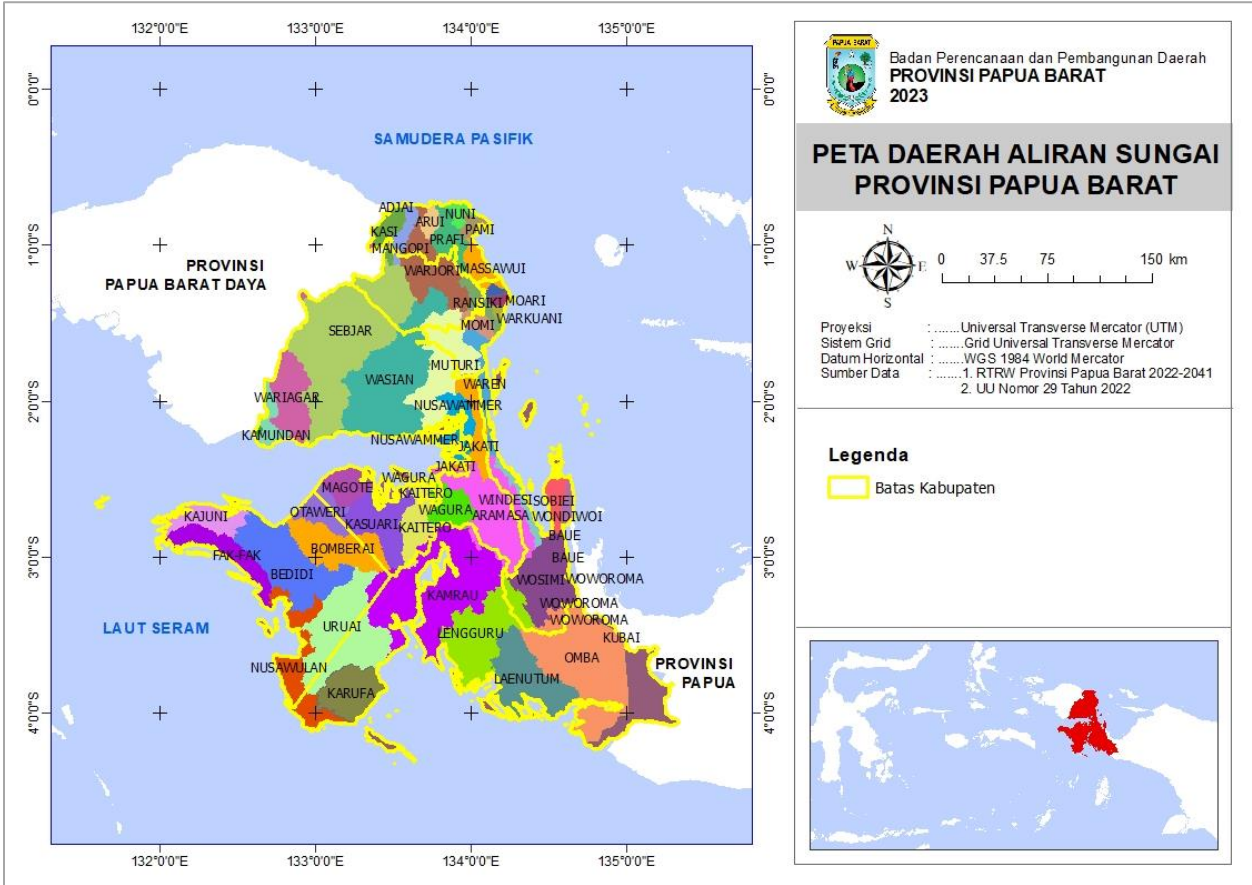
Provinsi Papua Barat memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Provinsi Papua Barat relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Provinsi Papua Barat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumber daya air sangat urgen sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik.

Gambar II.6 Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Gambar II.7 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023



Wilayah Provinsi Papua Barat dilewati beberapa sungai besar yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Secara garis besar, daerah tangkapan sungai (*catchment area*) di Provinsi Papua Barat terdiri atas 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu: (1) SWS Kamundan–Sebyar dengan luas wilayah yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni; serta (2) SWS Omba yang meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Tabel II.6 Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat

No	DAS	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
1	Adi	155,18	Kaimana	Omba
2	Andai	n.a	Manokwari	Kamundan – Sebyar
3	Angrameos	21,43	Teluk Wondama	Omba
5	Armasa	2.756,20	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Kamundan - Sebyar
6	Arui	232,35	Manokwari	Kamundan - Sebyar
10	Baue	173,75	Teluk Wondama	Omba
11	Bedidi	2.569,20	Fakfak	Omba
13	Bomberai	1.668,32	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba
15	Dramai	71,53	Kaimana	Omba
16	Fakfak	1.173,83	Fakfak	Omba
20	Jakati	893,53	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
22	Kabuai	0,03	Teluk Wondama	Omba
25	Kaitero	944,79	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba, Kamundan - Sebyar
26	Kajuni	932,70	Fakfak	Omba
27	Kamrau	5.021,88	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
28	Kamundan	n.a	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
30	Karas	46,76	Fakfak	Omba
31	Karawatu	1,31	Kaimana	Omba
32	Karufa	1.328,42	Kaimana	Omba
33	Kasi	n.a	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
34	Kasuari	1.662,54	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
37	Kayumerah	24,28	Kaimana	Omba
42	Kuwoni	0,02	Teluk Wondama	Omba
44	Laenutum	2.054,42	Kaimana	Omba
45	Lengguru	2.515,37	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba
46	Magote	713,25	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
49	Mangoapi	373,61	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
50	Maniai	17,36	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
54	Maransabadi	5,19	Teluk Wondama	Omba
57	Mioswaar	109,40	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
59	Moari	125,49	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
60	Momi	316,26	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
61	Muturi	2167,77	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
62	Namatote	38,84	Kaimana	Omba
63	Nuni	230,62	Manokwari	Kamundan - Sebyar
64	Nusawammer	827,60	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
65	Nusawulan	1.618,25	Kaimana, Fakfak	Omba
66	Ogar	18,22	Fakfak	Omba
67	Omba	4.238,39	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
68	Otaweri	794,38	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
70	Pami	216,47	Manokwari	Kamundan - Sebyar
71	Panjang	12,42	Fakfak	Omba
72	Prafi	675,58	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
73	Ransiki	427,70	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
74	Roon	54,79	Teluk Wondama	Omba



No	DAS	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
75	Rorebo	0,04	Teluk Wondama	Omba
76	Rouw	0,94	Teluk Wondama	Omba
77	Rumberpon	100,37	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
79	Salakula	12,73	Kaimana	Omba
82	Sebyar	n.a	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
85	Sianiri Kecil	3,81	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
87	Sobie	481,21	Teluk Wondama	Omba
90	Urat	5,39	Fakfak	Omba
91	Uruai	3.080,84	Kaimana, Fakfak	Omba
92	Wagura	814,34	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
96	Warbiadi	93,44	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
97	Waren	608,86	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
98	Wariagar	n.a	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
100	Warjori	1.634,55	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Manokwari	Kamundan - Sebyar
101	Warkuani	69,46	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
104	Wasian	3.922,79	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
105	Wassawui	499,50	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
110	Winesi	385,51	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
111	Wondiboy	247,03	Teluk Wondama	Omba
112	Wosimi	1.887,61	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
114	Woworoma	65,43	Teluk Wondama, Kaimana	Omba

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Danau lain yang termasuk dalam kategori luas di Kabupaten Kaimana adalah Danau Laamora (2.445,14 Ha), Danau Kamakawulo (2.320,42 Ha), Danau Daiwasu (2.196,77 Ha), dan Danau Manami (919,75 Ha). Danau lain yang berukuran di atas 1.000 Ha di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah Danau Angga Gigi (2.124,87 Ha) dan Danau Angga Gita (2.237,23 Ha) di Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Danau Tanemot di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu seluas 1.723,61 Ha. Luas dan penyebaran danau di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel II.7.

Tabel II.7 Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat

No	Danau	Luas (ha)	Kabupaten	No	Danau	Luas (ha)	Kabupaten
1	Wasidori	14,39	Manokwari	10	Kinumisumar	2,80	Fakfak
2	Kabori	25,84	Manokwari	11	Oyas	1,15	Fakfak
3	Anggi Gigi	2.124,87	Pegunungan Arfak	12	Kuniki	3,52	Fakfak
4	Anggi Gita	2.237,23	Pegunungan Arfak	13	Daiwasu	2.196,77	Kaimana
5	Makiri	661,62	Teluk Bintuni	14	Laamora	2.445,14	Kaimana
6	Tanemot	1.723,61	Teluk Bintuni	15	Kamakawulo	2.320,42	Kaimana
7	Tawajo	11,14	Teluk Bintuni	16	Jamur	3.533,34	Kaimana
8	Ayot	42,35	Teluk Bintuni	17	Manami	919,75	Kaimana
9	Ambuar	37,25	Teluk Wondama				

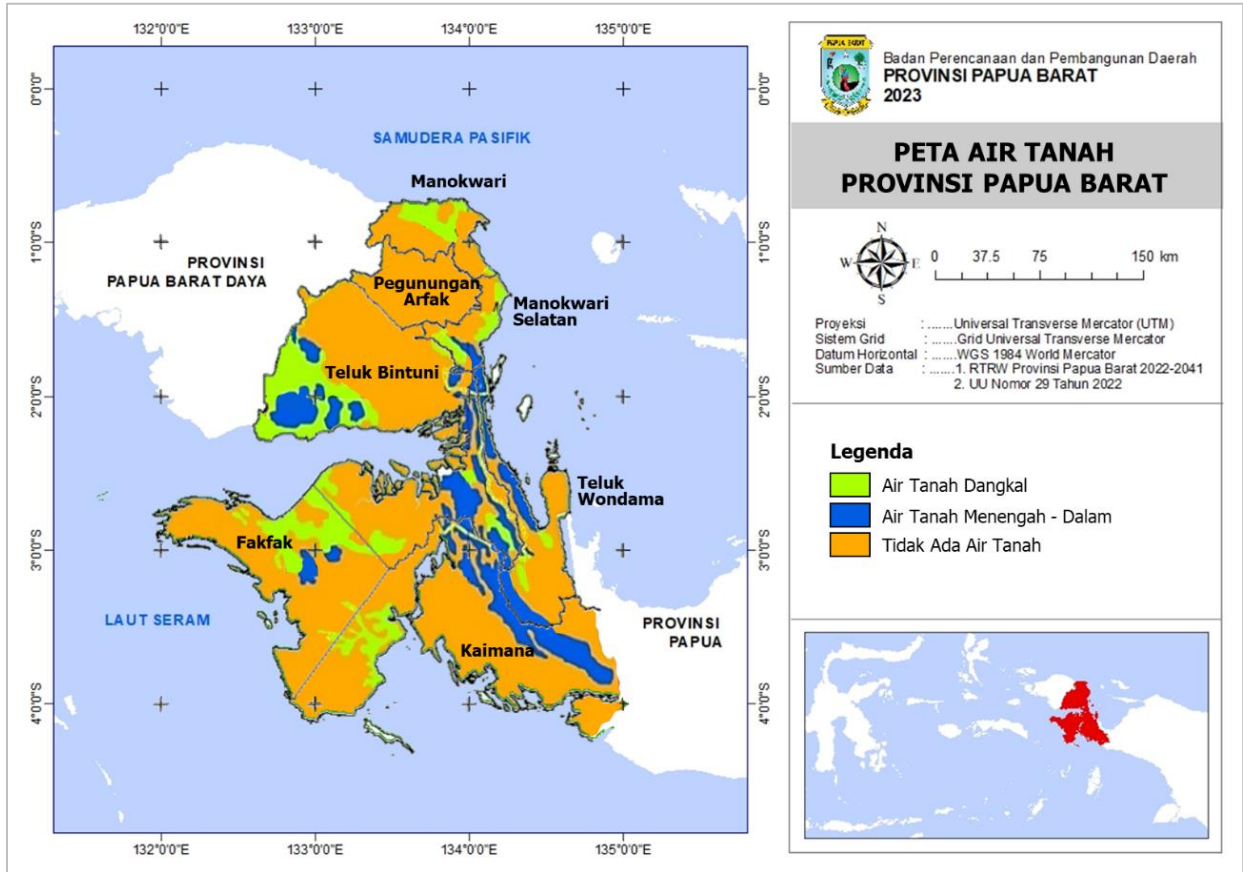
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Selain potensi air permukaan yang berada di sungai dan danau, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi air tanah yang cukup tinggi. Air tanah mengandung dua pengertian. Pertama, air tanah yang terkandung dalam tanah hingga batas kedalaman perakaran pada umumnya tanaman atau pada solum tanah dan disebut sebagai kandungan lengas tanah atau soil moisture. Kedua,



air tanah dibawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari yang tersebut di atas, dan disebut sebagai ground water atau air aquifer. Di Provinsi Papua Barat, potensi air tanah dangkal yang cukup signifikan terdapat di Kabupaten Sorong Selatan hingga mencapai 40%. Penyebaran lokasi air tanah di Provinsi Papua Barat disajikan pada Gambar II.8 dan Tabel II.8.

Gambar II.8 Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Tabel II.8 Luas Areal Air Tanah (Ground Water) di Papua Barat

No	Kabupaten	Luas (km ²)	Air Tanah Dangkal (km ²)	Air Tanah Menengah-Dalam (km ²)	Tanpa Air Tanah (km ²)
1	Fakfak	11.036,48	1.557,58	356,89	9.122,00
2	Kaimana	16.241,84	982,99	2.615,05	12.643,79
3	Teluk Wondama	3.959,53	111,44	729,28	3.118,81
4	Teluk Bintuni	20.840,83	4.088,51	3.709,02	13.043,30
5	Manokwari	4.452,76	788,55	0,00	3.664,21
6	Manokwari Selatan	2.812,44	611,79	564,31	1.636,34
7	Pegunungan Arfak	2.773,74	57,08	2,93	2.713,73

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

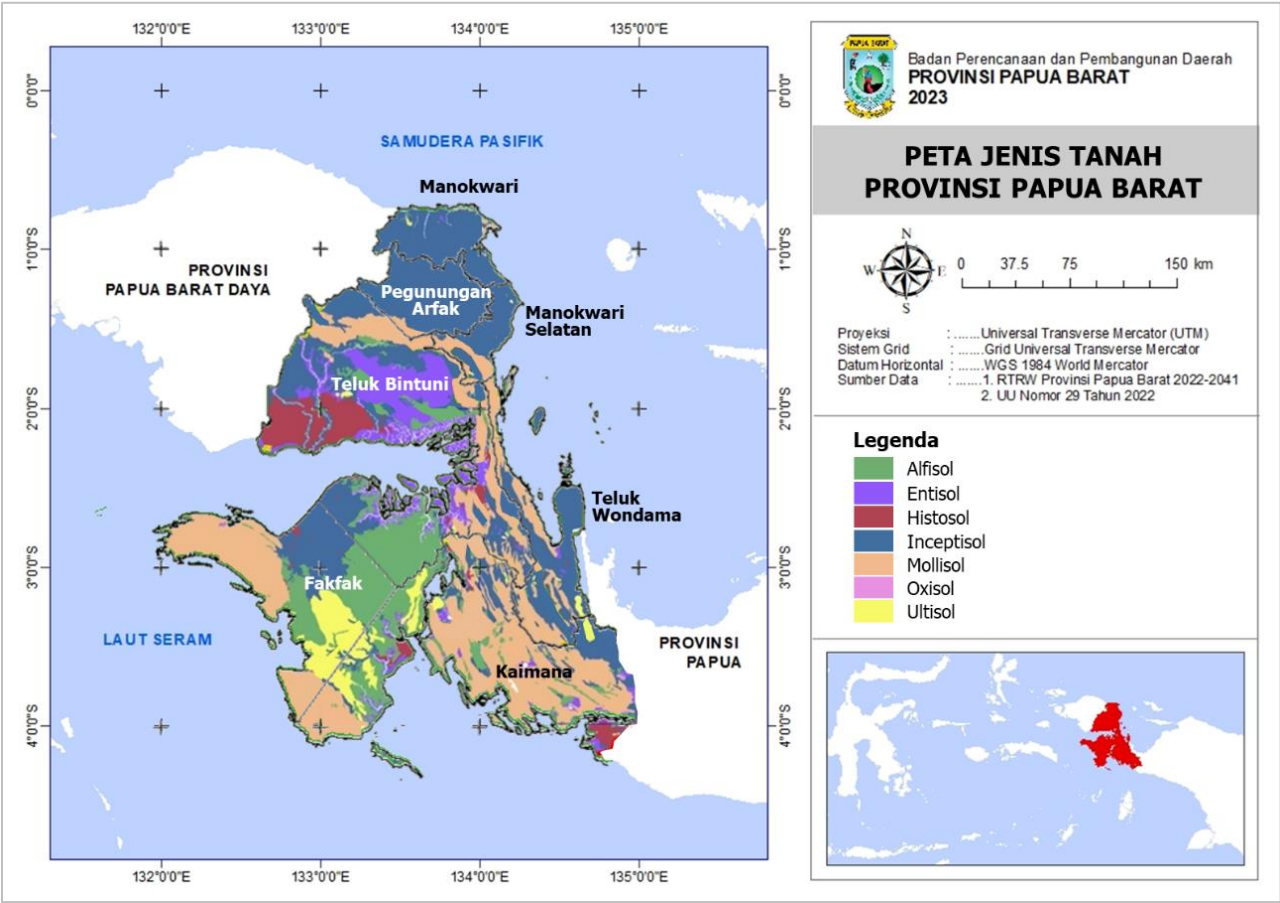
2.1.1.6 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat berdasarkan sistem taksonomi tanah USDA terdiri atas: Histosols, Entisols, Inceptisols, Alfisols, Mollisols, Ultisols, dan Oxisols. Dari ketujuh ordo tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat, luasan terbesar ditempati oleh Ordo Inceptisols dan Mollisols. Melihat kondisi demikian, Provinsi Papua Barat mempunyai potensi



yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian karena tanah dengan Ordo Inceptisols dan Mollisols merupakan jenis tanah yang subur. Adapun peta sebaran jenis tanah di wilayah Papua Barat dapat dilihat pada Gambar II.9.

Gambar II.9 Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

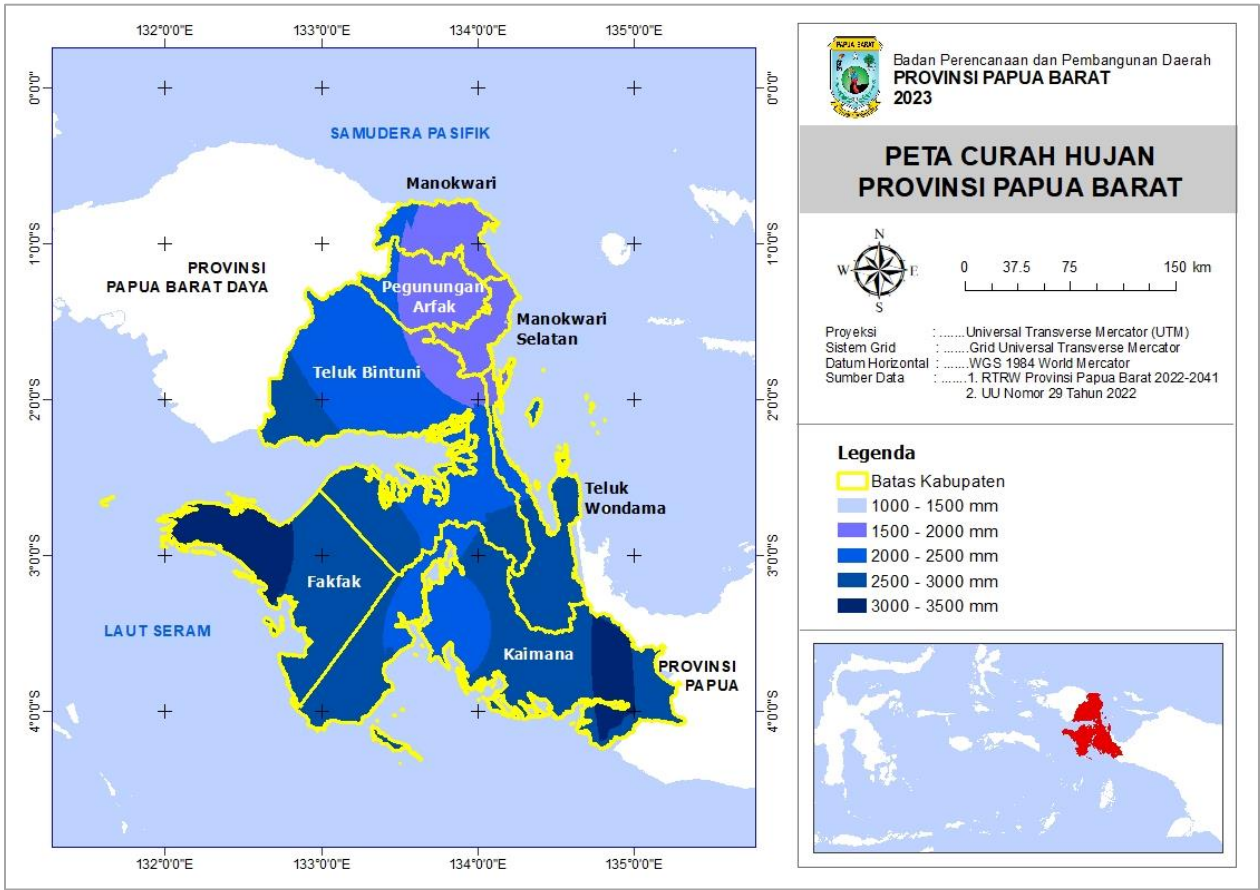
Provinsi Papua Barat terletak tepat di sebelah Selatan garis khatulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah tropika humida. Karena daerahnya yang bergunung-gunung, maka iklim di Provinsi Papua Barat sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Pola umum iklim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh topografinya yang kasar. Suhu sangat bergantung dari ketinggian, sedangkan ketinggian dan kejajaran barisan pegunungan mempengaruhi pola angin dan presipitasi dalam setiap daerah.

Suhu dan kelembaban merupakan komponen iklim paling konstan di Provinsi Papua Barat. Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua Barat tahun 2022 cenderung stabil yaitu berkisar antara 26,50-28,00°C. Selain itu, kelembaban udara pada tahun 2022 berkisar antara 81-85 persen. Kecepatan anginnya terbilang normal dengan kisaran mencapai 2-3 knot. Selanjutnya rata-rata hari hujan di Provinsi Papua Barat tahun 2022 berkisar antara 150- 250 hari,



dengan jumlah curah hujan yang cukup bervariasi sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar II.10.

Gambar II.10 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2023

Tabel II.9 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG di Provinsi Papua Barat, 2022

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Suhu			Kelembaban (%)			Jumlah Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum			
Fakfak	Stasiun Meteorologi Torea	20,80	26,50	33,40	49	85	100	4312	250	60
Kaimana	Stasiun Meteorologi Kaimana	22,50	28,00	34,70	53	84	99	3669	237	66
Teluk Wondama	Pos Hujan Wasior	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2891	238	n.a
Teluk Bintuni	Pos Hujan Tisai SPV	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2505	160	n.a
Manokwari	Stasiun Meteorologi Rendani	22,50	28,00	34,70	50	81	100	2085	199	55
Manokwari Selatan	Stasiun Klimatologi Papua Barat	19,80	27,80	33,00	50	84	100	1579	168	58
Pegunungan Arfak	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

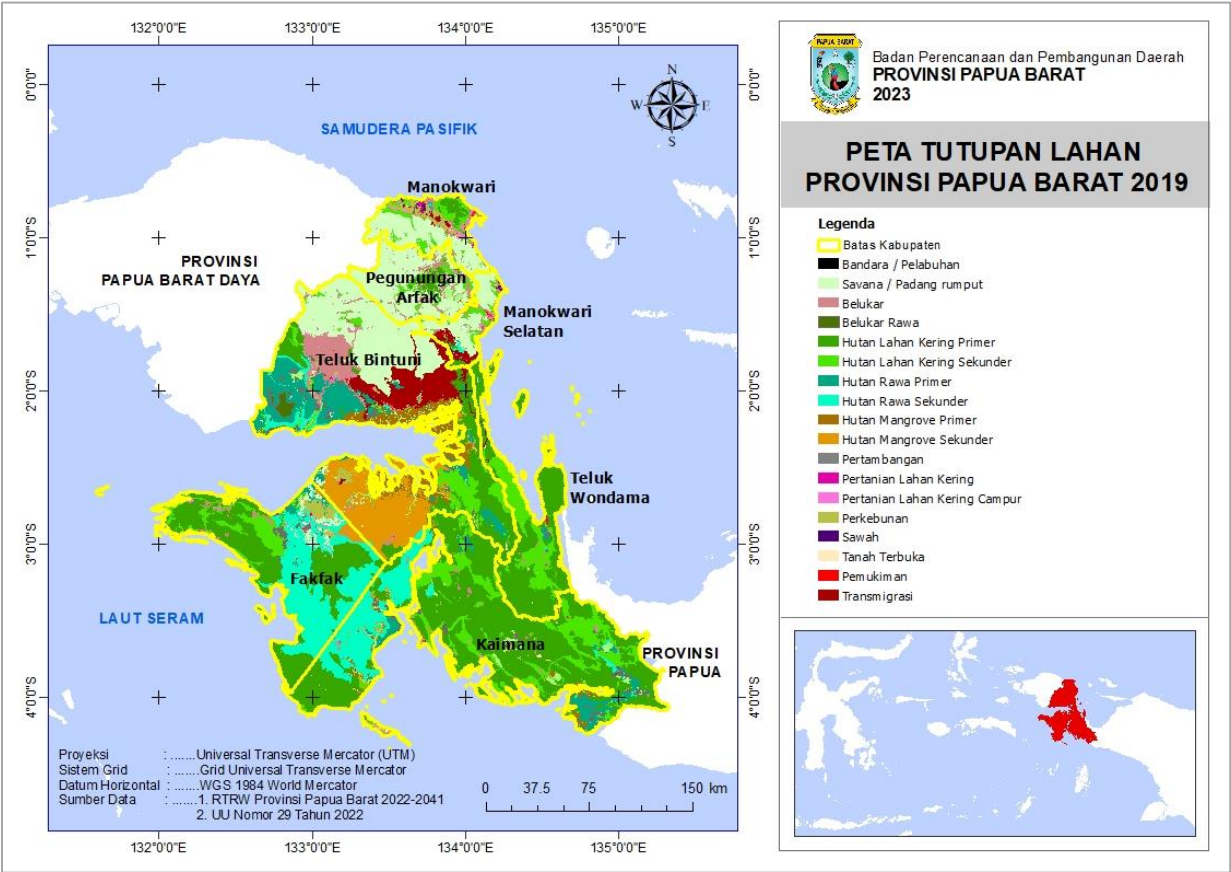
Sumber: BPS Papua Barat, 2023 (publikasi “Papua Barat Dalam Angka, 2023”)

Pada tingkat kabupaten, suhu udara maksimal tertinggi pada tahun 2022 berada di Kabupaten Manokwari dan Kaimana yaitu mencapai 34,70°C. Pada kondisi suhu udara minimum, suhu udara minimal terendah yang terdata di stasiun pengamatan BMKG pada tahun 2022 berada di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu 19,80 °C. Berdasarkan penyinaran matahari, pada tahun 2022 durasi penyinaran tertinggi berada di Kabupaten Kaimana (66%), sedangkan durasi penyinaran matahari terendah berada di Kabupaten Manokwari (55%).

2.1.1.7 Tutupan Lahan

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas relief atau topografi, iklim, tanah dan air dan biotik seperti manusia, hewan dan tumbuhan yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Penggunaan lahan mempunyai makna berbeda dengan tutupan lahan karena berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tersebut.

Gambar II.11 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Webgis KLHK OpenSource (diakses pada 12 Maret 2023)

Berdasarkan Gambar II.11 diketahui bahwa sebagian besar lahan di Provinsi Papua Barat didominasi hutan. Jenis hutan dengan luasan tertinggi adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan basah primer. Gambar II.11



juga menunjukkan bahwa lahan terbangun di Provinsi Papua Barat masih relatif kecil. Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Manokwari merupakan wilayah yang memiliki fungsi guna lahan permukiman tertinggi dan telah tumbuh menjadi sentra kegiatan perkotaan, disamping berperan sebagai ibukota Papua Barat.

Pasca penetapan 6 kabupaten/kota (Kota Sorong, Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Tambrau dan Sorong Selatan) menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya pada 8 Desember 2022 (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022), maka kedepannya terdapat urgensi pembentukan pusat kegiatan ekonomi baru atau kawasan perkotaan baru di Provinsi Papua Barat karena beralihnya wilayah administrasi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong menjadi Papua Barat Daya. Kota Sorong selama ini memang telah tumbuh menjadi sentra-sentra kegiatan perkotaan dan pintu gerbang kegiatan jasa, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat perkotaan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan Provinsi Papua Barat ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumber daya mineral yang luar biasa. Pembangunan Provinsi Papua Barat harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial dan sektor-sektor unggulan secara optimal guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Provinsi Papua Barat yang masih tertinggal. Rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 dan mempertimbangkan cakupan wilayah Papua Barat pasca penetapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, maka struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat dibagi menjadi 3 SWP (Satuan Wilayah Pengembangan). Pembagian SWP nantinya juga diikuti dengan pengembangan pusat-pusat hierarki dan penyediaan jaringan infrastruktur terutama transportasi. Dengan demikian akan tercipta keterkaitan antar SWP yang terintegratif di wilayah Papua Barat. Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan untuk Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:



SWP 1	Pengembangan fungsi administrasi pemerintahan, industri berskala kecil, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan kehutanan
	Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama

Satuan wilayah pembangunan 1 meliputi wilayah–wilayah Provinsi Papua Barat bagian utara, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Wondama. SWP ini memiliki areal laut yang berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kepulauan Biak Numfor (Provinsi Papua). Produksi perikanan tangkap di wilayah SWP 1 ini merupakan salah satu yang tertinggi, dengan budidaya laut yang potensial untuk dikembangkan (seperti teripang). Wilayah SWP 1 ini juga merupakan salah satu wilayah di Papua Barat yang kaya dengan kepemilikan sumber daya hutan yang melimpah.

Daerah SWP 1 telah memiliki beberapa jenis industri pengolahan. Dari segi unit usaha, jumlah industri yang ada di wilayah ini paling tinggi. Meski demikian, nilai produksi industri pengolahan ini masih di bawah Kota Sorong yang telah mekar menjadi bagian Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini karena jenis industri yang ada di wilayah SWP 1 ini cenderung berupa usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tabel II.10 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP I

KAWASAN	RENCANA PENGELOLAAN
Kawasan Pengembangan Tanaman Hortikultura Dataran Tinggi Anggi	1. Membuka akses pengembangan baik dari segi produksi, konsumsi dan distribusi; 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan tanaman hortikultura; 3. Mempersiapkan sumberdaya manusia pelaku usaha (petani) untuk pengembangan tanaman hortikultura; 4. Menciptakan daya dukung masyarakat terhadap penggunaan produk hortikultura daerah;
Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Wondama	1. Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan; 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari; 3. Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; 4. Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari;
Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi Kebar	1. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan; pengembangan peternakan sapi. 2. Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak;



KAWASAN	RENCANA PENGELOLAAN
	3. Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular; 4. Pemetaan potensi padang penggembalaan dan tanaman hijau pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

Di Kabupaten Manokwari juga telah berkembang kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan sangat potensial untuk terus dikembangkan. Komoditas unggulan antara lain padi, kedelai, jagung dan buah-buahan. Meskipun demikian, saat ini kebutuhan pangan khususnya beras yang diproduksi di Provinsi Papua Barat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harus diimpor dari luar daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi mutlak diperlukan dengan sasaran utama pencapaian swasembada.

Di dalam wilayah SWP 1 ini terdapat Kabupaten Manokwari yang ditetapkan sebagai ibukota bagi Provinsi Papua Barat sehingga pengembangan SWP 1 akan diarahkan juga pada fungsi administrasi pemerintahan. Selain itu dengan kecenderungan yang telah ada di wilayah ini, SWP 1 juga diarahkan untuk pengembangan industri berskala kecil, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan kehutanan.

SWP 2	Pengembangan fungsi industri, pertambangan dan penggalian, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan jasa
	Kabupaten Teluk Bintuni

Wilayah SWP 2 meliputi wilayah Provinsi Papua Barat bagian barat laut, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni. Kawasan Teluk Bintuni yang kaya akan berbagai potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, seperti hasil hutan, laut dan migas. Sektor kehutanan dan perkebunan di SWP 2 cukup menonjol dibandingkan dengan wilayah lain, misalnya dalam pengembangan komoditi kelapa dan coklat.

Dalam RTRWN, Kabupaten Teluk Bintuni dijadikan sebagai kawasan andalan pengembangan mangrove. Keberadaan ekosistem mangrove yang luas, masih relatif utuh dan harus dilindungi menyebabkan karakter ekosistem Teluk Bintuni rentan secara ekologis sekaligus penting baik dari aspek ekologi dan konservasi maupun ekonomi. Potensi ekonomi Teluk Bintuni telah diketahui sejak lama. Hutan Mangrove Bintuni telah mendukung keberadaan sejumlah industri dan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, antara lain dari



kayu chips dan sektor perikanan. Berbagai potensi tersebut kemudian menarik perhatian investor untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Investasi tersebut antara lain ditanamkan memanfaatkan minyak dan gas. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut telah menyebabkan berbagai tekanan lingkungan pada kawasan Teluk Bintuni. Dalam RTRWN Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan andalan, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Tabel II.11 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP II

KAWASAN	RENCANA PENGELOLAAN
Kawasan Pengembangan Minyak dan Gas Bintuni	1. Mendata potensi sumber minyak dan gas di sekitar wilayah kawasan; 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan;
Kawasan Andalan Teluk Bintuni	1. Pengembangan model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sesuai dengan karakteristik kawasan Teluk Bintuni (misalnya teknik silvo fishery); 2. Pengembangan prasarana dan sarana untuk kegiatan pertanian; 3. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan; 4. Pengembangan transportasi multimoda (darat dan laut); meningkatkan aksesibilitas wilayah; 5. Pengelolaan lingkungan hidup (Rehabilitasi mangrove, dsb) untuk mencegah menurunnya daya dukung lingkungan; 6. Pengembangan kapasitas aparat dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

Wilayah SWP 2 juga memiliki potensi tinggi pada kegiatan pertambangan. Di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kegiatan pertambangan besar yang dilakukan oleh LNG Tangguh sejak tahun 2009 dan telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Dengan adanya kegiatan pertambangan di wilayah ini, menjadikan pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mengangkut hasil tambang ke wilayah lain. Untuk itu wilayah SWP 2 akan dikembangkan untuk fungsi industri, pertambangan dan penggalian, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan jasa.

SWP 4	Pengembangan fungsi industri, perikanan tangkap dan kehutanan
	Kabupaten Fakfak dan Kaimana

Kawasan SWP 4 berada di daerah paling selatan dari Provinsi Papua Barat serta terdiri dari Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Kaimana. Wilayah SWP 4 berhadapan langsung dengan areal perairan Laut Arafura. Di wilayah ini juga



terdapat Teluk Triton yang memiliki bentang lahan laut khas dan merupakan daerah kelautan yang kaya. Potensi perikanan yang dimiliki wilayah ini pun tergolong tinggi. Produksi beberapa jenis komoditas ikan seperti kakap putih, tenggiri, dan udang windu yang berasal dari wilayah SWP 4 ini merupakan yang tertinggi di Papua Barat.

Di SWP 4 terdapat kawasan yang sejak lama diidentifikasi sebagai kawasan potensial untuk pertanian, perkebunan dan peternakan, yakni Bomberay. Dalam RTRWN, Bomberay (Fakfak) termasuk bagian Kawasan Andalan Fakfak dan sekitarnya. Untuk menunjang pengembangan kawasan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengusulkan pembangunan pelabuhan Kokas yang menjadi pelabuhan feeder bagi Pelabuhan utama di Kota Sorong. Sebagaimana wilayah lain di Papua Barat, wilayah SWP 4 ini juga sama seperti SWP 1, kaya akan hutan. Produksi dari kehutanan di wilayah relatif cukup tinggi. Dengan potensi kelautan dan kehutan yang tinggi dapat mendorong pada potensi tumbuhnya kegiatan industri di wilayah SWP 4 ini. Kegiatan industri akan menjadi *forward linkages* dari kegiatan perikanan dan kehutanan yang tumbuh di wilayah ini. Untuk itu maka pengembangan SWP 4 akan diarahkan pada fungsi industri, perikanan, tangkap, dan kehutanan.

Tabel II.12 Rencana Pengelolaan Kawasan di SWP IV

KAWASAN	RENCANA PENGELOLAAN
Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi Bomberai	1. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan pengembangan peternakan sapi; 2. Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak; 3. Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular; 4. Pemetaan potensi padang penggembalaan dan tanaman hijauan pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan;
Kawasan Pengembangan Agropolitan Fakfak	1. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta Membudidayakan komoditi unggulan yang menjadi rencana pengembangan agropolitan; 2. Pembangunan sarana dan prasarana agribisnis yang menunjang kawasan agropolitan; 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat; 4. Penguatan kelembagaan kelompok tani maupun koperasi; 5. Diversifikasi produk untuk menunjang pengolahan produk sehingga mampu menciptakan nilai tambah; 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekitar kawasan;
Kawasan Andalan Fakfak dan sekitarnya	1. Pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kawasan agropolitan (Pengembangan pelabuhan di Kokas, pengembangan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outlet, dsb); 2. Pengembangan sentra pertanian, peternakan, industri dan



KAWASAN	RENCANA PENGELOLAAN
	pertambangan; 3. Peningkatan akses pasar produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan; 4. Sebagai pusat pengembangan kegiatan budidaya perikanan; 5. Pusat pengembangan agrobisnis; 6. Pusat koleksi dan distribusi; 7. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/investor; 8. Pendampingan pertanian bagi masyarakat;
Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Kaimana	1. Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan; 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari; 3. Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; 4. Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari; 5. Membangun hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pihak luar untuk pengembangan potensi wisata bahari;

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020, Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi Kajian untuk mendapatkan nilai IRB dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing kabupaten. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana, dan komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara, komponen kapasitas adalah unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistic, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta kapasitas pemulihan.

Wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik dan Australia. Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari sesar-sesar normal, antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna sehingga wilayah Papua Barat rawan terhadap bencana gempa bumi. Secara spesifik, Tabel II.13 menunjukkan nilai indeks risiko bencana setiap kabupaten di Papua Barat.

Tabel II.13 Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Papua Barat

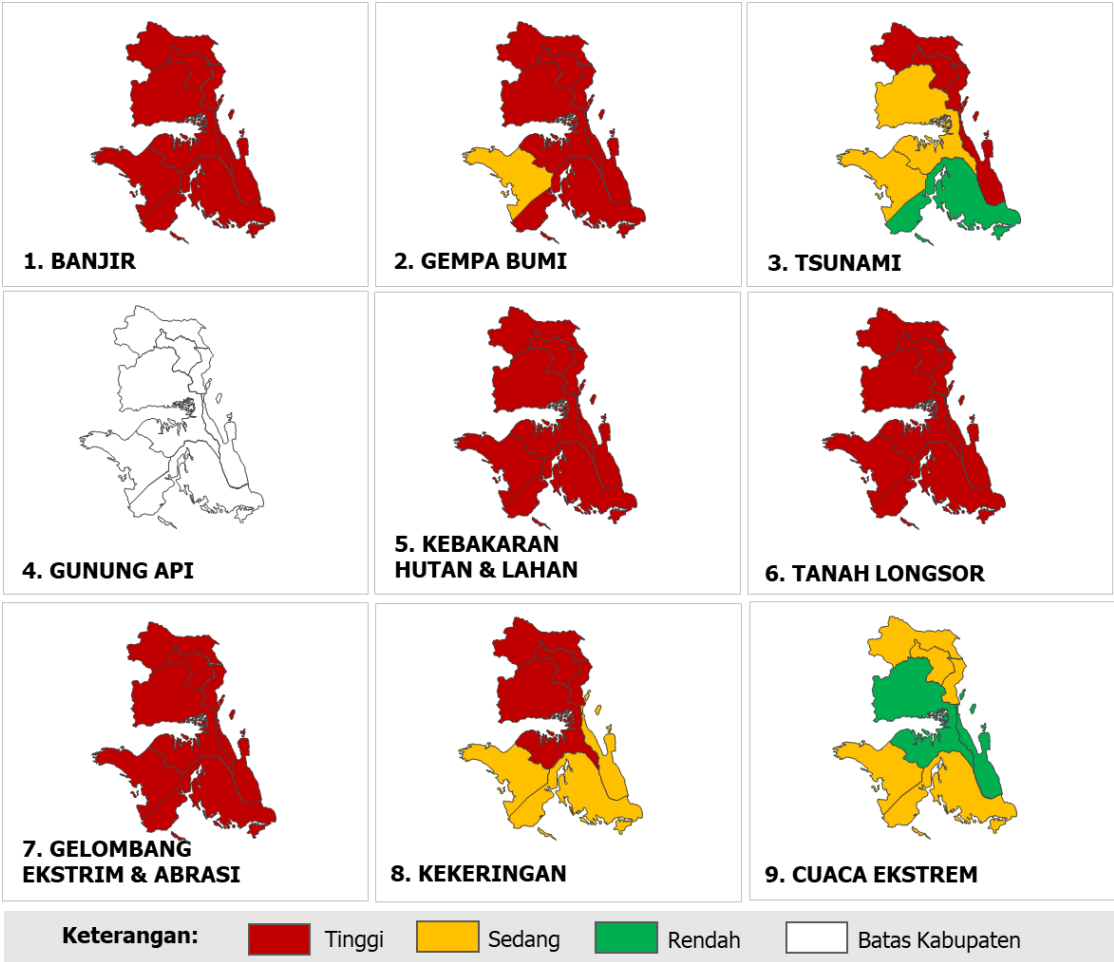
No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko
1	Teluk Bintuni	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	tinggi
2	Manokwari Selatan	153,05	125,45	152,06	152,06	152,06	160,35	tinggi

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko
3	Pegunungan Arfak	153,05	125,45	152,06	152,06	152,06	160,35	tinggi
4	Teluk Wondama	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	143,74	tinggi
5	Manokwari	153,05	144,77	146,96	146,96	146,96	146,96	tinggi
6	Kaimana	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	sedang
7	Fakfak	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021"

Berdasarkan Tabel II.13, dapat dilihat bahwa 5 kabupaten di Papua Barat diklasifikasikan sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sementara, 2 kabupaten lainnya diklasifikasikan sebagai daerah dengan risiko bencana sedang, yaitu Kabupaten Kaimana dan Fakfak. Tabel II.14 menyediakan data indeks risiko per ancaman di setiap kabupaten.

Gambar II.12 Peta Risiko Bencana Per Ancaman di Papua Barat, 2021



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia 2021 (diolah)"

Tabel II.14 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Berdasarkan Kab/Kota, 2021

No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Teluk Bintuni	166,80	Tinggi	Banjir	36,00	Tinggi
				Gempa bumi	21,60	Tinggi
				Tsunami	9,60	Sedang
				Kebakaran hutan dan lahan	24,00	Tinggi
				Tanah longsor	24,00	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24,00	Tinggi



No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
2	Manokwari Selatan	160,35	Tinggi	Kekeringan	24,00	Tinggi
				Cuaca ekstrim	n.a	n.a
				Banjir	21,60	Tinggi
				Gempa bumi	32,40	Tinggi
				Tsunami	20,40	Tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	32,40	Tinggi
				Tanah longsor	21,60	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36,00	Tinggi
				Kekeringan	20,40	Tinggi
3	Pegunungan Arfak	160,35	Tinggi	Cuaca ekstrim	6,80	Sedang
				Banjir	21,60	Tinggi
				Gempa bumi	32,40	Tinggi
				Tsunami	n.a	n.a
				Kebakaran hutan dan lahan	32,40	Tinggi
				Tanah longsor	21,6	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36,00	Tinggi
				Kekeringan	20,40	Tinggi
				Cuaca ekstrim	6,90	Sedang
4	Teluk Wondama	143,74	Tinggi	Banjir	28,76	Tinggi
				Gempa bumi	19,91	Tinggi
				Tsunami	17,91	Tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	15,48	Tinggi
				Tanah longsor	23,23	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	15,48	Tinggi
				Kekeringan	11,80	Tinggi
				Cuaca ekstrim	n.a	n.a
5	Manokwari	146,96	Tinggi	Banjir	16,04	Tinggi
				Gempa bumi	24,06	Tinggi
				Tsunami	24,00	Tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	26,73	Tinggi
				Tanah longsor	17,82	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	26,73	Tinggi
				Kekeringan	17,82	Tinggi
				Cuaca ekstrim	5,05	Rendah
6	Kaimana	122,00	Sedang	Banjir	36,00	Tinggi
				Gempa bumi	14,40	Tinggi
				Tsunami	4,80	Rendah
				Kebakaran hutan dan lahan	16,80	Tinggi
				Tanah longsor	16,80	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20,00	Tinggi
				Kekeringan	6,40	Sedang
				Cuaca ekstrim	6,80	Sedang
7	Fakfak	105,20	Sedang	Banjir	21,60	Tinggi
				Gempa bumi	7,20	Sedang
				Tsunami	9,60	Sedang
				Kebakaran hutan dan lahan	16,80	Tinggi
				Tanah longsor	16,80	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20,20	Tinggi
				Kekeringan	6,40	Sedang
				Cuaca ekstrim	6,80	Sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia 2021"

Berdasarkan Gambar II.12 dan Tabel II.14, dapat dilihat bahwa pada kasus bencana banjir, seluruh kabupaten di Papua Barat termasuk dalam kelas risiko tinggi. Wilayah yang memiliki risiko bencana banjir tertinggi adalah Teluk Bintuni dan Kaimana dengan skor IRB bencana banjir sebesar 36,00.

Wilayah Provinsi Papua Barat juga sangat berpotensi terhadap gempa bumi dan kemungkinan diikuti oleh tsunami. Di Provinsi Papua Barat, terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar Sorong (SFZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar



Lungguru (LFZ) dan Sesar Tarera-Aiduna (TAFZ). Kabupaten yang memiliki risiko tinggi dalam bencana gempa bumi dan tsunami adalah Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sementara, kabupaten dengan risiko tinggi dalam bencana gempa bumi namun memiliki risiko sedang atau rendah dalam bencana tsunami adalah Teluk Bintuni dan Kaimana. Sementara, Kabupaten Fakfak dinilai memiliki risiko sedang untuk bencana gempa bumi dan tsunami.

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerakaknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Berdasarkan Gambar II.12 dan Tabel II.14 diketahui bahwa seluruh kabupaten di Papua Barat termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bencana longsor.

BNPB mendefinisikan gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang terjadi karena efek terjadinya siklon tropis yang memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, disertai hujan deras. Tabel II.13 menunjukkan bahwa seluruh wilayah kabupaten di Papua Barat yang memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana gelombang ekstrim.

Sebagai daerah yang didominasi tutupan lahan hutan, kelas risiko bencana kebakaran lahan dan hutan di seluruh kabupaten Papua Barat termasuk ke dalam kategori tinggi. Bencana kebakaran lahan dan hutan juga dapat terjadi dikarenakan oleh kegiatan budidaya yang dilakukan manusia. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian juga menjadi salah satu penyebab bencana karena pembukaan tersebut dilakukan dengan pembakaran untuk meminimalisasi biaya dan hasilnya sangat cepat. Pada kasus bencana kekeringan, kabupaten dengan risiko tinggi adalah Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Manokwari. Sedangkan, kabupaten yang memiliki kelas risiko kekeringan sedang Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.

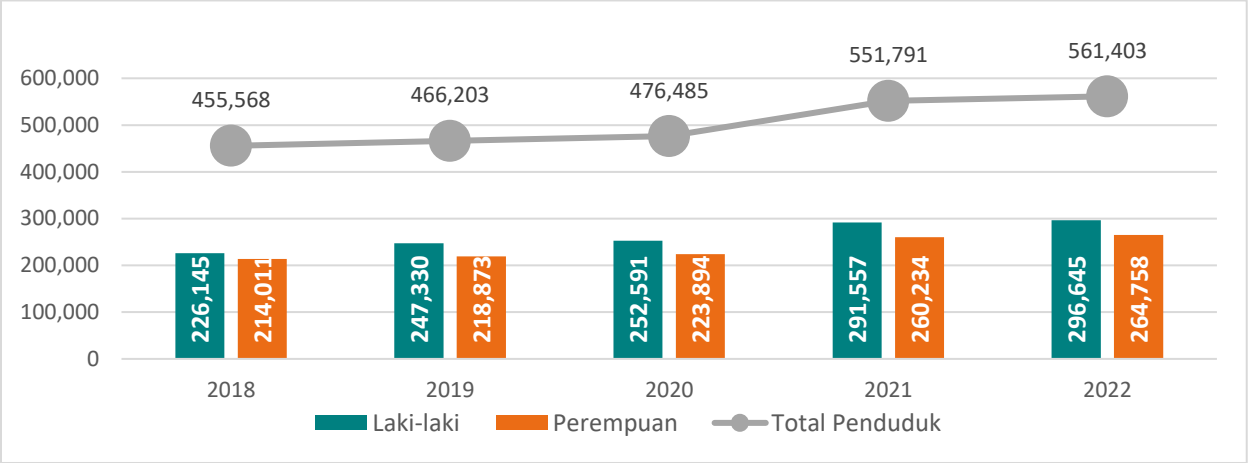
2.1.5 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 561.403 jiwa. Jumlah penduduk Papua Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya



migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Barat (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah.

Gambar II.13 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota, 2018-2023 (jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2023"

Meskipun jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut perlu mendapat perhatian untuk dapat dilakukan pengendalian yang sesuai. Kondisi Provinsi Papua Barat dengan infrastruktur yang masih terbatas akan menyulitkan jika jumlah penduduk meningkat pesat dimana dikhawatirkan kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan dan penunjang kehidupan lainnya tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini pada gilirannya akan mempersulit kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat sendiri. Untuk itu, diperlukan pendidikan keluarga berencana kepada masyarakat Provinsi Papua Barat melalui koordinasi dengan instansi terkait di seluruh kabupaten dengan harapan menekan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan langkah jangka panjang untuk membentuk SDM yang berkualitas sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penduduk yang masih sedikit dan bertambah tidak terlalu pesat, program peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi kependudukan di Papua Barat berdasarkan kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.15.

Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Papua Barat sampai pada tahun 2022 adalah Manokwari yaitu sebanyak 197.097 jiwa (35,11% dari total penduduk di Papua Barat), diikuti Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 92.236 jiwa (16,43%), dan Kabupaten Fakfak sebanyak 86.283 jiwa (15,37%). Sementara itu, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Mwanokwari Selatan yaitu sebanyak 38.648 jiwa (6,88%), dan Pegunungan Arfak sebanyak 39.760 jiwa (7,08%).



Tabel II.15 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km² Menurut Kab/Kota Hasil Sensus Tahun 2022

No.	Kabupaten	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan	Persentase	Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata 2010-2022
1	Fakfak	14.320,00	86.283	6,03	15,37	0,73
2	Kaimana	16.241,84	63.633	3,92	11,33	1,26
3	Teluk Wondama	3.950,53	43.746	11,07	7,79	2,85
4	Teluk Bintuni	20.840,83	92.236	4,43	16,43	3,34
5	Manokwari	3.186,28	197.097	61,86	35,11	1,31
6	Manokwari Selatan	2.812,44	38.648	13,74	6,88	4,22
7	Pegunungan Arfak	2.773,74	39.760	14,33	7,08	2,30
Papua Barat		64.125,66	561.403	8,75	100,00	

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen " Papua Barat Dalam Angka 2023"

Tabel II.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kab/Kota, 2022

No	Kabupaten	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (L/P)
1	Fakfak	42.092	86.283	86.283	104,99
2	Kaimana	30.284	63.633	63.633	110,12
3	Teluk Wondama	20.609	43.746	43.746	112,27
4	Teluk Bintuni	38.616	92.236	92.236	138,85
5	Manokwari	94.839	197.097	197.097	107,82
6	Manokwari Selatan	18.673	38.648	38.648	106,97
7	Pegunungan Arfak	19.645	39.760	39.760	102,39
Papua Barat		296.645	264.758	561.403	112,04

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen " Papua Barat Dalam Angka 2023"

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari disebabkan kedua wilayah tersebut memiliki sarana transportasi dan aksesibilitas yang paling memadai, infrastruktur yang cukup bagus, memiliki variasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding kabupaten yang lain. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi penduduk yang didorong meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan.

Jumlah penduduk laki-laki di Papua Barat sebanyak 296.645 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 264.758 jiwa. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 112,04 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Provinsi Papua Barat terdapat 112 penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur sampai pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 55.162 jiwa, diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 53.842 jiwa, dan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 52.528 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori expansive dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM



produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah. Dengan jumlah penduduk muda dan angkatan kerja juga besar, maka pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel II.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Papua Barat Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
1	0-4	26.822	24.397	51.219
2	5-9	24.616	22.212	46.828
3	10-14	25.764	23.065	48.829
4	15-19	27.807	24.721	52.528
5	20-24	29.170	25.992	55.162
6	25-29	28.433	25.409	53.842
7	30-34	26.842	24.247	51.089
8	35-39	24.599	21.997	46.596
9	40-44	21.853	19.286	41.139
10	45-49	18.348	16.257	34.605
11	50-54	14.505	12.795	27.300
12	55-59	11.065	9.529	20.594
13	60-64	7.581	6.650	14.231
14	65-69	4.787	4.225	9.012
15	70-74	2.746	2.404	5.150
16	75+	1.709	1.570	3.279
Total		296.645	264.758	561.403

LAKI-LAKI

52,84%

(296.645 jiwa)

PEREMPUAN

47,16%

(264.758 jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023" (diolah)

Kondisi Demografi OAP dan non-OAP

Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi demografi OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) sejak Mei 2020 di 13 kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Tabel II.18 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan Jumlah Penduduk pada SAIK+			Cakupan SAIK+ Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Barat		542.999	123.461	60.895	184.356	33,95
1	Fakfak	85.197	32.054	18.879	50.933	59,78
2	Kaimana	62.256	17.417	5.330	22.747	36,54
3	Manokwari	192.663	33.450	24.610	58.060	30,14
4	Manokwari Selatan	35.949	17.831	5.854	23.685	65,89
5	Pegunungan Arfak	38.207	168	6	174	0,46
6	Teluk Bintuni	87.083	1.914	3.387	5.301	6,09
7	Teluk Wondama	41.644	20.627	2.829	23.456	56,33

Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) <https://saikplus.papubaratprov.go.id/>



Berdasarkan Tabel II.18 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 19 Mei 2023 di 7 kabupaten di Papua Barat sebesar 184.356 jiwa atau 33,95% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 542.999 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SAIK+, sebanyak 66,97% adalah OAP sedangkan 33,03% lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

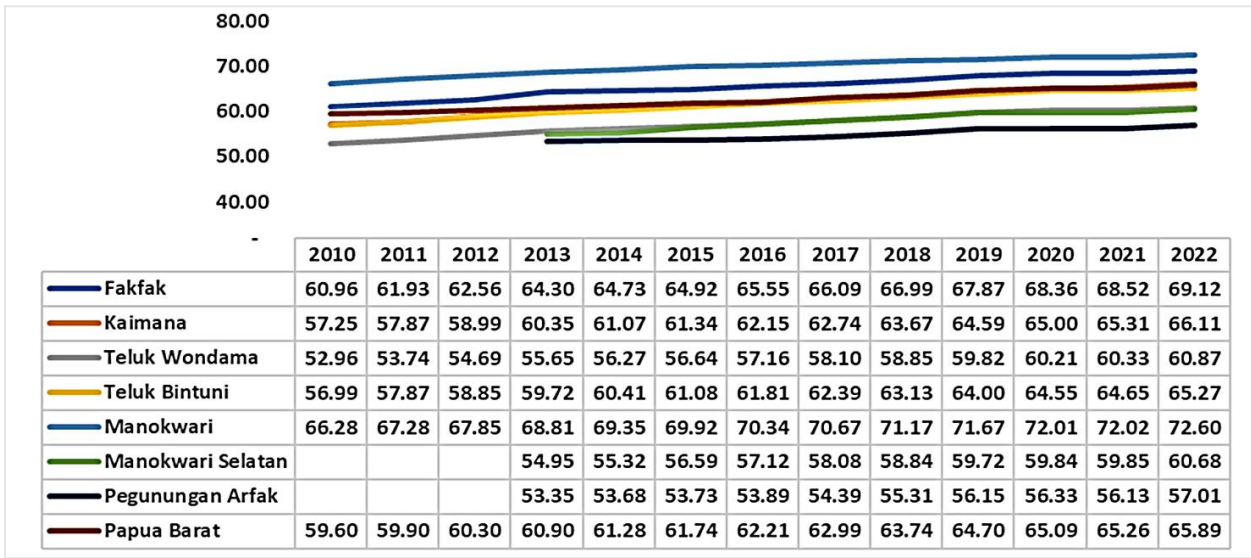
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Berdasarkan Gambar II.14 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, secara umum IPM **Provinsi Papua Barat** termasuk **kategori sedang** (kriteria: 60-69). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, hanya **Kabupaten Manokwari** yang memiliki IPM dengan **kategori tinggi** sejak tahun 2016. Adapun **Kabupaten Pegunungan Arfak** merupakan kabupaten dengan **IPM terendah** (kriteria <60).

Gambar II.14 Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat, 2010-2022

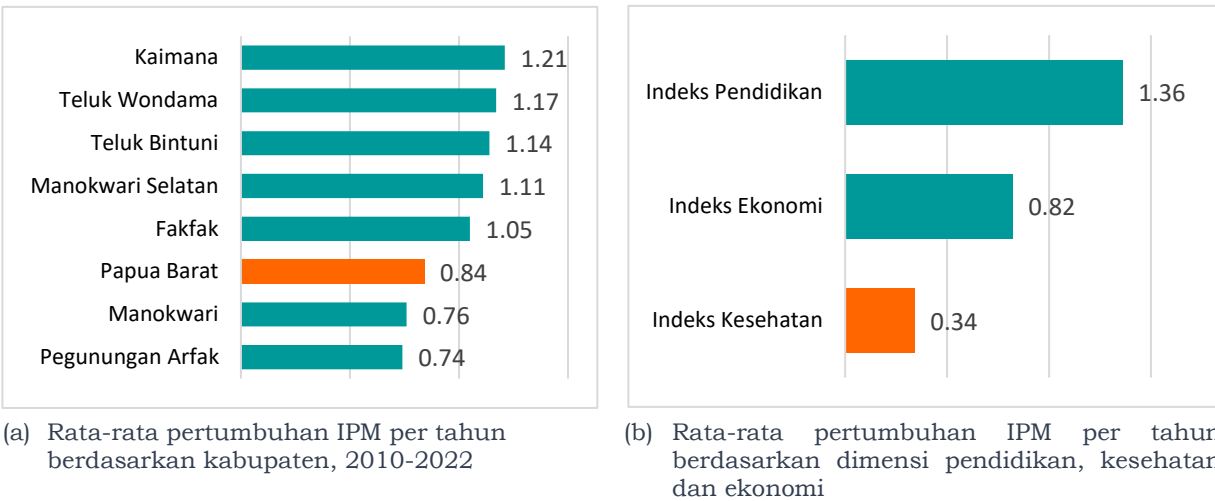


*Catatan: nilai IPM Papua Barat tahun 2022 dalam grafik merupakan hasil proxy
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun kabupaten dan Provinsi Papua Barat pada 2010-2022 dapat dilihat pada Gambar II.14. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan IPM di Papua Barat

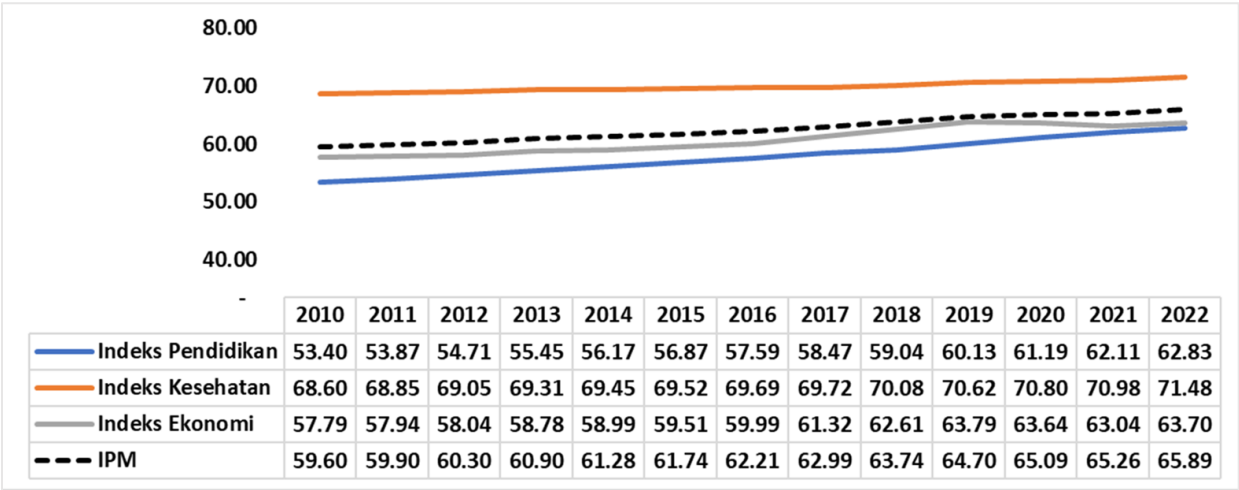
tercatat sebesar 0,84% per tahun. Wilayah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Kaimana (1,21% per tahun) dan terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (0,74% per tahun). Terdapat 2 kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan IPM di bawah rata-rata provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari (0,76%) dan Pegunungan Arfak (0,74%).

Gambar II.15 Rata-rata Pertumbuhan IPM per Tahun, 2010-2022 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

Gambar II.16 Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat Menurut Dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, 2010-2022



*Catatan: nilai IPM serta dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi Papua Barat tahun 2022 dalam grafik merupakan hasil proxy
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

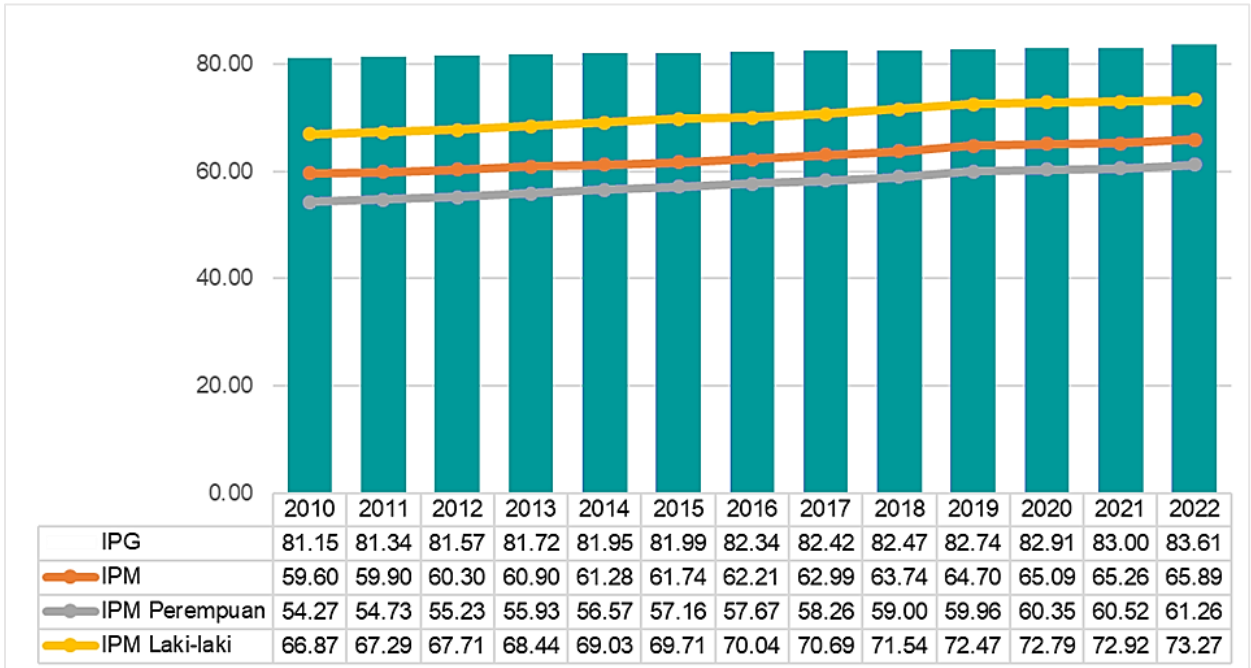
Gambar II.16 menunjukkan perkembangan IPM Provinsi Papua Barat menurut dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi tahun 2010-2022. Pada Gambar II.16 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 capaian terendah berada pada dimensi pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dengan nilai indeks sebesar 62,83. Sedangkan capaian dimensi ekonomi (pengeluaran per kapita) dan kesehatan (Usia Harapan Hidup) berturut-turut sebesar 63,70 dan 71,84. Apabila dilihat berdasarkan pertumbuhannya,



dimensi pendidikan memiliki kecepatan peningkatan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,36%. Sedangkan dimensi ekonomi (pengeluaran per kapita) dan kesehatan masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82% dan 0,34% per tahun.

Gambar II.17 menunjukkan IPM menurut gender dan IPD Papua Barat tahun 2010-2022. Berdasarkan Gambar II.17 diketahui bahwa secara umum IPM Perempuan di Papua Barat konsisten lebih rendah dibandingkan IPM Laki-laki selama 2010-2022. Hal ini juga berimplikasi pada lebih rendahnya IPM perempuan di Papua Barat dibandingkan IPM agregatnya. Adapun rata-rata IPG selama 2010-2022 berada pada kisaran 82,24 yang menandakan diperlukannya peningkatan IPG sekitar 18 poin untuk mencapai level kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

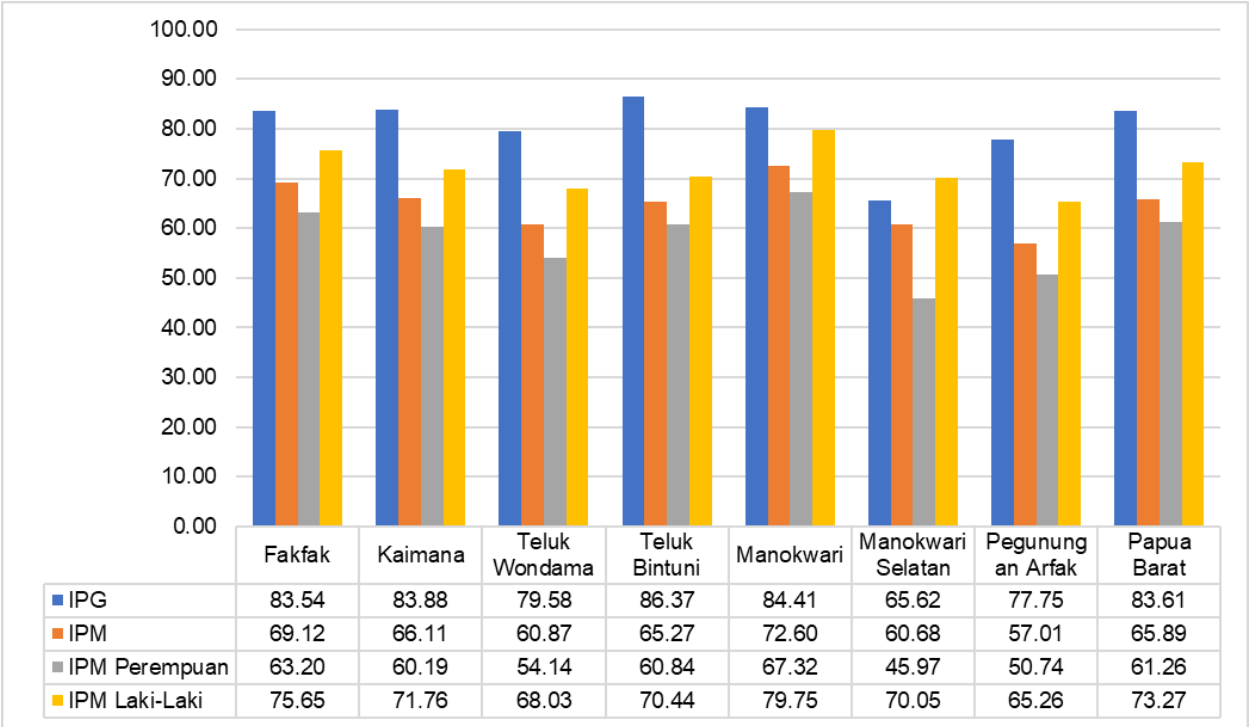
Gambar II.17 IPM Menurut Gender dan IPG Papua Barat 2010-2022



*Catatan: nilai IPM dan IPG Papua Barat tahun 2022 dalam grafik merupakan hasil proxy
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

Gambar II.18 menunjukkan IPM laki-laki, IPM perempuan dan IPG Kabupaten di Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Gambar II.18 diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten dengan IPG terendah di Papua Barat adalah Manokwari Selatan (65,62), Pegunungan Arfak (77,75), dan Teluk Wondama (79,58). Ketiganya memiliki IPG di bawah 80. Dapat dilihat juga capaian IPM perempuan di 3 kabupaten tersebut berada di bawah angka 60 atau masuk kategori rendah. Angka IPM Perempuan di Kabupaten Manokwari Selatan bahkan berada di bawah 50.

Gambar II.18 IPM Menurut Gender dan IPG Kabupaten di Papua Barat, 2022



*Catatan: nilai IPM dan IPG Kabupaten di Papua Barat tahun 2022 merupakan hasil proxy
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2016-2021, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten di Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, total PDRB ADHK 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 37,88 triliun dan mengalami peningkatan menjadi Rp.39,41 triliun pada tahun 2022. Kabupaten yang memiliki PDRB ADHK tertinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama (Rp 25,56 triliun) dan Kabupaten Kaimana (Rp 3,5 triliun). Tingginya nilai PDRB Teluk Wondama ini disebabkan karena besarnya pendapatan dari **sektor migas**.

Tabel II.19 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Juta Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Fakfak	3.367.230,08	3.545.307,64	3.440.577,18	3.474.011,49	3.551.876,59
Kaimana	1.739.446,02	1.803.958,82	1.752.821,56	1.716.000,85	1.735.217,97
Teluk Wondama	971.458,81	1.012.028,45	979.428,29	990.093,92	1.021.743,36
Teluk Bintuni	24.542.830,62	25.380.151,09	25.648.777,94	25.058.622,87	25.564.575,63
Manokwari	6.579.066,62	6.815.964,08	6.388.756,31	6.624.674,04	6.761.037,14
Manokwari Selatan	548.388,70	595.221,15	578.446,22	585.579,28	597.173,77
Pegunungan Arfak	133.354,14	142.569,45	151.225,06	158.112,79	180.201,08
Total 7 Kabupaten	37.881.774,99	39.295.200,68	38.940.032,56	38.607.095,24	39.411.825,54

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Tabel II.20 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tanpa Migas Kabupaten di Papua Barat (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Fakfak	3.367,23	3.545,31	3.440,58	3.474,01
Kaimana	1.557,82	1.647,56	1.739,45	1.803,96
Teluk Wondama	971,46	1.012,03	979,43	990,09



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Teluk Bintuni	2.090,87	3.247,02	3.154,21	3.222,87
Manokwari	6.579,07	6.815,96	6.388,76	6.593,32
Manokwari Selatan	548,39	595,22	578,45	586,83
Pegunungan Arfak	133,35	142,57	151,23	157,52
Total 7 Kabupaten	15.248,19	17.005,67	16.432,11	16.828,60

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2022

Apabila ditinjau berdasarkan nilai PDRB ADHK tanpa sektor migas, pada tahun 2021 wilayah yang memiliki nilai PDRB tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (Rp 6,59 triliun) dan Kabupaten Fakfak (Rp 3,47 triliun), sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.20. Apabila membandingkan nilai PDRB pada Tabel II.20 dan Tabel II.19 dapat diketahui bahwa tingginya peran sektor migas terhadap pendapatan regional Provinsi Papua Barat, terutama Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel II.21 menunjukkan laju pertumbuhan total PDRB menurut kabupaten di Papua Barat tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.21 diketahui bahwa wilayah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak dari 10,62% pada tahun 2018 menjadi 13,97% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat percepatan pembangunan ekonomi di Pegunungan Arfak selama tahun 2018-2022 dibandingkan dengan daerah lainnya di Papua Barat.

Tabel II.21 Laju Pertumbuhan Total PDRB Menurut Kab/Kota di Papua Barat (%)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Fakfak	6,59	5,29	-2,95	0,97	2,24
Kaimana	5,58	3,71	-2,83	-2,1	1,12
Teluk Wondama	4,01	4,18	-3,22	1,09	3,20
Teluk Bintuni	5,25	3,41	1,06	-2,3	2,02
Manokwari	5,16	3,6	-6,27	3,69	2,06
Manokwari Selatan	4,48	8,54	-2,82	1,23	1,98
Pegunungan Arfak	10,62	6,91	6,07	4,55	13,97

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2022

2.2.1.3 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam subbab ini, pembahasan struktur ekonomi dirumuskan berdasarkan sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten di Papua Barat. Pada tahun 2017-2022, secara umum struktur ekonomi kabupaten di Papua Barat menunjukkan struktur ekonomi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Tabel II.22, diketahui bahwa 6 dari 7 wilayah kabupaten di Papua Barat memiliki struktur ekonomi yang didominasi kontribusi lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) konstruksi, serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Meskipun



demikian, terdapat 3 kabupaten yang memiliki kontribusi lapangan usaha perdagangan yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Fakfak (12,53%), Kaimana (11,17%) dan Manokwari (13,52%). Khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni, sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian adalah sektor pertambangan dan penggalian (34,64%), serta industri pengolahan (55,06%). Dalam hal ini, subsektor industri batubara dan pengilangan migas masih mendominasi dibandingkan industri pengolahan non-migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan pemeran utama adalah industri *Liquid Natural Gas* (LNG).

Tabel II.22 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022

Lapangan Usaha		Rata-rata Distribusi PDRB ADHK 2017-2022 (%)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,64	28,81	34,32	2,58	14,33	61,39	34,31
2	Pertambangan dan Penggalian	1,39	1,19	1,32	34,64	2,73	0,53	0,32
3	Industri Pengolahan	3,78	6,18	2,51	55,06	4,66	1,37	0,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,02	0,00	0,10	0,13	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,05	0,05	0,00	0,37	0,05	0,00
6	Konstruksi	25,56	17,87	16,45	4,82	19,87	3,35	11,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,53	11,17	7,96	0,41	13,52	1,22	0,12
8	Transportasi dan Pergudangan	5,20	4,94	2,18	0,12	5,11	2,59	0,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,09	0,77	0,40	0,03	1,60	0,39	0,20
10	Informasi dan Komunikasi	3,48	2,11	0,56	0,04	4,78	0,28	0,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,49	1,38	0,15	4,01	1,03	0,16
12	Real Estate	2,28	2,05	1,60	0,14	3,22	0,30	0,47
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,09	0,06	0,00	0,24	0,08	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,04	19,80	26,75	1,68	18,15	21,19	47,17
15	Jasa Pendidikan	5,34	2,10	3,50	0,25	4,68	3,66	3,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	0,84	0,75	0,07	2,03	1,37	1,26
17	Jasa Lainnya	0,33	0,46	0,20	0,00	0,59	1,08	0,30
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2023 (diolah)

Dalam menganalisis struktur ekonomi daerah, selain mengkaji kontribusi lapangan usaha juga perlu meninjau laju pertumbuhan lapangan usaha pada rentang tahun tertentu. Berdasarkan Tabel II.23 dapat diketahui terdapat laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa). Hal ini mengindikasikan mulai adanya transformasi struktural atau pergeseran pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja/struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di Papua Barat.



Tabel II.23 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022

Lapangan Usaha		Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2017-2022 (%)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	0,90	-0,14	-0,07	1,00	1,32	-4,18
2	Pertambangan dan Pengalihan	-0,86	2,69	3,97	0,28	4,07	2,83	21,94
3	Industri Pengolahan	2,44	1,41	2,48	1,42	13,51	7,54	9,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,22	7,64	12,50	13,05	20,03	5,16	-1,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,50	1,08	0,82	2,86	3,73	32,70	0,00
6	Konstruksi	2,19	0,40	1,81	46,96	-5,58	3,39	67,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,70	5,31	4,34	6,63	5,69	3,11	16,69
8	Transportasi dan Pergudangan	1,45	0,58	2,02	-2,61	-0,12	0,58	31,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,98	4,45	2,83	2,19	6,81	1,95	57,20
10	Informasi dan Komunikasi	6,87	5,76	2,56	8,13	5,34	16,51	28,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	3,11	11,91	7,08	5,95	50,61	84,50
12	Real Estate	2,46	0,55	4,37	5,22	1,86	2,77	11,62
13	Jasa Perusahaan	3,20	2,50	1,38	2,52	0,73	-0,02	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	-1,36	2,79	4,10	4,46	5,43	15,51
15	Jasa Pendidikan	2,21	3,02	3,68	2,62	-1,58	4,17	0,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	7,68	5,74	9,59	6,03	7,34	2,35
17	Jasa Lainnya	3,81	3,39	5,94	5,57	4,21	0,52	-0,73
PDRB		2,49	1,06	1,88	1,93	1,61	2,75	9,90

Keterangan: Laju pertumbuhan lapangan usaha relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2023 (diolah)

Untuk menganalisis struktur ekonomi kabupaten di Papua Barat dilakukan analisis Tipologi Klassen terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha di Papua Barat tahun 2017-2022. Tipologi Klassen membagi lapangan usaha menjadi 4 kategori yaitu: kuadran 1 adalah sektor maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor berkembang cepat, kuadran III adalah sektor maju tapi tertekan, serta kuadran IV adalah sektor yang relative tertinggal (lihat Tabel II.24).

Berdasarkan Tabel II.24 dapat diketahui bahwa sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sektor konstruksi. Wilayah yang tidak memiliki sektor maju dan berkembang pesat adalah Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Di Kabupaten Teluk Bintuni, sektor pertambangan dan industri pengolahan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil sehingga termasuk dalam kategori “sektor maju tapi tertekan” (kuadran III). Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan

karena sektor pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil.

Tabel II.24 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2022

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3	3	4	3	3	3
2	Pertambangan dan Penggalian	4	4	4	3	4	4	2
3	Industri Pengolahan	4	3	4	3	2	4	4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2	2	2	2	2	4	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	4	4	4	4	2	4
6	Konstruksi	3	3	3	2	3	4	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	1	1	4	1	4	4
8	Transportasi dan Pergudangan	4	4	4	4	4	4	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2	2	4	4	2	4	2
10	Informasi dan Komunikasi	2	2	4	2	2	2	2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2	2	2	2	2	2	2
12	Real Estate	4	4	2	4	4	4	4
13	Jasa Perusahaan	2	4	4	4	4	4	4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	3	4	3	3	3
15	Jasa Pendidikan	4	2	4	4	4	4	4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4	2	2	2	2	4	4
17	Jasa Lainnya	2	2	2	4	4	4	4

Keterangan: 1 Kuadran I: sektor maju dan tumbuh pesat
2 Kuadran II: sektor potensial dan dapat berkembang pesat
3 Kuadran III: sektor maju tapi tertekan
4 Kuadran IV: sektor relatif tertinggal

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2023 (diolah)

Sebagai tindaklanjut dari analisis Tipologi Klassen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.24, dapat diketahui intervensi sektoral yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pembangunan ekonomi jangka pendek/menengah maupun jangka panjang. Untuk perbaikan ekonomi jangka pendek/menengah pemerintah provinsi/kabupaten dapat fokus pada perbaikan sektor-sektor potensial yang berkembang pesat.



2.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami trend peningkatan pada 2018-2019 namun mengalami penurunan pada 2019-2022. Pada tahun 2018 rata-rata PDRB ADHK per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 79,85 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 80,69 juta pada tahun 2019, dan mengalami penurunan hingga mencapai menjadi Rp 60,46 juta pada tahun 2022. Peningkatan dari PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018-2019 merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian karena pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Adapun penurunan PDRB per kapita disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah sebagai dampak pandemi covid-19.

Secara regional, wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 277,16 juta pada 2020). Tingginya PDRB per kapita pada Teluk Bintuni disebabkan adanya tambang minyak di Kabupaten Sorong dan tambang *Liquid Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia.

Tabel II.25 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (Rp 000) 2018-2022

No.	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	43.515	44.997	40.323	40.482	41.165
2	Kaimana	29.783	29.481	28.152	27.257	27.269
3	Teluk Wondama	30.579	30.910	23.615	23.237	23.356
4	Teluk Bintuni	389.007	390.770	296.127	280.241	277.165
5	Manokwari	38.497	40.325	33.161	33.989	34.303
6	Manokwari Selatan	23.220	23.987	16.216	15.763	15.452
7	Pegunungan Arfak	4.385	4.407	3.969	4.061	4.532
Rata-rata		79.855	80.697	63.080	60.719	60.463

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2023”

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel II.26, rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Barat termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Meskipun demikian, pada tahun 2017-2021 tren rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua Barat. Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan rendah pada tahun 2021 di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (skor: 0,309). Adapun wilayah yang



memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kaimana (skor: 0,413) dan Teluk Wondama (skor: 0,391).

Tabel II.26 Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Papua Barat

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fakfak	0,370	0,397	0,390	0,397	0,347
2	Kaimana	0,434	0,440	0,402	0,407	0,413
3	Teluk Wondama	0,438	0,410	0,413	0,410	0,391
4	Teluk Bintuni	0,341	0,387	0,364	0,390	0,366
5	Manokwari	0,373	0,398	0,383	0,381	0,372
6	Manokwari Selatan	0,406	0,389	0,403	0,363	0,371
7	Pegunungan Arfak	0,274	0,391	0,294	0,329	0,309
Rata-rata Kabupaten		0,377	0,402	0,378	0,382	0,367

Sumber: BPS Papua Barat, 2022 dalam <https://papuabar.bps.go.id/indicator/23/171/1/rasio-gini-menurut-kabupaten-kota.html>

2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan Penduduk

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2018-2022 menunjukkan tren penurunan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebagai dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebesar 114,32 ribu jiwa (27,77%) dan mengalami penurunan menjadi 113,64 ribu jiwa (25,61%).

Secara regional seluruh daerah di Papua Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2018-2022, Terdapat 2 kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dari tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Manokwari, dan Kaimana. Adapun daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Papua Barat pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (33,71%), dan Teluk Wondama (30,06%) (lihat Tabel II.27).

Tabel II.27 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota, 2018-2022

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	18,73	18,22	17,72	18,51	18,13	24,31	23,25	22,27	22,86	22,06
2	Kaimana	9,66	9,63	9,52	10,31	10,11	16,65	16,11	15,50	16,04	15,29
3	Teluk Wondama	10,53	10,48	10,22	10,74	10,44	33,32	32,42	30,91	31,61	30,06
4	Teluk Bintuni	19,64	19,59	19,22	20,07	20,45	31,30	30,57	29,39	29,79	29,73
5	Manokwari	37,72	36,67	35,92	35,63	34,96	22,21	21,06	20,14	20,56	19,90
6	Manokwari Selatan	7,24	7,21	7,09	7,65	7,68	30,87	29,94	28,88	29,30	28,55
7	Pegunungan Arfak	10,80	10,74	10,68	11,85	11,87	35,72	34,83	22,81	34,70	33,71
Papua Barat		114,32	112,54	110,37	114,76	113,64	27,77	26,88	24,27	26,41	25,61

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2023”



Arah kebijakan dan Strategi terkait penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrim sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu.

Pada Tabel II.28 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0) dan kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan. Meskipun demikian, terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 2,11 (tahun 2021) menjadi 2,12 (tahun 2022). Hal ini memberikan gambaran meskipun terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Papua Barat, namun masih terdapat peningkatan ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.28 Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2022

No	Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahaan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Fakfak	22,86	22,06	6,11	5,33	2,12	1,92	596.406	628.418
2	Kaimana	16,04	15,29	2,83	3,32	0,73	1,00	450.301	511.011
3	Teluk Wondama	31,61	30,06	6,48	5,50	1,79	1,56	597.676	614.573
4	Teluk Bintuni	29,79	29,73	9,15	9,96	3,84	4,11	693.305	716.834
5	Manokwari	20,56	19,90	4,96	3,69	1,70	0,95	663.438	690.028
6	Manokwari Selatan	29,30	28,55	8,92	8,99	3,45	3,64	686.235	702.674
7	Pegunungan Arfak	34,70	33,71	5,28	6,43	1,15	1,66	683.722	706.497
Rata-rata		26,41	25,61	6,25	6,17	2,11	2,12	624.440	652.862

Sumber: BPS Nasional, 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Fokus Pendidikan

2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf Usia 15+

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bentuk huruf apapun, terhadap keseluruhan penduduk. Melek Huruf atau kemampuan baca tulis merupakan kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan yang menjadi salah satu indikator pendidikan yang penting karena kemampuan membaca adalah titik awal dari proses belajar. Angka melek huruf



dibatasi pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang diasumsikan sebagai batas usia yang telah melewati jenjang pendidikan dasar.

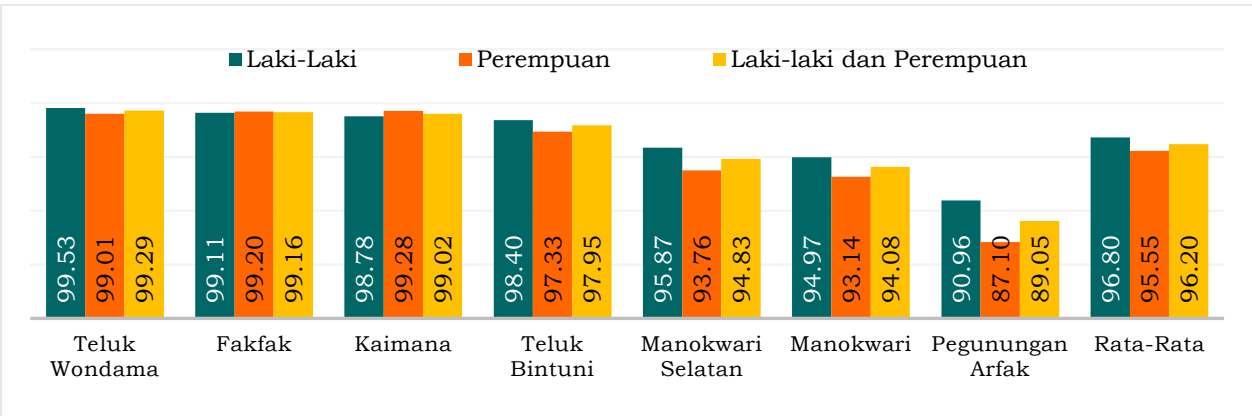
Data BPS Provinsi Papua Barat sebelum pembentukan DOB menunjukkan bahwa selama kurun waktu enam tahun, Angka Melek Huruf pada usia 15 tahun ke atas menunjukkan kecenderungan meningkat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 penduduk usia 15 tahun ke atas Angka Melek Huruf Papua Barat adalah 97,80, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 96.01. Tabel II.29 memperlihatkan data Angka Melek Huruf Papua Barat sebelum pemekaran sejak tahun 2016 hingga 2021.

Tabel II.29 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Papua Barat Sebelum Pemekaran Tahun 2016-2021

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melek Huruf	97,05	97,16	97,37	97,72	97,46	97,80

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2016-2021

Gambar II.19 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin, per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

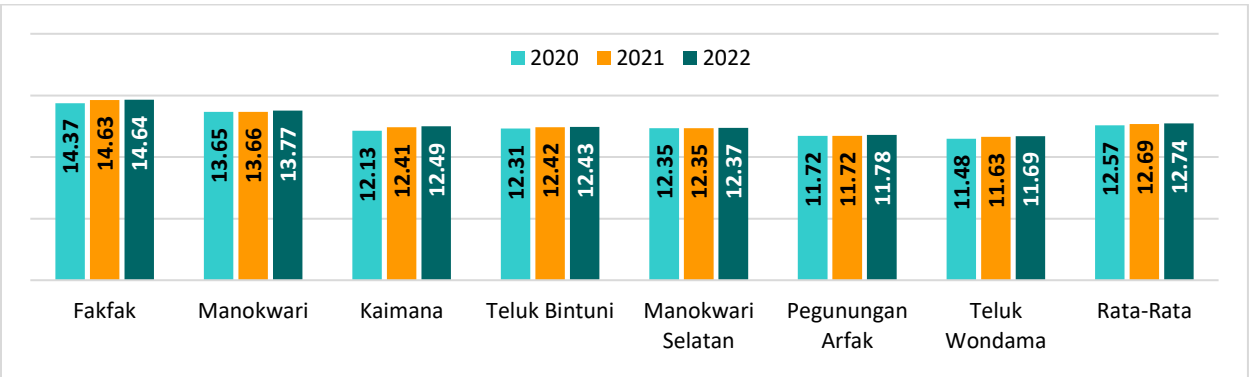
Untuk mengetahui Angka Melek Huruf Provinsi Papua Barat di 7 Kabupaten pasca pemekaran, digunakan data BPS tahun 2023. BPS memilah kemampuan baca tulis ke dalam huruf Latin dan huruf Arab, namun terdapat irisan antar kedua kelompok penduduk ini, yakni yang mampu baca tulis huruf keduanya (Latin dan Arab) yang tidak dipisahkan. Sehingga dalam uraian ini dipergunakan indikator kemampuan baca tulis huruf Latin saja. Perhitungan rata-rata dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat mendapatkan angka 96,20% dengan rata-rata Angka Melek Huruf pada laki-laki lebih tinggi daripada angka rata-rata perempuan. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan kabupaten, angka tertinggi dicapai oleh Kabupaten Teluk Wondama (rata-rata laki-laki dan perempuan 99,29%). Namun berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf pada perempuan tertinggi di Kabupaten Kaimana (99,28%). Angka terendah

terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak, yaitu 90,96% pada laki-laki dan 87,10% pada perempuan.

2.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai pada usia tersebut.

Gambar II.20 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022



*Catatan: Untuk tingkat provinsi, dipakai angka rata-rata karena belum ada angka Provinsi Papua Barat pasca pemekaran. Sehingga diperoleh perbedaan angka antara rata-rata dalam penghitungan rata-rata kabupaten dengan rata-rata laki-laki dan perempuan

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

HLS di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir (2020-2022), tetapi secara rata-rata dari 7 kabupaten masih berada pada capaian angka 12 plus, yakni 12,57 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 12,74 di tahun 2022. Angka ini dapat diartikan bahwa anak 7 tahun (laki-laki dan perempuan) yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,7 tahun lamanya, atau sampai dengan menyelesaikan Pendidikan Menengah (SMA atau sederajat). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.20.

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, terdapat sedikit perbedaan antara HLS laki-laki dan perempuan. HLS pada perempuan sedikit lebih rendah daripada laki-laki, namun keduanya sama-sama mencapai 2 tahun plus, dan sama-sama meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tinjauan per kabupaten menunjukkan HLS Kabupaten Fakfak dan Manokwari pada tahun 2022 mencapai di atas 13 tahun, sementara HLS terendah terdapat di kabupaten Pegunungan Arfak, yakni 8, 88 tahun pada perempuan dan 11,73 tahun pada laki-laki. HLS pada perempuan yang lebih



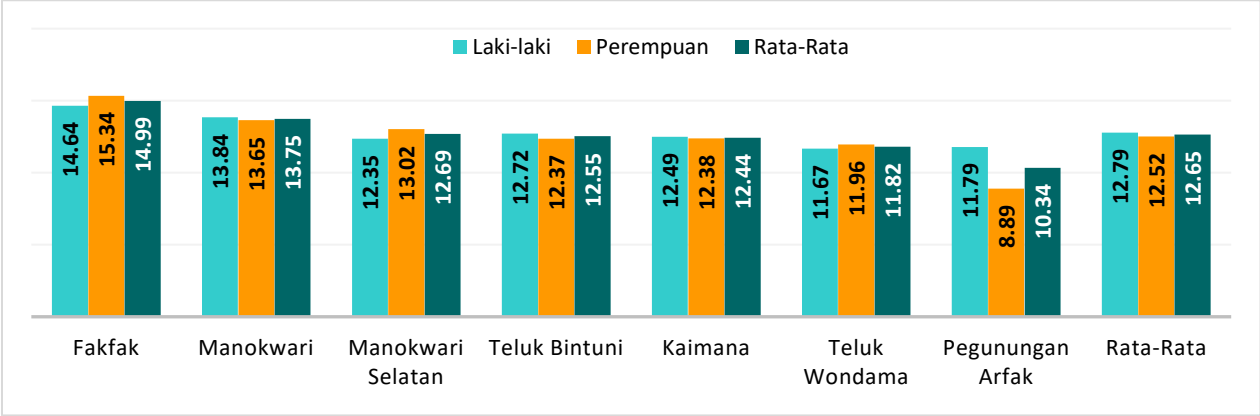
tinggi daripada laki-laki terdapat di Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama, bahkan di HLS Perempuan di Kabupaten Fakfak merupakan angka tertinggi di antara capaian semua kabupaten pada kedua jenis kelamin, yakni 15,34 tahun. Berikut gambar yang menunjukkan capaian HLS menurut kabupaten pada tahun 2022.

Gambar II.21 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Gambar II.22 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022



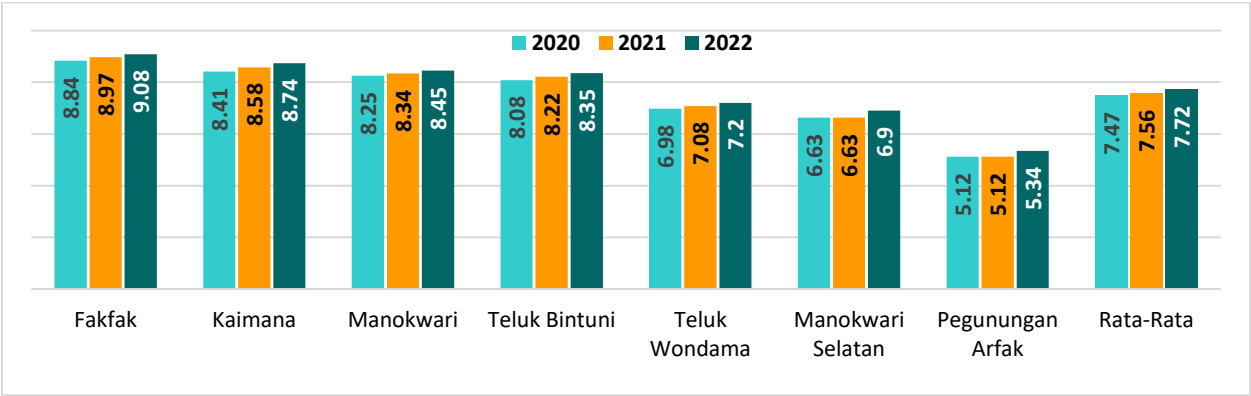
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.2.2.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Papua Barat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dalam kurun waktu sejak tahun 2020 hingga 2022 secara rata-rata baru mencapai angka 7 tahun plus (untuk laki-laki dan perempuan), yakni 7,47, 7,56 dan 7,72 berturut-turut untuk tahun 2020, 2021 dan 2022. Artinya, rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat rata-rata mengenyam pendidikan formal selama 7 tahun lebih atau setara dengan kelas 2 SMP. Angka ini masih di bawah angka rata-rata Nasional, yaitu dengan capaian 8,69 pada tahun 2022.

Berdasarkan kabupaten, terdapat 4 kabupaten dengan angka RLS di atas 8 (Fakfak, Kaimana, Manokwari dan teluk Bintuni), sedangkan 3 kabupaten lainnya baru belum mencapai angka 8.

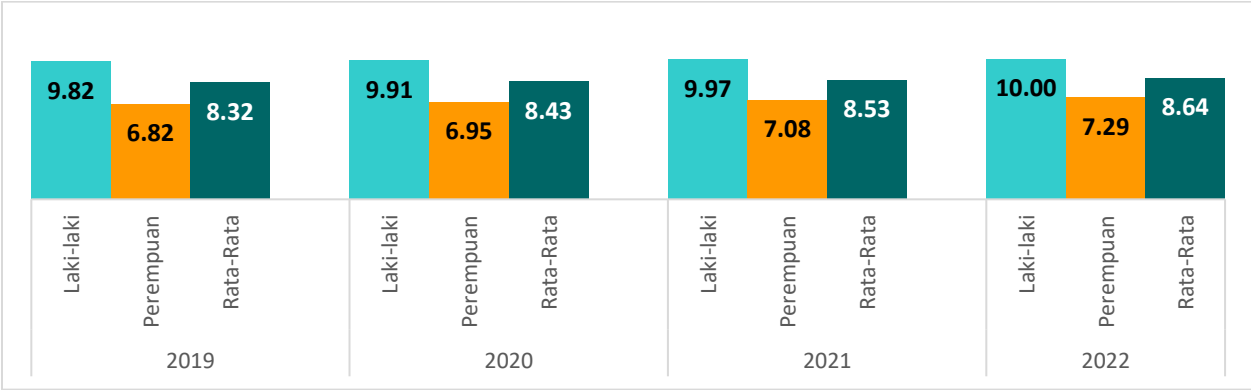
Gambar II.23 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Barat, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Angka RLS pada perempuan di Provinsi Papua Barat masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, meskipun juga mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2022, RLS pada perempuan sebesar 7,29 tahun. Atau tertinggal hampir 3 tahun dibandingkan RLS laki-laki yang mencapai 10 tahun.

Gambar II.24 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019-2022

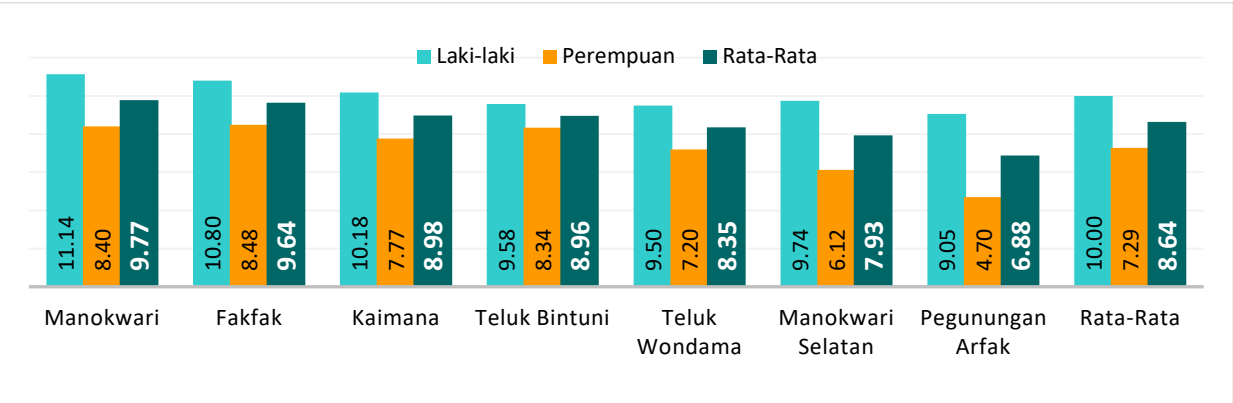


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Tinjauan berdasarkan kabupaten mendapatkan angka RLS tertinggi di Kabupaten Manokwari, yaitu 11,14 tahun untuk laki-laki dan 8,40 tahun untuk perempuan. Pegunungan Arfak memiliki angka RLS terendah, dan juga selisih tertinggi antara laki-laki dan perempuan (Laki-laki 9,05 tahun, perempuan 4,70 tahun), yang juga menunjukkan kesenjangan terbesar angka RLS antara laki-laki dan perempuan. Angka-angka ini mewakili kondisi pembangunan pendidikan serta tingkat putus sekolah di masing-masing kabupaten. Gambar II.25 menunjukkan perbandingan RLS di Provinsi Papua Barat.



Gambar II.25 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022



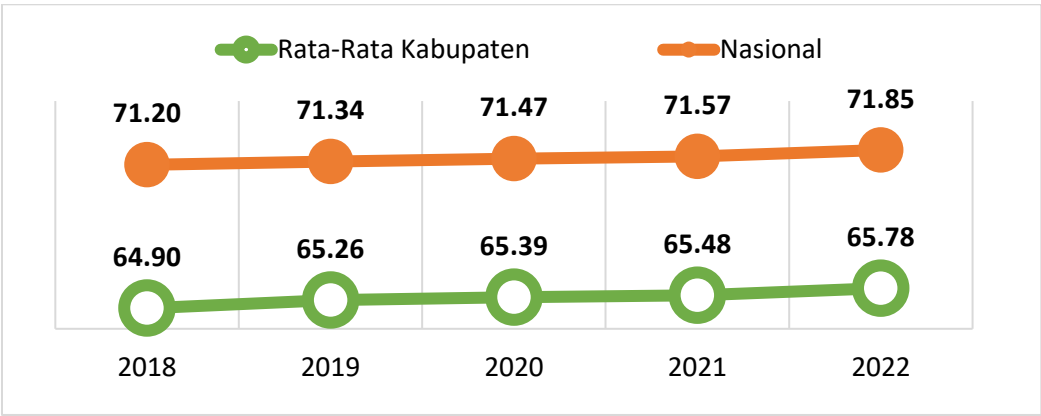
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.2.2.2 Fokus Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen penentu Indeks Pembangunan Manusia dari bidang kesehatan. AHH menggambarkan usia kematian pada suatu populasi yang merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Sehingga angka ini pada dasarnya merupakan gambaran kondisi kesehatan suatu wilayah secara garis besar. Tinggi rendahnya AHH ditentukan oleh faktor-faktor: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, pelayanan kesehatan yang tersedia, kondisi sosio-ekonomi (tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan serta gaya hidup dan kondisi psikososial) yang mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Gambar II.26 Perbandingan Capaian AHH Rata-Rata Kabupaten di Papua Barat dengan Nasional



Sumber: BPS RI, 2023

Secara umum, AHH di 7 Kabupaten di Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 rata-rata kabupaten mencapai angka 65,78 tahun. Angka ini berada di bawah nasional yakni 71,85

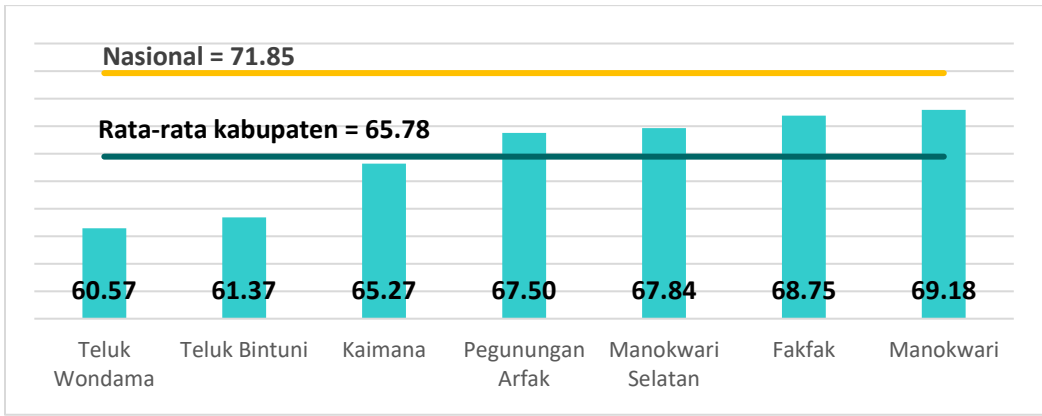


tahun. Gambar II.26 menunjukkan peningkatan rata-rata AHH Kabupaten sejak tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan AHH Nasional.

Sebelum pembentukan DOB, Provinsi Papua Barat menambahkan indikator capaian AHH yang kontekstual dengan profil penduduknya, yaitu AHH OAP. Di dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021, tercantum angka AHH OAP pada tahun 2020 adalah 65,55 tahun. Pemilahan ini menunjukkan AHH OAP tahun 2020 lebih rendah dari pada AHH keseluruhan penduduk Provinsi Papua Barat yang mencapai 66,02 tahun.

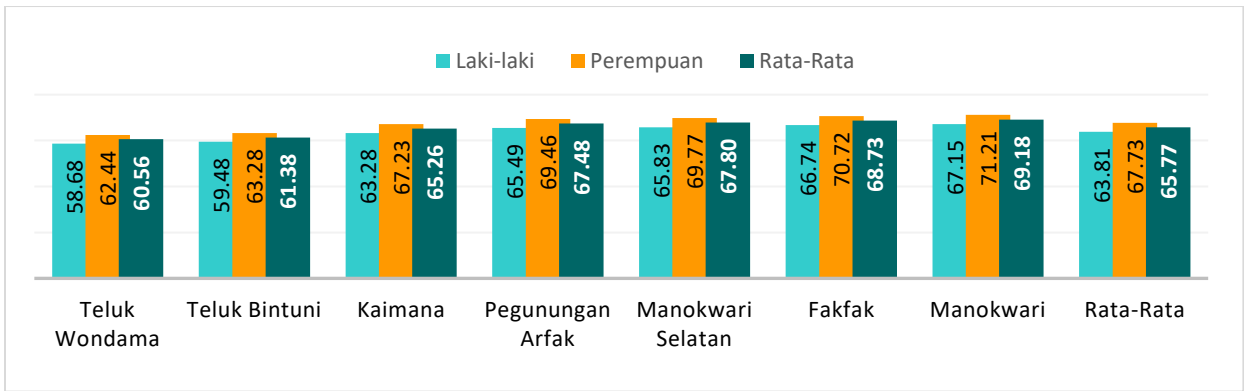
Jika ditinjau berdasarkan kabupaten di tahun 2022, Kabupaten Manokwari memiliki AHH tertinggi yakni 69.18 tahun, diikuti oleh Kabupaten Fakfak, 68,75 tahun. Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Kaimana merupakan 3 kabupaten dengan AHH di bawah rata-rata seluruh kabupaten, yakni berturut-turut 60,57, 61,37 dan 65,27 tahun. Rentang perbedaan AHH dari yang terendah hingga tertinggi ini cukup jauh, yakni lebih dari 8 tahun. Selengkapnya AHH per kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.27.

Gambar II.27 AHH Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Gambar II.28 AHH Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Pemilahan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua kabupaten. Hal ini selaras



dengan angka nasional dan global. Hasil perhitungan AHH tahun 2022 mendapatkan AHH rata-rata dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat pada perempuan 67,73 tahun dan pada laki-laki 63,81 tahun. AHH tertinggi pada kedua jenis kelamin terdapat di Kabupaten Manokwari, sedangkan Teluk Wondama merupakan kabupaten dengan capaian AHH terendah pada kedua jenis kelamin.

2.2.2.2.2 Gizi Buruk

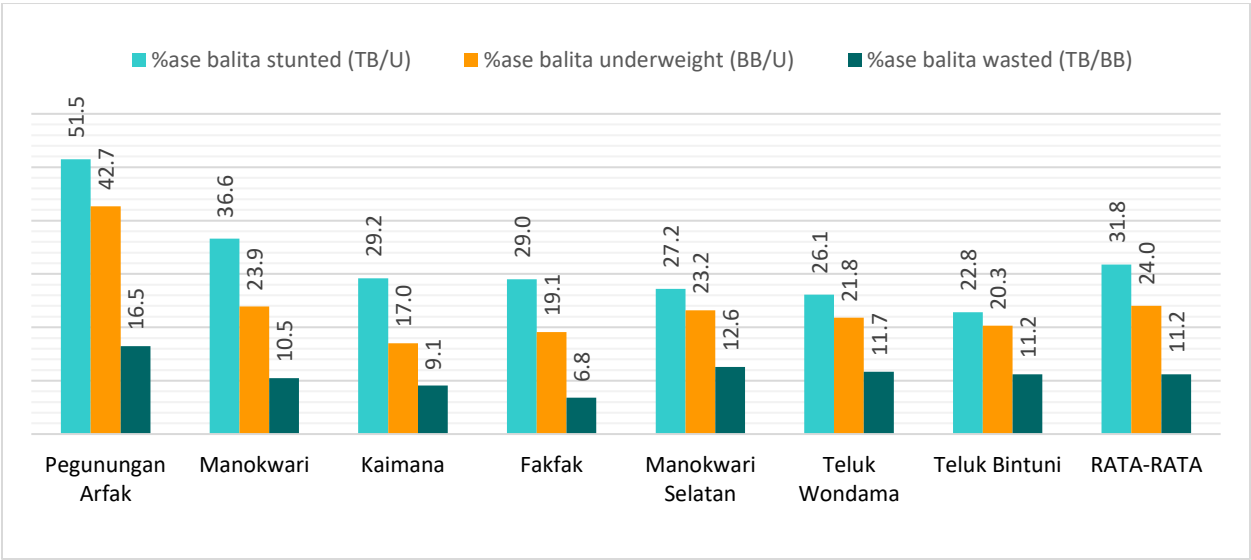
Kondisi gizi mempengaruhi angka kesakitan, kematian dan kualitas hidup seseorang. Telah diketahui bahwa masa yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk pembentukan perkembangan otak, kecerdasan, dan pertumbuhan fisik adalah masa 1000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun). Gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada periode ini akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit-penyakit metabolisme pada usia dewasa. Itu sebabnya masalah gizi menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Tujuan ke-2, yakni: “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan”

Pengukuran status gizi dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB). Pengukuran ini didasarkan atas standar World Health Organization dan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), yang disebut *underweight* di kabupaten-kabupaten di Papua Barat rata-rata 24,0% (Studi Status Gizi Indonesia/ SSGI 2022) Angka ini lebih tinggi dari pada angka nasional, yakni 17,1%, dan mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata tahun 2021 berdasarkan survey yang sama yakni 20,5%. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki proporsi balita kekurangan gizi sangat tinggi berdasarkan indeks ini (42,7%), sedangkan proporsi terendah terdapat di Kaimana (17,0%).

Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak *stunted* (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan SSGI didapatkan angka rata-rata kabupaten sebesar 31,8%. Angka rata-rata kabupaten ini meningkat dibandingkan angka tahun 2021 yakni sebesar 29,8% dan masih jauh di atas

angka nasional sebesar 21,6%. Angka Stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 51,6%.

Gambar II.29 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita menurut Indeks TB/U, BB/U dan TB/BB di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Dengan indeks TB/BB, dari hasil studi yang sama tahun 2022 diperoleh angka balita kurus (*wasted*) rata-rata dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat sebanyak 11,2%. Angka ini juga lebih tinggi dari pada angka nasional yakni 7,7% dan lebih tinggi dibanding rata-rata di tahun 2021 (11,8%). Gambar II.29 menunjukkan prevelensi kekurangan gizi pada balita di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022 berdasarkan ke-3 indeks pengukuran antropometri.

Selain masalah gizi pada balita, kekurangan gizi pada Wanita Usia Reproduksi terutama ibu hamil, juga mempengaruhi status kesehatan anak yang akan dilahirkannya. Kekurangan gizi pada kelompok ini disebut Kurang Energi Kronis (KEK). Secara rata-rata dari 7 kabupaten di Papua Barat, Ibu Hamil mengalami KEK berdasarkan hasil Riskesdas 2018 sebanyak 28,02%, dan pada Perempuan Tidak Hamil sebanyak 20,87%. Proporsi Ibu Hamil KEK yang sangat tinggi berdasarkan riset ini terdapat di Teluk Wondama (54,04%) dan Pegunungan Arfak (53,23%).

2.2.2.3 Fokus Ketenagakerjaan

2.2.2.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK

merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel II.30 menunjukkan perkembangan TPAK di Papua Barat selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat, bahwa rata-rata TPAK kabupaten di Papua Barat mengalami trend kenaikan pada tahun 2018-2021 (dari 69,77 pada tahun 2018 menjadi 77,19 pada tahun 2021), namun kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 74,16.

Tabel II.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2018-2022 (%)

No.	Kabupaten	TPAK					TPT				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	60,65	66,05	68,66	71,53	63,29	10,47	11,49	11,45	7,90	6,75
2	Kaimana	63,97	71,61	74,68	75,65	77,43	2,94	6,51	6,90	3,23	3,34
3	Teluk Wondama	62,85	69,95	75,83	74,97	72,77	3,29	3,23	4,43	2,90	2,86
4	Teluk Bintuni	71,49	66,50	69,44	67,35	70,58	6,01	8,29	8,58	4,74	3,58
5	Manokwari	63,88	66,93	70,29	71,49	63,88	5,12	7,31	7,47	7,04	5,41
6	Manokwari Selatan	77,07	81,11	82,74	84,61	77,40	5,14	2,48	2,43	2,90	1,06
7	Pegunungan Arfak	88,51	91,73	95,37	94,71	93,75	1,29	0,22	1,62	0,70	0,12
Rata-rata		69,77	73,41	76,72	77,19	74,16	4,89	5,65	6,13	4,20	3,30

Sumber: Profil Papua Barat, 2021

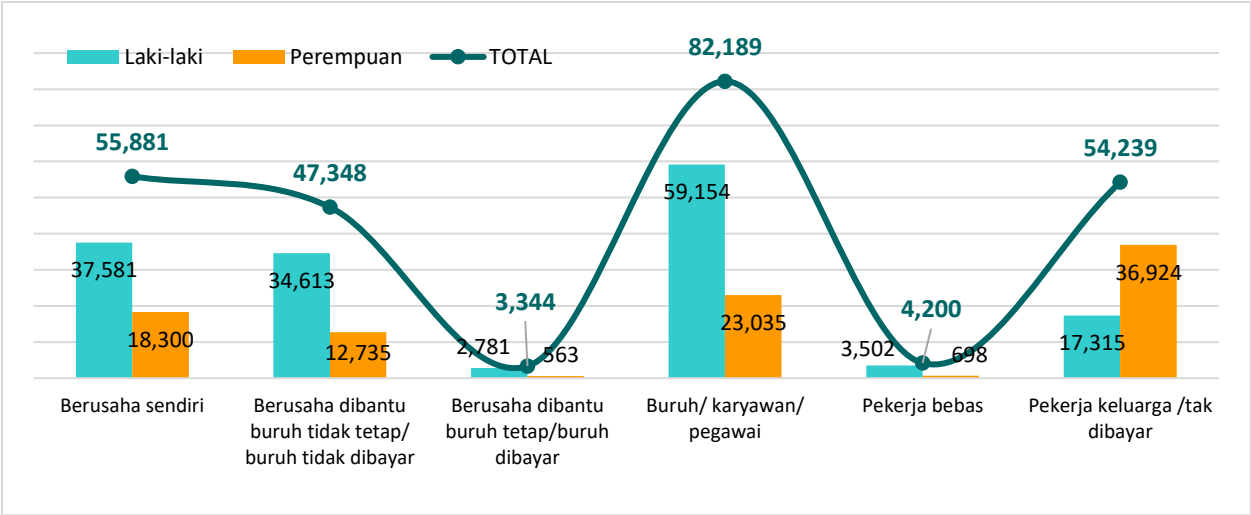
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Rata-rata TPT Kabupaten di Papua Barat selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 4,89% pada tahun 2018 menjadi 3,30% pada tahun 2022 (Tabel II.30). Meskipun tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja dapat dianggap sebagai indikator yang informatif dalam mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja, namun perlu dipertimbangkan bahwa indikator ini belum cukup untuk menafsirkan ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.

2.2.2.3.2 Pekerjaan Utama Penduduk

Tabel II.31 dan Gambar II.30 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.31 dan Gambar II.30 diketahui bahwa mayoritas (sebanyak 82.189 jiwa) penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Barat pada tahun 2022 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yang terdiri atas 59.154 jiwa laki-laki dan 23.035 jiwa perempuan. Berdasarkan gender, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan penduduk usia perempuan usia 15 tahun ke atas mayoritas bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.



Gambar II.30 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Papua Barat (jiwa), 2022



Sumber: BPS Kabupaten, 2013

Tabel II.31 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten (jiwa), 2022

Provinsi/ Kabupaten	Jenis Kelamin	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga /tak dibayar	Total
Fakfak	Laki-laki	10.826	2.180	152	7.963	224	1.278	22.623
	Perempuan	3.319	1.035	24	4.769	0	3.392	12.539
Kaimana	Laki-laki	3.412	6.393	573	8.090	385	2.361	21.214
	Perempuan	2.284	2.325	307	3.905	161	4.965	13.947
Teluk Wondama	Laki-laki	2.720	2.651	68	3.373	529	1.502	10.843
	Perempuan	831	1.076	11	1.548	0	2.573	6.039
Teluk Bintuni	Laki-laki	4.900	3.516	321	11.477	1.260	1.129	22.603
	Perempuan	2.055	1.573	35	4.011	361	3.210	11.245
Manokwari	Laki-laki	14.876	10.050	1.325	23.891	332	1.235	51.709
	Perempuan	8.660	3.191	124	6.937	0	8.094	27.006
Manokwari Selatan	Laki-laki	638	2.056	342	3.103	727	7.897	14.763
	Perempuan	952	1.375	62	1.535	176	6.411	10.511
Pegunungan Arfak	Laki-laki	209	7.767	0	1.257	45	1.913	11.191
	Perempuan	199	2.160	0	330	0	8.279	10.968
Papua Barat	Laki-laki	37.581	34.613	2.781	59.154	3.502	17.315	154.946
		24,25%	22,34%	1,79%	38,18%	2,26%	11,17%	100%
	Perempuan	18.300	12.735	563	23.035	698	36.924	92.255
		19,84%	13,80%	0,61%	24,97%	0,76%	40,02%	100%

Sumber: BPS Kabupaten, 2013

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Provinsi Papua Barat memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan multikulturalisme penduduk yang tinggal di daerah ini. Multikulturalisme yang ada di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari keragaman suku yang berjumlah





67 suku dan keragaman bahasa yang mencapai 310 bahasa yang menghasilkan beranekaragam kebudayaan. Daya tarik wisata budaya ini berpotensi menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat Provinsi Papua Barat sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya.

Peran pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung.

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembina terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Belum meratanya ketersediaan fasilitas olah raga di masing-masing kabupaten merupakan salah satu kendala bagi perkembangan atlet-atlet Papua Barat.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

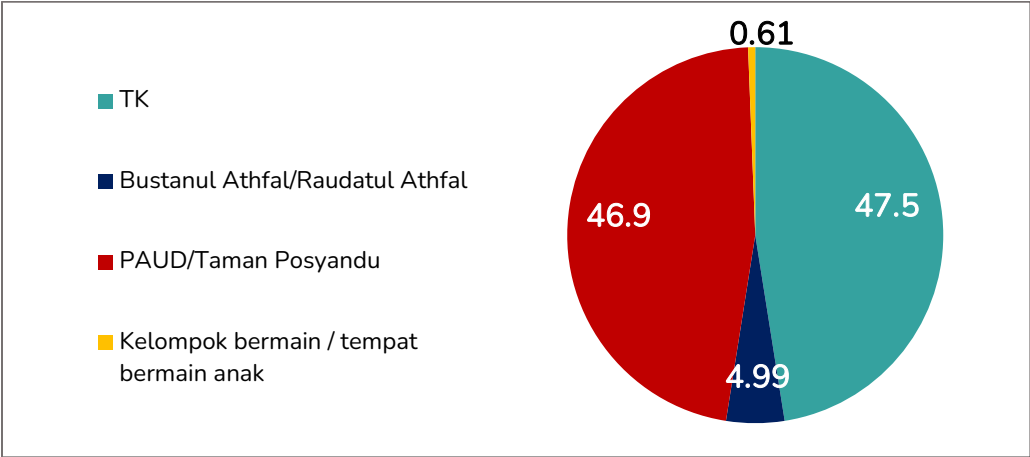
Aspek Pelayanan Pendidikan yang dibahas dalam dokumen ini adalah pendidikan dalam jalur formal, yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta mencakup jenis pendidikan umum, vokasi, dan khusus.

2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat

Sedangkan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat digolongkan sebagai pendidikan nonformal. Proporsi masing-masing jenis PAUD di Papua Barat ditunjukkan dalam gambar II.23 di bawah ini, yang menunjukkan jenis TK dan PAUD–Taman Posyandu sebagai benyuk pendidikan terbanyak (masing-masing 47,5% dan 46,9%). Perbandingan ini merupakan angka provinsi Papua Barat sebelum pemekaran, namun cukup mewakili kondisi pasca pembentukan DOB.

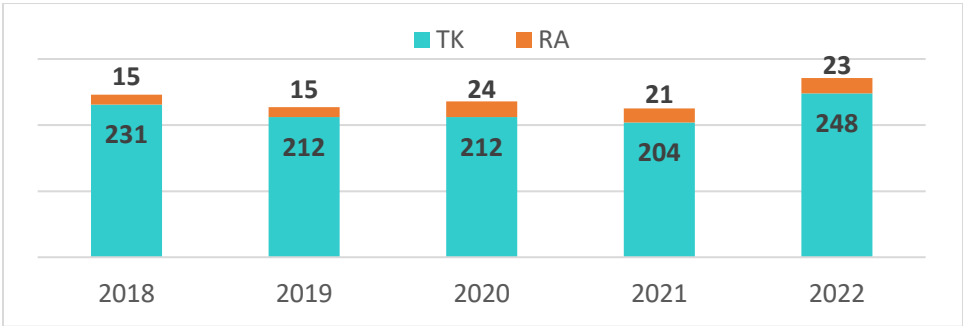
Gambar II.31 Jenis dan Prporosi Pendidikan Pra Sekolah di Papua Barat sebelum Pemekaran tahun 2021 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat, 2021

Jumlah TK dan RA di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat jumlah TK 231 sekolah dan RA 15 sekolah. Data tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah sekolah dibandingkan tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan 248 TK dan 23 RA (total 219 TK dan RA).

Gambar II.32 Perkembangan Jumlah TK dan RA di Papua Barat, 2018-2021

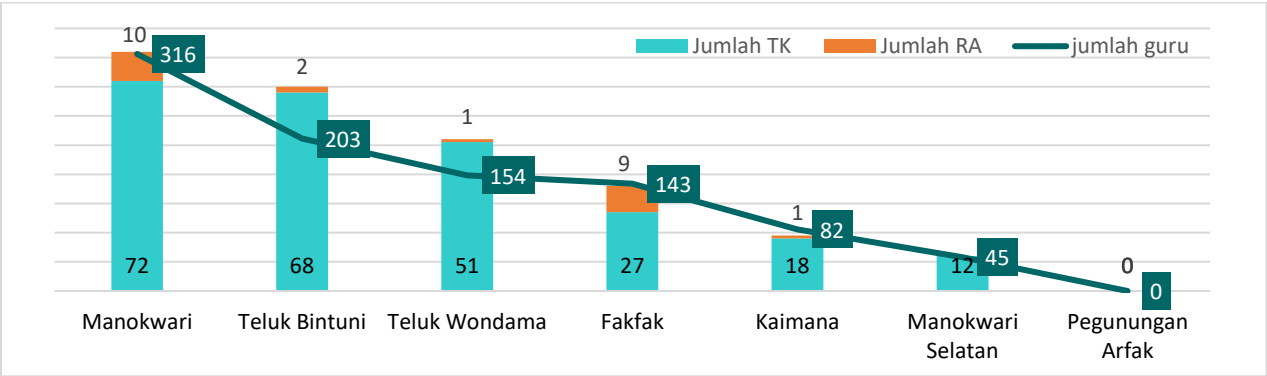


Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2018-2023

Berdasarkan kabupaten, jumlah TK dan RA di tahun 2022 terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (82 TK/RA). Sedangkan di Pegunungan Arfak tidak tercatat adanya fasilitas PAUD ini. Jumlah guru TK/RA di masing-masing kabupaten juga sebanding dengan jumlah sekolah, dengan guru terbanyak di Kabupaten Manokwari (316 guru).Selengkapnya dpa dilihat pada Gambar II.33.



Gambar II.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru TK/RA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

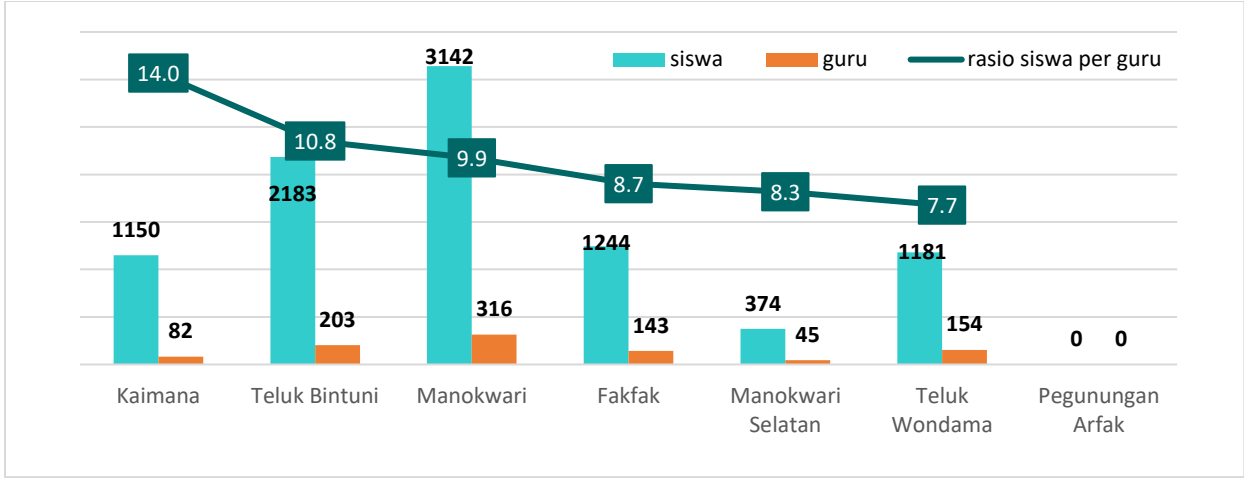


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Jika dihitung rasio guru per sekolah, secara keseluruhan tingkat provinsi diperoleh angka 3 guru per sekolah TK/RA. Di tingkat kabupaten, rasio guru per sekolah berkisar antara 3 guru (Teluk Wondama dan Teluk Bintuni) dan 4 guru (Fakfak, Kaimana, Manokwari dan Manokwari Selatan).

Jumlah peserta didik TK/RA di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 tercatat 9.274 anak, sehingga rasio jumlah siswa per sekolah di tingkat provinsi adalah 34 anak. Angka ini paling padat di Kabupaten Kaimana (61 siswa per sekolah), diikuti oleh Manokwari (38 siswa), Fakfak (35 siswa), Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan (masing-masing 31 siswa) dan paling rendah di Teluk Wondama (28 siswa).

Gambar II.34 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Siswa pada Tingkat PAUD di Provinsi Papua Barat 2022

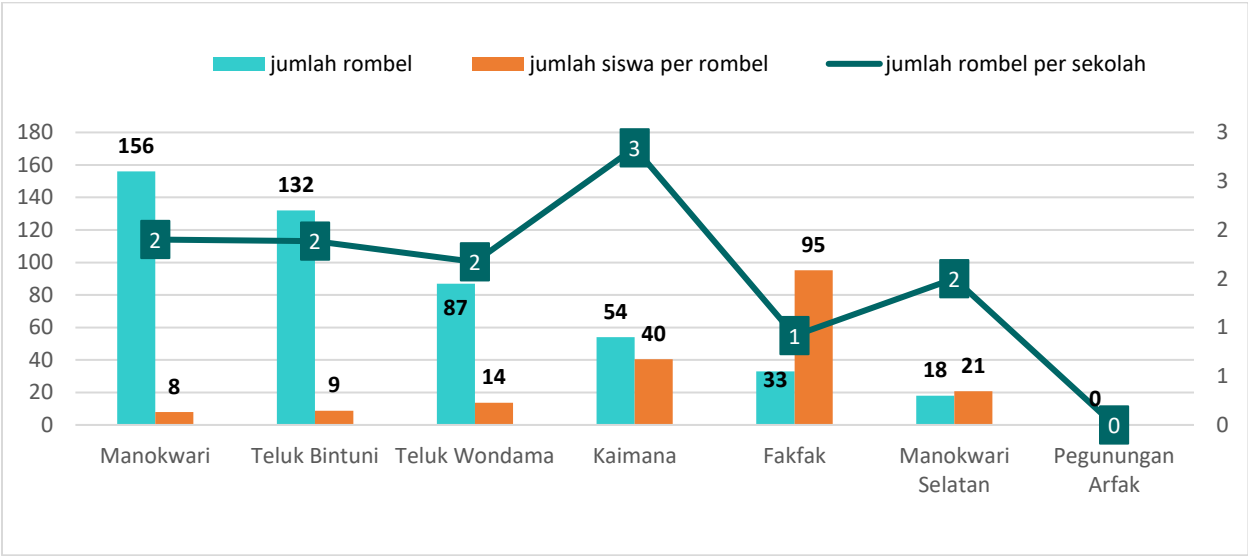


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Rasio guru terhadap anak didik TK/RA untuk tingkat provinsi terhitung 1 guru untuk 9,8 anak didik. Jumlah siswa TK/RA terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (3142 anak), namun rasio guru terhadap anak didik tertinggi di Kabupaten Kaimana, dengan perbandingan 1 guru untuk 14 anak. Gambar II.34 menampilkan jumlah anak didik, guru dan rasio guru terhadap

anak didik di masing-masing Kabupaten tahun 2022. Rasio ini sudah memenuhi standar nasional, yaitu minimal 1 guru untuk 15 anak didik pada PAUD usia 4-6 tahun.

Gambar II.35 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat PAUD di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Sedangkan jika dihitung berdasarkan Rombongan Belajar (Rombel), pada tingkat TK di Provinsi Papua Barat terdapat 480 Rombel (Dapodikdasmen, 2023), atau 2 rombel per sekolah. Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan pula angka terbanyak adalah 2 rombel per sekolah. Gambar II.35 yang menampilkan jumlah rombel, jumlah siswa per Rombel serta jumlah Rombel pr sekolah berdasarkan Kabupaten.

2.3.1.1.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

A. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

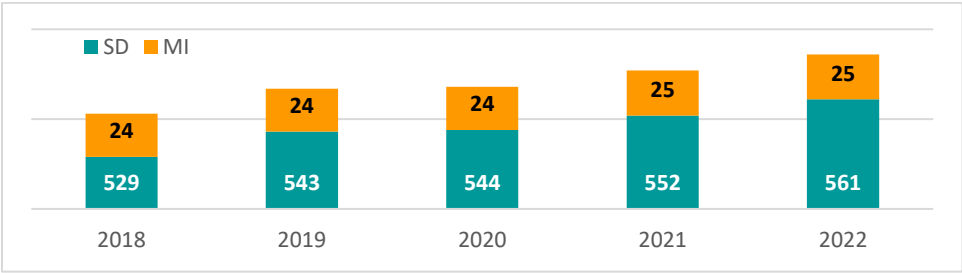
Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari sejumlah 553 SD/MI pada tahun 2018 menjadi 586 SD/MI tahun 2022. Gambar II.36 menunjukkan perkembangan jumlah SD dan MI di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2022, SD/MI terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (130 sekolah) dan paling sedikit di Manokwari Selatan (30 sekolah). Sebaran ini



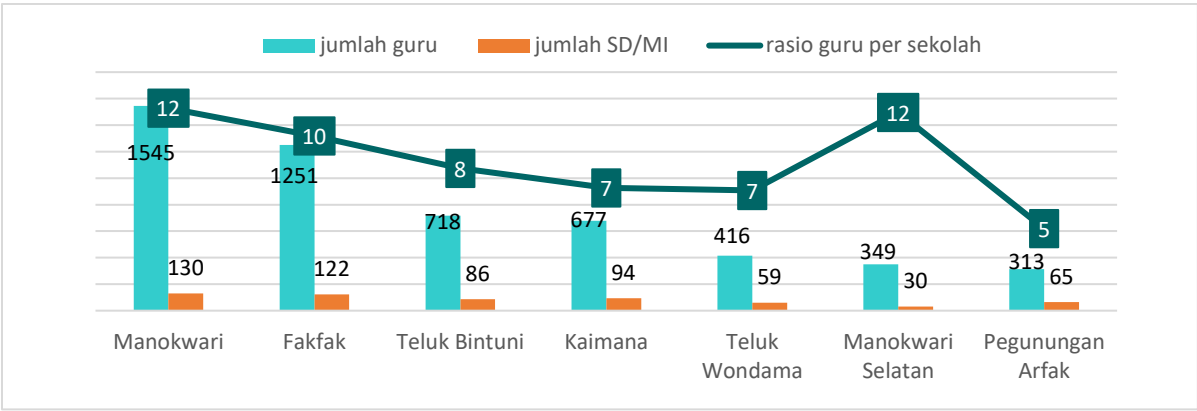
sebanding dengan distribusi jumlah penduduk di wilayah Provinsi Papua Barat. Sedangkan guru yang mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 5269 guru, terdiri dari 4974 guru SD dan 295 guru MI. Dengan jumlah ini, diketahui bahwa rasio guru terhadap sekolah dasar di Provinsi Papua Barat adalah 9 guru per sekolah. Jika dipilah per kabupaten, maka kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SD tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, yakni 12 guru untuk 1 sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 5 orang guru per sekolah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.37.

Gambar II.36 Perkembangan Jumlah SD dan MI di Papua Barat, 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019-2023

Gambar II.37 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



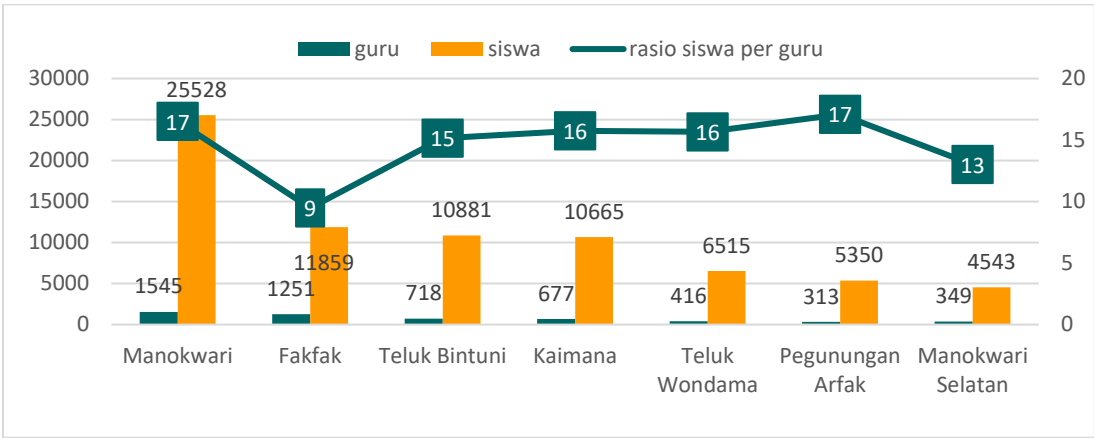
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Sedangkan kecukupan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 14 siswa untuk 1 guru atau 699 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SD terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MI 15:1.

Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak memiliki rasio guru : siswa yang tertinggi yakni 1055 guru untuk 10,000 siswa atau dengan rasio 8 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak, yakni masing-masing

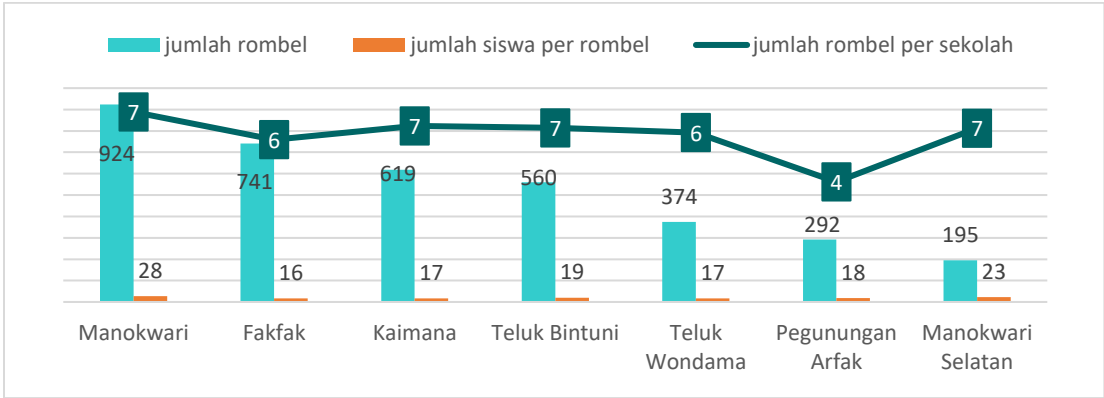
585 dan 605 untuk 10.000 siswa, atau masing-masing 17 siswa untuk 1 guru. Gambar II.20 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat.

Gambar II.38 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2019-2021 (Data diolah)

Gambar II.39 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

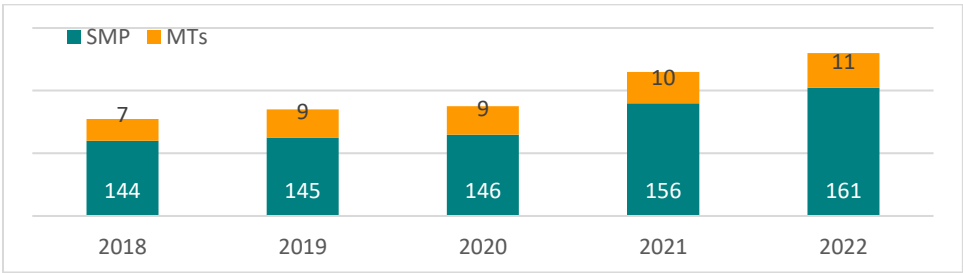
Dalam Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, indikator yang digunakan untuk menilai proses pendidikan yakni jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dalam tiap sekolah dan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan. Untuk tingkat SD, jumlah rombongan ideal adalah 6-24 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 28 anak. Untuk provinsi Papua Barat, rata-rata rombongan di tiap sekolah untuk tingkat SD/MI adalah 6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 20 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional.

Jika dipilah per kabupaten, hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memenuhi standar jumlah rombongan per sekolah (4 rombongan). Sedangkan mengenai jumlah siswa dalam 1 rombongan telah terpenuhi oleh semua SD/MI di semua kabupaten, dengan jumlah terbanyak peserta didik dalam 1 rombongan di Kabupaten Manokwari (28 siswa) (lihat Gambar II.39).

B. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Provinsi Papua Barat juga bertambah dalam 5 tahun terakhir, dari sejumlah 151 SMP/MTs pada tahun 2018 menjadi 172 SMP/MTs tahun 2022. Gambar II.40 menunjukkan perkembangan jumlah SMP dan MTs di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

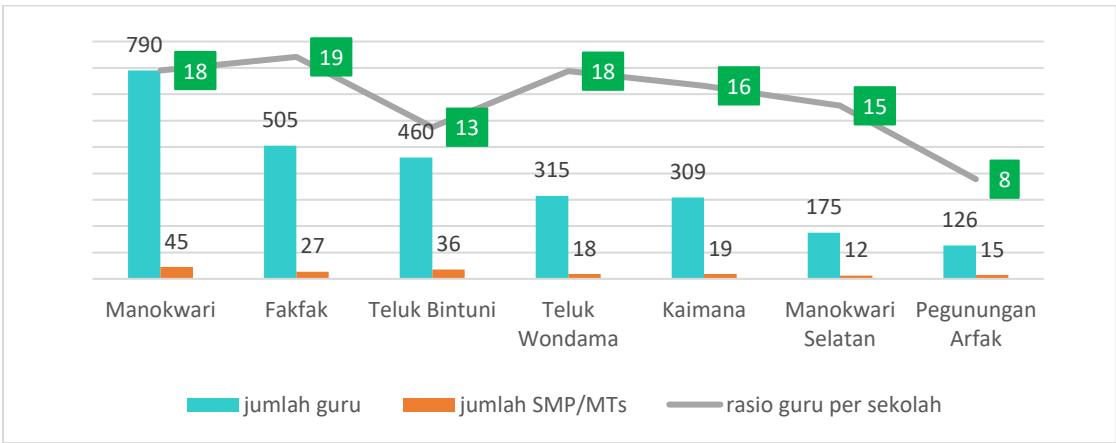
Gambar II.40 Perkembangan Jumlah SMP dan MTs di Papua Barat, 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019-2023

SMP/MTs di tahun 2022 terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (45 sekolah) dan paling sedikit di Manokwari Selatan (12 sekolah). Jumlah guru yang SMP/MTs mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 2680 guru, terdiri dari 2518 guru SMP dan 162 guru MTs. Dengan jumlah ini, terhitung rasio guru : sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Barat adalah 16 guru untuk 1 sekolah. Pemilahan kabupaten menunjukkan kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SMP/MTs tertinggi terdapat di Kabupaten Fakfak, yakni 19 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 8 orang guru per sekolah (lihat Gambar II.41).

Gambar II.41 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

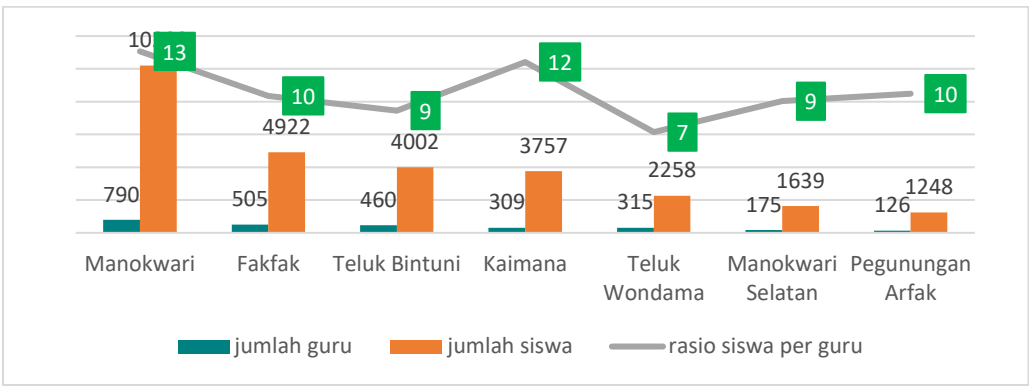
Sedangkan ketersediaan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 10 siswa untuk 1 guru atau 956



guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMP terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MTs 15:1

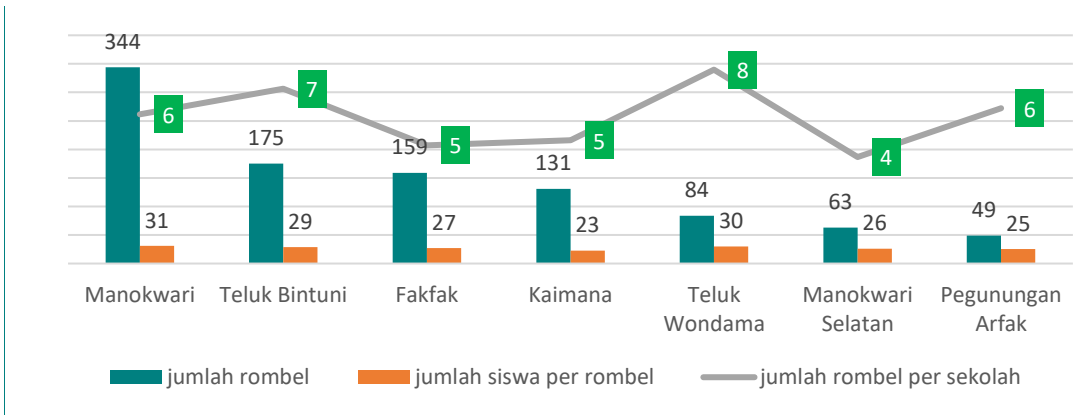
Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Teluk Wondama memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi yakni 1149 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 7 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Manokwari, yakni 774 untuk 10.000 siswa, atau 13 peserta didik untuk 1 guru. Gambar II.20 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Gambar II.42 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Gambar II.43 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Jumlah rombongan ideal untuk tingkat SMP/MTs berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-33 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 32 anak. Untuk provinsi Papua Barat, rata-rata rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMP/MTs Tahun 2022 adalah 6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 28 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional.



Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa semua kabupaten di Provinsi Papua Barat memenuhi standar jumlah rombel per sekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombel pada tingkat SMP/MTs. Kabupaten dengan jumlah rombel terbanyak terbanyak adalah Teluk Wondama dengan 8 rombel per sekolah. Sedangkan peserta didik terbanyak dalam 1 rombel terdapat di Kabupaten Manokwari (31 siswa).

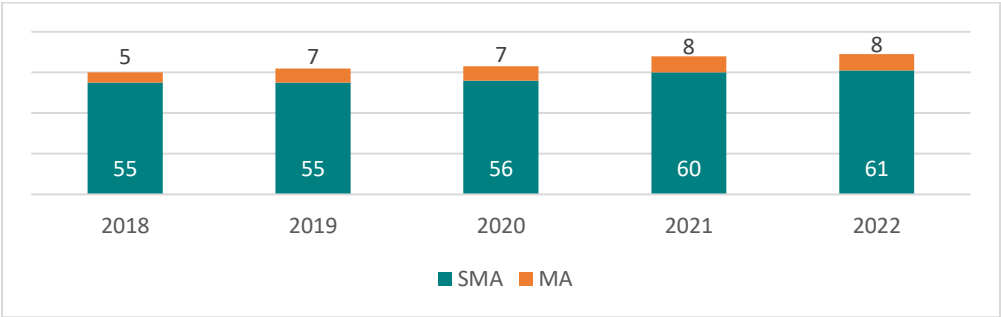
2.3.1.1.3 Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

A. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah

Seperti pada jenjang pendidikan di bawahnya, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir juga meningkat, dari 60 SMA/MA pada tahun 2018 menjadi 69 SMA/MA tahun 2022. Gambar II.44Gambar II.45 menunjukkan perkembangan jumlah SMP dan MTs di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

Gambar II.44 Perkembangan Jumlah SMA dan MA di Papua Barat, 2018-2022



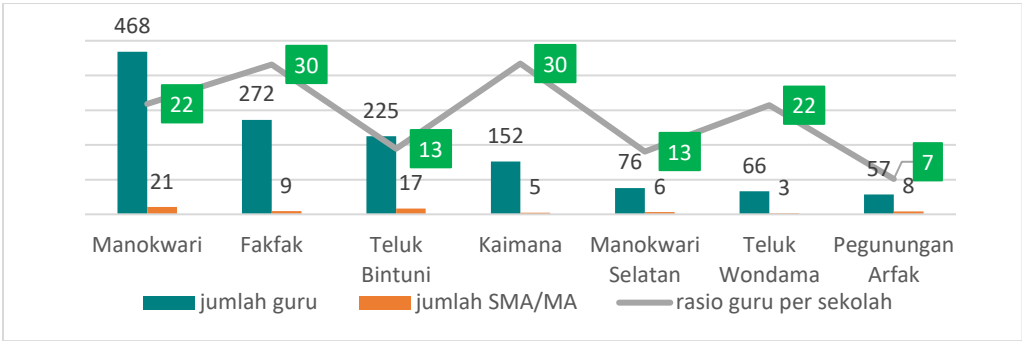
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019-2023

Jumlah SMA/MA terbanyak di tahun 2022 terdapat di Kabupaten Manokwari (21 sekolah) dan paling sedikit di Teluk Wondama (3 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat jumlah guru SMA/MA sebanyak 1316 guru, terdiri dari 1179 guru SMA dan 137 guru MA. Dengan jumlah ini, rasio guru terhadap sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Barat adalah 19 orang guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per sekolah di tingkat SMA/MA tertinggi terdapat di Kabupaten Fakfak dan Kaimana, yakni masing-masing 30 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 7 orang



guru per sekolah. Gambar II.45 menunjukkan sebaran SMA/MA dan gurunya di Provinsi Papua Barat tahun 2022.

Gambar II.45 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022

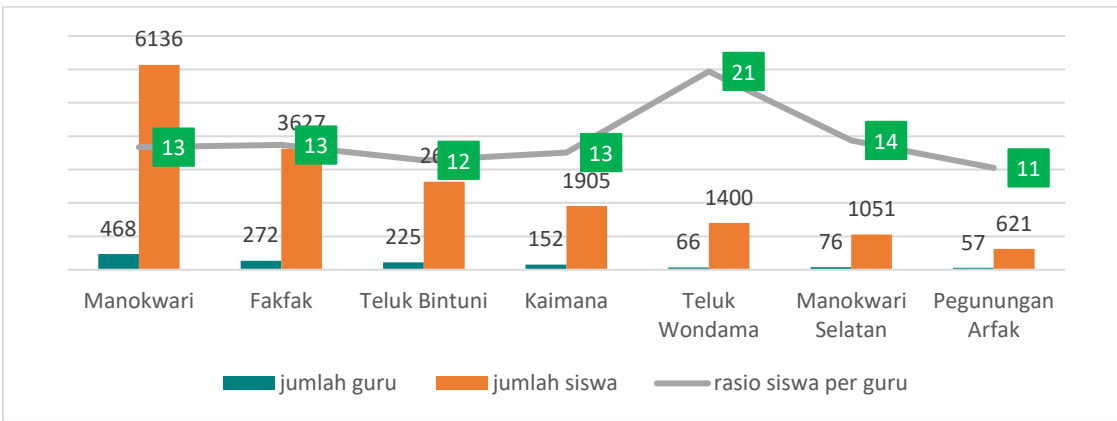


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 13 siswa untuk 1 guru atau 757 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMA terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MA 15:1

Kabupaten yang memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi adalah tercatat Kabupaten Pegunungan Arfak yakni 918 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 7 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Teluk Wondama, yakni 471 untuk 10.000 siswa, atau 21 peserta didik untuk 1 guru. Sebaran guru, siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat ditunjukkan pada Gambar II.46.

Gambar II.46 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

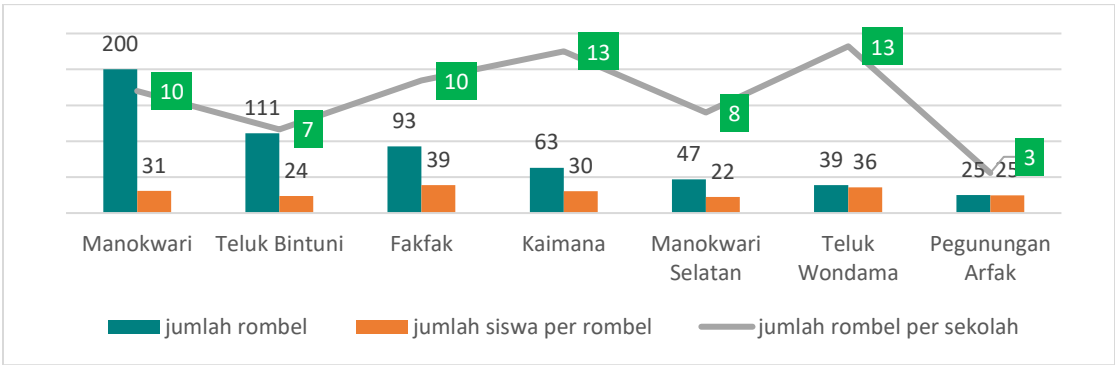
Standar jumlah rombel untuk tingkat SMA/MA berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-36 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombel maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 telah memenuhi standar



nasional, dengan rata-rata rombel di tiap sekolah pada tingkat SMA/MA adalah 8 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombel sebanyak 30 orang.

Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua Barat memenuhi standar jumlah rombel per sekolah namun terdapat 1 kabupaten yang jumlah siswanya dalam 1 rombel belum mencapai standar nasional yaitu kabupaten Fakfak (jumlah peserta didik 39 orang dalam 1 rombel). Kabupaten dengan jumlah rombel terbanyak terbanyak adalah Kaimana dan Teluk Wondama yaitu masing-masing 13 rombel per sekolah. Gambar II.47 menunjukkan informasi selengkapnya.

Gambar II.47 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2022



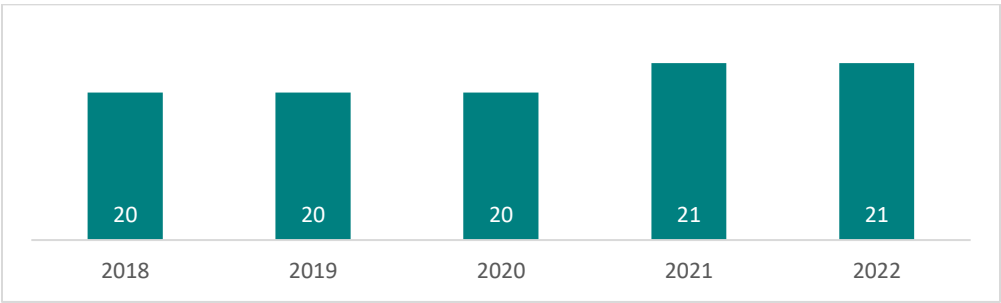
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

B. Sekolah Menengah Kejuruan

Berbeda dengan jenjang dan jenis sekolah lainnya, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir relatif tetap, hanya terdapat penambahan 1 sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun Ajaran 2021-2022. Dalam wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 terdapat 20 SMK, dan pada tahun 2022 menjadi 21 SMK. Gambar II.45 menunjukkan perkembangan jumlah SMK di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

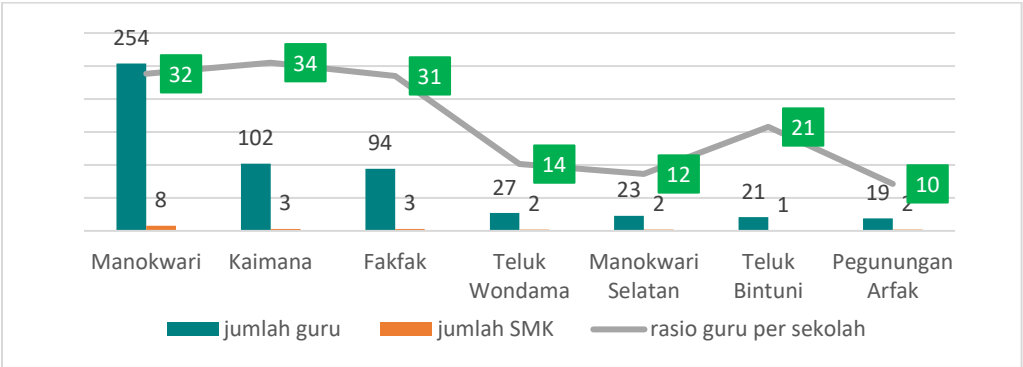
SMK terbanyak di tahun 2022 terdapat di Kabupaten Manokwari (8 sekolah), sementara di Kabupaten lain hanya terdapat 1- 3 SMK; paling sedikit di Teluk Bintuni (1 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat jumlah guru SMK sebanyak 540 orang. Dengan jumlah ini, rasio guru SMK di Provinsi Papua Barat adalah 26 guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Kaimana, yakni 34 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 10 guru per sekolah. Gambar II.48 menunjukkan sebaran SMK dan gurunya di Papua Barat tahun 2022.

Gambar II.44 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Barat, 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019-2023

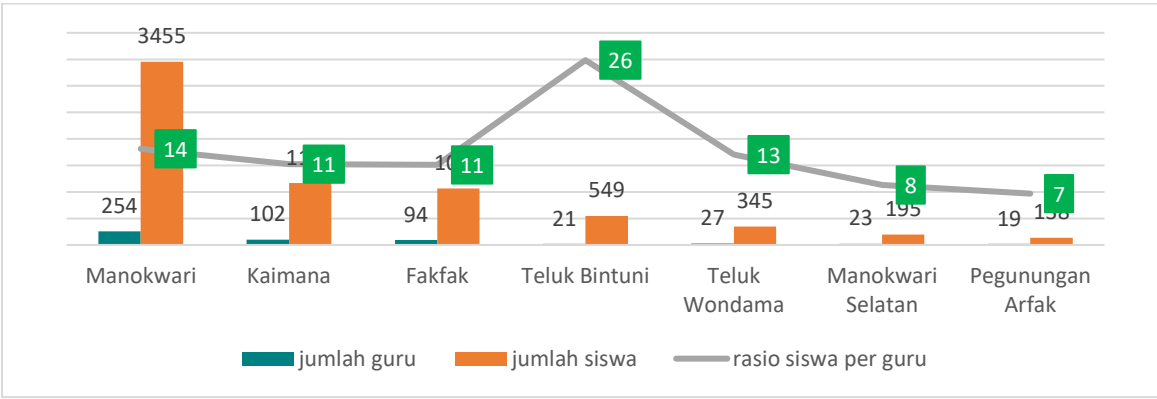
Gambar II.48 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Kecukupan jumlah guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 13 siswa untuk 1 guru atau 781 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMK terhadap gurunya adalah 15:1

Gambar II.49 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

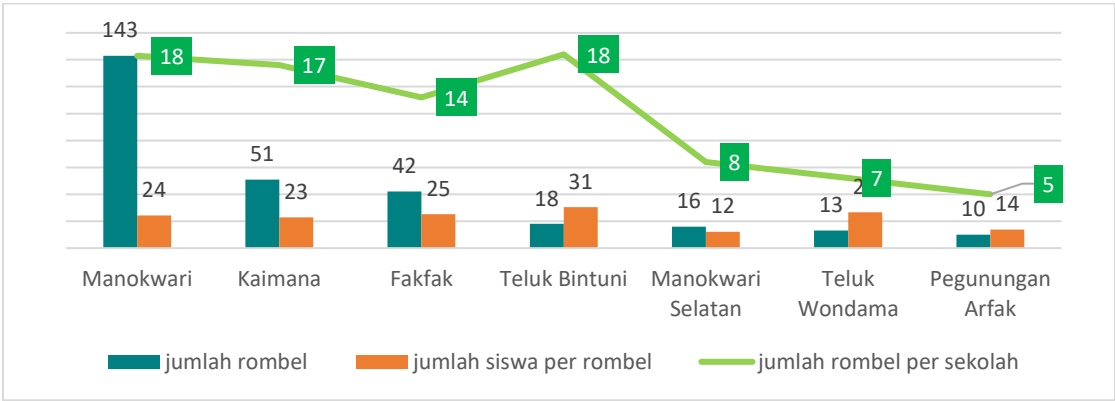
Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi yakni 1377 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 7 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio



terendah terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni 383 untuk 10.000 siswa, atau 26 peserta didik untuk 1 guru. Gambar II.49 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat.

Standar jumlah rombel untuk tingkat SMK berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-72 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombel maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 telah memenuhi standar nasional, dengan jumlah rombel di tiap sekolah pada tingkat SMK adalah 14 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombel sebanyak 24 orang.

Gambar II.50 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua Barat memenuhi standar jumlah rombel per sekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombel. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki jumlah rombel terbanyak terbanyak (18 rombel) dengan peserta didik 31 orang dalam 1 rombel. Kabupaten dengan jumlah rombel paling sedikit adalah Pegunungan Arfak (5 rombel). Gambar II.50 menunjukkan jumlah rombel serta rasionya terhadap siswa dan sekolah per kabupaten.

2.3.1.1.4 Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Barat berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada 1 sekolah, bertempat di Kabupaten Manokwari. Jumlah peserta didik di sekolah ini 42 orang, terdiri dari masing-masing 21 laki-laki dan perempuan (Dapodikdasmen 2023), dengan jumlah guru sebanyak 8 orang. Dengan demikian di sekolah ini rasio 1 guru untuk 2-3 peserta didik. Jumlah rombongan belajar adalah 6 rombel (Dapodik Kemendikbudristek



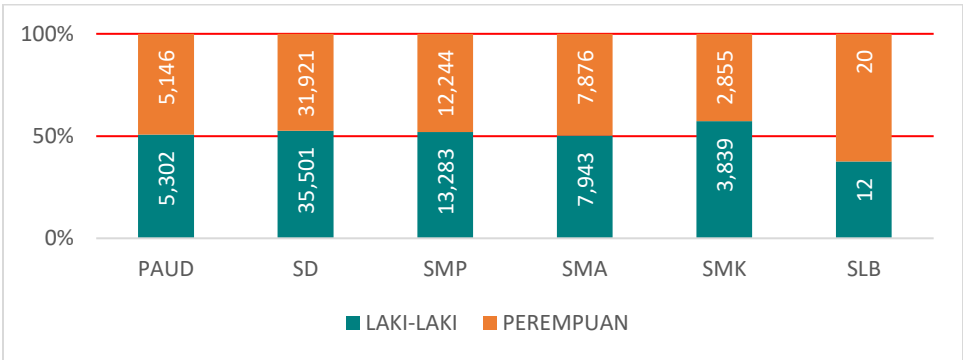
2023), sehingga jumlah peserta didik per rombel adalah 3-4 orang. SLB ini tidak tercantum dalam data akreditasi BANSM Kemendikbud

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021, Angka Partisipasi Pendidikan Khusus di Papua Barat sebelum pemekaran dengan penerima layanan penyandang disabilitas pada tahun 2021 adalah sebesar 63,28%. Data untuk empat tahun terakhir lainnya (2017-2020) tidak tersedia.

2.3.1.1.5 Partisipasi Sekolah

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), diketahui bahwa jumlah peserta didik mengalami penurunan dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Data ini menunjukkan adanya sejumlah peserta didik yang putus sekolah terutama dari jenjang SD ke SMP. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, proporsi peserta didik laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan di tahun ajaran 2021-2022, kecuali pada sekolah SLB. Gambar II.51 menunjukkan pertambahan jumlah peserta didik di Provinsi Papua Barat berdasarkan jenjang/ jenis pendidikan serta proporsinya berdasarkan jenis kelamin.

Gambar II.51 Jumlah Peserta Didik pada Tiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin, Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Data APS terkini untuk Provinsi Papua Barat yang tersedia adalah data tahun 2021, yang rangkumannya ditunjukkan pada Tabel II.32.

Dari Tabel II.32 nampak bahwa APS makin menurun dengan bertambah tingginya usia jenjang pendidikan. Dari APS anak usia 7-12 tahun yang setara dengan pendidikan sekolah dasar sebesar 96,96% sedikit menurun di kelompok usia 13-15 tahun (setara usia SMP), kemudian menurun cukup



banyak di usia 16-18 tahun (usia SMA) hingga makin rendah pada usia 19-24 tahun (usia pendidikan tinggi) yang hanya 24,54%.

Tabel II.32 Angka Partisipasi Sekolah, Provinsi Papua Barat, 2021

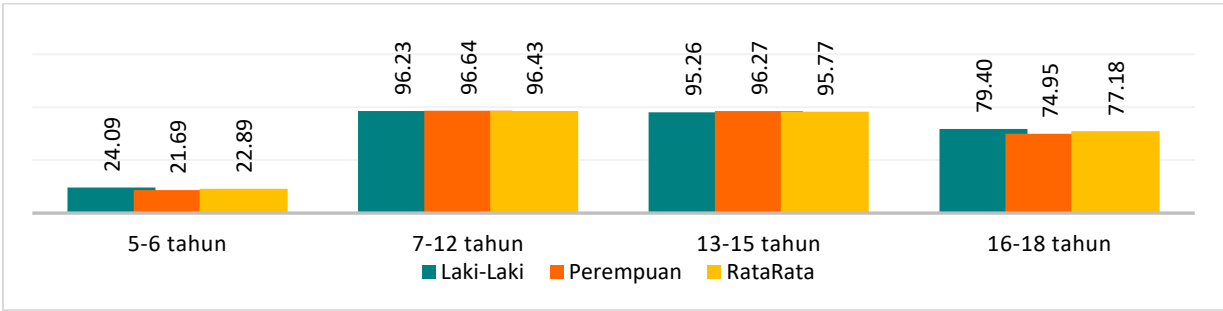
Kabupaten	7-12 tahun	13 – 15 tahun	16 – 18 tahun	19 – 24 tahun
Fakfak	99.48	98.47	89.58	44.43
Kaimana	98.65	98.55	75.46	16.25
Teluk Wondama	97.67	96.48	71.37	13.2
Teluk Bintuni	96.73	95.92	71.87	20.26
Manokwari	96.94	96.14	85.93	29.95
Manokwari Selatan	94.49	93.95	66.96	30.14
Pegunungan Arfak	94.79	93.52	77.92	17.58
Rata-Rata	96.96	96.15	77.01	24.54

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Sumber data di atas tidak mencakup usia PAUD. Namun data dari KemenPPPA dalam Profil Anak Indonesia 2017-2020 menyebutkan persentase anak usia 0-6 Tahun yang sedang mengikuti PAUD terhadap total anak 0-6 tahun di Provinsi Papua barat sebelum dimekarkan pada tahun 2019 sebesar 20,71%. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 27,22%. Namun keikutsertaan anak ini telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni 13,83% di tahun 2017 dan 15,59% tahun 2018

Sedangkan data APS berdasarkan kabupaten terpilah jender yang terakhir adalah data BPS untuk APS tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. APS laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada kelompok umur 5-6 tahun dan 16-18 tahun, sedangkan pada 2 kelompok umur pendidikan lainnya, APS perempuan lebih tinggi. APS berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata di 7 kabupaten ditunjukkan pada Gambar II.52.

Gambar II.52 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Pemilahan APS terpilah gender berdasarkan kabupaten ditampilkan pada Tabel II.33. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa kabupaten, terutama pada kelompok umur 13-15 tahun.

Tabel II.33 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019

Kabupaten	5-6 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Fakfak	21.49	14.07	99.51	97.58	99.79	95.62	90.36	89.19
Kaimana	28.04	21.53	97.93	99.18	97.81	99.55	82.81	64.38
Teluk Wondama	35.17	24.37	98.14	96.4	95.57	98.48	69.41	73.74
Teluk Bintuni	12.56	21.63	92.88	98.83	94.47	96.69	71.19	72.18
Manokwari	19.39	30.54	98.18	92.28	94.68	98.59	78.59	97.11
Manokwari Selatan	25.37	29.03	93.04	94.38	96.41	87.71	70.48	61.82
Pegunungan Arfak	26.61	10.65	93.92	97.81	88.07	97.27	92.97	66.22
Rata-Rata	24.09	21.69	96.23	96.64	95.26	96.27	79.40	74.95

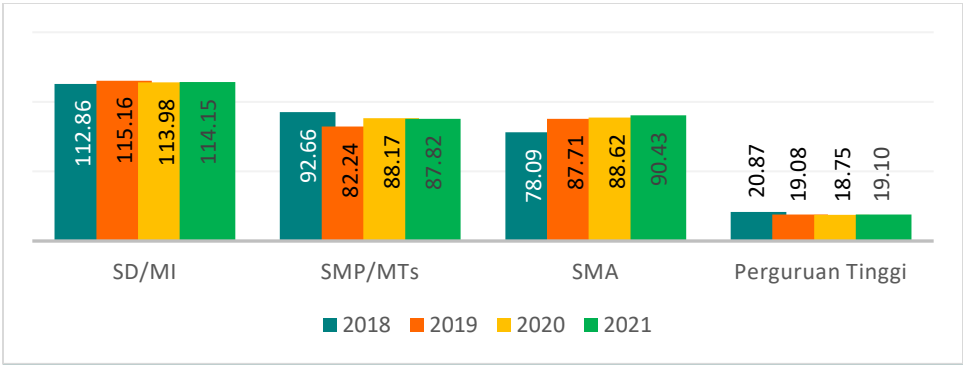
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.1.5 Angka Partisipasi Kasar

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Gambar II.53 menunjukkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Papua Barat pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat hingga Perguruan Tinggi. Dari gambar tersebut, nampak bahwa APK pada jenjang SD/MI dan SMA/MA meningkat di tahun 2021 dibandingkan tahun 2018, sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan Perguruan tinggi justru menurun.

Angka di atas 100% pada APK SD/MI menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peserta didik pada jenjang SD/MI yang usianya di luar usia sekolah pada jenjang ini. Tidak tersedia data terpisah jender mengenai APK di kabupaten-kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat.

Gambar II.53 Rata-Rata APK dari 7 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2018-2021



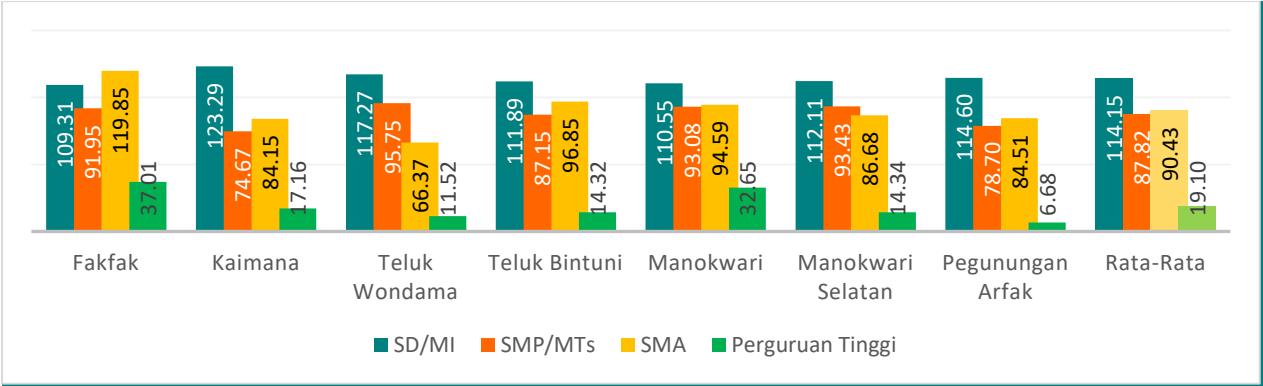
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Perbandingan APK antar kabupaten menggunakan data terakhir (Tahun 2021) menunjukkan dua pola pada 2 kelompok kabupaten; kelompok pertama menunjukkan APK yang makin rendah dengan makin tingginya jenjang pendidikan, yakni Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan. Kelompok kabupaten lainnya (Fakfak, Kaimana, Manokwari dan pegunungan Arfak) menunjukkan adanya kenaikan APK pada jenjang SMA/MA dibandingkan SMP/MTs. Dengan membandingkan APK dengan Angka



Partisipasi Murni (bahasan di bawah) dapat diartikan bahwa lebih tingginya APK di tingkat SMA/MA ini menunjukkan adanya peserta didik yang berusia di luar jenjang usia pendidikan tersebut di 4 kabupaten itu.

Gambar II.54 APK Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021

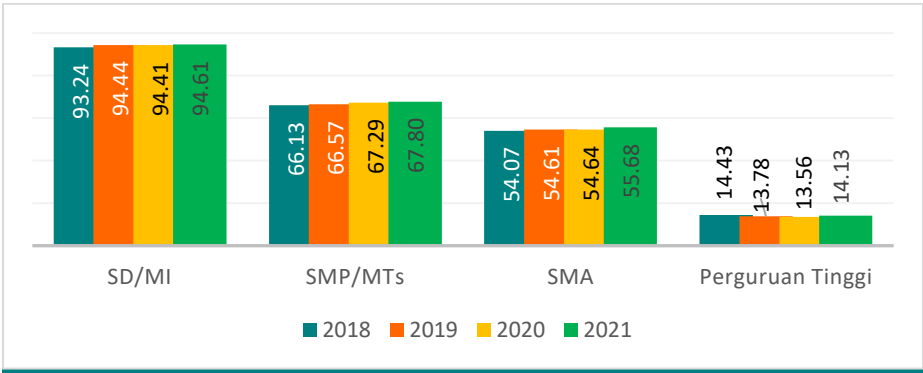


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.1.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa yang bersekolah pada satu jenjang pendidikan dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Indikator ini bermanfaat untuk menilai proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Perbandingan APM rata-rata dari 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya APM pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun terjadi penurunan APK pada jenjang pendidikan tinggi. Gambar II.55 menunjukkan perkembangan APM pada masing-masing jenjang pendidikan dalam kurun waktu 2018-2021.

Gambar II.55 Rata-Rata APM dari 7 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2018-2021



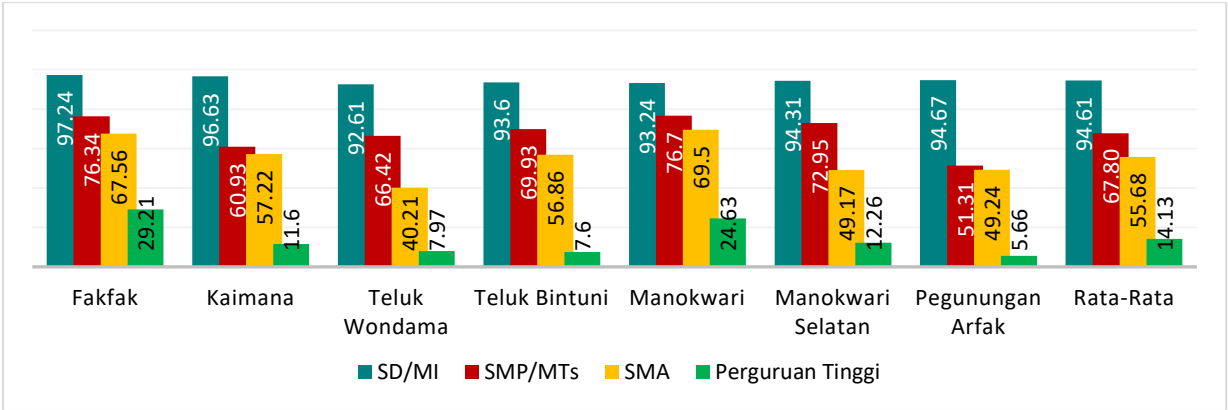
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Perbandingan APM antar kabupaten tahun 2021 menunjukkan pola yang sama yakni APM yang makin rendah dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI semua kabupaten menunjukkan angka yang



tinggi, dengan capaian paling rendah sebesar 92,61% di Kabupaten Teluk Wondama. Terjadi penurunan yang cukup tajam yang sama di semua kabupaten yakni dari jenjang SD ke SMP dan dari SMA ke Perguruan Tinggi. Gambar II.56 menunjukkan perbandingan APM antar kabupaten pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2021.

Gambar II.56 APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.1.7 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun data yang disajikan pada Tabel II.53 merupakan angka provinsi Papua Barat sebelum pemekaran berupa Angka putus sekolah anak berumur 7-17 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Angka di 7 kabupaten Provinsi Papua Barat pasca pemekaran diasumsikan tidak jauh berbeda dengan angka provinsi sebelum pembentukan DOB.

Tabel II.53 Angka Putus Sekolah Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin

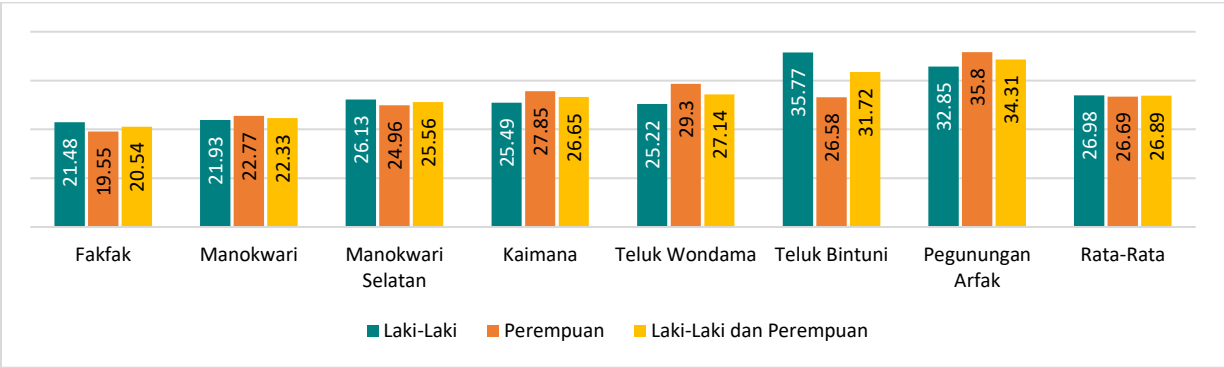
INDIKATOR	2016	2017	2018
Laki-laki	1,51	0,75	0,98
Perempuan	0,85	1,24	1,23
TOTAL	1,18	0,98	1,11

Sumber: KemenPPPA dalam Profil Anak Indonesia, 2017-2019

Dengan tidak adanya data terpilah kabupaten mengenai Angka Putus Sekolah, digunakan persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi. Kelemahannya persentase ini tidak bisa memilah keputussekolahan pada masing-masing jenjang pendidikan. Gambar II.57 di bawah menunjukkan Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke AtasTidak Bersekolah Lagi



Gambar II.57 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten, 2022



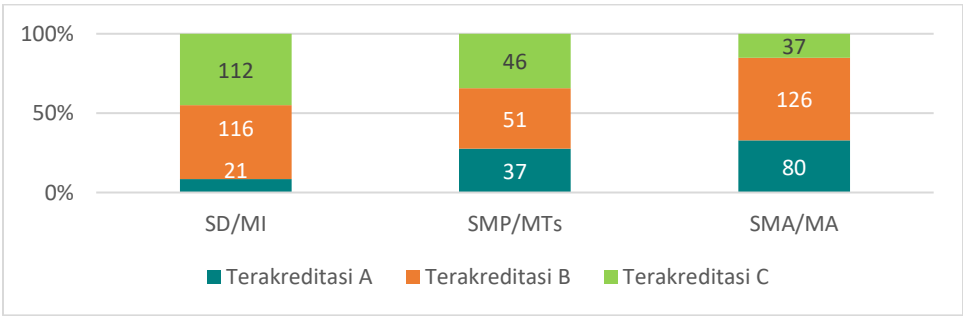
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Dati gambar di atas nampak bahwa persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi paling tinggi angkanya di Kabupaten Pegunungan Arfak, terutama pada penduduk perempuan. Sedangkan penduduk usia sekolah laki-laki yang tidak bersekolah lagi tertinggi persentasenya di Kabupaten Teluk Bintuni.

2.3.1.1.8 Akreditasi Sekolah

Berdasarkan data Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah dapat diketahui jumlah sekolah yang telah terakreditasi pada penilaian tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Barat (liha Gambar II.58). Mayoritas sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Papua Barat berada dalam akreditasi B. Adapun data terkompilasi mengenai akreditasi sekolah terpilah kabupaten setelah pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi 2 provinsi tidak dapat ditampilkan berhubung pemilahan jenjang dan jenis sekolah berdasarkan status akreditasinya pada BANSM Kemedikbud per kabupaten belum tersusun.

Gambar II.58 Peringkat Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran, Tahun Penilaian 2021



Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2022 – BANSM kemdikbud.go.id

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

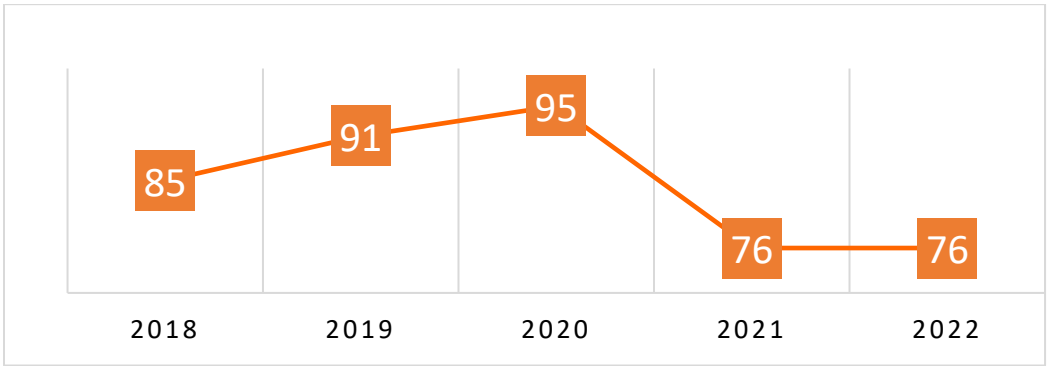


promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Praktik Perseorangan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium, Rumah Sakit, Upaya Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dalam uraian berikut, fasilitas yang dibahas adalah puskesmas, rumah sakit, dan Ketersediaan Obat dan Vaksin (sebagai bagian dari Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan), serta UKBM.

A. Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Papua Barat sebelum pembentukan DOB sampai dengan tahun 2021 tercatat 162 Puskesmas, dengan 70 Puskesmas di antaranya telah terakreditasi atau mencakup 43,21%. Separuh dari puskesmas yang terakreditasi itu (34 puskesmas) terakreditasi Dasar, Sementara 31 lainnya terakreditasi Madya dan 5 terakreditasi Utama. (*LAKIP Dinkes Provinsi Papua Barat 2021*). Jika dipilah per kabupaten setelah pemekaran provinsi, di 7 kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat, jumlah puskesmas mengalami penurunan sejalan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena perbaikan data dengan mengeluarkan sejumlah puskesmas yang belum teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI. Gambar II.25 menunjukkan perkembangan jumlah puskesmas di 7 kabupaten di Provinsi Papua barat sejak 2018 hingga 2022. Jumlah puskesmas di Provinsi Papua Barat tahun 2022 berjumlah 76 unit, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni (4 rawat inap dan 16 nonrawat inap). Distribusi per kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.59.

Gambar II.59 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Barat



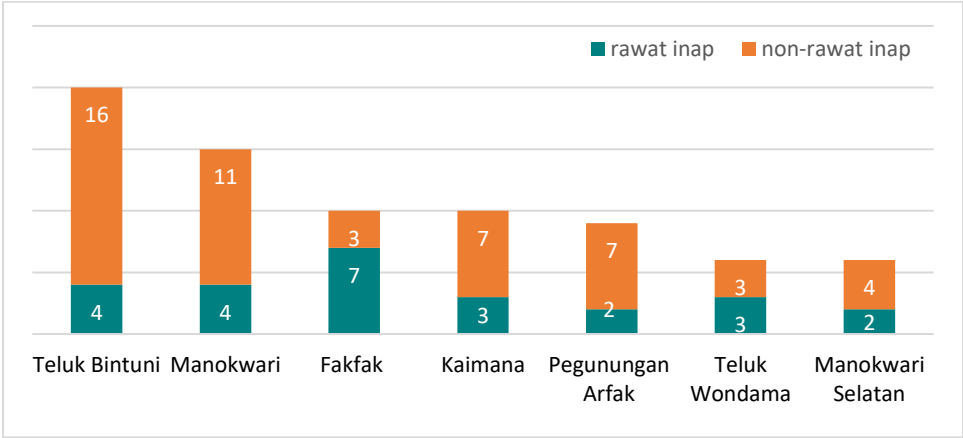
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Dengan mengacu pada data BPS, rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Barat adalah 1 : 7.387 penduduk. Rasio ini sangat baik dibandingkan standar nasional yakni minimal 1 puskesmas untuk 16.000



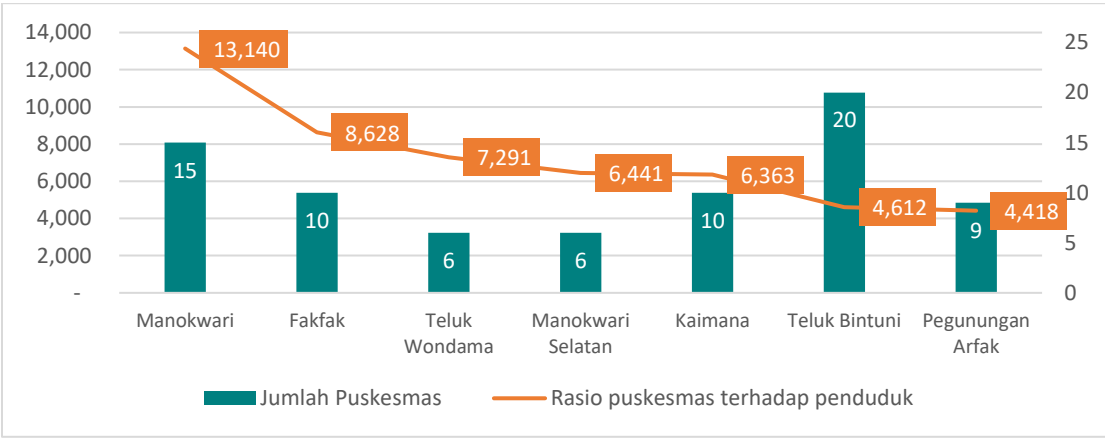
penduduk. Jika dilihat per kabupaten, semua kabupaten telah memenuhi standar nasional (lihat Gambar II.61).

Gambar II.60 Distribusi Puskesmas Setiap Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Gambar II.61 Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

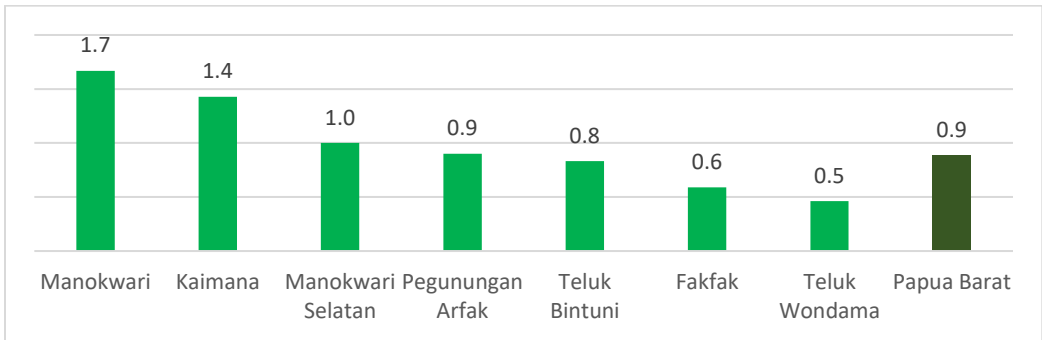


Sumber: Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Meskipun rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat tergolong sangat baik, namun diketahui kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi masih merupakan hambatan terhadap aksesibilitas penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan puskesmas.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan Puskesmas terhadap distrik di Papua Barat pada tahun 2022 sebesar 0,9. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap distrik yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 distrik, di tingkat provinsi hampir terpenuhi. Tetapi jika diperhatikan distribusi Puskesmas tersebut di tingkat kabupaten, hanya 3 kabupaten yang rasionya telah mencapai standar nasional, yakni Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Manokwari Selatan. Pada Gambar II.62 dapat dilihat rasio puskesmas per jumlah distrik di masing-masing kabupaten.

Gambar II.62 Rasio Puskesmas per Distrik Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022

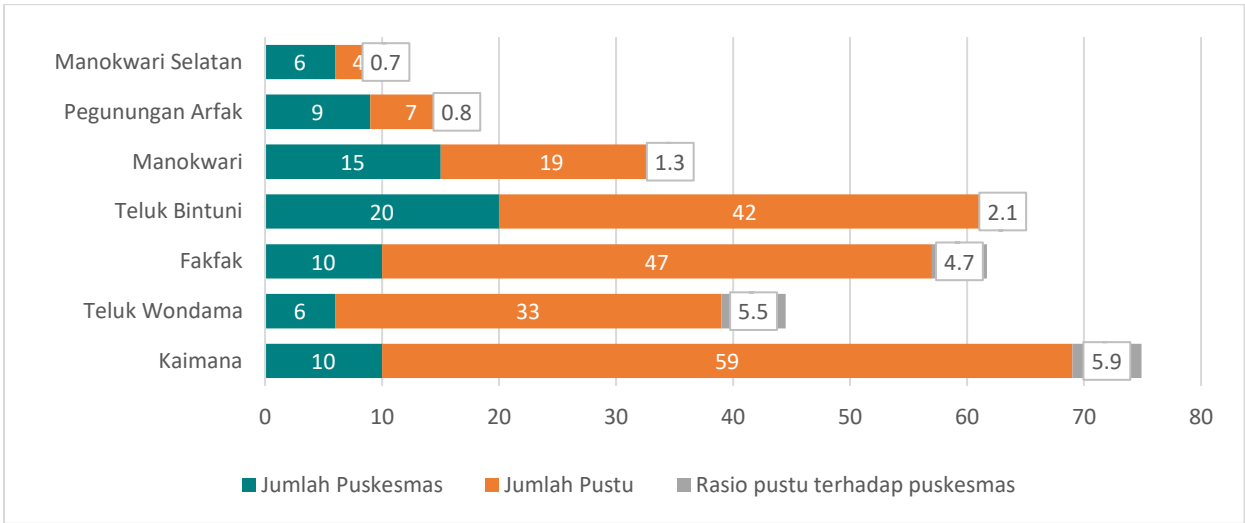


Sumber: Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Puskesmas Pembantu

Data BPS menunjukkan jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran meningkat dari 383 unit di tahun 2017, menjadi 419 unit di tahun 2020. Setelah pemekaran, jumlah posyandu di 7 kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat berjumlah 211 pustu. Jumlah ini menghasilkan rasio keseluruhan di tingkat provinsi sebesar 1 puskesmas : 2,8 puskesmas pembantu. Sedangkan jika dipilah per kabupaten, diketahui bahwa hanya di kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak terdapat puskesmas tanpa puskesmas pembantu (rasio puskesmas : puskesmas pembantu kurang dari 1). Gambar II.63 menunjukkan rasio tersebut per kabupaten.

Gambar II.63 Rasio Puskesmas Pembantu per Puskesmas Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Puskesmas dengan Kecukupan SDM Kesehatan

Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2020 menyebutkan secara nasional terdapat 6,9% puskesmas tanpa dokter. Sebelum pembentukan DOB, Provinsi Papua Barat berada di urutan kedua tertinggi setelah Provinsi Papua dengan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 42,07% dari 154 puskesmas yang terdaftar.





Data terakhir SISDMK (31 Desember 2021) juga menunjukkan bahwa belum ada puskesmas di Provinsi Papua Barat yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut. Secara nasional, cakupan puskesmas dengan ketersediaan 9 jenis nakes sesuai standar baru mencapai 39,6% dari seluruh puskesmas di Indonesia. Sementara itu pemenuhannya di puskesmas di kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat kesemuanya masih di bawah 50%.

Puskesmas yang Menjalankan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah raga

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan Kesehatan Kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja, dan dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja.

Kesehatan kerja termasuk dalam indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020, yakni dengan mengukur persentase kabupaten yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Satu kabupaten/kota dinyatakan melaksanakan kedua upaya kesehatan ini jika puskesmas melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, masing-masing minimal 30%. Capaian nasional pada tahun 2020 (Profil Kesehatan Indonesia 2021), 64% kabupaten/kota di Indonesia sudah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja, dan 37,5% melaksanakan kesehatan olahraga. Hingga tahun 2021, belum ada kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memenuhi kriteria melaksanakan kesehatan kerja maupun kesehatan olahraga.

B. Rumah Sakit

Terdapat 11 rumah sakit di Provinsi Papua Barat, yang 8 di antaranya merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang di antaranya terdapat 4 di Manokwari, dan masing-masing 1 di Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Di antara 8 RS tersebut, 6 di antaranya sudah terakreditasi, sebagian besar dengan tingkat Perdana. Nama serta kelas dan akreditasi ke-8 RS di Provinsi Barat terdapat dalam Tabel II.34.



Tabel II.34 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat

Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
Manokwari	1. RSUD Kabupaten Manokwari	C	Utama
	2. RSUD Provinsi Papua Barat	C	
	3. RSAL Dr. Azhar Zahir	D	Perdana
	4. RS Bhayangkara Lodewijk Mandatjan	D	
Fakfak	RSUD Kabupaten Fakfak	C	Perdana
Kaimana	RSUD Kabupaten Kaimana	D	Perdana
Teluk Wondama	RSUD Kabupaten Teluk Wondama	D	Perdana
Teluk Bintuni	RSUD Kabupaten Teluk Bintuni	C	Paripurna

Sumber: LAKIP Dinkes Provinsi Papua Barat, 2021 (diolah)

Selain 8 RS di atas, 3 rumah sakit lainnya berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana terdapat dalam Tabel II.35.

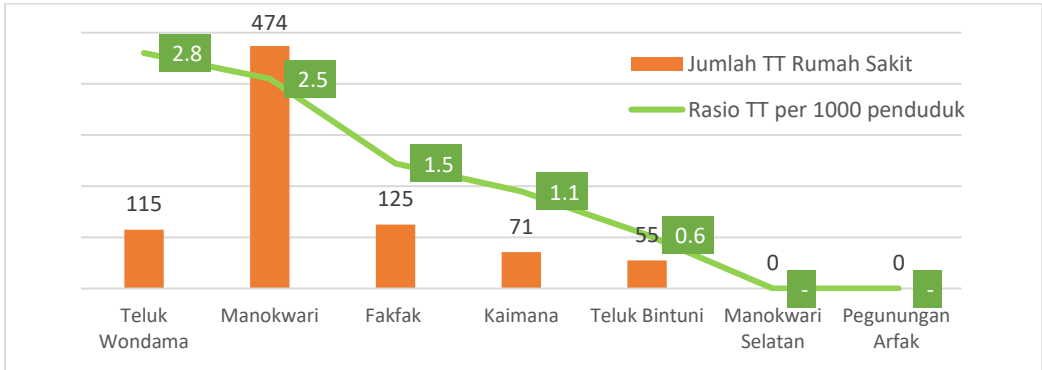
Tabel II.35 Rumah Sakit yang Berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Papua Barat

Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
Manokwari	RS Tk.IV J.A. Dimara		
	RS Pratama Warmare	D Pratama	
Manokwari Selatan	RS Pratama Elia Waran	D Pratama	

Sumber: LAKIP Dinkes Provinsi Papua Barat, 2021 (diolah)

Kabupaten yang tidak tercantum dalam daftar di atas adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Pembangunan dan pengadaan sarana RS di Pegunungan Arfak telah siap sebagai RS Kelas D Pratama, namun hingga awal tahun 2022 belum beroperasi. Di antara ke-11 rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat, 8 di antaranya (73%) diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemprov, dan Pemkab) dan 3 oleh TNI-Polri.

Gambar II.64 Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 (diolah)

Indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Menurut data Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019, seluruh tempat tidur RS di Papua Barat berjumlah 1786 Tempat Tidur, atau 1,6 Tempat Tidur per 1000 penduduk. Rasio ini melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun





jika dipilah per kabupaten, selain 4 kabupaten yang belum memiliki RS sebagai FKTL, rasio TT per 1000 penduduk yang di bawah 1 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni.

C. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Upaya peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan bertujuan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator sasaran strategis untuk mengukur capaian upaya ini yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 menunjukkan capaian puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 92,1%, yang telah melampaui target nasional sebesar 85%. Demikian pula Provinsi Papua Barat sebelum pembentukan DOB telah mencapai cakupan di atas target nasional, yakni sebesar 89,9%. Sedangkan persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat esensial secara nasional mencapai adalah 83,8%, (di atas target nasional 77%). Indikator ini menunjukkan persentase kabupaten yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan. Provinsi Papua Barat sebelum dimekarkan menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni 91,7% kabupaten/ kota memiliki ketersediaan obat esensial.

Cakupan Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) diukur dengan menggunakan persentase Puskesmas yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG (Bacillus Calmette-Guérin), Vaksin DPT-HB-HIB (Difteri, Pertusis, Tetanus - Hepatitis B - Haemophilus Influenza tipe B), Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Target nasional adalah 90% puskesmas di Indonesia memiliki ketersediaan vaksin IDL, sementara pada tahun 2021, target tersebut telah terlampaui dengan capaian sebesar 97%. Sedangkan angka Provinsi Papua Barat sebelum dibentuk DOB mencapai 81,9%.

Data per kabupaten mengenai ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas tersedia secara kualitatif pada Profil Dinas Kesehatan provinsi Papua Barat Tahun 2019. Berdasarkan laporan tersebut, dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang puskesmasnya tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial.



D. Telemedicine

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, di antara strategi pembangunan kesehatan yakni penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satu fokusnya pada: Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine. Provinsi Papua Barat belum mencatat capaian terkait jenis layanan ini.

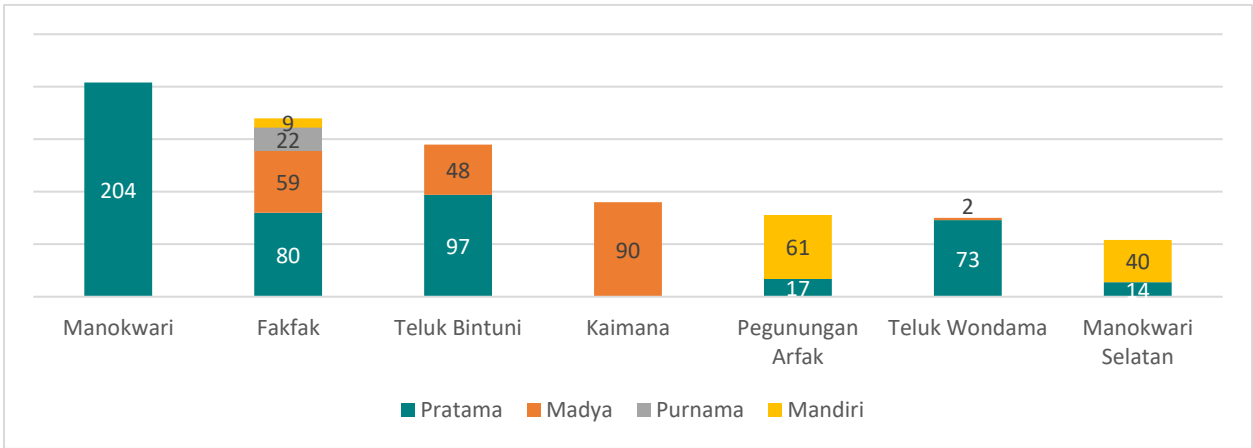
E. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang diuraikan dalam dokumen ini yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Posbindu PTM (Pos pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular).

Posyandu

Jumlah posyandu di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebanyak 816 posyandu, yang terdiri dari 485 posyandu Pratama (59,4%), 199 Posyandu Madya (24,4%), 22 Posyandu Purnama (2,7%) dan 110 (13,5%) posyandu Mandiri. Posyandu Purnama dan Mandiri baru terdapat di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Fakfak, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Gambar II.65 menjabarkan jumlah serta strata posyandu di masing-masing kabupaten:

Gambar II.65 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

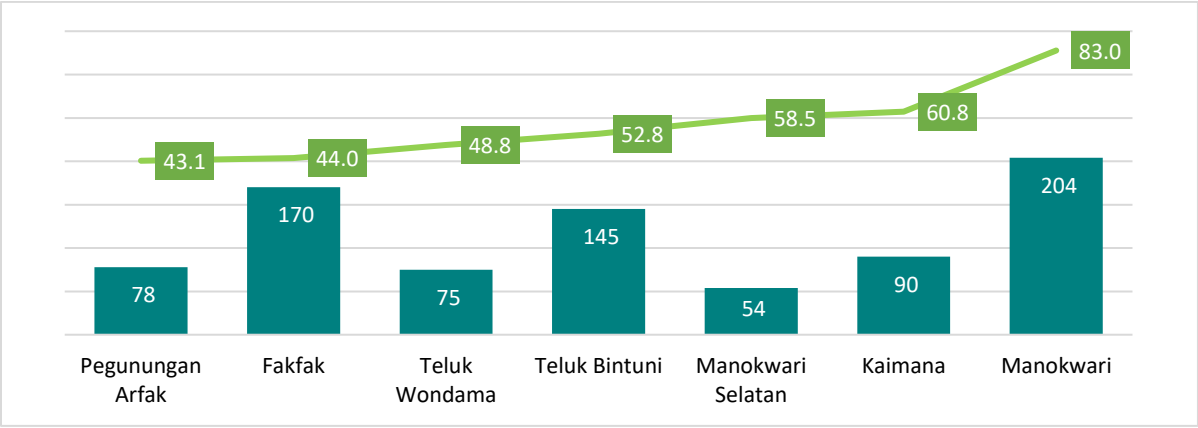
Jumlah keseluruhan posyandu di Provinsi Papua Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Data BPS Provinsi Papua Barat menunjukkan jumlah posyandu tidak berubah di tahun 2017 dan 2018, yakni sebanyak 776 unit, lalu menurun menjadi 684 di tahun 2019. Terdapat perbedaan data jumlah posyandu dibandingkan lapran Dinas Kesehatan, yang mungkin disebabkan adanya posyandu-posyandu di wilayah kerja puskesmas yang telah tercatat di



dinas kesehatan namun tidak terdata oleh BPS. Data BPS Provinsi Papua Barat di tahun-tahun selanjutnya tidak menampilkan jumlah posyandu.

Untuk mengetahui rasio posyandu per jumlah balita, dalam pembahasan ini digunakan data jumlah posyandu yang tersedia hingga tingkat kabupaten yaitu data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2019. Dengan jumlah keseluruhan 816 posyandu, maka diketahui rasionya adalah 1 posyandu untuk 58,5 balita. (Jumlah penduduk usia 0-5 tahun di 7 kabupaten provinsi Papua Barat sebanyak 47.626 – BPS Provinsi Papua Barat 2021). Selanjutnya dengan menggunakan proyeksi jumlah balita seprovinsi Papua Barat untuk menentukan jumlah balita per kabupaten, maka dapat diketahui rasio posyandu per balita di masing-masing kabupaten sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.66. Berdasarkan Gambar II.66 nampak bahwa rasio posyandu terhadap jumlah balita di Kaimana dan Manokwari lebih rendah daripada angka provinsi, yakni berturut-turut 1:60,8 dan 1:83,0.

Gambar II.66 Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: (1) Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019
(2) Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2020 – diolah

Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jumlah Posbindu PTM tahun 2019 di Provinsi Papua Barat sebanyak 87 unit. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak (31 Posbindu), sementara dari Kabupaten Kaimana dan Pegunungan Arfak tidak ada kegiatan Posbindu yang dilaporkan.

Tabel II.36 Jumlah Posbindu di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019

No	Kabupaten	Jumlah Posbindu
1	Fakfak	31
2	Teluk Wondama	25



No	Kabupaten	Jumlah Posbindu
3	Manokwari	17
4	Teluk Bintuni	7
5	Manokwari Selatan	7
6	Kaimana	0
7	Pegunungan Arfak	0
Papua Barat		87

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

2.3.1.2.2 SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kunci dalam pembangunan kesehatan. Peran SDM kesehatan antara lain meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebut bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Pembahasan mengenai SDM kesehatan pada dokumen ini mencakup jumlah dan cakupan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, tanpa pemilahan antara puskesmas dan rumah sakit.

Gambar II.67 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten	Tenaga Kesehatan	Tenaga Medis
Fakfak	974	57
Kaimana	670	34
Teluk Wondama	470	32
Teluk Bintuni	1,375	183
Manokwari	935	59
Manokwari Selatan	204	7
Pegunungan Arfak	110	9
Papua Barat	4,738	381
Rasio per 100.000 penduduk	844.0	67.9

Sumber: BPS Papua Barat, 2023

A. Tenaga Medis

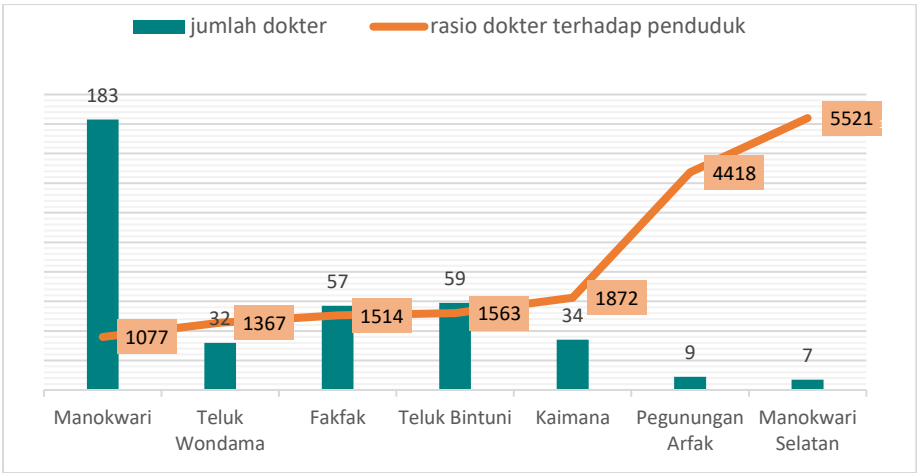
Jumlah dokter yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit di seluruh Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 tercatat sebanyak 122 orang. Jumlah ini menghasilkan rasio dokter terhadap penduduk sebesar 1 : 4451, atau 22 dokter per 100.000 penduduk. Rasio ini masih di bawah standar nasional yakni minimal 1 dokter untuk 2500 penduduk.

Kondisi ini menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Data BPS menyebutkan di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 terdapat



381 tenaga medis, yang menghasilkan rasio 68 tenaga medis per 100.000 penduduk atau 1 dokter untuk 1473 penduduk. Perlu dicatat bahwa data BPS tidak memilah dokter menurut jenisnya, sehingga yang dimaksud tenaga medis di sini selain dokter mencakup juga dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Distribusi tenaga medis per kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.33. Dari Gambar II.68 diketahui bahwa Kabupaten Manokwari memiliki tenaga dokter paling banyak dan juga rasionya terbaik terhadap jumlah penduduk. Sedangkan Rasio dokter terhadap penduduk di atas 1 : 2.500 terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Gambar II.68 Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



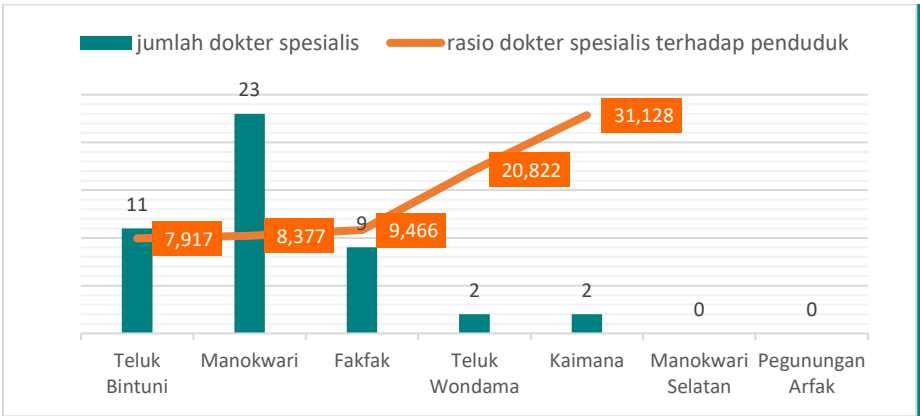
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Mengenai tenaga dokter spesialis, berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2019, di 7 kabupaten wilayah provinsi Papua Barat tercatat 47 orang dokter spesialis, sehingga rasionya terhadap jumlah penduduk untuk tingkat provinsi sudah melampaui standar nasional yakni 1 dokter spesialis berbanding 11.553 penduduk atau 9 dokter spesialis per 100.000 penduduk. (Standar nasional adalah 1: 16.000). Dengan melihat Gambar II.69 yang memilah jumlah dokter spesialis per kabupaten, nampak bahwa jumlah dokter spesialis terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari, namun rasio teringan ada di kabupaten Teluk Bintuni. Rasio dokter spesialis yang melebihi standar nasional hanya terdapat di 3 kabupaten, yaitu Teluk Bintuni, Manokwari dan Fakfak.

Jumlah tenaga Dokter Gigi di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat dan BPS Provinsi Papua Barat, di tahun 2019 terdapat 20 dokter gigi yang tercatat bekerja di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Papua Barat adalah 1 dokter gigi untuk 32.599 penduduk

atau 3 dokter gigi per 100.000 penduduk. Sementara itu di provinsi Papua Barat belum tercatat adanya dokter gigi spesialis yang bertugas. Distribusi dokter gigi per kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.37.

Gambar II.69 Rasio Dokter Spesialis terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Tabel II.37 Jumlah dan Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019

No	Kabupaten	Jumlah	Rasio per 1000 penduduk
1	Manokwari	8	13
2	Kaimana	4	10
3	Fakfak	3	6
4	Teluk Wondama	2	2
5	Teluk Bintuni	2	3
6	Manokwari Selatan	1	4
7	Pegunungan Arfak	0	
Papua Barat		42	0.04

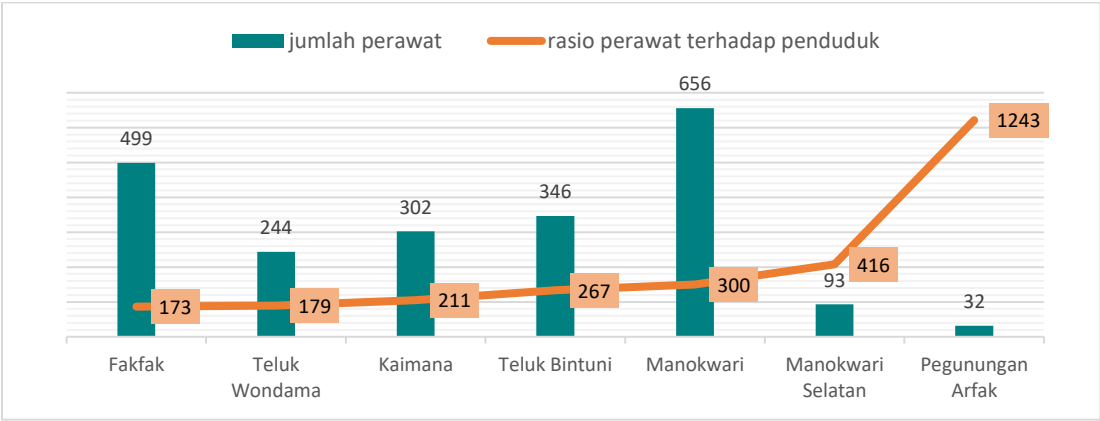
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

B. Tenaga Keperawatan

Di tahun 2019, berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2019 jumlah perawat di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat berjumlah 1.542 orang, atau 284 perawat per 100.000 penduduk. Rasio ini sama dengan 1 perawat untuk 352 penduduk, yang telah melampaui standar nasional jumlah perawat terhadap jumlah penduduk, yakni 1:855. Situasi ini makin membaik di tahun 2021. BPS Provinsi Papua Barat mencatat pada tahun 2021 terdapat 2172 tenaga keperawatan di 7 Kabupaten Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat dalam Angka, 2023). Dengan demikian rasio tenaga perawat menjadi lebih baik yakni 387 perawat per 100.000 penduduk. Rasio ini sama dengan 1 perawat untuk 258 penduduk. Distribusi tenaga perawat di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.70. Jumlah perawat terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari, tetapi rasionya terhadap jumlah penduduk yang terbaik ada di Kabupaten Fakfak. Namun hampir semua kabupaten telah memenuhi standar jumlah perawat (di atas 1: 855), kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak.



Gambar II.70 Rasio Tenaga Perawat terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021

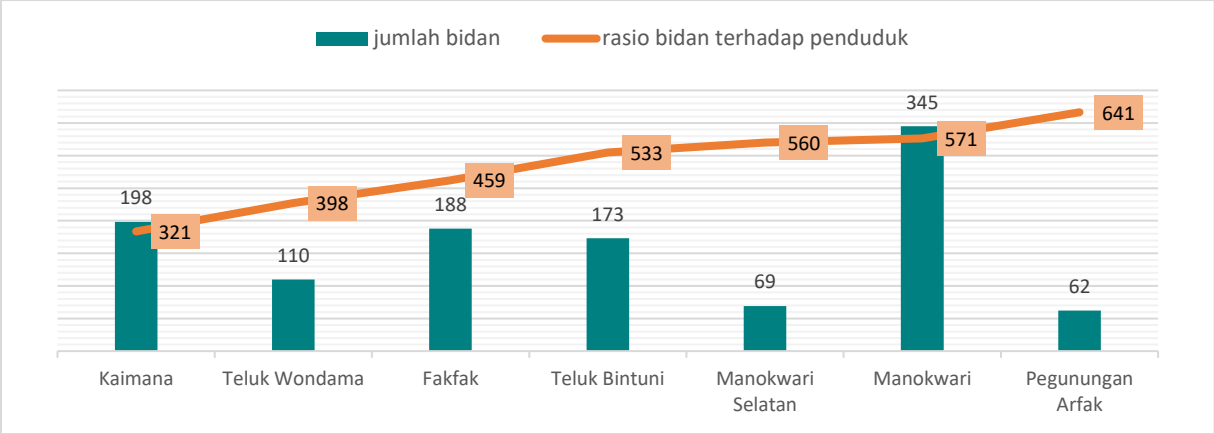


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

C. Tenaga Kebidanan

Jumlah bidan di 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019, kurang lebih setengah dari jumlah perawat, yakni sejumlah 820 orang. Angka ini sama dengan 151 bidan per 100.000 penduduk atau 1 bidan untuk 662 penduduk. Rasio ini telah melebihi standar jumlah minimal tenaga bidan terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan secara nasional, yakni 1: 1000.

Gambar II.71 Rasio Tenaga Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Pada tahun 2021, jumlah bidan meningkat menjadi 1145 orang, yang menghasilkan rasio 204 bidan per 100.000 penduduk atau sama dengan 1 bidan untuk 490 penduduk. Dari Gambar II.71 dapat dilihat bahwa bukan saja pada tingkat provinsi jumlah bidan telah memenuhi standar minimal, namun juga di semua kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.

D. Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas promotif dan preventif untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan masyarakat antara lain tenaga



kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik dan tenaga gizi. Selain tenaga medis dan paramedis, ketenagaan puskesmas dinyatakan sesuai standar jika tersedia setidaknya 1 orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan ini di tiap puskesmas. Distribusi tenaga kesehatan preventif dan promotif ini cukup terdistribusi ke hampir semua kabupaten, kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak. Namun kecukupan jumlahnya belum memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan yang ada.

Tabel II.38 Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan								
		Tenaga Teknis	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Teknik Biomedika	Teknik Biomedika	Keterapian Fisik	Keteknisia n Medis	Psikologi Klinis
1	Fakfak	33	46	16	31	21	54	6	20	3
2	Kaimana	23	16	10	22	13	41	2	9	0
3	Teluk Wondama	13	15	7	19	3	17	3	7	0
4	Teluk Bintuni	39	50	12	28	15	30	2	15	0
5	Manokwari	100	63	19	47	20	88	4	16	0
6	Manokwari Selatan	12	6	2	4	4	6	0	1	0
7	Pegunungan Arfak	2	3	0	2	0	0	0	0	0
Papua Barat		222	199	66	153	76	236	17	68	3
Rasio per 100.000 penduduk		39.5	35.4	11.8	27.3	13.5	42.0	3.0	12.1	0,5

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Data BPS yang menampilkan semua jenis tenaga kesehatan secara lengkap per kabupaten adalah data yang dipublikasikan tahun 2023, yang menampilkan distribusinya di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021. Distribusi tenaga kesehatan di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel II.38.

E. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah, pemerintah pusat telah menetapkan daerah tertinggal sebagai sasaran utama pembangunan. Kriteria penetapan suatu daerah sebagai Daerah Tertinggal antara lain berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 ditetapkan 4 dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tergolong daerah tertinggal, yakni Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Dengan demikian semua tenaga kesehatan yang bertugas di 4 kabupaten itu termasuk sebagai tenaga kesehatan Daerah Tertinggal.



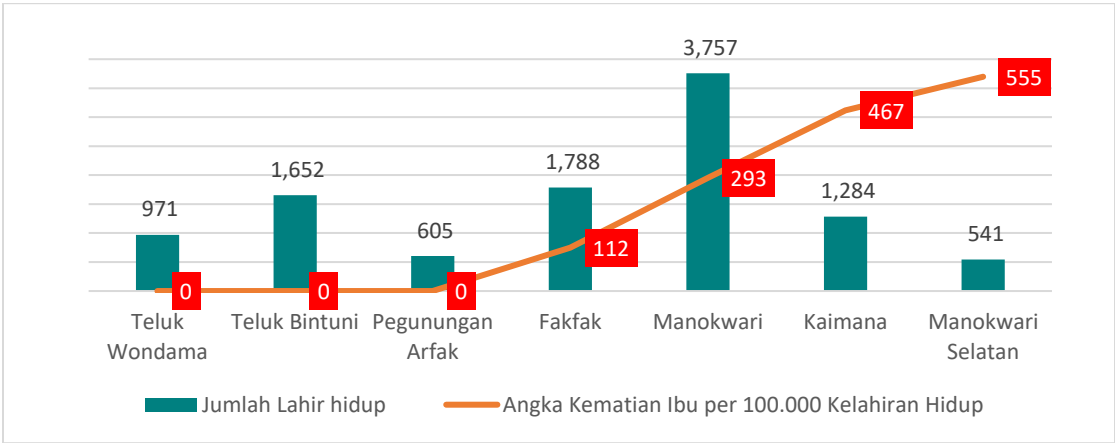
2.3.1.2.3 Kesehatan Keluarga

A. Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Definisi kematian ibu dalam indikator ini adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup. Selain karena sensitifnya indikator ini terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga menunjukkan derajat kesehatan masyarakat.

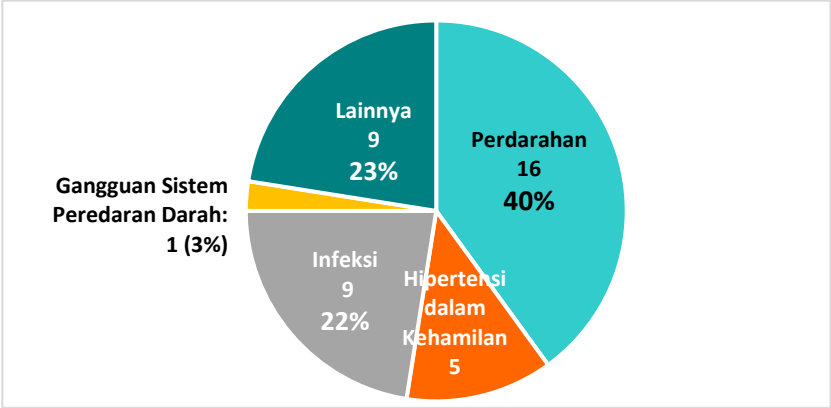
Untuk menentukan AKI, selain jumlah kematian, diperlukan data yang valid mengenai jumlah kelahiran hidup dalam satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan data ini masih terbatas, karena sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai. Namun untuk memberikan gambaran umum, dalam bahasan ini digunakan data yang tersedia sampai tingkat kabupaten tahun 2019, yakni 22 kematian ibu dari 10.598 kelahiram hidup. Sehingga diperoleh AKI dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar 208 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dari angka nasional saat ini sebesar 306, dan sangat mungkin terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Sedangkan jika dilihat distribusinya per kabupaten, terdapat 2 kabupaten yang AKInya di atas 300 per 100.000 kelahiran hidup, yaitu Kabupaten Kaimana dan Manokwari Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.72.

Gambar II.72 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Gambar II.73 Jumlah dan Persentase Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



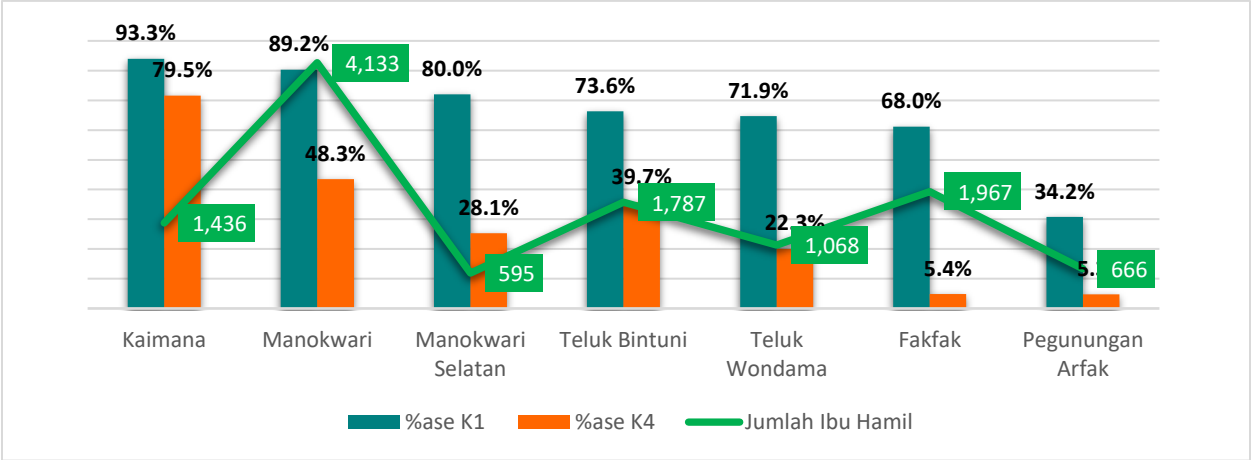
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Mengenai Penyebab Kematian Ibu, tidak diperoleh data yang dapat dipilah untuk 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dari data sebelum pemekaran. Namun penyebab kematian ibu berdasarkan data sebelum dan sesudah pemekaran dapat diasumsikan masih sama, yakni yang terbanyak adalah perdarahan (40%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (22%), Hipertensi dalam kehamilan (12%), dan sebab lainnya yang jumlah dan proporsinya dapat dilihat pada Gambar II.73.

B. Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3.

Gambar II.74 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

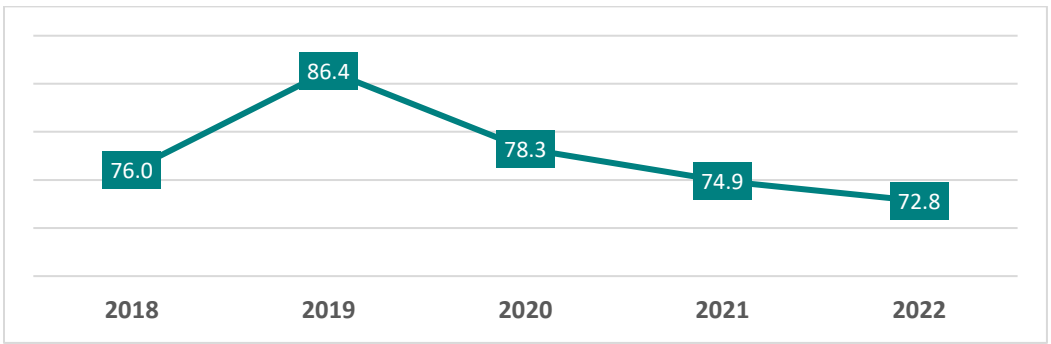


Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 menunjukkan cakupan K1 sebesar 78,5% dan K4 sebesar 37,7%. Cakupan K4 Provinsi Papua Barat ini jauh di bawah cakupan nasional pada tahun 2019 sebesar 88,5%. Jika dilihat per kabupaten, Kabupaten Manokwari memiliki jumlah ibu hamil paling banyak, namun cakupan K1 dan K4 tertinggi terdapat di Kabupaten Kaimana.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

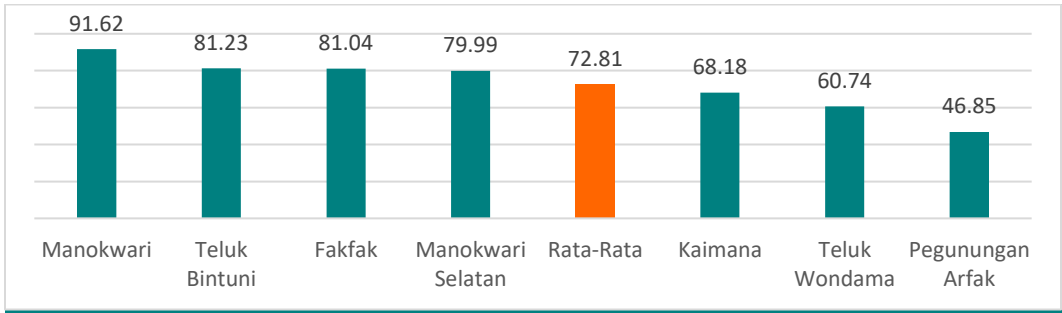
Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi selain pada masa kehamilan adalah mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Gambar II.75 Rata-Rata Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Barat, 2018- 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019 – 2023 (diolah)

Gambar II.76 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

BPS tidak menyediakan data mengenai pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, namun menampilkan data yang cukup lengkap mengenai persentase penolong persalinan. Terdapat kecenderungan penurunan rata-rata persentase pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan sejak 2019 hingga 2022 di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Secara umum cakupan pertolongan

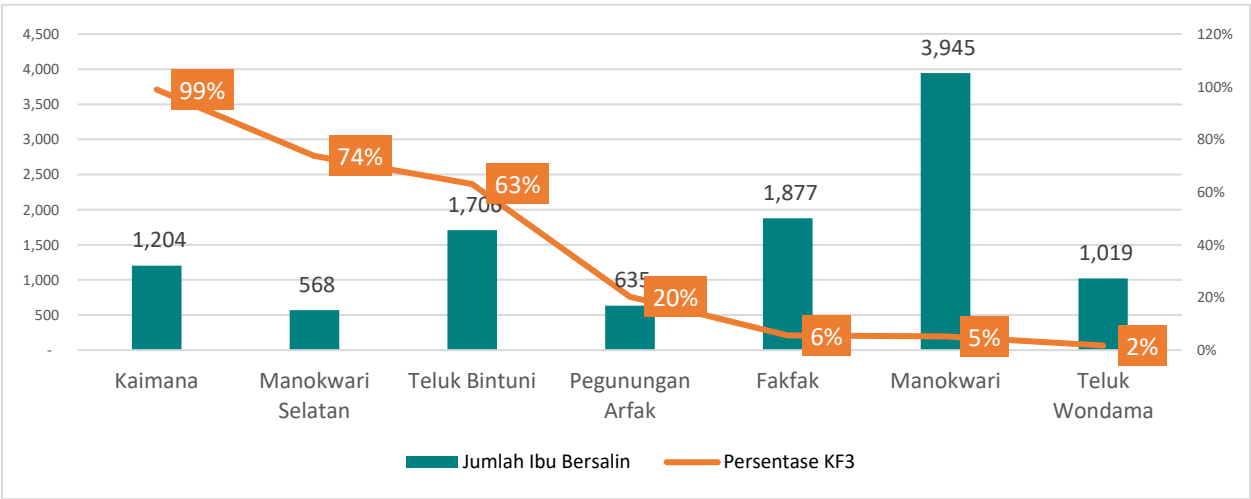
persalinan oleh tenaga kesehatan cukup tinggi, bahkan pada tahun 2019 hampir mencapai target nasional sebesar 87%.

Distribusi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan per kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022 menunjukkan Kabupaten Manokwari telah melampaui target nasional dengan capaian 91.6%. Sementara 3 kabupaten: Kaimana, Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak berada di bawah rata-rata kabupaten dengan angka terendah di Pegunungan Arfak (46,95).

D. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Standar Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yang dianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tingkat provinsi, cakupan KF1, KF2 dan KF3 di 7 kabupaten se-Papua Barat tahun 2019 berturut-turut 56,3%, 53.3% dan 28,7%. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap secara nasional 88,3%.

Gambar II.77 Jumlah Ibu Bersalin dan Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

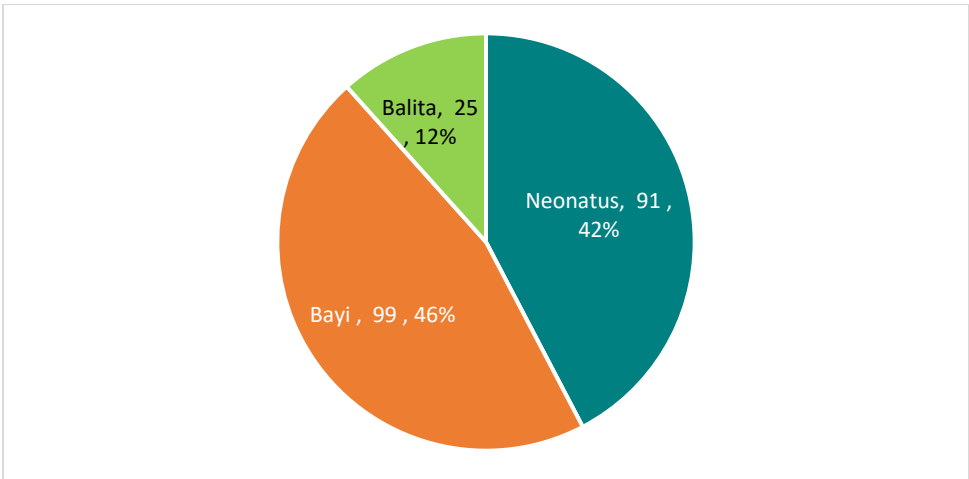
Capaian kunjungan nifas menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Gambar II.77. Berdasarkan data dari Dinkes tersebut nampak bahwa Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni Sorong Selatan mencapai cakupan Kunjungan Nifas Lengkap di atas 60%. Sedangkan cakupan di bawah 10% terdapat di Kabupaten Fakfak, Manokwari dan Teluk Wondama.



E. Angka Kematian Anak

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2019 diketahui bahwa jumlah seluruh kematian anak di 7 Kabupaten berjumlah 215 kasus, terdiri dari 91 neonatus (0-28 hari), 99 bayi (29 hari – 11 bulan) dan 25 balita (12 – 59 bulan). Dengan angka-angka ini maka angka kematian anak di Provinsi Papua Barat adalah 19,6 per 1000 persalinan (jumlah ibu bersalin 10.954 orang). Proporsi kematian pada 3 kelompok umur anak ditampilkan pada Gambar II.78.

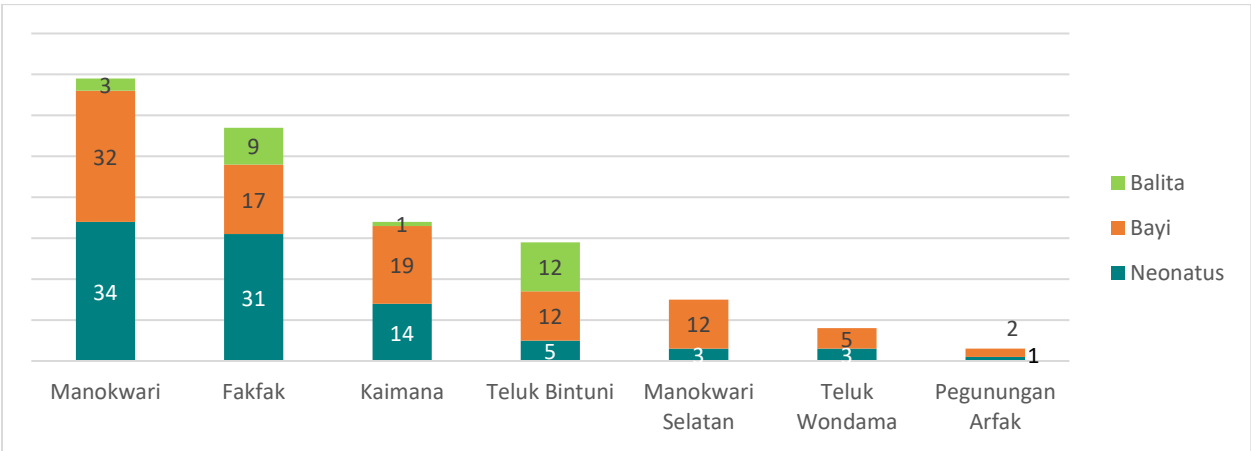
Gambar II.78 Jumlah Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Jika dipilah berdasarkan kabupaten, kematian anak terbanyak pada tahun 2019 dilaporkan di Kabupaten Manokwari dengan 69 kematian (lihat Gambar II.79). Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan melaporkan sangat sedikit kasus kematian anak. Kemungkinan di daerah-daerah sulit ini pelaporan kasus kematian dari kampung ke tingkat administrasi pemerintahan yang lebih atas belum berjalan dengan baik.

Gambar II.79 Jumlah Kematian Anak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

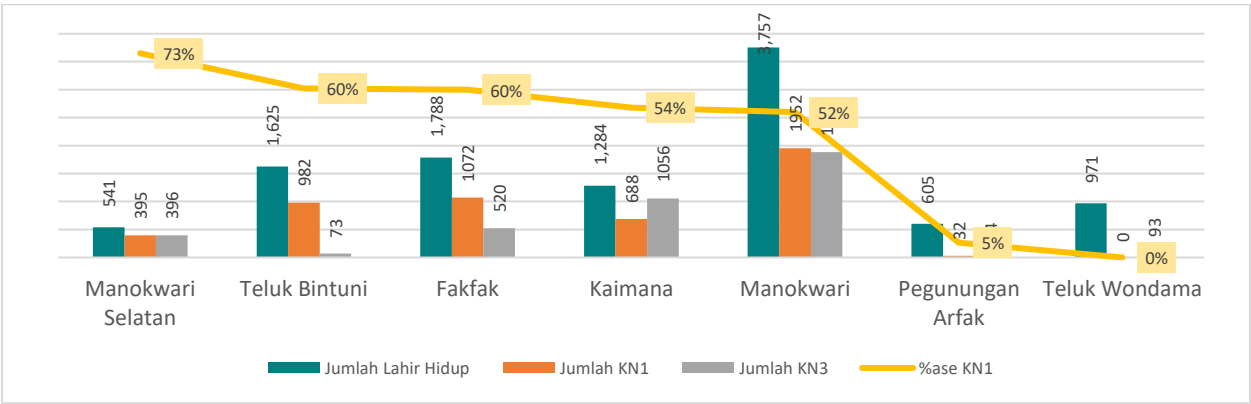
Penyebab kematian neonatal pada tahun 2019 terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, tetanus neonatorum, dan lainnya. Pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan, penyebab kematian terbanyak adalah diare, disusul oleh pnemonia, malaria dan lainnya. Demikian juga pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare dan pneumonia.

F. Kunjungan Neonatal

Masa neonatal (0-28 hari) merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini antara lain dengan mengupayakan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Cakupan KN1 di 7 Kabupaten Provinsi Papua Barat Tahun 2019 mencapai 48%, sedangkan cakupan KN3 sebesar 38%. Sebaran cakupan Kunjungan Neonatal berdasarkan kabupaten ditampilkan dalam Gambar II.80.

Gambar II.80 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

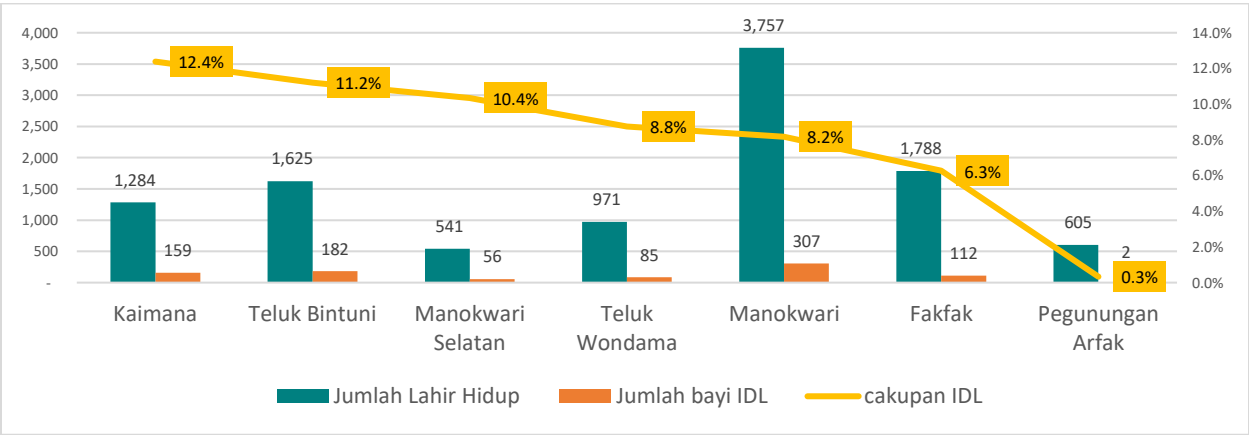
Gambar II.80 menunjukkan bahwa cakupan KN1 yang mencapai 60% atau lebih terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan Fakfak. Cakupan KN3 tidak dapat dibandingkan karena ada ketidaksesuaian data yakni 2 kabupaten dengan cakupan KN3 yang melebihi KN1. Meskipun demikian,

dapat disimpulkan bahwa KN1 Provinsi Papua Barat masih jauh di bawah capaian nasional tahun 2020 yakni 86,0%.

G. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2019, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar 8,5%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%. Berdasarkan Gambar II.81 dapat diketahui bahwa separuh dari kabupaten di Papua Barat memiliki cakupan IDL sama atau lebih tinggi daripada angka provinsi, yakni Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Manokwari.

Gambar II.81 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Mengenai *Universal Child Immunization* (UCI), menurut Profil Kesehatan Indonesia 2020, di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat belum ada laporan mengenai kampung/ kelurahan yang mencapai UCI, yakni kampung/ kelurahan dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Secara nasional, capaian desa/ kelurahan UCI adalah 59,2%. Dalam Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019, memang terdapat ketidaklengkapan data, dengan hanya 1 kabupaten yang melaporkan capaian



Desa/ Kelurahan UCI. Yakni Kabupaten Kaimana; 64% kampung/ kelurahan UCI.

Data Dinas Kesehatan tahun 2018 menunjukkan angka yang lebih baik. Dari 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, 6 di antaranya (86%) melaporkan cakupan Kampung/ Kelurahan UCI di atas 80%. Dengan demikian jika dihitung dalam lingkup provinsi, yakni dengan menggunakan indikator Kabupaten yang 80% desa/kelurahannya mencapai UCI, didapatkan bahwa 86% kabupaten di Provinsi Papua Barat telah mencapai UCI. Angka ini telah melebihi target nasional yakni 78% pada tahun 2020. Namun disayangkan tidak ada data yang memadai untuk tahun 2019 dan selanjutnya. Selain itu jika dibandingkan dengan capaian persentase IDL pada bayi yang baru mencapai 8,5% pada tahun 2019, angka UCI ini perlu ditinjau kembali. Tabel II.39 menunjukkan data tahun 2018 mengenai Kampung/Kelurahan UCI.

Tabel II.39 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018

Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan UCI	Jumlah Seluruh Kampung/ Kelurahan	Persentase Kampung/ Kelurahan UCI
Fakfak	133	137	97%
Manokwari Selatan	53	58	91%
Teluk Wondama	35	40	88%
Teluk Bintuni	34	40	85%
Kaimana	70	83	84%
Manokwari	158	189	84%
Pegunungan Arfak	0	40	0%
Papua Barat	483	587	82%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018

H. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

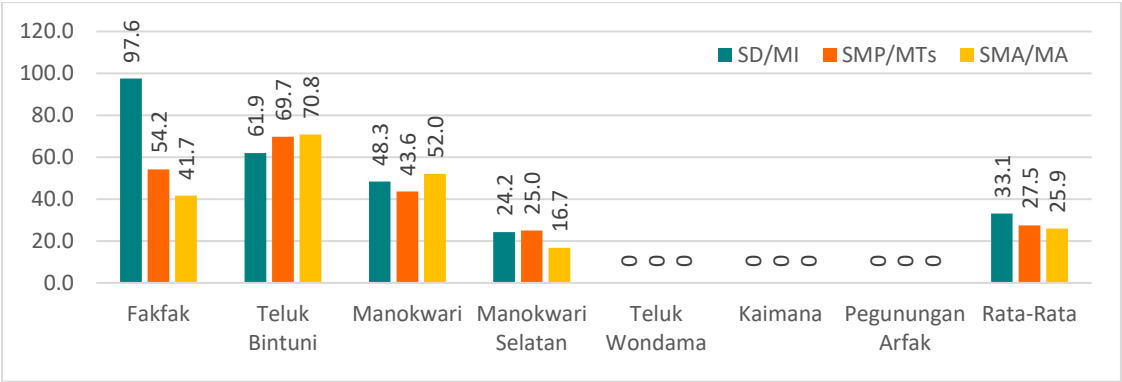
Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Tidak terdapat laporan yang lengkap mengenai cakupan sekolah di Provinsi Papua Barat yang mendapat pelayanan kesehatan peserta didik dalam periode tahun 2018-2022. Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2018 diketahui bahwa pelayanan kesehatan sekolah dilakukan rata-rata dari 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat mencakup 33,1% untuk tingkat SD/MI, 27,5% tingkat SMP/MTs dan 25,9% tingkat SMA/ MA. Cakupan pelayanan untuk tingkat SD/MI tertinggi di Kabupaten Fakfak, sedangkan



untuk tingkat SLTP dan SLTA tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni. Gambar II.82 menampilkan cakupan pelayanan kesehatan sekolah di masing-masing kabupaten pada tahun 2018. Sementara di tahun 2019 hanya 1 kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan ini. Secara nasional, cakupan pelayanan sekolah pada tahun 2020 mencakup 84,7% untuk tingkat SD/MI, 81,9% tingkat SMP/MTs dan 79,1% tingkat SMA/ MA.

Gambar II.82 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018

2.3.1.2.4 Gizi

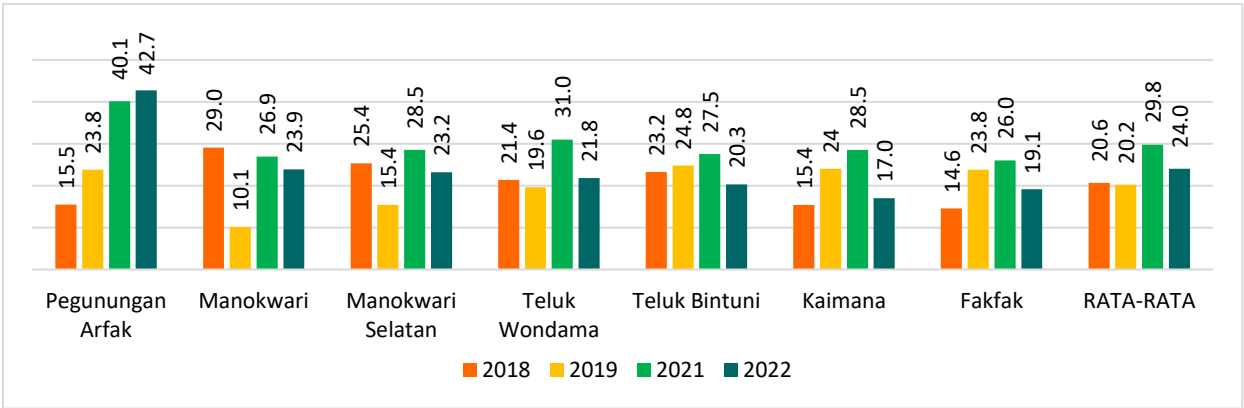
A. Status Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, menetapkan bahwa status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB). Pengukuran status gizi ini didasarkan atas standar World Health Organization tahun 2005. Indeks yang biasa digunakan di fasilitas kesehatan saat ini adalah BB/U untuk menilai gizi buruk atau gizi kurang dan indeks TB/U untuk menilai kondisi anak stunting.

Data mengenai kondisi gizi anak di 7 kabupaten Provinsi Papua Barat yang dapat dijadikan acuan adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tahun 2021 dan 2022. Perbandingan kondisi gizi dari tahun ke tahun berdasarkan ke-3 survey ini menunjukkan bahwa kondisi gizi balita di Provinsi Papua Barat tidak membaik dalam 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan angka rata-rata kabupaten baik untuk balita dengan berat badan kurang (underweight) maupun tinggi badan kurang (stunting).

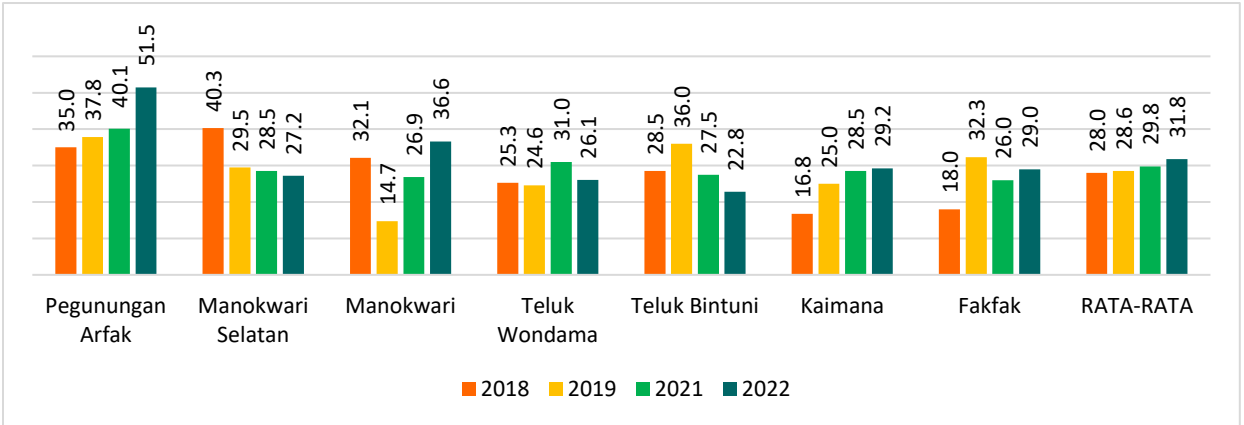
Gambar II.47 di bawah ini menunjukkan prevalensi balita gizi buruk berdasarkan BB/U per kabupaten tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022. Secara rata-rata kabupaten, balita dengan berat badan kurang di tahun 2018 sebesar 20,6% lalu mengalami fluktuasi hingga menjadi 24,0% tahun 2022. Kabupaten yang paling tinggi prevalensinya adalah Pegunungan Arfak (berturut-turut 40,1% dan 42,7% di tahun 2021 dan 2022), meskipun pada survey tahun 2018 dan 2019 prevalensinya cukup rendah (berturut-turut 15,5% dan 23,8%). Angka gizi buruk rata-rata kabupaten di Provinsi Papua Barat lebih tinggi dari pada angka nasional, yakni 16,3% (2019), 17,0% (2021) dan 17,1% (2022). Sementara itu, berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak stunting, menunjukkan angka rata-rata kabupaten di Provinsi Papua Barat meningkat dalam 5 tahun terakhir berdasarkan survey-survey yang dilakukan Kemenkes RI; dari 28,0% di tahun 2018 hingga 31,8% di tahun 2022.

Gambar II.83 Persentase Balita BB Kurang Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022



Sumber: Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022

Gambar II.84 Persentase Balita TB Pendek Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022



Sumber: Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022

Berdasarkan kabupaten nampak bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki prevalensi balita stunting yang sangat tinggi dan dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Kabupaten yang menunjukkan kecenderungan





penurunan prevalensi stunting dalam 5 tahun terakhir hanya kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni. Namun dalam 3 tahun terakhir tidak ada kabupaten yang prevaleninya di bawah 20%. Capaian Provinsi Papua Barat ini masih jauh di bawah angka nasional stunting yakni 27,67% (2019), 24,4% (2021) dan 21,6% (2022).

B. Pemantauan Pertumbuhan

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan setiap balita mendapatkan penimbangan minimal 8 kali setahun dan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun. Pada Riskesdas 2018 Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran memiliki proporsi balita yang minimal 1 kali dalam 12 bulan terakhir melakukan penimbangan berat badan sebanyak 58,70% untuk balita laki-laki dan 61,16% balita perempuan, atau untuk keseluruhan balita sebesar 59,93%. Sedangkan pengukuran panjang/tinggi badan dilakukan pada 29,37% laki-laki dan 30,22% perempuan (seluruhnya 29,8%). Tidak tersedia data terpisah kabupaten mengenai cakupan pelayanan ini. Namun kondisi pasca pembentukan DOB untuk 7 kabupaen di wilayah Provinsi Papua Barat dapat diasumsikan tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelum pemekaran.

C. Pemberian Makanan Tambahan Balita

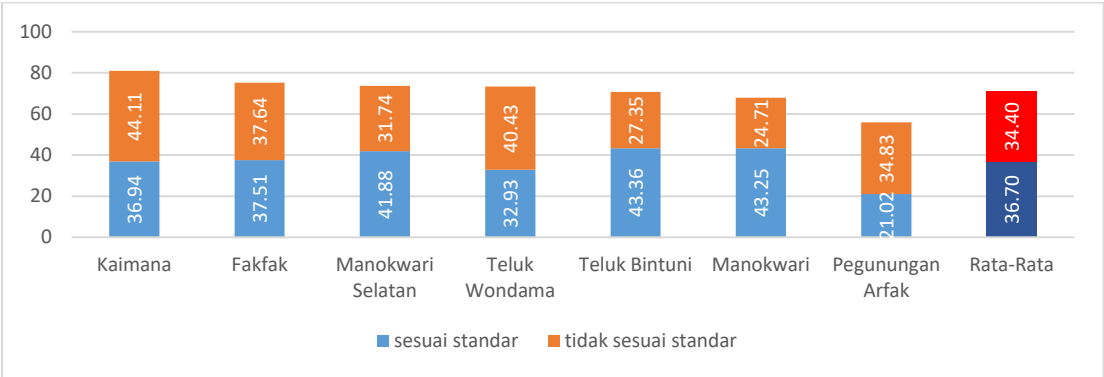
Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita adalah suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dengan formulasi khusus dan dilengkapi dengan vitamin dan mineral, baik untuk pemulihan atau pemenuhan status gizi. Dalam Riskesdas 2018, didapatkan proporsi anak umur 6-59 bulan di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran yang memperoleh PMT sebesar 28,83% anak laki-laki dan 28,02% anak perempuan (rata-rata 28,43%). Pemberian makanan yang dihitung dalam Riskesdas ini merujuk pada seluruh makanan tambahan yang diberikan ketika posyandu (PMT penyuluhan); makanan tambahan khusus diberikan untuk balita kurus yang diberikan selama 90 hari makan (PMT pemulihan). Tidak tersedia data terpisah kabupaten mengenai cakupan PMT pada balita, naum dapat siasumsikan bahwa cakupan PMT di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat setelah pemekaran terwakili oleh kondisi di 13 kabupaten sebelum pembentukan DOB.

D. Pemberian Kapsul Vitamin A

Berdasarkan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi

6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU. Hasil Riskesdas Provinsi Papua Barat Tahun 2018 mendapatkan pemberian Vitamin A pada anak usia 6-59 bulan rata-rata dari 7 kabupaten mencapai 71,10%, namun sebagian di antaranya (34,40%) tidak sesuai standar. Gambar II.85 menunjukkan distribusi cakupan pemberian kapsul Vitamin A menurut Kabupaten.

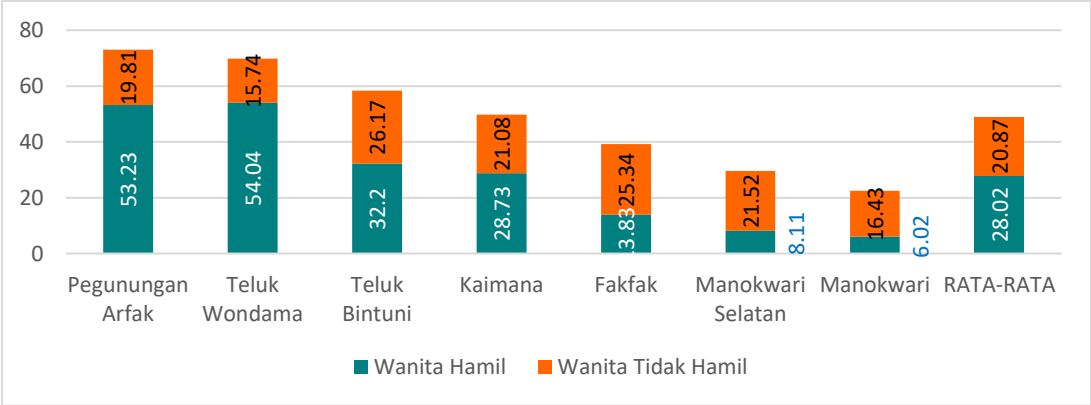
Gambar II.85 Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018



Sumber: Riset Kesehatan Dasar Provinsi Papua Barat 2018

Gambar II.85 menunjukkan bahwa cakupan distribusi Kapsul Vitamin A secara keseluruhan (sesuai standar atau tidak sesuai standar) tidak berbeda terlalu jauh antar kabupaten. Sedangkan pemberian kapsul Vitamin A sesuai standar tertinggi di Kabupaten Bintuni dan Manokwari, yaitu masing-masing 43,36% dan 43,25%.

Gambar II.86 Persentase KEK pada Wanita Hamil dan Wanita Tidak Hamil Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018



Sumber: Riset Kesehatan Dasar Provinsi Papua Barat 2018

Selain masalah gizi pada balita, kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Reproduksi, terutama ibu hamil di Provinsi Papua Barat juga berada pada kondisi yang membutuhkan perhatian. Pada tingkat Provinsi, hasil





Riskesdas 2018 mendapatkan angka 23,21% Ibu Hamil mengalami KEK, dan 20,83% Perempuan Tidak Hamil KEK. Sedangkan jika dipilah per Kabupaten, terdapat proporsi Ibu Hamil KEK yang sangat tinggi Di Teluk Wondama (54,04%) dan Pegunungan Arfak (53,23%) (lihat Gambar II.86).

2.3.1.2.5 Pengendalian Penyakit

A. Penyakit Menular

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019 dan Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di dunia setelah India.

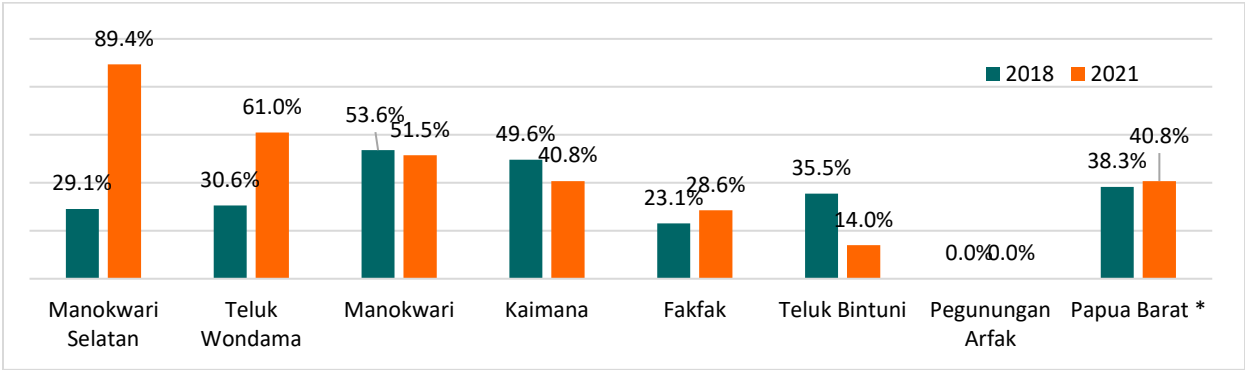
Keberhasilan penanganan tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (*Treatment Coverage*, TC). Pada tahun 2020 belum ada provinsi di Indonesia yang mencapai angka $TC \geq 80\%$, dengan rata-rata nasional baru mencapai 41,7%. TC Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, baru mencapai 22,1%

Sedangkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*, TSR) secara nasional baru mencapai 82,7%, masih di bawah target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%. Dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa capaian angka keberhasilan pengobatan Tbc Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran sebesar 60,1%.

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018 dapat ditarik angka capaian TC dan TSR untuk wilayah Provinsi Papua Barat pasca-pemekaran. Dengan menggunakan estimasi insidens kasus per kabupaten 6,6 per 1000 penduduk (Laporan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2021 – Kemenkes RI 2022), diperoleh angka TC pada 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar 38,3% dan angka TSR sebesar 27,1%.

Upaya penanggulangan Tb di Papua Barat menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2021, dalam lingkup provinsi terjadi kenaikan TC menjadi 40,8% (menggunakan angka rata-rata kabupaten dari data BPS 2023). Peningkatan cakupan terjadi pada 3 kabupaten, yakni Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Fakfak. Gambar II.87 menunjukkan TC per kabupaten tahun 2021.

Gambar II.87 Persentase TC Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2018, 2022

Demikian pula TSR pada tahun 2021 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2018 (dengan catatan angka tahun 2021 menggunakan angka rata-rata kabupaten)

Tabel II.40 Perbandingan Persentase TSR Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021

KABUPATEN	TSR PER TAHUN		PENINGKATAN TSR
	2018	2021	
Manokwari	38.4%	74.8%	94.8%
Kaimana	29.9%	76.7%	156.5%
Teluk Bintuni	10.8%	58.3%	439.8%
Teluk Wondama	1.2%	59.6%	4866.7%
Manokwari Selatan	1.4%	30.2%	2057.1%
Fakfak	19.2%	78.3%	307.8%
Pegunungan Arfak	0.0%	0.0%	-
Rata-Rata	27.1%	54.0%	99.3%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat 2023

HIV-AIDS

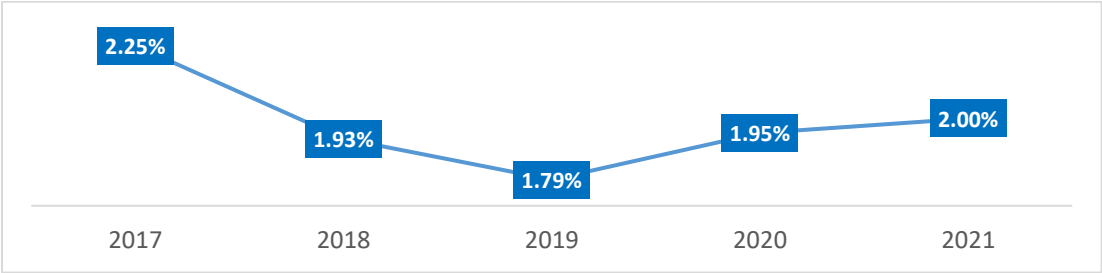
Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi. Secara nasional jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sejak tahun 1987, kasus pertama yang diakui pemerintah, sampai dengan Triwulan I 2021, jumlah kumulatif kasus HIV di Indonesia mencapai 427.201 orang, dengan kematian sebanyak 61.912 orang. Sebelum pembentukan DOB, Provinsi Papua Barat menduduki urutan ke 15 dari 34 provinsi dengan jumlah kasus kumulatif 6.139 orang (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan selama tahun 2021 di wilayah Provinsi sebelum pemekaran ditemukan 364 kasus HIV baru. Jumlah orang yang dites dalam periode 1 tahun ini sebanyak 18.217 orang, sehingga *positivity rate*-nya mencapai 2,00% (LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi



Papua Barat Tahun 2021). Perkembangan positivity rate HIV dalam 5 tahun terakhir ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

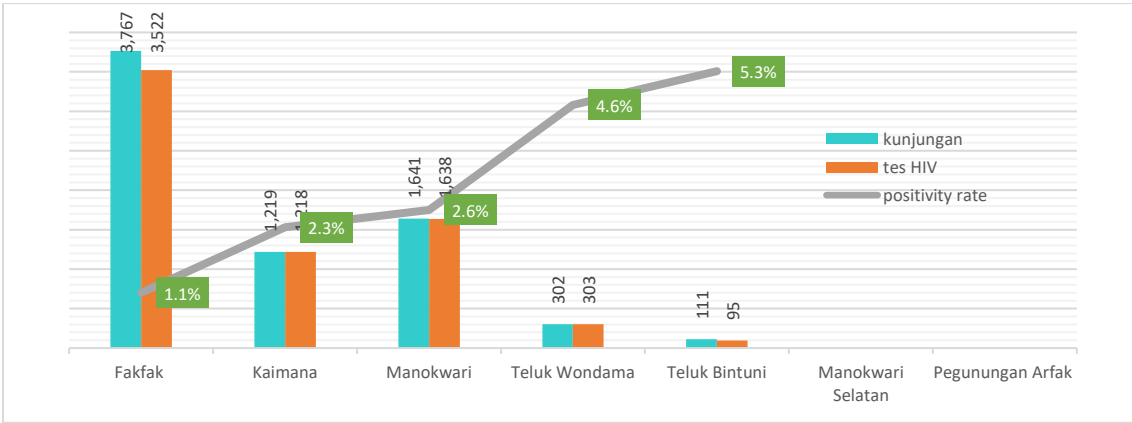
Gambar II.88 Perkembangan Positivity Rate HIV di Papua Barat (Pra-Pemekaran), 2017 - 2021



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

Dibandingkan tahun 2017, *positivity rate* tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,25%. Namun pada angka pada tahun 2021 ini lebih tinggi daripada angka tahun 2018 hingga 2020. Jumlah kunjungan, jumlah tes HIV dan *positivity rate* per kabupaten pada tahun 2020 (lihat Gambar II.49).

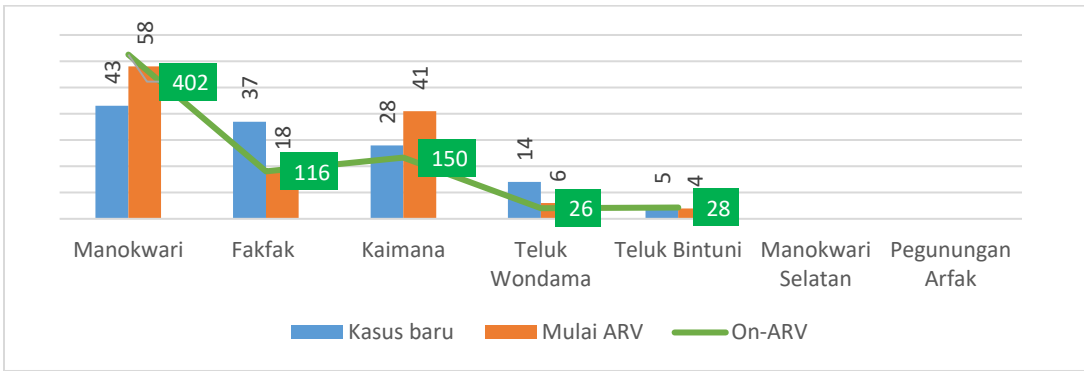
Gambar II.48 Jumlah Kunjungan Klien dan Positivity Rate HIV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan dan tes HIV selama tahun 2021 terbanyak dilakukan di Kabupaten Fakfak (3767 kunjungan dengan 3522 orang dites), sementara *positivity rate* tertinggi terdapat di Teluk Bintuni (5,3%). Dua kabupaten; Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, tidak melaporkan adanya kunjungan dan tes HIV selama tahun 2021. Terdapat 127 kasus baru di 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2021, dan juga terhitung 127 orang (100%) memulai pengobatan dengan ARV. Melihat kesamaan angka ini, nampaknya jumlah orang yang memulai pengobatan ini termasuk ODHA yang terdaftar dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah ODHA yang sedang dalam terapi ARV (on ARV) hingga tahun 2021 berjumlah 722 orang. Distribusinya per kabupaten ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.49 Jumlah Kasus Baru, Mulai ARV dan On-ARV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

ODHA yang sedang dalam pengobatan ARV terbanyak terdapat di kota-Kabupaten Manokwari (402 orang), demikian pula jumlah kasus yang baru memulai ARV (58 orang), diikuti oleh Kabupaten Kaimana (41 orang). Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak hingga tahun 2021 belum melaporkan adanya kasus HIV. Mengenai tingkat pengetahuan penduduk terkait HIV, hasil Riskesdas 2018 menemukan bahwa pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat (sebelum pemekaran), 75,18% pernah mendengar tentang HIV.

Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 34,8% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran menunjukkan cakupan yang cukup baik (45,7%), sebagai urutan ke-3 secara nasional setelah DKI Jakarta (53,0%) dan Banten (46,0%). Pada tahun 2020 secara nasional dan provinsi target penemuan sebesar 80% belum tercapai.

Diare

Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Secara nasional, pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang

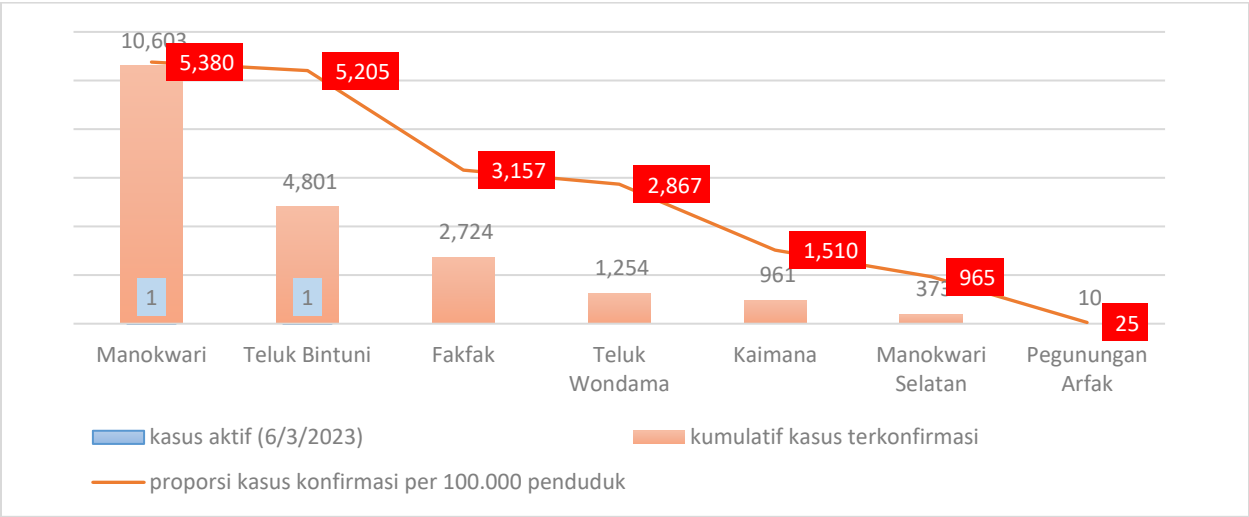
ditetapkan. Sedangkan capaian provinsi Papua Barat sebelum pemekaran sebanyak 1755 anak atau sebesar 10,2% dari sasaran yang berjumlah 17.160 anak. Capaian ini ke-3 terendah di antara 34 provinsi di Indonesia, setelah Provinsi Sulawesi Utara (4,0%) dan Bali (10,0%).

Covid-19

Hingga awal 2023, WHO melaporkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah merenggut 6,9 juta jiwa. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 758 juta orang di seluruh dunia dalam 3 tahun sejak kemunculannya di China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, hingga akhir Februari 2023 tercatat 6,7 juta kasus dengan kematian 161 ribu jiwa. Jumlah kasus kematian ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-11 di dunia (<https://covid19.who.int>).

Sementara di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi Covid-19 mencapai 29.726 orang, dengan kematian tercatat 218 jiwa. Jumlah ini menghasilkan angka kematian kasus (Case Fatality Rate, CFR) Covid-19 di Papua Barat sebesar 1,1%, lebih rendah daripada angka nasional yakni 2,4% dan hampir tinggi dibandingkan dengan angka global (0,9%).

Gambar II.52 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Aktif dan Proporsi Kasus Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Februari 2023



Sumber: dinkes.papuabaratprov.go.id

Di antara 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 kasus kumulatif terbanyak dilaporkan di Kabupaten Manokwari (10.603). Sementara untuk kasus aktif yang masih dalam perawatan atau isolasi pada akhir Februari 2023 sudah sangat sedikit, yakni 2 orang masing-masing 1 orang di Manokwari dan Teluk Bintuni.

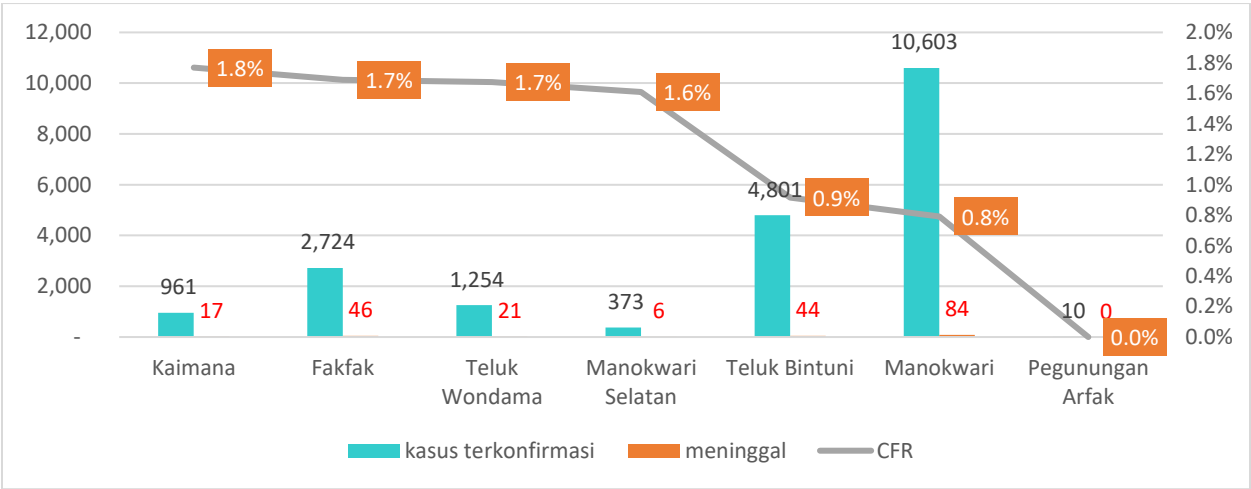
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Manokwari juga menduduki peringkat tertinggi dengan proporsi kasus 5,380 per 100.000



penduduk, disusul Teluk Bintuni dengan proporsi 5.205 per 100.000 penduduk. Kabupaten pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan adalah wilayah yang paling sedikit melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19, yakni berturut-turut 10 dan 373 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.89.

Kabupaten yang melaporkan kematian karena Covid-19 terbanyak hingga akhir Februari 2022 adalah juga Kabupaten Manokwari (10.014 kematian). Namun jika dihitung CFR-nya, maka angka tertinggi diperoleh di Kabupaten Kaimana (1,8%). Gambar II.90 menunjukkan sebaran tersebut per kabupaten.

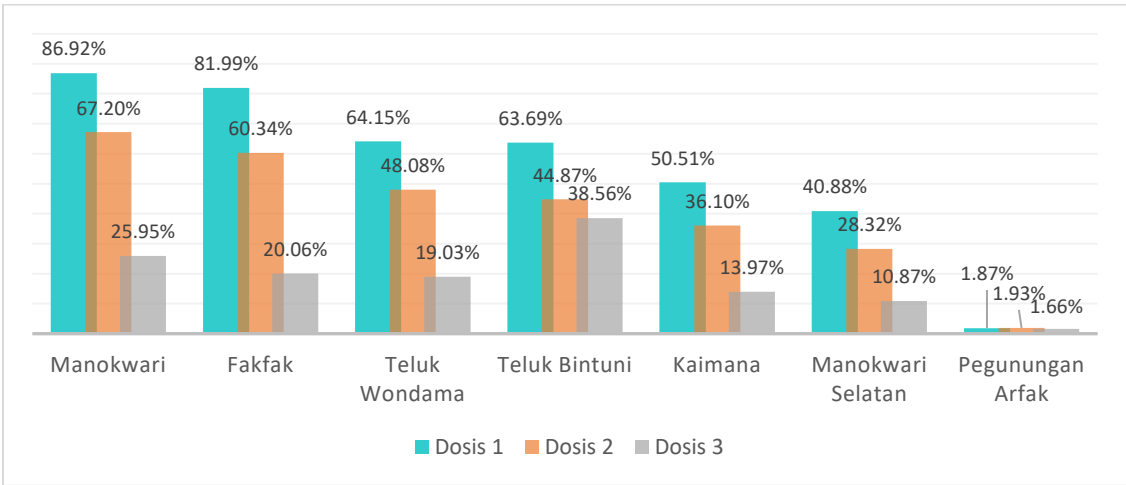
Gambar II.53 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Meninggal dan CFR Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Papua Barat sampai dengan Februari 2022



Sumber: dinkes.papuabaratprov.go.id

Respon yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggapi pandemi ini antara lain upaya pencegahan penularan secara individu, pembatasan penyebaran penyakit melalui asesmen berkala dan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelacakan kasus, penanganan kasus, serta pemberian vaksinasi secara masif.

Gambar II.54 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat sampai dengan Februari 2023



Sumber: covid19papuabarat.org





Hingga 28 Februari 2023, Papua Barat telah mencapai cakupan vaksinasi sebesar 66,7% dosis pertama, 49,8% dosis kedua dan 22,3% dosis ketiga/booster pertama. Secara nasional hingga awal Maret 2023 telah tercapai 74,5% vaksinasi dosis kedua, lebih tinggi daripada cakupan global yang mencatat angka 65,1%.

Gambar II.55 menunjukkan bahwa kabupaten Manokwari dan Fakfak merupakan 3 kabupaten tertinggi cakupan dosis pertamanya dengan telah mencapai vaksinasi dosis pertama di atas 70%, namun untuk dosis kedua belum ada kabupaten/ kota yang melampaui angka 70%. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki cakupan vaksinasi yang terendah di antara semua kabupaten di Papua Barat.

Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional, target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

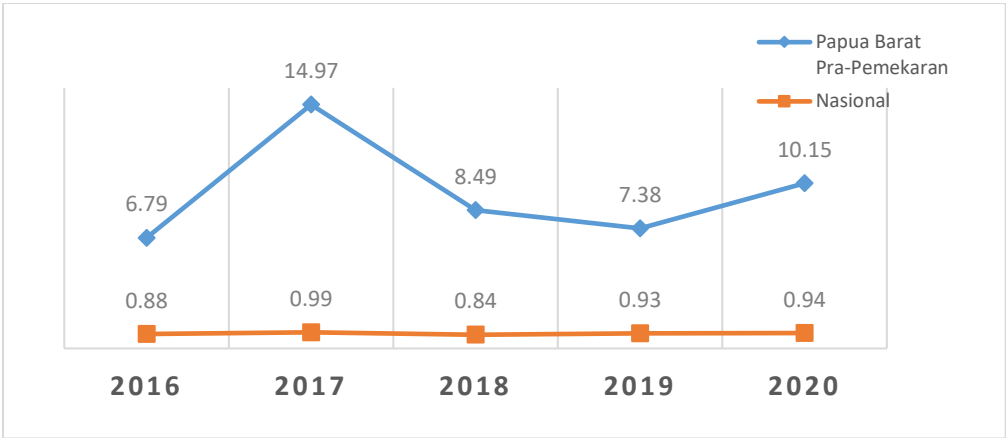
Pada tahun 2020, baru 3 provinsi di Indonesia yang seluruh kabupatennya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Papua Barat merupakan 1 dari 3 provinsi di Indonesia bagian timur yang belum memiliki kabupaten yang berstatus eliminasi malaria, bersama Provinsi Maluku dan Papua. Namun ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria.

Angka Kesakitan Malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk di wilayah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir API nasional di bawah 1 per 1.000 penduduk, termasuk pada tahun 2020 yang sebesar 0,94%. Angka API di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi sejak 2016, namun belum mencapai di bawah 5/1000 penduduk. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan angka API Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran tahun 2020 sebesar 10,15/1000 penduduk, yang menunjukkan kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan API menjadi 5.53/ 1000 penduduk. Gambar II.55 menunjukkan



perkembangan API Papua Barat dibandingkan dengan angka nasional dari tahun 2016 hingga 2020.

Gambar II.55 Perkembangan Annual Paracite Incidence (API) per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat, 2016 - 2020



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020

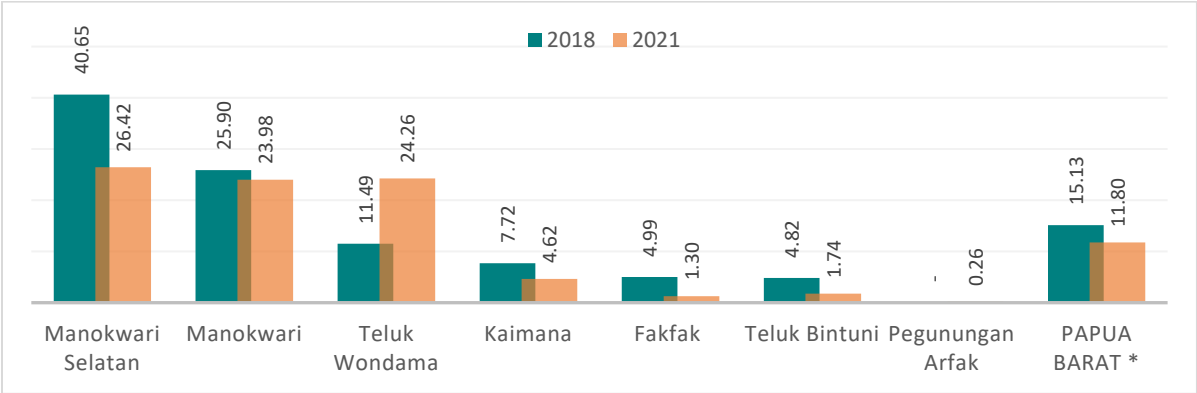
Perbandingan API per kabupaten pasca pembentukan DOB dapat dihitung dengan mengacu pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat (2018 dan 2019) serta publikasi BPS – Provinsi Papua Barat dalam Angka (2022, 2023), meskipun terdapat perbedaan angka dibandingkan dengan angka yang dipublikasikan oleh Kemenkes RI. API per kabupaten tersebut ditampilkan dalam Tabel II.41 dan Gambar II.96.

Tabel II.41 Perkembangan Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 - 2021

Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Manokwari Selatan	40.65	22.97	15.00	26.42
Manokwari	25.90	18.61	49.30	23.98
Teluk Wondama	11.49	6.06	15.60	24.26
Kaimana	7.72	2.66	2.80	4.62
Fakfak	4.99	2.29	1.50	1.30
Teluk Bintuni	4.82	1.09	1.60	1.74
Pegunungan Arfak	-	-	0.20	0.26
Rata-rata Kabupaten	15.13	9.48	12.29	11.80

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018, 2019 dan BPS Provinsi Papua Barat 2022, 2023

Gambar II.56 Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 dan 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018 dan BPS Provinsi Papua Barat 2021





Secara umum API di Provinsi Papua Barat telah mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Meskipun angka provinsi tidak dapat dibandingkan karena angka tahun 2020 dan 2021 menggunakan angka rata-rata kabupaten. Namun data ini dapat menilai perkembangan per kabupaten. Gambar II.57 menunjukkan perbedaan API per kabupaten antara tahun 2018 dan 2021. Berdasarkan Gambar II.57 diketahui bahwa penurunan API terjadi pada hampir semua kabupaten, kecuali Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak.

B. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan 70% penyebab kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, namun lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan secara keseluruhan pada tingkat provinsi sebelum pemekaran pada tahun 2019 adalah 167.778 kasus. Penyakit Diabetes Mellitus masih menempati proporsi terbesar, yaitu sebesar 40,26 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Hipertensi sebesar 5,69 persen. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Papua Barat.

Capaian upaya Pengendalian PTM diukur dengan jumlah kabupaten yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular oleh setidaknya 80% puskesmas. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Sampai tahun 2020, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas berjumlah 70 kabupaten/kota dari 103 yang ditargetkan, atau hanya 13,62% dari seluruh kabupaten/kota. Di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran, belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas (Profil Kesehatan Indonesia 2021).

2.3.1.2.6 Kesehatan Lingkungan

A. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya yang dilakukan adalah mendorong

terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan KTR, atau baru 54,3% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Papua Barat sendiri penerapan KTR ini belum berjalan dengan baik, meskipun telah ditetapkan Pergub tentang KTR di tahun 2015.

B. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan terutama penyakit yang diakibatkan oleh pangan atau *Food Borne Diseases*. Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar secara nasional pada tahun 2020 adalah 43,5%, yang telah melewati target Renstra 2020 sebesar 38%. Provinsi Papua Barat sebelum pemekafan menunjukkan capaian yang baik, yakni sebanyak 393 TPP telah memenuhi standar atau 42,8% dari seluruh TPP yang terdaftar. Tidak tersedia data terpilah kabupaten mengenai cakupan pelayanan di bidang ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

C. Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS. Sedangkan sebanyak 22 Provinsi hingga tahun 2020 belum menyelenggarakan KKS, termasuk Provinsi Papua Barat.

2.3.1.2.7 Jaminan Kesehatan Nasional

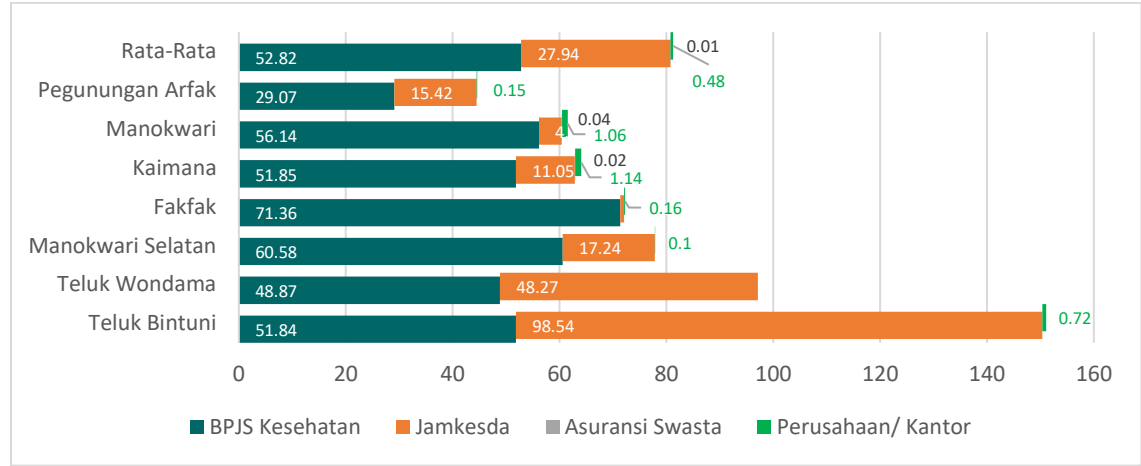
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang membagi kepesertaan JKN menjadi 2 kelompok, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang



iurannya dibayari oleh pemerintah. (2) Bukan PBI jaminan kesehatan, yang terdiri dari Pekerja maupun Non Pekerja beserta keluarganya.

Pada tahun 2020 sebanyak 82,0% (222.406.808 jiwa) penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional . Provinsi Papua Barat merupakan 1 dari 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC). Tiga provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di Papua Barat jumlah peserta JKN PBI adalah 612.636 jiwa, dengan total keseluruhan peserta JKN sebanyak 1.135.204 jiwa. Dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebelum pembentukan DOB sejumlah 981.822 jiwa, maka cakupan peserta JKN tingkat provinsi mencapai 115,62%.

Gambar II.56 Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Namun data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa cakupan penerima Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Barat di wilayah kabupaten pasca pemekaran hanya 81,24% (angka rata-rata dari 7 kabupaten). Demikian pula untuk seluruh provinsi lama, cakupan keseluruhannya adalah 76,21%. Jaminan kesehatan ini mencakup BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta maupun Perusahaan/ Kantor. Gambar II.57 menampilkan cakupan penerima Jaminan Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan Gambar II.57 diketahui bahwa cakupan penduduk yang menjadi peserta Jamkesda di Kabupaten Teluk Bintuni hampir 100%. DI Kabupaten Teluk Wondama, cakupan peserta BPJS Kesehatan ditambah Jamkesda mencapai hampir 100%.

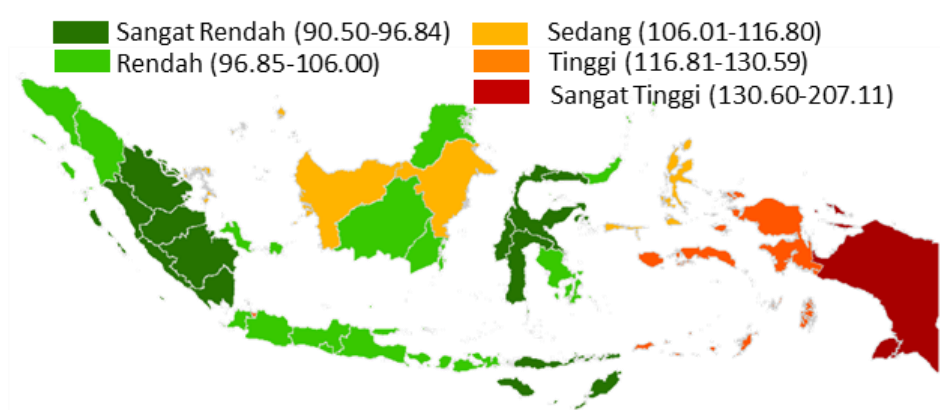
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak

geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula harga di daerah tersebut. Berdasarkan Gambar II.89 dan Tabel II.42 diketahui bahwa tingkat kesulitan geografis menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Papua Barat memiliki **IKK yang tinggi** meskipun dalam periode 2015-2021 terdapat trend penurunan IKK di Papua Barat.

Gambar II.89 Indeks Kemahalan Konstruksi 34 Provinsi di Indonesia, 2021 (pembagian wilayah sebelum penetapan UU No. 29 Tahun 2022)



Sumber: BPS RI dalam dokumen “Indeks Kemahalan Konstruksi, 2021” (diolah)

Tabel II.42 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten di Papua Barat

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	135,50	135,83	129,89	126,32	135,74	117,96
2	Kaimana	133,64	124,79	121,24	123,48	118,86	116,06
3	Teluk Wondama	131,98	124,62	122,57	127,67	124,49	117,36
4	Teluk Bintuni	147,63	146,40	156,26	139,24	147,41	144,22
5	Manokwari	131,26	120,93	120,13	120,92	119,59	114,43
6	Manokwari Selatan	143,12	133,96	146,32	130,73	130,44	132,18
7	Pegunungan Arfak	213,02	188,95	192,80	185,70	167,64	151,52
Rata-rata		148,02	139,35	141,32	136,29	134,88	127,68

Sumber: BPS RI dalam dokumen “Indeks Kemahalan Konstruksi, 2016-2023”

Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, daerah yang memiliki IKK tertinggi di Papua Barat tahun 2022 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (skor: 151,52) dan Kabupaten Teluk Bintuni (skor: 144,22). Daerah dengan IKK yang relatif rendah di Papua Barat adalah Manokwari (114,43) sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.42.

2.3.1.3.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Tabel II.43 menunjukkan proporsi Panjang jaringan jalan di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.43 diketahui terdapat peningkatan panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) dari 47,99% pada tahun 2018 menjadi 73,23% pada tahun 2022. Secara absolut Panjang jalan kondisi mantap pun meningkat dari 636,90 km pada tahun 2018 menjadi 1.559,42 km pada tahun 2022.

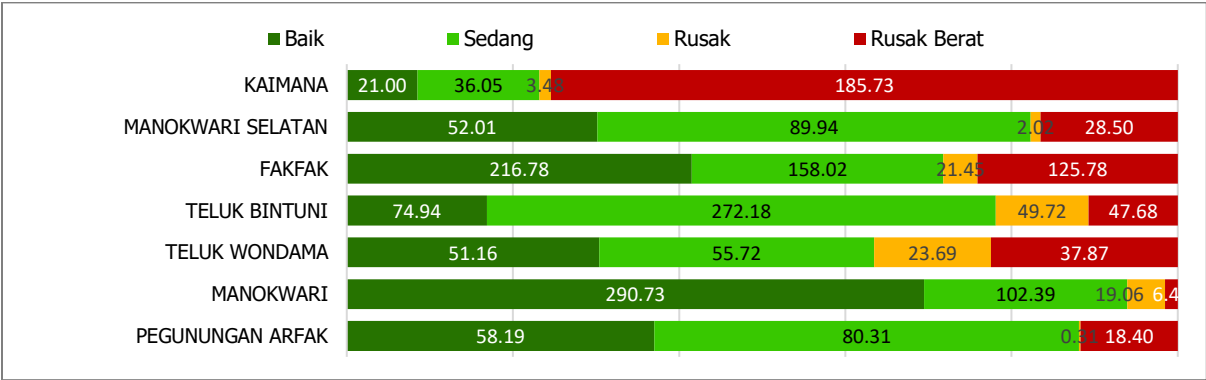


Tabel II.43 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Papua Barat 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan (km)	Baik	356,10	647,90	649,87	775,17	764,81
	Sedang	280,80	533,46	637,84	658,95	794,61
	Rusak	478,04	280,15	303,75	162,80	119,73
	Rusak Berat	212,30	617,59	587,22	482,25	450,38
Persentase (%)	Baik	26,83	31,16	29,83	37,28	35,91
	Sedang	21,16	25,66	29,28	31,69	37,31
	Rusak	36,02	13,47	13,94	7,83	5,62
	Rusak Berat	16,00	29,70	26,95	23,19	21,15

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2019-2023 (Data Diolah)

Gambar II.90 Kondisi Jalan Berdasarkan Kab/Kota di Papua Barat 2022 (km)



Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2022 (Data Diolah)

Gambar II.90 menampilkan kondisi jalan berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022. Berdasarkan Gambar II.90 diketahui bahwa daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan peningkatan akses jalan adalah Kabupaten Kaimana. Adapun daerah yang memiliki akses jalan paling baik di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari dengan persentase jalan mantap sebesar 82,30%.

2.3.1.3.4 Sanitasi Layak

Sistem sanitasi mencakup pengolahan air limbah dan irigasi menjadi perlu dimaksimalkan dalam pelayanan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Limbah manusia seperti urine dan feses dan limbah-limbah rumah tangga dapat menjadi sumber masalah kesehatan bila tidak diolah dalam sistem yang baik. Berdasarkan Tabel II.44 diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat terus meningkat dari tahun 2018-2022. Apabila ditinjau berdasarkan Kabupaten, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama merupakan kabupaten yang memerlukan perhatian prioritas dalam perbaikan sanitasi.

Tabel II.44 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	65,83	68,25	75,60	65,86	69,18
2	Kaimana	81,11	75,20	70,73	74,57	76,48
3	Teluk Wondama	66,47	82,94	88,32	61,10	53,00



No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
4	Teluk Bintuni	65,71	71,56	77,92	77,45	78,56
5	Manokwari	76,33	82,52	90,72	86,90	82,58
6	Manokwari Selatan	84,89	85,27	86,49	91,54	88,42
7	Pegunungan Arfak	32,33	43,31	43,28	45,21	34,98
Rata-rata		67,52	72,72	76,15	71,80	69,03

Sumber: BPS Papua Barat, 2023 dalam dokumen “Papua Barat dalam Angka 2023”

Tabel II.45 menunjukkan persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar di Papua Barat Tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.45 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Meskipun demikian, apabila meninjau berdasarkan kabupaten, diperlukan percepatan pembangunan fasilitas tempat buang air besar di Pegunungan Arfak karena rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar masih tinggi yaitu sebesar 28,04%.

Tabel II.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Papua Barat, 2022

Kabupaten	Sendiri	Bersama/ Komunal	MCK	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
Fakfak	72,56	7,38	15,99	0,00	4,06
Kaimana	64,19	14,96	11,83	0,65	8,37
Teluk Wondama	45,29	11,61	25,41	1,76	15,93
Teluk Bintuni	79,42	4,60	12,75	0,29	2,95
Manokwari	85,68	8,88	4,50	0,00	0,94
Manokwari Selatan	76,64	12,74	5,30	0,06	5,26
Pegunungan Arfak	23,86	13,46	33,68	0,96	28,04
Rata-rata	63,95	10,52	15,64	0,53	9,36

Sumber: BPS Papua Barat, 2023 dalam dokumen “Papua Barat dalam Angka 2023”

2.3.1.3.5 Sumber Air Minum layak

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum, air minum merupakan air yang layak diminum dengan atau tanpa proses pengeolahan yang memenuhi syarat Kesehatan. Berdasarkan Tabel II.46 dapat diketahui terdapat peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak di Papua Barat pada 2018-2022. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, daerah yang memerlukan percepatan peningkatan akses sumber air minum layak adalah Kabupaten Teluk Wondama (tahun 2022: 23,97%) dan Pegunungan Arfak (tahun 2022: 77,17%).

Tabel II.46 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	75,22	70,41	63,40	98,00	98,49
2	Kaimana	53,47	44,29	45,88	83,78	85,88
3	Teluk Wondama	13,40	15,98	6,08	19,78	23,97
4	Teluk Bintuni	52,68	44,26	34,21	90,37	87,54
5	Manokwari	26,18	38,81	24,31	86,20	81,05
6	Manokwari Selatan	29,77	38,51	33,50	80,77	89,30
7	Pegunungan Arfak	24,71	36,63	38,64	82,47	77,17
Rata-rata		39,35	41,27	35,15	77,34	77,63

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2023



Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Papua Barat adalah air ledeng, air pompa, air dalam kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya (Tabel II.47). Berdasarkan Tabel II.47 maka dapat diketahui bahwa air kemasan dan air isi ulang merupakan sumber air minum utama masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.47 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama, 2022

	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Rata-rata
Leding	29,22	8,49	0,00	1,84	1,67	0,23	0,00	5,92
Pompa	0,40	2,13	0,34	15,69	7,08	4,94	0,78	4,48
Air Dalam Kemasan	14,36	37,07	12,14	38,60	43,65	21,49	0,47	23,97
Sumur Terlindung	0,84	5,42	7,84	6,85	25,60	40,40	0,21	12,45
Sumur Tak Terlindung	0,00	1,58	0,30	0,73	1,80	2,06	3,92	1,48
Mata Air Terlindung	0,98	2,22	10,47	3,25	2,76	2,18	18,44	5,76
Mata Air Tak Terlindung	0,46	2,61	56,99	4,05	4,55	5,66	0,44	10,68
Lainnya	39,86	37,27	58,11	31,93	5,89	6,04	1,88	25,85

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dasar. Untuk melihat capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah, salah satu tolak ukur yang dapat digunakan adalah kuantitas dan kualitas tempat hunian. Berdasarkan versi penilaian dari BPS, rumah layak huni ditinjau dari kondisi rumah tinggal, yaitu; (1) Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas; (2) Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas; dan (3) Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas. Dengan kata lain, tiga faktor digunakan dalam penilaian kondisi rumah adalah atap, dinding dan lantai.

Tabel II.48 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Atap Rumah Terluas, 2022

Kabupaten	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu / Kayu / Sirap	Jerami / Ijuk / Daun / Rumbia	Lainnya
Fakfak	3,49	5,12	88,23	1,00	2,11	0,00	0,05
Kaimana	0,65	3,86	93,94	0,81	0,65	0,09	0,00
Teluk Wondama	0,00	2,67	96,35	0,00	0,23	0,41	0,34
Teluk Bintuni	0,20	3,47	95,11	0,89	0,00	0,33	0,00
Manokwari	0,51	1,53	95,54	1,04	1,07	0,00	0,31



Kabupaten	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu / Kayu / Sirap	Jerami / Ijuk / Daun / Rumbia	Lainnya
Manokwari Selatan	0,25	1,72	95,93	0,49	0,80	0,81	0,00
Pegunungan Arfak	2,27	0,93	93,47	0,00	2,94	0,29	0,08
Rata-rata	1,05	2,76	94,08	0,60	1,11	0,28	0,11

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.48 menunjukkan distribusi rumah tangga menurut bahan utama atap rumah terluas di kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.48 diketahui bahwa mayoritas (94,08%) rumah tangga di Papua Barat menggunakan seng sebagai bahan utama atap rumah. Adapun rumah tangga yang menggunakan genteng relatif sedikit yaitu sebesar 2,76%. Kondisi ini terjadi di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.49 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Dinding Rumah Terluas, 2022

Kabupaten	Tembok	Plesteran Ayaman Bambu / Kawat	Kayu / Papan, Batang Kayu	Bambu, Anyaman Bambu	Lainnya
Fakfak	83,28	2,05	14,25	0,11	0,30
Kaimana	69,42	0,02	30,56	0,00	0,00
Teluk Wondama	52,67	0,00	46,31	1,02	0,00
Teluk Bintuni	35,80	0,01	64,18	0,00	0,01
Manokwari	74,74	0,32	24,62	0,00	0,32
Manokwari Selatan	69,33	0,00	30,45	0,05	0,16
Pegunungan Arfak	66,43	0,00	33,53	0,04	0,00
Rata-rata	64,52	0,34	34,84	0,17	0,11

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.50 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Lantai Rumah Terluas, 2022

Kabupaten	Marmer / Granit	Keramik	Parket / Vinil / Karpas, Ubin / Tegel / Teraso	Kayu / Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya
Fakfak	0,66	42,84	7,51	11,85	34,72	0,41	1,68	0,33
Kaimana	0,42	36,15	9,65	11,90	38,03	0,36	3,49	0,00
Teluk Wondama	0,33	21,90	8,96	28,09	38,64	1,63	0,30	0,16
Teluk Bintuni	0,49	21,47	10,48	40,51	24,41	0,79	1,57	0,28
Manokwari	0,86	43,55	4,05	8,04	42,02	0,52	0,96	0,00
Manokwari Selatan	0,15	41,40	1,87	9,78	44,30	2,00	0,50	0,00
Pegunungan Arfak	0,67	11,20	13,52	32,20	40,41	1,17	0,23	0,60
Rata-rata	0,51	31,22	8,01	20,34	37,50	0,98	1,25	0,20

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.49 menunjukkan persentase rumah tangga menurut bahan utama dinding terluas di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.49 dapat diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat menggunakan





bahan utama tembok (64,52%). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat karakteristik berbeda pada rumah tangga di Teluk Bintuni dan Teluk Wondama dengan banyaknya penggunaan kayu/papan/batang kayu sebagai dinding rumah. Rumah tangga di Teluk Bintuni yang menggunakan kayu/papan/batang kayu sebanyak 64,18%, sedangkan rumah tangga di Teluk Wondama sebesar 46,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik wilayah (iklim, budaya masyarakat, kemudahan memperoleh bahan baku) dapat mempengaruhi kecenderungan rumah tangga dalam memilih bahan utama dinding rumah.

Tabel II.50 menunjukkan persentase rumah tangga di Papua Barat menurut bahan utama lantai rumah terluas tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.50 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat menggunakan semen/batas merah (37,50%) dan keramik (31,22%) sebagai lantai rumah. Meskipun demikian, apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat kondisi khusus di Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak yang cukup tinggi dalam menggunakan kayu/papan sebagai lantai rumah. Persentase rumah tangga yang menggunakan kayu/papan di Teluk Wondama sebesar 28,09%, di Pegunungan Arfak sebesar 32,20%, dan di Teluk Bintuni sebesar 40,51%.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Tindak Kejahatan

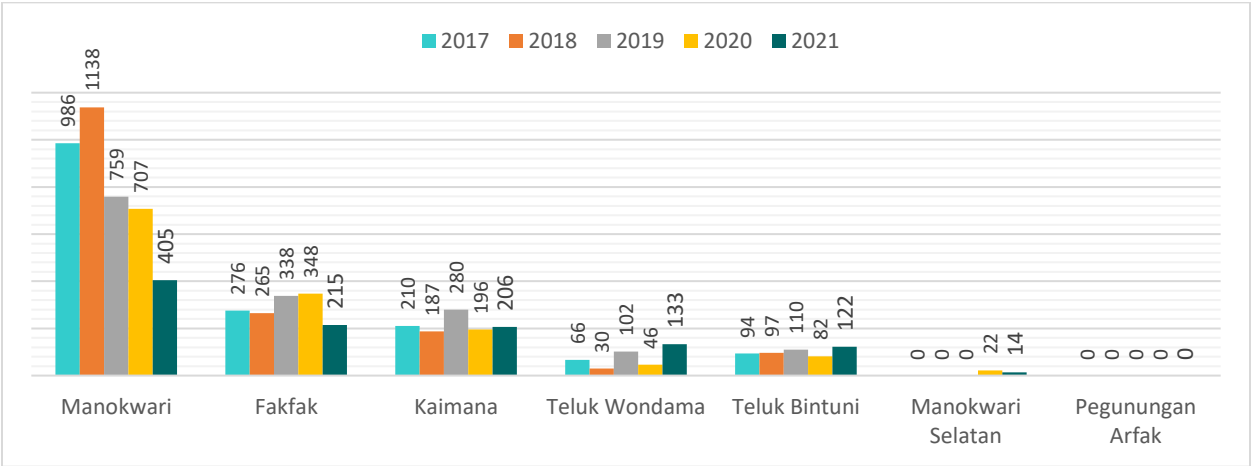
Untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah antara lain digunakan indikator angka kejahatan yang terjadi. Data BPS bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Selain itu, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres yang tersebar di kabupaten di seluruh Papua Barat. Sehingga total agregasi jenis kejahatan di Papua Barat bisa berbeda antara data dari Polda dan total agregasi dari kabupaten.

Berdasarkan data Polda Papua Barat, dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan, dari total 1632 kasus pada tahun 2017, menjadi 1095 kasus di tahun 2021, meskipun ada peningkatan di tahun 2018 yakni 1717 kasus. Kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Kabupaten Manokwari, yang menunjukkan bahwa banyaknya kasus kejahatan makin tinggi dengan makin banyaknya jumlah penduduk. Terdapat 2 Kabupaten yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2021



dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni Kabupaten Teluk Bintuni dan teluk Wondama. Gambar II.91 menunjukkan perkembangan kasus kejahatan di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir hingga 2021.

Gambar II.91 Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2018-2022

Tabel II.51 Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Jenis Kejahatan		Jumlah Menurut Kabupaten							Papua Barat
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	-	-	-	3	2	-	-	5
Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Ringan	41	46	20	28	80	4	-	219
	Penganiayaan Berat		3	1	1		3	-	8
	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	8	-	-	17	-	-	36
Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	3	3	3	1	1	-	-	11
	Pencabulan	-	8	3	1	5	-	-	17
Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan	-	-	2	-	53	3	-	58
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	25	31	14	35	35	-	-	140
	Pencurian dengan pemberatan	-	-	6	-	-	-	-	6
	Pencurian Kendaraan Bermotor	4	6	7	-	-	-	-	17
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	9	6	5	5	5	4	-	34
	Pembakaran dengan Sengaja	-	-	1	-	-	-	-	1
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	-	-	2	-	-	-	-	2
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/ Perbuatan Curang	12	9	4	20	-	-	-	45
	Penggelapan	4	7	3	1	-	-	-	15
	Korupsi	1		1					2
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	3	-	-	-	-	3
Jumlah		110	127	75	95	198	14	0	619

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2022

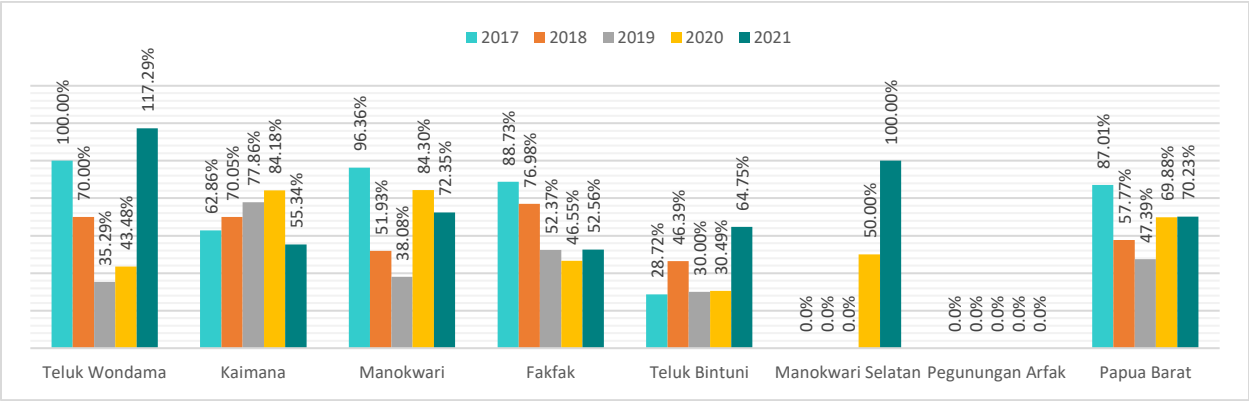
Jenis-jenis kejahatan dikelompokkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Tabel II.51 menunjukkan jumlah kasus kejahatan menurut jenisnya di Provinsi Papua Barat tahun 2021.



Berdasarkan Tabel II.51 diketahui bahwa penganiayaan ringan merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan (219 kasus) dan terbanyak terjadi di Kabupaten Manokwari. Kasus pencurian terjadi di hampir semua kabupaten, kecuali Pegunungan Arfak yang juga memang belum menyediakan laporan kasus kejahatan.

Mengenai kasus-kasus kejahatan yang diselesaikan dari semua kasus yang dilaporkan, dalam kurun waktu tahun 2019-2021 di Provinsi Papua Barat terjadi peningkatan dari 47,4% menjadi 70,2%, meskipun 2 tahun sebelumnya (2017-2018) mengalami penurunan. Peningkatan persentase yang tajam nampak terjadi di Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan yang masing-masing mencapai 100% pada tahun 2021. Sementara kabupaten yang persentasenya penyelesaian kasusnya menurun adalah Kabupaten Kaimana dan Manokwari, masing-masing mencapai 55,3% dan 72,4% di tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.92.

Gambar II.92 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2018-2022

2.3.1.5.2 Konflik Massal

Konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal. Berdasarkan Tabel II.52 diketahui bahwa jumlah kampung/kelurahan sebelum pembentukan DOB yang mengalami perkelahian massal berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kampung/ kelurahan dengan konflik massal di Papua Barat sebelum pemekaran sebanyak 114 kampung/ kelurahan (5,74%). Berikutnya pada tahun 2019 turun menjadi 66 kampung/ kelurahan (3,32%) yang mengalami perkelahian massal. Sementara data Podes tahun 2020 menunjukkan adanya



kenaikan menjadi 70 kampung/kelurahan (3,53%) yang mengalami perkelahian massal.

Apabila kita melihat lebih rinci ke kabupaten, kita dapat melihat variasi jumlah kejadian perkelahian massal. Selama tahun 2021, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan dengan perkelahian massal tertinggi di Papua Barat, yaitu masing-masing sebanyak 11 desa/kelurahan. Sebaliknya, Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten yang kampung/kelurahannya paling sedikit dilaporkan sebagai tempat terjadi konflik massal dalam kurun waktu tahun 2018-2020.

Tabel II.52 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Kejadian Perkelahian Massal di Wilayahnya

No	Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah kampung/ Kelurahan tempat terjadi Perkelahian massal				Persentase kampung/ kelurahan tempat terjadi perkelahian massal (%)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Fakfak	149	12	6	9	11	8.05%	4.03%	6.04%	7.38%
2	Kaimana	86	6	6	7	1	6.98%	6.98%	8.14%	1.16%
3	Teluk Wondama	76	5	5	4	0	6.58%	6.58%	5.26%	0.00%
4	Teluk Bintuni	261	10	5	1	6	3.83%	1.92%	0.38%	2.30%
5	Manokwari	173	13	7	7	11	7.51%	4.05%	4.05%	6.36%
6	Manokwari Selatan	57	3	4	2	0	5.26%	7.02%	3.51%	0.00%
7	Pegunungan Arfak	166	3	0	0	1	1.81%	0.00%	0.00%	0.60%
PAPUA BARAT		968	52	33	30	30	5.37%	3.41%	3.10%	3.10%

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2019-2022

2.3.1.5.3 Penyelesaian Konflik Massal

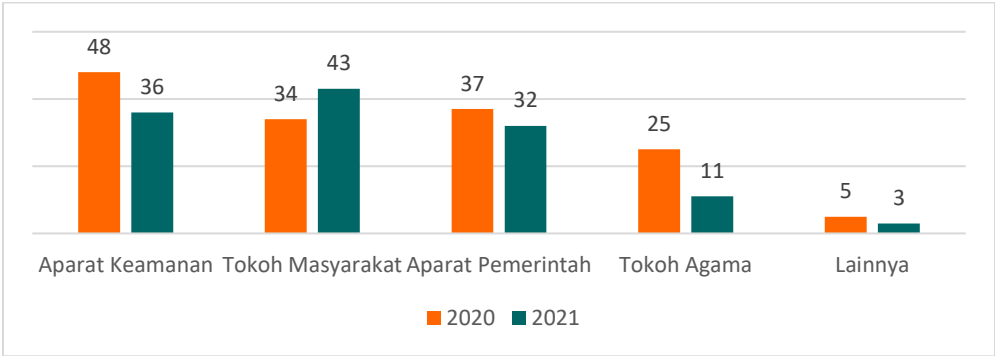
Dalam upaya menanggulangi isu konflik Pemerintah Daerah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sebagaimana Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial). Selain itu, terdapat strategi yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Gambar II.93 memetakan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik massal di Papua Barat. Berhubung tidak tersedia data terpilah kabupaten, maka angka-angka yang digunakan adalah untuk seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran. Dari gambar di bawah dapat diketahui bahwa Tokoh Masyarakat merupakan inisiator yang penting



dalam penyelesaian konflik. Pada tahun 2020 tokoh Masyarakat menempati urutan kedua setelah Aparat Keamanan (36 dan 48 kampung/kelurahan), Namun pada tahun 2021, tokoh masyarakat menduduki urutan teratas dengan 43 kampung/kelurahan yang konfliknya diselesaikan oleh kelompok ini

Gambar II.93 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran Tahun 2020 dan 2021

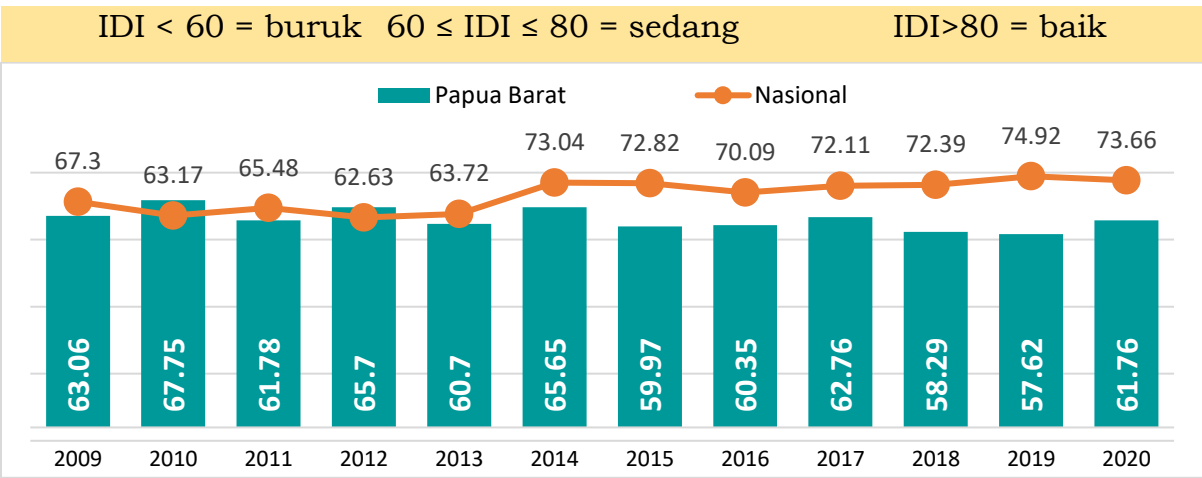


Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2021-2022

2.3.1.5.4 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution od democracy*). IDI disusun secara cermat berdasarkan *evidence based* (fakta / kejadian), dengan data yang dikumpulkan dari berita media massa, dokumen instansi/peraturan daerah, *focus group discussion* (FGD) serta wawancara mendalam.

Gambar II.94 Perkembangan IDI Papua Barat Pra-Pemekaran dan Nasional 2009-2020



Sumber: BPS Papua Barat dalam “Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020”

Sejak pengukuran pertama IDI tahun 2009 hingga tahun 2020, diketahui perkembangan IDI Papua Barat cukup berfluktuatif yang mencerminkan dinamika kinerja demokrasi Provinsi Papua Barat (lihat Gambar II.94). Namun



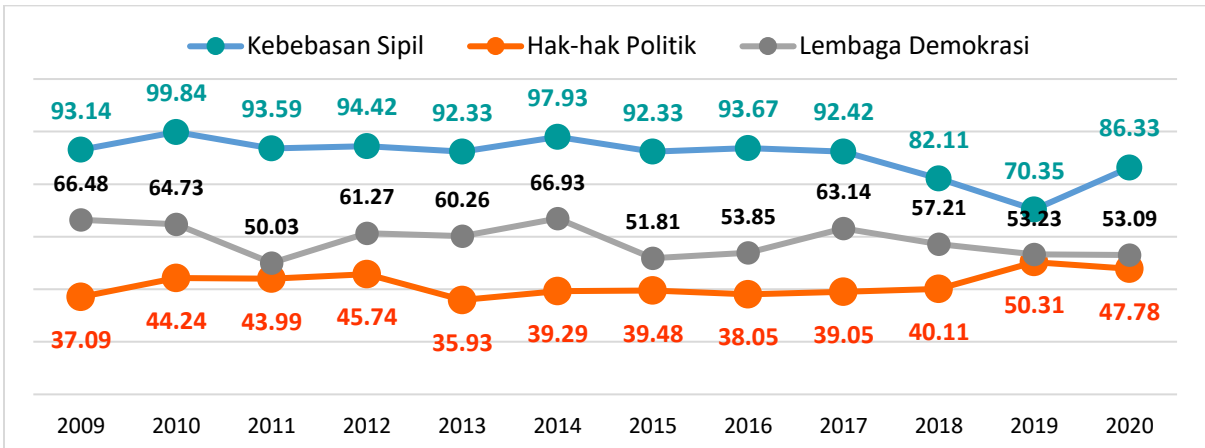
tidak tersedia data terpilah kabupaten sehingga indeks yang diuraikan di dalam bahasn ini adalah IDI untuk Provinsi papua Barat dengan 11 kabupaten sebelum pembentukan DOB.

IDI Papua Barat pra-pemekaran pada umumnya termasuk dalam kategori “sedang” ($60 \leq \text{IDI} \leq 80$), kecuali pada tahun 2015, 2018 dan 2019 termasuk dalam kategori “buruk”. Capaian tertinggi IDI Papua Barat terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 67,75. Namun demikian, pada tahun-tahun setelahnya terjadi perlambatan bahkan penurunan kinerja demokrasi di Papua Barat, hingga pada tahun 2020 IDI Papua Barat sebesar 61,76.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pada tahun 2009-2013 kondisi IDI Papua Barat tidak berbeda jauh dengan IDI nasional dan berada pada kategori “sedang”. Selanjutnya mulai tahun 2014 setelah dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2014 IDI nasional secara konsisten bergerak positif. Sebaliknya, IDI Papua Barat bergerak cukup fluktuatif berpindah antara kategori sedang dan buruk. Bahkan pada tahun 2019 (pada saat IDI nasional mencapai indeks tertinggi sejak pengukuran IDI), IDI Papua Barat justru tercatat berada pada kategori buruk dengan indeks sebesar 57,62.

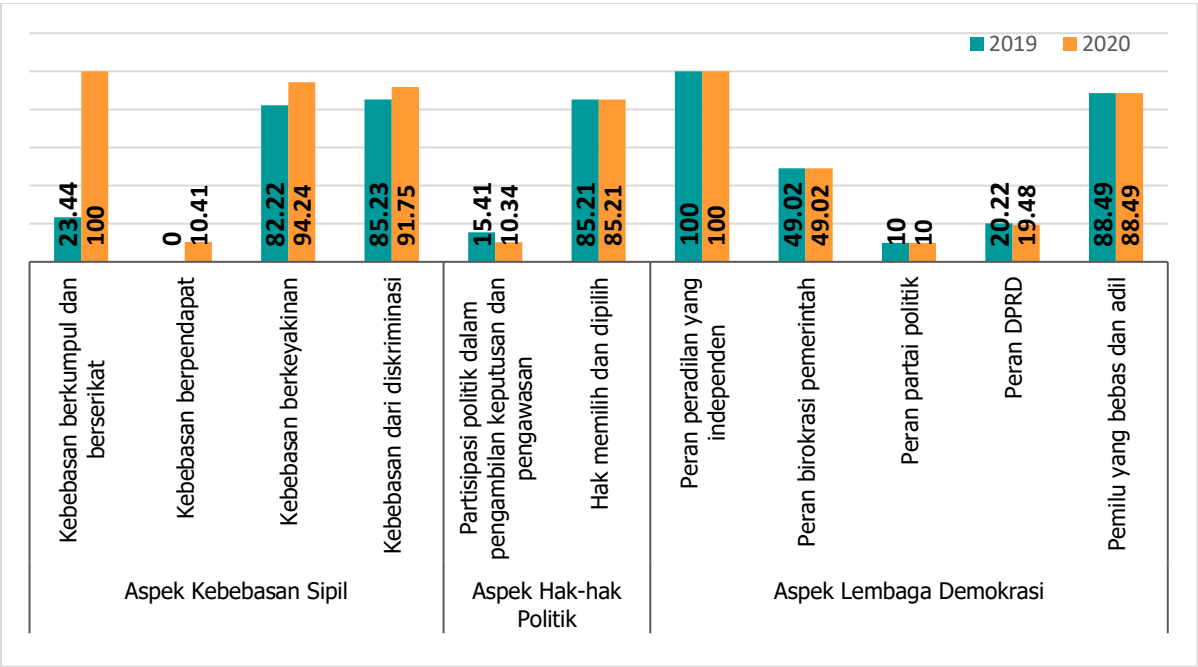
Pada tahun 2020 peningkatan IDI Papua Barat dipicu dengan adanya perbaikan aspek kebebasan sipil. Indeks kebebasan sipil mengalami peningkatan 15,98 poin dari 70,35 pada tahun 2019 menjadi 86,33 pada tahun 2020. Capaian ini mendongkrak kinerja aspek kebebasan sipil dari kategori sedang menjadi baik. Hal sebaliknya terjadi pada kedua aspek pembangun IDI lainnya. Indeks aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi pada tahun 2020 turun masing-masing sebesar 2,53 poin dan 0,14 poin. Apabila dilihat dari tren indeks aspek pada kedua aspek tersebut, mulai tahun 2017 aspek lembaga demokrasi terus mengalami penurunan, menempatkan aspek ini berkinerja buruk seperti pada aspek hak-hak politik (lihat Gambar II.95).

Gambar II.95 Perkembangan Indeks Aspek IDI Papua Barat Pra-Pemekaran 2009-2020



Sumber: BPS Papua Barat dalam “Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020”

Gambar II.96 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020



Sumber: BPS Papua Barat dalam “Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020”

Peningkatan aspek kebebasan sipil Papua Barat tahun 2020 terutama disebabkan oleh menurunnya: (1) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (2) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; (3) tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya; (4) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; serta (5) tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Penurunan aspek hak-hak politik Papua Barat tahun 2020 disebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun penurunan aspek lembaga demokrasi terutama disebabkan oleh menurunnya peran DPRD terutama dalam menghasilkan Perda inisiatif (lihat Gambar II.96).

2.3.1.6 Sosial

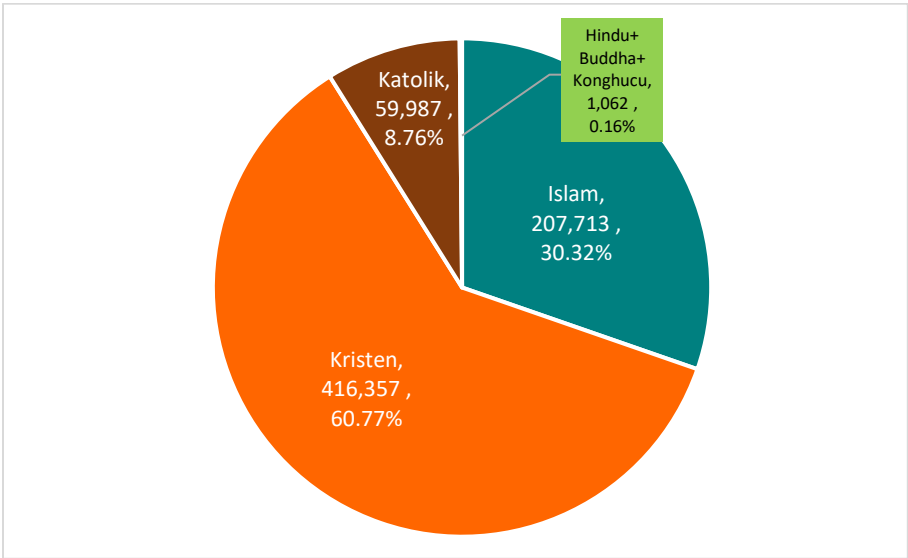
2.3.1.6.1 Agama dan Kepercayaan

Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia sehingga sektor agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Pada tahun 2021, sebagian besar penduduk Provinsi Papua Barat memeluk Agama Kristen Protestan (60,8%), sedangkan pemeluk Agama Islam dan Katolik berturut-turut mencakup



proporsi penduduk sebesar 30,3% dan 8,8%. Pemeluk agama lain, yakni Hindu, Buddha dan Konghucu, setelah dijumlahkan ketiganya hanya mencakup 0,2% dari seluruh penduduk Papua Barat. Gambar II.97 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk berdsasarkan agama yang dianut.

Gambar II.97 Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Agama, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, diketahui bahwa terdapat 2 kabupaten dengan persentase penduduk beragama Islam tertinggi, yakni Kabupaten Fakfak (60,1%) dan Teluk Bintuni.

Tabel II.53 Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Papua Barat per Kabupaten Menurut Agama, 2022

Kabupaten	Penduduk Menurut Agama											
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Buddha		Konghucu	
	Jumlah	% thd Kab	Jumlah	% thd Kab	Jumlah	% thd Kab	Jumlah	% thd Kab	Jumlah	% thd Kab	Jumlah	% thd Kab
Fakfak	53,964	60.12%	16,505	18.39%	19,189	21.38%	73	0.08%	28	0.03%	-	-
Kaimana	27,188	42.43%	30,890	48.20%	5,943	9.27%	45	0.07%	11	0.02%	4	0.01%
Teluk Wondama	12,973	23.50%	41,140	74.54%	989	1.79%	81	0.15%	8	0.01%	3	0.01%
Teluk Bintuni	39,920	46.13%	28,243	32.63%	18,270	21.11%	65	0.08%	48	0.06%	-	-
Manokwari	64,831	20.46%	236,245	74.54%	15,153	4.78%	412	0.13%	284	0.09%	-	-
Manokwari Selatan	8,837	17.93%	40,006	81.17%	443	0.90%	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	23,328	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	207,713	30.32%	416,357	60.77%	59,987	8.76%	676	0.10%	379	0.06%	7	0.00%

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Sebanding dengan jumlah penduduk pemeluknya, demikian pula sebaran tempat ibadah menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat. Tempat ibadah untuk umat Kristen merupakan yang terbanyak di Provinsi Papua Barat (66,0%). Proporsi tempat ibadah ini serupa di hampir semua kabupaten, kecuali di Kabupaten Fakfak yang lebih banyak memiliki tempat peribadahan untuk Agama Islam. Tabel II.54 menunjukkan sebaran tempat ibadah di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.54 Jumlah Tempat Ibadah per Kabupaten Menurut Agama di Papua Barat, 2022

Kabupaten	Jumlah Tempat Ibadah menurut Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu
Fakfak	102	83	33	1	0	1
Kaimana	94	102	11	1	1	0
Teluk Wondama	2	93	1	1	0	0
Teluk Bintuni	55	146	41	1	1	0
Manokwari	84	327	29	8	2	0
Manokwari Selatan	8	60	2	0	0	0
Pegunungan Arfak	0	120	0	0	0	0
Papua Barat	345	931	117	12	4	1
Persentase	24.47%	66.03%	8.30%	0.85%	0.28%	0.07%

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.6.2 Bantuan dan Jaminan Sosial

Penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran, yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui bantuan dan jaminan sosial yang merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Bentuk bantuan ini antara lain berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan. Program Indonesia Pintar (PIP), dan asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS).

Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung.

Tabel II.55 Persentase Keluarga yang Menerima Bantuan Pangan NonTumai Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2022

No	Wilayah	Persentase Keluarga Penerima Manfaat			
		2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	0,00	0.00	19.06	13.42
2	Kaimana	0,00	3.19	5.53	4.94
3	Teluk Wondama	0,00	0.27	18.61	13.88
4	Teluk Bintuni	0,00	7.38	12.80	12.93
5	Manokwari	0,00	13.37	11.75	8.34
6	Manokwari Selatan	0,00	8.33	28.18	12.36
7	Pegunungan Arfak	0,00	4.94	20.50	5.70
Rata-Rata		0,00	257.19	267.18	261.7

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020-2022

Di Provinsi Papua Barat, data mengenai penerima program ini tersedia sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 hanya Kota Sorong yang melaporkan angka penerima BPNT. Selanjutnya terjadi fluktuasi jumlah keluarga penerima manfaat dari bantuan ini, yang jika dirata-ratakan dari 7 kabupaten di Provinsi



Papua Barat, penerimanya 5,35%, 16,63% dan 10,22% berturut-turut pada tahu 2020, 2021 dan 2022. Pilahan per kabupaten menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase keluarga yerbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (13,4%), kemudian di tahun 2021 di Kabupaten Manokwari Selatan (28,2%) dan di tahun 2022 Kabupaten Teluk Wondama (13,9%). Tabel II.55 menunjukkan sebaran penerima manfaat BPNT tahun 2019-2022.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Dalam 3 tahun terakhir, persentase rata-rata keluarga penerima manfaat dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, yakni dari rata-rata 9,0% (2020) meningkat manjadi 10,3% (2021) dan 13,5% (2022). Pada tahun 2020 dan 2021, Kabaupaten Manokwari Selatan tercatat memiliki persentase KPM tertinggi (berturut-turut 18,4% dan 16,7%), sedangkan di Tahun 2022, persentase terbanyak dilaporkan terdaat di Kabupaten Fakfak (25,1%). Tabel II.56 menunjukkan sebaran KPM PKH di Papua Barat dalam 3 tahun terakhir.

Tabel II.56 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	2020	2021	2022
1	Fakfak	6.14	13.22	25.14
2	Kaimana	1.05	2.44	4.99
3	Teluk Wondama	8.12	15.76	15.37
4	Teluk Bintuni	9.74	8.31	14.87
5	Manokwari	16.69	15.64	12.38
6	Manokwari Selatan	18.39	16.72	14.22
7	Pegunungan Arfak	2.53	0.00	7.41
Rata-Rata		260.33	261.640	264.55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020-2022

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014

Data penerima manfaat PIP di Provinsi Papua Barat tersedia hingga tahun 2021. Dari data ini diketahui bahwa penerima manfaat cenderung menurun



jumlahnya dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 cakupan PIP 8,3% (rata-rata dari 7 kabupaten) lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 10,4% di tahun 2019 dan 11,0% tahun 2020. Kabupaten yang paing tinggi persentasenya dari tahun ke tahun adalah Teluk Bintuni (2017-2018), Teluk Wondama (2019 dan 2021) dan Manokwari Selatan (2020). Tabel II.57 menunjukkan cakupan penerima manfaat PIP tahun 2017-2021.

Tabel II.57 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2021

NO	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fakfak	16.06	13.44	10.88	6.27	8.32
2	Kaimana	12.54	13.33	11.49	7.69	11.41
3	Teluk Wondama	6.36	6.45	15.53	14.38	11.58
4	Teluk Bintuni	21.62	21.68	12.26	14.85	8.05
5	Manokwari	12.54	10.00	9.76	11.58	6.48
6	Manokwari Selatan	15.61	18.48	13.41	18.27	10.18
7	Pegunungan Arfak	6.42	0.38	1.46	2.99	2.50
Rata-Rata		263.52	262.72	261.72	262	259.940

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2018-2022

Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Kartu ini merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial, antara lain BPNT dan PIP.

Dalam 4 tahun terakhir, Keluarga Pemegang KKS di Provinsi Papua Barat cenderung meningkat, dari 8,7% di tahun 2019 menjadi 12,6% di tahun 2022. Persentase keluarga penerima manfaat per kabupaten berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, 2021 dan 2022 Kabupaten Fakfak menduduki peringkat tertinggi untuk cakupan keluarga pemegang KKS, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 peringkat tertinggi berturut-turut ditunjukkan oleh kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan (lihat Tabel II.58).

Tabel II.58 Persentase Keluarga Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten	Persentase Keluarga Penerima Manfaat				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	16.01	5.07	6.39	24.23	20.14
2	Kaimana	12.83	10.14	11.31	8.76	12.31
3	Teluk Wondama	12.70	7.31	12.67	14.04	11.14
4	Teluk Bintuni	11.22	5.54	9.86	9.41	14.75
5	Manokwari	8.49	13.06	11.11	10.04	7.53
6	Manokwari Selatan	14.96	11.97	17.61	13.04	10.64
7	Pegunungan Arfak	2.18	7.38	5.93	0.26	11.36
Rata-Rata		11.20	8.64	10.70	11.40	12.55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2018-2022



Jaminan Sosial

Tabel II.59 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial tahun 2020-2022, yaitu berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, serta pesangon PHK. Dari tabel tersebut diketahui bahwa cakupan seluruh program jaminan sosial mengalami penurunan di Papua Barat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, namun sedikit meningkat lagi pada tahun 2022,

Tabel II.59 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2022

Jenis Jaminan Sosial	Cakupan Penerima Manfaat (%)		
	2020	2021	2022
Jaminan Pensiun	13.15	8.91	9.30
Jaminan Hari Tua	11.42	8.34	8.67
Asuransi Kecelakaan Kerja	9.93	8.50	8.75
Jaminan / Asuransi Kematian	11.11	8.27	8.50
Pesangon PHK	4.23	2.14	2.60

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020-2022

Tinjauan terhadap cakupan per kabupaten pada tahun 2022 mendapatkan bahwa Kabupaten Kaimana memiliki cakupan tertinggi untuk ke-5 jenis jaminan sosial dimaksud, sedangkan cakupan terendah dimiliki oleh Kabupaten Pegunungan Arfak. Tabel II.60 menunjukkan perbandingan cakupan jaminan sosial antara Pegunungan Arfak dengan Kaimana tahun 2022.

Tabel II.60 Perbandingan Cakupan Jaminan Sosial Antara Wilayah dengan Cakupan Terendah (Pegunungan Arfak) dan Wilayah dengan Cakupan Tertinggi (Kaimana), 2022

Jaminan Sosial	Cakupan Terendah (Kab. Pegunungan Arfak) (%)	Cakupan Tertinggi (Kab. Kaimana) (%)
Jaminan Pensiun	0.83	16.31
Jaminan Hari Tua	0.66	17.59
Asuransi Kecelakaan Kerja	0.66	16.63
Jaminan / Asuransi Kematian	0.66	18.63
Pesangon PHK	0.19	5.62

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020-2022

2.3.1.7 Tenaga Kerja

2.3.1.7.1 Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja berhubungan erat dengan profil kependudukan, utamanya yang berusia produktif. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tabel II.61 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Barat menurut jenis kegiatan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.61 diketahui



bahwa 95,90% Angkatan kerja di Papua Barat telah bekerja. Persentase Angkatan kerja yang telah bekerja tertinggi terdapat di Pegunungan Arfak (99,88%), sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Fakfak (93,25%). Meskipun demikian, jumlah angkatan pengangguran yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Manokwari, yaitu sebesar 4.545 penduduk.

Tabel II.61 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2022 (%)

Kabupaten		Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1	Fakfak	35.162	2.547	37.709	93,25
2	Kaimana	35.161	1.214	36.375	96,66
3	Teluk Wondama	16.882	497	17.379	97,14
4	Teluk Bintuni	33.848	1.257	35.105	96,42
5	Manokwari	79.411	4.545	83.956	94,59
6	Manokwari Selatan	14.720	158	14.878	98,94
7	Pegunungan Arfak	24.379	30	24.409	99,88
Papua Barat		239.563	10.248	249.811	95,90

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2023

2.3.1.7.3 Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel II.62 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.62 diketahui bahwa mayoritas penduduk Papua Barat bekerja di sector pertanian (43,95%) serta sektor perdagnagan dan jasa (45,24%). Penduduk yang bekerja di sektor industri relatif kecil yaitu hanya sebesar 10,80% atau 25.874 penduduk.

Tabel II.62 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Kabupaten		Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		1	2	3	
1	Fakfak	13.462	3.466	18.234	35.162
2	Kaimana	15.825	2.480	16.856	35.161
3	Teluk Wondama	9.293	1.989	5.600	16.882
4	Teluk Bintuni	11.120	5.007	17.721	33.848
5	Manokwari	26.247	12.069	41.095	79.411
6	Manokwari Selatan	7.654	863	6.203	14.720
7	Pegunungan Arfak	21.698	0	2.681	24.379
Papua Barat		105.299	25.874	108.390	97,15
		43,95%	10,80%	45,24%	100,00%

Catatan:

- 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
- 2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi
- 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2023

Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor pertanian adalah Kabupaten Teluk Wondama,



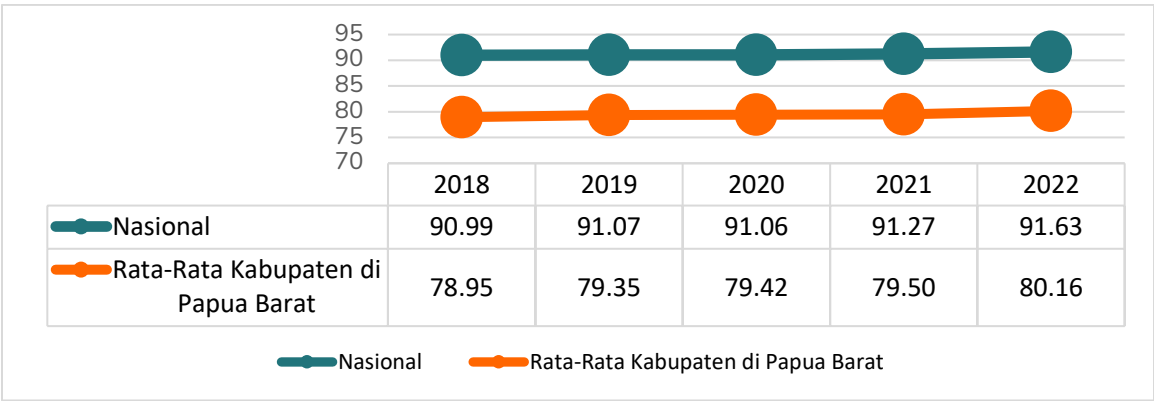
Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Adapun wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor perdagangan dan jasa adalah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Di sektor industri, meskipun memiliki penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil di tingkat provinsi secara umum, namun pekerja sektor industri cukup tinggi berada di Kabupaten Manokwari (12.069 penduduk).

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1.8.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Gambar II.98 memperlihatkan grafik dan angka capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan nasional. Angka Provinsi yang digunakan adalah angka rata-rata dari 7 kabupaten, karena belum tersedia data terpilah provinsi baru pasca pembentukan DOB.

Gambar II.98 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

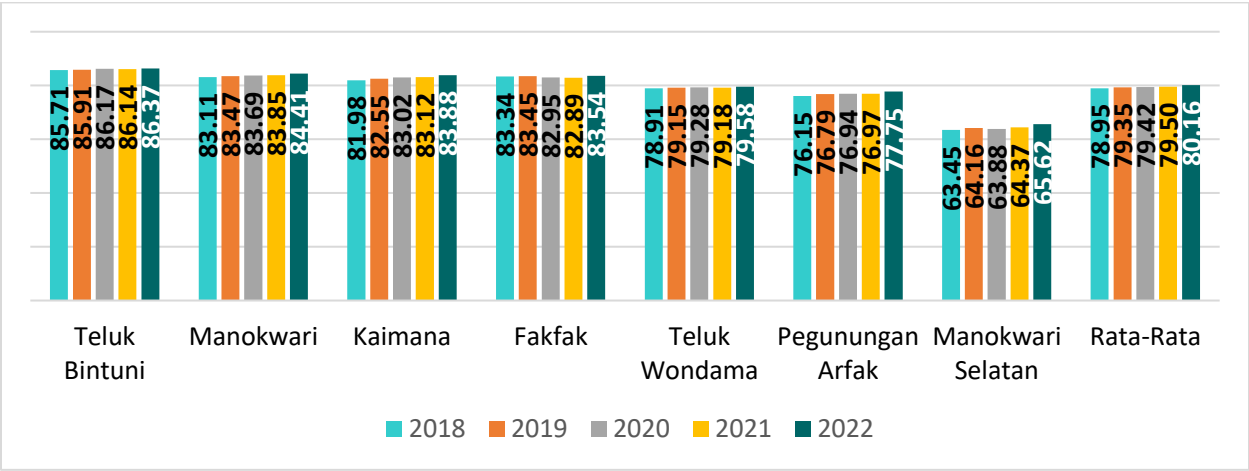


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Pemilahan berdasarkan Kabupaten menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir semua kabupaten di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan IPG dalam 5 tahun terakhir. IPG tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (86,4), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Manokwari Selatan (65,6), sebagaimana yang ditunjukkan Gambar II.99.



Gambar II.99 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022

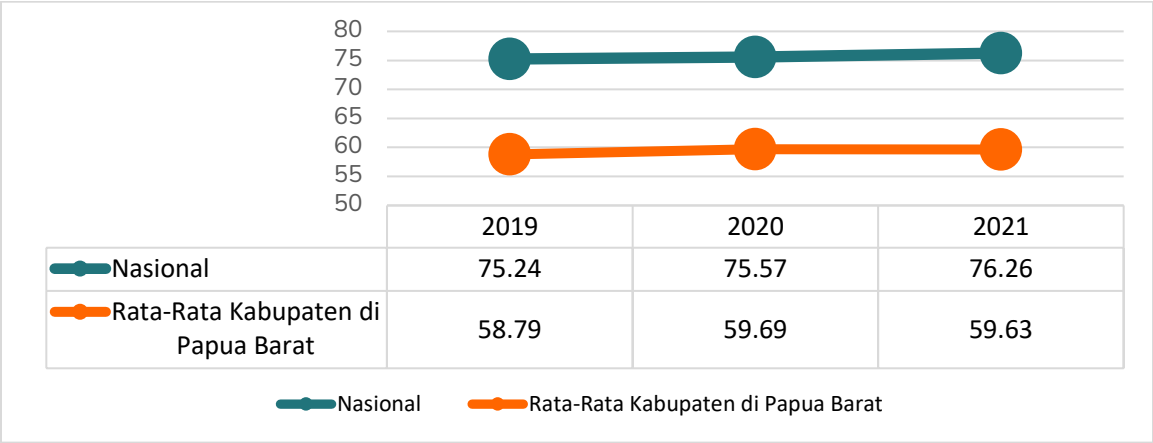


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.8.2 Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Papua Barat tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Gambar II.100 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2021

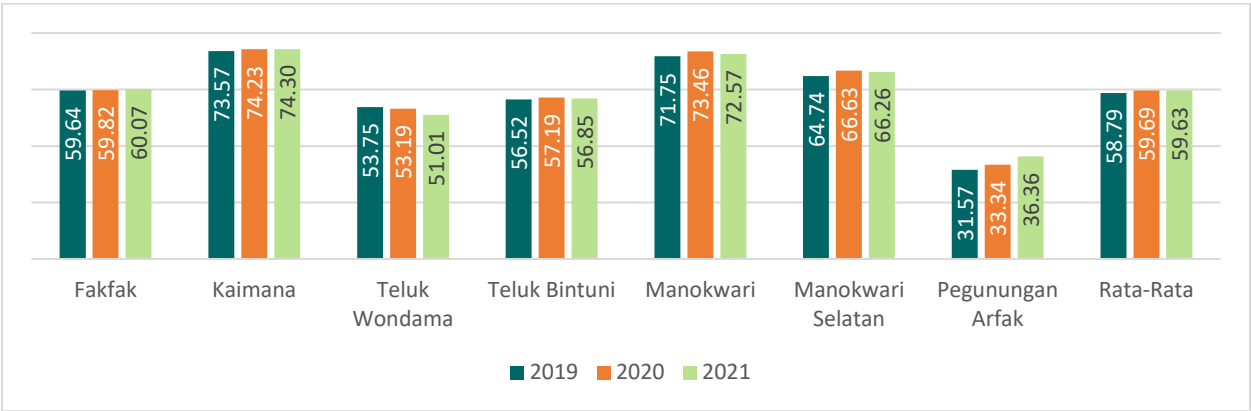


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

IDG di Papua Barat yang dihitung dari rata-rata 7 kabupaten pasca pemerkaran menunjukkan penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun masih lebih tinggi daripada angka tahun 2019. Gambar II.100 memperlihatkan ilustrasi dan data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan nasional. Jika dipilah berdasarkan

kabupaten, penurunan IDG pada tahun 2021 terjadi pada Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Manokwari. Gambar II.101 memperlihatkan capaian IDG Provinsi Papua Barat menurut kabupaten dalam 3 tahun terakhir, 2019 - 2021.

Gambar II.101 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.8.3 Persentase Partisipasi Perempuan di Dunia Kerja

Tingkat peran perempuan dalam dunia kerja, diukur melalui Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten (Persen). Dalam tingkat provinsi, persentase perempuan dalam bidang pekerjaan itu mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir namun masih tergolong masih rendah, yakni 35,92% (2019) hingga 39,57% (2022), sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel II.63.

Tabel II.63 Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten

Kabupaten	2019	2020	2021
Fakfak	40.67	40.65	44.56
Kaimana	41.84	44.31	50.43
Teluk Wondama	39.21	36.72	32.79
Teluk Bintuni	38.88	41.3	40.98
Manokwari	35.85	40.72	41.47
Manokwari Selatan	35.74	43.69	41.54
Pegunungan Arfak	19.26	20.59	25.21
Papua Barat	35.92	38.28	39.57

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.8.4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Indikator ini ingin melihat keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif di tingkat daerah. Indikator ini memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, khususnya di Lembaga legilatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. Meskipun



proporsi perempuan yang duduk di posisi DPR masih tergolong sangat rendah (Tabel II.64), yakni 14,71% dan tidak berubah dalam tiga tahun terakhir (2019-2021). Kabupaten Manokwari memiliki persentase tertinggi (28%), sedangkan Pegunungan Arfak hanya mencapai 5%. Tabel II.64 menunjukkan keterlibatan perempuan di DPR tingkat Kabupaten.

Tabel II.64 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Kabupaten	2019	2020	2021
Fakfak	10	10	10
Kaimana	20	20	20
Teluk Wondama	10	10	10
Teluk Bintuni	10	10	10
Manokwari	28	28	28
Manokwari Selatan	20	20	20
Pegunungan Arfak	5	5	5
Rata-Rata	14.71	14.71	14.71

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.3.1.8.5 Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan

Tabel II.65 menunjukkan perbandingan antara APM pada tingkat SD, SMP dan SMA yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin di wilayah Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran. Apabila dilihat secara keseluruhan, pada tahun 2018 dan 2019 APM laki-laki lebih tinggi daripada APM perempuan. Tapi apabila dilihat dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2020-2021, APM perempuan menunjukkan peningkatan yang bisa menyandingi, atau bahkan melebihi APM laki-laki. Pola tersebut berlaku untuk semua jenjang Pendidikan.

Tabel II.65 APM SD, SMP dan SMA berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran, 2018-2021

Kategori	2018	2019	2020	2021
APM tingkat Pendidikan SD				
Perempuan	92.8	93.04	93.38	94.07
Laki-laki	94.47	94.77	94.29	94.04
APM tingkat Pendidikan SMP				
Perempuan	68.62	68.88	72.56	71.19
Laki-laki	69.57	70.86	68.56	69.93
APM tingkat Pendidikan SMA				
Perempuan	60.05	64.97	65.52	65.48
Laki-laki	65.69	61.57	61.88	61.72

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat

Tabel II.66 Perbandingan APS Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Selisih
5-6 tahun	24.09	21.69	2.40
7-12 tahun	96.23	96.64	-0.41
13-15 tahun	95.26	96.27	-1.02
16-18 tahun	79.40	74.95	4.45

Sumber: BPS Proovinsi Papua Barat 2023

Data terpilah kabupaten pasca pemekaran provinsi yang terssedia adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2022. Dari data ini nampak bahwa pada jenjang pendidikan SMP dan SMA (usia 7-12 dan 13-15 tahun), perempuan

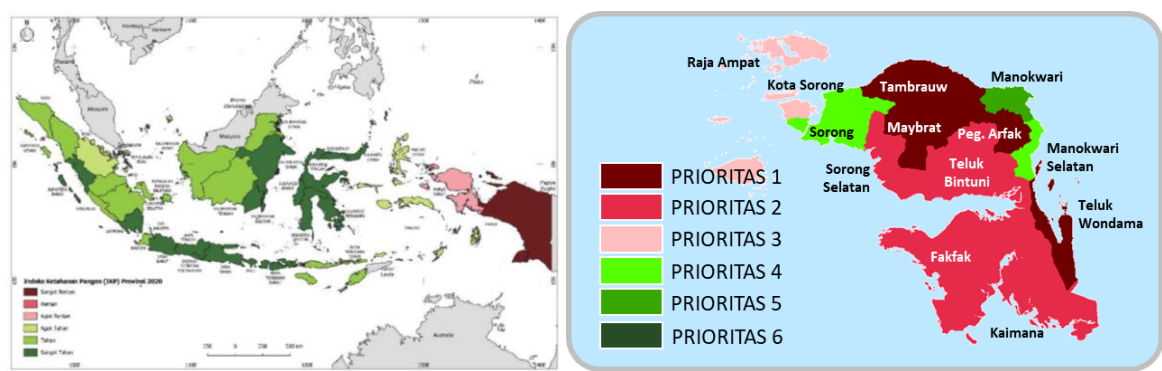
memiliki APS yang lebih tinggi daripada laki-laki, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.66.

2.3.1.9 Pangan

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan suatu daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Berdasarkan IKP tahun 2018-2020 diketahui bahwa Papua Barat sebelum pemekaran termasuk dalam **wilayah rentan pangan prioritas 2** yang sangat bergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain / sentra produksi pangan (lihat Tabel II.67 dan Gambar II.102). Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi di Papua Barat.

Berdasarkan kabupaten, daerah yang termasuk **wilayah rentan pangan prioritas 1** adalah Kabupaten Teluk Wondama (skor= 33,07) dan Pegunungan Arfak (skor = 29,05). **Wilayah rentan pangan prioritas 2** adalah Kabupaten Fakfak (skor = 45,51), Kaimana (skor = 46,06) dan Teluk Bintuni (skor = 47,09). Adapun wilayah yang memiliki Indeks Ketahanan Pangan tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (75,42 = prioritas 5) dan Manokwari Selatan (65,78 = prioritas 4) (lihat Tabel II.67).

Gambar II.102 Peta Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Tahun 2020



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen “Indeks Ketahanan Pangan 2020”

Tabel II.67 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dan Provinsi Papua Barat

Wilayah		Uraian	2018	2019	2020
Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran	IKP (indeks)		N/A	30,12	49,40
	Kategori		Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
	Interpretasi		Tingkat kerentanan	Tingkat kerentanan	Tingkat kerentanan

Wilayah		Uraian	2018	2019	2020
			pangan relatif sangat tinggi	pangan relatif sangat tinggi	pangan relatif sangat tinggi
		a. Indeks Ketersediaan (IK)	N/A	3,56	28,23
		b. Indeks Keterjangkauan	N/A	44,23	60,74
		c. Indeks Pemanfaatan (IP)	N/A	39,46	54,59
Kabupaten					
1	Fakfak	IKP (indeks)	39,29	47,74	45,51
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2
2	Kaimana	IKP (indeks)	45,54	46,40	46,06
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
3	Teluk Wondama	IKP (indeks)	33,22	27,34	33,07
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
4	Teluk Bintuni	IKP (indeks)	37,23	41,47	47,09
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 2
5	Manokwari	IKP (indeks)	61,41	68,80	75,42
		Kategori	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 5
6	Manokwari Selatan	IKP (indeks)	54,30	36,33	65,78
		Kategori	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 4
7	Pegunungan Arfak	IKP (indeks)	30,22	23,40	29,05
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen “Indeks Ketahanan Pangan 2018-2020”

2.3.1.9.1 Konsumsi Kalori dan Protein Perkapita Sehari

Angka kecukupan konsumsi kalori / energi (AKE) untuk penduduk Indonesia adalah 2.150 kkal per kapita sehari, sedangkan angka kecukupan konsumsi protein (AKP) adalah 50 gram per kapita sehari. Angka kecukupan tersebut menunjukkan banyak kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap penduduk dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif. Apabila ditinjau berdasarkan kecukupan kalori/energi dan protein, pada tahun 2016-2021 **rata-rata konsumsi kalori masyarakat Papua Barat sebelum pemekaran belum mencapai standar kecukupan konsumsi harian (<2.150 kkal per kapita sehari)**, meskipun rata-rata konsumsi protein per kapita sehari telah memenuhi standar (>50 gram per kapita sehari). Pada Maret 2016, rata-rata konsumsi kalori masyarakat Papua Barat sebesar 1828,53 kkal dan meningkat menjadi 1911,04 kkal pada Maret 2021.

Tabel II.68 Rata-rata Konsumsi Protein dan Kalori Per Kapita Sehari di Papua Barat 2016-2021

No	Indikator	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021
1	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (gram)						
	a. Papua Barat Sebelum Pemekaran	50,00	53,20	56,48	56,60	55,16	54,82
	b. Indonesia	56,67	62,20	62,19	62,13	61,98	62,28
2	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (kkal)						
	a. Papua Barat Sebelum Pemekaran	1828,53	1875,44	1944,26	1922,27	1902,71	1911,04
	b. Indonesia	2037,40	2152,64	2147,09	2120,52	2112,06	2143,21

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi”



2.3.1.9.2 Kelompok Komoditi Penyumbang Kalori dan Protein

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya (kecuali Air Susu Ibu / ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan), sebagai contoh:

- 1. nasi merupakan sumber utama kalori tetapi miskin vitamin dan mineral;
- 2. sayur dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, meneral dan serat, tetapi miskin kalori dan protein; dan
- 3. ikan dan daging merupakan sumber utama protein tetapi sedikit kalori.

Tabel II.69 Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan, Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran, Maret 2021

No	Kelompok Komoditas Makanan	Total Konsumsi		Distribusi Konsumsi	
		Kalori (kkal)	Protein (gram)	Kalori (%)	Protein (%)
1	Padi-padian	779,86	18,34	40,81	33,45
2	Umbi-umbian	131,67	0,80	6,89	1,46
3	Ikan/ udang/ cumi/ kerang	83,32	14,40	4,36	26,27
4	Daging	67,37	3,55	3,53	6,48
5	Telur dan susu	52,60	2,75	2,75	5,02
6	Sayur-sayuran	41,03	2,86	2,15	5,22
7	Kacang-kacangan	32,08	3,16	1,68	5,76
8	Buah-buahan	44,76	0,43	2,34	0,78
9	Minyak dan Kelapa	297,84	0,10	15,59	0,18
10	Bahan minuman	98,63	0,63	5,16	1,15
11	Bumbu-bumbuan	7,51	0,29	0,39	0,53
12	Konsumsi lainnya	43,49	0,91	2,28	1,66
13	Makanan dan minuman jadi	230,86	6,61	12,08	12,06
Rata-rata Konsumsi di Papua Barat		1.911,04	54,82	100,00	100,00

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi”

Berdasarkan Tabel II.69, terdapat tiga kelompok makanan dengan angka konsumsi kalori per kapita harian tertinggi, yaitu padi-padian (40,81%), minyak dan kelapa (15,59%), makanan dan minum Jadi (12,08%) dan umbi-umbian (6,89%). Sedangkan kelompok makanan dengan angka konsumsi protein per kapita tertinggi di Papua Barat, yaitu padi-padian (33,45%), ikan/ udang/ cumi/ kerang (26,27%), serta makanan dan minuman jadi (12,06%). Kelompok makanan daging serta kelompok makanan telur dan susu memiliki angka konsumsi protein yang rendah yaitu 6,48% dan 5,02%.

2.3.1.10 Pertanian

Ketersediaan tanah atau lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai suatu rencana dasar memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau



karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Dalam hal ini, di wilayah Provinsi Papua Barat perlu diperhatikan adanya berbagai jenis status (penguasaan) tanah sebagai berikut:

a. Tanah negara bebas	c. Tanah negara yang telah
b. Tanah negara yang dibebani, di dalamnya termasuk:	diperuntukkan
• Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH	d. Tanah negara yang dikuasai penduduk
• Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA)	e. Tanah negara yang dikuasai instansi
• Hutan Suaka Alam (HSA)	f. Hak Milik Adat
• Hutan Lindung	g. Hak Guna Usaha
• Hutan Produksi	h. Hak Pakai
• Kontrak Karya	i. Hak Pengelolaan
• Kuasa Pertambangan	j. Hak Guna Bangunan
	k. Hak Milik

Permasalahan yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang pada umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal ini dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis).

Pola kepemilikan lahan di Provinsi Papua terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau Ondoafi. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tanah *Milik*, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah



yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.

- Tanah *Milik dengan Hak Pakai*, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal tersebut dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting yang perlu dibahas di Provinsi Papua Barat, ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat. IKLH merupakan hasil komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan Tabel II.70, IKLH Provinsi Papua Barat pada publikasi terakhir memiliki nilai 84,22 yang termasuk dalam klasifikasi **“baik”**. Secara keseluruhan, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan nilai IKLH tertinggi secara nasional. Apabila ditinjau berdasarkan komponen IKLH, komponen dengan capaian paling tinggi adalah Indeks Kualitas Lahan (100,00) dan Indeks Kualitas Udara (95,79) dengan kategori sangat baik.

Tabel II.70 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Papua Barat 2016-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	85,69	91,50	89,96	83,96	n.a	84,22
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	82,50	81,25	53,89	53,96	n.a	62,00
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	n.a	n.a	n.a	n.a	81,00	89,30
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,63	90,41	92,64	92,64	95,00	95,79
5	Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	80,63	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00

Catatan: data IKLH Provinsi Papua Barat yang diperoleh dari KLHK masih mencakup 13 kabupaten/kota
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023



Penentuan nilai indeks ini ditentukan oleh beberapa pengambilan sampel pada titik sampling. Pada tahun 2019 untuk mendapatkan nilai IKA, terdapat 1 sungai di Papua Barat yang diambil sampelnya pada 6 titik pantau. Untuk menentukan nilai IKU, terdapat total 12 titik pengambilan sampel di Papua Barat, yang bervariasi antara area industri, area transportasi, area perkantoran, dan area pemukiman.

Untuk mempertahankan hasil IKLH yang tinggi, serta meningkatkan hasil pada aspek tertentu (secara spesifik di aspek kualitas air untuk Provinsi Papua Barat), diperlukan upaya lebih dalam strategi perbaikan kualitas lingkungan dan memfokuskan pada perbaikan indikator-indikator strategis. Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan intensitas pemantauan kualitas lingkungan agar data yang diperoleh untuk peningkatan kedepannya merupakan data yang lebih valid dan representatif terhadap mutu lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat. Selain nilai IKLH, terdapat beberapa aspek lainnya yang ditentukan sebagai indikator kinerja daerah provinsi. Berikut adalah indikator-indikator kinerja aspek lingkungan hidup.

Tabel II.71 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017 - 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio sungai yang dipantau baku mutunya	%	-	-	24,00	20,14	-
2	Rasio udara yang dipantau	%	-	-	23,97	37,42	-
3	Rasio tempat pembuangan sampah sementara	%		-	-	-	27,00
4	Persentase penanganan sampah	%	-	25,00	55,00	74,12	75,64
5	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air	%	-	4,00	-	-	-
6	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	%	-	-	50,00	-	-
7	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	50,00	50,00
8	Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup	%	-	-	-	-	-
9	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	%	-	-	-	22,22	40,00
10	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL	%	78,00	82,00	73,52	-	-

Sumber: Bappeda / Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.71 dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian yang dilakukan oleh bidang lingkungan hidup dari tahun ke tahun, terutama dalam upaya penanganan sampah. Peningkatan upaya ini perlu diteruskan supaya lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat terus terjaga



pelestariannya. Pembangunan-pembangunan infrastruktur pendukung seperti prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pengembangan TPA, pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem terpadu, pengelolaan limbah industri dan pertambangan, serta pengembangan sistem drainase perlu diupayakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup dan mendukung komitmen Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang peka terhadap keadaan lingkungan hidup dan alam di sekitarnya.

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang urusan ini merupakan salah satu urusan penting dalam tata pemerintahanan daerah maupun nasional. Dengan memiliki database yang lengkap dan akurat, nantinya para perumus kebijakan akan menggunakan database ini sebagai acuan perumusan dan perencanaan pembangunan agar tepat sasaran. Penggunaan NIK nasional dan penerapan e-KTP membantu pemrosesan database kependudukan ini, dengan mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda ataupun KTP palsu.

2.3.1.12.1 Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Cakupan Penduduk ber-KTP

Persentase Penduduk Ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap seluruh penduduk usia 17 tahun ke atas. Tabel II.72 akan menampilkan capaian provinsi terhadap cakupan penduduk yang memiliki KTP. Secara umum, cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat meningkat, dan telah mencapai 63.64% pada tahun 2020.

Tabel II.72 Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat 2017-2021 (%)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan penduduk yang memiliki KTP	37.32	48.82	56.92	63.64	N/A

Sumber: Bappeda Papua Barat, 2022

Penduduk 17 tahun ke atas yang ber-NIK

Cakupan penduduk 17 tahun keatas yang ber-NIK cenderung memiliki trend penurunan dari tahun 2017 menuju tahun 2019. Adapun data untuk tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia.

Tabel II.73 Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat, 2017-2021 (%)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk 17 tahun ke atas yang ber-NIK	96.15	86.18	92.26	N/A	N/A

Sumber: Bappeda Papua Barat



Rasio pasangan yang ber-akte nikah

Akta nikah adalah dokumen yang penting dalam sebuah keluarga. Pencatatan pernikahan dianggap sah secara hukum oleh negara apabila ada akta nikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, hak untuk mendapatkan akta lahir bagi anak juga bisa di proses apabila orang tua memiliki akta nikah. Berdasarkan Tabel II.74, terlihat bahwa cakupan pasangan yang memiliki akta nikah di Provinsi Papua Barat sangat rendah. Meskipun mengalami trend peningkatan, namun angkanya masih dibawah 50% pada tahun 2021, yaitu hanya sebesar 37.73%.

Tabel II.74 Rasio Pasangan yang berakte nikah di Papua Barat, 2017-2021 (%)

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio pasangan yang berakte nikah	12.57	14.23	22	26	37.73

Sumber: Bappeda Papua Barat, 2022

Kepemilikan Akta Lahir

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh hak-haknya. Tabel II.75 akan menampilkan persentase penduduk yang memiliki akta lahir untuk usia 0-17 tahun, sementara Tabel II.76 akan untuk 0-4 tahun berdasarkan survey oleh BPS yang dicantumkan dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel II.75 Persentase penduduk berumur 0-17 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran di Papua Barat tahun 2018-2021 (%)

Persentase penduduk berumur 0-17 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Ya (menunjukkan)	43.84	45.31	47.54	40.5
Ya (tidak menunjukkan)	26.92	29.75	29.03	33.73
Tidak memiliki	28.49	24.33	22.89	29.47
Tidak tau	0.75	0.62	0.54	0.8

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2016-2021

Tabel II.76 Persentase penduduk berumur 0-4 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran di Papua Barat tahun 2018-2021 (%)

Persentase penduduk berumur 0-4 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Ya (menunjukkan)	32.85	34.46	36.36	29.96
Ya (tidak menunjukkan)	19.55	20.03	22.17	24.53
Tidak memiliki	47.07	44.7	41.17	44.64
Tidak tau	0.53	0.81	0.3	0.87

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2016-2021

2.3.1.12.2 Layanan Dokumen Kependudukan

Pelayanan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh WNI, antara lain Biodata Penduduk; Kartu Keluarga; KTP; surat keterangan kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil. Peran provinsi dalam konteks urusan administrasi kependudukan adalah sebagai koordinator, pembina, dan pengawas di lingkup kabupaten. Hal tersebut dikarenakan peran utama terkait pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengumpulan data kependudukan dalam urusan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah di kabupaten/kota. Kewajiban dan tanggung jawab Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kab/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.3.1.13.1 Indeks Desa Membangun (IDM)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa/kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata sosialnya.

Tabel II.77 Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	kampung sangat tertinggal	$0,270 \leq \text{IDM} \leq 0,491$
2	kampung tertinggal	$0,491 < \text{IDM} \leq 0,599$
3	kampung berkembang	$0,599 < \text{IDM} \leq 0,707$
4	kampung maju	$0,707 < \text{IDM} \leq 0,815$
5	kampung mandiri	$0,815 < \text{IDM} \leq 0,920$

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pemberdayaan merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Barat dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Papua Barat berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.77. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitasi pemajuan kampung di Papua Barat menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel II.78 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Papua Barat

Indikator		2016	2019	2020	2021
Nilai Rata-rata IDM Provinsi Papua Barat		0.4689	0.4914	0.5093	0.5131
Status IDM Provinsi Papua Barat Sebelum Pemekaran (13 Kab/Kota)		Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
Status IPM Kabupaten					
1	Teluk Wondama	0,4710	0,5349	0,5401	0,5332



Indikator		2016	2019	2020	2021
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
2	Kaimana	0,4267	0,5296	0,5328	0,5380
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
3	Manokwari	0,5403	0,5233	0,5308	0,5307
		Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
4	Manokwari Selatan	0,4969	0,4903	0,4971	0,4970
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
5	Teluk Bintuni	0,4351	0,4881	0,4887	0,5010
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal
6	Fakfak	0,4909	0,4867	0,5416	0,5429
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
7	Pegunungan Arfak	0,4211	0,4249	0,4575	0,4739
		Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal

Catatan: Tidak tersedia data untuk tahun 2017 dan 2018
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen “Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2021”

Tabel II.79 Rekapitulasi Jumlah Kabupaten, Distrik dan Kampung di Papua Barat Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM)

NO	STATUS IDM	JUMLAH KAB./KOTA				JUMLAH DISTRIK				JUMLAH KAMPUNG			
		2016	2019	2020	2021	2016	2019	2020	2021	2016	2019	2020	2021
1	Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Maju	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	13
3	Berkembang	0	0	0	0	3	4	9	10	63	29	113	137
4	Tertinggal	3	4	7	9	39	85	98	115	364	702	710	840
5	Sangat Tertinggal	9	8	5	3	126	118	100	82	1.060	961	875	752
JUMLAH		12	12	12	12	168	207	207	207	1.492	1.692	1.709	1.742

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen “Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2021”

Berdasarkan Tabel II.78 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2015-2020, status IDM Provinsi Papua Barat masih berada dalam kategori “**tertinggal**” dengan skor 0,5045. Meskipun demikian, terdapat peningkatan status IDM kampung di Papua Barat yang signifikan dari kampung tertinggal menjadi kampung berkembang dan maju selama tahun 2016-2021 (lihat Tabel II.79). Berdasarkan kabupaten di Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong mengalami perkembangan IDM yang relatif signifikan karena telah meningkatkan status dari “sangat tertinggal” pada tahun 2020 menjadi “tertinggal” pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong.



2.3.1.13.2 Implementasi Dana Desa

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Barat tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. Dana Desa sebagai wujud implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan kampung di Papua Barat. Kampung tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Tabel II.80 diketahui bahwa terdapat peningkatan alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat ke kampung di Papua Barat, dengan jumlah total Rp.1,07 triliun (1744 kampung) pada tahun 2016 menjadi Rp.1,56 triliun (1742 kampung) pada tahun 2020. Meningkatnya alokasi Dana Desa ini berbanding lurus dengan meningkatnya nilai IDM Papua Barat, sehingga mengindikasikan kontribusi Dana Desa terhadap perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung.

Tabel II.80 Jumlah Kampung Penerima dan Alokasi Dana Desa (Ribu Rupiah) di Papua Barat Tahun 2016-2020

NO	WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH KAMPUNG PENERIMA						
1	Fakfak	142	142	142	142	142
2	Manokwari	165	164	164	164	164
3	Teluk Bintuni	115	115	115	115	115
4	Teluk Wondama	76	76	75	75	75
5	Kaimana	84	84	84	84	84
6	Manokwari Selatan	57	57	57	57	57
7	Pegunungan Arfak	166	166	166	166	166
Papua Barat		805	804	803	803	803
ALOKASI DANA DESA (RIBUAN RUPIAH)						
1	Fakfak	89.688.622	113.154.978	114.330.889	138.140.255	138.519.829
2	Manokwari	100.356.882	127.407.488	122.808.850	140.853.254	145.302.935
3	Teluk Bintuni	73.378.274	93.230.474	95.879.250	112.647.475	119.058.138
4	Teluk Wondama	47.933.460	61.650.303	60.808.826	70.928.885	74.356.212
5	Kaimana	56.309.616	71.057.178	77.811.539	94.240.757	99.869.128
6	Manokwari Selatan	37.552.811	47.764.559	50.828.918	60.747.361	65.445.870
7	Pegunungan Arfak	100.704.755	128.526.923	124.042.501	139.457.632	144.741.575
Papua Barat		505.924.420	642.791.903	646.510.773	757.015.619	787.293.687

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

2.3.1.13.3 Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021 menetapkan bahwa sebagian dana Otonomi Khusus Papua Barat dialokasikan untuk Pendataan Orang Asli Papua (OAP) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Untuk Provinsi Papua Barat, salah satu wujud program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada TA 2020

dan TA 2021 adalah Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung - OTSUS dalam rangka peningkatan pembangunan kampung untuk kesejahteraan masyarakat khususnya OAP, melalui sinergi pendataan OAP serta pemberdayaan masyarakat dan kampung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kampung dan kader masyarakat kampung.

Dengan merujuk pada Undang-Undang dan kedua Peraturan Pemerintah di atas maka Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Dana Otonomi Khusus, yang di dalamnya ada kegiatan pendataan OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+), telah memiliki pijakan hukum yang kuat. Karena itu, program ini perlu dilaksanakan dalam konteks penguatan dan afirmasi OAP untuk meningkatkan kesejahteraan baik di tingkat Kampung, Kabupaten maupun Provinsi. Keberlanjutan program Pendataan OAP melalui SAIK+ serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini juga telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani pada Rapat Koordinasi Provinsi Papua dan Kabupaten di Papua Barat pada tanggal 5 November 2021 di Manokwari dan tanggal 18 November 2021 di Kota Sorong.

Sesuai dengan UU Desa dan PP No. 106 Tahun 2021 serta PP No. 107 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mempunyai peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kampung, selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada kampung. Dengan pertimbangan itu, Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat harus dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan pelaksanaan UU Desa, termasuk dalam hal bantuan teknis dan pendampingan melalui P3MD.

Salah satu komponen utama program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung adalah Sistem informasi dan Administrasi Kampung (SAIK+). SAIK+ mempunyai 4 (empat) komponen utama yaitu:

1. Kelembagaan pengelola SAIK+
2. Variabel data SAIK+
3. Aplikasi dan arsitektur jaringan SAIK+
4. Kader Kampung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) adalah kelembagaan utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selain itu SAIK+ juga berjalan dengan baik jika didukung oleh Distrik dan Pemerintahan Kampung.



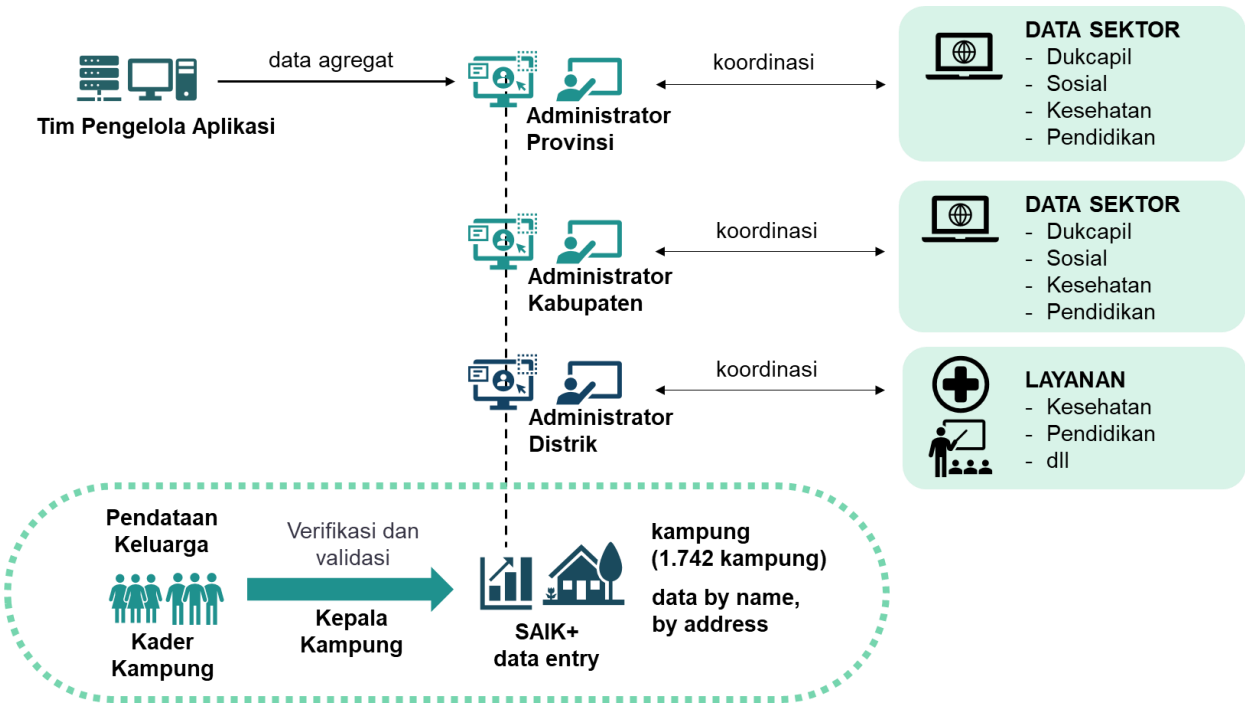
Gambar II.103 Sinergi Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Sumber: Pedoman Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS Papua Barat

SAIK+ adalah pendataan keluarga yang mencakup data mengenai seluruh anggota keluarga. Variabel data SAIK+ mencakup kondisi sosial (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll) dan ekonomi penduduk dengan memilah OAP dan Non-OAP sehingga sesuai dengan mandat UU Nomor 2/2021. Data dikumpulkan dan dimasukkan ke aplikasi dan jaringan SAIK+ yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.

Gambar II.104 Skema Penyelenggaraan SAIK+



Arsitektur jaringan SAIK+ ditampilkan dalam Gambar II.104. Berdasarkan Gambar II.104 diketahui bahwa pengumpulan dan input data



dilakukan oleh Kader Kampung yang merupakan pemuda yang berasal dari kampung tersebut, sehingga mengenal dengan baik lingkungan dan penduduk yang disurvei. Sampai dengan bulan Maret 2023 perkembangan Data SAIK+ terdapat dalam Tabel II.81 dan Tabel II.82. Data SAIK+ selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kampung, baik yang dilaksanakan oleh Distrik, Kabupaten dan Provinsi. Pada tahun 2021 dan 2022 sudah ada beberapa kampung yang memanfaatkan data SAIK+ untuk perencanaan di tingkat kampung, terutama dalam merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Tabel II.81 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan Jumlah Penduduk pada SAIK+			Cakupan SAIK+ Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Barat		542.999	123.461	60.895	184.356	33,95
1	Fakfak	85.197	32.054	18.879	50.933	59,78
2	Kaimana	62.256	17.417	5.330	22.747	36,54
3	Manokwari	192.663	33.450	24.610	58.060	30,14
4	Manokwari Selatan	35.949	17.831	5.854	23.685	65,89
5	Pegunungan Arfak	38.207	168	6	174	0,46
6	Teluk Bintuni	87.083	1.914	3.387	5.301	6,09
7	Teluk Wondama	41.644	20.627	2.829	23.456	56,33

Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
<https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

Tabel II.82 Cakupan Kampung/Kelurahan yang Sudah dan Belum Melakukan Pendataan SAIK+ (per 19 Maret 2023)

Kabupaten	Kampung/Kelurahan		
	Total	Sudah Melakukan Pendataan SAIK+	Belum Melakukan Pendataan SAIK+
Fakfak	149	147	2
Kaimana	86	60	26
Teluk Wondama	76	75	1
Teluk Bintuni	117	5	112
Manokwari	173	164	9
Manokwari Selatan	57	54	3
Pegunungan Arfak	166	3	163
Papua Barat	824	508	316
	100,00%	61,65%	38,35%

Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
<https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1.14.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks demografi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dikontribusi oleh angka kelahiran yang tinggi, maka dari itu menilai indikator kinerja ini untuk bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangat penting.

Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (dalam jangka periode 10 tahun) di Papua Barat berdasarkan kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.83. Sementara untuk laju pertumbuhan per tahun dari 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel II.83. Sebagai referensi, laju pertumbuhan cepat apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2%, dikatakan sedang apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1-2%, dan dikatakan lambat apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1%. Secara umum, dalam periode 10 tahun (2010-2020) laju pertumbuhan penduduk di Papua Barat tergolong tinggi, dan Kabupaten Tambrauw merupakan Kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Namun perlu dijadikan catatan bahwa laju pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor migrasi. Sementara untuk periode 1 tahun terakhir (tahun 2020), laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu hanya 0.77%.

Tabel II.83 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)

No.	Kabupaten	Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020
1	Fakfak	2.38
2	Kaimana	2.92
3	Teluk Wondama	4.54
4	Teluk Bintuni	5.03
5	Manokwari	2.97
6	Manokwari Selatan	5.93
7	Pegunungan Arfak	3.98
Rata-Rata		3.96

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka, 2020

2.3.1.14.2 Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Indikator kinerja ini sangat penting untuk menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para pemangku kebijakan untuk merencanakan program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Tabel II.84 akan menunjukkan data TFR per usia 15-49 tahun dari tahun 2018-2020.

Tabel II.84 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Tahun 2018-2020 (%)

Indikator	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR) per usia 15-49 tahun	2.36	2.94	2.69

Sumber: BKKBN dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Papua Barat, 2020



2.3.1.14.3 Pemakaian Kontrasepsi

A. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta KB Aktif

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah pasangan suami istri yang usia perempuannya adalah 15-49 tahun. Adapun data jumlah PUS di Papua Barat pada tahun 2019 dan 2020 adalah 162.290 dan 175.253 secara berurutan. Sementara untuk jumlah peserta KB aktif pada tahun 2019 dan 2020 adalah 68.734 dan 90.975 secara berurutan. Adapun detilnya dapat dilihat pada Tabel II.85.

Tabel II.85 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta KB Aktif (jiwa)

Indikator	2019	2020
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	162.290	175.253
Jumlah PUS Peserta KB Aktif (IUD, MOW, MOP, implan, suntikan, pil & komdom)	68.734	80.975

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat

B. Angka prevalensi kontrasepsi

Angka prevalensi kontrasepsi, atau biasa disingkat sebagai CPR merupakan perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturah kelahiran. Selain itu, indikator ini juga digunakan sebagi proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. menunjukan data tingkat prevalesi pemakaian kontrasepsi di Papua Barat dari tahun 2018-2020. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, tingkat prevalensi terus meningkat.

Tabel II.86 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 2018-2020 (%)

Indikator	2018	2019	2020
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	34.8	42.76	46.23

Sumber: BKKBN dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Papua Barat, 2020

C. Metode KB yang digunakan

Metode KB beranekaragam, termasuk cara yang tradisional (Tabel II.87). Di Papua Barat, metode suntikan dan pil merupakan metode yang paling banyak diminati.

Tabel II.87 Metode KB yang Digunakan oleh PUS (%)

No.	Metode KB	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sterilisasi wanita	4.00	2.45	3.85	4,86	2,66
2	Sterilisasi pria	0.34	0.23	0.26	0,14	0,41
3	Spiral	2.93	3.32	4.30	4,75	3,66
4	Suntikan	65.34	62.30	56.86	58,01	60,95



No.	Metode KB	2017	2018	2019	2020	2021
5	Susuk KB	7.86	9.21	9.40	9,08	11,11
6	Pil	16.79	19.99	20.20	17,97	17,41
7	Intravag/Kondom wanita	0.64	0.45	N/A	0,08	0,22
8	Menyusui alami	0.01	0.45	0.80	0,07	0,16
9	Kalender	1.04	1.17	1.58	2,70	0,10
10	Lainnya	1.04	0.43	2.45	1,15	2,17

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.15 Perhubungan

Sarana transportasi merupakan bagian penting yang harus dimiliki suatu daerah dalam membantu tercapainya tujuan pembangunan. Sarana transportasi merupakan bagian krusial dalam menunjang arus perpindahan arus barang, jasa, maupun informasi pendukung pembangunan.

2.3.1.15.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya pergerakan penduduk dan jumlah kendaraan di Provinsi Papua Barat, maka kebutuhan akan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi juga akan meningkat. Tabel II.88 menyajikan data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Nilai rasio terus menurun dari periode 2017-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan. Namun, nilai rasio ini masih bisa dikatakan masih rendah, sehingga belum dapat memicu kepadatan jalan oleh kendaraan yang ekstrem di daerah.

Tabel II.88 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Papua Barat 2016-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan (km)	3591.48	3591.48	3590.12	3621.39
Jumlah Kendaraan (unit)	26086	35455	48886	n.a
Rasio	0.14	0.10	0.07	n.a

Catatan: data yang disajikan masih mengacu pada data BPS Provinsi yang mencakup 13 kab/kota
 Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka, 2017-2021 (Data diolah)

2.3.1.15.4 Transportasi Darat

Dengan berkembangnya jaringan jalan di Provinsi Papua Barat, maka aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat pun akan bergantung pada transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan darat yang cenderung semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan tingginya mobilitas penduduk. Merujuk pada Data Statistik Transportasi Darat Nasional, Tabel II.89 menyajikan perkembangan kendaraan transportasi di Papua Barat.



Tabel II.89 Jumlah Angkutan Darat Berdasarkan Jenis Angkutan Darat di Papua Barat

No.	Jenis angkutan darat	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang	33.043	34.329	34.585
2	Mobil bis	313	341	341
3	Mobil barang	15.507	16.446	16.614
4	Sepeda motor	262.442	282.377	287.292
5	Kendaraan bermotor	311.305	333.493	333.832

Catatan: data yang disajikan masih mengacu pada data BPS yang mencakup 13 kab/kota

Sumber: BPS RI dalam Statistik Transportasi Darat

2.3.1.15.5 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/
Terminal Per Tahun

A. Transportasi Udara/ Penumpang Udara

Kehadiran Bandar Udara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Transportasi udara merupakan salah satu transportasi penting di Papua Barat, hal ini dikarenakan karakteristik wilayah yang cukup bergunung, curam, dan diliputi oleh hutan sehingga transportasi darat menjadi cukup sulit untuk mengakses beberapa daerah.

Tabel II.90 Jumlah Penerbangan dan Penumpang Udara di Papua Barat Tahun 2017-2020

Penerbangan/ Penumpang udara	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah penerbangan berangkat	penerbangan	17.368	18.959	16.698	13.621
Jumlah penumpang pesawat berangkat	orang	958.235	1.189.567	1.069.372	834.025
Jumlah penerbangan datang	penerbangan	17.387	18.875	16.126	13.489
Jumlah penumpang pesawat datang	orang	977.509	1.235.698	1.080.112	827.403

Catatan: data yang disajikan masih mengacu pada data BPS yang mencakup 13 kab/kota

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Daerah tahun 2017-2020

B. Transportasi Laut dan Kunjungan Kapal

Jalur laut merupakan salah satu transportasi yang menggerakkan perekonomian wilayah di Provinsi Papua Barat. Sebagian besar mobilitas orang dan barang di Provinsi Papua Barat masih menggunakan transportasi laut dikarenakan kondisi geografis wilayah. Provinsi Papua Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fakfak, dan Pelabuhan Kaimana. Pelabuhan utama ini digunakan sebagai pelabuhan komersil. Selain itu, terdapat pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah kepulauan, pesisir pantai maupun sungai-sungai, yaitu perintis Waisor, Windesi, Oransbari, Saukorem, Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inawatan, Bintuni, Babo, dan Kokas. Kemudian, rute domestik dan lokal pelayaran di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel II.91. Sementara, untuk kunjungan kapal baik dalam negeri maupun luar negeri dapat dilihat pada Tabel II.92.

Tabel II.91 Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat		
No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
Pelayaran Domestik		
1	KM Ciremai	Surabaya - Makassar - Bau-Bau - Sorong - Manokwari - Serui - Jayapura PP
2	KM Dorolonda	Surabaya - Balikpapan - Pantoloan - Toli-Toli - Bitung - Ternate - Sorong - Manokwari - Nabire - Serui - Biak - Jayapura PP
3	KM Dobonsolo	Surabaya - Makassar - Bau Bau - Sorong - Manokwari - Jayapura PP
4	KM Labobar	Surabaya - Makassar - Sorong - Manokwari - Wasior - Nabire - Serui - Jayapura PP
5	KM Nggapulu	Makassar - Bau Bau - P Buru - Ambon - Fakfak - Sorong - Manokwari - Wasior - Nabire - Serui - Biak - Jayapura PP
6	KM Tatamailau	Manado - Morotai - Sorong - Fakfak - Kaimana - Timika - Agats - Merauke PP
7	KM Tidar	Jakarta - Surabaya - Makassar - Bau Bau - Ambon - Banda - Tual - Dobo - Kaimana - Fakfak PP
Pelayaran Lokal		
9	KMP Komodo	Sorong - Saonek Waisai - Kabare PP, Sorong - Linmalas - Waigama PP, Sorong Foley - Harapan Jaya PP, Sorong - Seget - Seremuk - Konda - Teminabuan - Mugim - Kais - Inawatan - Kokoda PP, Biak - Numfor - Manokwari PP
10	KM Kasuari Pasifik	Manokwari - Numfor - Biak PP
11	KMP Napan Wainami	Manokwari - Wasior - Nabire PP
12	KMP Graceia	Manokwari - Wasior PP
13	KMP Mernati	Sorong - Sausapor - Werur - Wor - Saubeba - Wau - Waiben - Enbuan - Saukorem - Manokwari

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel II.92 Kunjungan Kapal Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kegiatan di Papua Barat				
Kunjungan Kapal	2017	2018	2019	2020
Kunjungan dalam Negeri	6.737	7.468	10.012	7.691
Debarkasi dalam Negeri	558.997	554.627	612.913	221.946
Embarkasi dalam Negeri	521.301	562.809	649.776	232.990
Kunjungan luar negeri	706	424	252	102
Debarkasi luar negeri	0	0	0	0
Embarkasi luar negeri	0	0	53	0

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Daerah tahun 2017-2020

C. Jumlah Angkutan Barang yang melalui Dermaga Pelabuhan/Transportasi Udara

Tabel II.93 Jumlah Angkutan Barang yang Melalui Dermaga Pelabuhan/Transportasi Udara di Papua Barat di Tahun 2017-2020						
Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan	Ton	5.000	5.430	6.543	6.890	7,200
Jumlah barang yang terangkut transportasi udara	kg	17.000	20.000	23.000	24.000	25.000

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat



2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

2.3.1.16.1 Akses Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting saat ini untuk memudahkan interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Provinsi Papua Barat. Sarana komunikasi yang telah berkembang di Papua Barat adalah penggunaan telepon seluler dan internet. Salah satu operator telepon seluler yang telah beroperasi di Papua Barat antara lain Telkomsel.

Tabel II.94 menunjukkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel di Papua Barat tahun 2017-2022. Berdasarkan Tabel II.94 diketahui terdapat peningkatan penduduk usia >5 tahun yang menggunakan telepon seluler dari 57,04% pada tahun 2017 menjadi 68,45% pada tahun 2022. Secara regional, kabupaten dengan persentase penduduk pengguna telepon seluler terbesar tahun 2022 terdapat di Teluk Bintuni (86,82%), dan Manokwari (79,05%). Adapun wilayah dengan persentase penduduk pengguna telepon adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (44,34%).

Tabel II.94 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel di Papua Barat, 2017-2022

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	64,89	70,59	74,85	71,35	76,72	76,96
2	Kaimana	52,26	57,26	58,56	64,23	62,53	63,41
3	Teluk Wondama	56,58	66,09	65,13	70,29	73,00	60,59
4	Teluk Bintuni	66,63	70,96	76,59	81,30	85,69	86,82
5	Manokwari	73,05	76,15	80,96	82,79	82,93	79,05
6	Manokwari Selatan	60,21	61,18	60,34	68,73	71,33	68,01
7	Pegunungan Arfak	25,64	42,79	34,94	40,57	44,02	44,34
Rata-rata		57,04	63,57	64,48	68,47	70,89	68,45

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”

Tabel II.95 menunjukkan persentase penduduk lebih dari 5 tahun yang menggunakan komputer di Papua Barat, baik berupa PC/desktop, laptop/notebook ataupun tablet. Berdasarkan Tabel II.95 diketahui persentase pengguna komputer mengalami trend stagnan dan bahkan cenderung menurun dari 14,51% pada tahun 2017 dan menjadi 9,34% pada tahun 2022. Wilayah dengan pengguna komputer terbesar di Papua Barat tahun 2022 adalah Kabupaten Fakfak (15,04%) dan Kaimana (12,36%). Adapun wilayah dengan pengguna komputer paling sedikit di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (tahun 2022: 1,53%).



Tabel II.95 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet), 2017-2022

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	15,22	21,90	18,93	16,88	15,04	14,63
2	Kaimana	16,12	20,48	11,40	10,97	11,45	12,36
3	Teluk Wondama	21,84	18,98	13,23	15,88	5,18	6,9
4	Teluk Bintuni	14,54	21,03	15,77	16,47	13,00	11,60
5	Manokwari	20,58	25,14	20,30	15,83	10,81	11,22
6	Manokwari Selatan	10,94	12,23	11,80	13,36	6,49	7,16
7	Pegunungan Arfak	2,30	3,86	3,11	2,08	0,77	1,53
Rata-rata		14,51	17,66	13,51	13,07	8,96	9,34

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”

Tabel II.96 menunjukkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet di Papua Barat tahun 2017-2022. Berdasarkan Tabel II.96 diketahui terdapat peningkatan penduduk yang mengakses internet secara signifikan dari 20,73% pada tahun 2017 menjadi 48,93% pada tahun 2022. Wilayah dengan persentase pengakses internet terbesar di Papua Barat tahun 2022 adalah Teluk Bintuni (65,55%) dan Manokwari (63,30%). Adapun wilayah dengan cakupan pengakses internet terkecil tahun 2022 di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (16,58%).

Tabel II.96 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fakfak	19,24	38,10	46,37	48,38	55,67	56,91
2	Kaimana	23,80	36,11	38,82	48,88	51,00	51,38
3	Teluk Wondama	19,70	20,10	34,12	47,36	48,19	42,88
4	Teluk Bintuni	25,51	31,56	39,77	54,20	64,43	65,55
5	Manokwari	35,03	41,03	53,58	58,85	58,70	63,30
6	Manokwari Selatan	21,03	26,56	33,74	38,09	42,52	45,93
7	Pegunungan Arfak	0,83	5,20	5,03	9,76	8,13	16,58
Rata-rata		20,73	28,38	35,92	43,65	46,95	48,93

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”

Tabel II.97 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019 dan 2020

No	Kabupaten	2019					2020				
		4G/ LTE	3G/ H/ H+/ EVDO	2,5G/ E/ GPRS	Tidak Ada	Jumlah	4G/ LTE	3G/ H/ H+/ EVDO	2,5G/ E/ GPRS	Tidak Ada	Jumlah
1	Fakfak	32	10	20	35	97	34	6	32	31	103
2	Kaimana	5	4	-	9	18	5	3	2	9	19
3	Teluk Wondama	20	4	14	26	64	48	3	12	9	72
4	Teluk Bintuni	42	14	7	16	79	140	10	7	23	180
5	Manokwari	51	48	13	49	161	78	29	15	34	156
6	Manokwari Selatan	11	4	4	7	26	20	13	9	-	42
7	Pegunungan Arfak	5	1	8	38	52	7	12	2	28	49
PAPUA BARAT		166	85	66	180	497	332	76	79	134	621

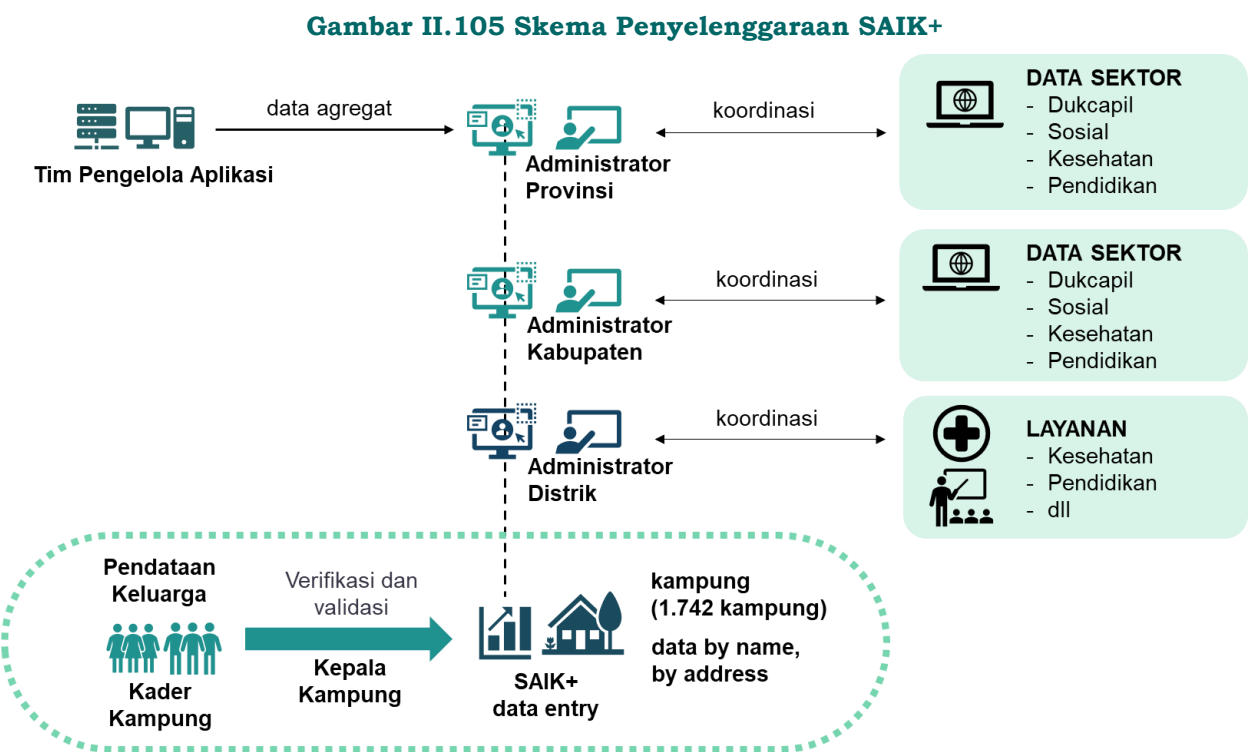
Sumber: BPS Papua Barat, 2021

Cakupan akses komunikasi dan informasi penduduk Papua Barat tidak terlepas dari cakupan pelayanan jaringan internet dan telepon seluler. Berdasarkan Tabel II.97 diketahui terdapat peningkatan jumlah kampung/kelurahan di Papua Barat yang dapat menerima sinyal telepon dan internet dari 317 kampung (63,78%) pada tahun 2019 menjadi 487 kampung (78,42%) pada tahun 2020.

2.3.1.16.2 Sistem Administrasi dan Informasi Kampung - OTSUS

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) – Otonomi Khusus adalah pendataan keluarga yang mencakup data mengenai seluruh anggota keluarga. Variabel data SAIK+ mencakup kondisi sosial (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll) dan ekonomi penduduk dengan memilah OAP dan Non-OAP sehingga sesuai dengan mandat UU Nomor 2/2021. Data dikumpulkan dan dimasukkan ke aplikasi dan jaringan SAIK+ yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Adapun untuk mengakses SAIK+ secara online dapat melalui <https://saikplus.papubaratprov.go.id/>.

Sistem informasi dan Administrasi Kampung (SAIK+) adalah komponen utama Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) adalah kelembagaan utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selain itu SAIK+ juga berjalan dengan baik jika didukung oleh Distrik dan Pemerintahan Kampung.



Arsitektur jaringan SAIK+ ditampilkan dalam Gambar II.104. Berdasarkan Gambar II.104 diketahui bahwa pengumpulan dan input data dilakukan oleh Kader Kampung yang merupakan pemuda yang berasal dari kampung tersebut, sehingga mengenal dengan baik lingkungan dan penduduk yang disurvei. Sampai dengan bulan Maret 2023 perkembangan Data SAIK+ terdapat dalam Tabel II.81 dan Tabel II.82. Data SAIK+ selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kampung, baik yang dilaksanakan oleh Disktrik, Kabupaten dan Provinsi. Pada tahun 2021 dan 2022 sudah ada beberapa kampung yang memanfaatkan data SAIK+ untuk perencanaan di tingkat kampung, terutama dalam merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Tabel II.98 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 19 Maret 2023)

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan Jumlah Penduduk pada SAIK+			Cakupan SAIK+ Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Barat		542.999	123.461	60.895	184.356	33,95
1	Fakfak	85.197	32.054	18.879	50.933	59,78
2	Kaimana	62.256	17.417	5.330	22.747	36,54
3	Manokwari	192.663	33.450	24.610	58.060	30,14
4	Manokwari Selatan	35.949	17.831	5.854	23.685	65,89
5	Pegunungan Arfak	38.207	168	6	174	0,46
6	Teluk Bintuni	87.083	1.914	3.387	5.301	6,09
7	Teluk Wondama	41.644	20.627	2.829	23.456	56,33

Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
<https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

Tabel II.99 Cakupan Kampung/Kelurahan yang Sudah dan Belum Melakukan Pendataan SAIK+ (per 19 Maret 2023)

Kabupaten	Kampung/Kelurahan		
	Total	Sudah Melakukan Pendataan SAIK+	Belum Melakukan Pendataan SAIK+
Fakfak	149	147	2
Kaimana	86	60	26
Teluk Wondama	76	75	1
Teluk Bintuni	117	5	112
Manokwari	173	164	9
Manokwari Selatan	57	54	3
Pegunungan Arfak	166	3	163
Papua Barat	824	508	316
	100,00%	61,65%	38,35%

Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
<https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Tabel II.100 menunjukkan

jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.100 diketahui bahwa jumlah koperasi yang tidak aktif di Papua Barat sangat tinggi yaitu 213 koperasi (40,49%). Apabila meninjau berdasarkan wilayah, Kabupaten Fakfak memiliki jumlah koperasi aktif terbanyak yaitu 134 koperasi, sedangkan wilayah dengan jumlah koperasi terkecil berada di Manokwari Selatan yaitu hanya 2 koperasi.

Tabel II.100 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Papua Barat (unit), 2017

No	Kabupaten	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Fakfak	134	49	183
2	Kaimana	22	27	49
3	Teluk Wondama	13	26	39
4	Teluk Bintuni	38	92	130
5	Manokwari	86	18	104
6	Manokwari Selatan	2	1	3
7	Pegunungan Arfak	18	0	18
Papua Barat		313	213	526

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2018”

2.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Tabel II.101 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Kabupaten	Jumlah Proyek					Realisasi Investasi (000 US\$)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	n.a	n.a	n.a	1	1	n.a	n.a	-	33.333	41
2	Kaimana	n.a	n.a	n.a	1	2	n.a	n.a	-	-	8
3	Teluk Wondama	n.a	n.a	n.a	-	-	n.a	n.a	-	-	-
4	Teluk Bintuni	n.a	n.a	n.a	4	-	n.a	n.a	5209	20.628	-
5	Manokwari	n.a	n.a	n.a	1	12	n.a	n.a	-	-	226
6	Manokwari Selatan	n.a	n.a	n.a	1	2	n.a	n.a	76	1	0,40
7	Pegunungan Arfak	n.a	n.a	n.a	1	1	n.a	n.a	66	-	0,55
Papua Barat		n.a	n.a	n.a	9	18	n.a	n.a	5.351,00	53.962,00	275,95

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

Tabel II.101 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) di Papua Barat tahun 2016-2020, Berdasarkan Tabel II.101 diketahui secara umum terdapat penambahan jumlah proyek, namun penurunan realisasi investasi PMA di Papua Barat. Jumlah proyek PMA pada tahun 2019 meningkat dari 9 proyek menjadi 18 proyek pada tahun 2020. Adapun realisasi PMA menurun dari 5,35 juta US\$ pada tahun 2018 menjadi 0,27 juta US\$ pada tahun 2020. Wilayah dengan PMA tertinggi adalah Manokwari (tahun 2020: 12 proyek dengan realisasi investasi 226 ribu US\$).

Tabel II.102 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No	Kabupaten	Jumlah Proyek					Realisasi Investasi (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	n.a	n.a	-	2	5	n.a	n.a	-	9.035	3.125
2	Kaimana	n.a	n.a	-	2	3	n.a	n.a	-	2.827	27.953
3	Teluk Wondama	n.a	n.a	-	1	3	n.a	n.a	-	-	135
4	Teluk Bintuni	n.a	n.a	-	3	4	n.a	n.a	-	1.468	17.781
5	Manokwari	n.a	n.a	-	6	7	n.a	n.a	-	108.427	6.150
6	Manokwari Selatan	n.a	n.a	-	-	-	n.a	n.a	-	-	-
7	Pegunungan Arfak	n.a	n.a	-	-	-	n.a	n.a	-	-	-
PAPUA BARAT		n.a	n.a	0	14	22	n.a	n.a	0	121.757	55.144

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

Tabel II.102 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Papua Barat Tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.102 diketahui secara umum terdapat peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi PMDN di Papua Barat dari 14 proyek pada tahun 2019 menjadi 22 proyek pada tahun 2020, serta dari 121.757 juta pada tahun 2018 menjadi 55.144 juta pada tahun 2020. Wilayah dengan PMDN tertinggi adalah Kabupaten Kaimana (tahun 2020: 3 proyek dengan realisasi investasi 27.953 juta rupiah).

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

2.3.1.19.1 Kepemudaan

Nilai IPP Provinsi Papua Barat sedikit meningkat dari 48,50 pada 2015 menjadi 50,83 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Papua Barat sedikit lebih baik pada domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan. Sebaliknya, nilai indeks pada tiga domain yang lain masih berada di bawah angka nasional. Domain pendidikan memiliki capaian yang baik dengan nilai indikator di atas angka nasional, yaitu rata-rata lama sekolah yang mencapai 10,61 tahun, APK sekolah menengah 90,18%, dan APK perguruan tinggi 35,97%. Sementara itu, peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh perbaikan capaian pada dua indikator. Pertama, angka kehamilan remaja turun pesat dari 17,29% menjadi 6,48%. Kedua, proporsi pemuda yang merokok berkurang dari 25,67% menjadi 22,94%.

Tabel II.103 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua Barat dan Indonesia 2015-2018

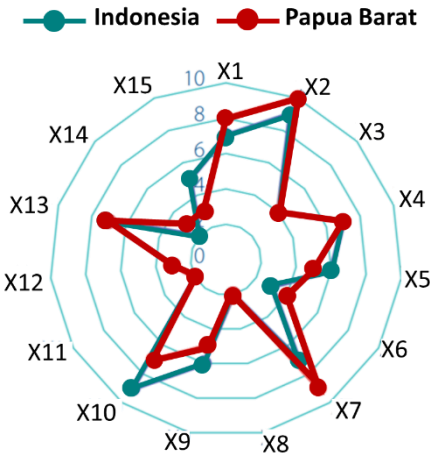
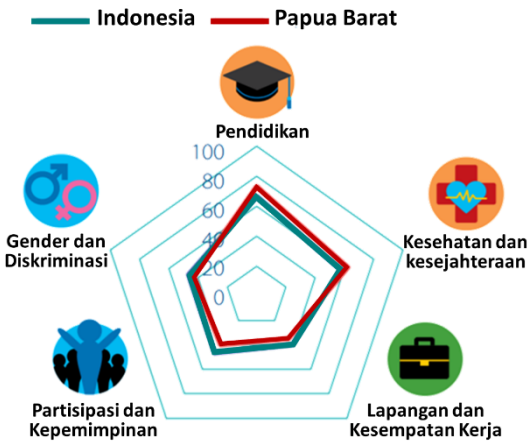
WILAYAH		INDIKATOR	2015	2016	2017	2018
PAPUA BARAT	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		48,50 (Ranking 16)	51,33 (Ranking 16)	51,00 (Ranking 13)	50,83 (Ranking 20)
	a.	Domain Pendidikan	66,67	70,00	73,33	73,33

WILAYAH	INDIKATOR		2015	2016	2017	2018
	b.	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	57,50	70,00	60,00	62,50
	c.	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	30,00	35,00	35,00
	d.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	43,33	43,33	43,33	40,00
	e.	Domain Gender dan Diskriminasi	40,00	43,33	43,33	43,33
INDONESIA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		48,67	50,83	49,33	51,50
	a.	Domain Pendidikan	63,33	63,33	63,33	66,67
	b.	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55,00	57,50	55,00	57,50
	c.	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	40,00	35,00	40,00
	d.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46,67	46,67	46,67	46,67
	e.	Domain Gender dan Diskriminasi	43,33	46,67	46,67	46,67

Catatan: data yang ditampilkan merupakan data agregat tingkat provinsi yang diperoleh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan masih mencakup 13 kabupaten/kota
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen “Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia”

Gambar II.106 Capaian Pembangunan Pemuda Papua Barat Tahun 2018

- a. Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Papua Barat dan nilai nasional pada 2018
- b. Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Papua Barat dan nilai nasional pada 2018



Keterangan:

- X1

Rata-rata lama sekolah
- X2

APK sekolah menengah
- X3

APK perguruan tinggi
- X4

Angka kesakitan pemuda
- X5

Persentase pemuda korban kejahatan
- X6

Persentase pemuda merokok
- X7

Persentase remaja hamil
- X8

Persentase pemuda wirausaha kerah putih
- X9

TPT pemuda

X10

Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan

X11

Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi

X12

Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat

X13

Angka perkawinan usia anak

X14

Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas

X15

Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2019 dokumen “Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia”

Tantangan pertama yang dihadapi Provinsi Papua Barat dalam pembangunan pemudanya terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yaitu tingginya tingkat pengangguran pemuda (15,33%) yang melebihi angka nasional (13,47%). Tantangan kedua terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Tantangan pada domain ini mencakup semua indikator yang capaiannya berada di bawah angka nasional. Salah satunya adalah



partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya mencapai 66,95%; angka ini merupakan angka terendah se-Indonesia pada 2018. Tantangan ketiga terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yakni proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (15,77%) yang kecil dan menempati peringkat keempat terendah di antara semua provinsi. Terlepas dari domain yang capaiannya mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu memberikan perhatian khusus pada upaya memperbaiki domain lapangan dan kesempatan kerja karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain.

2.3.1.19.2 Olahraga

Isu tentang gaya hidup sehat telah menjadi acuan banyak daerah dan lembaga untuk senantiasa mendorong masyarakat supaya aktif terlibat dalam aktivitas fisik, khususnya melalui kegiatan olahraga. Hidup aktif memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Selain menjauhkan dari berbagai penyakit fisik, olahraga juga dapat menjauhkan dari gangguan jiwa seperti depresi. Dengan kata lain, olahraga selain membuat jasmani menjadi lebih kuat sekaligus membuat jiwa menjadi lebih sehat.

Tabel II.104 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Wilayah	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
		Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Papua Barat	29,84	26,42	31,00	24,24	27,81
2	Indonesia	40,73	29,43	38,23	33,14	35,70

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Statistik Sosial Budaya 2018”

Kesadaran masyarakat Papua Barat dalam berolahraga masih cukup rendah. Seperti yang ditunjukkan Tabel II.104, pada tahun 2018 penduduk Papua Barat berusia 5 tahun ke atas yang berolahraga hanya sebesar 27,81%. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena masyarakat Papua Barat kerap tidak memasukkan kegiatan olahraga ke dalam prioritas hidup. Masyarakat lebih cenderung mementingkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup dibanding berolahraga. Partisipasi berolahraga penduduk perkotaan (29,84%) lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan (26,42%). Kondisi ini mengindikasikan fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Setiap orang yang berolahraga mempunyai tujuan yang beragam, diantaranya sebatas hobi, menurunkan berat badan, menjaga Kesehatan, memulihkan tubuh, bagian dari pelajaran sekolah, berprofesi sebagai atlet dan untuk tujuan-tujuan lainnya. Berdasarkan Tabel II.105 diketahui bahwa



mayoritas penduduk berusia 5 tahun ke atas di Papua Barat yang berolahraga bertujuan untuk menjaga kesehatan (35,39%), hobi/rekreasi (20,36%) dan bagian dari pelajaran/kurikulum sekolah (38,62%).

Tabel II.105 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tujuan Utama Berolahraga dan Jalur/Wadah Utama Dalam Berolahraga, 2018

KATEGORI			PAPUA BARAT	INDONESIA
Berdasarkan Tujuan Utama Berolahraga (%)	1	Menjaga kesehatan	35,39	39,91
	2	Prestasi	2,99	0,93
	3	Hobi/Rekreasi	20,36	11,13
	4	Kurikulum Sekolah	38,62	46,17
	5	Profesi	0,83	0,54
	6	Lainnya	1,80	1,32
Berdasarkan Jalur/Wadah Utama Berolahraga (%)	1	Sendiri	37,30	32,66
	2	Sekolah	43,26	50,95
	3	Perkumpulan Olahraga	8,66	9,65
	4	Tempat Kerja	5,67	3,38
	5	Lainnya	5,11	3,36
Berdasarkan Jenis Olahraga (%)	1	Senam	34,32	37,76
	2	Atletik	5,10	6,55
	3	Jogging/Gerak Jalan	19,74	21,78
	4	Tenis Meja	1,26	0,44
	5	Bulu Tangkis	3,24	2,99
	6	Bola Voli	5,63	5,62
	7	Bola Basket	1,44	1,62
	8	Sepak Bola	24,58	15,33
	9	Renang	0,77	1,22
	10	Bela Diri	0,94	0,73
	11	Bersepeda	0,45	2,11
	12	Lainnya	2,52	3,86

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Statistik Sosial Budaya 2018”

Tabel II.106 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga Tahun 2018

No	Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
1	Fakfak	33	58	16	12	13	18	29	14	12	13	0
2	Kaimana	12	36	8	5	5	7	8	4	5	6	1
3	Teluk Wondama	17	63	0	2	1	0	2	0	3	0	0
4	Teluk Bintuni	52	117	12	3	4	6	8	2	9	3	3
5	Manokwari	57	104	20	4	4	9	5	6	10	12	0
6	Manokwari Selatan	12	42	5	2	1	2	0	0	4	1	4
7	Pegunungan Arfak	12	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua Barat		195	521	61	28	28	42	52	26	43	35	8

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2018 dokumen “Statistik Potensi Desa Provinsi Papua Barat 2018”

Di tahun 2018, senam menjadi olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas. Dari seluruh penduduk yang berolahraga di Papua Barat, sebesar 34,32\$ diantaranya melakukan olahraga senam. Senam merupakan olahraga yang menyenangkan untuk dilakukan. Banyak orang melakukan olahraga senam karena praktis dan tidak membutuhkan alat khusus. Selain senam, jogging/gerak jalan dan sepakbola/futsal juga menjadi olahraga yang paling banyak dilakukan di Papua





Barat dengan persentase sebesar 19,74% dan 24,58%. Tingginya minat penduduk Papua Barat terhadap olahraga didukung keberadaan fasilitas olahraga yang memadai, khususnya untuk sepak bola, voli dan bulu tangkis (lihat Tabel II.106).

2.3.1.20 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Provinsi Papua barat bekerjasama dengan BPS Provinsi Papua Barat telah merangkum berbagai statistik Provinsi Papua Barat. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Propinsi Papua Barat. Urusan Statistik ini dirujuk berdasarkan lampiran Permendagri No. 45 tahun 2010, yaitu adanya ketersediaan dokumen perencanaan berikut:

1. Buku Provinsi dalam angka
2. Buku Statistik Daerah
3. Buku PDRB Provinsi

Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel II.107. Provinsi Papua barat telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2011-2016 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Provinsi Papua Barat dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Provinsi Papua Barat dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi Papua Barat dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Provinsi Papua barat berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Provinsi Papua Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta



potensi yang ada di Provinsi Papua barat. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan buku PDRB Provinsi Papua barat baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2011-2016, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat di akses melalui situs BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts* 2008 seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations*.

Tabel II.107 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku Provinsi Dalam Angka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Buku Statistik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Buku PDRB Provinsi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019

2.3.1.21 Persandian

Aspek persandian tidak lepas dengan aspek keamanan informasi, dikarenakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka ruang lingkup persandian tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya, tapi meluas ke arah pengamanan informasi. Indikator keberhasilan dalam bidang persandian dapat dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta



dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan menggunakan sandi. Indikator lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, jumlah aset atau fasilitas yang diamankan serta kegiatan yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi perbulannya. Indikator yang digunakan dalam penertapan kinerja daerah Provinsi Papua Barat di periode RPJMD sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel II.108 Hasil Kinerja Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Papua Barat (%)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan persandian daerah	15,00	50,00	60,00	30,00	75,00

Sumber: Bappeda / Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, 2022

Apabila dilihat dari Tabel II.108, terdapat perkembangan fluktuatif untuk indikator cakupan layanan persandian daerah. Namun, angka di tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2017. Seiring berkembangnya kebutuhan daerah dalam pengamanan informasi, maka diharapkan layanan persandian daerah dapat tercukupi untuk keseluruhan Provinsi Papua Barat.

2.3.1.22 Kebudayaan

Gambaran Sosial-budaya tidak terlepas dari definisi Manusia sebagai makhluk sosial/ *sosiale animale* dengan sisi *homo humanicus*, *homo economicus*, dan juga *homo kulturalis*. Berdasarkan sisi-sisi tersebut maka manusia sejak dahulu kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai manusia, dari sisi kulturalis manusia kemudian menciptakan pranata Adat dengan nilai – nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi. Manusia Adat di provinsi Papua Barat kemudian disebut oleh undang undang sebagai Masyarakat Hukum Adat/ *Indigenous People*. Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) Bab 1, Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Pada perubahan kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 2021 pasal 1 ayat 22 dipertegas dengan definisi Orang Asli Papua (OAP) yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di



Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

2.3.1.22.1 Kekerabatan

Sistem sosial masyarakat di tanah Papua mengenal empat (4) tipe karakteristik kekerabatan suku yang dijadikan dasar dalam pengelolaan wilayah adat yaitu Tipe *Iroquois*, , Tipe *Hawaian*, Tipe *Omaha*, dan tipe *Iroquois-Hawaian*. Secara khusus pada wilayah Provinsi Papua Barat atau wilayah budaya Saireri, Domberai, dan Bomberai, dijumpai beberapa 3 tipe kekerabatan yang berpengaruh pada penguasaan wilayah dan potensi lokal, antara lain:

a. Tipe *Iroquois*

Sistem kekerabatan tipe *iroquois* mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu paralel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung dan berbeda dari istilah yang digunakan untuk saudara sepupu silang serta penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu. Misalnya, Suku Wandamen (Wilayah Adat Saireri) dan Suku Iha (Wilayah Adat Bomberai).

b. Tipe *Hawaian*

Sistem kekerabatan tipe hawaian ialah suatu sistem pengelompokkan yang menggunakan istilah yang sama dan paralel. Tipe ini dijumpai pada Suku Mairasi (Wilayah Bomberai), Suku Arfak (Hatam, Meyah, Sough, dan Moile/Moskona).

c. Tipe *Omaha*

Sistem kekerabatan tipe omaha merupakan suatu sistem yang mengklasifikasikan saudara-saudara sepupu silang matrilineal dan patrilineal dengan istilah-istilah yang berbeda dan istilah untuk saudara sepupu silang itu dipengaruhi oleh tingkatan generasi dan bersifat asimetris, sehingga istilah untuk anak laki-laki saudara laki-laki ibu adalah sama dengan saudara laki-laki ibu dan istilah untuk anak laki-laki saudara perempuan ayah adalah sama untuk anak laki-laki saudara perempuan. Tipe ini dijumpai pada Suku Maybrat. Sedangkan dilihat dari prinsip garis keturunan, maka terdapat prinsip pewarisan keturunan, yaitu: memiliki keturunan melalui garis ayah/patrilineal. Misalnya, suku-suku di Kepala Burung Maybrat, suku-suku di Teluk Cenderawasih suku Wandamen, Kuri, dst.

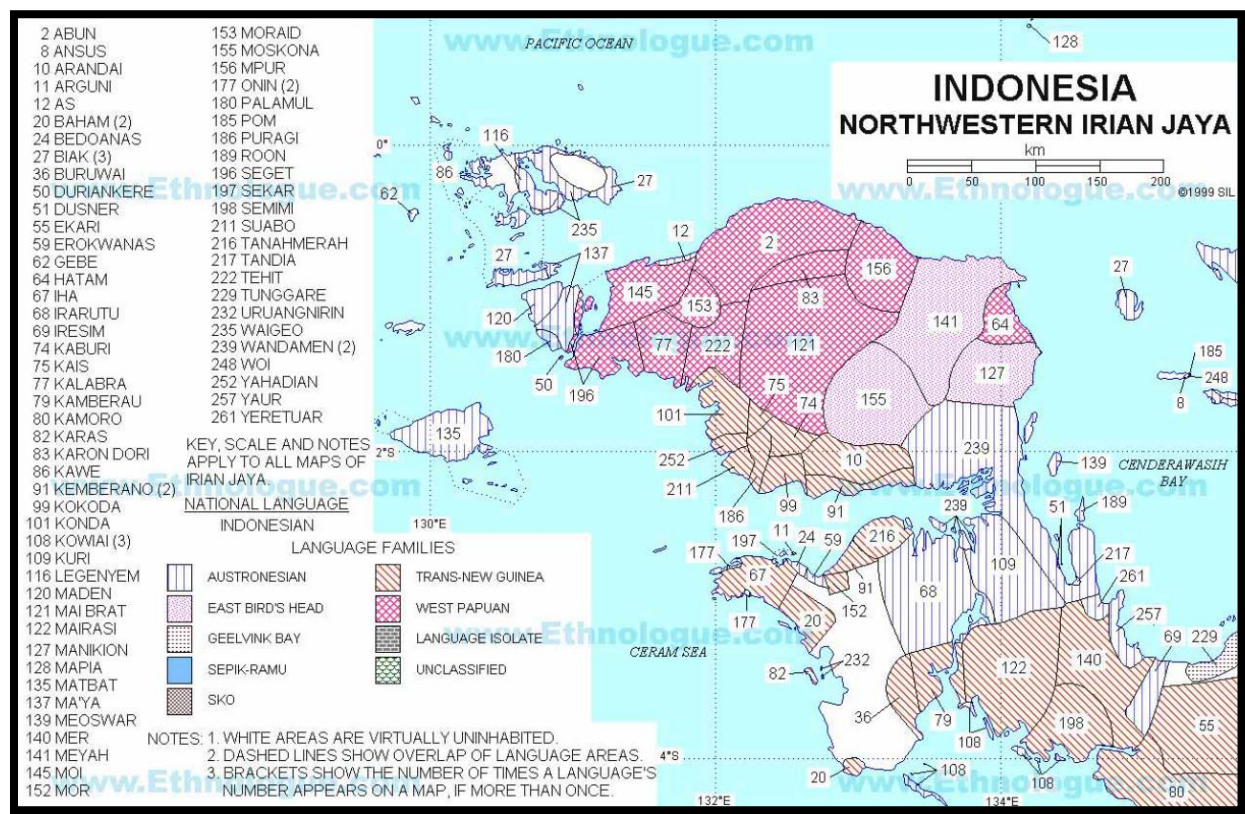
2.3.1.22.2 Bahasa

Pendekatan linguistik historis dan tipologi Bahasa membagi wilayah Papua barat dihuni oleh suku suku dengan Bahasa dari rumpun bahasa



Austronesia yang berada dibagian bawah leher burung dikenal seperti Irarutu, Sekar, Kuri, Mor (di Semenanjung Bomberai). dan Bahasa Non Austronesia meliputi sub kelompok *South Halmahera-West New Guinea* (SHWNG) atau Bahasa *West Papua* termasuk didalamnya adalah Roon, Wandamen, Dusner, Yaur (di Teluk Cenderawasih), Ambel, Maya, Batanta, Matbat (di Kepulauan Raja Ampat), bagian kepala burung juga tersebar bahasa Hatam, Meyah, Sougb, Irires, Miyach, Maybrat, Kalabra, Moi, Abun, Moraid, Mpur dst.

Gambar II.107 Peta Bahasa Papua Barat oleh SIL Internasional



Bahasa bahasa Austronesia berasal dari satu nenek moyang bahasa yaitu Proto-Austronesia yang berasal dari Taiwan di utara sampai Selandia Baru di selatan dan dari Kepulauan Paskah (Easter Island) di Timur sampai di Madagaskar di sebelah barat yaitu di pantai timur benua Afrika (lihat Blust, 1993, 2009; Ross, 2004; Pawley & Ross, 1993). Mayoritas bahasa-bahasa di Indonesia masuk ke dalam rumpun Austronesia, kecuali beberapa bahasa di Kepulauan Alor dan Pantar, Halmahera Utara, dan sebagian besar bahasa-bahasa di Tanah Papua yang dikategorikan ke dalam bahasa nonAustronesia (atau bahasa Papua). Bahasa yang terdiri dari banyak keluarga bahasa sendiri-sendiri. Diprediksi kurang lebih terdapat 60 keluarga bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Papua, yang. (Foley, 1986, 2000)

2.3.1.22.3 Sistem Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan adat yang dikenal di wilayah adat Bomberai dan Domberai seperti yang dijelaskan pada Tabel II.109.

Tabel II.109 Tiga Tipe Kepemimpinan Yang Dianut di Dua Wilayah Adat Papua Barat

Bentuk Kepemimpinan	Penjelasan	Wilayah Suku
Bigman 'pria berwibawa'	Sistem di mana seorang pria perkasa meraih status kepemimpinan karena pencapaian atau "achievement" ditentukan oleh kemampuan	Sistem bigman ini tergambar pada suku-suku di wilayah budaya



Bentuk Kepemimpinan	Penjelasan	Wilayah Suku
	pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki tubuh yang besar dan tegap, serta memiliki sifat murah hati dalam pembagian perolehan. Ciri lain dari tipe kepemimpinan ini ialah bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh pemimpin sejati itu secara otonomi tunggal.	Saireri seperti di teluk wondama, sebagian Doberai, dan Bomberai.
Sistem Raja Raja	bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orangtua kepada anak pria yang sulung, akan tetapi bila anak itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan tersebut, maka salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dapat memperoleh kedudukan tersebut. Dengan demikian hak kekuasaan selalu dipertahankan dan diwariskan dalam rangka kelompok kekerabatan besar, seperti klen, melalui sistem pewarisan atau “ascribed”. Asas keabsahan disini adalah keturunan, yang diperkuat oleh mitologi dan religi.	Sistem kepemimpinan raja ini tergambar pada suku-suku di Doberai dan Bomberai, yakni Suku Maybrat di Kepala Burung, suku-suku di Kepulauan Raja Ampat, suku-suku di daerah Semenanjung Onim (Fakfak) dan di daerah Kaimana.
Sistem Campuran	pola yang timbul baik karena kemampuan sendiri maupun atas dasar keturunan, tetapi juga berkuasa sebagai tuan tanah yang mewariskan kekuasaan kepada anak sulung; sementara seorang mambri ‘panglima perang’ mencapai kekuasaannya karena keperkasaan pribadi namun pada kesempatan tertentu dapat menjalankan kekuasaan selaku kepala kampung atau kepala suku.	sebagian besar suku-suku di wilayah budaya Saireri, sebagian Doberai (suku besar Arfak), dan Bomberai (suku Kuri Wamesa)

Sumber : Mansoben (1995)

2.3.1.22.4 Tarian Adat

Keberagaman juga terlihat dari seni tari di Papua Barat. Di Papua Barat terdapat empat bentuk tarian adat dalam suku ini, yaitu:

- a. *Tup*, merupakan gerakan berputar di tempat, atau berjalan atau berlari yang dilakukan sambil bernyanyi.
- b. *Weantagawi*, merupakan gerakan dua orang yang saling berhadapan muka sambil menghentakkan kaki di tanah bersama-sama. Gerakan ini diikuti langkahmengikuti irama, maju dua langkah dan mundur dua langkah seirama dengan lagu yang dibawakan.
- c. *Pipakwean*, merupakan gerakan berlari mondar-mondir di suatu tempat terbatas, seirama dengan lagu yang dibawakan.
- d. *Tem*, gerakan ini diadakan di dalam rumah, di dalam sinar nyala api. Muda-mudi duduk berhadapan muka, dipisahkan oleh tungku apui, sambil bernyanyi kaum pemuda memberi daun kepada pemuda dan sebaliknya.



Sedangkan untuk tarian terdapat tiga macam, yaitu (1) tarian muda-mudi, tarian ini merupakan tarian yang dilakukan oleh para pemuda dengan cara melambai-lambaikan dedaunan kepada gais yang disukainya dan apabila si gadis menyukainya makan gais tersebut akan ikut menari bersama pemuda tadi; (2) tarian pesta, jeni lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu kegembiraan, kesenangan, serta pujian; dan (3) tarian perang, lagu-lagu yang dibawakan berisi lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat juang.

2.3.1.22.5 Nilai-nilai Kearifan Lokal

Keunikan budaya di provinsi Papua barat dapat kita temukan pada bentuk-bentuk kesenian, norma dan nilai adat, tipologi kepemimpinan serta nilai kearifan yang berkorelasi dengan sejarah/mitologi, religi dan membentuk karakter dan identitas jati dirinya. Nilai kearifan selalu berhubungan dengan alam sekitar dari wilayah pegunungan, lembah dan rawa, sungai sampai ke wilayah pantai dan perairan laut. Sebagai contoh terdapat beberapa bentuk kearifan lokal yang dianggap nilai penting yang dianut oleh suku suku di provinsi Papua barat antara lain di suku arfak, Suku Moi, suku wilayah pesisir di teluk wandama dan Suku Meybrat dan seterusnya seperti contoh yang ditunjukkan oleh tabel dibawah.

Tabel II.110 Bentuk Bentuk Kearifan Lokal di Provinsi Papua barat

SUKU	KEARIFAN LOKAL	PENJELASAN
Arfak	1. Igya Ser Hanjob , kearifan membagi kawasan menjadi 4 bagian : Bahamti, Situmti, Susti, Nimahanti 2. Ibeiya , rumah tradisional kaki seribu Suku Moile 3. Tradisi Budidaya ubi jalar	konsep Zonasi mata pencaharian tradisional yang membagi wilayah kelola menjadi empat zona. Keempat zona tersebut adalah: (1) Zona bahamti berada pada kawasan yang tinggi dari Pegunungan Arfak; (2) Zona nimahamti (nihamti)berada di sekitar Kawasan dengan topografilereng-lereng terjal; (3) Zona susti berada di sekitar lereng yang tidak terlalu terjal; dan (4) Zona situmti, berada pada kaki bukit yang datar sampai ke sekitar pemukiman , biasanya hanya dikenal 2 zona untuk pertanian budidaya yaitu zona Susti, Zona Situmti, sedangkan zona bahamti lebih banyak dipakai sebagai kawasan berburu dan mengambil hasil hutan seperti Kayu untuk rumah dan sumber tanaman obat.
Moi	Egek (sejenis Sasi tempat dan perairan)	merupakan pelarangan pengambilan sesuatu dari alam atau benda-benda tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun.
Meybrat	Kmot aya	mengandung nilai, keyakinan dan sanksi atau aturan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air terutama di daerah hulu sungai. telah diterapkan sejak nenek moyang, bentuk larangan di kmot aya melarang mandi dengan sabun dan dilarang menyiram air tanpa izin.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022

2.3.1.22.6 Sistem Penguasaan Tanah

Karakteristik suku-suku memandang tanah sebagai inti dan titik sentral pusat ekologi dan basis dari satu kesatuan ekosistem yang mengatur hubungan antara manusia dan semua makhluk hidup di alam. Tanah adalah sumber segala kehidupan di bumi. Di atas tanah, di dalam tanah, dan jauh dalam perut bumi tersimpan sumber mineral, deposit, dan kandungan bumi lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Tanah dipahami dan diklasifikasikan oleh kebanyakan masyarakat adat sebagai tanah itu sendiri beserta dusun sagu, sungai maupun hutan kayu yang berada di atasnya. Tanah dalam kaitannya dengan kepentingan hidup tidak selalu dipersepsikan dengan pandangan ekonomi saja, tetapi juga senantiasa dikaitkan dengan beberapa aspek seperti budaya, religi, dan politik. Karakteristik persepsi tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Secara ekonomis:** tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya adalah media yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperluan hidupnya, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar maupun bahan untuk membuat rumah.
2. **Secara budaya:** tanah dipersepsikan sebagai “mama”, yakni pihak yang melahirkan dan membesarkan; oleh karenanya adalah “sah” bila sang mama menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengan kesuburan dan kelimpahan kekayaan alam. Di sisi lain sang anak dituntut untuk senantiasa memperhatikan kondisi sang “mama” tetap sempurna melakukan kewajibannya dan memberi hasil, yakni dengan cara menjaga norma-norma dan melakukan serangkaian seremonial, guna mengharapkan agar sang mama senantiasa memberikan kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak-anak cucunya.
3. **Secara religius:** tanah senantiasa diasosiasikan dan atau dikaitkan dengan para leluhur, roh-roh dari nenek moyangnya. Bahkan keyakinan itu diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah atau tanah adalah warisan yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupannya. Dalam pandangan demikian, maka tanah mendapat penghargaan yang tinggi, karena menghargai tanah mempunyai makna sebagai bagian dari penghargaan terhadap para leluhur dan nenek moyangnya.
4. **Secara politis:** tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat. Eksistensi politis masyarakat diukur dari apakah ia mempunyai kawasan bagi kelompok-kelompok masyarakatnya dan seberapa besar tanah itu mampu mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyarakat

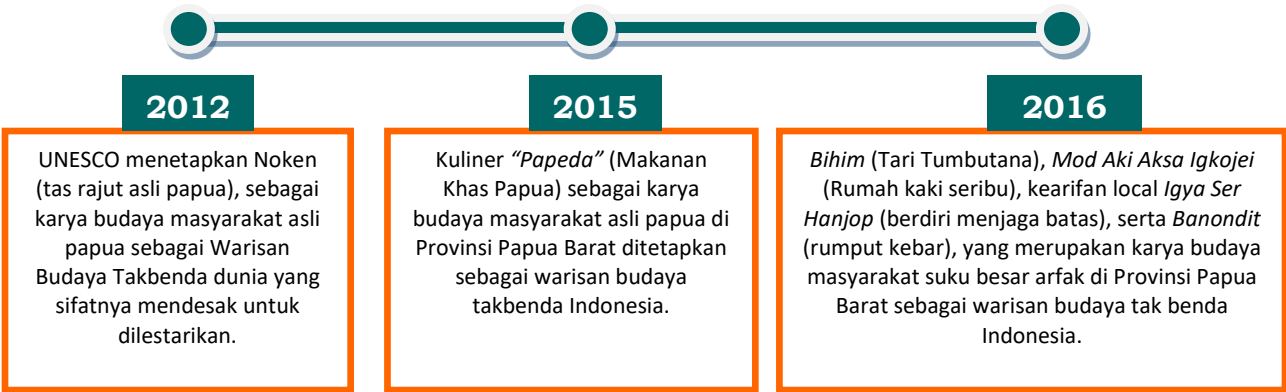


tersebut. Tanah tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk melaksanakan hubungan dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya. (Warami, 2016).

2.3.1.22.7 Kerajinan

Apabila dilihat dari sisi kerajinan, kerajinan di Papua sangat bervariasi. Salah satunya adalah seni ukir. Ukiran-ukiran tersebut biasanya berbentuk busur, panah, maupun peralatan-peralatan perang lainnya. Warna-warna yang mendominasi yang digunakan dalam kerajinan adalah putih, hitam, merah dan kuning. Warna putih dibuat dari tanah liat, isi keladi putih yang membusuk atau abu dari tungku api. Warna hitam dibuat dari asap lemak babi dan damar, arang dapur atau dari buah-buahan hutan. Warna merah dibuat dari tanah merah yang digali dari dalam tanah. Sedangkan warna kuning dibuat dari akar tumbuh-tumbuhan dan tali-talian hutan. Banyaknya hasil kerajinan dan budaya masyarakat Papua Barat membuat pemerintah harus giat untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya tersebut sebagai budaya asli Papua Barat, salah satu caranya adalah dengan mendaftarkannya baik secara nasional maupun internasional. Secara runtut waktu, dalam beberapa tahun terakhir pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar II.108.

Gambar II.108 Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional



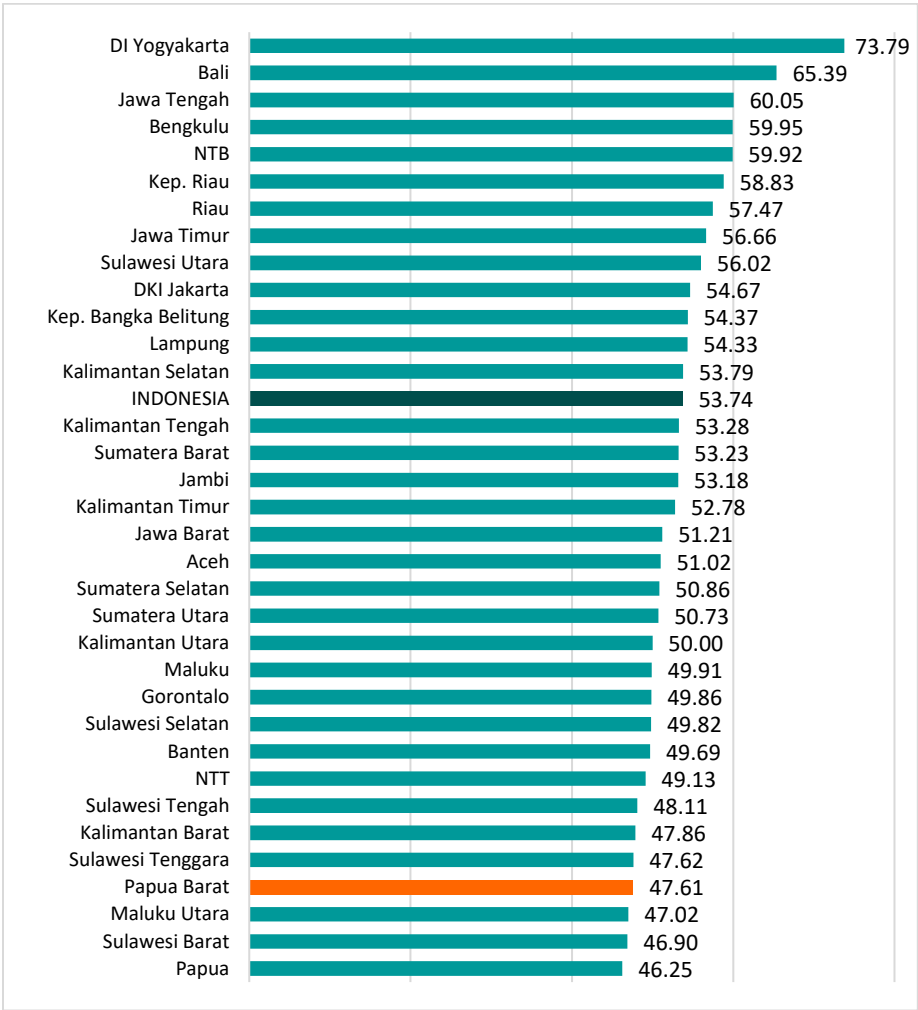
Sumber: RIPPDA Provinsi Papua Barat 2011-2030 (diolah)

2.3.1.22.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membawa arah baru dalam **pembangunan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan** dan

peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban.

Gambar II.109 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018



Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data agregat tingkat provinsi yang diperoleh dari Kemendikbud sebelum penetapan UU 29 Tahun 2022

Sumber: Kemendikbud dalam dokumen “Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018” dan <http://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/91>

Sebagai salah satu instrument untuk mengukur kontribusi kebudayaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan **tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah**, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi

budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Gambar II.109 menunjukkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2018. Berdasarkan Gambar II.109 diketahui IPK Papua Barat sebesar 47,61 dan berada di bawah angka nasional (53,74). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan kebudayaan di Papua Barat masih membutuhkan usaha dan kerja keras berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Tabel II.111 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat 2018

No.	Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Papua Barat
		Papua Barat	Indonesia	
1	Ekonomi Budaya	30,55	29,74	12
2	Pendidikan	69,67	64,58	32
3	Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,83	23
4	Warisan Budaya	41,11	20,11	34
5	Ekspresi Budaya	36,57	45,04	5
6	Budaya Literasi	55,03	48,70	25
7	Gender	54,97	51,03	32
IPK Total		53,74	47,61	31

Sumber: Kemendikbud dalam dokumen “Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018”

Apabila meninjau dimensi penyusun IPK, terdapat dua dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional, yaitu:, dimensi ketahanan sosial budaya pada posisi ke-23 dan dimensi ekspresi budaya pada posisi ke-5. Sementara itu, lima dimensi lainnya masih berada beberapa poin di bawah angka nasional, dimana dimensi warisan budaya menghasilkan nilai indeks terkecil dan berada pada posisi ke-34 (lihat Tabel II.111). Adapun hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Papua Barat, sebagai berikut:

- a. **Dimensi Ekonomi Budaya:** pada tahun 2018 hanya 0,30% penduduk usia 15 tahun ke atas yang sumber penghasilannya berasal dari keterlibatan mereka sebagai pelaku pertunjukkan seni.
- b. **Dimensi Pendidikan:** pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 7,27 tahun, atau setara dengan kelas 1 SMP. Capaian ini masih berada di bawah capaian nasional (8,17 tahun) bahkan target (15 tahun).
- c. **Dimensi Ketahanan Sosial Budaya:** pada tahun 2018 masih ada 30,49% rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Capaian ini masih jauh dari angka nasional (23,08%), bahkan target (0%).



- d. **Dimensi Warisan Budaya:** pada tahun 2018 belum ada benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi. Perlu usaha keras dari pemerintah setempat untuk menetapkan benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, minimal sejajar dengan angka nasional (3,17%) untuk mencapai target (50%).
- e. **Dimensi Ekspresi Budaya:** pada tahun 2018 hanya 2,30% penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni, meskipun capaian ini sudah berada di atas angka nasional (1,91%).
- f. **Dimensi Budaya Literasi:** pada tahun 2018 terdapat 8,44 % penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan. Capaian ini masih berada di bawah capaian nasional (12,16%) bahkan target (25%).
- g. **Dimensi Gender:** pada tahun 2018 terdapat sekitar 7 orang perempuan dari 100 orang penduduk laki-laki yang menjadi anggota parlemen. Capaian ini masih jauh di bawah capaian nasional (21 orang).

2.3.1.23 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memnuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Di Provinsi Papua Barat terdapat satu buah Perpustakaan umum provinsi dan satu buah perpustakaan umum Kabupaten yang juga berjumlah satu buah. Tabel II.112 menunjukkan indikator kinerja bidang perpustakaan Papua Barat.

Tabel II.112 Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah
Provinsi Papua Barat, 2017 - 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan	%	0,01	0,02	0,03	-	0,05
2	Persentase kenaikan minat baca masyarakat per tahun	%	5,00	10,00	15,00	-	25,00
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	-	-	45.000	-	30.000
4	Persentase penduduk membaca selain buku pelajaran	%	0,01	0,01	0,03	-	0,05

Sumber: Bappeda / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.112, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan, yang menandakan bahwa minat baca yang dimiliki oleh masyarakat seiring waktu semakin meningkat, yang juga ditunjukkan oleh indikator persentase kenaikan minat



baca masyarakat per tahun. Begitu juga dengan indikator terakhir, yaitu persentase penduduk membaca selain buku pelajaran, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Minat baca yang semakin meningkat harus didukung oleh ketersediaan jumlah dan koleksi buku yang beragam, dimana kedepannya diharapkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah semakin meningkat. Koleksi buku ini tidak terbatas pada buku (monograph), tapi juga dapat merupakan serial (majalah dan bulletin), koleksi digital, dan koleksi audio.

2.3.1.24 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Arsip juga dapat berfungsi sebagai bukti perekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan dapat menjadi memori kolektif yang berguna sebagai pembelajaran untuk pembangunan daerah kedepannya. Berikut adalah indikator-indikator kinerja bidang kearsipan Papua Barat.

Tabel II.113 Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Papua Barat, 2017-2021 (%)

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	-	10,00	10,00	-	10,00
2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD	-	15,00	15,00	-	15,00
3	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
4	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi	-	1,00	1,00	-	1,00

Sumber: Bappeda / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.113 dapat dilihat bahwa tingkat ketertiban administrasi kearsipan dan pengelolaan arsip di tingkat OPD masih relatif rendah. Begitu juga dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang belum dilakukan secara efektif. Arsip daerah yang telah terdigitalisasi juga dapat dilakukan peningkatan kedepannya. Kedepannya, OPD diharapkan dapat menerapkan arsip secara baku, memiliki tenaga arsip yang telah diberi pembekalan dan pelatihan sistem kearsipan, dan menggunakan dapat mengelola arsip dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis). Penataan arsip diharapkan telah berdasarkan kode klasifikasi, serta OPD menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengarsipan yang efektif dan efisien.

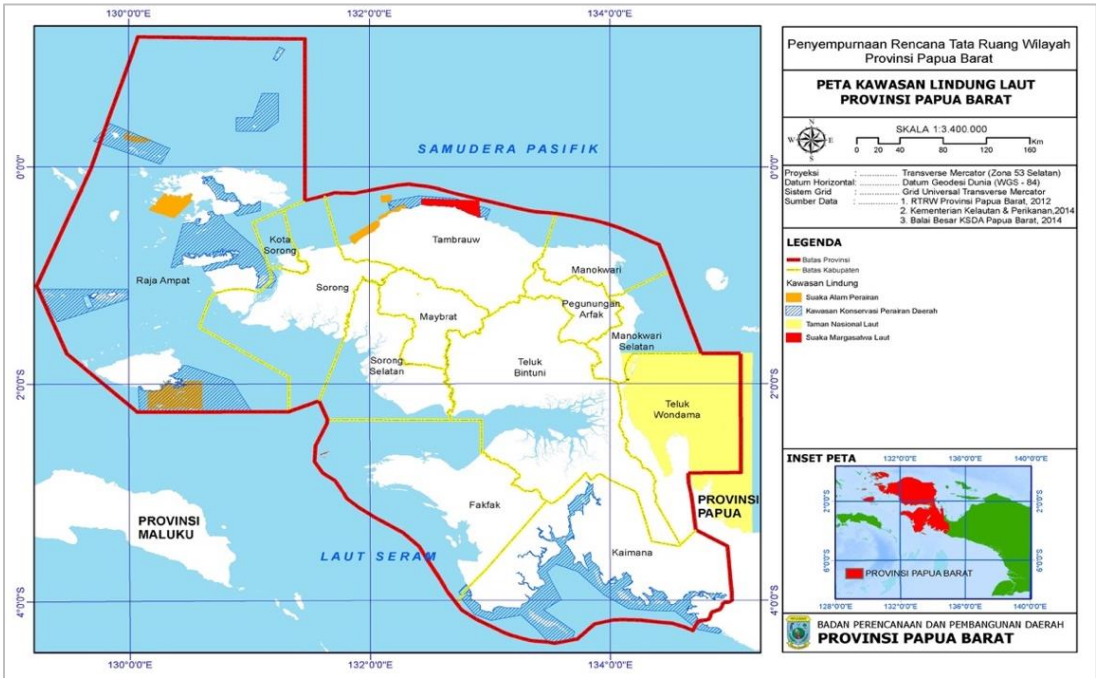
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

2.3.2.1.1 Kawasan Lindung Laut

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar baik untuk sektor perikanan, minyak dan gas, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Dengan potensi sumberdaya kelautan yang tinggi meliputi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga di masa mendatang, melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, kebutuhan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Gambar II.110 Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat



Catatan: peta yang ditampilkan masih mencakup wilayah Provinsi Papua Barat sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Dalam rangka perlindungan terhadap sumber daya perairan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua Barat. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perubahannnya pada Undang-undang 45 Tahun 2009, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan perubahannya pada Undang-undang No. 1 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir



merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan nirhayati, yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Di dalam suatu ekosistem pesisir terjadi transformasi energi yang berlangsung di antara kedua komponen dalam sistem tersebut maupun dengan komponen-komponen dari sistem lainnya. Kelangsungan fungsi ekosistem sangat menentukan kelestarian sumber daya alam sebagai komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. Karena itu untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung di antara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem.

Dalam RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033, kawasan konservasi atau lindung laut di Provinsi Papua Barat terdiri dari beberapa kriteria diantaranya suaka margastwa laut, cagar alam laut, Taman Nasional Laut, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Berdasarkan manfaatnya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan sebagai perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan Teluk Bintuni, kawasan Teluk Cenderawasih, kawasan pesisir utara kepala burung (Sausapor, Manokwari), kawasan mangrove Bintuni; kawasan untuk kepentingan wisata dan ritual meliputi kawasan Teluk Triton dan Pulau Aiduna (Kaimana). Gambaran mengenai beberapa kawasan konservasi di perairan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih

Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNTC) terletak di Samudera Pasifik dan secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}43'-03^{\circ}22'$ Lintang Utara dan $134^{\circ}06'-135^{\circ}10'$ Bujur Timur. Berdasarkan wilayah administrasi, TNTC berada di Kabupaten Teluk Wondama yang meliputi 13 distrik yaitu Distrik Wasior, Wondiboi, Rasiei, Naikere, Pesisir Kuri, Teluk Duairi, Roon, Rumberpon, Soug Wepu, Windesi, Wamesa, Dataran Wamesa, dan Roswar. TNTC merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove dan hutan tropika daratan pulau di Papua. TNTC merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Potensi karang TNTC tercatat 150 jenis dari 15 famili,

dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentase penutupan karang hidup bervariasi antara 30,40% sampai dengan 65,64%. Umumnya, ekosistem terumbu karang terbagi menjadi dua zona yaitu zona rata-rata terumbu (reef flat) dan zona lereng terumbu (reef slope). Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni karang biru (*Heliopora coerulea*), karang hitam (*Antipathes sp.*), family *Faviidae* dan *Pectiniidae*, serta berbagai jenis karang lunak.

Kawasan TNTC secara definitif ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 Agustus 2002 dengan luas 1.453.500 hektare, terdiri dari 68.000 hektare daratan yang meliputi 12.400 hektare (0,85%) pesisir pantai, 55.800 hektare (3,84%) daratan pada pulau-pulau, 80.000 hektare (5,5%) terumbu karang dan luas lautan 1.305.500 hektare (89,8%). Kawasan TNTC beriklim tropis lembab. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson, kawasan TNTC termasuk dalam iklim tipe A dengan nilai $Q = 12,47\%$. Rata-rata curah hujan per tahun berkisar antara 1.500-3.500 mm dengan temperatur udara 25-30°C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75-90%.

Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Kaimana, merupakan KKLD yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, melalui Peraturan Bupati Kaimana No. 04 Tahun 2008 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kaimana. Luas wilayah yang dicadangkan menjadi KKLD adalah sebesar 597.747 Ha meliputi seluruh perairan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terakhir pulau terluar (seluruh wilayah perairan Kaimana) sehingga semua kampung masuk dalam kawasan, yaitu terdapat 7 distrik yang terdiri dari 84 kampung dan 2 kelurahan. Adapun di tingkat nasional telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dimana Luas KKD Kaimana adalah 499.804,13 Ha.

Secara morfologi, Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari $< 2\%$ hingga di atas 70% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0 - 2.800 m di atas permukaan laut. Iklim secara umum dibagi menjadi 2 yaitu musim kemarau dan penghujan, namun masyarakat lokal lebih mengenal 4 musim yaitu pancaroba timur (Maret-Mei), angin timur (Juni- Agustus), pancaroba barat (September-November), dan musim angin barat (Desember-Februari). Temperatur permukaan perairan Kaimana pada bulan Agustus





berkisar antara 25,6-27,0°C dan 24,3-26,5°C di dasar (50 m), sedangkan pada bulan Februari temperatur bervariasi antara 28,4° dan 29,0°C di lapisan permukaan dan 27,3-29,6°C di dasar. Rata-rata perbedaan antara permukaan dan dasar perairan lebih besar di bulan Agustus daripada Februari. Salinitas pada perairan Kaimana tercatat antara 29,5- 34,1.

Persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 4-6 m berkisar antara 22-82%, sementara persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 12-15 m berkisar antara 4-57%, dan persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 20-25 m berkisar antara 3-68%. Spesies ikan yang paling sering dijumpai adalah *Lutjanus decussatus*, *Parupeneus barberinus*, *Parupeneus multifasciatus*, *Ctenochaetus binotatus* dan *Scarus flavipectoralis*. Sementara lebih dari setengah dari biomas ikan target yang tercatat terdiri dari famili *Caesionidae* (*fusiliers*), *Scaridae* (*parrot fish*) dan *Acanthuridae* (*surgeon fish*). Perairan daerah Kaimana memiliki terumbu karang tepi (*fringing reef*). Topografi daerah pesisirnya landai. Hasil penelitian dari CI sepanjang tahun 2006–2010, daerah KKLD Kaimana memiliki 1.003 jenis ikan, 471 jenis karang, 28 jenis udang, dan 2 mantis. Tutupan karang yang dihasilkan memperlihatkan bahwa tutupan karang karang mati mencapai 16%, karang hidup 15%, rubbles 10%, pasir 42% dan biota lainnya 17%. Daerah hutan mangrove terdapat di Teluk triton, yaitu disekitar kampung Lobo dan Teluk Arguni di Distrik Yamor. Mangrove di wilayah KKLD Kaimana masih tergolong asli dan masih cukup baik.

2.3.2.1.2 Perikanan Laut dan Perairan Umum

Produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dihasilkan dari 6 kabupaten yang memiliki wilayah laut. Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap laut terbesar di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Kaimana (27.943 ton dengan nilai produksi 1.285 milyar rupiah). Adapun produksi ikan tangkap di perairan umum darat (sungai dan danau) terbesar di Papua Barat terdapat di Kabupaten Kaimana (202 ton dengan nilai produksi 4,48 milyar rupiah) dan Teluk Bintuni (146 ton dengan nilai produksi 4,48 milyar rupiah), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.114. Perbedaan produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum darat tersebut sangat dipengaruhi jumlah dan komposisi armada penangkapan. Semakin banyak jumlah armada penangkapan dan komposisi armadanya modern (kapal motor) tinggi, maka produksi perikanan tangkap juga akan mengalami peningkatan.



Tabel II.114 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Laut dan Perairan Umum Daratan, 2019

No	Kabupaten	Laut						Perairan Umum Darat			
		Cakalang	tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	TOTAL	Udang	Ikan	Lainnya	TOTAL
VOLUME (TON) :											
1	Fakfak	-	438	-	-	1.610	2.048	-	-	-	-
2	Kaimana	3.197	-	3.383	2.158	19.205	27.943	-	197	5	202
3	Teluk Wondama	1.749	458	492	8	9.174	11.882	-	-	-	-
4	Teluk Bintuni	-	-	-	1.111	4.421	5.532	35	72	39	146
5	Manokwari	-	1.561	2.832	-	6.002	10.394	-	14	-	14
6	Manokwari Selatan	219	207	235	-	1.759	2.420	-	31	2	33
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
PAPUA BARAT		5.165	2.664	6.942	3.277	42.171	60.219	35	339	46	420
NILAI PRODUKSI (MILYAR RUPIAH)											
1	Fakfak	-	17,52	-	-	84,13	101,65	-	-	-	-
2	Kaimana	111,88	-	208,2	156,5	809,3	1.285,9	-	4,3	0,09	4,48
3	Teluk Wondama	108,04	22,91	24,6	0,16	471,3	627,1	-	-	-	-
4	Teluk Bintuni	-	-	-	82,4	152,4	234,8	1,58	2,1	1,16	4,9
5	Manokwari	-	78,02	141,6	-	378,7	598,3	-	0,36	-	0,36
6	Manokwari Selatan	8,7	10,36	11,72	-	79,2	110,6	-	0,94	0,05	1,00
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	0,79
PAPUA BARAT		228,62	128,81	386,12	239,06	1.975,03	2.958,35	1,58	8,49	1,30	11,53

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2020”

2.3.2.1.3 Perikanan Budidaya

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Barat juga berasal dari perikanan budidaya. Pada tahun 2019, produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Fakfak (10.163 ton dengan nilai produksi 50,81 milyar rupiah) dan Kabupaten Kaimana (1.326 ton dengan nilai produksi 2,73 milyar rupiah), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.115. Hal yang menarik terjadi di Kabupaten Kaimana yang menghasilkan produksi ikan budidaya sangat tinggi, namun memiliki nilai produksi relatif rendah. Hal ini mengindikasikan nilai jual ikan budidaya di Kaimana yang relatif lebih murah dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel II.115 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya, 2019

No	Wilayah	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Bandeng	Rumput Laut	Kerapu	Udang	Total
VOLUME (TON) :											
1	Fakfak	-	-	-	-	-	-	10.163	-	-	10.163
2	Kaimana	-	-	-	1	-	4	1.313	8	-	1.326
3	Teluk Wondama	-	-	-	32	22	-	151	4	-	209
4	Teluk Bintuni	-	-	1	2	1	3	-	-	-	7
5	Manokwari	-	-	249	378	183	-	-	-	-	810
6	Manokwari Selatan	-	-	9	1	-	-	-	-	-	10
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
PAPUA BARAT		-	-	259	416	206	7	11.627	12	0	12.527
NILAI PRODUKSI (MILYAR RUPIAH)											

No	Wilayah	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Bandeng	Rumput Laut	Kerapu	Udang	Total
1	Fakfak	-	-	-	-	-	-	50,81	-	-	50,81
2	Kaimana	-	-	-	0,07	0,03	0,48	1,05	1,10	-	2,73
3	Teluk Wondama	-	0,02	0,04	1,60	1,33	-	0,43	0,31	-	3,73
4	Teluk Bintuni	-	-	0,05	0,11	0,09	0,08	-	-	-	0,33
5	Manokwari	-	-	12,45	22,65	9,15	-	-	-	-	44,25
6	Manokwari Selatan	-	-	0,43	0,06	-	-	-	-	-	0,49
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	0,19	0,43	-	-	-	-	0,62
PAPUA BARAT		0,00	0,02	12,97	24,68	11,03	0,56	52,29	1,41	0,00	102,96

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka”

2.3.2.2 Pariwisata

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Papua Barat dari 11,99% pada tahun 2016 menjadi 12,51% pada tahun 2020 (Tabel II.116).

Tabel II.116 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB Papua Barat 2016-2020 (%)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHK (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Pariwisata		11,99	12,61	12,73	13,34	12,51
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	6,33	6,54	6,90	7,03
2	Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,53	2,58	2,72	2,30
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,52	0,54	0,55	0,58	0,55
4	Informasi dan Komunikasi	1,80	1,87	1,91	2,07	2,29

Catatan: data yang ditampilkan merupakan data agregat yang diperoleh dari BPS Provinsi Papua Barat sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya, dengan cakupan wilayah 13 kabupaten/kota
 Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum optimal dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Berdasarkan Tabel II.117 diketahui bahwa rata-rata lama menginap tamu asing pada tahun 2020 di Papua Barat hanya 1,60 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik adalah 2 hari. Salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Provinsi Papua Barat karena ketersediaan suprastruktur dan infrastruktur yang belum dapat menarik minat wisatawan untuk berada lebih lama di Provinsi Papua Barat.



Tabel II.117 Jumlah Akomodasi, Rata-rata Lama Menginap, Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Papua Barat 2017-2020

INDIKATOR		2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama menginap tamu asing		2,36	2,52	1,92	1,60
Rata-rata lama menginap tamu domestik		2,18	1,89	1,92	2,00
Hotel Berbintang	Tingkat penghunian kamar hotel (%)	57,18	54,41	49,99	37,18
	Tingkat penghunian tempat tidur (%)	52,63	54,61	57,29	N/A
	Jumlah malam tamu	231.265	317.934	409.131	266.941
Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya	Tingkat penghunian kamar hotel (%)	25,35	37,67	N/A	13,75
	Tingkat penghunian tempat tidur (%)	26,70	37,12	N/A	N/A
	Jumlah malam tamu	67.860	402.121	N/A	68.730

Catatan: data yang ditampilkan merupakan data agregat yang diperoleh dari BPS Provinsi Papua Barat sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya, dengan cakupan wilayah 13 kabupaten/kota
Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2018-2021”

Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata tentunya sangat didukung oleh beberapa fasilitas penunjang kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi berupa hotel. Berdasarkan Tabel II.118 diketahui bahwa jumlah hotel berbintang di Papua Barat sangat terbatas. Hotel berbintang 4 dan 3 hanya dapat ditemui di Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Kaimana. Mayoritas hotel di Papua Barat merupakan hotel melati, yaitu sebanyak 91 hotel. Terdapat daerah yang tidak memiliki fasilitas/sarana akomodasi hotel berbintang dan hotel melati yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel II.118 Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi Usaha Akomodasi Tahun 2020

No	Kabupaten	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Melati	Jumlah
1	Fakfak	0	0	1	0	0	16	17
2	Kaimana	0	0	1	0	0	5	6
3	Teluk Wondama	0	0	0	0	0	6	6
4	Teluk Bintuni	0	0	0	1	0	37	38
5	Manokwari	0	1	1	2	0	24	28
6	Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	3	3
7	Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0	0	0
Papua Barat		0	1	3	3	0	91	98

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

2.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Provinsi Papua Barat. Di bidang ketenagakerjaan, sektor pertanian menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat. Selain itu, pentingnya sektor pertanian juga dilihat dari fungsinya sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian. Pembahasan sektor pertanian terbagi menjadi subbab tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.

2.3.2.3.1 Tanaman Pangan

Tabel II.119 menunjukkan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Barat tahun 2019-2020. Berdasarkan Tabel II.119 diketahui bahwa wilayah



dengan produksi beras tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Manokwari (9.325,70 ton) dan Kabupaten Manokwari Selatan (2.877,52 ton). Wilayah dengan produksi jagung dan kedelai terbesar adalah Kabupaten Manokwari (jagung: 1.885 ton dan kedelai: 38 ton).

Tabel II.119 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2020 (ton)

No	Kabupaten	Padi (Ton)		Beras (Ton)		Jagung		Kedelai	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Fakfak	49,91	88,1	29,83	52,66	20,0	n.a	-	n.a
2	Kaimana	-	-	-	-	211,0	n.a	-	n.a
3	Teluk Wondama	260,06	162,29	155,44	97,01	37,0	n.a	-	n.a
4	Teluk Bintuni	857,07	1.208,13	512,31	722,16	696,0	n.a	4,0	n.a
5	Manokwari	17.022,45	15.601,20	10.175,26	9.325,70	1.885,0	n.a	38,0	n.a
6	Manokwari Selatan	4.664,44	4.813,88	2.788,19	2.877,52	723,0	n.a	-	n.a
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	n.a	-	n.a
Papua Barat		22.853,93	21.873,60	13.661,03	13.075,05	3.572,00	0,00	42,00	0,00

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

Rencana pengembangan tanaman pangan tidak lepas dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini dicapai melalui penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. KP2B terdapat di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

2.3.2.3.2 Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Tabel II.120 menunjukkan produksi perkebunan berdasarkan kabupaten di Papua Barat tahun 2020. Berdasarkan Tabel II.120 diketahui bahwa produksi kelapa sawit hanya terdapat di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari



(39.164,35 ton) dan Teluk Bintuni (7.613,48 ton). Selain kepala sawit terdapat produksi komoditas kelapa dan kakao yang cukup tinggi pada tahun 2020. Daerah dengan produksi kelapa terbesar adalah Kaimana (567 ton) dan Manokwari (502 ton). Daerah dengan produksi kakao terbesar adalah Manokwari (617 ton) dan Manokwari Selatan (395 ton). Adapun komoditas kopi baru diproduksi di Pegunungan Arfak (1,5 ton).

Tabel II.120 Produksi Perkebunan (ton), 2020

No	Kabupaten	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Kakao
1	Fakfak	-	155,00	-	8,00
2	Kaimana	-	567,00	-	6,00
3	Teluk Wondama	-	465,23	-	26,30
4	Teluk Bintuni	7.613,48	76,15	-	50,00
5	Manokwari	39.164,35	502,00	-	617,00
6	Manokwari Selatan	-	62,40	-	395,00
7	Pegunungan Arfak	-	-	1,5	-
PAPUA BARAT		46.778,83	1.828,78	1,5	1.102,30

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

2.3.2.3.3 Peternakan

Tabel II.121 menunjukkan populasi ternak dan unggas di Papua Barat tahun 2020. Berdasarkan Tabel II.121 diketahui bahwa daerah yang memiliki populasi ternak tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (babi = 39.234 ekor ; sapi potong = 17.234 ekor ; kambing = 7.610 ekor). Selain itu, Kabupaten Manokwari juga memiliki populasi unggas tertinggi di Papua Barat (ayam kampung = 5.995.856 ekor ; ayam petelur = 178.227 ekor ; ayam pedaging = 343.687 ekor ; itik = 78.659 ekor).

Tabel II.121 Populasi Ternak & Unggas di Papua Barat Tahun 2020 (ekor)

No	Kabupaten	Ternak							Unggas			
		Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik / Itik Manila
1	Fakfak	-	1,823	-	-	1.745	-	560	53.560	5.747	11.081	795
2	Kaimana	-	525	-	-	456	-	156	19.230	5.934	11.443	405
3	Teluk Wondama	-	623	-	-	286	-	1.279	10.542	1.780	3.433	494
4	Teluk Bintuni	-	2.535	-	-	645	-	5.672	141.250	7.892	15.219	890
5	Manokwari	-	17.234	-	-	7.610	-	39.234	5.995.856	178.227	343.687	78.659
6	Manokwari Selatan	-	2.633	-	-	753	-	6.163	40.200	3.613	6.966	1.110
7	Pegunungan Arfak	-	1.435	-	-	247	-	6.945	48.560	-	-	-
PAPUA BARAT		-	24.987	0	0	11.742	0	60.009	6.309.198	203.193	391.829	82.353

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

2.3.2.4 Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek



ekonomi, lingkungan ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat tempatan. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase kawasan hutan terbesar di Indonesia, hal ini menjadikan sub sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan Papua Barat. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Pengembangan sektor kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas. Pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan.

Tabel II.122 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (ha) Tahun 2020

No.	Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam & Pelestarian Alam	Hutan Produksi			JUMLAH
				Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi	
1	Fakfak	43.876	55.222	224.472	442.917	136.858	903.345
2	Kaimana	339.810	131.446	568.310	336.586	123.897	1.500.049
3	Teluk Wondama	54.451	785.558	78.313	68.915	121.639	1.108.876
4	Teluk Bintuni	127.487	198.048	486.251	747.492	216.600	1.775.878
5	Manokwari	62.391	96.364	34.859	9.238	19.221	222.073
6	Manokwari Selatan	158.414	78.481	37.493	4.221	0	278.609
7	Pegunungan Arfak	6.947	1.081	5.261	2.928	25.285	41.502
Papua Barat		793.376	1.346.200	1.434.959	1.612.297	643.500	5.830.332
Persentase (%)		13,60%	23,09%	63,31%			100,00%

Sumber: Papua Barat Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Papua Barat

Berdasarkan data BPS, Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 memiliki kawasan hutan dan perairan seluas 5.830.332 ha. Dari seluruh luasan tersebut, sebagian besar luasan hutan merupakan hutan produksi dengan luasan keseluruhan mencapai 3.690.756 ha (63,31%). Dari 3.690.756 ha hutan produksi, luas hutan produksi terbatas adalah seluas 1.434.959 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 643.500 ha, dan hutan produksi tetap seluas 1.612.297 ha. Sementara untuk luas hutan lindung 793.376 ha (13,60%) dan hutan suaka alam dan pelestarian alam seluas 1.346.200 ha (23,09%).

Berdasarkan proporsi tersebut, nampak bahwa kawasan hutan untuk tujuan perlindungan masih berada di atas persentase yang disyaratkan, yaitu minimal 30%. Proporsi tersebut perlu dipertimbangkan kembali, karena dengan pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat, persebaran di setiap kabupaten/kota tentunya akan bervariasi. Selain itu, secara fisiografi, kawasan hutan di Provinsi Papua Barat memiliki kelerengan yang bervariasi dari datar sampai sangat curam, namun sekitar 65% memiliki *slopes* dari curam-sangat curam dengan kemiringan di atas 25%. Oleh karenanya dalam rencana



pengembangan wilayah pembangunan di setiap kabupaten perlu mempertimbangkan proporsi kawasan hutan untuk perlindungan ini. Kawasan hutan produksi, khususnya areal hutan produksi konversi persebarannya tidak merata di setiap kabupaten. Untuk itu, penataan fungsi kawasan perlu ditinjau kembali dan peninjauannya dilaksanakan bersamaan dengan penetapan tata ruang wilayah pembangunan Provinsi Papua Barat dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi SDA tersedia di setiap wilayah.

Berdasarkan peta transisi penggunaan lahan tahun tahun 2006-2012 dan 2012-2020, laju deforestasi, degradasi maupun reforestasi pada dua periode ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Laju deforestasi tahunan pada dua periode ini meningkat dari 5,151 ha/tahun menjadi 15,558 ha/tahun atau meningkat 3 kali lipat, demikian juga laju degradasi hutan juga meningkat lebih dari tiga kali lipat, sedangkan laju reforestasi meningkat 203 kali lipat . Secara total laju emisi bersih GRK per tahun (net emission) dari deforestasi, degradasi dan reforestasi pada periode 2006-2012 adalah sekitar 4.362.841 tCO₂ dan pada periode 2012-2020 mencapai 6.079.945 tCO₂/tahun. Jadi rata-rata emisi per tahun selama periode 2006-2020 ialah sebesar 5.344.043 tCO₂/tahun. Tingkat emisi dapat dijadikan sebagai tingkat emisi baseline sektor lahan dan kehutanan Provinsi Papua Barat. Periode 2012-2020 merupakan periode referensi yang digunakan oleh di nasional untuk FRL REDD+ nasional.

Tabel II.123 Rata-Rata Emisi Tahunan dari Deforestasi, Degradasi, dan Serapan dari Reforestasi di Provinsi Papua Barat pada Periode 2006-2012 dan 2012-2020

URAIAN	SATUAN	2006-2012	2012-2020	FREL
Deforestasi	ha/th	5.154	15.588	11.116
	t CO ₂ /th	2.006.755	6.270.271	4.443.050
Degradasi	ha/th	22.211	74.545	52.116
	t CO ₂ /th	2.407.013	8.674.912	5.988.670
Reforestasi	ha/th	152	30.863	17.701
	t CO ₂ /th	-50.928	-8.865.238	-5.087.677
Rata-rata emisi	t CO ₂ /tahun	4.362.841	6.079.945	5.344.043

Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).
Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022, diolah

Target nasional penurunan emisi GRK yang terdapat dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) dari sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 17% dari 29% target penurunan emisi GRK dari seluruh sektor. Maka pengendalian emisi GRK dari sektor FOLU di Provinsi Papua Barat perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022-2024.





Untuk memahami upaya pengendalian emisi GRK dari sektor FOLU maka diperlukan peninjauan pada rencana penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada penyusunan Rencana Operasional (RENOP) menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Rencana disusun menggunakan hasil analisis spasial dalam Laporan Integrasi Perencanaan Program Berbasis Spasial pada Tingkat Tapak untuk Mencapai Target Pembangunan KLHK (Biro Perencanaan KLHK, 2021) yang disusun dengan menggunakan tiga informasi utama sebagai wujud pengintegrasian berbasis spasial, meliputi; (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF). Ketiga informasi spasial ini menjadi “template” yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan sehingga target penurunan emisi GRK dapat dicapai di Provinsi Papua Barat.

2.3.2.4.1 Analisis Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT)

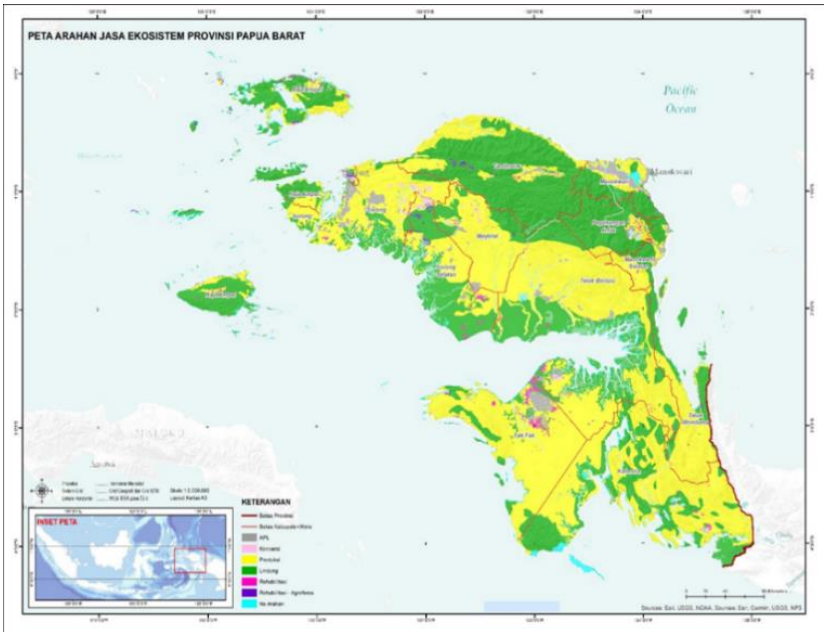
Peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan adalah peta yang dibuat dari informasi daya dukung/daya tampung (DDDT) indikatif dan kualitas hutan berdasarkan nilai candangan karbon tinggi atau high carbon stock (HCS) dan fraksi tutupan tajuk hutan. Peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan berisi informasi 4 arahan optimasi pemanfaatan kawasan secara umum yaitu arahan lindung, arahan produksi, arahan rehabilitasi dan arahan konversi. Arahan lindung memiliki ciri kawasan dengan fungsi layanan jasa lingkungan tinggi dan kualitas hutan masih baik atau kualitas hutan rendah, namun merupakan ekosistem esensial (gambut, savanna, kars, eksosistem pegunungan tinggi/lumut) serta memiliki nilai High Conservation Value (HCV) yang tinggi. Arahan produksi diperuntukan bagi kawasan yang memiliki kualitas hutan tinggi namun memiliki *High Conservation Value* (HCV) yang rendah. Arahan rehabilitasi diperuntukan bagi kawasan yang lahannya sudah diokupasi masyarakat dengan kegiatan pertanian dan memiliki fungsi layanan jasa lingkungan sedang dan rendah. Arahan konversi diperuntukan bagi kawasan yang umumnya sudah menjadi kawasan terbangun dan budidaya pertanian yang lebih dari 20 tahun (KLHK, 2022).

Berdasarkan hasil analisis peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan di Provinsi Papua Barat terdapat 34,74% dari total luas kawasan diarahkan untuk lindung, 57,81% untuk produksi, 2,74% untuk APL, 0,29% untuk konversi, dan



0,88% untuk rehabilitasi. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya kawasan di Provinsi Papua Barat diarahkan untuk lindung. Selain itu, ini mengindikasikan bahwa kawasan di Papua Barat memiliki jasa lingkungan yang tinggi dan kualitas hutan masih sangat baik serta nilai HCV yang tinggi. Sementara wilayah yang diarahkan untuk produksi yang luasnya sekitar 57,81% dari kawasan, mengindikasikan terdapatnya kawasan yang memiliki HCV yang sudah rendah tetapi kualitas hutan masih sangat baik dan jasa ekosistemnya tinggi. Adapun hasil analisis arahan optimasi pemanfaatan kawasan untuk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat diperlihatkan pada Tabel II.124.

Gambar II.111 Peta dan Persentase Luasan Arahan Optimasi Pemanfaatan Kawasan



Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).
Sumber: hasil analisis, 2022

Tabel II.124 Luasan Arahan Optimasi Pemanfaatan Kawasan

No	Kabupaten	Arahan Optimasi Pemanfaatan Kawasan (Ha)							TOTAL (HA)
		APL	Konversi	Produksi	Lindung	Rehabilitasi	Rehabilitasi Agrofores	Tidak Ada Arahan	
1	Fakfak	44.040	3.338	764.080	126.362	28.459	815	19.851	986.945
2	Kaimana	4.684	971	938.022	543.400	7.660	480	75.802	1.571.019
3	Manokwari	49.141	5.671	69.444	155.244	864	1.419	13.917	295.700
4	Manokwari Selatan	11.078	781	83.248	85.673	1.068	487	1.282	183.618
5	Pegunungan Arfak	11.436	249	42.513	295.470	2.484	752	4.822	357.726
6	Teluk Bintuni	35.659	5.488	1.141.829	665.098	9.115	571	76.960	1.934.720
7	Teluk Wondama	2.722	499	310.665	141.845	1.555	1.321	6.533	465.140
Grand Total (Ha)		158.760	16.997	3.349.801	2.013.092	51.205	5.845	199.167	5.794.868
Persentase (%)		2,74	0,29	57,81	34,74	0,88	0,10	3,44	100,00

Sumber: hasil analisis, 2022

Berdasarkan Tabel II.124 arahan optimasi kawasan untuk lindung terbesar terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (665.098 Ha) dan Kabupaten Kaimana (543.400 Ha). Hal ini dapat dipahami dikarenakan umumnya



kabupaten tersebut berada pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sementara arahan optimasi kawasan untuk produksi terbesar terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (1.141.829 Ha), kemudian diikuti oleh masing-masing Kabupaten Kaimana (938.022 Ha), dan Kabupaten Fakfak (764.080 Ha).

2.3.2.4.2 Analisis Indeks Biogeofisik

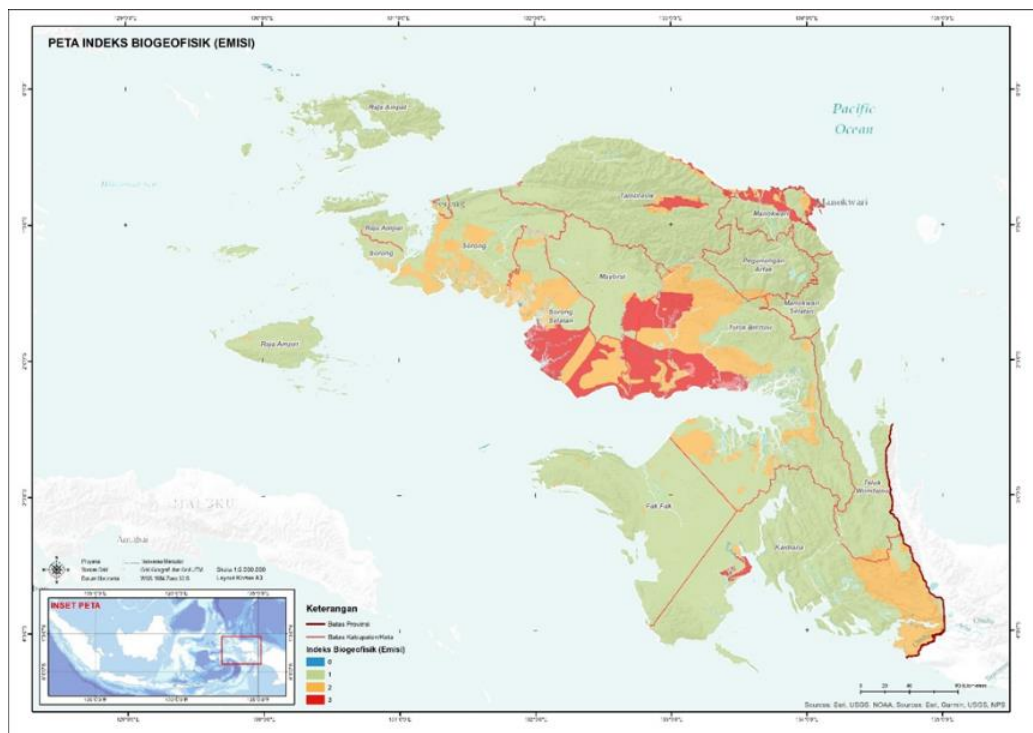
Penyusunan peta Indeks Biogeofisik (IBGF) dikembangkan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*. Dalam hal ini IBGF disusun dalam 3 jenis informasi yaitu IBGF Emisi, IBGF Serapan dan IBGF Kebakaran.

- 1) IBGF Emisi ditetapkan berdasarkan laju deforestasi historis (Indeks Emisi Historis, IEH) dan persentase tutupan hutan alam yang masih tersisa saat ini pada wilayah tersebut (Indeks Tutupan Hutan, ITH). Wilayah yang memiliki ranking IBGF Emisi tertinggi merupakan wilayah yang laju deforestasi masa lalu (emisi historis) tinggi sementara luas fraksi wilayah yang masih berhutan alam sudah sangat rendah. Artinya, wilayah yang IBGF Emisi memiliki ranking pertama akan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk kehilangan hutan alam dalam waktu yang tidak terlalu lama atau dapat dikatakan memiliki tingkat risiko emisi sangat tinggi. Pada wilayah ini, keberadaan faktor-faktor pendorong (drivers) deforestasi sudah sangat tinggi sehingga perlu mendapat prioritas untuk penanganan faktor pendorong. Sebaliknya pada wilayah yang ranking IBGF Emisi rendah.
- 2) IBGF Serapan ditetapkan berdasarkan tren perubahan luas lahan tidak produktif historis (Indeks Luas Lahan Non Produktif; ILNP) dan persentase tutupan lahan tidak produktif yang ada saat ini pada wilayah tersebut (Indeks Tutupan non-Produktif; ITNP). Wilayah yang memiliki ranking IBGF Serapan tertinggi merupakan wilayah yang tren perubahan luas lahan tidak produktif cenderung meningkat dan luas lahan tidak produktif saat ini sudah sangat tinggi (>75%). Artinya, wilayah yang IBGF Serapan memiliki ranking pertama akan memiliki potensi serapan yang sangat tinggi.
- 3) IBGF Kebakaran menggambarkan tingkat kerentanan atau kemudahan suatu kawasan terkena kebakaran yang ditetapkan berdasarkan keberadaan titik api historis dan kondisi biofisik. IBGF Kebakaran pada prinsipnya menentukan tingkat kerentanan wilayah terhadap kebakaran berdasarkan

kedekatan wilayah terhadap faktor pemicu atau pendorong terjadinya kebakaran diantaranya kedekatan dengan jalan, pemukiman, keberadaan gambut dan lainnya. Masing-masing indeks dibagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang dan tinggi (KLHK, 2022).

Berdasarkan hasil analisis peta indeks biogeofisik emisi di Provinsi Papua Barat terdapat 75,65% (4.383.805 Ha) berada pada kategori rendah, 16,02% (928.058 Ha) kategori sedang dan 7,22% kategori tinggi (418.494 Ha). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada wilayah Provinsi Papua Barat memiliki laju deforestasi masa lalu yang masih rendah dan wilayah yang masih berhutan alam masih sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan kondisi hutan di Provinsi Papua Barat masih sangat baik, meskipun demikian pada beberapa wilayah terdapat juga daerah yang laju deforestasi masa lalunya tinggi dan kualitas hutan alamnya semakin menurun seperti pada wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Hal ini dikarenakan pada kedua wilayah tersebut berada pada wilayah pesisir yang saat ini banyak mengalami pertumbuhan yang pesat. Adapun grafik distribusi luasan dan peta indeks biogeofisik emisi di Provinsi Papua Barat diperlihatkan pada Gambar II.112.

Gambar II.112 Peta Luasan Indeks Biogeofisik Emisi



Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).

Sumber: hasil analisis, 2022

Adapun hasil analisis indeks biogeofisik emisi untuk tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat diperlihatkan pada Gambar II.112. Berdasarkan Gambar II.112 luasan indeks biogeofisik emisi dengan kategori tinggi terbesar

terdapat pada Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara untuk kategori sedang terbesar terdapat pada Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana. Untuk kategori rendah luasan terbesar terdapat di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni.

Tabel II.125 Luasan Indeks Biogeofisik Emisi di Papua Barat

No	Kabupaten	Indeks Biogeofisik Emisi				TOTAL
		Tanpa IBGF	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Fakfak	2.392	977.656	6.896	0	986.944
2	Kaimana	21.205	1.230.348	304.070	15.397	1.571.020
3	Manokwari	2.752	209.309	19.062	64.577	295.700
4	Manokwari Selatan	439	180.342	2.837	0	183.618
5	Pegunungan Arfak	4.791	340.407	12.527	0	357.726
6	Teluk Bintuni	32.110	1.001.811	562.279	338.520	1.934.720
7	Teluk Wondama	821	443.932	20.387	0	465.140
Papua Barat		64.510	4.383.805	928.058	418.494	5.794.868
		1,11%	75,65%	16,02%	7,22%	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Provinsi Papua Barat, 2022

Adapun hasil analisis untuk indeks biogeofisik serapan di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa kategori rendah IBGF serapan sebesar 78,73% (7.599.984 ha), kategori sedang IBGF sebesar 11,16% (1.389.102 Ha), dan kategori tinggi IBGF sebesar 8,99% (620.194 Ha). Kondisi diatas menunjukkan bahwa luas lahan yang produktif di Provinsi Papua Barat masih sangat mendominasi. Saat yang bersamaan tren perubahan lahan tidak produktif menjadi produktif masih sangat kecil. Hal ini mencirikan bahwa hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat umum masih alami dan upaya rehabilitasi lahan untuk menghasilkan lahan yang produktif masih sangat kecil. Untuk lebih jelasnya, Gambar II.113 dan Tabel II.126 memperlihatkan distribusi luasan dan peta indeks biogeofisik serapan di Provinsi Papua Barat.

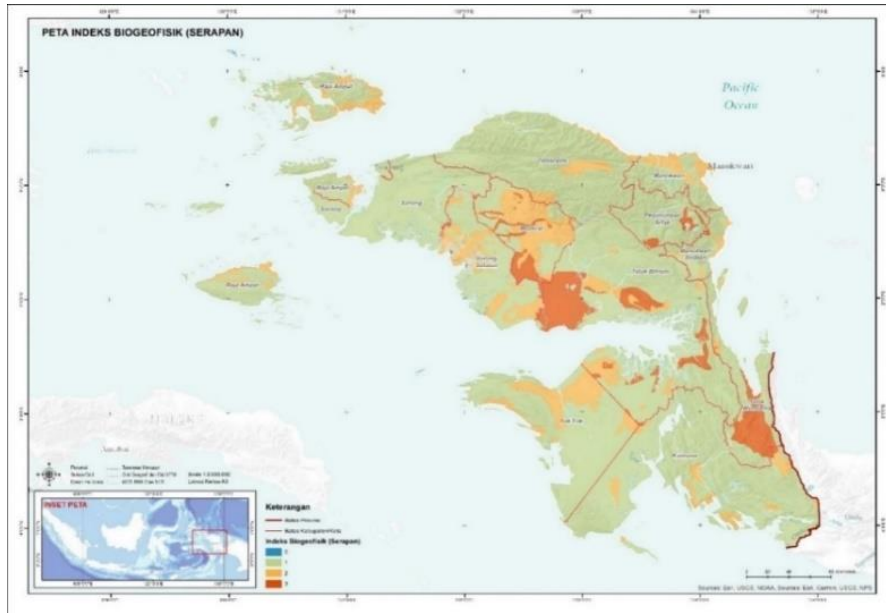
Tabel II.126 Luasan Indeks Biogeofisik Serapan di Papua Barat

No	Kabupaten	Indeks Biogeofisik Serapan				TOTAL
		Tanpa IBGF	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Fakfak	2.392	751.784	232.768	0	986.944
2	Kaimana	21.205	1.420.576	125.955	3.284	1.571.020
3	Manokwari	2.752	208.847	84.101		295.700
4	Manokwari Selatan	439	155.723	27.327	129	183.618
5	Pegunungan Arfak	4.791	322.542	27	30.366	357.726
6	Teluk Bintuni	32.110	1.408.967	156.921	336.722	1.934.720
7	Teluk Wondama	821	293.858	19.852	150.609	465.140
Papua Barat		111.297	7.599.984	1.389.102	620.194	9.720.578
		1,11%	78,73%	11,16%	8,99%	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Provinsi Papua Barat, 2022

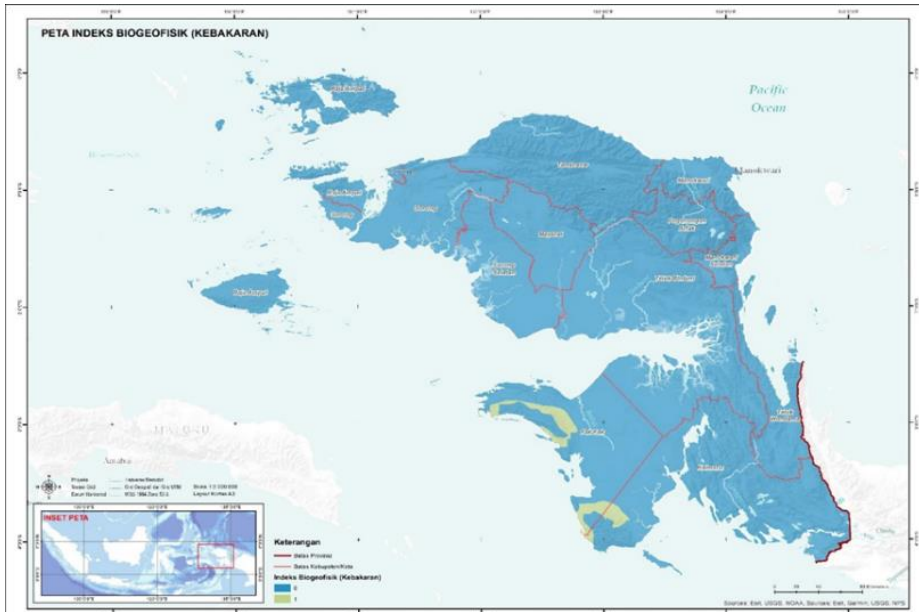
Berdasarkan Tabel II.126, indeks biogeofisik serapan kategori tinggi terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (336.722 Ha) dan Teluk Wondama (150.609 Ha). Hal ini mengindikasikan pada wilayah administrasi tersebut lahan tidak produktif cukup besar dibandingkan wilayah lain dan cenderung meningkat.

Gambar II.113 Peta dan Persentase Luasan Indeks Biogeofisik Serapan



Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).
Sumber: hasil analisis, 2022

Gambar II.114 Peta dan Persentase Luasan Indeks Biogeofisik Kebakaran



Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).
Sumber: hasil analisis, 2022

Untuk analisis indeks biogeofisik kebakaran pada Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa terdapat kategori rendah IBGF Kebakaran sebesar 2,66% (154.237 Ha) dan tanpa IBGF Kebakaran sebesar 97,34% (5.640.631 Ha). Data ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan atau kemudahan suatu kawasan terkena kebakaran yang ditetapkan berdasarkan keberadaan titik api historis dan kondisi biofisik di Provinsi Papua Barat sangat kecil dan bahkan tidak ada. Hal ini dapat dipahami dikarenakan kondisi hutan alam di Provinsi Papua Barat masih sangat baik dan umumnya sulit diakses sehingga faktor pemicu terjadinya kebakaran masih sangat kecil. Adapun grafik distribusi

luasan dan peta indeks biogeofisik kebakaran di Provinsi Papua Barat diperlihatkan pada Gambar II.114. Adapun hasil analisis indeks biogeofisik kebakaran untuk tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat diperlihatkan pada Tabel II.127.

Tabel II.127 Luasan Indeks Biogeofisik Kebakaran di Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten	IBGF Kebakaran		Total
		Tanpa Kebakaran	Rendah	
1	Fakfak	869.243	117.700	986.944
2	Kaimana	1.534.484	36.536	1.571.020
3	Manokwari	295.700		295.700
4	Manokwari Selatan	183.618		183.618
5	Pegunungan Arfak	357.726		357.726
6	Teluk Bintuni	1.934.720		1.934.720
7	Teluk Wondama	465.140		465.140
Papua Barat		5.640.631	154.236	5.794.868
		97,34%	2,66%	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Provinsi Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.127 indeks biogeofisik kebakaran kategori rendah terdapat di Kabupaten Fakfak (117.700 Ha) dan Kaimana (36.536 Ha). Hal ini mengindikasikan pada wilayah tersebut terdapat titik api historis dan kondisi biosifiknya rentan untuk mengalami kebakaran meski kategori rendah. Namun secara umum resiko kerentanan dan kemudahan kawasan terkena kebakaran di Provinsi Papua Barat sangat kecil.

2.3.2.4.2 Analisis Tipologi Kelembagaan

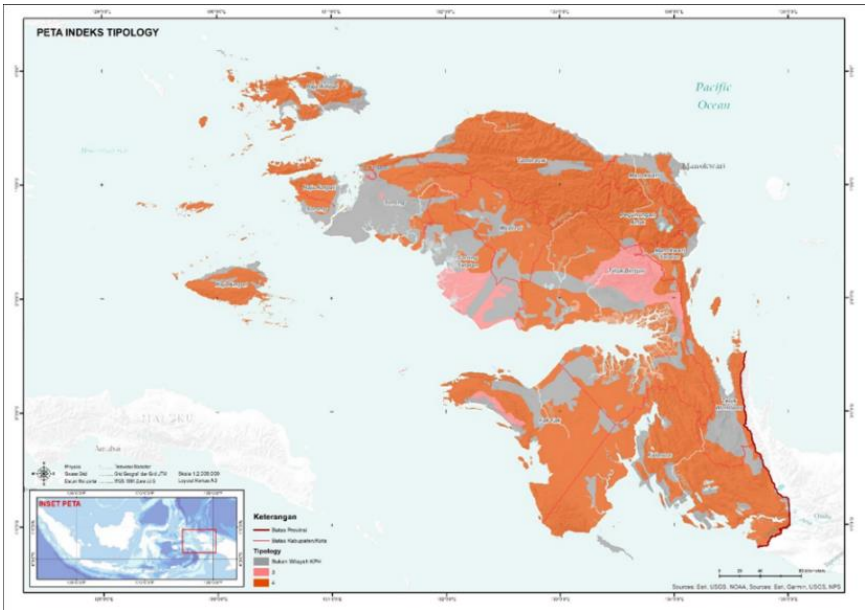
Salah satu strategi pemilihan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang optimal dapat dilakukan berdasarkan pada dua kondisi objektif, yaitu: kapasitas pemerintah dan kekuatan modal sosial (Birner dan Wittmer, 2003). Mengacu hal tersebut, maka dalam kelembagaan pengelola KPH dilakukan berdasarkan pendekatan tipologi dengan menggunakan tiga indikator, yaitu; (1) modal sosial, (2) kapasitas kelembagaan, dan (3) potensi kawasan KPH.

Kondisi modal sosial kawasan dalam unit pengelola dinyatakan dalam bentuk Indeks Modal Sosial yang ditetapkan dari dua indikator, yaitu; (1) indikator berdasarkan aktivitas pertanian dan keberadaan penduduk di dalam kawasan yang diukur berdasarkan persentase luas lahan pertanian dan pemukiman terhadap luas total KPH, (2) indikator keberadaan masalah sosial yang diukur dari keberadaan 3 jenis program tahunan KPH, yaitu; penyelesaian konflik lahan, program pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah kebakaran.

Kapasitas kelembagaan dinyatakan dalam Indeks Kapasitas Lembaga (IKL) yang ditetapkan dari dua indikator, yaitu; (1) kapasitas Pemerintah Daerah

yang mengacu kepada Kepmen LHK No. SK.651/2016, dan (2) kemampuan kelembagaan KPH yang diukur dari empat faktor, yaitu; (a) kondisi sumber daya manusia, (b) sarana/prasarana KPH, (c) keberadaan RPHJP dan (d) umur KPH yang ditentukan berdasarkan waktu pengesahan SK RPHJP. Berdasarkan tahapan kondisi modal sosial dan kapasitas kelembagaan tersebut, maka diperoleh empat tipe tata kelola SDH yaitu; (1) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital tinggi dan kapasitas lembaga tinggi (Tipe-1), (2) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital tinggi dan kapasitas lembaga rendah (Tipe-2), (3) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital rendah dan kapasitas lembaga besar (Tipe-3), dan (4) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital rendah dan kapasitas lembaga kecil (Tipe-4) (KLHK, 2022). Adapun distribusi luasan dan peta indeks biogeofisik emisi di Provinsi Papua Barat diperlihatkan dalam Gambar II.115.

Gambar II.115 Peta dan Persentase Tipologi Kelembagaan KPH di Provinsi Papua Barat



Catatan: perhitungan emisi yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua Barat yang masih mencakup 13 kabupaten/kota (sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya).

Sumber: hasil analisis, 2022

Berdasarkan analisis tipologi kelembagaan di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa tipologi kelembagaan hanya ada 2 tipe, yaitu tipe 3 dan tipe 4. Masing-masing luasan untuk kelembagaan tipe 4 sebesar 73,02% (4.231.521 Ha) dan tipe 3 sebesar 5,88% (340.751 Ha). Sementara untuk luasan yang bukan dalam wilayah KPH sebesar 21,10% (1.222.596 Ha). Hal ini menunjukkan bahwa tipologi kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat umumnya berada pada kondisi sosial kapital rendah dan kapasitas lembaga kecil. Adapun hasil analisis tipologi kelembagaan KPH untuk tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Tabel II.128.

Tabel II.128 Luasan Tipologi Kelembagaan KPH di Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten	Tipologi Kelembagaan (ha)		Non Kph (Bukan Wilayah KPH)	Total
		3	4		
1	Fakfak	33.908	717.459	235.578	986.945
2	Kaimana		1.325.397	245.622	1.571.019
3	Manokwari		209.258	86.442	295.700
4	Manokwari Selatan	7.189	140.030	36.399	183.618
5	Pegunungan Arfak	2.635	319.900	35.191	357.726
6	Teluk Bintuni	296.589	1.226.396	411.734	1.934.720
7	Teluk Wondama	430	293.081	171.630	465.140
Papua Barat		340.751	4.231.521	1.222.596	5.794.868
		5,88%	73,02%	21,10%	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD Provinsi Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.128, tipologi kelembagaan tipe 4 terluas terdapat di Kabupaten Kaimana (1.325.397 Ha), dan Teluk Bintuni (1.226.396 ha). Sementara tipologi kelembagaan tipe 3 terluas terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (296.589 ha). Selanjutnya, berdasarkan luasan KPH teridentifikasi sebagian besar unit KPH di Provinsi Papua Barat memiliki tipe tipologi A4. Kondisi ini mengindikasikan bahwa KPH Papua Barat secara umum memiliki luasan lebih besar dari 100.000 Ha, beban izin kurang dari 50% dengan tipe kelola swasta yaitu modal sosial rendah dan kelembagaannya lemah.

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua Barat. Tabel II.129 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan di Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.129 diketahui bahwa daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan akses listrik adalah Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel II.129 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan, 2022 (%)

No	Kabupaten	Listrik PLN	Listrik non-PLN	Bukan listrik
1	Fakfak	85,84	13,49	0,66
2	Kaimana	69,70	17,83	12,47
3	Teluk Wondama	54,86	30,57	14,56
4	Teluk Bintuni	76,73	23,12	0,15
5	Manokwari	95,84	2,02	2,14
6	Manokwari Selatan	94,83	1,72	3,45
7	Pegunungan Arfak	32,69	31,36	35,95
Papua Barat		75,54	72,93	17,16

Sumber: BPS Papua Barat dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua Barat”



2.3.2.7 Perindustrian

Perusahaan industri besar dan sedang di Papua Barat tahun 2019 tersebar di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan (lihat Tabel II.130). Sebagian besar industri besar dan sedang berada di Kabupaten Teluk Bintuni (7 industri) serta Kabupaten Manokwari (7 industri). Pada tahun 2019, perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Papua Barat mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.718 orang (lihat Tabel II.130). Adapun lokasi dengan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari (2320 tenaga kerja).

Tabel II.130 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedarang di Papua Barat 2019

No	Kabupaten	Jumlah Industri			Jumlah Tenaga Kerja
		Industri Sedang	Industri Besar	Total	
1	Kaimana	1	1	2	613
2	Teluk Bintuni	4	3	7	783
3	Manokwari	4	3	7	2320
4	Manokwari Selatan	0	1	1	2
Papua Barat		9	8	17	3.718

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Statistik Industri besar dan Sedarang Papua Barat 2019”

Pembangunan dan pengembangan sektor industri besar dan sedang tidak berarti sekedar membangun pabrik-pabrik dan memasarkan hasil produksinya, namun bermakna membangun suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk hidup dan berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat setempat. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, industri yang akan dikembangkan di Papua Barat harus dipilih secara hati-hati, hemat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan energi, serta menggunakan teknologi yang efisien, produktif, dan bersih serta tidak membahayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perkembangan industri di Papua Barat dapat berdampak pada meningkatnya konsumsi energi yang secara tidak langsung menyebabkan penurunan kualitas udara. Hal ini disebabkan karena adanya gas buang sisa kegiatan industri yang menimbulkan emisi dan mengakibatkan penurunan kualitas udara menurun. Tabel II.131 menunjukkan banyaknya pemakaian bahan bakar industri besar dan sedang di Papua Barat pada tahun 2019. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten (lihat Tabel II.131), wilayah yang berpotensi paling terdampak dengan adanya pemakaian bahan bakar industri besar dan sedang adalah Kabupaten Manokwari.



Tabel II.131 Banyaknya Pemakaian Bahan Bakar Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019

No	Kabupaten	Bensin (liter)	Solar / HSD / ADO (liter)	Batu Bara (ton)	Gas dari PGN (m³)	Gas Bukan dari PGN (m³)	Gas LPG (kg)	Pelumas (liter)
1	Kaimana	24.048	1.561.853	89	6	0	1.200	14.407
2	Teluk Bintuni	21.987	1.176.200	0	0	0	0	15.206
3	Manokwari	172.358	3.581.711	15.641.483	84.996	0	1.877	51.164
4	Manokwari Selatan	n.a	n.a	b.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Papua Barat		218.393	6.319.764	15.641.572	85.002	0	3.077	80.777

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Statistik Industri besar dan Sedang Papua Barat 2019”

Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan 2019 jumlah usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua Barat sebanyak 3.739 usaha yang didominasi usaha industri mikro, dan sisanya adalah industri kecil. Usaha IMK paling banyak terdapat di Kabupaten Manokwari sebanyak 963 usaha atau 25,75% dari seluruh usaha IMK di Papua Barat (lihat Tabel II.132).Aktivitas usaha IMK di Provinsi Papua Barat paling banyak pada kegiatan Industri Makanan dan Industri Kayu, Barang dari Kayu, Anyaman Rotan.

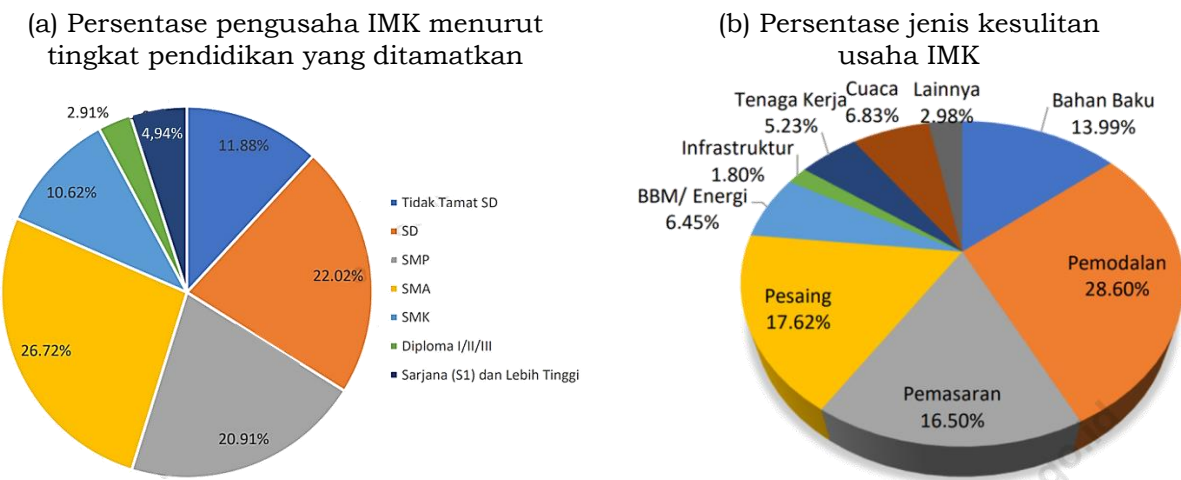
Tabel II.132 Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Provinsi Papua Barat Tahun 2019

No	Kabupaten	Banyaknya Usaha	Sumber Modal Utama						Tenaga Kerja
			Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian / Sepenuhnya dari Pihak Lain					
				Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah	Lainnya	
1	Fakfak	607	567	24	0	0	16	0	1.120
2	Kaimana	551	500	4	47	0	0	0	894
3	Teluk Wondama	767	711	30	24	0	0	0	1.431
4	Teluk Bintuni	631	493	121	8	9	0	0	1.172
5	Manokwari	963	793	162	6	2	0	0	2.106
6	Manokwari Selatan	220	193	22	5	0	0	0	488
PAPUA BARAT		3.739	3.257	363	90	11	16	0	7.211

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Barat 2019”

Lebih dari separuh usaha IMK di Papua Barat yakni sebanyak 3.696 usaha (54,81%) dipimpin oleh pengusaha yang berpendidikan SMP ke bawah. Presentase pengusaha di sektor Industri Makanan dengan pendidikan SMP ke bawah dibandingkan seluruh pengusaha IMK mencapai 35,21%. Artinya sebagian besar pengusaha pendidikan rendah berusaha di sektor Industri Makanan. Sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu, dst juga didominasi oleh pengusaha pendidikan SMP ke bawah. Sementara pengusaha yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah (Diploma I/II/III dan Sarjana (S1) atau lebih tinggi) hanya 529 pengusaha atau 7,85% dari seluruh pengusaha IMK di Papua Barat.

Gambar II.116 Persentase Pengusaha IMK Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, serta Persentase Jenis Kesulitan Usaha IMK



Catatan: analisis yang ditampilkan merupakan analisis terhadap data agregat provinsi Papua sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Barat 2019”

Kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha adalah hal yang biasa. Hal ini berlaku juga pada usaha IMK. Dari 6.743 usaha IMK, 83,70% atau 5.644 usaha IMK mengalami kesulitan. Proporsi paling banyak mengalami kesulitan pada pemodalán (28,60% atau 2.076 usaha IMK). Kemudian secara berturut-turut berikutnya adalah pesaing (17,62%), pemasarana (16,50%), bahan baku (13,99%), cuaca (6,83%), BBM/Energi (6,45%), tenaga kerja (5,23%), infrastruktur (1,80%) dan lainnya (2,98%). Adapun penyebab usaha IMK kesulitan bahan baku adalah bahan baku langka sebesar 45,67%, bahan baku mahal sebesar 38,98%, bahan baku jauh sebesar 13,78% dan lainnya sebesar 1,57%. Kabupaten paling banyak usaha IMK mengalami kesulitan bahan baku adalah Kabupaten Manokwari, sebanyak 326 usaha IMK, dimana 129 usaha IMK mengalami kesulitan bahan baku langka dan 159 usaha IMK mengalami kesulitan bahan baku mahal.

2.3.2.8 Transmigrasi

A. Kawasan Transmigrasi

Di wilayah Provinsi Papua Barat, menurut data Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada periode 2015-2023 terdapat 5 kawasan transmigrasi yang tersebar di 4 kabupaten. Jumlah seluruh transmigran di 5 kawasan tersebut adalah 12.318 KK. Papua Barat merupakan salah satu provinsi tujuan transmigrasi, yang seluruhnya berjumlah 144 kawasan di seluruh Indonesia. Gambar II.117 menunjukkan lokasi kawasan trasnmigrasi tersebut.

Gambar II.117 Peta Lokasi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat, 2023



Sumber: <https://sipukat.kemendesa.go.id/>

KK Transmigrasi terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari, yaitu di Kawasan Prafi dengan 9.172 KK transmigran. Kabupaten Fakfak memiliki 2 kawasan Transmigrasi,, namun dengan jumlah KK paling sedikit di antara kabupaten lainnya. Tabel II.48 merangkum lokasi, luas kawasan dan jumlah KK di masing-masing kawasan.

Tabel II.133 Sebaran Kawasan dan jumlah KK Transmigrasi di Papua Barat, 2023

NO.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	JUMLAH KK
1	Manokwari	Prafi	64,652.08	9,172
2	Manokwari Selatan	Momiwaren	26,216.00	2,466
3	Fakfak	Weri - Saharey	16,504.67	90
4	Fakfak	Bomberay-Tomage	16,039.89	167
5	Teluk Wondama	Werianggi-Werabur	37,121.32	423
Jumlah			160,533.96	12,318

Sumber: <https://sipukat.kemendesa.go.id/>

B. Program Transmigrasi

Program yang dijalankan terkait urusan transmigrasi adalah:

- a. program pengembangan transmigrasi lokal,
- b. program pengembangan wilayah transmigrasi, dan
- c. program pengembangan pemukiman transmigrasi lokal.

Transmigrasi lokal di Provinsi Papua Barat bukan berarti perpindahan penduduk dari satu provinsi ke provinsi lain, tetapi pemecahan penduduk di

satu wilayah dengan tingkat ekonomi lemah sehingga diharapkan terjadi peningkatan ekonomi keluarga yang melakukan transmigrasi. Kegiatan yang berkaitan dengan urusan transmigrasi antara lain adalah pembangunan/penataan rumah penduduk, penjaminan kebutuhan beras bagi transmigran, pemberian lahan untuk usaha pertanian dengan luas yang memperhatikan konteks daerah, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan, pemberian sarana prasarana produksi usaha, pembangunan fasilitas pendukung (pos kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana keagamaan) di lokasi pengembangan transmigrasi.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Indikator daya saing daerah secara umum terdiri atas pengeluaran per kapita, persentase pengeluaran konsumsi makanan, kondisi sarana transportasi, ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi dan akses internet, angka kriminalitas, pajak dan retribusi daerah, kualitas tenaga kerja, kualitas aparatur pemerintah, serta rasio ketergantungan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel II.134 diketahui secara umum pengeluaran per kapita penduduk Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Papua Barat mengalami trend peningkatan dari rata-rata 7.407 ribu rupiah/orang/tahun pada 2016 menjadi 7.976 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019.

Apabila meninjau kondisi Kabupaten di Papua Barat, wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita tinggi dan telah melebihi angka nasional pada tahun 2021 adalah Kabupaten Manokwari (11.977 ribu rupiah/orang/tahun). Adapun wilayah dengan pengeluaran per kapita yang paling rendah di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (5.009 ribu rupiah/orang/tahun) dan Manokwari Selatan (5.505 ribu rupiah/orang/tahun).



Tabel II.134 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Fakfak	6.935	7.057	7.357	7.608	7.599	7.446
2.	Kaimana	7.538	7.752	8.071	8.304	8.325	8.151
3.	Teluk Wondama	7.434	7.694	7.927	8.198	8.219	8.034
4.	Teluk Bintuni	9.208	9.463	9.622	9.821	9.974	9.708
5.	Manokwari	11.440	11.595	11.789	11.994	12.207	11.977
6.	Manokwari Selatan	4.702	5.012	5.225	5.511	5.505	5.505
7.	Pegunungan Arfak	4.594	4.683	4.979	5.102	5.099	5.009
Rata-rata		7.407	7.608	7.853	8.077	8.133	7.976
INDONESIA		10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2016-2021”

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titik dimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

Tabel II.135 menampilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk semua kabupaten di Papua Barat. Kabupaten dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tertinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp 1.601.286, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak Rp 575.425. Dari 7 kabupaten di Papua Barat, terdapat wilayah dengan rata-rata pengeluaran per kapita di bawah satu juta rupiah yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel II.135 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020

No	Kabupaten	Konsumsi Makanan	Konsumsi Bukan Makanan	Jumlah
1	Fakfak	770.218	687.539	1.457.757
2	Kaimana	668.033	672.999	1.341.032
3	Teluk Wondama	944.561	656.725	1.601.286
4	Teluk Bintuni	838.231	738.378	1.576.608
5	Manokwari	701.047	849.023	1.550.071
6	Manokwari Selatan	698.940	608.475	1.307.415
7	Pegunungan Arfak	354.619	220.807	575.425
Rata-rata		710.807	633.421	1.344.228

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Analisis Pola Pengeluaran Penduduk Papua Barat 2020”

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

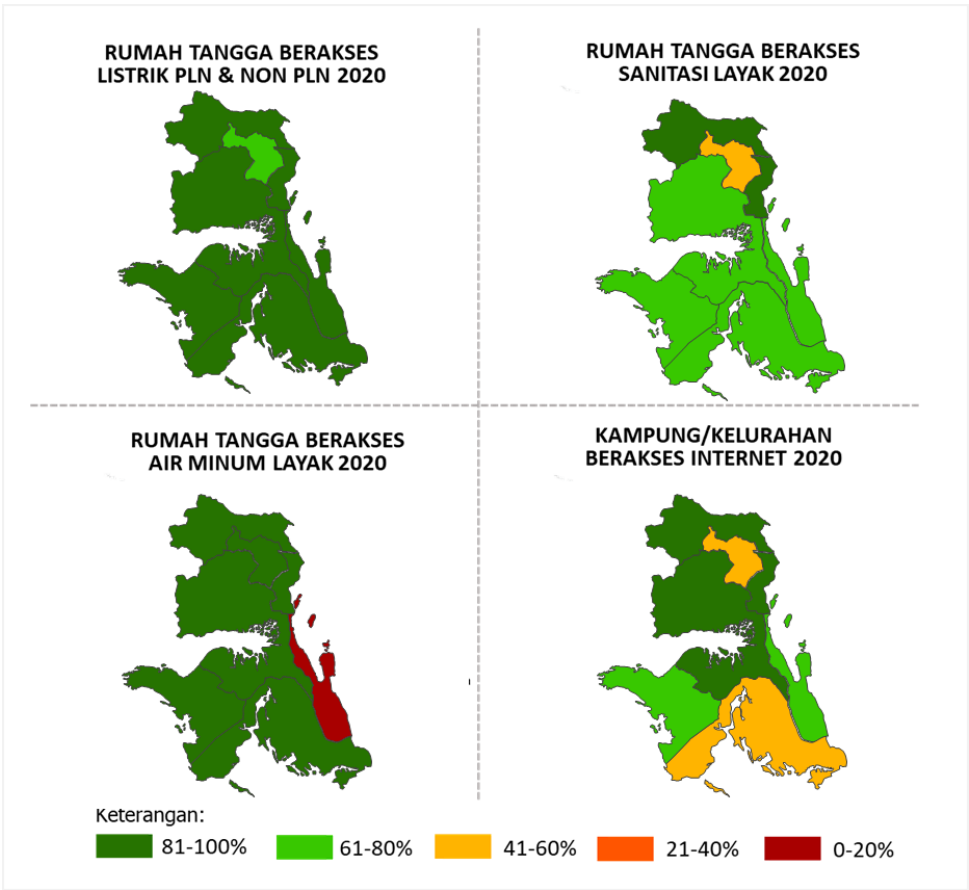
2.4.2.1 Sarana Transportasi

Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun sosialnya.

2.4.2.2 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi dan akses internet merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Berdasarkan Gambar II.118 diketahui kondisi infrastruktur khususnya air minum, sanitasi dan internet yang tidak terdistribusi merata di Papua Barat.

Gambar II.118 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet



Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

Daerah yang relatif berdaya saing tinggi karena memiliki cakupan listrik, air bersih, sanitasi dan akses internet baik adalah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk meningkatkan daya saing kabupaten di Papua Barat, daerah yang perlu diprioritaskan/diakselerasi dalam peningkatan ketersediaan air bersih, sanitasi dan akses internet karena memiliki cakupan yang paling rendah (< 60%) adalah:

- 
- a. **Percepatan akses listrik:** Kabupaten Pegunungan Arfak
 - b. **Percepatan akses sanitasi:** Kabupaten Pegunungan Arfak
 - c. **Percepatan akses air minum layak:** Kabupaten Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni
 - d. **Percepatan akses internet:** Kabupaten Pegunungan Arfak, Kaimana

2.4.2.3 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Berdasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2020), Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan ancaman bencana yang beragam, termasuk banjir dan kekeringan. Definisi banjir yang digunakan adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sementara kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. BNPB mengukur indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak dari sungai pada daerah rawan banjir menggunakan metode fuzzy logic. Sementara, bahaya kekeringan dihitung menggunakan pendekatan kekeringan meteorologis yang dianalisis dengan metode perhitungan Indeks Presipitasi Terstandarisasi atau Standardized Precipitation Index (SPI) periode 3 bulanan.

Pada kasus bencana banjir, seluruh wilayah di Papua barat termasuk dalam kelas risiko tinggi. Wilayah dengan skor tertinggi untuk bencana banjir adalah Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni. Pada kasus bencana kekeringan, kelas risiko tinggi berada di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, seperti Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sedangkan, kabupaten dengan kelas risiko kekeringan sedang adalah Kaimana, dan Fakfak. Terakhir, kabupaten dengan kelas risiko kekeringan rendah adalah Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

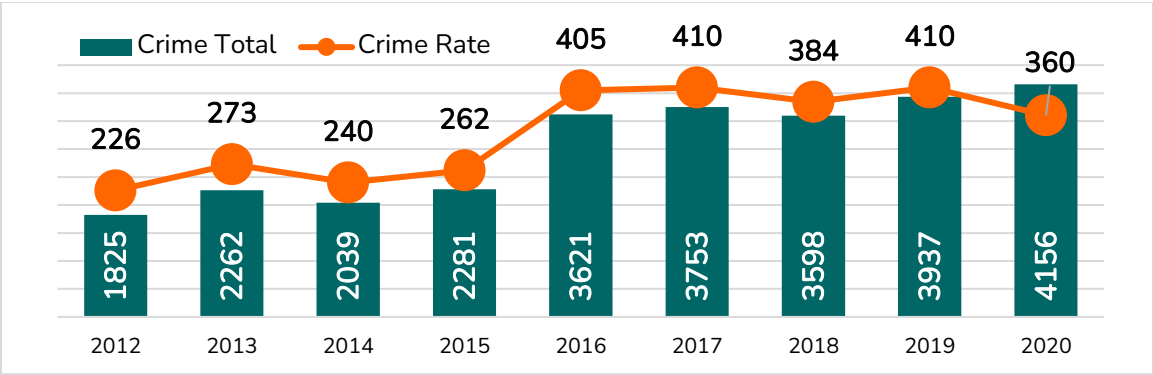
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah digunakan indikator jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat kejahatan (*crime rate*). *Crime rate* mencerminkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan Gambar II.119 diketahui bahwa pada periode 2012-2020 secara umum terdapat trend peningkatan jumlah dan tingkat kejahatan di Papua Barat sebelum pemekaran provinsi, meskipun pada

2014 dan 2018 sempat mengalami penurunan. Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2012-2020), laju peningkatan tindak pidana 127% di Provinsi Papua Barat sebelum dimekarkan. Pada tahun 2012 jumlah kriminalitas di Papua Barat tercatat sebanyak 1825 kasus, dan meningkat signifikan menjadi 4156 kasus pada tahun 2020.

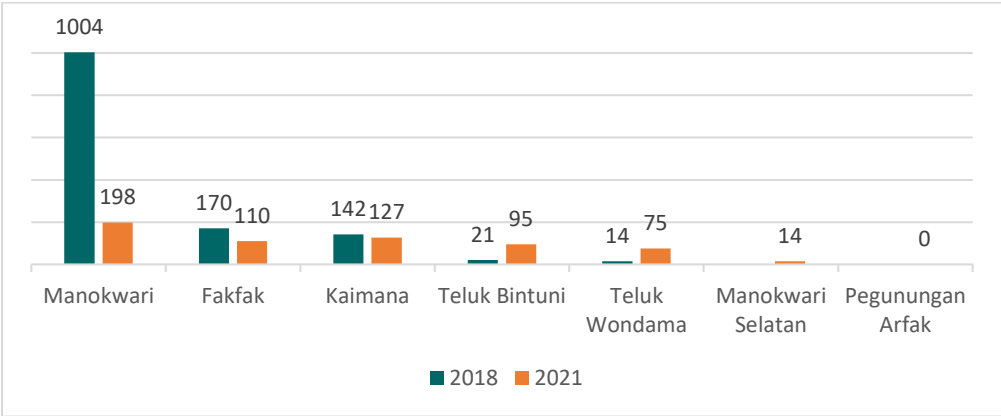
Gambar II.119 Jumlah Tindak Pidana dan Crime Rate Papua Barat Sebelum Pemekaran 2012-2020



Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Statistik Kriminal Papua Barat 2020”

Di antara 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu 2018-2021, jumlah kejahatan tertinggi pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Manokwari (1004 kasus), akan tetapi menurun di tahun 2021 menjadi 198 kasus. Tidak ada laporan kasus di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak pada tahun 2018, namun pada tahun 2021 dilaporkan adanya 14 kasus di Manokwari Selatan dan 0 kasus di Pegunungan Arfak. Gambaran mengenai perkembangan jumlah kasus kejahatan tersebut ditunjukkan melalui Gambar II.120.

Gambar II.120 Perbandingan Jumlah Kejahatan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021



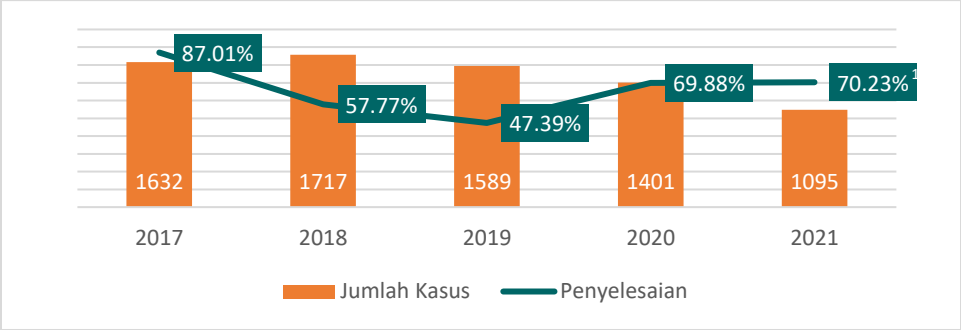
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2019 dan 2021

Umumnya jumlah tindak pidana sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah, meskipun demikian perlu dicatat bahwa dalam statistik kriminalitas ini jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah



dihitung melalui pendekatan pelaporan dan kasus yang ditangani kepolisian setempat. Untuk kasus-kasus pidana dimana aparat kepolisian tidak hadir untuk menangani perkara maupun penduduk yang tidak melaporkan tindak kejahatan, maka jumlah kasusnya pun cenderung tidak tercakup. Sehingga tingkat risiko kejadian kejahatan di suatu wilayah tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan.

Gambar II.121 Perkembangan Jumlah Kasus Kriminal dan Persentase Penyelesaiannya di Provinsi Papua Barat, 2018 dan 2021



Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2018-2021

Upaya untuk mengatasi gangguan kemanan berupa tindak kejahatan ditunjukkan melalui proporsi kasus yang ditangani oleh Pihak Keamanan. Dalam 3 tahun terakhir persentase kasus kejahatan yang diselesaikan di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan, dari 47,4% di tahun 2019 menjadi 70,2% di tahun 2021. Perkembangan ini memberikan gambaran situasi yang baik terhadap iklim berinvestasi di tingkat provinsi. Gambar II.121 menunjukkan perkembangan jumlah kasus kejahtan dan persentase kasus yang diselesaikan dalam 5 tahun terakhir.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

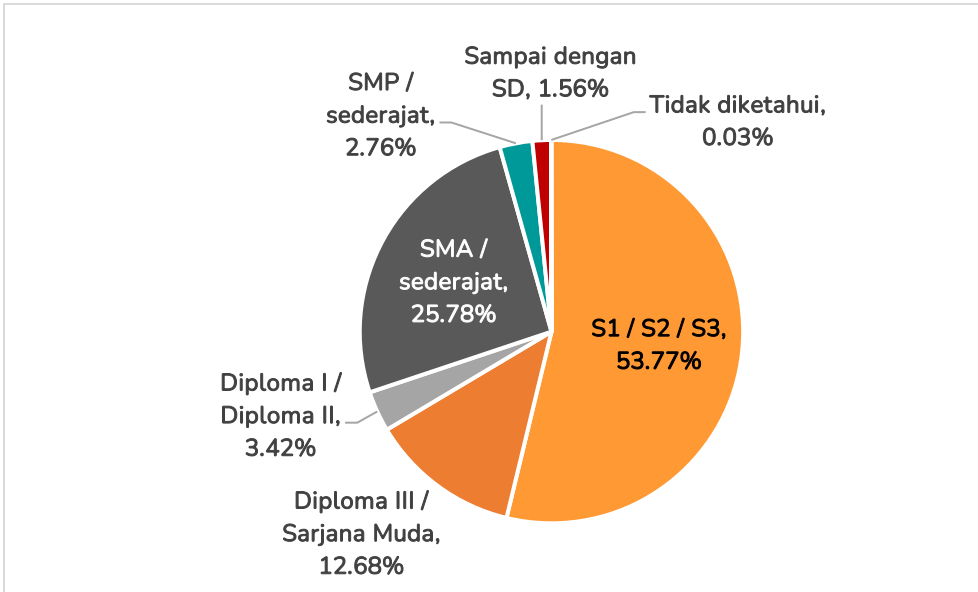
2.4.4.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugs-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen,

pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Total jumlah aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 adalah sebanyak 39.068 personil, yang terdiri atas 21.115 personil pria dan 17.953 personil perempuan. Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas aparatur sipil negara merupakan lulusan sarjana / magister / doktoral (53,77% atau 21.007 personil). Namun, masih terdapat personil yang belum mendapatkan kualifikasi Pendidikan di perguruan tinggi (sebanyak 1,56% atau 609 personil kelulusan SD/ sederajat, 2,76% atau 1.080 personil kelulusan SMP/ sederajat, dan 25,78% atau 10.070 personil kelulusan SMA/ sederajat). Diharapkan, pada masa mendatang kualitas pendidikan aparatur di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan, dikarenakan kapasitas SDM merupakan aspek penting dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah kedepannya diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kepada aparaturnya.

Gambar II.122 Persentase Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan, 2020



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen
“Papua Barat Dalam Angka 2021”

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang



berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel II.136 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Papua Barat, 2022

	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Papua Barat
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur								
0-4	9.515	5.433	4.548	7.605	19.007	3.401	1.710	51.219
5-9	8.161	5.559	4.188	6.960	17.246	2.944	1.770	46.828
10-14	8.020	6.440	4.751	7.582	16.617	2.959	2.460	48.829
15-19	8.402	6.770	4.416	8.272	17.314	3.877	3.477	52.528
20-24	7.588	5.916	3.858	8.789	19.907	4.437	4.667	55.162
25-29	7.170	5.458	3.726	9.586	19.609	3.912	4.381	53.842
30-34	6.935	5.441	3.678	9.206	17.430	3.495	4.904	51.089
35-39	6.845	5.282	3.526	8.853	15.654	2.790	3.646	46.596
40-44	5.605	4.576	2.944	7.553	13.980	2.739	3.742	41.139
45-49	5.056	4.048	2.324	6.396	11.353	2.365	3.063	34.605
50-54	4.087	3.185	1.752	4.610	9.189	1.974	2.503	27.300
55-59	3.465	2.319	1.513	2.956	7.250	1.517	1.574	20.594
60-64	2.384	1.477	1.110	1.801	5.423	1.027	1.009	14.231
65-69	1.588	916	713	1.135	3.615	598	447	9.012
70-74	797	499	416	586	2.197	396	259	5.150
75+	665	314	283	346	1.306	217	148	3.279
Penduduk Usia Belum Produktif (<15 tahun)	25.696	17.432	13.487	22.147	52.870	9.304	5.940	146.876
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	57.537	44.472	28.847	68.022	137.109	28.133	32.966	397.086
Penduduk Usia Tidak Produktif (>64 tahun)	3.050	1.729	1.412	2.067	7.118	1.211	854	17.441
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	49,96	43,09	51,65	35,60	43,75	37,38	20,61	41,38

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dan Kabupaten, 2023” (diolah)

Tabel II.136 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di Papua Barat pada tahun 2022. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan Papua Barat sebesar 41,38. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi di Papua Barat adalah Teluk Wondama (51,65) dan Fakfak (49,96). Adapun wilayah yang



memiliki rasio ketergantungan paling rendah di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (20,61) dan Teluk Bintuni (35,60).

Semakin rendah rasio ketergantungan di suatu daerah maka akan memberi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri, seperti dengan mengakses pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, maupun akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika usia produktif tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.

2.5 EVALUASI RPJMD PAPUA BARAT 2017-2022

Evaluasi RPJMD Papua Barat 2017-2022 penting untuk dilakukan sebagai *tools* dalam menilai efektivitas implementasi pembangunan tahun 2017-2022, serta sebagai pembelajaran untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan tahun 2023-2026. Terbatasnya ketersediaan data menjadi salah satu kendala dalam evaluasi capaian indikator sasaran pembangunan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.137 diketahui bahwa dari 87 indikator sasaran pembangunan RPJMD 2017-2022 terdapat 23 indikator (26,44%) yang tidak didukung data capaian eksisting. Tidak tersedianya data capaian eksisting paling banyak terdapat pada misi ke-5 tentang indikator daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata.

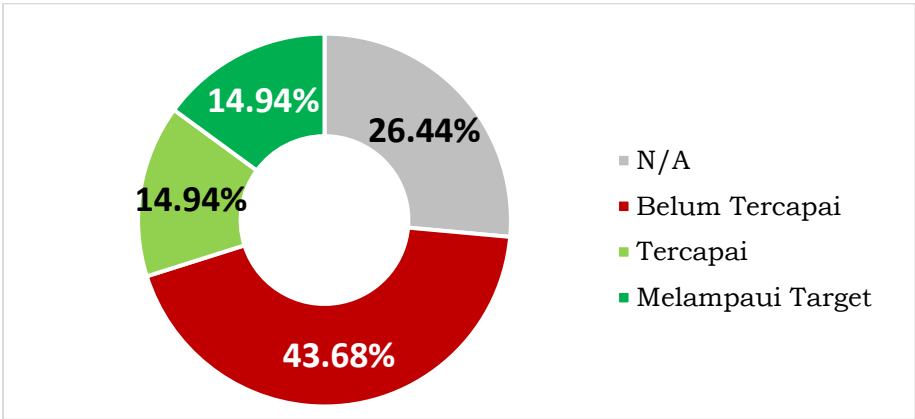
Tabel II.137 Rekapitulasi Evaluasi RPJMD Papua Barat 2017-2022

MISI PEMBANGUNAN		KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
		N/A	BELUM TERCAPAI	TERCAPAI	MELAMPAUI TARGET
MISI 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif	2	4	8	1
MISI 2	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	2	7	0	1
MISI 3	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	4	9	1	3
MISI 4	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar	3	7	1	4
MISI 5	Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata	8	2	0	2
MISI 6	Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat	0	1	0	1
MISI 7	Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial	2	5	2	1



MISI PEMBANGUNAN		KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
		N/A	BELUM TERCAPAI	TERCAPAI	MELAMPAUI TARGET
MISI 8	Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah	2	3	1	0
TOTAL		23	38	13	13
		26,44%	43,68%	14,94%	14,94%

Gambar II.123 Capaian Indikator Sasaran RPJMD Papua Barat 2017-2022



Sumber: Hasil Analisis (2022)

Berdasarkan Tabel II.138, secara umum dapat disimpulkan bahwa mayoritas (38 indikator atau 43,68%) target indikator sasaran pembangunan tahun 2017-2022 belum tercapai yang disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi atau sangat optimis. Tidak tarcapainya target indikator sasaran pembangunan paling banyak terdapat pada misi pembangunan ke-3 tentang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), misi pembangunan ke-2 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan SDA, misi pembangunan ke-4 tentang infrastruktur dasar.

Apabila meninjau keberhasilan capaian, terdapat 13 target indikator (14,94%) yang telah tercapai dan 13 target indikator (14,94%) yang telah melampaui target. Meskipun demikian, kondisi ini perlu ditinjau kembali karena terdapat penetapan target indikator yang terlalu rendah. Misi pembangunan tahun 2017-2022 dengan paling banyak memiliki capaian indikator memenuhi target adalah misi ke-1 tentang tata kelola pemerintahan.

Tabel II.138 Evaluasi Capaian RPJMD Papua Barat 2017-2022

VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
VISI: MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT																						
MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (<i>good and clean governance</i>) serta otonomi khusus yang efektif																						
TUJUAN 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat																						
S1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat	Ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	persen	30,00	30,00	50,00	70,00	80,00	100,00	30,00	50,00	80,00	80,00	80,00	N/A	100,00	166,67	160,00	114,29	100,00	N/A	tercapai
		Ketersediaan Perdasu sesuai mandat undang-undang otonomi khusus	persen	30,00	30,00	50,00	70,00	80,00	100,00	30,00	50,00	80,00	80,00	80,00	N/A	100,00	166,67	160,00	114,29	100,00	N/A	tercapai
		Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus	persen	50,00	50,00	60,00	60,00	90,00	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus																						
S2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	kategori	CC	CC	CC	CC	B	B	C	B	B	B	N/A	N/A	belum tercapai	melampaui	melampaui	melampaui	N/A	N/A	melampaui
S3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
S4	Optimalnya sistem pengawasan daerah	Persentase penyelesaian TLHP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,20	70,67	67,50	69,50	70,04	N/A	70,20	70,67	67,50	69,50	70,04	N/A	belum tercapai
S5	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,00	92,00	95,00	64,00	71,00	N/A	67,00	92,00	95,00	64,00	71,00	N/A	belum tercapai
S6	Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Tingkat implementasi inovasi daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	tercapai
S7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
		Persentase tingkat pertumbuhan PAD	persen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	38,74	-2,3	5,33	0,34	-21,61	N/A	553,43	-32,86	76,14	4,86	-308,71	N/A	belum tercapai
TUJUAN 3: Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis IT																						
S8	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan informasi publik berbasis IT	Cakupan layanan publik berbasis IT	persen	10,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	10,00	25,00	35,00	20,00	60,00	N/A	100,00	83,33	87,50	40,00	100,00	N/A	tercapai

VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
S9	Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan pembangunan daerah	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	tercapai
S10	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah	Cakupan layanan persandian daerah	persen	15,00	38,00	40,00	60,00	75,00	100,00	15,00	50,00	60,00	30,00	75,00	N/A	100,00	131,58	150,00	50,00	100,00	N/A	tercapai
S11	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan	persen	7,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00	0,01	0,02	0,03	0,00	0,05	N/A	0,14	0,20	0,30	0,00	0,25	N/A	belum tercapai
S12	Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	persen	0,00	10,00	22,00	35,00	57,00	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MISI 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan																						
TUJUAN 4: Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan																						
S13	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	84,51	84,51	82,00	81,00	80,00	80,00	85,69	91,50	82,18	77,39	81,80	N/A	101,40	108,27	100,22	95,54	102,25	N/A	melampaui
S14	Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	66,16	0,00	93,40	N/A	0,00	0,00	66,16	0,00	93,40	N/A	belum tercapai
S15	Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota	persen	22,22	22,22	16,67	11,11	11,11	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum tercapai
		Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat	persen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum tercapai
		Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat	persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum tercapai
		Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat	persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum tercapai
		Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni	persen	20,00	40,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum tercapai
S16	Meningkatnya konservasi sumber daya alam di	Luas tutupan hutan	jt hektar	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rehabilitasi kawasan hutan	hektar	234,00	406,00	406,00	500,00	550,00	600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Provinsi Papua Barat	Luas kawasan konservasi perairan	ribu hektar	350,00	710,00	710,00	923,00	923,00	1.136,00	175,00	630,00	710,00	710,00	671,05	N/A	50,00	88,73	100,00	76,92	72,70	N/A	belum tercapai	
MISI 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan																							
TUJUAN 5: Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing																							
S17	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,50	7,70	8,00	8,30	8,50	9,00	7,15	7,27	7,44	7,6	7,69	N/A	95,33	94,42	93,00	91,57	90,47	N/A	belum tercapai	
		Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua	tahun	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	N/A	5,15	5,20	5,30	5,50	N/A	N/A	34,33	34,67	35,33	36,67	N/A	belum tercapai	
		Harapan Lama Sekolah	tahun	15,00	15,00	15,00	15,00	18,00	18,00	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13	N/A	83,13	83,53	84,80	86,07	72,94	N/A	belum tercapai	
		Harapan Lama Sekolah Orang Asli Papua	tahun	15,00	15,00	15,00	15,00	18,00	18,00	N/A	10,4	10,4	10,5	10,6	N/A	N/A	69,33	69,33	70,00	58,89	N/A	belum tercapai	
		Angka Melek Huruf	persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	97,16	97,37	97,72	97,46	97,8	N/A	102,27	101,96	101,79	100,99	100,82	N/A	melampaui	
		Angka Melek Huruf OAP	persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Guru OAP	persen	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S18	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	37	34	30	28	25	23	44	44	41	42	49	N/A	118,92	129,41	136,67	150,00	196,00	N/A	belum tercapai	
		Angka Kematian Bayi	per 100.000 kelahiran	26	24	22	20	18	16	8	7	10	8	5	N/A	30,77	29,17	45,45	40,00	27,78	N/A	melampaui	
		Prevalensi HIV/AIDS	persen	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	2,25	1,93	1,79	1,95	2,00	N/A	112,50	101,58	99,44	114,71	125,00	N/A	belum tercapai	
		Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	rasio	0,76	1,05	1,32	1,57	1,81	2,00	4,95	4,43	3,43	5,59	6,27	N/A	651,32	421,90	259,85	356,05	346,41	N/A	melampaui	
		Rasio Dokter per satuan penduduk	rasio	0,38	0,52	0,65	0,77	0,89	1,00	0,35	0,35	0,27	0,27	0,52	N/A	92,11	67,31	41,54	35,06	58,43	N/A	belum tercapai	
		Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	rasio	0,40	0,55	0,69	0,82	0,94	3,00	0,65	0,56	0,41	0,42	0,74	N/A	162,50	101,82	59,42	51,22	78,72	N/A	belum tercapai	
		Cakupan Puskesmas terakreditasi di distrik	persen	10,00	29,00	49,00	68,00	87,00	100,00	23,90	32,10	44,00	43,50	43,20	N/A	239,00	110,69	89,80	63,97	49,66	N/A	belum tercapai	
	RSUD rujukan provinsi	unit	0	0	1	1	1	2	N/A	N/A	2	2	2	2	N/A	N/A	200,00	200,00	200,00	100,00	tercapai		
S19	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	orang	-	10	20	30	40	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah pemuda OAP pelopor	orang	20	50	70	80	90	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
MISI 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar																							
TUJUAN 6: Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat																							
S20	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	tercapai	
		Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik	persen	62,71	70,17	77,62	85,08	92,54	100,00	45,69	27,31	26,38	30,04	31,00	N/A	72,86	38,92	33,99	35,31	33,50	N/A	belum tercapai	



VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	persen	50,07	60,14	70,07	80,00	90,07	100,00	50,07	60,14	70,07	72,56	72,65	100,00	100,00	100,00	100,00	90,70	80,66	N/A	belum tercapai	
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	persen	78,00	81,00	83,00	86,00	89,00	92,00	76,13	76,29	76,73	77,43	80,21	92,00	97,60	94,19	92,45	90,03	90,12	N/A	belum tercapai	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	persen	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah TPA Regional	unit	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	belum tercapai
S21	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat	unit	135	500	550	605	666	732	135	500	159	159	97	133	100,00	100,00	28,91	26,28	14,56	18,17	belum tercapai	
		Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	persen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	22,50	24,68	27,11	29,86	32,86	36,10	N/A	67,31	70,18	63,87	77,66	N/A	N/A	272,73	258,87	213,90	236,34	N/A	melampaui (target RPJMD terlalu rendah)	
		Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	22,50	24,68	27,11	29,86	32,86	36,10	65,3	73,95	76,39	78,71	N/A	N/A	290,22	299,64	281,78	263,60	N/A	N/A	melampaui (target RPJMD terlalu rendah)	
S22	Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan ketersediaan energi baru dan terbarukan	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	250	300	300	350	350	400	0	77	191	130	142	N/A	0,00	25,67	63,67	37,14	40,57	N/A	belum tercapai	
		Persentase kampung terakses listrik	persen	51,36	58,31	65,26	72,21	79,16	86,11	0,00	54,57	55,20	21,69	85,88	N/A	0,00	93,59	84,58	30,04	108,49	N/A	melampaui	
		Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	75,00	N/A	0,00	100,00	50,00	50,00	75,00	N/A	belum tercapai	
		Tingkat elektrifikasi provinsi	persen	77,60	79,76	81,92	84,08	86,24	88,40	90,10	92,31	94,35	94,94	95,80	N/A	116,11	115,73	115,17	112,92	111,09	N/A	melampaui	
MISI 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata																							
TUJUAN 7: Meningkatkan perekonomian daerah yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor																							
S23	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi	orang	50	50	50	50	50	50	55	66	72	77	88	N/A	110,00	132,00	144,00	154,00	176,00	N/A	melampaui	
S24	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP	persen	-	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja OAP	persen	92,50	92,75	92,90	93,00	93,25	93,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S25	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Persentase UMKM OAP yang berkembang	persen	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	0,00	0,00	55,99	69,54	28,71	N/A	0,00	0,00	186,63	173,85	57,42	N/A	belum tercapai	
S26	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	Nilai ekspor bersih	juta \$ US	2.841,45	2.983,52	3.132,70	3.289,33	3.453,80	3.626,49	1.960,81	2.823,66	2.332,68	1.795,85	1.494,04	N/A	69,01	94,64	74,46	54,60	43,26	N/A	belum tercapai	
		Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan	orang	0	10	10	10	10	10	N/A	212	364	N/A	288	N/A	N/A	N/A	2120	3640	N/A	2880	N/A	melampaui (target RPJMD terlalu rendah)
S27	Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan jumlah IKM	persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
S28	Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan terpadu di wilayah transmigrasi	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUJUAN 8: Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata terpadu berskala internasional di Provinsi Papua Barat																							
S29	Meningkatnya keterpaduan dan daya saing pariwisata daerah	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	15	25	35	45	55	70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	orang	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
S30	Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung pariwisata daerah	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat	kali	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
MISI 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat																							
TUJUAN 9: Terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah																							
S31	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	107,72	108,79	109,88	110,98	112,09	113,21	100,65	100,98	102,22	101,08	N/A	N/A	93,44	92,82	93,03	91,08	N/A	N/A	belum tercapai	
		Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya	kelompok	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	N/A	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	N/A	melampaui
MISI 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial																							
TUJUAN 10: Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial																							
S32	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penanganan PMKS	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
S33	Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung	Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat	orang	-	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	N/A	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	N/A	tercapai	
S34	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,20	92,35	92,40	92,50	92,65	92,75	82,42	82,47	82,74	82,91	83,00	N/A	89,39	89,30	89,55	89,63	89,58	N/A	belum tercapai	



VISI / MISI / TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						CAPAIAN						TINGKAT CAPAIAN						KET.
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak	persen	20,00	20,00	30,00	50,00	60,00	75,00	69,20	69,20	76,90	76,90	76,90	N/A	346,00	346,00	256,33	153,80	128,17	N/A	melampaui (target RPJMD terlalu rendah)
		Jumlah ruang terbuka ramah anak	unit	-	5	10	15	20	25	0	2	4	4	4	4	0,00	40,00	40,00	26,67	20,00	16,00	belum tercapai
TUJUAN 11: Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan hak kependudukan masyarakat																						
S35	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Cakupan peserta KB aktif	persen	-	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	N/A	N/A	42,35	46,2	N/A	N/A	N/A	N/A	84,70	84,00	N/A	N/A	belum tercapai
		Adanya regulasi pengendalian penduduk	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	belum tercapai
		Laju pertumbuhan penduduk	persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,46	2,41	2,36	2,31	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	tercapai
S36	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	37,32	48,82	56,92	63,64	N/A	N/A	74,64	81,37	81,31	79,55	N/A	N/A	belum tercapai
		Persentase kepemilikan KK	persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	persen	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	N/A	70,76	75,06	76,57	74,23	N/A	N/A	88,45	83,40	76,57	74,23	N/A	belum tercapai
MISI 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah																						
TUJUAN 12: Meningkatnya stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat																						
S37	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum	Indek potensi kerawanan sosial	indeks	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	tercapai	tercapai	tercapai	tercapai	tercapai	tercapai	tercapai
		Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	60,00	63,00	65,00	66,00	67,00	70,00	62,76	58,29	57,62	61,76	N/A	N/A	104,60	92,52	88,65	93,58	N/A	N/A	belum tercapai
		Angka kriminalitas (crime rate)	per 100.000 penduduk	200	180	170	150	150	130	410	384	410	360	N/A	N/A	205,00	213,33	241,18	240,00	N/A	N/A	belum tercapai (target RPJMD terlalu optimis)
S38	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Kab/kota siaga dan tangguh bencana	kab/kota	0	6	8	13	13	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indek Risiko Bencana	indeks	150,00	147,00	143,00	140,00	135,00	130,00	140,30	144,05	144,05	144,05	N/A	N/A	93,53	97,99	100,73	102,89	N/A	N/A	belum tercapai
		Kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana	angka	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Hasil Analisis (2022)



2.6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Menurut PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus memenuhi SPM terdiri atas: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Tabel II.139 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target SPM Provinsi Berdasarkan Urusan

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN
Pendidikan	1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
	2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 -18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100%
				100%
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
	2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
Pekerjaan Umum	1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%
	2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%
Perumahan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi	100%

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN
		program Pemerintah Daerah pnovinsi	penyediaan rumah yang layak huni	
Trantibumlinmas	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%
Sosial	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%
	2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%
	3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%
	4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya pelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%
	5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

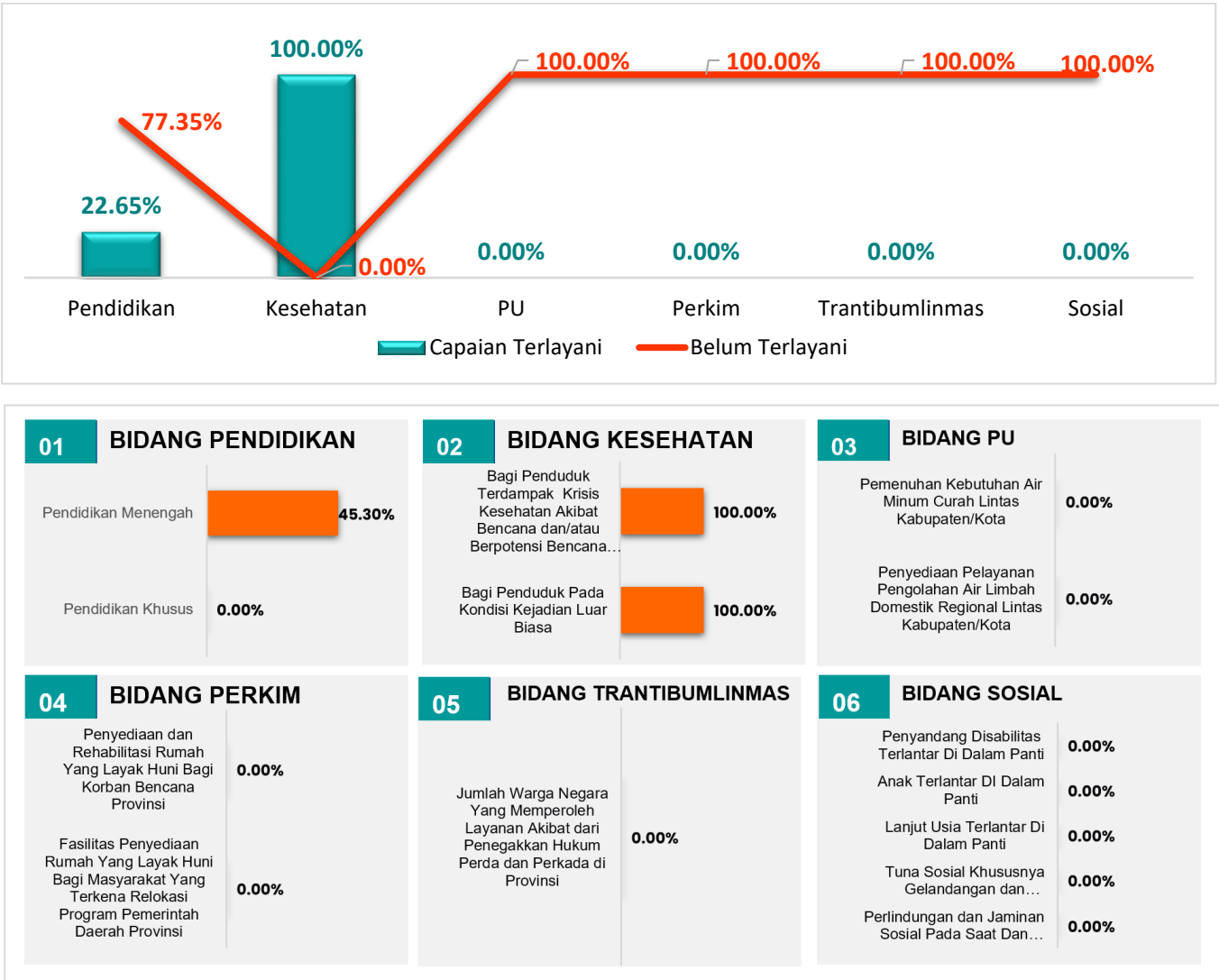
Merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi SPM Provinsi Papua Barat tahun 2020 belum seluruhnya memenuhi target capaian, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.124. Meskipun capaian kesehatan sudah terlaksana dengan sangat baik (100%), namun capaian SPM pendidikan adalah sebesar 22,65%. Dalam laporan SPM pendidikan masih terdapat gap/selisih antara target dan realisasi. Hal ini mencerminkan jumlah warga negara yang terlayani SPM pendidikan belum sesuai target yang ditetapkan. Apabila meninjau capaian SPM per bidang, diketahui bahwa capaian implementasi SPM pendidikan khusus masih 0%, Adapun capaian SPM pendidikan menengah sebesar 45,30%.

Apabila meninjau capaian SPM PU, perkim, trantibum dan sosial dalam Gambar II.124 diketahui bahwa terdapat capaian 0%. Dalam SPM PU, indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana memiliki capaian 0% karena pada tahun 2020 tidak terjadi bencana alam. Dalam SPM Perkim, indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda memiliki capaian 0% karena tidak ada



relokasi program Pemda pada tahun 2020. Meskipun demikian, berdasarkan laporan SPM, anggaran untuk penerapan SPM telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bidang trantibum dan sosial. Hal ini mengindikasikan perlu adanya peningkatan upaya pelaporan SPM di tingkat Pemerintah Provinsi.

Gambar II.124 Capaian SPM Per Bidang Provinsi Papua Barat 2020



Catatan:Cakupan analisis SPM diperoleh dari Kemendagri berdasarkan analisis terhadap data agregat Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran DOB Papua Barat Daya
Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

2.7. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)

2.7.1. Keterkaitan SDGs dengan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Pencapaian TPB terlihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memberikan mandat untuk mengintegrasikan TPB

kedalam agenda pembangunan, yaitu dengan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung pencapaian TPB, penting bagi dokumen RPD Papua Barat ini untuk mengkaji kesesuaian indikator-indikator pembangunan daerah dengan TPB. Hal ini juga diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD).

Struktur penyusunan dokumen RPJMD mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017, dimana secara garis besar hanya menjelaskan, tujuan, target dan indikator pembangunan daerah dan indikator program. Sedangkan dalam Indikator TPB disusun lebih teknis, rigid dan detail yang Sebagian besar ditemukan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perencanaan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Urgensi penyelarasan indikator TPB dengan RPJMD daerah kabupaten adalah agar target dan tujuan TPB (sebanyak 17 tujuan) sebagai tujuan pembangunan dunia dapat tergambar dalam kemajuan pembangunan daerah, yaitu untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan kemajuan dalam:

- 1. Kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan dan kelaparan
- 2. Mengurangi ketimpangan
- 3. Memperbaiki manajemen air dan energi
- 4. Pembangunan lingkungan hidup
- 5. Penciptaan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tabel II.140 akan memberikan gambaran keselarasan indikator pembangunan daerah Papua barat. Tujuan dari penyajian tabel ini adalah untuk memperoleh informasi keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah terhadap pembangunan global.

Tabel II.140 Keserasian Indikator Pembangunan terhadap SDGs

NO TUJUAN	TUJUAN	ISU DALAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR (2020/2021)	URUSAN
1	Menghapus kemiskinan	Kemiskinan	1 Persentase Penduduk Miskin	%	21,37	Lintas Sektor
			2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	5,79	Lintas Sektor
			3 Indeks Kedalaman	%	2,09	Lintas Sektor



NO TUJUAN	TUJUAN	ISU DALAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR (2020/2021)	URUSAN
		Perlindungan Sosial	Kemiskinan (P2)			
			1 Rumah tangga penerima bantuan sosial	Rumah tangga	6810	Sosial
		Akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan pelayanan dasar	2 Cakupan penanganan PMKS	%	N/A	Sosial
			1 APS Sekolah Menengah	%	78,01	Pendidikan
			2 APS Sekolah Khusus	%	63,28	Pendidikan
			3 Rasio tenaga kesehatan	per 1000 penduduk	6,27	Kesehatan
			4 Rasio tenaga dokter	per 1000 penduduk	0,52	Kesehatan
			5 Rasio tenaga medis	per 1000 penduduk	0,74	Kesehatan
			6 Cakupan puskesmas terakreditasi di Distrik	%	43,21	Kesehatan
			7 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	%	29	Kesehatan
2	Mengakhiri kelaparan	Pemenuhan makanan bergizi	8 Cakupan kepemilikan KTP	%	63,64	
			1 Rata-rata konsumsi protein perhari	gram	54,82	Pangan; Pertanian
			2 Rata-rata konsumsi kalori perhari	kcal	1911,04	Pangan; Pertanian
			3 Persentase kekurangan gizi pada balita	%	19,9	Kesehatan
3	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	Kematian ibu, neonatus, bayi dan balita	4 Persentase angka stunting	%	26,2	Kesehatan
			1 Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	49	Kesehatan
4	Pendidikan bermutu	Kualitas pendidikan	2 Angka Kematian Bayi	per 100.000 kelahiran	5	Kesehatan
			1 Jumlah sekolah pendidikan dasar terakreditasi A	unit	58	Pendidikan
			2 Jumlah sekolah pendidikan	unit	80	Pendidikan





NO TUJUAN	TUJUAN	ISU DALAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR (2020/2021)	URUSAN
			menengah terakreditasi A			
			5 APK Sekolah Menengah	%	93,15	Pendidikan
			6 APM Sekolah Menengah	%	63,51	Pendidikan
			7 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,69	Pendidikan
5	Kesetaraan Gender	Pembangunan dan pemberdayaan gender	1 Pembangunan gender	Indeks	82,34	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			2 Pemberdayaan gender	Indeks	62,17	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6	Akses air bersih dan sanitasi	Akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1 Persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum layak	%	29,67	Pekerjaan umum; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
			2 Persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum bersih	%	77,66	Pekerjaan umum; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata	1 Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak		78,71	Pekerjaan umum
7	Energi	Akses energi	1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	95,8	Energi dan Listrik
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	1 Laju pertumbuhan PDRB ADHB	%	5,90*	Lintas Sektor
			2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	%	2,66*	Lintas Sektor
		Pekerjaan layak	1 Tingkat pengangguran terbuka	%	5.84	Tenaga Kerja
			2 Rasio penduduk yang bekerja	%	93.2	Tenaga Kerja
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	Infrastruktur jalan	1 Persentase jalan pada kondisi mantap	%		Pekerjaan Umum





NO TUJUAN	TUJUAN	ISU DALAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR (2020/2021)	URUSAN
		Transportasi	2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	%	27,52	Perhubungan
10	Mengurangi ketimpangan	Desa Mandiri	1 Indeks Desa Membangun	%	0,5	Pemberdayaan masyarakat dan kampung
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Ruang terbuka untuk semua	1 Ratio RTH per Satuan Wilayah ber HPL /HGB	%	N/A	Pekerjaan Umum
		Rumah layak huni	1 Persentase rumah layak huni	%	32,86	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		Transportasi yang mudah diakses	1 Cakupan penumpang yang terangkut transportasi umum	%	N/A	Perhubungan
12	Konsumsi dan produksi bertanggungjawab	Manajemen sampah	1 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	N/A	Lingkungan Hidup
14	Ekosistem bawah air	Lingkungan laut	1 Indeks pencemaran air laut	indeks	N/A	Lingkungan Hidup
			2 Indeks kualitas air laut	Indeks	N/A	Lingkungan Hidup
15	Menjaga ekosistem darat	Merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	1 Indeks tutupan lahan	Indeks	N/A	Lingkungan Hidup
			2 Penegekan hukum lingkungan	%	N/A	Lingkungan Hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat	Mengurangi korban kekerasan	1 Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	360	Lintas Sektor
		Kredibilitas pemerintah	2 Opni BPK	opini	WTP	Keuangan
		Demokrasi	3 Indeks Demokrasi	Indeks	61,76	
		akses terhadap pelayanan	4 Persentase kepemilikan KK	%	N/A	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
			5 Kepemilikan KTP	%	63,64	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



NO TUJUAN	TUJUAN	ISU DALAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR (2020/2021)	URUSAN
			6 Kepemilikan Akta Kelahiran	%	74,23	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Pendapatan pemerintah	1 Persentase peningkatan PAD	%	0,34	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Investasi dan bantuan pembangunan dan kerjasama	1 Nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	695,53	Penanaman Modal
			2 Nilai investasi PMA	Juta US Dolaar	74,2	Penanaman Modal

Sumber: Hasil Analisis, 2022



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atas kinerja keuangan masa lalu dalam konteks penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan. Gambaran kondisi keuangan daerah berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengindentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan, kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci* dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak dapat dicukupi dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah Provinsi Papua Barat dapat tergambar dari kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir dari 4.02 % pada tahun 2017 menjadi minus -0.51 persen pada tahun 2021 (BPS, 2022). Sejak terjadi covid19 pandemi di awal tahun 2020 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kinerja pada sebagian besar lapangan usaha seperti sektor utama minyak dan gas bumi serta pertambangan dan penggalian. Ekonomi Papua Barat dengan minyak dan gas bumi (migas) Tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen. Dibanding tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami perbaikan kinerja walaupun masih mengalami kontraksi yang mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen. Sedangkan Tanpa minyak dan gas





bumi (non migas) ekonomi Papua Barat Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,50 persen. Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,84 persen (BPS, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan memberikan input pada proses perencanaan periode berikutnya. Pengukuran pelaksanaan APBD dilakukan dalam menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, serta pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, dan *tax ratio*. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat yang akan dianalisis adalah periode 2017-2021.

Sesuai dengan adanya pengesahan kebijakan pemekaran daerah Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka skenario pengelolaan keuangan daerah juga perlu direvisi mengacu pada hitungan-hitungan proyeksi pendapatan dan belanja yang lebih realistis sesuai dengan ketentuan regulasi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum Tabel III.1 menunjukkan perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat 2017-2021, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,27% per tahun. Selama periode 2017-2021 secara nominal, pendapatan daerah Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, realisasi total pendapatan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7,8 triliun meningkat hingga menjadi Rp11,34 triliun pada tahun 2019 Lalu menurun hingga Rp5,02 triliun pada tahun 2021. Sementara itu, realisasi belanja daerah mengalami penurunan rata-rata yang lebih rendah dari pendapatan daerah yang mencapai sebesar 3,87% per tahun. Sama seperti nominal pendapatan daerah, realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi pada periode yang sama, yaitu dari sebesar Rp7,02 triliun pada 2017 meningkat hingga menjadi sebesar Rp9,75 triliun pada tahun 2020 lalu

menurun hingga mencapai Rp4,57 triliun pada 2021. Selanjutnya, dari segi realisasi pembiayaan, indikator pembiayaan *netto* mengalami pertumbuhan yaitu mencapai rata-rata sebesar 50,81% per tahun pada periode 2017-2021, dari sebesar Rp7,46 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1,83 triliun pada tahun 2021. Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran yaitu sebesar Rp1,23 triliun. Sementara pada tahun 2017, 2018 dan 2021 terjadi surplus anggaran.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel III.2 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017-2021 realisasi total pendapatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp7,8 triliun pada tahun 2017 hingga menjadi sebesar Rp11,34 triliun pada tahun 2019. Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 24,87% sehingga realisasi pendapatan menjadi sebesar Rp 8,52 triliun. Kemudian pada tahun 2021, realisasi pendapatan kembali menurun cukup signifikan yaitu sebesar 41,05% hingga nominalnya sebesar Rp5,02 triliun.

Secara keseluruhan pada periode 2017-2021, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Provinsi Papua Barat masih berasal dari pendapatan transfer (lebih dari 90%), khususnya dana alokasi umum.. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,56% per tahun. Pendapatan transfer menurun rata-rata sebesar 4,08% per tahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sebesar 106,03% per tahun. Penurunan PAD dan Pendapatan Transfer pada periode tersebut tak lepas dari pengaruh signifikan penurunan yang sangat tinggi pada masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 dan 2021. Dalam masa pandemi Covid tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi daerah khususnya yang tercermin dari objek-objek PAD di Provinsi Papua Barat tergolong belum cukup stabil.



Tabel III.1 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021 (Rp Juta)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	r
4. Pendapatan Daerah	7.800.891,76	7.309.838,20	11.339.763,89	8.519.361,86	5.021.760,00	-4,27%
41. Pendapatan Asli Daerah	470.072,40	459.243,07	483.725,60	485.365,55	380.500,00	-4,56%
42. Pendapatan Transfer	7.330.419,35	6.850.595,12	10.855.310,29	8.033.764,31	4.639.900,00	-4,08%
43. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	400,00	-	728,00	232,00	1.360,00	106,03%
5. Belanja Daerah	7.016.193,29	6.947.065,39	9.269.298,18	9.746.946,23	4.574.470,00	-3,87%
51. Belanja Operasi	3.138.937,41	3.109.757,60	3.651.709,04	3.344.079,81	1.934.290,00	-8,52%
52. Belanja Modal	770.102,98	1.539.271,67	1.757.983,37	1.543.170,85	987.140,00	16,46%
53. Belanja Tidak Terduga	-	-	-	456.288,45	20.450,00	-95,52%
54. Belanja Transfer	3.107.152,89	2.298.036,12	3.859.605,77	4.403.407,12	1.632.590,00	-1,73%
SURPLUS/DEFISIT	784.698,47	362.772,80	2.070.465,71	(1.227.584,36)	447.290,00	30,31%
6. Pembiayaan Daerah	746.238,91	729.891,19	980.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	50,81%
61. Penerimaan Pembiayaan	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	44,53%
62. Pengeluaran Pembiayaan	55.206,60	50.000,00	100.000,00	-	-	-3,14%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.530.937,38	1.092.663,99	3.051.309,15	1.825.205,81	2.272.500,00	33,74%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp Juta)

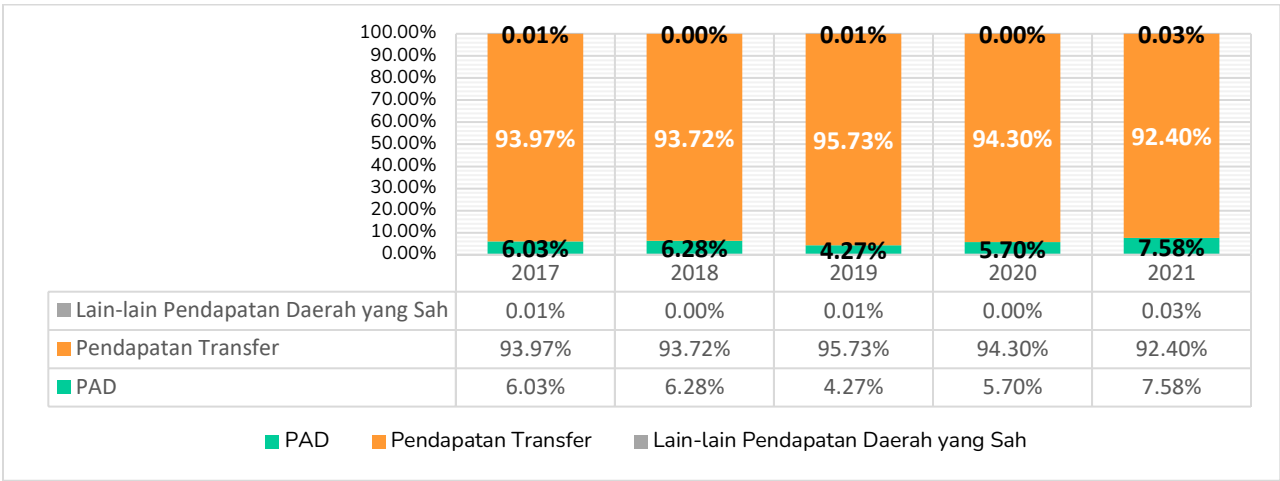
URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	r
4. Pendapatan Daerah	7.800.891,76	7.309.838,20	11.339.763,89	8.519.361,86	5.021.760,00	-4,27%
41. Pendapatan Asli Daerah	470.072,40	459.243,07	483.725,60	485.365,55	380.500,00	-4,56%
411. Pajak Daerah	306.595,60	344.238,71	369.671,61	339.806,65	295.080,00	-0,39%
412. Retribusi Daerah	1.324,15	2.951,20	3.542,57	3.260,41	3.950,00	39,02%
413. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	7.826,61	17.123,88	21.603,37	32.700,00	65,44%
414. Lain-lain PAD yang Sah	162.152,66	104.226,54	93.387,54	120.695,12	48.770,00	-19,12%
42. Pendapatan Transfer	7.330.419,35	6.850.595,12	10.855.310,29	8.033.764,31	4.639.900,00	-4,08%
421. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.330.419,35	6.850.595,12	10.855.310,29	8.033.764,31	4.639.900,00	-4,08%
422. Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-
43. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	400,00	-	728,00	232,00	1.360,00	106,03%
431. Pendapatan Hibah	400,00	-	728,00	232,00	1.360,00	106,03%
432. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
433. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021



Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang pada umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Untuk Papua Barat sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua Barat didominasi oleh besarnya kontribusi dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua. Kedua komponen tambahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pendapatan transfer, sehingga secara umum Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan tranfer, Lain-lain pendapatan yang sah masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan dua sumber pendapatan lainnya yang berasal dari pendapatan hibah dari Pemda lainnya dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri. (Gambar III.1).

Gambar III.1 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Gambar III.1 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2017-2021. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah meski nilai kontribusinya mengalami fluktuasi. Kontribusi pendapatan transfer yakni sebesar 93,97% pada tahun 2017 meningkat hingga mencapai 95,73% pada tahun 2019. Pada tahun 2021, kontribusi pendapatan transfer turun menjadi sebesar 92,40%. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah, namun mengalami fluktuasi kontribusi pada total pendapatan. Pada tahun 2017, kontribusi PAD terhadap total pendapatan sebesar 6,03% lalu meningkat





menjadi 7,58% pada tahun 2021. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi dengan kisaran angka 0,001 pesen hingga 0,03%.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan PAD Provinsi Papua Barat

Selama periode 2017-2021 (Tabel III.3), hanya pada tahun 2017 dan 2019 realisasi pendapatan daerah berada di atas target dengan nilai persentase sebesar 113,24% dan 133,74%. Sementara itu, pada tahun 2018, 2020, dan 2021 pendapatan daerah Provinsi Papua Barat berada di bawah target 100%, dengan nilai persentase tahun 2018 99,90%, tahun 2020 93.41% dan turun tajam di tahun 2021 dengan nilai persentase 74,82. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat mengalami pengurangan sebagaimana yang terjadi selama dua tahun terakhir, sebagai konsekuensi dari pandemi yang telah berdampak negatif pada keuangan negara

Besaran PAD dalam postur APBD merupakan indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, adanya kenaikan pada target PAD tersebut menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah daerah di Papua Barat untuk meningkatkan derajat kemandiriannya. Merujuk pada Tabel III.2 Komponen terbesar penyumbang pajak daerah pada PAD berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Rokok. Penurunan Pajak Daerah di Tahun 2020 dan 2021 disebabkan turunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)_serta Pajak Rokok karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat efek dari adanya Pandemi Covid 19. Sedangkan kontribusi Pajak Air Permukaan tidak signifikan. Disamping pendapatan pajak, jenis pendapatan yang berasal dari retribusi seperti retribusi jin Usaha Perikanan, retribusi Ijin Trayek dan retribusi Penjualan Produksi Jasa Usaha Daerah merupakan penyumbang terkecil komponen PAD yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Secara keseluruhan besarnya pendapatan pajak dan retribusi daerah tersebut merupakan hasil dari sektor migas, industri, perdagangan dan pariwisata yang menjadi unggulan Papua Barat.

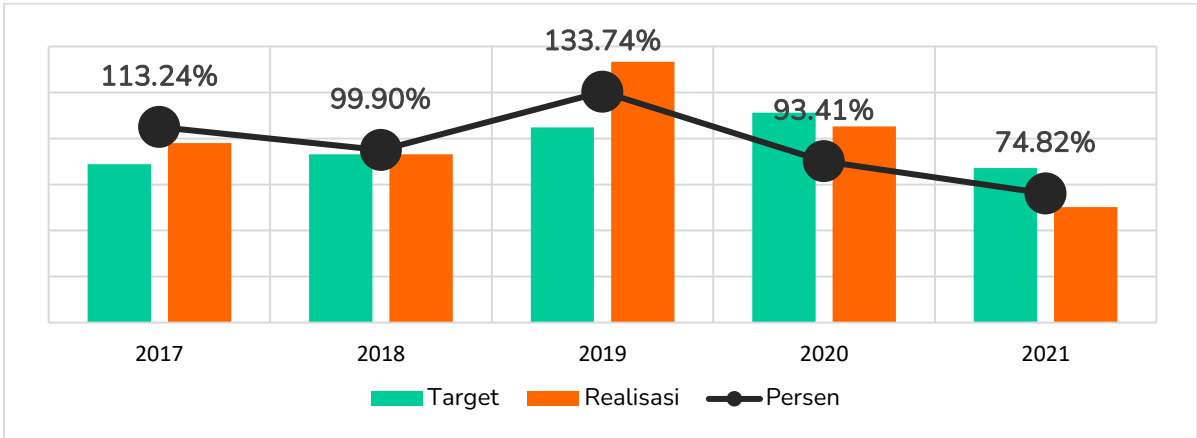
Sementara itu penerimaan lain-lain PAD yang sah Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan kontribusi kedua tertinggi setelah Pajak Daerah yang sebagian besar berasal dari hasil kerja sama daerah dengan pemda lainnya/pihak ketiga.

Tabel III.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2017	6.888.867.177.840,00	7.800.891.757.888,00	113,24%	(912.024.580.048,00)
2018	7.316.831.455.000,00	7.309.838.197.631,30	99,90%	6.993.257.368,70
2019	8.479.203.287.742,00	11.339.763.889.678,80	133,74%	(2.860.560.601.936,76)
2020	9.120.609.473.505,00	8.519.361.863.192,00	93,41%	601.247.610.313,00
2021	6.711.780.735.373,00	5.021.760.000.000,00	74,82%	1.690.020.735.373,00

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Gambar III.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, maka pengukuran kinerja dilakukan pula dari sisi realisasi belanja Pemerintah prov Papua Barat. Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi terdiri atas Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Kelompok Belanja Modal terdiri atas Jenis Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan



Jaringan, Belanja aset tetap lainnya. Kelompok Belanja Transfer yang terdiri atas Jenis Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Secara umum dari tahun 2017 sampai tahun 2021, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi. Tabel III.4 menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jumlah realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp7,02 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 9,27 triliun pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup signifikan menjadi Rp 4,57 triliun. Selama periode 2017-2021 belanja daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,87% per tahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa alokasi belanja operasi dan belanja transfer memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis belanja lainnya. Selama periode 2017-2021, belanja operasi rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,52% per tahun, sementara belanja modal mengalami peningkatan rata-rata 16,46% per tahun. Belanja tak terduga mengalami penurunan rata-rata 95,52% per tahun. Terakhir, Transfer mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,73% setiap tahunnya. Fluktuasi ini tidak lepas dari pengaruh penurunan signifikan masing masing komponen belanja daerah pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19. sehingga membuat pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja.

Selama periode yang sama, pada pos belanja operasi, belanja barang dan jasa menyumbang kontribusi paling besar. Namun, belanja barang dan jasa mengalami rata-rata penurunan per tahun paling tinggi, yang mencapai 18,66%. Sementara itu, pada pos belanja modal, walaupun mengalami fluktuasi namun secara rata-rata mengalami peningkatan yaitu sebesar 16,46% per tahun. Pada tahun 2017, belanja modal mencapai sebesar Rp 770,1 miliar meningkat hingga Rp1,76 triliun pada tahun 2019, lalu menurun hingga mencapai Rp987,14 miliar pada tahun 2021. Belanja Transfer mengalami penurunan signifikan terutama pada tahun 2021, hingga mencapai 62,92%, dari sebesar Rp 4,4 triliun pada tahun 2020, turun menjadi sebesar Rp 1,63 triliun pada tahun 2021. Sementara itu, pos belanja tidak terduga muncul pada tahun 2020 dan 2021 dengan nominal sebesar Rp 456,29 miliar dan Rp20,45 miliar. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Papua Barat dapat dilihat pada Tabel III.4.

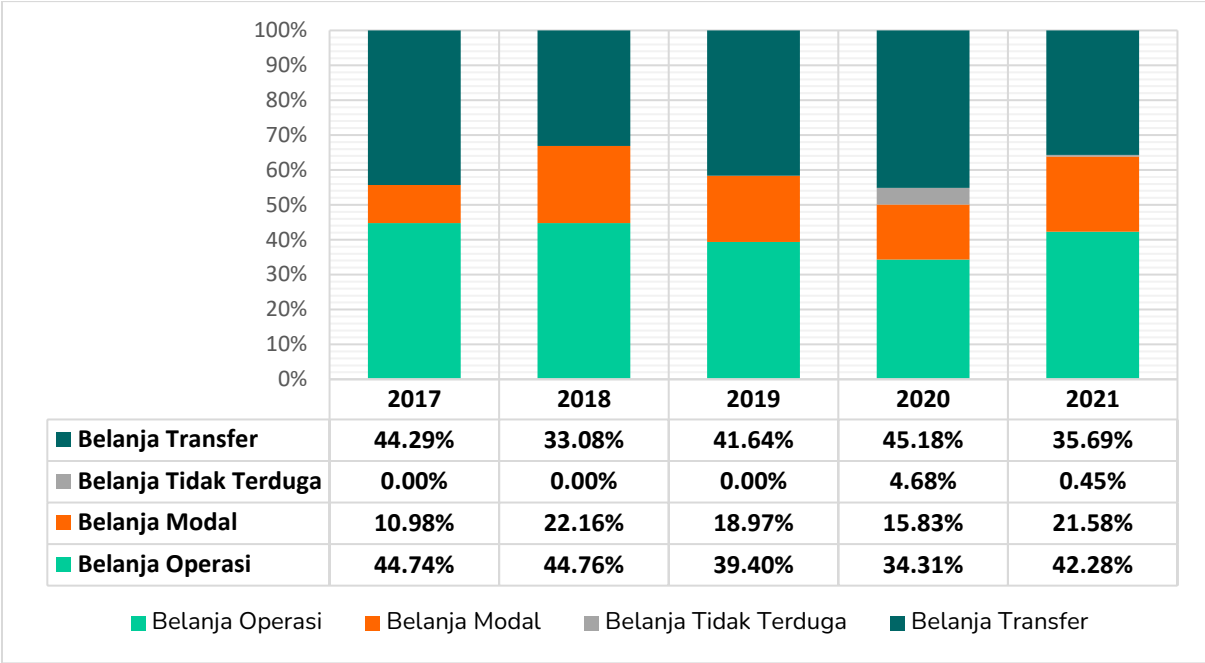
Tabel III.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp Juta)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	r
5. Belanja Daerah	7.016.193,29	6.947.065,39	9.269.298,18	9.746.946,23	4.574.470,00	-3,87%
51. Belanja Operasi	3.138.937,41	3.109.757,60	3.651.709,04	3.344.079,81	1.934.290,00	-8,52%
511. Belanja Pegawai	492.857,25	735.016,09	847.781,62	904.716,54	649.020,00	10,73%
512. Belanja Barang dan Jasa	1.818.791,35	1.514.770,89	1.899.915,80	1.350.077,65	615.550,00	-18,66%
513. Belanja Bunga	1.561,98	-	-	-	-	-
514. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
515. Belanja Hibah	780.815,62	783.082,13	850.998,13	1.047.338,11	634.440,00	-1,85%
516. Belanja Bantuan Sosial	44.911,21	76.888,50	53.013,50	41.947,51	35.280,00	0,85%
52. Belanja Modal	770.102,98	1.539.271,67	1.757.983,37	1.543.170,85	987.140,00	16,46%
521. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
522. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
523. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
524. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
525. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
526. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
53. Belanja Tidak Terduga	-	-	-	456.288,45	20.450,00	-95,52%
531. Belanja Tidak Terduga	-	-	-	456.288,45	20.450,00	-95,52%
54. Belanja Transfer	3.107.152,89	2.298.036,12	3.859.605,77	4.403.407,12	1.632.590,00	-1,73%
541. Belanja Bagi Hasil	1.373.262,78	362.439,17	1.845.415,98	2.620.473,06	190.040,00	71,20%
542. Belanja Bantuan Keuangan	1.733.890,11	1.935.596,95	2.014.189,79	1.782.934,05	1.442.550,00	-3,72%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021



Gambar III.3 Komposisi Belanja Provinsi Papua Barat, 2017-2021



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

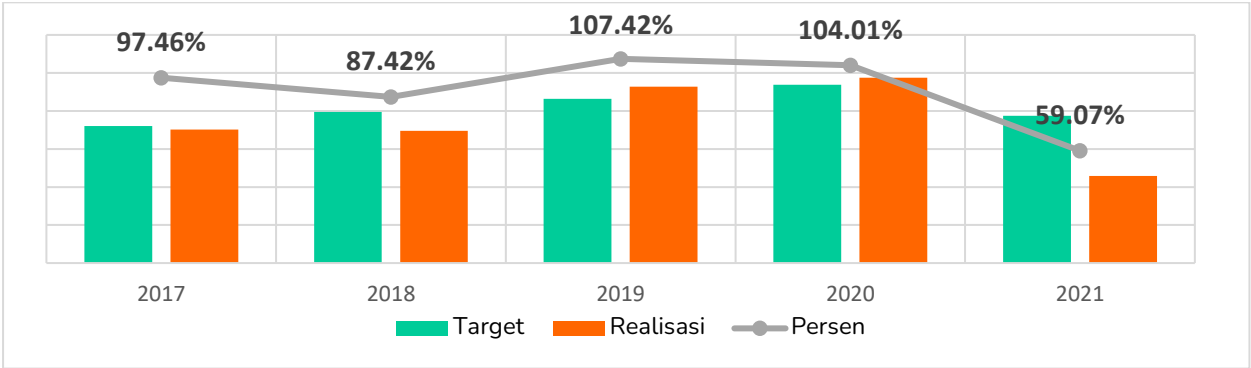
Selanjutnya apabila ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja operasi dan belanja transfer. Selama periode 2017 sampai 2021, peranan belanja operasi mencapai kisaran angka sebesar 34,31% s.d. 44,76%. Sementara itu, proporsi belanja transfer merupakan terbesar kedua dan mencapai kisaran angka 33,08% sampai dengan 45,18%. Belanja modal mengalami fluktuasi dengan nilai kontribusi berkisar dari 10,98% hingga 22,16%. Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan pada tahun 2020, menjadi sebesar 4,68%.

Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2017-2021, pada tahun 2017, 2018, dan 2021 rencana belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran di bawah 100%. Hal Ini disebabkan keterlambatan dalam memulai kegiatan, yang diawali dengan terlambatnya penetapan APBD (paling cepat bulan maret), dan keterlambatan penetapan juknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, hingga terlambatnya penetapan pejabat struktural, pejabat perbendaharaan, hingga pengelola keuangan. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi belanja daerah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase mencapai 107,42% dan 104,01%.



Gambar III.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2021



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2017	7.198.960.532.711	7.016.193.285.404	97,46%	182.767.247.307,00
2018	7.946.480.035.572	6.947.065.392.851	87,42%	999.414.642.720,64
2019	8.629.203.287.742	9.269.298.181.082	107,42%	(640.094.893.340,14)
2020	9.371.589.357.504	9.746.946.226.430	104,01%	(375.356.868.926,00)
2021	7.744.110.211.743	4.574.470.000.000	59,07%	3.169.640.211.743,00

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel III.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016-2019 (Rp Juta)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	r
6. Pembiayaan Daerah	746.238,91	729.891,19	980.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	50,81%
61. Penerimaan Pembiayaan	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	44,53%
611. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	44,53%
612. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
613. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
614. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
615. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
616. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
62. Pengeluaran Pembiayaan	55.206,60	50.000,00	100.000,00	-	-	-3,14%
621. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
622. Penyertaan Modal Daerah	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	0,00%
623. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.206,60	-	-	-	-	-100,00%
624. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
625. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.530.937,38	1.092.663,99	3.051.309,15	1.825.205,81	2.272.500,00	33,74%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Tabel III.6 menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi pemerintah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Provinsi Papua Barat pada periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2017, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 10,59 triliun yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 12,03 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, nilai total aset daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 15.68 triliun dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 16.28 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.





Tabel III.7 Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	788,486,279,497	1,093,210,128,420	3,051,563,209,920	1,825,275,124,813
Investasi Jangka Pendek				
Piutang Pendapatan	4.770.360.500	6.640.754.713	4,635,160,000	33,218,658,397
Piutang Lain-lain	10.312.210.545	37.216.764.279	19,493,186,435	
Persediaan	957.904.028.548	865.227.534.673	1,253,409,353,197	1,564,329,523,719
Penyisihan Piutang	(996.695.317)	(6.173.943.471)	(4,364,182,445)	
Beban Dibayar Dimuka	1.084.052.083	1.765.214.062	715,488,547	82,864,779,821
JUMLAH ASET LANCAR	1.761.560.235.856	1.997.886.452.676	4,325,452,215,653	3,505,688,086,749
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen			-	-
Investasi Permanen	319.105.713.752	369.228.795.414	470,905,935,873	468,952,612,818
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	319.105.713.752	369.228.795.414	470,905,935,873	468,952,612,818
ASET TETAP				
Tanah	1.369.394.847.934	1.374.301.938.843	1,409,951,216,843	1,431,198,676,468
Peralatan dan Mesin	1.007.240.006.801	1.081.450.279.226	1,164,410,953,775	1,320,398,780,468
Gedung dan Bangunan	2.565.881.708.551	2.742.229.553.920	2,803,795,957,273	3,740,484,289,502
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.992.525.794.947	7.185.299.602.816	7,370,067,596,102	7,686,249,253,970
Aset Tetap Lainnya	294.827.916.641	316.565.526.641	319,865,145,141	322,940,855,141
Konstruksi dalam Pengerjaan	529.535.346.522	511.366.136.191	1,784,191,280,295	2,112,125,051,561
Akumulasi Penyusutan	(3.295.857.618.557)	(3.598.879.975.644)	(4,033,697,031,427)	(4,444,310,316,083)
JUMLAH ASET TETAP	8.463.548.002.839	9.612.333.061.994	10,818,585,118,002	12,169,086,591,027
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran			-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	-
Aset Tidak Berwujud	4.162.380.000	6.394.028.500	12,235,115,663	13,176,840,663
Aset Lain-lain	42.056.666.071	47.350.555.491	56,057,940,691	127,439,197,134

URAIAN	2017	2018	2019	2020
JUMLAH ASET LAINNYA	46.219.046.071	53.744.583.991	68,293,056,354	140,616,037,797
JUMLAH ASET	10.590.432.998.518	12.033.192.894.075	15,683,236,325,883	16,284,343,328,392
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.900.779	546.134.572	254,056,880	9,315,257
Utang Bunga				
Utang Pajak				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	36.000.000.000	6.015.000.000	104,872,000,000	24,343,190,000
Pendapatan Diterima Dimuka	620.833.333	325.833.333	970,083,333	628,283,333
Utang Jangka Pendek Lainnya	26.206.177.337	21.444.174.283	4,742,935,500	5,850,187,829
Utang Beban				
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan			-	-
Utang Belanja	6.205.509.291	9.985.759.940	43,041,252,992	441,833,357,261
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	69.081.420.740	38.316.902.128	153,880,328,705	472,724,333,680
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri			-	-
Utang Luar Negeri	181.074.600.000	245.459.600.000	180,640,600,000	196,511,131,893
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	181.074.600.000	245.459.600.000	180,640,600,000	196,511,131,893
JUMLAH KEWAJIBAN	250.156.020.740	283.776.502.128	334,520,928,705	669,235,465,573
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang				
Cadangan untuk Persediaan				
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	10.340.276.977.778	11.749.416.391.947	15,348,715,397,178	15,615,107,862,819
Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang				
JUMLAH EKUITAS DANA	10.340.276.977.778	11.749.416.391.947	15,348,715,397,178	15,615,107,862,819

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021



Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu empat tahun (2017-2020) mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kewajiban daerah Provinsi Papua Barat mencapai nilai sebesar Rp 250,16 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga mencapai Rp 283,78 miliar. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah mengalami peningkatan yaitu mencapai 334.52 miliar. Pada tahun 2020, jumlah kewajiban daerah Provinsi Papua Barat peningkatan naik signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 669.23 miliar.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2017-2020, nilai ekuitas pemerintah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai ekuitas daerah Provinsi Papua Barat mencapai nilai sebesar Rp 10,34 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp 15,61 triliun.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/ elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, rasio lancar neraca keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah



mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel III.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat, 2017-2020

RUMUS	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas				
Aset Lancar	1.761.560.235.856	1.997.886.452.676	4.325.452.215.653	3.505.688.086.749
Kewajiban Jangka Pendek	69.081.420.740	38.316.902.128	153.880.328.705	472.724.333.680
Rasio Lancar	25,5	52,14	28,1	7,4
Aset Lancar Persediaan	957.904.028.548	865.227.534.673	3.072.042.862.456	1.941.358.563.030
Kewajiban Jangka Pendek	69.081.420.740	38.316.902.128	153.880.328.705	472.724.333.680
Quick Ratio	13,87	22,58	19,96	4,11
Rasio Solvabilitas				
Total Hutang	250.156.020.740	283.776.502.128	334.520.928.705	669.235.465.573
Total Aset	10.590.432.998.518	12.033.192.894.075	15.683.236.325.883	16.284.343.328.392
Rasio Total Hutang (%)	2,36%	2,36%	2,13%	4,11%
Total Hutang	250.156.020.740,00	283.776.502.128,00	334.520.928.705	669.235.465.573
Total Ekuitas	10.340.276.977.778	11.749.416.391.947	15.348.715.397.178	15.615.107.862.819
Rasio Hutang/Modal (%)	2,42%	2,42%	2,18%	4,29%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi





total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan **pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD**. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah dapat tergambar dari APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pada sub bab ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran memiliki tujuan mendapatkan gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Papua Barat pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan belanja di masa mendatang. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program



dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2017-2021 (Tabel III.9).

Tabel III.9 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017-2021

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP JUTA)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP JUTA)	PERSENTASE
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2017	492.857.250.076	7.071.399.883.252,00	6,97%
2018	735.016.089.247	6.997.065.392.851,36	10,50%
2019	847.781.618.060	9.369.298.181.082,14	9,05%
2020	904.716.537.784	9.746.946.226.430,00	9,28%
2021	649.020.000.000	4.574.470.000.000,00	14,19%
Rata-rata	725.878.299.033	7.551.835.936.723	10,00%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja untuk pembangunan dan semakin kecilnya Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Belanja Aparatur merupakan pengeluaran wajib dan mengikat yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021 segi nominal namun dari segi proporsinya terhadap total pengeluaran cenderung mengalami peningkatan, meski sempat sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2017, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 492,86 miliar, kemudian meningkat hingga mencapai Rp 904,72 miliar di tahun 2019. Pada tahun 2020 nominal belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp 649,02 miliar.

Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat juga berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2017 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah mencapai 6,97%, kemudian meningkat hingga mencapai 10,50% pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah menurun menjadi 9,05%. Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 14,19%. Secara keseluruhan rata-rata proporsi belanja aparatur selama 5 tahun terakhir sebesar 10% terhadap total pengeluaran pemerintah.



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

Tabel III.10 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2017-2021 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	7.800.891,76	7.309.838,20	11.339.763,89	8.519.361,86	5.021.760,00
2	Belanja Daerah	7.016.193,29	6.947.065,39	9.269.298,18	9.746.946,23	4.574.470,00
	Surplus/Defisit	784.698,47	362.772,80	2.070.465,71	-1.227.584,36	447.290,00
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.206,60	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	746.238,91	729.891,19	980.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	1.530.937,38	1.092.663,99	3.051.309,15	1.825.205,81	2.272.500,00

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Tabel III.11 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	r
6. Pembiayaan Daerah	746.238,91	729.891,19	980.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	50,81%
61. Penerimaan Pembiayaan	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	44,53%
611. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00	44,53%
612. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
613. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
614. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
615. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
616. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
62. Pengeluaran Pembiayaan	55.206,60	50.000,00	100.000,00	-	-	-3,14%
621. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
622. Penyertaan Modal Daerah	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	0,00%
623. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.206,60	-	-	-	-	-100,00%
624. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
625. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.530.937,38	1.092.663,99	3.051.309,15	1.825.205,81	2.272.500,00	33,74%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel III.10 terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2017-2021, terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto setiap tahunnya. Pada tahun 2017, pembiayaan netto Provinsi Papua Barat mencapai nilai sebesar Rp 746,24



miliar, mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni menjadi Rp 729,89 miliar. Pada tahun 2019, pembiayaan netto mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan netto mencapai Rp 980,84 miliar. Pada tahun 2020, nilai pembiayaan netto Provinsi Papua Barat kembali mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 3,05 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, pembiayaan netto mengalami penurunan menjadi Rp 1,83 triliun.

3.2.2.1 Defisit Riil Anggaran

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua Barat selama kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel III.12.

Tabel III.12 Surplus/Defisit Riil APBD Papua Barat, 2017-2021 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	7.800.891,76	7.309.838,20	11.339.763,89	8.519.361,86	5.021.760,00
	Dikurangi:					
2	Realisasi Belanja Daerah	7.016.193,29	6.947.065,39	9.269.298,18	9.746.946,23	4.574.470,00
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.206,60	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Surplus/Defisit Riil	729.491,87	312.772,80	1.970.465,71	-1.227.584,36	447.290,00

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

3.2.2.2 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, mengatur bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari : (a.) SiLPA; (b). pencairan Dana Cadangan; (c). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d.) penerimaan Pinjaman Daerah; (e). penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (f). penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah di luar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Papua Barat Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.13.





Tabel III.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Papua Barat (Rp Juta)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Tabel III.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2017-2021

URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021	
	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA
Jumlah SiLPA	801.445,50	100,00%	779.891,19	100,00%	1.080.843,44	100,00%	3.052.790,17	100,00%	1.825.210,00	100,00%
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	746.238,91	93,11%	729.891,19	93,59%	980.843,44	90,75%	3.052.790,17	100,00%	1.825.210,00	100,00%
Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)



Merujuk kepada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa penyebab terjadinya SiLPA dapat bersumber dari : (a) Pelampaun Penerimaan PAD, (b) Pelampaun Penerimaan Pendapatan Transfer, (c) Pelampaun Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sert (d) Pelampaun penerimaan Pembiayaan, (e)Penghematan Belanja, (f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum terselesaikan, (g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat (earmarked; ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD.

Ruang Fiskal = (Total Pendapatan + silpa) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah

Pendapatan Mengikat = DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus

Belanja Wajib = Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + belanja wajib lainnya

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan Ruang Fiskal Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021 ditemukan ruang fiskal Provinsi Papua Barat cukup memiliki ruang dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah.



Tabel III.15 Ruang Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021 (Rp Juta)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	(RP, JUTA)	(RP, JUTA)	(RP, JUTA)	(RP, JUTA)	(RP, JUTA)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	8.602.337,26	8.089.729,39	12.420.607,33	11.572.152,04	6.846.970,00
PENDAPATAN DAERAH	7.800.891,76	7.309.838,20	11.339.763,89	8.519.361,86	5.021.760,00
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	801.445,50	779.891,19	1.080.843,44	3.052.790,17	1.825.210,00
PENDAPATAN MENGIKAT	4.355.441,48	4.453.497,85	4.439.358,75	4.502.222,10	4.463.840,00
DAK	338.947,59	444.560,37	491.563,79	483.377,57	448.590,00
Dana Penyesuaian	4.016.493,89	4.008.937,48	3.947.794,96	4.018.844,53	4.015.250,00
BELANJA MENGIKAT	881.191,40	1.193.122,47	1.396.466,49	1.338.703,81	889.423,50
Belanja Pegawai	492.857,25	735.016,09	847.781,62	904.716,54	649.020,00
Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD (15% dari belanja barang dan jasa + modal)	388.334,15	458.106,38	548.684,88	433.987,27	240.403,50
BELANJA WAJIB	776.668,30	916.212,77	1.097.369,75	867.974,55	480.807,00
Belanja Pendidikan (20% dari belanja barang dan jasa + modal)	517.778,87	610.808,51	731.579,83	578.649,70	320.538,00
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	258.889,43	305.404,26	365.789,92	289.324,85	160.269,00
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	6.013.301,18	6.562.833,09	6.933.195,00	6.708.900,46	5.834.070,50
KAPASITAS FISKAL	2.589.036,08	1.526.896,30	5.487.412,34	4.863.251,58	1.012.899,50

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Tabel III.15 menunjukkan hasil ruang fiskal daerah di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, ruang fiskal Provinsi Papua Barat mencapai Rp 2,59 triliun namun menurun pada tahun 2018 dengan nilai capaian sebesar Rp 1,53 triliun. Selanjutnya ruang fiskal mengalami peningkatan pada tahun berikutnya hingga mencapai sebesar Rp 5,49 triliun pada tahun 2018. Pada dua tahun berikutnya, ruang fiskal Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dengan nilai pencapaian berturut-turut sebesar Rp 4,86 triliun dan Rp 1,01 triliun pada tahun 2021.

Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + OTSUS + TRANSFER PROV + LP) - BP}{JUMLAH PENDUDUK MISKIN}$$

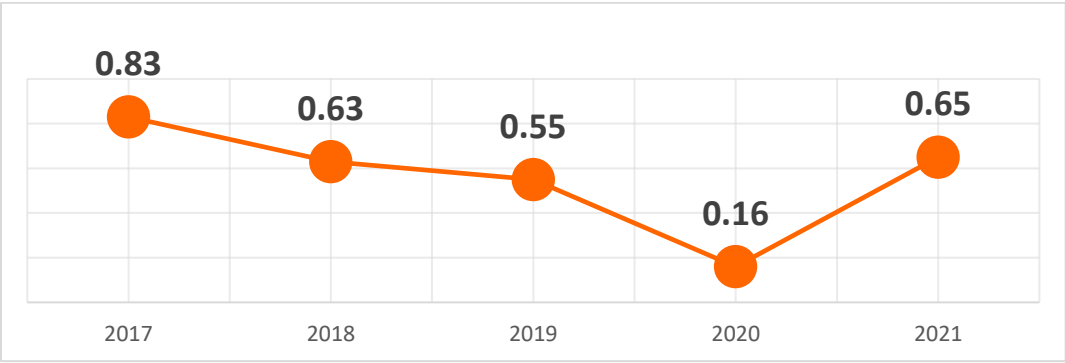
Keterangan:

KF	=	Kapasitas Fiskal	TRANSFER	=	Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah	PROV	=	/Kota (bernilai positif untuk Kabupaten
DBH	=	Dana Bagi Hasil		=	/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
DAU	=	Dana Alokasi Umum	LP	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
OTSUS	=	Dana Otonomi Khusus	BP	=	Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2021 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, nilai IKF Provinsi Papua Barat menunjukkan nilai sebesar 0,83 atau masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2018, nilai IKF Provinsi Papua Barat mengalami penurunan yakni menjadi 0,63 sehingga masuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2019, nilai IKF Provinsi Papua Bara kembali mengalami penurunan dengan nilai IKF mencapai 0,55. Kemudian, pada tahun 2020, nilai IKF Provinsi Papua Barat turun menjadi 0,16 sehingga masuk dalam kategori sangat rendah. Pada tahun 2021, nilai IKF Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai nilai sebesar 0,65 atau masuk dalam katergori sedang.

Gambar III.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021, 2022

3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya dapat mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi selama periode tahun 2017-2021. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 yakni sebesar 1,22. Kemudian pada tahun 2018, kemampuan mendanai belanja daerah menurun menjadi 1,16. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi 1,33 dan di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 1,19. Selanjutnya, pada tahun 2021, kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 1,50.



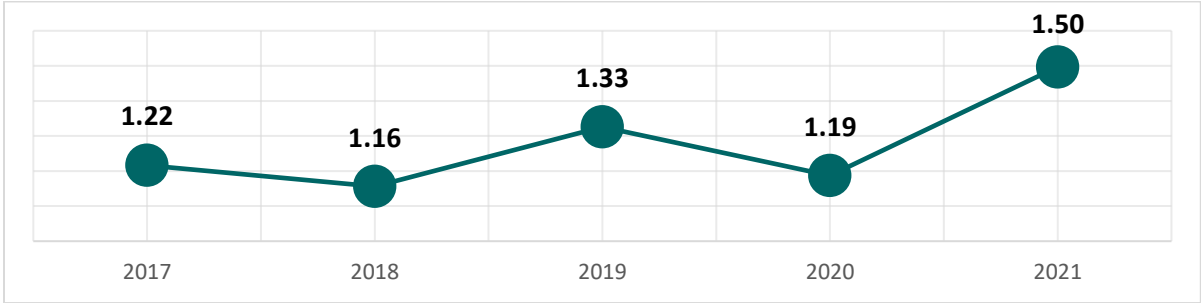
Meskipun selama tahun 2017-2021 kemampuan mendanai belanja daerah telah bernilai lebih dari satu, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber penerimaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel III.16 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Provinsi Papua Barat (Rp Juta)

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGE-LUARAN PEM-BIAYAAN	TOTAL PENGE-LUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
2017	7.800.891,76	801.445,50	8.602.337,26	7.016.193,29	55.206	7.071.399,88	1,22
2018	7.309.838,20	779.891,19	8.089.729,39	6.947.065,39	50.000	6.997.065,39	1,16
2019	11.339.763,89	1.080.843,44	12.420.607,33	9.269.298,18	100.000	9.369.298,18	1,33
2020	8.519.361,86	3.052.790,17	11.572.152,04	9.746.946,23	0	9.746.946,23	1,19
2021	5.021.760,00	1.825.210,00	6.846.970,00	4.574.470,00	0	4.574.470,00	1,50

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2017-2021 (diolah)

Gambar III.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah
Provinsi Papua Barat 2017-2021



Sumber: DJPK Kemenkeu 2022 (diolah)

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan adanya kebijakan pemekaran Provinsi Papua Papua Barat Daya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 22 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap proyeksi dan kerangka pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2024-2026. Proyeksi dan kerangka pendanaan daerah Provinsi Papua Barat tersebut dihitung berdasarkan justifikasi objektif terhadap pos-pos pendapatan daerah setelah adanya pemisahan dengan daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

3.3.1 Arah Kebijakan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Kondisi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 akan berjalan sangat dinamis sesuai dengan pergerakan ekonomi nasional dan regional yang menggeliat seiring dengan semakin teratasinya pandemi Covid-19 yang





beberapa tahun belakangan telah benar-benar memberi pukulan yang berat terhadap berbagai aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.

Di samping itu adanya pemberlakuan beberapa regulasi terbaru akan memberi warna terhadap pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua beserta beberapa Peraturan Pemerintah turunannya, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta yang terbaru Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Merespon kondisi tersebut, Arah dan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah selanjutnya akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

3.3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 s/d 2026 adalah:

1. Konsolidasi kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pasca berlakunya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya;
2. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pemungut pajak dan petribusi Daerah;
4. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Menginisiasi sumber pendapatan daerah dari Penyertaan modal pada BUMD yang sudah ada seperti Bank Papua serta perusahaan BUMD baru yang layak secara ekonomis dan punya prospek profitabilitas;

9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan daerah
10. Meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi regulasi pengajuan usulan dana tranfer dari Pusat dan Dana Otonomi Khusus;
11. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua dikelola secara efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD
12. Dana otonomi Khusus terutama diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP dan mengikat untuk dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
13. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus terutama dialokasikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan;
14. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;

3.3.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 s/d 2026 adalah:

1. Konsolidasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pasca terbentuknya daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya;
2. Mendisain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien dan efektif ;
3. Penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
4. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan





urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

6. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a. Belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun
 - b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undan
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal
8. Penerimaan daerah terkait dengan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua berupa selisih antara 70% bagian Daerah sebagai DBH dalam rangka

Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:

- a. 35% untuk belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - b. 25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - c. 30% untuk belanja infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - d. 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
9. Pengalokasian belanja yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan peraturan perundangan, yang antara lain diarahkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik;
 - b. Penggunaan dana otonomi khusus yang bersifat umum, antara lain untuk:
 - o Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik.
 - o Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat.
 - o Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penggunaan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan:
 - o Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan.
 - o Paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.
 - o Pemberdayaan ekonomi masyarakat
10. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus dialokasikan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur





daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

3.3.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 s/d 2026 adalah:

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
4. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2017-2021 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dalam periode 2023-2026, dengan kondisi awal APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sesuai dengan pasca terbentuknya daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2023-2026 diasumsikan telah berhasil pulih dari masa pandemi Covid-19 dan adanya lonjakan kenaikan harga komoditas di pasar internasional

memberikan keuntungan bagi Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya minyak dan gas bumi.

Tabel III.17 menunjukkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026, dengan menggunakan basis data APBD 2023 sebagai tahun 1 perencanaan, hal ini terkait dengan keberadaan data APBD tahun 2023 yang merupakan angka awal APBD Provinsi Papua Barat pasca berlakunya undang undang pemekaran Provinsi papua Barat Daya. Angka angka penerimaan dana transfer daerah (DTKD) juga telah disesuaikan dengan arahan Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) terkait dengan perhitungan penyesuaian antar provinsi induk dan pemekaran berdasarkan variabel-variabel tertentu termasuk jumlah penduduk, luas wilayah dan kapasitas fiskal daerah.

Pada tahun 2023, nilai pendapatan daerah mencapai sebesar Rp 4,91 triliun yang kemudian diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen menjadi sebesar Rp.5,02 trilyun pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp.5,13 trilyun pada tahun 2025 dan sebesar Rp.5,28 triyun pada tahun 2026.

Selanjutnya dari sisi belanja daerah pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.5,50 trilyun yang kemudian diperkirakan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.5,02 trilyun pada tahun 2024, penurunan belanja daerah ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian pada pos-pos belanja daerah yang bebannya dialihkan ke Provinsi pemekaran Papua Barat Daya. Sedangkan pada tahun 2025 dan 2026 belanja daerah diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.5,13 trilyun dan sebesar Rp.5,25 trilyun.



Tabel III.17 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2023-2026 (Rp)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Pertumbuhan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
4	PENDAPATAN DAERAH	4.910.620.880.589	5.020.944.165.262	5.138.445.136.318	5.258.999.120.727	2,3%
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	640.881.515.682	658.223.116.822	679.928.279.959	702.486.055.584	3,1%
	Pajak Daerah	496.768.283.140	516.639.014.466	537.304.575.044	558.796.758.046	4,0%
	Retribusi Daerah	5.145.661.647	5.274.303.188	5.406.160.768	5.541.314.787	2,5%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.424.194.310	36.309.799.168	37.217.544.147	38.147.982.751	2,5%
	Lain-lain PAD yang Sah	103.543.376.585	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-1,1%
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	4.268.072.484.907	4.361.721.048.440	4.457.516.856.359	4.555.513.065.143	2,2%
04.02.01	DBH Pajak dan SDA	2.501.480.286.907	2.554.193.703.415	2.608.095.578.792	2.663.216.391.742	2,1%
	Dana Bagi Hasil Pajak	89.460.359.000	93.933.376.950	98.630.045.798	103.561.548.087	5,0%
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.412.019.927.907	2.460.260.326.465	2.509.465.532.994	2.559.654.843.654	2,0%
04.02.02	Dana Alokasi Umum	645.931.585.000	658.850.216.700	672.027.221.034	685.467.765.455	2,0%
	DAU tidak ditentukan penggunaannya	447.670.686.000	456.624.099.720	465.756.581.714	475.071.713.349	2,0%
	DAU yang ditentukan penggunaannya	198.260.899.000	202.226.116.980	206.270.639.320	210.396.052.106	2,0%
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	108.718.367.000	111.436.326.175	114.222.234.329	117.077.790.188	2,5%
	DAK Fisik	99.882.319.000	102.379.376.975	104.938.861.399	107.562.332.934	2,5%
	DAK Non Fisik	8.836.048.000	9.056.949.200	9.283.372.930	9.515.457.253	2,5%
	Dana Otonomi Khusus	1.011.942.246.000	1.037.240.802.150	1.063.171.822.204	1.089.751.117.759	2,5%
	Dana Otonomi Khusus Papua	449.162.730.000	460.391.798.250	471.901.593.206	483.699.133.036	2,5%
	Penerimaan Umum	199.627.880.000	204.618.577.000	209.734.041.425	214.977.392.461	2,5%
	Penerimaan Berbasis Kinerja	249.534.850.000	255.773.221.250	262.167.551.781	268.721.740.576	2,5%
	Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus Papua	562.779.516.000	576.849.003.900	591.270.228.998	606.051.984.722	2,5%



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Pertumbuhan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.666.880.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-13,3%
	Hibah	1.666.880.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-13,3%
5	BELANJA	5.505.620.880.586	5.020.944.165.262	5.138.445.136.318	5.258.999.120.727	-1,4%
05.01	BELANJA OPERASI	2.338.833.246.207	2.210.449.069.960	2.150.695.668.688	2.254.246.557.745	-1,1%
	Belanja Pegawai	860.053.505.373	799.586.522.261	719.627.870.035	647.665.083.031	-9,0%
	Belanja Barang dan Jasa	1.101.303.250.776	1.010.262.547.699	1.030.467.798.653	1.205.981.474.714	3,6%
	Belanja Hibah	376.886.520.258	400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	2,0%
	Belanja Bantuan Sosial	589.969.800	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,6%
05.02	BELANJA MODAL	1.175.334.596.282	1.087.087.942.245	1.228.298.962.658	1.208.460.582.789	1,3%
	Belanja Modal Tanah	31.800.000.000				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.481.720.463				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.469.093.313				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	744.809.340.681				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.658.381.825				
	Belanja Modal Aset Lainnya	116.060.000				
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	142.638.965.866	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-21,6%
	Belanja Tak Terduga	142.638.965.866	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-21,6%
05.04	TRANSFER	1.848.814.072.231	1.673.407.153.057	1.709.450.504.973	1.746.291.980.192	-1,7%
	Belanja Bagi Hasil	298.563.966.450	257.520.885.444	265.246.512.007	273.203.907.367	-2,6%
	Transfer Bantuan Keuangan	1.550.250.105.781	1.415.886.267.613	1.444.203.992.966	1.473.088.072.825	-1,6%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-594.999.999.997	0	0	0	
6	PEMBIAYAAN	594.999.999.997	0	0	0	





No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Pertumbuhan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
06.01	PENERIMAAN DAERAH	644.999.999.997	0	0	0	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	644.999.999.997	0	0	0	
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Piutang Daerah					
06.02	PENGELUARAN DAERAH	50.000.000.000	-	-	-	
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Utang					
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	0	

Sumber : Hasil Analisis

3.3.4 Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan daerah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua berupa selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian Daerah sebagai DBH dalam rangka Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - a. 35 persen untuk belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - b. 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - c. 30 persen untuk belanja infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - d. 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
2. Dana Otonomi Khusus Papua yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum yang merupakan dana. yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu) persen, yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik
 - peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
 - Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan yang merupakan dana yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima) persen dari plafon DAU nasional, yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - Paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan
 - paling sedikit 20 persen untuk belanja kesehatan dan



- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah pusat dengan Dewan perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran, dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya serta juga memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan pengalokasian DTI, antara lain untuk:
- a. Pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan
 - b. Energi listrik
 - c. air bersih
 - d. Telekomunikasi, dan
 - e. Sanitasi lingkungan

Selanjutnya kerangka penggalokasian dana Tambahan DBH sumber daya alam, dana otonomi khusus Papua serta Dana tambahan Infrastruktur selanjutnya diuraikan dalam Tabel III.18.

Tabel III.18 Kerangka Pengalokasian DBH Sumber Daya Alam Papua Barat, 2023-2026

No	URAIAN	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Penerimaan DBH Migas				
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.352.407.880.912	1.390.049.265.383	1.428.868.837.617	1.468.904.216.390
2	Indikasi Belanja				
	Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota	981.576.096.077	1.001.207.617.999	1.021.231.770.359	1.041.656.405.766
	Belanja Bidang pendidikan	129.791.124.692	136.094.576.585	142.672.973.540	149.536.733.718
	Belanja Bidang Kesehatan dan perbaikan gizi	92.707.946.209	97.210.411.846	101.909.266.815	106.811.952.656
	Belanja Bidang Infrastruktur	111.249.535.450	116.652.494.215	122.291.120.177	128.174.343.187
	Belanja Bidang pemberdayaan masyarakat adat	37.083.178.483	38.884.164.738	40.763.706.726	42.724.781.062

Sumber: BPKAD Papua Barat, diolah

Tabel III.18 menunjukkan proyeksi penerimaan dana bagi hasil migas yang merupakan salah satu komponen pembiayaan penting yang mendukung penyelenggaraan dana otonomi khusus di provinsi Papua Barat. Secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana bagi hasil sumber daya alam akan ditransfer ke kabupaten penghasil dan kabupaten yang terdampak dengan sumber dana bagi hasil sumber daya alam migas tersebut. Selanjutnya sisa bagian dana yang dikelola oleh Pemerintah provinsi Papua Barat dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan prosentase yang ditentukan oleh peraturan perundangan terkait.



Tabel III.19 Kerangka Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Barat Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Dana Otsus 1% Plafon DAU				
1.a	Proyeksi Penerimaan	424.159.185.331	435.964.750.203	448.139.833.154	460.696.232.658
1.b	Indikasi Belanja	424.159.185.331	435.964.750.203	448.139.833.154	460.696.232.658
	Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik				
	peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan				
	Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan				
2	Dana Otsus 1,25% Plafon DAU				
2.a	Proyeksi Penerimaan	249.534.850.000	255.773.221.250	262.167.551.781	268.721.740.576
2.b	Indikasi Belanja	249.534.850.000	255.773.221.250	262.167.551.781	268.721.740.576
	Pendidikan				
	Kesehatan				
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				

Sumber : BPKAD Papua Barat, diolah

Tabel III.19 menunjukkan kerangka pengalokasian dana otonomi khusus Papua Barat yang merupakan 2,25 persen dari plafon DAU nasional. dana otsus yang merupakan 1 persen dari plafon DAU dialokasikan untuk membiayai Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat, sedangkan dana otsus yang merupakan 1,25 persen dari plafon DAU nasional dialokasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel III.20 Kerangka Pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus Tahun 2023-2026

No	URAIAN	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Proyeksi Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	562.779.516.000	576.849.003.900	591.270.228.998	606.051.984.722
2	Indikasi Belanja DTI	562.779.516.000	576.849.003.900	591.270.228.998	606.051.984.722
	Pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan				
	Energi listrik				
	air bersih				
	Telekomunikasi				
	Sanitasi lingkungan				

Sumber: BPKAD Papua Barat, diolah

Tabel III.20 menunjukkan proyeksi penerimaan dan pengalokasian dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua selama periode tahun 2023-2026. Penerimaan DTI didasarkan pada alokasi tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07 /2022 Tentang Alokasi Transfer Ke Daerah Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua Barat Dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023, sedangkan pengalokasian DTI ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis internasional, kebijakan nasional dan isu sektoral lainnya

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan bidang sosial.

4.1.1.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Barat telah lama menjadi perhatian nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua Barat dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar



(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan trend yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Papua Barat masih tertinggal dengan rata-rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Barat menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusn masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1	Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	1	Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
			2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
			3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
			4	Kondisi topografi yang sangat ektrim dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
	2	Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan	1	Belum optimalnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
			2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
			3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
			4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dsb



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
		6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
		7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran
		8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
		9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
	3	1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
		2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi
		3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah
		4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran
		5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Barat tergolong rendah yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita.

Permasalahan-permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Berikut rincian

permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Barat berdasarkan capaian program-program kesehatan hingga tahun 2022:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Terdapat puskesmas-puskesmas di Provinsi Papua Barat yang belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya.
- Rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Barat sudah melebihi standar nasional namun beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat memiliki kondisi geografis yang sulit sehingga menghambat akses penduduk terhadap layanan puskesmas yang tersedia di pusat distrik.
- Hingga tahun 2022, belum ada kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat yang memenuhi kriteria melaksanakan kesehatan kerja maupun kesehatan olahraga
- Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut telah tersedia di 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 8 unit, yang pada tahun 2022 sebagian besar sudah terakreditasi.
- Rasio Tempat Tidur RS di Papua Barat sebesar sudah melebihi standar WHO, , tetapi selain 2 kabupaten yang belum memiliki RS sebagai FKTL, rasio TT per 1000 penduduk yang di bawah 1 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni
- Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 menunjukkan rasio 1 posyandu : 76,6 balita. Kabupaten Manokwari memiliki rasio posyandu yang lebih rendah dari pada angka provinsi
- Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) yang terdapat di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sebanyak 158 unit. Dari Kabupaten Kaimana dan Pegunungan Arfak tidak ada kegiatan Posbindu yang dilaporkan.
- Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Provinsi Papua Barat mencakup 89,9%. Angka ini telah melewati target nasional 85% (capaian nasional 92,1%)
- Persentase kabupaten di Papua Barat dengan ketersediaan obat esensial mencapai 91,7% (nasional 83,8%, di atas target 77%).
- Cakupan Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) di Papua Barat tahun 2021 mencapai 81,9% (capaian nasional 97%, di atas target 90% puskesmas)



- Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine belum berjalan sesuai standar.
- Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi sudah berjalan dan mencapai target yang ditetapkan.

SDM kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat belum memadai serta penyebarannya belum merata, ditunjukkan dengan kondisi tahun 2019-2020 sebagai berikut:

- Rasio dokter terhadap penduduk per kabupaten telah mencapai standar,
- Rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk pada tingkat provinsi telah mencapai standar, namun hanya 3 kabupaten yang telah memenuhi target nasional
- Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis sangat terbatas. Satu kabupaten tidak memiliki dokter gigi, dan 1 kabupaten lainnya hanya memiliki 1 dokter gigi.
- Rasio Perawat terhadap penduduk telah melampaui standar nasional sampai ke tingkat kabupaten, kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak
- Rasio Bidan terhadap penduduk telah mencapai standar baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
- Kyranfg dari separuh puskesmas di Provinsi Papua Barat memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian..

Kesehatan Keluarga

- Ibu hamil yang memperoleh pelayanan oleh tenaga kesehatan, maasih di bawah cakupan nasional. Hanya Kabupaten Kaimana dan Manokwari yang mencapai K4 di atas rata-rata nasional
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cukup tinggi; , dengan 3 kabupaten di bawah rata-rata provinsi.
- Cakupan kunjungan nifas lengkap masih di bawah capaian nasional, dengan 3 kabupaten yang cakupannya di bawah 10% yakni Kabupaten, Fakfak, Manokwari dan Teluk Wondama



- Cakupan Kunjungan Neonatal KN1 dan KN3 Papua Barat tahun 2020 masih rendah. Kabupaten dengan cakupan di bawah 10% antara lain Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama.
- Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) masih rendah. Dua kabupaten memiliki cakupan di bawah angka provinsi.
- Belum ada kampung/ kelurahan di Papua Barat yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)
- Prevalensi balita kurang berat badan dibandingkan umur dan balita stunting di Papua Barat di atas angka nasional, Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitive untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Demikian pula intervensi spesifik yang dijalankan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak belum mencapai target yang ditetapkan.
- Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil dan pada Wanita Tidak Hamil sangat tinggi, terutama di Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak (

Penyakit Menular

Cakupan pelayanan penyakit menular di Provinsi Papua Barat secara umum belum mencapai target-target yang ditetapkan, diantaranya:

- Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (*Treatment Coverage*, TC)
- Penambahan kasus baru HIV masih cukup tinggi.
- Target penemuan kasus pneumonia pada balita belum tercapai
- Cakupan pelayanan penderita diare pada balita di Papua Barat masih rendah
- *Annual Paracite Incidence* (API) Malaria Provinsi Papua Barat masih di atas 5/1000 penduduk

Penyakit Tidak Menular

- Diabetes Melitus menempati proporsi PTM terbesar, diikuti oleh Hipertensi.
- Di Provinsi Papua Barat, belum ada kabupaten yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas.

Kesehatan Lingkungan

- Di Provinsi Papua Barat baru 1 kabupaten yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- Papua Barat hingga tahun 2022 belum menjalankan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS),

Jaminan Kesehatan Nasional



Pada tahun 2020 Provinsi Papua Barat merupakan 1 dari 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC). Dengan cakupan peserta JKN tingkat provinsi mencapai 115,62%

SPM Bidang Kesehatan dan Renstra Kemenkes 2020-2024

Secara umum pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Provinsi Barat masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain yang memerlukan pendampingan dan perbaikan tata kelola dari pemerintah provinsi meliputi juga pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat.

Sementara itu, pencapaian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi juga sebagian besar belum terpenuhi. Renstra Kemenkes mencakup seluruh aspek pembangunan kesehatan, antara lain penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan peningkatan sumber daya kesehatan. Tabel IV.2 merupakan rangkuman dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang diuraikan di atas.

Tabel IV.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	1 Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Separuh puskesmas di Provinsi Papua Barat belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya
			2	Empat kabupaten di Provinsi Papua Barat belum memiliki rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan (masih sebagai FKTP)
			3	Rasio posyandu per jumlah balita masih rendah dan strata posyandu sebagian besar berstrata pratama dan madya
			4	Belum semua kabupaten melaksanakan Posbindu PTM, dan yang sudah terlaksana belum berjalan secara teratur
			5	Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine belum berjalan sesuai standar
		2 Jumlah dan kualitas tenaga	1	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter gigi dan tenaga preventif-



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata		promotif (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, ATLM, Kefarmasian dan Gizi)
			2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
			3	Kurang dari 10% puskesmas di Provinsi Papua Barat yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup
	3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
			2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, terutama di kabupaten yang memiliki wilayah sulit
			3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) masih tinggi di beberapa kabupaten
			4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
			5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten/kota yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
			6	Belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas.
			7	Belum ada kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
			8	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) baru berjalan di 1 kabupaten dan Kabupaten/ Kota Sehat (KSS) belum berjalan
			9	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
			10	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
					masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Papua Barat masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK		Tingginya prevalensi balita stunting	1	Belum semua kabupaten/ kota menjalankan surveilans gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
				3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan stunting masih rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, merupakan jalan yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat merupakan inisiatif awal untuk memberikan solusi infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian. Namun, di luar proyek tersebut yang sekarang masih dalam proyek penggarapan, terdapat permasalahan-permasalahan lain, utamanya dalam konteks infrastruktur. Berdasarkan Tabel IV.3, terdapat empat permasalahan yang teridentifikasi terkait dengan infrastruktur. Pertama, mengenai belum memadainya kualitas infrastruktur jaringan transportasi (yaitu jalan, dan jembatan). Masalah ini menjadi penting, karena jalan dan jembatan merupakan prasarana primer dalam memfasilitasi mobilitas penduduk, termasuk mobilitas ke akses-akses pelayanan. Selain itu, arahan pembangunan fisik ke depan juga harus diimbangi dengan perencanaan saluran drainase dan pengendali banjir, untuk mencegah adanya genangan atau bahkan bencana banjir.

Kedua, belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar untuk penyediaan air baku dan air bersih/air minum layak. Perhatian lebih besar harus difokuskan kepada penyediaan sumber air minum layak. Data statistik membuktikan bahwa penduduk yang bisa mengakses sumber air minum layak sangat rendah, yaitu di kisaran angka 30% saja. Ketiga, kualitas infrastruktur sanitasi layak juga perlu menjadi perhatian, mengingat aspek tersebut ada didalam SPM. Meskipun angka cakupan sanitasi layak di Papua Barat meningkat selama lima tahun terakhir, tapi kesenjangan antar kabupaten sangat terlihat dalam data statistik. Adapun kabupaten yang memiliki cakupan sanitasi terburuk di wilayah Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Maybrat dan Sorong Selatan. Ke-empat, tata Kelola untuk



penyediaan infrastruktur juga menjadi kunci untuk mewujudkan adanya pembangunan infrastruktur fisik. Tata Kelola mencakup koordinasi antar pihak terkait, dengan alokasi pembiayaan.

Rumusan masalah poin 5 dalam Tabel IV.3 merupakan rumusan masalah untuk penataan ruang. Pada dasarnya, penataan ruang di Papua Barat masih memerlukan banyak intervensi untuk pengelolaan yang baik, dan hal tersebut hanya bisa akan dicapai apabila ada sistem pendataan dan evaluasi yang baik.

Tabel IV.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan jembatan) serta sistem pengendali aliran air.	1	Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
			2	Kurangnya kapasitas OPD untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
			3	Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
			4	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
			5	Kurangnya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
			6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua Barat terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
			7	Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak disepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir.
			8	Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
			9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase
	2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
			2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih	3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber sumber air baku
	3	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	1	Belum adanya sarana pengolahan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat
			2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			4	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
	4	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
	5	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Barat
			5	Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses permukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang menjadi komponen pembangun dalam pemenuhan kriteria rumah layak huni. Dari standar rumah layak huni yang dipakai oleh BPS, menunjukkan masih adanya keluarga yang tinggal dengan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar layak. Selain itu, ketersediaan utilitas seperti sanitasi juga menjadi fokus perhatian utama di Papua Barat. Data mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak hanya berkisar diantara 20% - 30% saja berdasarkan data tahun 2017-2021. Tentunya hal ini masih dibawah



standar SPM, dimana penyediaan sanitasi seharusnya sudah mencapai 60% pada tahun 2019. Ditambah lagi, cakupan penataan permukiman kumuh juga masih sangat rendah.

Dengan kondisi geografis yang ekstrem di mayoritas daerah di Papua Barat, indeks kemahalan konstruksi juga menjadi sangat tinggi. Kegiatan mengangkut material bangunan membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan menjadikan proyek pemenuhan rumah layak huni membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, pemerintah daerah masih terkendala dengan permasalahan hak ulayat dalam pengadaan lahan (akan dijelaskan lebih lanjut di bidang urusan pertanahan).

Tabel IV.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	1	Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1	Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga
			2	Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
			3	Rendahnya kepemilikan rumah dengan kontruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan
			4	Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, dengan penanganan yang kurang optimal
			5	Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP)
	2	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan	1	Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Papua Barat
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		3	Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.5 Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketentraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.	1	Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
			2	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
			3	Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
			4	Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
			5	Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
			6	Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama
			7	Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	2	Belum optimalnya penyelenggaraan stabilitas politik daerah	1	Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
			2	Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi
			3	Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat
			4	Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
	3	Tingginya risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	1	Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
				Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas risiko multi bencana tinggi
			2	Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
			5	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
			6	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani dengan baik
			7	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.6.



**Tabel IV.6 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Barat**

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1	Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi risiko bencana sosial maupun bencana alam	1	Tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan
			2	Masih banyaknya kelompok orang asli papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan
			3	Kekosongan bantuan sosial atau penanganan risiko sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti pada perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat
			4	Belum optimalnya pemberian paket bantuan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS
			5	Belum tersedianya peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2	Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan perlindungan sosial	1	Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
			2	Belum tersedianya data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perlindungan sosial (bencana sosial, bencana alam, dan masyarakat kurang mampu)
			3	Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpilah OAP dan non-OAP by name by address secara berkala yang dilakukan di tingkat kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
	3	Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1	Belum memadainya SDM yang terdidik/terlatih di bidang rehabilitasi sosial
			2	Keterbatasan pendampingan pelayanan untuk penduduk miskin dan rentan, serta strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
	4	Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan	1	Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung pada APBN dan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi
			2 Kurangnya koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

4.1.2.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah, dimana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih Banyak penduduk Angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasikan masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumberdaya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel IV.7 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel IV.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja	1 Belum optimalnya pengembangan	1 Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
dalam perekonomian wilayah		kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja		produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
			2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia
			3	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Barat yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Barat hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja
			4	Longgarnya ikatan kerja (engagement) serta tingginya kecenderungan pencarian kerja baru/ meninggalkan pekerjaan (turnover rate) yang dapat meningkatkan risiko untuk tidak bekerja
	2	Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
			2	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
			3	Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal
	3	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1	Belum terealisasinya pemetaan/ data dukung kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Barat
			2	Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
			3	Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
					sudah berinvestasi di Provinsi Papua Barat baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
2	Belum optimalnya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenaga-kerjaan	1	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
				2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di perdesaan yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perdesaan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.2 **Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Barat masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Barat. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1	Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.	
			2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah	
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan	
			4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal	



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
			1	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akte kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; c. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreatifitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
			2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak
			3	Masih terdapat kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur
			4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga
			5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
			6	Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak
			7	Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja
			8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
			penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1 Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			2 Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3 Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi
			4 Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	1 Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi
			2 Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3 Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata	1 Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1 2 salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.4 Urusan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Barat. Pelayanan administrasi pertanahan juga bukan hal yang mudah di Papua Barat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel IV.10.

Tabel IV.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat	1 Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1 Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
		2 Belum adanya <i>database</i> /pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Barat
		3 Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
		4 Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
		5 Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral
	2 Belum optimalnya pengelolaan	1 Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		tanah ulayat masyarakat hukum adat	2	Belum maksimalnya pengakuan negara/pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat
			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel IV.11.

Tabel IV.11 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3	Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan	1	Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	2	Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai
			3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi
			5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (<i>reduce, reuse and recycle</i>).
			6	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
			7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.6 **Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi hak-nya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Barat. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel IV.12.



Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Barat meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakte nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumberdaya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel IV.12

Tabel IV.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan nonOAP belum 100%
			4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata





POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Barat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kedepan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.13.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kebang balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Barat masih belum optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel IV.13.



Tabel IV.13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana	1	Rendahnya akseptor KB aktif	1	Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
			2	Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB
			3	Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
			4	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang
			5	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
			6	Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB
	2	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Pernikahan usia anak
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Barat, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut.



Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.14.

Tabel IV.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis sumber daya kampung	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas pembangunan kampung.	1	Masih lemahnya pemahaman mayarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran kepada setiap aparat kampung.
			4	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
			5	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber pendapatan kampung
			6	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung.
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
			2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrument kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimanlnya	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		pembangunan kampung		kampung sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus
			2	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
			3	Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data by name by address terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung
			4	Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakefektifan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.15.

Tabel IV.15 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	1	Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
			2	Kurang maksimalnya keberadaan titik terminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
			3	Belum optimalnya fungsi fasilitas terminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
			4	Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
			5	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar
			7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan
	3	Masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
	4	Belum optimalnya tata kelola urusan perhubungan	1	Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikai dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.16.

Tabel IV.16 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Belum optimalnya kualitas	1	Belum optimalnya penggunaan	1	Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	2	Masih sedikitnya SDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang menguasai keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/managemen sistem E-Government termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem e-Government, serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				4	Belum diterapkannya pengamanan dan persandian terhadap sistem teknologi dan informasi pemerintah
				5	Belum adanya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian
				6	Belum optimalnya pelebagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung.
				7	Belum optimalnya pengadaan alat jurnalistik
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat
				2	Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah
				3	Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.11 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah



pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.17.

**Tabel IV.17 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Barat**

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1 Lemahnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Barat masih rendah
			2	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
			3	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
		2 Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar	1	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1 Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM	2	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
			1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
			2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
			4	Sulitnya kondisi geografis sehingga UMKM mengalami kesulitan mendistribusikan produk
			5	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
			6	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
			7	Masih rendahnya partisipasi Koperasi dalam aktifitas pertambangan rakyat
		2 Lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM	1	Minimnya modal usaha sehingga UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal
				3	Mayoritas UMK merupakan UMK yang tidak berbadan usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.18.

Tabel IV.18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan <i>investor needs</i>	1	Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat	
			2	Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah	
			3	Belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Barat	
			4	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS	
	2	Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1	Belum optimalnya perkembangan pengusaha asli papua dalam kegiatan ekonomi	
			2	Masih tingginya pelanggaran terhadap izin lokasi	
			3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha	
			4	Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah	
	3	Lemahnya tata kelola penanaman modal	1	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan	
			2	Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN	
			3	Belum optimalnya promosi investasi daerah	



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		4	Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penanaman modal antar pusat dan daerah
	4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penanaman modal	1	Penundaan investasi oleh investor karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua Barat. Telah tersedia fasilitas olah raga yang tersebar di seluruh kabupaten, namun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Barat dalam kompetisi-kompetisi olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Tabel IV.19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pengembangan daya saing pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga	1 Belum optimalnya kebudayaan dan pembinaan prestasi olahraga	1	Keterbatasan SDM pertandingan
		2	Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya
		3	Kurangnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
		4	Prestasi dan daya saing keolahragaan yang belum maksimal
		5	Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
		6	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota
	2 Belum optimalnya peran sosial pemuda	1	Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga
		2	Budaya premanisme di kalangan pemuda



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
			3	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika
	3	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuai kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.14 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Papua Barat memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Papua Barat dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel IV.20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	1	Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1	Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya
			2	Promosi budaya yang belum memadai melalui festival dan event-event budaya di tingkat kabupaten dan propinsi Papua Barat.
			3	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
			4	Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul, arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
	2	Kurangnya pelestarian budaya asli Papua Barat.	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya
			2	Belum dilestarikannya arsitektur rumah adat kaki seribu sebagai simbol arsitektur tradisional yang bernilai bagi pengembangan budaya dan pariwisata.



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
			3	Belum adanya roadmap dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Papua Barat dimasa yang akan datang.
			4	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
			5	Belum adanya museum etnografi sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya masyarakat
	3	Belum adanya pemetaan batas-batas ulayat adat ditingkat marga dan keret di kampung	1	Pemahaman batas-batas adat masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis atau dikaji dalam pemetaan, sehingga masih rawan konflik tanah adat antar kampung.
			2	Belum optimalnya pembinaan adat kepada generasi muda berkenan pemahaman tentang certa sejarah asal-usul dan batas-batas hak ulayat adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.

4.1.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.21.

Tabel IV.21 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan	1	Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
			2	Masih rendahnya teknologi perikanan budidaya
			3	Masih rendahnya promosi hasil budidaya perikanan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
kelautan yang berkelanjutan			4	Kurangnya pemahaman terkait teknik budidaya
			5	Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan
			6	Belum efektifnya fungsi insfrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	2	Lemahnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan	1	Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
	3	Belum optimalnya tata kelola sumber daya perikanan	1	Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
			2	Belum terbentuknya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.22.

Tabel IV.22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	1	Belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan makan dan minum untuk wisatawan (homestay, resort dan restaurant)
			2	Belum tersedianya sarana prasarana pariwisata, termasuk fasilitas penunjang atraksi wisata (gazebo, toilet, spot foto, pos jaga dan menara pandang)
			3	Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna endemik
			4	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya
			5	Belum optimalnya penguatan kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pemberdayaan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	2	Belum optimalnya pemasaran pariwisata		masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan
			1	Strategi komunikasi pemasaran belum terpadu sehingga branding pariwisata belum terpublikasi secara optimal
			2	Belum tersedianya layanan informasi pariwisata
	3	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kepariwisataan	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra pariwisata
			1	Kapasitas SDM pariwisata masih terbatas
			2	Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
			3	Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktifitas komoditas pertanian, pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.23.

Tabel IV.23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
1	Belum optimalnya kontribusi subsektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan holtikultura	1	Masih kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura
				2	Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik
				3	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan pertanian masyarakat



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping petani tidak memadai
				3	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok tani untuk menjadi wadah <i>sharring knowledge</i> petani
PERKEBUNAN					
2	Belum optimalnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perkebunan	1	Masih kecilnya skala usaha perkebunan
				2	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				3	Keterbatasan sumber bibit perkebunan yang berkualitas
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan perkebunan masyarakat
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas perkebunan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil perkebunan rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai
				3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
3	Belum optimalnya kontribusi	1	Belum optimalnya produksi dan	1	Kurangnya distribusi bibit ternak
				2	Kurang lengkapnya pendataan hewan ternak



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah		produktifitas peternakan	3	Belum adanya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)
	2	Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	1	Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten
	2	Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
			2	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	3	Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan	1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
			2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah sharring knowledge petani
			3	Belum adanya pembinaan bagi kelompok ternak

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa Papua Barat memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumsukan permasalahan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel IV.24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang memastikan	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor	1	Perubahan lahan yang tidak produktif menjadi produktif masih rendah
			2	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
pengelolaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan		kehutanan dan lahan		
	2	Belum optimalnya penjagaan dan pengawasan terhadap hutan dan kawasan lindung	1	Belum optimalnya pengawasan terhadap ekosistem hutan serta kawasan lindung
			2	Belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam hayati
	3	Nilai tambah hasil kehutanan masih rendah	1	Pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan masih rendah
			2	Dukungan SDM pendamping serta sarana dan prasarana masih terbatas
			3	Jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat sangat terbatas
			4	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel IV.25.

Tabel IV.25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	1	Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal maupun antarsektor	1	Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
				2	Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
				3	Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang
				4	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
				5	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
		2	Rendahnya akses masyarakat	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		terhadap sumber daya energi listrik	2	Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
			3	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.26.

Tabel IV.26 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1	Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
			2	Besarnya biaya transportasi untuk distribusi perdagangan
			3	Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
			4	Minimnya kualitas pasar rakyat dalam meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat
	2	Belum adanya standar mutu komoditas	1	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
			2	Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis berbasis SDA
			3	Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan
	3	Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1	Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
			2	Belum adanya jaminan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.3.7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Papua Barat terdapat pada Tabel IV.27.

Tabel IV.27 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	1	Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu
			2	Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/ persampahan dalam pengembangan industri
			3	Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2	Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1	Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
			2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
	3	Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
			2	Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4 Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

4.1.4.1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU No 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta



pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; (4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.28.

**Tabel IV.28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Barat**

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kordinasi kewenangan pemerintahan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan umum	1	Kuatnya prinsip <i>money follow function</i> dan <i>money follow organization</i> , serta belum efektifnya implementasi <i>money follow programme</i>
			2	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra strategis lainnya
			3	Belum optimalnya kordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik, kelurahan dan kampung
			4	Belum optimalnya kordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus Papua
			5	Belum optimalnya kordinasi penyelenggaraan program-program Otonomi Khusus
			6	Belum efektifnya penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan khusus yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan Otsus Papua Barat
			7	Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP
			8	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan
			9	Belum optimalnya pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi maupun kabupaeten/kota
			10	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah
			11	Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program otonomi khusus yang mengarah pada pemberdayaan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
				perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			2	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			3	Belum memadainya pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah
			4	Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i>
			6	Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi
			7	Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis dengan adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Barat terdapat pada Tabel IV.29.

Tabel IV.29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1	Ketersediaan ASN di Provinsi Papua Barat belum mencukupi kebutuhan daerah
			2	Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
			3	Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
			4	Masih kurangnya Penempatan ASN pada Jabatan tertentu berdasarkan kompetensi jabatan



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		5	Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Pimpinan
		6	Rendahnya jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar CPNS
		7	Belum terbentuknya kebijakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
		8	Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
	2	1	Belum efektifnya sosialisasi sistem penilaian beban kerja pegawai
		2	Belum berkembangnya sistem reward untuk ASN berprestasi dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		3	Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
	3	1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
		2	Model <i>e-government</i> masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi
		3	Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Papua Barat terdapat pada Tabel IV.30.

Tabel IV.30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
			2	Belum akuratnya database pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
			3	Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
			4	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
			2	Penyusunan APBD yang tidak tepat waktu
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Prinsip <i>value for money</i> dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan
			6	Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah
	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus
			2	Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus
			3	Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomi Khusus
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
			2	Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Papua Barat terdapat dalam Tabel IV.31 berikut.

Tabel IV.31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan	1	Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
perencanaan pembangunan dan penataan ruang		yang berorientasi hasil	2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
			3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
			4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
			5	Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus konstekstual Papua Barat
	2	Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1	Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal
			2	Lemahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanakannya secara efektif dan efisien
	3	Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan Otonomi Khusus Papua	1	Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SAIK+ yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
			2	Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun 2021
			3	Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung. Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
			4	Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
	4	Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
			2	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
			3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
			4	Belum optimalnya penjangkauan aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
			5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
			6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound</i>) dan terstruktur (ter-cascading)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel IV.32.

Tabel IV.32 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1	Belum optimalnya rewiu terhadap dokumen Perencanaan, Anggaran dan dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
			2	Masih rendahnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Daerah
			3	Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
			4	Belum optimalnya pengawasan dan audit penyelenggaraan program program Otsus
			5	Belum terbentuknya wadah/majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Saberpungli dalam rangka penyelesaian kerugian daerah serta menunjang pelayanan Publik



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	2 Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan pembangunan daerah	1 Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan rendahnya kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan
		2 Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, mark up harga, kurang volume pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat waktu
		3 SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2 ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua Barat dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua Barat. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Provinsi Papua Barat terbagi menjadi isu strategis internasional, isu kebijakan nasional, dan isu wilayah Papua Barat sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga



dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;	10. Mengurangi ketimpangan;
2. Mengakhiri kelaparan;	11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;	12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
4. Pendidikan bermutu;	13. Penanganan perubahan iklim;
5. Kesetaraan gender;	14. Menjaga ekosistem laut;
6. Akses air bersih dan sanitasi;	15. Menjaga ekosistem darat;
7. Energi bersih dan terjangkau;	16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;	17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
9. Infrastruktur, industri dan inovasi;	

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk **menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional**. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam **Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terdapat 236 Indikator SDGs yang merupakan kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil indentifikasi awal terkait kesesuaian indikator SDGs dengan kondisi kewilayahan Papua Barat, maka terdapat 224 (95%) Indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan pencapaian SDGs di Provinsi Papua Barat.



Gambar IV.1 Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

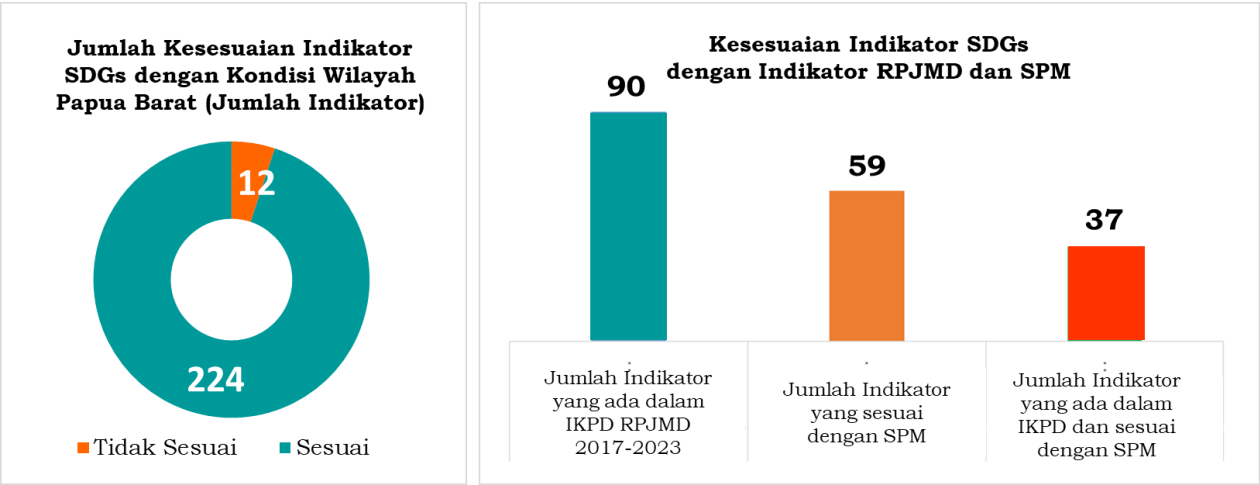


Sumber: United Nations, 2005

Selanjutnya, setelah melakukan inventarisasi kesesuaian antar indikator SDGs dan Indikator RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka dari 224 indikator SDGs terdapat 90 (40%) indikator SDGs yang telah tertuang dalam indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) dan 59 indikator SDGs yang telah sesuai dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari 90 indikator SDGs yang telah tertuang dalam IKPD terdapat 37 indikator SDGs yang telah selaras dengan indikator SPM.

Untuk memastikan pencapaian seluruh target target indikator SDGs di Papua Barat, maka diperlukannya penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs yang selaras dengan RPD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini akan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

Gambar IV.2 Kesesuaian Indikator SDGs dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022



Sumber: hasil analisis, 2022

4.2.1.2 Pandemi COVID-19

WHO melaporkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga awal 2023 telah merenggut 6,9 juta jiwa dari 758 juta orang di seluruh dunia yang telah terinfeksi dalam 3 tahun sejak kemunculannya di China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, hingga akhir Februari 2023 tercatat 6,7 juta kasus dengan kematian 161 ribu jiwa. Jumlah kasus kematian ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-11 di dunia (<https://covid19.who.int>).

Sementara di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi Covid-19 mencapai 29.726 orang, dengan kematian tercatat 218 jiwa. Jumlah ini menghasilkan angka kematian kasus (Case Fatality Rate, CFR) Covid-19 di Papua Barat sebesar 1,1%, lebih rendah daripada angka nasional yakni 2,4% dan hampir tinggi dibandingkan dengan angka global (0,9%).

Di antara 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 kasus kumulatif terbanyak dilaporkan di Kabupaten Manokwari (10.603). Sementara untuk kasus aktif yang masih dalam perawatan atau isolasi pada akhir Februari 2023 sudah sangat sedikit, yakni 2 orang masing-masing 1 orang di Manokwari dan Teluk Bintuni. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, Manokwari juga menduduki peringkat tertinggi dengan proporsi kasus 5,380 per 100.000 penduduk, disusul Teluk Bintuni dengan proporsi 5.205 per 100.000 penduduk. Kabupaten pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan adalah wilayah yang paling sedikit melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19, Kabupaten yang melaporkan kematian karena Covid-19 terbanyak hingga akhir Februari 2022 adalah juga Kabupaten Manokwari (10.014 kematian). Namun jika dihitung CFR-nya, maka angka tertinggi diperoleh di Kabupaten Kaimana.

Respon yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggapi pandemi ini antara lain upaya pencegahan penularan secara individu, pembatasan penyebaran penyakit melalui asesmen berkala dan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelacakan kasus, penanganan kasus, serta pemberian vaksinasi secara masif.

Hingga 28 Februari 2023, Papua Barat telah mencapai cakupan vaksinasi sebesar 66,7% dosis pertama, 49,8% dosis kedua dan 22,3% dosis ketiga/booster pertama. Secara nasional hingga awal Maret 2023 telah tercapai 74,5% vaksinasi dosis kedua, lebih tinggi daripada cakupan global yang mencatat angka 65,1%.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini berdampak bukan saja pada bidang kesehatan, tetapi pada hampir semua sektor kehidupan. Dampak negatif covid-19 terasa di seluruh perekonomian dunia, yang membawa





kontraksi yang sangat buruk termasuk Indonesia dan Papua Barat khususnya. Salah satu indikatornya, PDRB ADHB Papua Barat yang sempat mencapai pada tahun 2018 sebesar 10,94%, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar -0,93%.

Sektor-sektor yang mengalami penurunan ekonomi selama pandemi antara lain transportasi, akomodasi dan kuliner, perdagangan, jasa perusahaan, listrik dan gas, serta pertanian dan perikanan. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada bidang sosial ekonomi, antara lain terjadinya PHK di banyak industri dan pengurangan pendapatan yang diikuti dengan menurunnya daya beli. Pada sektor pendidikan, dengan diambilnya kebijakan belajar di rumah secara online diikuti dengan berbagai permasalahan, mulai dari sarana, kebutuhan jaringan internet, penguasaan teknologi yang masih rendah.

Dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, perencanaan pembangunan pun wajib mempertimbangkan segala faktor yang terkait dan/atau terdampak pandemi. Selain itu upaya penanggulangan dan pemulihan yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung masih tetap diperlukan hingga kondisi kehidupan masyarakat telah beradaptasi dengan Covid-19 sebagai salah satu penyakit endemis.

4.2.1.3 Pemanasan Global

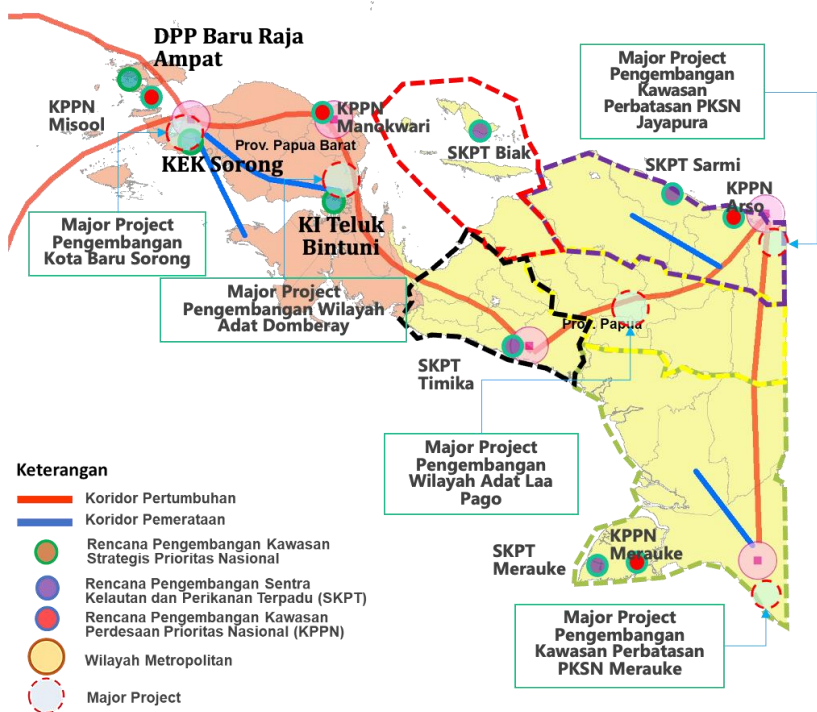
Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam upaya anticipasi perubahan iklim, diperlukan adanya pengawasan peruntukan lahan agar porsi lahan hijau tetap terjaga sebagai bagian agenda Bidang Urusan Penataan Ruang.

4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 tentang Pembangunan Wilayah Papua Barat

Untuk lima tahun mendatang, rencana pembangunan wilayah Papua Barat telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18/2020. Dalam narasi RPJMN, pembangunan wilayah Papua Barat di akomodasi pada Bab III dengan tajuk “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan”. Di level nasional, agenda utama pada lima tahun mendatang di tanah papua secara umum menekankan kepada pertumbuhan ekonomi untuk menjamin pemerataan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Lebih detilnya mengenai prioritas pembangunan Papua Barat dibahas pada Lampiran IV RPJMN 2020-2024.

Gambar IV.3 Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan Wilayah Papua dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Tabel IV.33 Pemetaan Kabupaten di Provinsi Papua Barat berdasarkan Pendekatan Pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan

Pendekatan Pembangunan	Kabupaten/Kota
Pertumbuhan	Kabupaten Manokwari
	Kabupaten Manokwari Selatan
	Kabupaten Teluk Wondama
Pemerataan	Kabupaten Pegunungan Arfak
	Kabupaten Teluk Bintuni
	Kabupaten Kaimana
	Kabupaten Fakfak

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pendekatan yang diambil dalam pembangunan wilayah dalam RPJMN menekankan adanya integrasi antara pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu, dalam RPJMN telah ditetapkan dua koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan koridor pertumbuhan merupakan pembangunan dengan mengandalkan basis keunggulan di suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Sedangkan pembangunan koridor pemerataan dilakukan dengan mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar koridor pertumbuhan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Gambar IV.3 akan memberikan ilustrasi peta dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan arahan strategi pengembangan wilayah Papua. Selain itu, Tabel IV.33 akan menunjukan arahan koridor pengembangan wilayah di Papua Barat. Berdasarkan Tabel IV.33 wilayah yang termasuk koridor pertumbuhan adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wondama. Adapun wilayah yang termasuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak.

Terlepas dari strategi pertumbuhan dan pemerataan, kebutuhan pembangunan wilayah tanah papua berdasarkan RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan sarana pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi secara merata. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
- 2. Keterkaitan antarwilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumberdaya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Hal ini dilakukan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah.
- 3. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik termasuk pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk penunjang akselerasi pembangunan.

Tabel IV.34 Prioritas Wilayah di Papua Barat

Tema Pembangunan	Arah Pembangunan di Papua Barat
Pengembangan sektor unggulan	Pengembangan komoditas unggulan wilayah papua barat: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, batubara, minyak, dan gas bumi
Pengembangan Kawasan Strategis	Pengembangan 34 SMK di Provinsi Papua Barat
Pengembangan Daerah Tertinggal,	1. Percepatan di Papua Barat dilakukan dengan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas



Tema Pembangunan	Arah Pembangunan di Papua Barat
Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses di kabupaten tertinggal. Adapun kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor wilayah pertumbuhan; 2. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh kabupaten/kota 3. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 sebesar 16,05% di Provinsi Papua Barat
Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Barat	1. Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung 2. Optimalisasi SDM unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan Kementrian/Lembaga 3. Penguatan Lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat 4. Pemberdayaan masyarakat adat termasuk Lembaga perempuan dan anak, percepatan pembangunan Kawasan kampung 5. Pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua 6. Pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal 7. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah 8. Pengembangan dan penguatan peran distrik/kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten 9. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Sumber: RPJMN 2020-2024

4.2.2.2 Kebijakan Otonomi Khusus

Dasar hukum penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pokok pemberian otonomi khusus adalah pengakuan dan penghormatan karakteristik sebuah daerah yang spesifik, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat integrasi nasional yang ditempuh melalui penghargaan secara setara atas keragaman kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan pemberian otonomi khusus adalah sebagai upaya untuk memenuhi rasa





keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 maka ditetapkan peraturan turunannya yaitu **PP Nomor 106 Tahun 2021** tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, serta **PP Nomor 107 Tahun 2021** tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Secara umum terdapat 5 norma pengaturan dalam PP No.106 Tahun 2021 dan PP No.107 Tahun 2021, yaitu:

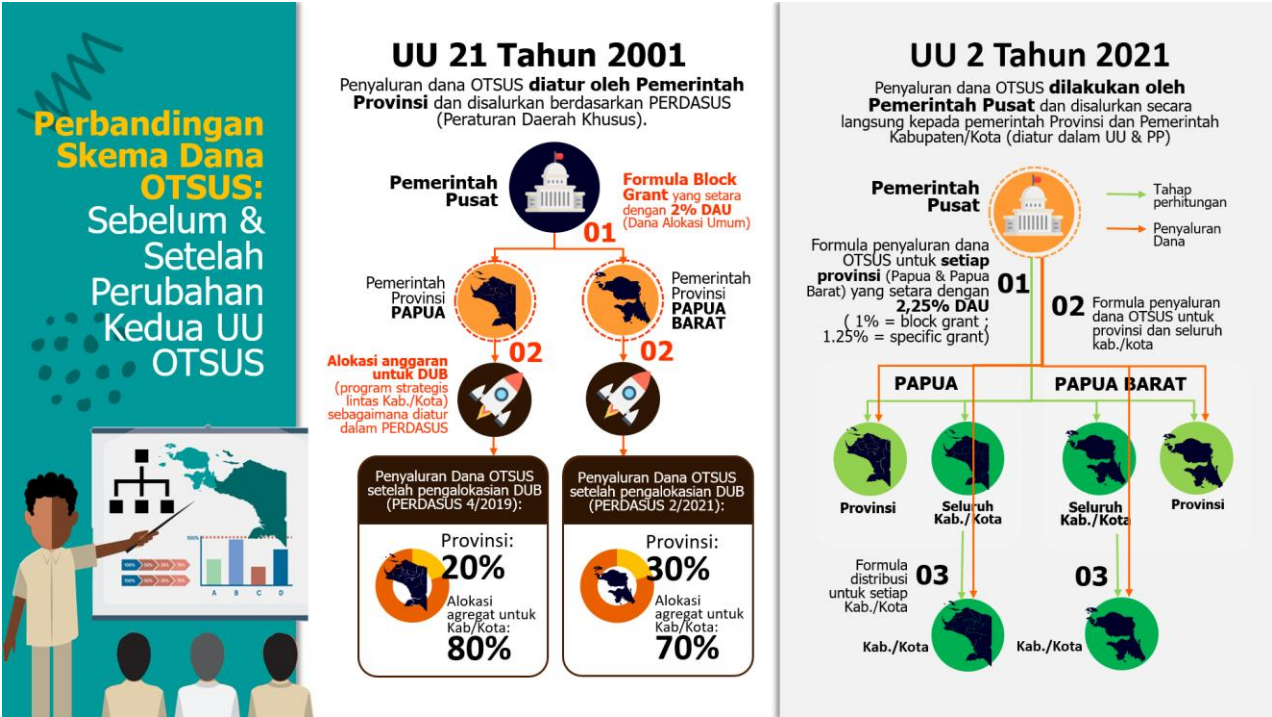
1. Kewenangan khusus;
2. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
3. DPRP dan DPRK yang diangkat;
4. Keuangan Otsus dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP); serta
5. Pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat perubahan kebijakan penyaluran dan kewenangan yang signifikan pada pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 dibandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2% DAU) diatur oleh Pemerintah Provinsi dan disalurkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2,25% DAU) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan disalurkan secara langsung kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 serta PP Nomor 107 Tahun 2021 (lihat Gambar IV.4). Hal ini berimplikasi pada menguatnya peran kabupaten/kota termasuk Kabupaten Fakfak dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus, peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam provinsi secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga kesenjangan antara Provinsi Papua Barat dan daerah lain bisa dimoderasi, dan hak-hak dasar penduduk Asli Papua mulai bisa dipenuhi. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menekankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang harus bertumpu pada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum,

demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.

**Gambar IV.4 Perbandingan Skema Dana Otonomi Khusus:
Sebelum dan Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus**



Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Untuk menjalankan mandat tersebut, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang menyasar OAP, pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) agar seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan tepat sasaran. Beberapa kabupaten telah menjalankan kegiatan tersebut, sehingga cakupan data yang terkumpul relatif lengkap. Sedangkan kabupaten/kota yang lain masih belum memahami dan karenanya belum dapat melaksanakan SAIK+. Ke depan perlu kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung agar kegiatan yang sangat penting ini dapat terlaksana dengan baik dan cakupan data mencapai 100%.

Otonomi khusus yang menjadi basis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat mencakup aspek kewenangan dan tugas pemerintahan yang sangat luas, bukan hanya aspek pemerintahan umum yang berlaku di semua tempat, namun aspek-aspek spesifik yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek-aspek kewenangan yang secara spesifik harus menjadi perhatian pemerintah provinsi mencakup perlindungan dan pengembangan masyarakat adat, pengembangan ekonomi orang asli Papua, keterjaminan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, konservasi lingkungan hidup, dan hubungan antar umat beragama yang



bersendi toleransi/ penghargaan. Kewenangan-kewenangan tersebut secara spesifik menekankan pada perlakuan yang bersifat afirmatif untuk masyarakat asli Papua. Bentuk afirmasi lain berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan kepemimpinan politik, dimana Orang Asli Papua memiliki saluran yang lebih luas melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan prioritas dalam kepemimpinan politik di provinsi dan kabupaten/kota.

4.2.2.3 Arahan Draft Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)

Disahkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi pada dirumuskannya langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041. Adapun RAPPP merupakan rencana aksi nasional 5 (lima) tahunan yang memuat sinergi program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.

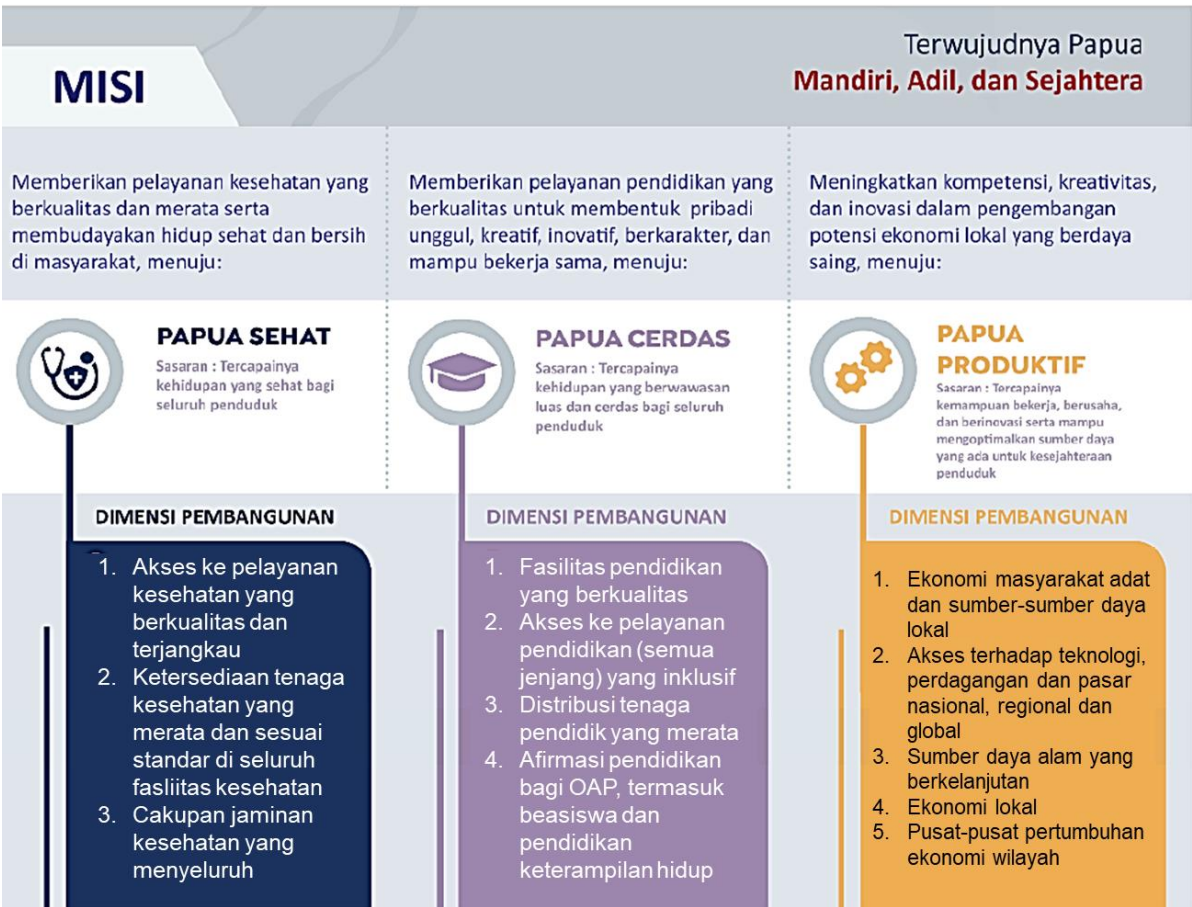
Percepatan pembangunan Papua Barat ke depan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu “*Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera*”. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi tersebut terdapat misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

1. **Misi-1**, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, **menuju Papua Sehat**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi *stunting*.
2. **Misi-2**, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, **menuju Papua Cerdas**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang

berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

3. **Misi-3**, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, **menuju Papua Produktif**, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar IV.5 Visi, Misi dan Dimensi Pembangunan dalam RIPPP dan RAPPP



Sumber: Draft RIPPP 2022-2041

4.2.3 Isu Strategis Wilayah Papua Barat

Setelah dilakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua Barat dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah pada 2023-2026. Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi 8 isu strategis pembangunan dan 4 isu strategis lintas sektor (*cross cutting*) di Papua Barat sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar IV.6.



Gambar IV.6 Isu Strategis Pembangunan dan Isu Strategis lintas Sektor (Cross Cutting) Papua Barat 2023-2026



Isu strategis lintas sektor (*cross cutting*) di Papua Barat terdiri atas 5 isu, yaitu:

1. Papua Barat sebagai provinsi Pembangunan Perkelanjutan
2. Afirmasi dan pemberdayaan OAP;
3. Pengentasan kemiskinan ekstrem;
4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal; serta
5. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan Kawasan kota baru.

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah & pelaksanaan OTSUS

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam berbagai urusan dan bidang kewenangan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima, disamping adanya kebijakan-kebijakan kontekstual khusus penyelenggaraan Pembangunan di Papua Barat terkait dengan kebijakan otonomi khusus Papua.

Otonomi Khusus di Papua telah dilaksanakan selama 20 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua tersebut berdampak pada kemajuan

pembangunan dari sisi ekonomi, tatanan demokrasi, sosial, kebudayaan, serta pelayanan publik oleh pemerintah di Papua. Namun demikian, meski telah berjalan 20 tahun, pemberian Otonomi Khusus tersebut belum mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umum pembangunan di Wilayah Papua, antara lain (1) rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia; (2) belum berkembangnya pengelolaan potensi unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3) rendahnya aksesibilitas, konektivitas wilayah, sarana-prasarana dasar perumahan, elektrifikasi, air minum, telekomunikasi dan informatika; (4) belum terjaganya kualitas lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan; serta (5) rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan serta tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan secara matang, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Adanya perubahan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus secara akuntabel, efektif dan efisien, transparan, serta tepat sasaran. Selain itu, perubahan Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan alokasi dana Otonomi Khusus dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Wilayah Papua yang pada akhirnya akan mewujudkan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan meningkatkan kinerja, yang dimulai





dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik hingga ke kampung-kampung. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya regulasi mengenai representasi OAP di DPRP dan DPRK. Provinsi harus mempersiapkan Pansel, wilayah pemilihan, kriteria bakal calon, serta meningkatkan kapasitas MRP dan DPRP/DPRK hasil pengangkatan.

2. Rendahnya akses & kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan & kesehatan) serta perlindungan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan

Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi isu yang strategis bukan saja karena pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang, tetapi juga karena dengan pencapaian yang baik atas indikator-indikator yang ditetapkan dalam kedua bidang urusan ini merupakan sumbangan terbesar untuk keberhasilan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif menjadi arah kebijakan dan strategi dalam RIPPP 2022-2041.

Dalam bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator untuk mengukur dampak pembangunan bidang pendidikan. Isu-isu yang perlu ditangani antara lain peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penjaminan mutu dan tatakelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Barat saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih

terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal. Selain ke-3 kondisi tersebut, tingginya prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat juga merupakan isu strategis mengingat stunting adalah kondisi yang dapat dicegah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Oleh karenanya prevalensi stunting juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di Papua Barat, bersama dengan Angka Harapan Hidup.

Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tatakelola fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal secara produktif, inovatif, berkelanjutan dan inklusif

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multistakeholder di Papua Barat. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi periode sebelumnya menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya sektor penggerak ekonomi di Papua Barat dalam mengungkit kesejahteraan rumah tangga masyarakat Papua terutama OAP, serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan intervensi program konvergen dengan memperhatikan lokus wilayah prioritas kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat miskin ekstrem di Papua Barat, dan memfokuskan kepada 5 (lima) wilayah prioritas melalui Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Beberapa konvergensi instrument kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan **dan perlu dilanjutkan** di 5 kabupaten prioritas dengan jumlah penduduk 12.360 orang yang tersebar di 34 distrik dan 185 kampung di Papua Barat pada tahun 2021 yaitu:

1. Menurunkan Beban Pengeluaran melalui beberapa Program Strategis antara lain:



- 
- a. Program strategis peningkatan pembangunan kampung (PROSPPEK) Provinsi Papua Barat;
 - b. Program Jaminan Kesehatan, terutama untuk OAP;
 - c. Program Pemberdayaan Sosial;
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terutama untuk OAP;
 - e. Program “Tangan Kasih” (pekerja formal, informal, disabilitas dan lintas agama);
 - f. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Meningkatkan Pendapatan melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Pemberdayaan UMKM, terutama UMKM OAP
 - b. Pengembangan ekonomi Lokal; dan
 - c. Penyuluhan pertanian
 3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas lokal serta berbasis kampung yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Di samping itu perhatian juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Tingkat inflasi Provinsi Papua Barat berada di atas angka nasional, dengan penyumbang inflasi terbesar adalah pangan (beras, cabe, tembakau, ikan laut). Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah tentang ketersediaan stok dan alur distribusi belum diimbangi kerjasama antar daerah dalam pengendalian harga, serta belum didukung pengadaan fasilitas penyimpanan bahan pangan.

4. Ketahanan wilayah dan kota yang rentan atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana

Derajat kerentanan wilayah dan kota dalam menghadapi berbagai macam dinamika atau perubahan beranekaragam, dan hal tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas wilayah dan daerah yang bersangkutan. Kapasitas dalam hal ini mencakup kapasitas fisik (infrastruktur), ekonomi/fiskal, dan sosial. Maka dari itu, isu strategis ini sangat berkaitan dengan pembangunan di ketiga sektor tersebut. Disisi lain, perubahan yang dimaksud juga memiliki banyak konteks, misalnya perubahan sistem lingkungan dan fisik, maupun institusi. Contohnya, untuk perubahan lingkungan dan fisik bisa diakibatkan oleh perubahan iklim dan kejadian bencana. Sementara perubahan institusi bisa diakibatkan adanya pergeseran kebijakan atau perubahan struktur birokrasi. Papua Barat, baik di tingkat Provinsi maupun Daerah merupakan sebuah entitas wilayah yang dalam kadar tertentu memiliki risiko untuk mengalami perubahan-perubahan ini di masa yang akan datang, yang mungkin akan mengganggu sistem untuk mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, isu strategis dipersempit terhadap kerentanan terhadap tiga kondisi yang saat ini dianggap menjadi tiga faktor dominan yang akan menimbulkan perubahan sistem, yaitu; (1) Perubahan iklim; (2) Demografi; dan (3) Bencana dan Polusi.

Perubahan iklim merupakan isu global, yang ditandai dengan meningkatnya kadar emisi gas rumah kaca. Fenomena ini memiliki dampak terhadap dunia, tidak terkecuali di Papua Barat. Masyarakat rentan secara sosial (tidak berdaya secara ekonomi) dan yang hidup di lingkungan yang memiliki risiko terhadap perubahan iklim seperti fenomena banjir, perlu menjadi perhatian utama. Namun disisi lain, Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki sumber daya kehutanan yang merupakan Kawasan konservasi menyumbang potensi untuk memitigasi perubahan iklim, Maka dari itu, sumberdaya perlu tersebut perlu di pertahankan. Papua Barat juga memiliki kerentanan terhadap perubahan demografi, dalam hal ini pergeseran komposisi penduduk. Tren tingkat rasio ketergantungan di Papua Barat cenderung meningkat. Apabila tidak di mitigasi dengan kebijakan yang tepat, kerentanan penduduk usia produktif terhadap beban pembiayaan hidupnya akan meningkat. Papua Barat juga memiliki risiko dan kerentanan terhadap bencana, utamanya banjir dan kekeringan. Pada wilayah kabupaten yang memiliki tingkat bahaya terhadap bencana tersebut, risiko akan terpaparnya bencana akan semakin tinggi ketika kerentanan wilayah tinggi. Pada intinya, ketahanan dalam konteks di poin ini merupakan kemampuan wilayah dan kota untuk kembali pulih ketika





ada suatu hal mengganggu atau berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

5. Tingginya risiko kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan emisi GRK

Pemeliharaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup merupakan sesuatu yang perlu dianggap strategis di seluruh wilayah, tidak terkecuali di Papua Barat. Pembangunan merupakan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak ada upaya untuk memitigasi penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembangunan tersebut. Tentunya, dalam konteks ini yang dimaksud dengan pembangunan maupun dan lingkungan akan bersifat sangat luas. Maka dari itu, proses perencanaan pembangunan telah mengisyaratkan adanya kajian-kajian khusus lingkungan, misalnya KLHS. Operasionalisasi mitigasi terhadap ancaman kerusakan lingkungan perlu di detilkan lagi dalam dokumen strategis berbagai sektor. Kebijakan, arahan dan program yang pro-lingkungan perlu di prioritaskan. Isu global perubahan iklim, selain memerlukan upaya mitigasi juga memerlukan upaya adaptasi. Adaptasi perubahan iklim bisa berada di berbagai level, dari level komunitas sampai dengan level nasional. Di level provinsi, upaya adaptasi sulit terlihat operasionalisasinya, namun bisa diupayakan dengan penyusunan kebijakan untuk mendorong adanya upaya adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang terdampak. Untuk itu, Papua Barat perlu memetakan tingkat kerentanan perubahan iklim dilihat dari lokasi dan karakter masyarakatnya.

Berbagai macam bencana di Papua Barat memiliki keragaman indeks bahaya dan risiko yang berbeda-beda pula. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pembangunan fisik, berupa infrastruktur untuk mitigasi masih jauh berada di jangkauan anggaran selama ini. Sebagai Langkah awal, Papua Barat perlu memetakan kebutuhan pembangunan fisik apa yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, misalnya saja tanggul untuk upaya pencegahan banjir. Mitigasi, tidak hanya terbatas pada bencana alam, namun juga bencana non alam, misalnya bencana sosial. Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana sosial, dimana pada dua tahun terakhir perlu dihadapi oleh seluruh dunia. Ketidaksiapan Papua Barat dalam mengalami kejadian luar biasa ini juga perlu menjadi pembelajaran

sendiri bagi daerah, untuk membuat rencana mitigasi apabila kejadian serupa akan terjadi lagi.

6. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah

Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat yang belum signifikan juga dipengaruhi oleh rendahnya kinerja infrastruktur. Konektivitas wilayah di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Provinsi Papua Barat serta banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar kampung dan distrik akibatnya rendah, karena minimnya pengembangan jalan yang menghubungkan akses mereka untuk bermobilisasi. Selain itu, permasalahan konektivitas juga dipengaruhi oleh keadaan geografis yang ekstrim, sehingga moda angkutan umum di Provinsi Papua Barat sangat terbatas.

7. Belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan terhadap anak serta lanjut usia

Pembangunan berbasis gender bertujuan untuk memastikan tidak adanya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, termasuk memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi besar sebagai subyek dan obyek pembangunan. Perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan yang tercermin dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Untuk itulah, untuk memaksimalkan peran yang begitu besar tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Kualitas manusia, baik laki-laki atau perempuan, dapat dikatakan tinggi jika memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, maupun pendapatan.

Meskipun upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi berdasarkan IPG dan IDG Papua Barat dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Papua Barat. Paradigma patriarki sedikit banyak mempengaruhi peran perempuan saat berkiprah di lingkungannya. Padahal jumlah perempuan yang banyak merupakan modal pembangunan yang potensial jika dikembangkan secara tepat dan berkualitas. Peran sumber daya manusia perempuan yang berkualitas memiliki dampak pada 2 hal, yaitu: (a) mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang





diarahkan pada pemerataan pembangunan; serta (b) mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Oleh karena itu, isu strategis dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang diprioritaskan adalah: (a) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; (b) peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan OAP; serta (c) penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah generasi penerus sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial sehingga terpenuhi kesejahteraannya merupakan hak setiap anak. Tidak hanya itu, anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar pemenuhan hak-hak anak tidak mengalami hambatan yang berarti. Memberikan pengasuhan, pemenuhan hak, serta perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, namun memastikan terselenggaranya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Perlindungan terhadap lanjut usia sebagai salah satu kelompok rentan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga lanjut usia. Meskipun secara tidak langsung, perlindungan terhadap lanjut usia berpotensi meningkatkan IPM melalui peningkatan Angka Harapan Hidup karena menurunnya angka kematian pada usia yang lebih muda serta pelayanan publik ramah lansia yang lebih berkualitas. Perlindungan sosial untuk warga lanjut usia (lansia) menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian pemerintah di tingkat pembangunan nasional, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun kebijakan dan program perlindungan sosial saat ini telah diarahkan untuk memperkuat implementasi jaminan sosial untuk lansia, pengembangan sarana dan prasarana ramah lansia, serta penghormatan dan pemberdayaan warga lansia.

8. Masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah

Penciptaan kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan program-program pembangunan di Papua Barat. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

Potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan yang ada di antara berbagai golongan dan kelompok masyarakat bisa saja meruncing jika tidak difasilitasi dan dimoderasi oleh pihak berwenang. Sekecil apapun potensi konflik sosial harus dilakukan deteksi dan pencegahan dini, itulah pentingnya kearifan lokal guna menciptakan keserasian sosial di masyarakat, tentunya diperlukan peran serta seluruh elemen di masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga aparat keamanan harus sinergi dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini potensi konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya potensi konflik sekecil apapun yang ada dalam masyarakat selayaknya harus tetap ada dalam kendali dan pengawasan pihak berwenang dalam kerangka menjaga kondusivitas wilayah Provinsi Papua Barat, berbagai strategi dan pendekatan untuk menjaga kondusivitas wilayah Papua Barat harus terus diupayakan oleh Pemda agar kehidupan yang harmonis tetap berlangsung.

Beberapa kebijakan yang terus digalakkan dalam kerangka menjaga kondusivitas wilayah Papua Barat ini antara lain: **Pertama**, Memperkuat sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Papua Barat. **Kedua**, Penguatan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga terciptanya kondusivitas daerah. **Ketiga**, Penguatan sistem keamanan dan ketertiban yang sudah terselenggara selama ini. **Keempat**, Penguatan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan diseminasi penciptaan kondisi yang aman dan kondusif.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode 2023-2026 yang didasarkan pada isu strategis pembangunan Papua Barat, agenda RPJPD Papua Barat, draft RTRW Papua Barat, RPJMN dan draft RIPPP.

5.1 PENDAHULUAN

5.1.1 Sinkronisasi sasaran RPJMD tahun 2023-2026 dengan sasaran RPJPD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2025.

Penetapan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 2023-2026 juga telah disinkronisasi dengan sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2025. Adapun tahapan pembangunan yang tertuang didalam RPJPD terdapat 4 (empat) tahapan, dan pada periode RPJMD 2023-2026 telah memasuki tahap ke-4, yaitu tahap: “Mewujudkan Provinsi Papua Barat yang Sejahtera”, dalam artian Papua Barat menjadi wilayah yang sejahtera secara perekonomian wilayah serta masyarakat Papua Barat sejahtera secara ekonomi dan social sebagai manifestasi dari capaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama tiga periode pembangunan jangka menengah sebelumnya (lihat Gambar V.1).

Gambar V.1 Tahapan Agenda Pembangunan Jangka Panjang dalam RPJPD Papua Barat 2012-2025



Sumber: RPJPD Papua Barat 2012-2025



Tabel V.1 akan menuangkan penjabaran sinkronisasi antara sasaran pokok pada tahap ke-4 pembangunan RPJPD dengan sasaran RPD Papua Barat pada tahun 2023-2026.

**Tabel V.1 Sinkronisasi Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Barat
Tahun 2012-2025 dengan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026**

Sasaran Pokok RPJPD Papua Barat Tahap 4 (2022-2025)	Sasaran RPD Papua Barat tahun 2023-2026	
1. Penciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan	S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana
	S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat
2. Pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok dan kebutuhan bahan makanan sumber protein masyarakat	S10	Meningkatnya Pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan
3. Pengembangan pola pangan serta peningkatan nilai tambah pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani		
4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk membuka akses mudah dan terjangkau ke seluruh wilayah	S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas
	S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda
5. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas publik	S16	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah
	S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan
6. Pemenuhan kebutuhan prasaranan dan sarana pelayanan publik	S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan
	S5	Menurunnya angka stunting
	S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung
7. Pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah	S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah
8. Penciptaan dan penerapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah
9. Pemenuhan kebutuhan legal formal pemerintahan	S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
10. Pelengkapan struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah	S25	Meningkatnya Profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan
	S26	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi
	S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung
11. Peningkatan besaran dan laju pertumbuhan PDRB	S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif
12. Peningkatan ekonomi wilayah berbasis keunggulan komparatif yang bertransformasi		
	S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah



Sasaran Pokok RPJPD Papua Barat Tahap 4 (2022-2025)	Sasaran RPD Papua Barat tahun 2023-2026	
bertahap menjadi berbasis keunggulan kompetitif 13. Peningkatan kerjasama ekonomi 14. Peningkatan pertumbuhan dan daya saing unit-unit usaha masyarakat	S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
15. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat sehingga berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan IPM	S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas
16. Pemenuhan prasarana perumahan dan prasarana pendukung lingkungan perumahan	S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
	S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan
17. Pengayoman dan pembinaan masyarakat penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan
18. Prioritas pembangunan bagi masyarakat miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan daerah terisolir	S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung
19. Pendayagunaan SDA yang terbarukan 20. Pengelolaan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan 21. Pelestarian dan pemeliharaan sumber daya air 22. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan SDA 23. Pengembangan SDA Khusus 24. Perencanaan tata ruang, dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi	S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan
	S21	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
25. Melestarikan keanekaragaman budaya dan memproteksi dari akulturasi budaya negatif 26. Pembinaan keimanan, ketaqwaan, dan budaya luhur masyarakat berbasis kearifan lokal	S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung

5.1.2 Sinkronisasi target kinerja RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan sasaran pokok pembangunan nasional

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan nasional periode tahun 2020-2024. Oleh sebab itu sasaran-sasaran pokok yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Gambar V.2) juga menjadi target yang harus dicapai oleh daerah, tentu saja dengan penyesuaian konteks lokal yang menjadi lingkungan strategis pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Tabel V.2 menunjukkan perbandingan sasaran pokok yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan target yang akan dicapai dalam RPD Provinsi Papua Barat pada tahun 2022.

Gambar V.2 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Tabel V.2 Perbandingan antara target capaian indikator makro pembangunan pada RPD Papua Barat dan RPJMN 2020-2024

Indikator	Satuan	Target Akhir RPD 2023-2026	Target RPJMN 2020-2024
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,57	63,94 – 67,42
Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,80	6,04
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,40	4,90
Tingkat Kemiskinan	persen	18,00	14,67
Rasio Gini	indeks	0,358	0,360-0,374
Tingkat emisi GRK lahan & kehutanan	tCO2/th	2.137.617	-
	%	40%	27,3%

5.1.3 Sinkronisasi target kinerja RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan RIPPP

Kehadiran Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan babak baru untuk Perubahan wilayah papua termasuk Papua Barat, yang arah pembangunannya telah diatur dalam RIPPP. RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat (Papua Sehat dan Papua Cerdas), sehingga menghasilkan daya saing dalam ekonomi masyarakat (Papua Produktif). Dalam memformulasikan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Papua Barat 2023-2026, ketiga flagship pembangunan dalam Papua Barat (Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif) telah melalui proses sinkronisasi, dimana tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Papua

Barat 2023-2026 berusaha mewujudkan target capaian yang ingin diakomodasi dalam ketiga flagship RIPPP tersebut.

Selain ingin mewujudkan ketiga flagship pembangunan tersebut, dalam RIPPP juga disebutkan bahwa adanya kondisi perlu, yaitu merupakan prasyarat keberhasilnya tercapainya pembangunan. Adapun kondisi perlu tersebut dikategorikan menjadi 2 (dua); (1) berhubungan dengan infrastruktur dasar dan konektifitas, dan (2) berhubungan dengan lingkungan hidup. Indikator dan tujuan dan sasaran dalam RPD Papua Barat 2023-2024 juga telah mengakomodasi strategi-strategi dan arah kebijakan untuk mengakomodasi kondisi perlu/prasyarat pembangunan yang tertuang dalam RIPPP. Kondisi perlu tersebut merupakan sebuah pondasi arah pembangunan yang tidak terlepas dari upaya pencapaian ketiga flagship dalam RIPPP. Adapun tabel sinkronisasinya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel V.3 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan RIPPP

Tujuan Pembangunan dalam RPD	FLAGSHIP RIPPP	Sasaran Pembangunan dalam RPD	
01 Meningkatkan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial	Papua Sehat, Papua Pintar	S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas
		S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
		S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga
		S5	Menurunnya angka stunting
		S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan
02 Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif	Papua Produktif	S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif
		S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif
		S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
		S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan
		S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
		S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung
03 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan	(Masuk ke dalam kondisi perlu RIPPP)	S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas
		S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
		S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan
		S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah



Tujuan Pembangunan dalam RPD	FLAGSHIP RIPP	Sasaran Pembangunan dalam RPD	
Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru		S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda
		S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan
04 Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan serta Berkelanjutan	(Masuk kedalam kondisi perlu RIPP)	S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan
		S21	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
05 Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik	(Masuk ke dalam kondisi perlu RIPP)	S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah
		S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah
		S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan
		S26	Meningkatnya inovasi pelayanan pemerintah daerah yang terimplementasi
		S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
06 Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	(Masuk ke dalam kondisi perlu RIPP)	S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana
		S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat

5.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang di peroleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah.

5.2.1 Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial

Tujuan 1 (satu) memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu:

- S1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- S2. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas
- S3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- S4. Meningkatkan prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga



- 
- S5.** Menurunnya angka stunting
 - S6.** Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan

5.2.2 Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif

Tujuan 2 (dua) memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu:

- S7.** Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif
- S8.** Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif
- S9.** Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
- S10.** Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan
- S11.** Meningkatnya investasi daerah guna menopang bertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- S12.** Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung

5.2.3 Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru

Tujuan 3 (tiga) memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu:

- S13.** Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas
- S14.** Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- S15.** Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan
- S16.** Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah
- S17.** Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda
- S18.** Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan

5.2.4 Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan serta Berkelanjutan

Tujuan 4 (empat) memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- S19.** Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- S20.** Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan
- S21.** Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan

5.2.5 Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta Pelayanan Publik

Tujuan 5 (lima) memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu:

- S22.** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah
- S23.** Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah
- S24.** Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- S25.** Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan
- S26.** Meningkatnya inovasi pelayanan pemerintah daerah yang terimplementasi
- S27.** Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil

5.2.6 Tujuan 6: Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Daya Tahan Masyarakat Provinsi Papua Barat

Tujuan 6 (enam) memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu:

- S28.** Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- S29.** Meningkatkan ketentraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat



Tabel V.4 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

KODE	Tujuan (Sesuai RIPP)/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
T1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,09	62,26	65,89	66,55	67,21	67,89	68,57	68,57
S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,02	66,41	66,46	66,54	66,67	66,80	66,94	66,94
S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,91	13,13	13,21	13,79	14,14	14,49	14,85	14,85
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,60	7,69	7,84	8,40	8,78	9,17	9,58	9,58
S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,34	83,00	83,61	84,28	84,95	85,63	86,32	86,32
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,17	62,17	n.a	64,05	65,01	65,98	66,97	66,97
S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50,83 (th 2018)	55,17	n.a	56,27	57,40	58,55	59,72	59,72
		Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen	n.a	n.a	n.a	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
S5	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	24,60	n.a	30,00	26,00	22,00	18,00	14,00	14,00
S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan	Cakupan OAP penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	n.a	n.a	n.a	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0
T2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,76	-0,51	2,01	3,00	4,00	5,00	5,80	5,80
		Tingkat Kemiskinan	Persen	21,37	21,84	21,33	21,00	19,00	18,50	18,00	18,00
		Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita	Rp. Ribu	63.080	60.719	60.463	56.123	57.806	59.541	61.327	63.167
		Indeks Gini	Indeks	0,376	0,381	0,381	0,373	0,369	0,366	0,362	0,358
S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,55	70,34	68,55	69,24	69,93	70,63	71,33	71,33



KODE	Tujuan (Sesuai RIPP)/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,80	5,84	5,37	5,00	4,80	4,60	4,40	4,40
S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata	Rp Milyar	3166,03	3143,26	3298,43	3364,40	3431,69	3500,32	3570,33	3570,33
S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,03	7,23	7,43	7,50	7,63	7,83	8,03	8,03
		Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	31,16	30,60	30,87	31,02	31,18	31,34	31,49	31,49
S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,78	100,86	100,63	100,68	100,73	100,78	100,83	100,83
S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Nilai Investasi	Rp. Triliun	n.a	14.709,34	n.a	15.077,07	15.454,00	15.840,35	16.236,35	16.236,35
		Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya per tahun	Persen	n.a	n.a	n.a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Persentase UMKM yang meningkat omzetnya per tahun	Persen	n.a	n.a	n.a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,23	5,20	5,40	5,56	5,73	5,90	6,08	6,08
S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	7,26	8,61	n.a	12,06	15,51	18,96	22,41	22,41
		Cakupan sistem administrasi dan informasi kampung yang terhubung dengan Kabupaten dan Provinsi	Persen	10,79	40,18	61,65	65,00	80,00	90,00	100,00	100,00





KODE	Tujuan (Sesuai RIPP)/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
T3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	130,59	130,59	124,82	122,32	119,88	117,48	115,13	115,13
S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	59,11	68,98	73,23	76,89	80,74	84,77	89,01	89,01
S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	78,71	77,89	73,52	81,09	82,31	83,54	84,79	84,79
		Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persen	63,87	77,66	n.a	80,01	81,21	82,43	83,66	83,66
		Cakupan Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi	Persen	N/A	N/A	N/A	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	N/A	56,83	n.a	58,25	59,70	61,20	62,73	62,73
S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses internet telepon seluler	Persen	68,33	81,09	n.a	85,14	87,70	90,33	93,04	93,04
S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan wilayah kabupaten/kota pesisir yang terhubung dengan moda transportasi laut	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



KODE	Tujuan (Sesuai RIPP)/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi udara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan non-PLN)	Persen	94,94	95,79	95,49	95,68	95,87	96,06	96,26	96,26
T4	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,8	79,25	84,22	77,82	78,45	78,45	78,45	78,45
S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53.89 (th 2019)	56,15	62,00	56,25	56,35	56,35	56,35	56,35
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	n.a	77,17	89,30	91,98	94,74	97,58	100,00	100,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.64 (th 2019)	92,07	95,79	92,17	92,27	92,27	92,27	92,27
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100,00 (th 2019)	95,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	tCO2/th	5344043,00			3.740.830	3.206.426	2.672.022	2.137.617	2.137.617
			Persen	100,00			70,00	60,00	50,00	40,00	40,00
T5	Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (th 2019)	C (th 2020)	n.a	B	B	B	A	A
S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B	B	B	B	B	A	A
S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2	3	3





KODE	Tujuan (Sesuai RIPP)/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S26	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi	Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	n.a	n.a	n.a	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase Kab/ Kota yang Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
T6	Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	57,62 (th 2019)	61,76 (th 2020)	n.a	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	144,05	146,46	n.a	142,05	141,34	140,63	139,93	139,23
S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	82,08 (th 2019)	n.a	n.a	82,10	82,92	83,75	84,59	84,59

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permasalahan dan dinamika isu strategis pembangunan yang berkembang.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien pada tahun 2023-2026. Strategi pembangunan menunjukkan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Keterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Provinsi Papua Barat 2023-2026 dapat dilihat dalam Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Papua Barat 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
T1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial	S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	S1.1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi perempuan dan laki-laki khususnya bagi OAP
				S1.2	Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik laki-laki maupun perempuan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata dengan mengutamakan tenaga kesehatan OAP
				S1.3	Meningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan kesehatan reproduksi
				S1.4	Meningkatkan cakupan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular
				S1.5	Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
				S1.6	Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas	S1.7	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana
				S2.1	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
				S2.2	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang baik perempuan maupun laki-laki khususnya OAP dan penyandang disabilitas
				S2.3	Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang berbasis komunitas (lembaga-lembaga agama, adat dan sosial lainnya)
				S2.4	Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
				S2.5	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan
		S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	S3.1	Mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
				S3.2	Meningkatkan cakupan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak
		S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	S4.1	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan kepemudaan dan olahraga
				S4.2	Mengembangkan kapasitas kepramukaan
				S4.3	Meningkatkan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi
		S5	Menurunnya angka stunting	S5.1	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin
		S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan	S6.1	Menyelenggarakan Perlindungan sosial OAP baik perempuan maupun laki-laki
				S6.2	Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
T2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	S7.1	Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal khususnya OAP



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Masyarakat yang inklusif			S7.2	Membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)	
			S7.3	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua	
			S7.4	Penciptaan dan penguatan peluang ekonomi dan produktifitas terutama bagi OAP serta kelompok rentan lainnya (penyandang disabilitas, penduduk miskin dan perempuan)	
	S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif	S8.1	Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan	
			S8.2	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata	
	S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	S9.1	Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengembangkan koperasi khususnya bagi OAP, Perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya	
			S9.2	Meningkatkan peran wilayah Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global	
	S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	S10.1	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi Domberay dan Bomberay yang berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa	
	S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	S11.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian wilayah	
	S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung	S12.1	Meningkatkan jangkauan pendataan kampung dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP (yang dipilah antara laki-laki dan perempuan)	
			S12.2	Meningkatkan pelebagaan dan perluasaan sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	
			S12.3	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi	



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
T3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru	S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	S13.1	Peningkatan jaringan jalan provinsi dalam rangka percepatan konektivitas antar wilayah
		S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	S14.1	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air
		S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	S15.1	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
				S15.2	Peningkatan penataan infrastruktur bangunan
		S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	S16.1	Peningkatan koneksitas jaringan komunikasi, data dan persandian pelayanan berbasis IT
		S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	S17.1	Pengembangan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern
T4	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan serta Berkelanjutan	S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	S18.1	Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar
		S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	S19.1	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
		S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan	S20.1	Peningkatan aktivitas dengan emisi GRK yang rendah
				S21	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
T5	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta Pelayanan Publik	S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	S21.2	Peningkatan tertib tata kelola pertanahan
				S22.1	Meningkatkan kordinasi dan sinergisitas penyelenggaraan pemerintahan, antar bidang dan sektor, antar wilayah maupun antar tingkatan pemerintahan
				S22.2	Memantapkan kordinasi dan kelembagaan Penyelenggaraan Otonomi khusus di Papua Barat
				S22.3	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi



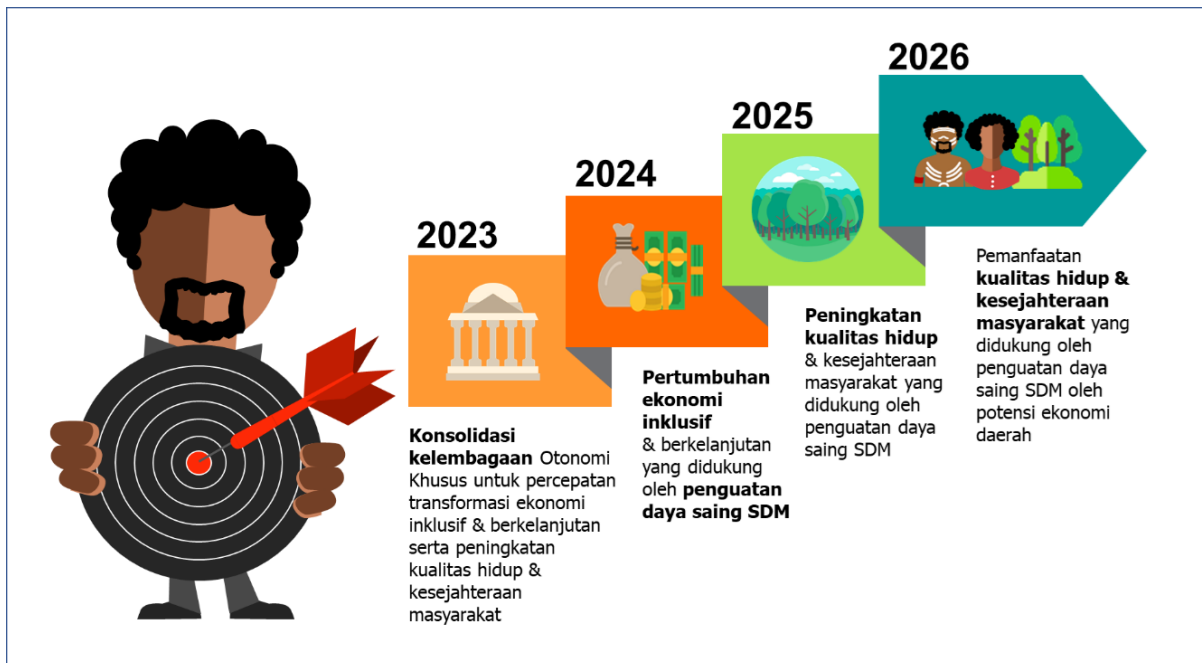
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah		Pemerintahan daerah secara lebih efisien dan efektif
				S23.1	Meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan daerah sesuai konteks daerah Papua Barat
				S23.2	Mengembangkan mekanisme dan instrumen perencanaan Otonomi Khusus yang lebih baik dan menysasar OAP
		S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	S23.3	Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah
				S24.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	S24.2	Meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah
				S25.1	Meningkatkan manajemen dan pelayanan ASN
		S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan		
		S26	Meningkatnya inovasi pelayanan pemerintah daerah yang terimplementasi	S26.1	Mengembangkan riset dan penelitian untuk inovasi pelayanan pemerintah daerah
		S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	S27.1	Mendorong percepatan legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua
				S27.2	Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung khususnya OAP dan penyandang disabilitas
T6	Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Daya Tahan Masyarakat Provinsi Papua Barat	S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	S28.1	Meningkatkan kesiagaan penanggulangan multibencana daerah
		S29	Meningkat kententruman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	S29.1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat
				S29.2	Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama serta Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.2.1 Tema Pembangunan

Tema dan Arah kebijakan umum Pembangunan Provinsi Papua Barat merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi penyelesaian permasalahan yang hendak dilaksanakan dalam horizon waktu berlakunya dokumen perencanaan ini. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama empat tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

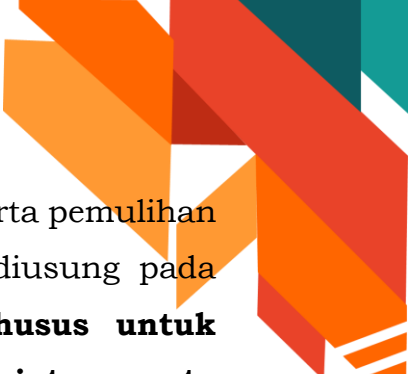
Gambar VI.1 Tema Pembangunan Daerah Papua Barat Tahun 2023-2026



Tema pembangunan setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional. Berdasarkan tema pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tahun 2023

Kondisi dan faktor yang cukup banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2023 adalah dimulainya satu era baru pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang ditandai dengan: 1) pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus Papua; 2) pemberlakuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; dan 3) upaya pemulihan ekonomi daerah setelah mengalami kemandekan yang cukup dalam yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid -19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat.



Sesuai dengan perkembangan regulasi otonomi khusus serta pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, tema pembangunan yang diusung pada tahun 2023 adalah **Konsolidasi Kelembagaan Otonomi Khusus untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Peningkatan Kualitas hidup dan Kesejahteraan Masyarakat**. Sedangkan arah kebijakan yang menjadi panduan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 adalah:

1. Penanganan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan Pendidikan
3. Pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
4. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Konsolidasi Transisi Kelembagaan Otonomi Khusus Papua dan Peningkatan Pelayanan Publik
7. Penciptaan stabilitas wilayah dan Ketahanan Masyarakat

Tahun 2024

Pada tahun 2024 diharapkan konsolidasi otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat diharapkan sudah semakin mantap dan seluruh pemangku pembangunan sudah bisa bergerak secara baik dalam koridor otonomi khusus baru. Disamping itu diharapkan pembangunan ekonomi dan berbagai sektor pembangunan lainnya sudah menggeliat kembali seperti sedia kala sebelum adanya Pandemi Covid-19. Dalam perspektif tersebut, Tema Pembangunan Daerah yang diusung pada tahun 2024 adalah **Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing SDM**. Sedangkan arah kebijakan yang menjadi panduan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 adalah:

1. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal
4. Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas



6. Tata Kelola Pemerintahan baik untuk mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
7. Pemantapan stabilitas wilayah dan ketahanan masyarakat

Tahun 2025

Pada tahun 2025, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan sudah semakin mantap yang ditandai dengan bergerakaknya sektor ekonomi dan pembangunan daerah lainnya secara simultan dalam mendukung peningkatan daya saing SDM dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2025 ini kemiskinan ekstrim yang menjadi perhatian utama pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dituntaskan. Selanjutnya Tema Pembangunan yang diusung pada tahun 2025 ini adalah: Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan daya saing SDM. Sedangkan arah kebijakan yang menjadi panduan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 adalah:

1. Percepatan Penanganan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Percepatan Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal
4. Peningkatan dan Pemantapan Pemantapan Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Pemantapan Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Tata Kelola Pemerintahan baik untuk mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
7. Pemantapan stabilitas wilayah dan Ketahanan Masyarakat

Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026. Beberapa target pelaksanaan pembangunan yang direncanakan harus dapat diwujudkan dan jadi milestone baru bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya sesuai dengan sentuhan kepemimpinan baru Papua Barat Hasil Pilkada Langsung. Pada tahun 2026 ini, sudah harus terlihat angka kemiskinan yang sudah turun tajam, kemudian perekonomian daerah yang semakin inklusif serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, telah selesainya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta



konektivitas serta sudah semakin berdayanya Orang Asli Papua (OAP). Pada tahun 2026 ini, tema pembangunan daerah yang diusung adalah: kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan daya saing SDM dan potensi ekonomi daerah. Sedangkan arah kebijakan yang menjadi panduan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2026 adalah:

1. Percepatan Penanganan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Percepatan Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal
4. Peningkatan dan Pemantapan Pemantapan Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Pemantapan Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Tata Kelola Pemerintahan baik untuk mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
7. Pemantapan stabilitas wilayah dan Ketahanan Masyarakat

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua Barat dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Papua Barat 2023-2026

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2023	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial						
S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
S1.1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi perempuan dan laki-laki khususnya bagi OAP	Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan sesuai pemetaan kapasitas dan kondisi geografis	√	√	√	√	
		Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan	√	√	√	√	



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
		Perluasan cakupan dan pengembangan layanan telemedicine dan pembangunan puskesmas di distrik tanpa puskesmas			√	√
		Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses	√	√	√	√
		Pengembangan layanan unggulan di RS berdasarkan kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat setempat			√	√
		Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah sakit rujukan dan layanan kesehatan pada penduduk terdampak bencana		√	√	
		Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersinergi dengan program lain yang melengkapi paket manfaat JKN	√	√	√	√
S1.2	Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik laki-laki maupun perempuan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata dengan mengutamakan tenaga kesehatan OAP	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan baik laki-laki maupun perempuan terutama untuk OAP dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus dan program lainnya.			√	√
		Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi OAP disertai dengan penempatan wajib pasca kelulusan		√	√	√
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan baik laki-laki maupun perempuan melalui pendidikan dan pelatihan		√	√	√
		Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasasn	√	√	√	
S1.3	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih	√	√	√	√
		penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi	√	√	√	√
		Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu PONED dan RS Mampu PONEK	√	√	√	√
		Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap	√	√	√	√
		Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi	√	√	√	√
S1.4	Meningkatkan cakupan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular	Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua		√	√	√
		Peningkatan penemuan kasus melalui deteksi dini dan penemuan kasus penyakit menular secara aktif maupun pasif		√	√	√
		Peningkatan penanganan kasus melalui terapi segera dan tepat serta pemantauan pengobatan		√	√	√
		Penguatan sistem surveilans terpadu berbasis laboratorium		√	√	√
		Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi adat dan swasta untuk edukasi pengendalian penyakit	√	√	√	√
S1.5	Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu	Perbaikan distribusi alat Kesehatan, obat dan vaksin untuk mencukupi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan		√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
	kefarmasian dan alat kesehatan	Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan di tingkat provinsi		√	√	√
S1.6	Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan untuk pembudayaan masyarakat hidup sehat	√	√	√	√
		Penguatan regulasi gerakan masyarakat untuk membudayakan hidup sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan sehat serta keterjangkauan pilihan pangan sehat	√	√	√	√
		Peningkatan kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam menyelenggarakan UKBM terutama Posyandu dan Posbindu PTM	√	√	√	√
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	√	√	√	√
S1.7	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	√	√	√	√
		Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	√	√	√	√
		Penguatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta pelibatan laki-laki dalam membangun kesadaran terkait KB	√	√	√	√
S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas					
S2.1	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Penguatan pebelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21			√	√
		Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global		√	√	√
S2.2	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang baik perempuan maupun laki-laki khususnya OAP dan penyandang disabilitas	Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan OAP	√	√	√	√
		Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua Barat	√	√	√	√
		Penyelenggaraan sekolah berpola asrama dan sekolah unggulan yang berkualitas	√	√	√	√
		Pembangunan dan pengembangan LSB Terpadu		√	√	√
		Beasiswa untuk penyandang disabilitas dan anak perempuan dari keluarga miskin dan OAP		√	√	√
S2.3	Meningkatkan penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang berbasis komunitas (lembaga-lembaga agama, adat dan sosial lainnya)	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, OAP, perempuan dan penyandang disabilitas	√	√	√	√
		Pemenuhan tenaga pendidik serta pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk OAP		√	√	√
		Pemberian insentif untuk tenaga pendidik di daerah terpencil		√	√	√
S2.4	Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik baik perempuan maupun laki-laki			√	√
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah		√	√	√
S2.5	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan			√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
	perpustakaan dan kearsipan	Pengelolaan arsip daerah dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi			√	√
		Peningkatan kapasitas tenaga serta manajemen kearsipan	√	√		
S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan					
S3.1	Mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak		√	√	√
		Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Hak-hak Anak	√	√	√	√
S3.2	Meningkatkan cakupan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak	Penguatan Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berdasarkan kondisi sosial budaya setempat	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan dan kualitas penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota	√	√	√	√
		Penentuan kampung layak anak secara merata	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan dan kulaitas layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	√	√	√	√
S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga					
S4.1	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan kepemudaan dan olahraga	Penguatan tatakelola pembudayaan olah raga di masyarakat	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas pembinaan olah raga pendidikan dan olah raga prestasi	√	√	√	√
S4.2	Mengembangkan kapasitas kepramukaan	Pembinaan organisasi kepramukaan dalam mengembangkan kapasitas organisasi dan pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√
S4.3	Meningkatkan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta kegiatan ekonomi mandiri	√	√	√	√
S5	Menurunnya angka stunting					
S5.1	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin	Penguatan Surveilans Gizi di tingkat kabupaten/ kota	√	√	√	√
		Penguatan sistem bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi keluarga miskin dan rentan	√	√	√	√
		Penguatan pendidikan gizi melalui diversifikasi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga	√	√	√	√
		Peningkatan peran PKK dalam pencegahan stunting	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan dan kualitas pembinaan Keluarga Sejahtera dalam Pengasuhan 1000 HPK	√	√	√	√
S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan					
S6.1	Menyelenggarakan Perlindungan sosial OAP baik perempuan maupun laki-laki	Pengembangan program perlindungan sosial afirmatif bagi anak-anak dan lansia OAP	√	√	√	√
		Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan	√	√	√	√
		Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
		keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan				
		Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	√	√	√	√
		Fasilitasi penyediaan sarana sosial seperti panti sosial yang dimiliki oleh provinsi	√	√	√	√
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	√	√	√	√
S6.2	Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Pengembangan jaminan sosial bagi PMKS	√	√	√	√
T2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif					
S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif					
S7.1	Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal khususnya OAP	Revitalisasi SMK dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri			√	√
		Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya untuk perempuan dan OAP		√	√	√
		Penguatan peran kabupaten/kota dalam koordinasi kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi		√	√	√
		Upskilling dan reskilling pendidik dan instruktur vokasi		√	√	√
		Penguatan peran praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi		√	√	√
		Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja, termasuk Identifikasi menyeluruh atas skema sertifikasi kompetensi sesuai potensi daerah bagi OAP		√	√	√
S7.2	Membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)	Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (Balai Latihan Kerja)		√	√	√
S7.3	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua	Pemetaan potensi pasar dan analisis kebutuhan tenaga kerja (market demand analysis) dan kebutuhan pelatihan (training needs analysis)		√	√	√
		Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis, serta pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha terutama pengusaha muda OAP		√	√	√
		Pelatihan literasi dan akses pasar digital bagi pengusaha terutama pengusaha muda OAP		√	√	√
		Pendampingan wirausaha untuk mengakses permodalan		√	√	√
S7.4	Penciptaan dan penguatan peluang ekonomi dan produktifitas terutama bagi OAP serta kelompok rentan lainnya (penyandang disabilitas, penduduk miskin dan perempuan)	Fasilitasi akses ke permodalan khususnya untuk usaha ultra mikro	√	√		
		pendampingan pengembangan usaha untuk kelompok rentan khususnya kelompok penyandang disabilitas		√	√	√
		Pendampingan pelaku usaha khususnya perempuan kepala keluarga		√	√	√
S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif					
S8.1	Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan	Pengembangan industri pariwisata	√	√	√	√
		Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata	√	√	√	√
		Pengembangan promosi pariwisata	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
S8.2	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata	Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan	√	√	√	√
		Peningkatan SDM pariwisata terutama OAP melalui pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√
S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah					
S9.1	Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengembangkan koperasi khususnya bagi OAP, Perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya	Pendampingan pelaku usaha mikro kecil untuk mengakses kredit murah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan lainnya	√	√	√	√
		Pengembangan kemitraan usaha strategis antara usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan	√	√	√	√
		Pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pelaku UMKM	√	√	√	√
		Digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar daring, pembiayaan berbasis digital, dan tata kelola manajemen usaha berbasis digital	√	√	√	√
		Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi	√	√	√	√
		Pengembangan akses permodalan bagi UMKM			√	√
		Penciptaan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan OAP			√	√
S9.2	Meningkatkan peran wilayah Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global	Penguatan kebijakan afirmasi terhadap ekspor internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua		√	√	√
		Penguatan kerjasama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global		√	√	√
		Penguatan dukungan regulasi ekspor komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global		√	√	√
		Hilirisasi komoditas unggulan Papua yang memenuhi standar internasional		√	√	√
S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan					
S10.1	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi Domberay dan Bomberay yang berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa	Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan			√	√
		Penyediaan tenaga penyuluh	√	√	√	√
		Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√
		Pengembangan kelembagaan petani, peternak, dan nelayan	√	√	√	√
		Pengembangan industri tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perdagangan dan jasa			√	√
		Pengembangan rumah produksi		√	√	√
		Fasilitasi akses permodalan untuk UMKM yang dimiliki oleh Perempuan dan OAP			√	√
		Pengembangan distribusi pemasaran			√	√
S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan					
S11.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian wilayah	Peningkatan kepastian kepemilikan lahan melalui delineasi hak ulayat untuk menunjang investasi			√	√
		Penyusunan peta potensi investasi di setiap wilayah adat	√			
		Fasilitasi penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
		Promosi potensi investasi Papua di tingkat nasional maupun internasional	√	√	√	√
S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung					
S12.1	Meningkatkan jangkauan pendataan kampung dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP (yang dipilah antara laki-laki dan perempuan)	Peningkatan jangkauan pendataan kampung yang diiringi pemutakhiran pendataan kampung secara berkala		√	√	√
		Pemanfaatan sistem administrasi kampung dalam mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial serta dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan seperti perlindungan sosial OAP, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat		√	√	√
S12.2	Meningkatkan kelembagaan dan perluasaan sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Memperkuat regulasi dan kelembagaan sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	√	√	√	√
		Memperluas implementasi sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung di seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat	√	√	√	√
		Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan kapasitas dan pemberdayaan kader kampung	√	√	√	√
S12.3	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi	Mengembangkan regulasi dan kelembagaan Distrik sebagai Basis Pembangunan Wilayah di Papua Barat	√	√	√	√
		Mengembangkan model, standar dan pedoman distrik sebagai basis pembangunan wilayah	√	√	√	√
		Meningkatkan sosialisasi dan Kordinasi Pengembangan Distrik sebagai Basis Pembangunan Wilayah	√	√	√	√
T3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru					
S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas					
S13.1	Peningkatan jaringan jalan provinsi dalam rangka percepatan konektivitas antar wilayah	Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan antar kabupaten	√	√	√	√
		Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan drainase	√	√	√	√
S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua					
S14.1	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Pelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih	√	√	√	√
S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan					
S15.1	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	Penataan kawasan permukiman kumuh	√	√	√	√
		Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang berkualitas	√	√	√	√
		Penyediaan Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu	√	√	√	√
S15.2	Peningkatan penataan infrastruktur bangunan	Pendataan kelengkapan administrasi perijinan pendirian bangunan	√	√	√	√
		Penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	√	√	√	√
S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah					
S16.1	Peningkatan koneksitas jaringan komunikasi, data dan persandian pelayanan berbasis IT	fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler	√	√	√	√
		Pengembangan inovasi pelayanan pemerintah daerah berbasis IT	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan sarana, prasarana, dan SDM pengelolaan persandian daerah serta penguatan kemandirian informasi persandian	√	√	√	√
S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda					
S17.1	Pengembangan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis	√	√	√	√
S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan					
S18.1	Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar	Perluasan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok	√	√	√	√
		Perumusan grand design pemanfaatan sumber daya alam untuk energi baru terbarukan		√	√	√
		Penertiban dan pengendalian perizinan pengelolaan energi	√	√	√	√
T4	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan serta Berkelanjutan					
S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
S19.1	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas tutupan lahan	√	√	√	√
		Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	√	√	√	√
		Penataan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	√	√	√	√
		Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir)	√	√	√	√
		Peningkatan sarana dan prasarana persampahan maupun TPA Regional	√	√	√	√
S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan					
S20.1	Peningkatan aktivitas dengan emisi GRK yang rendah	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
		Mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi khususnya pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	√	√	√	√
		Menerapkan Sustainable Forest Management pada kawasan hutan produksi	√	√	√	√
		Mempertahankan kondisi kualitas hutan alam khususnya pada wilayah Kabupaten Tambrau, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fak Fak.	√	√	√	√
		Mencegah deforestasi khusus pada wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan	√	√	√	√
		Rehabilitasi lahan dengan rotasi berupa penanaman pohon yang dapat dipanen kayunya untuk meningkatkan cadangan karbon	√	√	√	√
		Menguatkan kelembagaan dan modal sosial guna meningkatkan kemampuan KPH di tingkat tapak	√	√	√	√
S21	Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan					
S21.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam	Sosialisasi dan pelatihan masyarakat adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan	√	√	√	√
		Pemberiaan penghargaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup	√	√	√	√
		Penetapan masyarakat hukum adat	√	√	√	√
S21.2	Peningkatan tertib tata kelola pertanahan	Penyediaan lokasi untuk program strategis provinsi	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	√	√	√	√
T5	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta Pelayanan Publik					
S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah					
S22.1	Meningkatkan kordinasi dan sinergisitas penyelenggaraan pemerintahan, antar bidang dan sektor, antar wilayah maupun antar tingkatan pemerintahan	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Papua Barat	√	√	√	√
		Memantapkan koordinasi dan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√	√
		Penyediaan produk hukum daerah yang berkualitas dan tepat waktu	√	√	√	√
S22.2	Memantapkan kordinasi dan kelembagaan Penyelenggaraan Otonomi khusus di Papua Barat	Meningkatkan kordinasi kebijakan penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat	√	√	√	√
		Mengembangkan instrumen pendukung efektivitas kebijakan Otsus di Papua Barat	√	√	√	√
		Memfasilitasi pemberian bantuan-bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia OAP dan lembaga lembaga adat serta keagamaan	√	√	√	√
S22.3	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi Pemerintahan daerah secara lebih efisien dan efektif	Meningkatkan Kordinasi, Fasilitasi dan monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPM pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan	√	√	√	√
		Revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua dan Fasilitasi dan penguatan kelembagaan adat dalam memberikan rekomendasi pembangunan Papua yang berkualitas	√	√	√	√
		Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√	√	√
		Penerapaaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	√	√	√	√
		Memperkuat penataan daerah termasuk fasilitasi tapal batas antar wilayah kabupaten/kota di Papua Barat	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan DPRD	√	√	√	√
S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah					
S23.1	Meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan daerah sesuai konteks daerah Papua Barat	Memperkuat relevansi dan ketepatan waktu penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√
		Menyusun dokumen perencanaan tematik daerah guna mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang	√	√	√	√
		Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah	√	√	√	√
		Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah di berbagai bidang pembangunan	√	√	√	√
		Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah dalam penerapan SIPD	√	√	√	√
S23.2	Mengembangkan mekanisme dan instrumen perencanaan Otonomi Khusus yang lebih baik dan menyasar OAP	Fasilitasi penguatan pendataan penduduk berbasis kampung	√	√	√	√
		Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang Umum dan Musrenbang OTSUS	√	√	√	√
		Fasilitasi penyiapan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis OAP	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
S23.3	Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah	Penguatan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah	√	√	√	√
		Penambahan auditor dalam memenuhi asistensi pengawasan pembangunan	√	√	√	√
S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah					
S24.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Harmonisasi Peraturan Perundangan Tentang Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Papua Barat	√	√	√	√
		Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di wilayah Papua	√	√	√	√
		Memfasilitasi ketepatan waktu dan peningkatan kualitas APBD Papua Barat	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi evaluasi APBD dan pelaporan keuangan Kabupaten/Kota	√	√	√	√
		Meningkatkan cakupan dan kualitas pengelolaan aset daerah	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencatatan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	√	√	√	√
		Meningkatkan kapasitas pendapatan daerah terutama yang berasal dari PAD	√	√	√	√
S24.2	Meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Meningkatkan pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah daerah	√	√	√	√
		Penguatan pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus Papua	√	√	√	√
S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan					
S25.1	Meningkatkan manajemen dan pelayanan ASN	Menegakkan kebijakan dan regulasi untuk peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
		Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√
		Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga lembaga yang potensial dalam upaya pengembangan kapasitas SDM aparatur	√	√	√	√
		Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	√	√	√	√
		Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh pemerintah daerah	√	√	√	√
S26	Meningkatnya inovasi pelayanan pemerintah daerah yang terimplementasi					
S26.1	Mengembangkan riset dan penelitian untuk inovasi pelayanan pemerintah daerah	Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga terkait untuk implementasi inovasi pelayanan daerah	√	√	√	√
		Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan yang berasal dari penelitian-penelitian terapan	√	√	√	√
		Penerapan dan optimalisasi hasil kajian atau riset dalam impelemntasi pembangunan daerah	√	√	√	√
S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil					
S27.1	Mendorong percepatan legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua	Merumuskan definisi kependudukan khususnya berkaitan dengan Orang Asli Papua	√	√	√	√
		Mengembangkan inovasi kebijakan untuk legalitas penduduk OAP	√	√	√	√
		Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota	√	√	√	√
S27.2	Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung	Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota	√	√	√	√
		Pengembangan data base kependudukan Orang Asli Papua	√	√	√	√



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
	terutama OAP dan penyandang disabilitas	Penyajian dan pemanfaatan profil kependudukan	√	√	√	√
T6	Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Daya Tahan Masyarakat Provinsi Papua Barat					
S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana					
S28.1	Meningkatkan kesiagaan penanggulangan Multibencana daerah	Penguatan data, informasi, literasi dan kelembagaan dalam menghadapi multi bencana	√	√	√	√
		Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah	√	√	√	√
		Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana	√	√	√	√
		Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) kebencanaan	√	√	√	√
		Penyediaan infrastruktur tanggap bencana	√	√	√	√
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	√	√	√	√
S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat					
S29.1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Fasilitasi dan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	√	√	√	√
		Pemberdayaan dan pengawasan ormas	√	√	√	√
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan	√	√	√	√
S29.2	Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama serta Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	√	√	√	√
		Peningkatan pemahaman politik, hak-hak, dan wawasan kebangsaan	√	√	√	√
		Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antar umat dan kerukunan antar golongan penduduk	√	√	√	√
		Penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antar umat beragama	√	√	√	√
		Penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	√	√	√	√
		Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis	√	√	√	√
		Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Barat	√	√	√	√

6.2.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

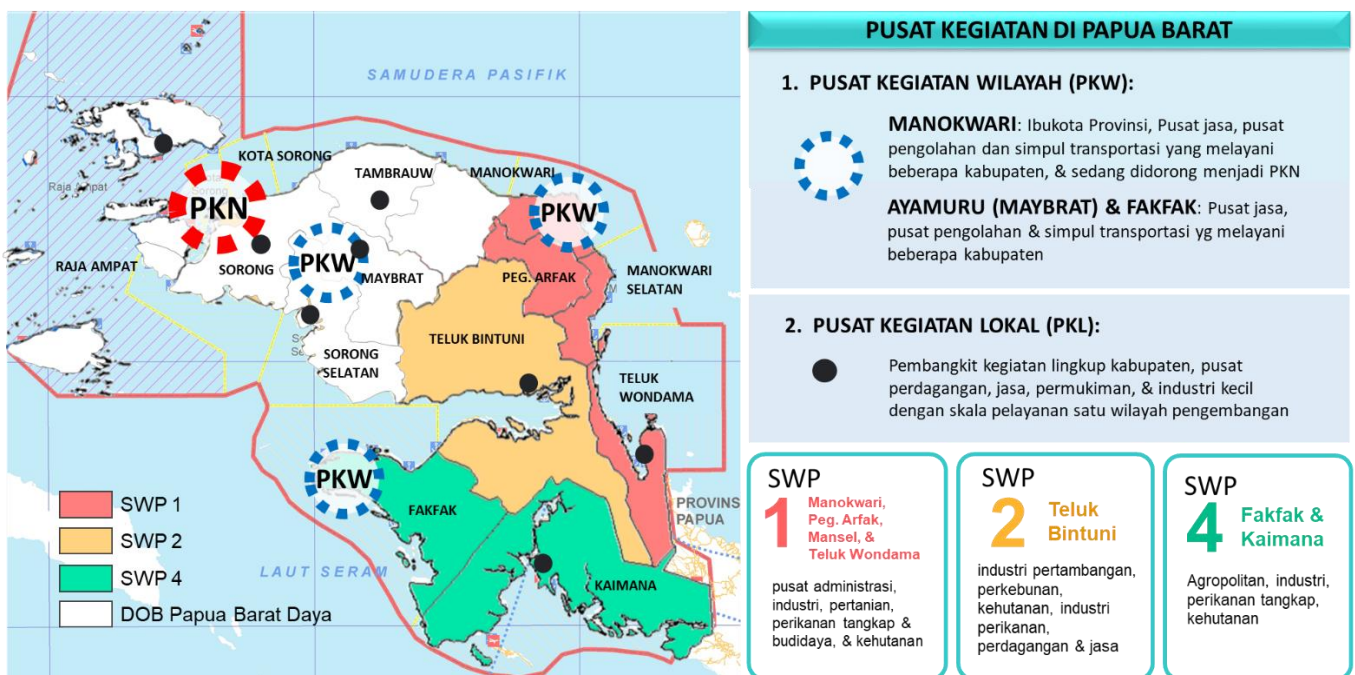
6.2.3.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pengembangan kewilayahan Provinsi Papua Barat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratis, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah, serta draft RIPPP. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam periode pembangunan tahun 2023-2026 kebijakan umum pembangunan hijau berkelanjutan diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah

Papua Barat, terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan daerah menjadi hal yang penting mengingat tingginya potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun potensi pariwisata di Papua Barat. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 dan pasca penetapan DOB Papua Barat Daya, maka struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat disusun menjadi 3 SWP (Satuan Wilayah Pengembangan). Pembagian SWP nantinya juga diikuti dengan pengembangan pusat-pusat hierarki dan penyediaan jaringan infrastruktur terutama transportasi, sehingga akan tercipta keterkaitan antar SWP yang terintegratif di wilayah Provinsi Papua Barat (lihat Gambar VI.2). Dengan beralihnya wilayah Kota Sorong menjadi bagian Provinsi Papua Barat Daya, maka diperlukan perencanaan pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan baru di Papua Barat.

Gambar VI.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah di Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat

Dalam implementasi program dan kegiatan RPD Papua Barat 2023-2026, sebagai wujud dari rencana pengembangan wilayah dalam RTRW dan hasil analisis kondisi kinerja pembangunan kabupaten/kota di Papua Barat, maka terdapat prioritas kewilayahan implementasi program sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Prioritas Kewilayahan Implementasi Program RPD 2023-2026

Tujuan/Sasaran Pembangunan		Prioritas (1/2/3)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
T1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial							
S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1	1	1	1	1	1	1
S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas	2	1	1	1	2	2	1
S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	1	1	1	1	1	1
S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	2	2	3	2	2	3	2
S5	Menurunnya angka stunting	1	1	1	1	1	1	1
S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan	1	1	1	1	1	1	1
T2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif							
S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	1	3	1	1	1	2	1
S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif	1	1	1	2	1	2	2
S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	3	2	3	2	1	3	3
S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	2	2	2	3	2	2	2
S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	2	1	2	1	1	1	2
S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung	1	1	1	1	1	1	1
T3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru							
S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	1	1	1	1	2	2	1
S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	2	1	2	3	3	1
S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	2	3	1	2	2	2	1
S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	2	1	2	3	3	3	1
S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	1	1	1	2	3	2	1
S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	2	2	2	2	2	1	1
T4	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan							
S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1	1	1
S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	1	1	1	1	1	1	1



Tujuan/Sasaran Pembangunan		Prioritas (1/2/3)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
T5	Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik							
S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	2	2	2	2	1	1	1
S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	1	1	1	1	1	1	1
S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	2	2	2	1	1	1
S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan	2	2	2	2	1	1	1
S26	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi	1	1	1	1	1	1	1
S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1	1	1	1	1	1	1
T6	Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat							
S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	2	2	1	1	1	1	1
S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	1	1	1	2	1	1	2

*Keterangan: 1 = prioritas 1 ; 2 = prioritas 2 ; 3 = prioritas 3

6.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Di dalam RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, diuraikan program prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tabel VI.4 menunjukkan program prioritas daerah yang disertai pagu indikatif dalam implelementasi RPD Papua Barat 2023-2026.



Tabel VI.4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
T1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul Berkarakter dan Kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,89	66,55		67,21		67,89		68,57		68,57			
S1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,46	66,54		66,67		66,80		66,94		66,94			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	143.724	2.1 : 1000	148.036	2.2 : 1000	152.477	2.3 : 1000	157.051	2.3 : 1000	601.288	DINAS KESEHATAN	Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	240,87												
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	5,90												
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	29,00	35,00		50,00		75,00		95,00		95,00			
		Prevalensi HIV	Persen	2,00	1,80		1,50		1,20		1,00		1,00			
		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	5,53	4		3		2		1		1,00			
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	51,20	60,00		75,00		90,00		100,00		100,00			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100,00	100,00	450	100,00	473	100,00	496	100,00	521	100,00	1.940	DINAS KESEHATAN	Kesehatan
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14,00	20,00	14.674	35,00	15.408	55,00	16.178	75,00	16.987	75,00	63.247	DINAS KESEHATAN	Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	3,00	5	2.723	8	2.859	11	3.002	13	3.152		11.736	DINAS KESEHATAN	Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100,00	100,00	71.374	100,00	74.942	100,00	78.689	100,00	82.624	100,00	307.629	BLUD RSUD Papua Barat	Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	71.832	2.1 : 1000	75.423	2.2 : 1000	79.194	2.3 : 1000	83.154	2.3 : 1000	309.603	BLUD RSUD Papua Barat	Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pegawai rumah Sakit yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen	100,00	100,00	2.814		2.954		3.102		3.257		12.127	BLUD RSUD Papua Barat	Kesehatan
S2	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan, termasuk untuk penyandang disabilitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	13,79		14,14		14,49		14,85		14,85			
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,84	8,40		8,78		9,17		9,58		9,58			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	100,00	100,00	270.690	100,00	284.225	100,00	284.225	100,00	284.225	100,00	1.166.70 8	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan
		Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	per satuan murid	5	5		5		5		5		5			
		Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	20,00	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		45,33	43,75		45,90		47,48		49,06		50,64			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		57,75	61,52		65,43		67,43		69,43		69,43			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	52,52		54,65		56,78		58,91		61,04			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	60,81		63,89		66,97		70,05		73,13			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		76,40	84,00		88,22		92,22		96,22		100,22			
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB		60,00	83,10		85,72		88,22		90,72		93,22			
		Indeks Inkusisivitas SDLB		69,60	81,26		84,52		87,78		91,04		94,30			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		N/A	86,43		89,86		93,29		96,72		100,15			
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB		N/A	77,63		79,86		82,09		84,32		86,55			
		Indeks Inkusisivitas SMPLB		N/A	94,90		98,00		98,50		99,00		99,50			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Indeks Inkusisivitas SMALB		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SDLB	Rasio per 10.000 murid	747	750	269	750	282	750	296	750	311	750	1.159	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio per 10.000 murid	732	750		750		750		750		750			
		Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio per 10.000 murid	1.181	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			
		Persentase Guru SLB yang tersertifikasi (SDGs)	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Guru SDLB,SMPLB,SMALB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	dokumen	0	1	778	1	817	1	858	1	901	4	3.353	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meningkawt kompetensinya	orang	0	1		1		1		1		4			
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	N/A	48,50	2.955	49,20	3.014	49,70	3.074	50,10	3.136	50,10	12.179	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan
S3	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,61	84,28		84,95		85,63		86,32		86,32			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n.a	64,05		65,01		65,98		66,97		66,97			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date pada 11 kabupaten/kota di Papua Barat	Persen	N/A	20,00	685	50,00	702	80,00	720	100,00	738	100,00	2.844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Per 100 ribu perempuan	N/A	0	2.710	0	2.846	0	2.988	0	3.137	0	11.680	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	Persen	N/A	100,00	1.944	100,00	1.993	100,00	2.042	100,00	2.093	100,00	8.072	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	48,01	50,65		53,44		56,38		59,48		59,48	-		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20,00	7.653	50,00	7.844	80,00	8.040	100,00	8.241	100,00	31.779	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20,00		50,00		80,00		100,00		100,00	-		
		Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah,	Persen	N/A	20,00	2.012	50,00	2.062	80,00	2.114	100,00	2.167	100,00	8.355	DINAS PEMBERDAYAAN	PEMBERDAYAAN

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi													AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	per 10 ribu anak	N/A	0	624	0	884	0	909	0	934	0,00	3.352	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	n.a	56,27		57,40		58,55		59,72		59,72			
		Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen	n.a	25,00		50,00		75,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persen	N/A	50,00	7.050	70,00	7.403	90,00	7.773	100,00	8.161	100,00	30.386	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persen			270		350		400		450		1.470	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	100,00	2.100	100,00	2.153	100,00	2.206	100,00	2.261	100,00	8.720	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda dan Olahraga
S5	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen		21,20		18,70		16,20		13,70		13,70			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	240,87											DINAS KESEHATAN	Kesehatan
		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	5,53	4		3		2		1		1,00			
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	51,20	60,00		75,00		90,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100,00	100,00	-	100,00	5.453	100,00	5.726	100,00	6.012	100,00	17.191	DINAS KESEHATAN	Kesehatan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Persen			25.176		25.805		26.451		27.112		104.544	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Persen	N/A	0,00	21.397	0,00	21.932	33,33	22.480	66,67	23.042	66,67	88.851	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	95,00	95,30	3.674	95,50	3.766	95,80	3.860	96,00	3.956	96,00	15.256	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA Regional	Persen	N/A	25,00	1.900	27,50	1.995	30,00	2.095	33,00	2.199	33,00	8.189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	Persen	44,04	43,04	900	42,04	1.000	41,04	1.000	40,04	1.000	40,04	3.900	DINAS KETAHANAN PANGAN	Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Persen	100,00	100,00	2.800	100,00	2.940	100,00	3.087	100,00	3.241	100,00	12.068	DINAS KETAHANAN PANGAN	Ketahanan Pangan
		Cakupan pangan segar yang sudah disertifikasi	Produk	80	25		25		25		180					
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persen	89,17	91,00	9.559	93,00	9.798	97,00	10.043	100,00	10.294	100,00	39.694	DINAS KETAHANAN PANGAN	Ketahanan Pangan
		PPH konsumsi pangan	Persen	77,80	83,30		88,80		94,30		100,00		100,00			
S6	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan	Cakupan OAP penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	n.a	50,0		55,0		60,0		65,0		65,0			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30,00	5.000	50,00	5.125	80,00	5.253	100,00	5.384	100,00	20.763	DINAS SOSIAL	Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	Persen	N/A	100,00	3.165	100,00	3.323	100,00	3.489	100,00	3.664	100,00	13.642	DINAS SOSIAL	Sosial

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti														
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	30,00	3.144	50,00	3.302	80,00	3.467	100,00	3.640	100,00	13.642	DINAS SOSIAL	Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	n/a		2.000		2.000		2.000		2.000		8.000	DINAS SOSIAL	Sosial
T2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,01	3,00		4,00		5,00		5,80		5,80			
		Tingkat Kemiskinan	Persen	21,33	21,00		19,00		18,50		18,00		18,00			
		Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita	Rp. Ribu	60.463	56.123		57.806		59.541		61.327		63.167			
		Indeks Gini	Indeks	0,381	0,373		0,369		0,366		0,362		0,358			
S7	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,55	69,24		69,93		70,63		71,33		71,33			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,37	5,00		4,80		4,60		4,40		4,40			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persen	N/A	20,00	6.551	30,00	6.715	40,00	6.883	50,00	7.055	50,00	27.203	DINAS TRANSMIGR ASI DAN TENAGA KERJA	Ketenagaker jaan
Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun		Per 1000 kasus	1,83	1,85		1,87		1,88		1,90		1,90				
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek																
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	2,18	2,22	1.500	2,27	1.538	2,32	1.576	2,37	1.615	2,37	6.229	DINAS TRANSMIGR ASI DAN	Ketenagaker jaan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
															TENAGA KERJA	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	N/A	60,00	1.500	70,00	1.471	80,00	1.513	90,00	1.555	100,00	6.039	DINAS TRANSMIGR ASI DAN TENAGA KERJA	Ketenagaker jaan
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persen	N/A	20,00	143	40,00	147	60,00	151	80,00	155	80,00	597	DINAS TRANSMIGR ASI DAN TENAGA KERJA	Ketenagaker jaan
S8	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata	Rp Milyar	3298,43	3364,40		3431,69		3500,32		3570,33		3570,33			
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen			2.250		2.363		2.481		2.605		9.698	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	Persen	N/A	10,00	2.672	15,00	3.125	20,00	3.281	25,00	3.445	25,00	12.523	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Persen	100,00	100,00	1.100	100,00	1.121	100,00	1.142	100,00	1.164	100,00	4.527	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Pariwisata
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	Persen	N/A	20,00		25,00		30,00		40,00		40,00			
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	industri	N/A	10		15		20		25		25			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik/Destinas i Wisata yang ditingkatkan	Persen	62,07	67,07	2.802	72,07	2.872	77,07	2.944	82,07	3.017	82,07	11.635	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Pariwisata
		Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	1,60	1,62		1,63		1,65		1,66					
		Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	2,00	2,02		2,04		2,06		2,08					
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	31,25	1.862	51,25	1.909	71,25	1.956	91,25	2.005	91,25	7.732	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	100,00	100,00	298	100,00	305	100,00	313	100,00	321	100,00	1.237	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	100,00	100,00	1.716	100,00	1.759	100,00	1.803	100,00	1.848	100,00	7.126	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	Persen	89,70	89,80	3.414	89,90	3.499	90,00	3.587	90,10	3.677	90,10	14.177	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA	Kebudayaan
S9	Meningkatnya peran sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,43	7,50		7,63		7,83		8,03		8,03			
		Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	30,87	31,02		31,18		31,34		31,49		31,49			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	Persen	50,00	60,00	1.147	75,00	1.170	80,00	1.193	90,00	1.217	90,00	4.727	DINAS PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN	Industri
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada/tidak ada	ada	ada		ada		ada							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	40,00	50,00	2.423	55,00	2.423	60,00	2.423	65,00	2.423	65,00	9.692	DINAS PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN	Industri
		Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Persen	7,00	5,00		6,00		7,00		7,00					
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				538		549		560		571		2.219	DINAS PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN	Industri

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				1.147		1.170		1.193		1.217		4.727	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Industri
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen	40,00	45,00	1.911	50,00	1.964	55,00	2.019	65,00	2.075	65,00	7.969	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan
		Persentase Nilai ekspor non Migas	juta US \$	2077,37	2118,92		2161,30		2204,52		2248,61		2293,58			
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	Persen	65,00	70,00	3.823	75,00	3.861	80,00	3.900	85,00	3.939	85,00	15.523	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100,00	100,00	6.701	100,00	6.835	100,00	6.972	100,00	7.111	100,00	27.619	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase Inflasi tahunan	Persen	3,47	3,35		3,30		3,25		3,25		3,25			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100,00	100,00	2.343	100,00	2.280	100,00	2.344	100,00	2.410	100,00	9.377	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	100	100	250	100	250	100	250	100	250				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50,00	53,00	1.249	45,00	1.311	50,00	1.377	55,00	1.446	55,00	5.383	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50,00	53,00		56,00		59,00		62,00		62,00			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	Persen	40,00	45,00	1.676	55,00	1.710	65,00	1.744	75,00	1.779	75,00	6.908	DINAS KOPERASI, USAHA	Koperasi, Usaha Kecil

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	LATIHAN PERKOPERASIAN	serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi													KECIL DAN MENENGAH	dan Menengah
		Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen	N/A	45,00		55,00		65,00		75,00		75,00			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	7,71	7,86	500	8,02	500	8,18	600	8,35	700	8,51	2.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		80,00			
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen	45,00	50,00	500	55,00	500	60,00	500	65,00	500	65,00	2.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	Persen	40,00	45,00		50,00		55,00		65,00		65,00			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	Persen	40,00	45,00	7.609	55,00	7.799	65,00	7.994	75,00	8.194	75,00	31.596	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	N/A	10,00		20,00		40,00		50,00					
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	N/A	10,00		20,00		40,00		50,00					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	Persen	28,71	30,15	2.072	31,65	2.134	32,29	2.198	33,90	2.264	33,90	8.668	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
S10	Meningkatnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,63	100,68		100,73		100,78		100,83		100,83			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan produktifitas pertanian per hektar pertahun	persen													
		Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	67	11,00	13.775	13,00	14.119	15,00	14.472	16,00	14.834	16,00	57.201	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA DAN PERKEBUNA N	Pertanian
		Produktivitas Tanaman Pangan														
		1. Padi	Ton/Ha	3,95	4,15		4,35		4,57		4,80		4,80			
		2. Kacang Tanah	Ton/Ha	1,10	1,16		1,21		1,27		1,34		1,34			
		3. Jagung	Ton/Ha	1,80	1,89		1,98		2,08		2,19		2,19			
		4. Ubi Kayu	Ton/Ha	11,40	11,97		12,57		13,20		13,86		13,86			
		5. Ubi Jalar	Ton/Ha	11,80	12,39		13,01		13,66		14,34		14,34			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan				
					2023		2024		2025		2026		K	A						
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.								
		Produktivitas Tanaman Hortikultura																		
		1. Cabai Rawit	Ton/Ha	3,47	3,82				4,01				4,21					4,42		4,42
		2. Tomat	Ton/Ha	2,91	3,20				3,36				3,53					3,71		3,71
		3. Sawi	Ton/Ha	2,55	2,81				2,95				3,09					3,25		3,25
		4. Bawang Merah	Ton/Ha	3,17	3,48				3,66				3,84					4,03		4,03
		5. Wortel	Ton/Ha	0,84	0,92				0,97				1,02					1,07		1,07
		6. Kangkung	Ton/Ha	3,51	3,86				4,06				4,26					4,47		4,47
		7. Bayam	Ton/Ha	2,22	2,45				2,57				2,70					2,83		2,83
		8. Kacang Panjang	Ton/Ha	2,27	2,50				2,63				2,76					2,90		2,90
		9. Melon	Ton/Ha	2,26	2,49				2,61				2,74					2,88		2,88
		10. Semangka	Ton/Ha	3,06	3,37				3,54				3,71					3,90		3,90
		11. Alpukat	Kuintal/Ha	0,79	0,87				0,91				0,96					1,01		1,01
		12. Durian	Kuintal/Ha	1,28	1,41				1,48				1,55					1,63		1,63
		13. Mangga	Kuintal/Ha	1,44	1,59				1,67				1,75					1,84		1,84
		14. Nangka	Kuintal/Ha	1,40	1,54				1,61				1,69					1,78		1,78
		15. Pisang	Kuintal/Ha	2,52	2,78				2,91				3,06					3,21		3,21
		16. Nanas	Kuintal/Ha	0,12	0,13				0,13				0,14					0,15		0,15
		17. Rambutan	Kuintal/Ha	0,56	0,62				0,65				0,68					0,72		0,72
		18. Jeruk Siam	Kuintal/Ha	2,20	2,41				2,54				2,66					2,80		2,80
		19. Salak	Kuintal/Ha	0,44	0,48				0,51				0,53					0,56		0,56
		20. Manggis	Kuintal/Ha	0,43	0,47				0,49				0,52					0,54		0,54
		Produktivitas Perkebunan																		
		1. Kelapa	Ton/Ha	0,87	0,96				1,06				1,16					1,28		1,28
		2. Kopi	Ton/Ha	0,07	0,08				0,09				0,10					0,11		0,11
		3. Kakao	Ton/Ha	0,08	0,09				0,10				0,11					0,12		0,12
		4. Pala	Ton/Ha	0,07	0,07				0,08				0,09					0,10		0,10
		5. Pinang	Ton/Ha	0,12	0,13				0,15				0,16					0,18		0,18
		6. Sagu	Ton/Ha	0,89	0,98				1,08				1,18					1,30		1,30
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT))	Persen	1,50	1,70	17.326	1,90	17.759	2,00	18.203	2,10	18.658	2,10	71.946	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA DAN PERKEBUNA N	Pertanian				
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	N/A	30,00		50,00		60,00		80,00		80,00							
		Persentase irigasi pertanian terbangun	Persen	N/A	30,00		50,00		60,00		80,00		80,00							

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang diberdayakan	Persen	N/A	50,00	618	60,00	633	70,00	649	80,00	666	80,00	2.566	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA DAN PERKEBUNA N	Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan areal wilayah gagal panen yang tertangani	Persen	N/A	40,00	1.600	50,00	1.760	60,00	1.936	80,00	2.130	80,00	7.426	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA DAN PERKEBUNA N	Pertanian
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Persen	N/A	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha di bidang pertanian yang memiliki ijin	Persen	1,00	1,10	150	1,20	300	1,30	300	1,40	300	1,40	1.050	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA DAN PERKEBUNA N	Pertanian
		Cakupan pelayanan penerbitan izin usaha pertanian	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Cakupan pelayanan penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen	80,00	80,00	1.177	85,00	2.000	90,00	2.000	100,00	2.000	100,00	7.177	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak	Persen	80,00	80,00	4.000	85,00	4.100	90,00	4.203	100,00	4.308	100,00	16.610	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
		Produksi daging ternak besar:														
		1. Sapi	ton	1.762,86	1.851,00		1.943,55		2.040,73		2.142,77		2.142,77			
		2. Kambing	ton	59,37	60,56		61,77		63,00		64,26		64,26			
		3. Babi	ton	1.596,27	1.676,08		1.759,89		1.847,88		1.940,28		1.940,28			
		Produksi daging unggas														
		1. Ayam kampung	ton	672,61	686,06		699,78		713,78		728,05		728,05			
		2. Ayam petelur	ton	296,85	305,76		314,93		324,38		334,11		334,11			
		3. Ayam pedaging	ton	1.015,74	1.036,05		1.056,78		1.077,91		1.099,47		1.099,47			
		3. Itik/itik manila	ton	59,77	60,37		60,97		61,58		62,20		62,20			
		Produksi telur														
		1. Ayam kampung	ton	2.522,45	2.774,69		3.052,16		3.357,38		3.693,12		3.693,12			
		2. Ayam petelur	ton	3.303,75	3.634,13		3.997,54		4.397,29		4.837,02		4.837,02			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		3. Itik/itik manila	ton	722,23	794,45		873,89		961,28		1.057,41		1.057,41			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak	Persen	80,00	80,00	3.221	85,00	3.302	90,00	3.384	100,00	3.469	100,00	13.375	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya	Persen	N/A	50,00	500	60,00	513	70,00	525	80,00	538	80,00	2.076	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan tertanggulangnya pasca bencana alam bidang peternakan	Persen	N/A	80,00	500	80,00	550	90,00	605	100,00	665	100,00	2.320	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen	N/A	80,00	1.240	85,00	1.302	90,00	1.367	100,00	1.435	100,00	5.345	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN	Pertanian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	6.183	100,00	6.307	100,00	6.433	100,00	6.561	100,00	25.484	BLUD KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT	Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	800	100,00	816	100,00	832	100,00	849	100,00	3.297	BLUD PENGELOLA AN KKP KAIMANA	Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69,19	70,00	1.210	70,00	1.240	75,00	1.271	75,00	1.303	75,00	5.025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan
		Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	90,00	92,00		92,00		95,00		95,00					
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Persen	N/A	50,00		70,00		80,00		90,00					
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	N/A	80,00		85,00		90,00		100,00					
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	72,50	78,00	6.640	80,00	7.598	85,00	8.250	90,00	9.124	90,00	31.612	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		Luas Kawasan Konservasi Perairan yang di kelola	Ha	2.567.455,46	2.887.680,79		2.673.847,66		3.090.496,56		3.023.034,33		3.023.034,33			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	46.000	46.500	6.182	47.000	7.344	48.000	7.930	49.000	8.662	49.000	30.118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	98,49	99,48		100,47		101,48		102,49		102,49			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	130.000	150.000	17.961	170.000	18.320	190.000	18.687	210.000	19.060	230.000	74.028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	95,565	96,52		97,49		98,46		99,45		99,45			
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan	Persen	25,00	25,00	1.900	25,00	2.444	30,00	2.930	40,00	3.662	40,00	10.936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan
		Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan untuk jenis makanan ikan	kg/kapita/bulan	2,93	3,08		3,23		3,39		3,56		3,56			
		Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian	Persen	5,71	5,80		5,88		5,97		6,06		6,06			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69,19	70,00	1.000	70,00	1.025	75,00	1.051	75,00	1.077	75,00	4.153	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan
S11	Meningkatnya investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Nilai Investasi	Rp. Triliun	n.a	15.077,07	15.454,00			15.840,35		16.236,35		16.236,35			
		Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya per tahun	Persen	n.a	10,00	10,00			10,00		10,00		10,00			
		Persentase UMKM yang meningkat omzetnya per tahun	Persen	n.a	10,00	10,00			10,00		10,00		10,00			
		Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,40	5,56	5,73			5,90		6,08		6,08			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	Persen	100,00	100,00	500	100,00	515	100,00	530	100,00	546	100,00	2.092	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Penanaman Modal
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	Persen	67,25	70,25	679	73,25	1.000	76,25	1.150	79,25	1.161	79,25	3.989	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Penanaman Modal

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Sektor	7	8	500	9	1.500	10	1.500	11	1.500	11,00	5.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Penanaman Modal
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perijinan & non perijinan yang di keluarkan pertahun	Dokumen	2.204	2.210	500	2.215	1.591	2.216	1.632	2.220	1.714	2.220	5.437	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Penanaman Modal
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	Persen	84,00	85,00	1.000	90,00	1.000	95,00	1.000	100,00	1.000	100,00	4.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Penanaman Modal
S12	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, distrik dan kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	n.a	12,06		15,51		18,96		22,41		22,41			
		Cakupan sistem administrasi dan informasi kampung yang terhubung dengan Kabupaten dan Provinsi	Persen	61,65	65,00		80,00		90,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase Posyandu aktif	Persen	100,00	100,00	7.108	100,00	7.321	100,00	7.541	100,00	7.767	100,00	29.737	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN KAMPUNG	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		Persentase peningkatan status desa mandiri	persen													
		Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok	127	134		141		149		157		157			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen	46,41	50,00	18.557	60,00	18.928	70,00	19.307	80,00	19.693	80,00	76.485	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN KAMPUNG	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri	Persen	0,00	0,29	1.231	0,46	1.477	0,63	1.773	0,80	2.127	0,80	6.608	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN KAMPUNG	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		Persentase kampung maju	Persen	0,75	1,44		1,72		2,01		2,30		2,30			
		Persentase kampung berkembang	Persen	7,86	10,33		13,32		16,30		19,29		19,29			
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	100,00	536	100,00	590	100,00	649	100,00	713	100,00	2.488	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit	ada/tidak ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		layanan untuk kesejahteraan masyarakat													T DAN KAMPUNG	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persen	100,00	100,00	384	100,00	500	100,00	500	100,00	500	100,00	1.884	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
T3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru / Kawasan Kota Baru	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124,82	122,32		119,88		117,48		115,13		115,13			
S13	Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	73,23	76,89		80,74		84,77		89,01		89,01			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen			556.891		568.029		579.389		590.977		1.742.069	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	Persen	90,00	91,50	10.745	93,00	1.000	94,50	1.000	96,00	1.000	96,00	13.745	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	N/A	30,00		30,00		30,00		30,00					
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	Persen	25,00	27,20	18.388	29,59	18.756	32,20	19.131	35,03	19.513	35,03	75.788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi	Persen	8,33	16,67	7.523	25,00	7.899	33,33	8.294	41,67	8.709	41,67	32.425	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
S14	Meningkatnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih, sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	73,52	81,09		82,31		83,54		84,79		84,79			
		Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persen	n.a	80,01		81,21		82,43		83,66		83,66			
		Cakupan Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi	Persen	N/A	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	N/A	25,00	13.448	25,00	13.784	25,00	14.129	25,00	14.482	25,00	55.843	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	4,27	10,15	87.831	16,39	89.588	23,02	91.379	30,07	93.207	30,07	362.005	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
S15	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	n.a	58,25		59,70		61,20		62,73		62,73			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	N/A	18,18	5.979	27,27	6.278	27,27	6.592	27,27	6.921	100,00	25.770	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Pemukiman	Cakupan Pemukiman yang dibangun	persen	n/a		51.600		52.116		52.637		53.164		209.517	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pekerjaan Umum
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	17,49	18,36	14.421	19,28	15.142	20,25	15.899	21,26	16.694	21,26	62.156	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n
		Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Persen	N/A	25,00		50,00		75,00		100,00					
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	N/A	60,00		64,80		69,98		75,58					
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani	Persen	N/A	80,00		86,40		93,31		100,00					
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	N/A	65,00		70,20		75,82		81,88					

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	100,00	13.922	100,00	14.618	100,00	15.349	100,00	16.116	100,00	60.006	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n
S16	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses internet telepon seluler	Persen	n.a	85,14		87,70		90,33		93,04		93,04			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	N/A	80,00	6.613	87,20	6.745	95,05	6.880	100,00	7.018	100,00	27.256	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	N/A	85,00	13.717	92,65	14.403	100,00	15.123	100,00	15.879	100,00	59.122	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Kominfo
		Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)	Persen	40,18	60,00		80,00		90,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	N/A	65,00	344	70,85	500	77,23	500	84,18	500	84,18	1.844	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	N/A	100,00	2.032	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00	8.032	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Persandian
S17	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Cakupan wilayah kabupaten/kota pesisir yang terhubung dengan moda transportasi laut	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi udara	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi	Persen	N/A	60,00	17.762	63,00	18.650	66,15	19.583	69,46	20.562	69,46	76.556	DINAS PERHUBUNG AN	Perhubunga n
V/C Ratio di Jalan Provinsi		Persen	N/A	45,00	47,25		49,61		52,09		52,09					
Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang		Persen	N/A	35,00	36,75		38,59		40,52		40,52					
Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi		Persen	N/A	75,00	78,75		82,69		86,82		86,82					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen	N/A	20,00	530	21,80	600	23,76	600	25,90	600	25,90	2.330	DINAS PERHUBUNG AN	Perhubunga n
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	93.061.17 1	97.714.23 0	36.188	106.508.5 10	36.912	116.094.2 76	37.650	126.542.7 61	38.403	126.542 .761	149.153	DINAS PERHUBUNG AN	Perhubunga n
Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut		Orang	450.602	473.132	515.714		562.128		612.720		612.720					
Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut		Persen	N/A	60,00	65,40		71,29		77,70		77,70					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	N/A	17.000.00 0	5.289	18.530.00 0	5.553	20.197.70 0	5.831	22.015.49 3	6.123	22.015. 493	22.796	DINAS PERHUBUNG AN	Perhubunga n
		Jumlah arus penumpang angkutan udara	arus penumpang g	1.837.565, 00	1.929.443		2.103.093		2.292.372		2.498.685		2.498.6 85			
S18	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan non-PLN)	Persen	95,49	95,68		95,87		96,06		96,26		96,26			
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan peningkatan ketenagalistrikan	Unit	1800	500	20.126	500	20.629	500	21.145	500	21.674	500	83.574	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Energi dan Mineral
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	68,47	71,89		75,49		80,00		84,00		83,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan pembangunan energi terbarukan	Unit	1750	500	205	500	300	500	300	500	300	500	1.105	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Energi dan Mineral
		Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Persen	83,40	85,40		87,40		89,40		91,40		91,40			
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	30,00	40,00	233	50,00	556	60,00	572	70,00	588	70,00	1.949	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Energi dan Mineral
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen	5,00	7,00		10,00		12,00		15,00		15,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	N/A	50,00	527	70,00	600	80,00	600	100,00	600	100,00	2.327	DINAS ENERGI DAN SUMBER	Energi dan Mineral

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	MINERAL DAN BATUBARA														DAYA MINERAL	
T4	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	84,22	77,82		78,45		78,45		78,45		78,45			
S19	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	62,00	56,25		56,35		56,35		56,35		56,35			
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	89,30	91,98		94,74		97,58		100,00		100,00			
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95,79	92,17		92,27		92,27		92,27		92,27			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Persen	53,89	60,00	1.566	63,50	1.230	65,00	1.265	67,50	1.300	67,50	5.361	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Persen	92,64	93,00		94,50		96,00		97,00					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		0,00					
		Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
		Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
		Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	Persen	N/A	30,00		32,40		34,99		37,79					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada	-	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
		Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	N/A	75,00		81,00	500	87,48	500	94,48	500	94,48	1.500	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	N/A	75,00	1.660	81,00	1.650	87,48	1.696	94,48	1.744	94,48	6.751	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	N/A	25,00	362	40,00	500	60,00	500	80,00	500	80,00	1.862	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	Persen	N/A	65,00	183	70,20	130	75,82	134	81,88	137	81,88	584	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	N/A	5	-	7	500	9	500	11	500	11	1.500	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
		Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat,kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	Persen	N/A	60,00		64,80		69,98		75,58		75,58			
		Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA yang diverifikasi	N/A	60,00		63,00		66,15		69,46		69,46			
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah kearifan. lokal yang diverifikasi	N/A	60,00		62,40		64,90		67,49		67,49			
		Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	N/A	5		7		9		11		11			
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	N/A	65,00	189	67,60	500	70,30	500	73,12	500	73,12	1.689	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	Persen	N/A	70,00	250	72,80	250	75,71	250	78,74	250	78,74	1.000	DINAS LINGKUNGA N HIDUP DAN PERTANAHA N	Lingkungan Hidup
S20	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	tCO2/th		3.740.83 0	3.206.42 6		2.672.0 22		2.137.6 17		2.137.6 17				
Persen				70,00	60,00		50,00		40,00		40,00					
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan	Jumlah orang	528,00	200	1.615	200	1.655	200	1.697	300	1.739	300,00	6.706	DINAS KEHUTANAN	Kehutanan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	pemberberdayaan kehutanan														
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha	7.140.930	1.206.596	35.209	1.396.484	36.969	1.474.263	38.818	1.529.818	40.759	152981 8,00	151.755	DINAS KEHUTANAN	Kehutanan
		Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	N/A	30,00		25,50		21,68		18,42					
		Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persen	N/A	22,26		24,26		26,44		28,82					
		Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen	N/A	30,00		34,50		39,68		45,63		45,63			
		Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3	789.182	804.966		821.065		837.486		854.236		854.236			
		Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha	N/A	20,00		21,80		23,76		25,90		25,90			
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen	N/A	75,00		81,75		89,11		97,13		97,13			
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen	100	100,00	522	100,00	720	100,00	790	100,00	800	100,00	2.832	DINAS KEHUTANAN	Kehutanan
		Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	40,00	40,00		46,00		52,90		60,84					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen	N/A	20,00		23,00	2.920	26,45	2.955	30,42	3.037	30,42	8.912	DINAS KEHUTANAN	Kehutanan
T5	Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n.a	B		B		B		A		A			
S22	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B		B		B		A		A			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan kebijakan dan model afirmasi perlindungan sosial OTSUS bagi OAP kontekstual Papua	ada/tidak ada	ada	ada	1.967	ada	2.065	ada	2.169	ada	2.277	ada	8.478	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAA N OTONOMI KHUSUS	Pemerintah an Umum
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	2.013	100,00	2.063	100,00	2.115	100,00		100,00	6.191	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAA N OTONOMI KHUSUS	Pemerintah an Umum
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persen	N/A	100,00	400	100,00		100,00		100,00		100,00	400	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAA N OTONOMI KHUSUS	Pemerintah an Umum
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kerjasama daerah	Persen	N/A	100,00	3.718	100,00		100,00		100,00		100,00	3.718	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAA N OTONOMI KHUSUS	Pemerintah an Umum
		Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/kota	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persen	N/A	100,00	5.605	100,00		100,00		100,00		100,00	5.605	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAA N OTONOMI KHUSUS	Pemerintah an Umum
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	10,00	10,00	986	25,00	1.006	40,00	1.026	55,00	1.046	55,00	4.064	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pemerintah an Umum
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Layanan Administrasi pemerintahan desa	Persen	N/A	100,00	547	100,00	670	100,00	708	100,00	727	100,00	2.652	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pemerintah an Umum
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Cakupan pelaporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persen	N/A	100,00	156	100,00	660	100,00	658	100,00	698	100,00	2.172	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pemerintah an Umum
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	5.491	100,00	5.817	100,00	5.979	100,00	6.147	100,00	23.434	BIRO HUKUM	Pemerintah an Umum
		Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
		terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu														
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat terutama OAP	Persen	N/A	100,00	66.851	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00	276.851	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemerintah an Umum
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	5.571	B	5.000	B	5.000	A	5.000	A	20.571	BIRO ORGANISASI	Pemerintah an Umum
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	B		B		B		A		A			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	B		B		B		A		A			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rumusan kebijakan dan model penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan distrik yang dihasilkan	ada/tidak ada	ada	ada	8.201	ada	8.000	ada	8.000	ada	8.000	ada	32.201	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pemerintah an Umum
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	N/A	75,00	6.750	80,00	7.000	85,00	7.000	90,00	7.000	90,00	27.750	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pemerintah an Umum
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	N/A	50,00		60,00		70,00		80,00		80,00			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Persen	N/A	100,00	3.000	100,00	5.018	100,00	5.158	100,00	5.302	100,00	18.477	BIRO PEREKONOMIAN	Pemerintah an Umum
		Presentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
		Presentase Rumusan Kebijakan koperasi, ekonomi kreatif dan sumber daya alam	Persen	N/A	100		100		100		100		100,00			
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	N/A	100,00	326	100,00	485	100,00	498	100,00	512	100,00	1.821	SEKRETARIAT DAERAH	Pemerintah an Umum
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	Persen	100,00	100,00	2.990	100,00	3.065	100,00	3.141	100,00	3.220	100,00	12.416	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Pemerintah an Umum
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPB	ada/tidak ada	N/A	ada	45.791	ada	46.249	ada	46.711	ada	47.179	ada	185.930	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN	Pemerintah an Umum

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPB untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada		RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	
		Terintegrasi program-program DPRP untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRP	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
	PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjangrian aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP	Persen	N/A	100,00	-	100,00	1.072	100,00	1.102	100,00	1.133	100,00	3.308	SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	Pemerintah an Umum
	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA BARAT	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan MRP	ada/tidak ada	N/A	ada	59.775	ada	56.493	ada	58.071	ada	59.698	ada	234.037	SEKRETARIA T MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	Pemerintah an Umum
		Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangrian aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen	N/A	100,00	300	100,00	440	100,00	480	100,00	520	100,00	1.740	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN	Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	50,00	250	60,00	830	70,00	910	80,00	990	80,00	2.980	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN	Kearsipan

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
S23	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2		2		2		3		3			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan koordinasi dan sinkronissasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat				12.106		12.348		12.595		12.847		49.896	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah	Persen	100,00	100,00	10.500	100,00	10.763	100,00	11.032	100,00	11.307	100,00	43.601	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
		Ketersediaan Dokumen RKPD	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada					
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	N/A	2	13.818	2	14.163	3	14.518	3	14.880	3,00	57.379	INSPEKTORAT	Pengawasan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	N/A	100,00	411	100,00	487	100,00	500	100,00	514	100,00	1.912	INSPEKTORAT	Pengawasan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	N/A	75,00		80,00		85,00		100,00		100,00			
S24	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah	Level	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Asset management	Ya/Tidak	Ya	Ya	5.800	Ya	6.380	Ya	7.018	Ya	7.720	Ya	26.918	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP /D	WTP	WTP	2.010.930	WTP	2.051.149	WTP	2.092.172	WTP	2.134.015	WTP	8.288.265	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah
		Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu					
		Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tid	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu					

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
			ak Tepat Waktu													
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	N/A	5,00	2.657	6,00	3.132	7,00	3.219	8,00	3.309	8,00	12.317	BADAN PENDAPATA N DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Rasio PAD	Persen	N/A	6,00											
		Persentase Peningkatan penerimaan PAD UPT Fak-Fak	Rp. Miliar	N/A	5	589	5	604	5	619	5	634	5	2.446	UPT SAMSAT KABUPATEN FAKFAK	Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Kaimana	Rp. Miliar	N/A	5	597	5	612	5	627	5	643	5	2.479	UPT SAMSAT KABUPATEN KAIMANA	Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari	Rp. Miliar	N/A	5	786	5	806	5	826	5	846	5	3.264	UPT SAMSAT KABUPATEN MANOKWARI	Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Bintuni	Rp. Miliar	N/A	5	408	5	418	5	429	5	439	5	1.694	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK BINTUNI	Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Wondama	Rp. Miliar	N/A	5	531	5	544	5	558	5	572	5	2.205	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK WONDAMA	Pengelolaan Keuangan Daerah
S25	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam menyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	N/A	100,00	12.218	100,00	12.800	100,00	14.650	100,00	16.250	100,00	55.918	BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH	Kepegawaia n
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	18.417	100,00	18.785	100,00	19.161	100,00	19.544	100,00	75.908	BLUD BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Kepegawaia n
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	N/A	100,00	1.626	100,00	1.626	100,00	1.626	100,00	1.626	100,00	6.504	BLUD BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Kepegawaia n

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan					
					2023		2024		2025		2026		K	A							
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.									
S26	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang terimplementasi	Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	n.a	Inovatif		Inovatif		Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif								
		Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Tinggi		Tinggi								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00	2.770	100,00	2.825	100,00	2.882	100,00	2.940	100,00	11.417	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH					
		Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00										
		Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00										
		Cakupan publikasi ilmiah dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00										
S27	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase Kab/ Kota yang Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	74,23	81,65	800	89,82	816	98,80	832	100,00	849	100,00	3.297	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kependudukan dan Catatan Sipil					
		Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	N/A	50				60				70					80		80,00	-
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen		100				100				100					100			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	N/A	70		80		90		100				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kependudukan dan Catatan Sipil					
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	40,00	1.833	50,00	1.870	60,00	1.907	70,00	1.945	100,00	7.555	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUK	Kependudukan dan Catatan Sipil					

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														KAN, PENCATATA N SIPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen		100,00	352	100,00	300	100,00	300	100,00	300		1.252	DINAS ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN, PENCATATA N SIPIL, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kependudu kan dan Catatn Sipil
T6	Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	n.a	63,00		65,00		67,00		70,00		70,00			
S28	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	n.a	142,05		141,34		140,63		139,93		139,23			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	N/A	100,00	4.485	100,00	4.597	100,00	4.712	100,00	4.830	0,00	18.624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Ketentrama n, Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	8.444	100,00	8.866	100,00	9.310	100,00	9.775	100,00	36.395	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	Ketentrama n, Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat
		Presentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah Atau Legal	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00					
		Presentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00					
S29	Meningkat kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	n.a	82,10		82,92		83,75		84,59		84,59			

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Urusan Peme- rintahan
					2023		2024		2025		2026		K	A		
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	N/A	100,00	-	100,00	1.530	100,00	1.572	100,00	1.616	0,00	4.718	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Ketentrama n, Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina dan diawasi	Persen	100,00	100,00	133.451	100,00	136.120	100,00	138.842	100,00	141.619	100,00	550.033	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen	100,00	100,00	181	100,00	369	100,00	379	100,00	390	100,00	1.319	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100,00	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	12.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan DIni Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Persen	100,00	100,00	1.557	100,00	1.588	100,00	1.620	100,00	1.652	100,00	6.417	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	100,00	100,00	8.964	100,00	10.907	100,00	11.212	100,00	11.526	100,00	42.610	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan gambaran distribusi penggunaan kapasitas fiskal daerah kedalam berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kerangka urusan bidang kewenangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

7.1 KERANGKA PENDANAAN

Adanya kebijakan pemekaran daerah Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan daerah Provinsi induk Papua Barat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang APBN, Provinsi Papua Barat harus berbagi dana transfer dengan daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang dihitung menggunakan formula dan justifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Demikian juga halnya dengan potensi pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan akibat cukup besarnya potensi objek pajak dan retribusi daerah yang berada di wilayah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Kedepan tantangan utama bagi Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan porsi pendapatan daerah dari PAD terutama dari sumber-sumber potensial yang belum tergali.

Pengalokasian utama belanja daerah terutama akan dialokasikan pada pengeluaran mengikat dan pengeluaran wajib. Pengeluaran daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya gambaran belanja mengikat dan wajib yang dterkandung dalam APBD Provinsi Papua Barat, antara lain:



- a. Belanja mengikat untuk membiayai program penunjang urusan provinsi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk belanja gaji, tunjangan dan kebutuhan rutin lain yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan;
- b. Belanja transfer mengikat terutama terdapat pada dana bagi Hasil migas dan sumber daya alam lainnya, disamping bagi hasil dari beberapa pos Pendapatan Asli daerah tertentu;
- c. Belanja program-program tertentu yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat, seperti misalnya belanja Pengawasan Pembangunan Daerah dan pembinaan aparatur
- d. Belanja fungsi Pendidikan yang mencapai 20 persen dari total belanja daerah yang teralokasi tidak hanya pada Dinas Pendidikan tapi juga pada Dinas terkait lainnya bahkan juga terdapat pada Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada Kabupaten/kota
- e. Belanja Bidang Kesehatan yang mencapai minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji yang juga teralokasi tidak hanya pada Dinas kesehatan tapi juga pada unit kesehatan lainnya termasuk Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada Kabupaten/kota
- f. Belanja Bidang Infrastruktur daerah yang terutama berasal dari sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otsus, Dana Tamabahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus (DTI).

Gambaran umum kerangka pendanaan Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 selanjutnya ditampilkan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat 2023-2026 (Rp)

Uraian	2023	2024	2025	2026
PENERIMAAN DAERAH	5.555.620.880.586	5.020.944.165.262	5.138.445.136.318	5.258.999.120.727
PENDAPATAN DAERAH	4.910.620.880.589	5.020.944.165.262	5.138.445.136.318	5.258.999.120.727
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	644.999.999.997	0	0	0
Dikurangi :				
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH TAHUN 2023-2026	4.276.356.327.228	4.164.016.484.096	4.264.736.316.299	4.358.391.149.420
Belanja Penunjang Urusan	1.081.215.383.763	1.103.389.688.909	1.130.498.052.513	1.156.152.147.922
Belanja Transfer	1.848.814.072.231,00	1.673.407.153.056,95	1.709.450.504.972,52	1.746.291.980.192,04
Belanja Pengawasan Inspektorat	14.229.000.000	14.650.054.487	15.017.730.024	15.394.683.325
Belanja Pendidikan	271.736.930.000	285.323.776.500	285.378.740.325	285.436.452.341
Belanja Kesehatan	236.216.209.984	243.304.876.093	260.175.392.809	270.134.626.619
Belanja Infrastruktur (DAK FISIK + 0,25*DAU +DTI)	824.144.731.250	843.940.935.050	864.215.895.655	884.981.259.020
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.279.264.553.358	856.927.681.165	873.708.820.019	900.607.971.307

Sedangkan plafon belanja berdasarkan urusan kewenangan dan Organisasi perangkat daerah diuraikan dalam Tabel VII.2.



Tabel VII.2 Indikasi Plafon Belanja OPD Berdasarkan Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

No	OPD	2023	2024	2025	2026
1	DINAS PENDIDIKAN	327.300	341.998	343.186	344.400
2	DINAS KESEHATAN	200.486	212.311	219.164	226.247
3	RSUD	146.019	146.019	160.986	169.035
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR	870.347	878.909	897.650	916.838
5	SATPOL PP	38.729	41.227	42.262	43.323
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.781	21.512	22.271	23.061
7	DINAS SOSIAL	41.229	42.365	43.538	44.748
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	33.830	35.421	36.320	37.242
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.374	29.396	30.513	31.395
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	27.657	28.496	29.257	30.040
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	53.612	56.417	58.338	60.345
12	DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL DAN KB	19.027	20.566	21.121	21.694
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	43.488	44.802	46.074	47.432
14	DINAS PERHUBUNGAN	77.007	79.298	81.598	83.981
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.727	37.950	39.091	40.276
16	DINAS KOOPERASI DAN UMKM	28.437	28.704	29.163	29.633
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP	15.170	17.896	18.411	18.834
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	29.713	29.905	30.379	30.873
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	23.862	24.459	25.070	25.697
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16.509	17.657	18.164	18.681
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	74.950	78.830	81.794	85.397
22	DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	75.010	77.174	79.352	79.606
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	33.959	33.461	34.385	35.341
24	DINAS KEHUTANAN	136.778	149.104	154.082	159.235
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	38.045	39.463	40.429	41.419
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.255	5.312	5.370	5.429
27	SEKRETARIAT DAERAH	160.907	210.957	190.093	222.682
28	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTSUS	14.753	5.200	5.376	3.391
29	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.000	3.778	3.978	4.216
30	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9.000	7.874	8.093	8.320
31	BIRO HUKUM	8.000	8.326	8.488	8.656
32	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	69.581	70.500	70.500	70.500
33	BIRO ORGANISASI	7.000	6.165	6.198	6.231
34	BIRO PEMERINTAHAN	8.331	8.500	8.500	8.500
35	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.000	8.250	8.250	8.250
36	BIRO PEREKONOMIAN	3.000	7.874	8.093	8.320
37	BIRO UMUM	25.669	25.669	25.669	25.669
38	SEKRETARIAT DPRPB	119.130	121.394	122.627	123.873
39	SEKRETARIAT MRPB	72.190	69.242	71.176	73.170
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48.438	49.459	50.502	51.567
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	64.100	64.221	66.006	67.846
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.129.312	1.513.815	1.567.059	1.579.022
43	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44.485	45.116	46.182	47.277
44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.570	13.895	14.229	14.570
45	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	15.280	15.001	15.423	15.858
46	INSPEKTORAT	41.064	42.156	43.211	44.293
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34.212	35.344	37.757	39.935
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	164.298	169.558	173.067	176.651
TOTAL JUMLAH BELANJA		5.505.620	5.020.944	5.138.445	5.258.999

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel VII.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Daerah Daerah Papua Barat 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	55,563	100.00	56,674	100.00	57,808	100.00	58,964	100.00	229,009	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	100.00	100.00	270,690	100.00	284,225	100.00	284,225	100.00	284,225	100.00	1,166,708	DINAS PENDIDIKAN
	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	per satuan murid	5	5		5	5	5	5					
	Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	20.00	40.00		60.00	80.00	100.00	100.00					
	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		45.33	43.75		45.90	47.48	49.06						
	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		57.75	61.52		65.43	67.43	69.43						
	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	52.52		54.65	56.78	58.91						
	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	60.81		63.89	66.97	70.05						
	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A											
	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A											
	Indeks Iklim Keamanan SDLB	indeks	76.40	84.00		88.22	92.22	96.22						
	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	indeks	60.00	83.10		85.72	88.22	90.72						
	Indeks Inkuisivitas SDLB	indeks	69.60	81.26		84.52	87.78	91.04						
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	indeks	N/A	86.43		89.86	93.29	96.72						
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	indeks	N/A	77.63		79.86	82.09	84.32						
	Indeks Inkuisivitas SMPLB	indeks	N/A	94.90		98.00	98.50	99.00						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
			2021	2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	Indeks Iklim Keamanan SMALB	indeks	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	indeks	N/A	N/A		N/A		N/A						
	Indeks Inkusisivitas SMALB	indeks	N/A	N/A		N/A		N/A						
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SDLB	Rasio per 10.000 murid	747	750	269	750	282	750	296	750	311	750	1,159	DINAS PENDIDIKAN
	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio per 10.000 murid	732	750		750		750		750				
	Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio per 10.000 murid	1,181	1,200		1,200		1,200		1,200				
	Persentase Guru SLB yang tersertifikasi (SDGs)	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase Guru SDLB,SMPLB,SMALB yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase penataaan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	dokumen	0	1	778	1	817	1	858	1	901	4	3,353	DINAS PENDIDIKAN
	Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meningkawt kompetensinya	orang	0	1		1		1		1		4		
KESEHATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	38,915	100.00	40,082	100.00	41,285	100.00	42,523	100.00	162,806	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	143,724	2.1 : 1000	148,036	2.2 : 1000	152,477	2.3 : 1000	157,051	2.3 : 1000	601,288	DINAS KESEHATAN
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	akibat bencana dan/atau berpotensi bencana													
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	240.87											
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	5.90											
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	29.00	35.00		50.00		75.00		95.00		95.00		
	Prevalensi HIV	Persen	2.00	1.80		1.50		1.20		1.00		1.00		
	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	5.53	4		3		2		1		1.00		
	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	51.20	60.00		75.00		90.00		100.00		100.00		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100.00	100.00	450	100.00	473	100.00	496	100.00	521	100.00	1,940	DINAS KESEHATAN
	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14.00	20.00	14,674	35.00	15,408	55.00	16,178	75.00	16,987	75.00	63,247	DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	3.00	5	2,723	8	2,859	11	3,002	13	3,152		11,736	DINAS KESEHATAN
PROGRAM MEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait	Persen	100.00	100.00	0	100.00	5,453	100.00	5,726	100.00	6,012	100.00	17,191	DINAS KESEHATAN



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	penurunan prevalensi stunting)													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100.00	100.00	71,374	100.00	74,942	100.00	78,689	100.00	82,624	100.00	307,629	BLUD RSUD Papua Barat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	71,832	2.1 : 1000	75,423	2.2 : 1000	79,194	2.3 : 1000	83,154	2.3 : 1000	309,603	BLUD RSUD Papua Barat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pegawai rumah Sakit yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen	100.00	100.00	2,814		2,954		3,102		3,257		12,127	BLUD RSUD Papua Barat
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	37,452	100.00	38,201	100.00	38,965	100.00	39,744	100.00	154,362	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen			556,891		568,029		579,389		590,977		1,742,069	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	Persen												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	95.00	95.30	3,674	95.50	3,766	95.80	3,860	96.00	3,956	96.00	15,256	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen			25,176		25,805		26,451		27,112		104,544	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Persen	N/A	0.00	21,397	0.00	21,932	33.33	22,480	66.67	23,042	66.67	88,851	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	N/A	25.00	13,448	25.00	13,784	25.00	14,129	25.00	14,482	25.00	55,843	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	Persen	25.00	27.20	18,388	29.59	18,756	32.20	19,131	35.03	19,513	35.03	75,788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	Persen	90.00	91.50	10,745	93.00	1,000	94.50	1,000	96.00	1,000	96.00	13,745	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	N/A	30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi	Persen	8.33	16.67	7,523	25.00	7,899	33.33	8,294	41.67	8,709	41.67	32,425	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	4.27	10.15	87,831	16.39	89,588	23.02	91,379	30.07	93,207	30.07	362,005	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	N/A	18.18	5,979	27.27	6,278	27.27	6,592	27.27	6,921	100.00	25,770	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA Regional	Persen	N/A	25.00	1,900	27.50	1,995	30.00	2,095	33.00	2,199	33.00	8,189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Pengembangan Pemukiman	Cakupan Pemukiman yang dibangun	persen	n/a		51,600		52,116		52,637		53,164		209,517	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	17.49	18.36	14,421	19.28	15,142	20.25	15,899	21.26	16,694	21.26	62,156	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Persen	N/A	25.00		50.00		75.00		100.00				
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	N/A	60.00		64.80		69.98		75.58				
	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani	Persen	N/A	80.00		86.40		93.31		100.00				
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	N/A	65.00		70.20		75.82		81.88				
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	100.00	13,922	100.00	14,618	100.00	15,349	100.00	16,116	100.00	60,006	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	34,244	100.00	35,100	100.00	35,978	100.00	36,877	100.00	142,199	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	N/A	100.00	4,485	100.00	4,597	100.00	4,712	100.00	4,830	0.00	18,624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	N/A	100.00	0	100.00	1,530	100.00	1,572	100.00	1,616	0.00	4,718	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	12,337	100.00	12,645	100.00	12,962	100.00	13,286	100.00	51,230	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100.00	100.00	8,444	100.00	8,866	100.00	9,310	100.00	9,775	100.00	36,395	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Presentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah Atau Legal	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Presentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
				100.00		100.00		100.00		100.00				
Sosial														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	27,820	100.00	28,516	100.00	29,228	100.00	29,959	100.00	115,523	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30.00	5,000	50.00	5,125	80.00	5,253	100.00	5,384	100.00	20,763	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100.00	3,165	100.00	3,323	100.00	3,489	100.00	3,664	100.00	13,642	DINAS SOSIAL
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	30.00	3,144	50.00	3,302	80.00	3,467	100.00	3,640	100.00	13,642	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	n/a		2,000		2,000		2,000		2,000		8,000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan makam yang terpenuhi pemeliharannya di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persen	N/A	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	400	DINAS SOSIAL
Tenaga Kerja														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	22,056	100.00	22,607	100.00	23,173	100.00	23,752	100.00	91,588	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	Per 1000 kasus	1.83	1.85		1.87		1.88		1.90		1.90		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek													
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persen	N/A	20.00	6,551	30.00	6,715	40.00	6,883	50.00	7,055	50.00	27,203	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja													
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	2.18	2.22	1,500	2.27	1,538	2.32	1,576	2.37	1,615	2.37	6,229	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	N/A	60.00	1,500	70.00	1,471	80.00	1,513	90.00	1,555	100.00	6,039	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00						



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persen	N/A	20.00	143	40.00	147	60.00	151	80.00	155	80.00	597	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Persen	N/A	50.00	1,079	60.00	1,109	80.00	1,140	100.00	1,172	100.00	4,502	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persen	N/A	50.00		60.00		80.00		100.00	100.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	N/A	50.00	750	60.00	1,471	80.00	1,513	100.00	1,555	100.00	5,289	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada/tidak ada	N/A	ada	250	ada	362	ada	372	ada	383	ada	1,367	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	12,746	100.00	13,065	100.00	13,700	100.00	14,084	100.00	53,594	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date pada 11 kabupaten/kota di Papua Barat	Persen	N/A	20.00	685	50.00	702	80.00	720	100.00	738	100.00	2,844	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Per 100 ribu perempuan	N/A	0	2,710	0	2,846	0	2,988	0	3,137	0	11,680	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	Persen	N/A	100.00	1,944	100.00	1,993	100.00	2,042	100.00	2,093	100.00	8,072	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	48.01	50.65		53.44		56.38		59.48	59.48			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20.00	7,653	50.00	7,844	80.00	8,040	100.00	8,241	100.00	31,779	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20.00		50.00	80.00	100.00	100.00					
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persen	N/A	20.00	2,012	50.00	2,062	80.00	2,114	100.00	2,167	100.00	8,355	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	per 10 ribu anak	N/A	0	624	0	884	0	909	0	934	0.00	3,352	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pangan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	14,398	100.00	14,758	100.00	15,127	100.00	15,505	100.00	59,788	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	Persen	44.04	43.04	900	42.04	1,000	41.04	1,000	40.04	1,000	40.04	3,900	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Persen	100.00	100.00	2,800	100.00	2,940	100.00	3,087	100.00	3,241	100.00	12,068	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Cakupan pangan segar yang sudah disertifikasi	Produk	80	25		25	25	25	180					
	PPH Ketersediaan pangan	Persen	89.17	91.00	9,559	93.00	9,798	97.00	10,043	100.00	10,294	100.00		



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH konsumsi pangan	Persen	77.80	83.30		88.80		94.30		100.00		100.00	39,694	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pertanahan														
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	N/A	100.00	950	100.00	975	100.00	1,002	100.00	1,030	100.00	3,957	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	N/A	100.00	31,000	100.00	32,550	100.00	34,178	100.00	35,886	100.00	133,614	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Lingkungan Hidup														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	17,158	100.00	17,330	100.00	17,503	100.00	17,678	100.00	69,668	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Persen	53.89	60.00	1,566	63.50	1,230	65.00	1,265	67.50	1,300	67.50	5,361	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	Indeks Kualitas Udara	Persen	92.64	93.00		94.50		96.00		97.00				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		0.00				
	Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada				
	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada				
	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	Persen	N/A	30.00		32.40		34.99		37.79		37.79		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	N/A	75.00		81.00	500	87.48	500	94.48	500	94.48	1,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	N/A	75.00	1,660	81.00	1,650	87.48	1,696	94.48	1,744	94.48	6,751	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	N/A	25.00	362	40.00	500	60.00	500	80.00	500	80.00	1,862	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	Persen	N/A	65.00	183	70.20	130	75.82	134	81.88	137	81.88	584	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	N/A	5	0	7	500	9	500	11	500	11	1,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat,kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	Persen	N/A	60.00		64.80		69.98		75.58		75.58		
	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA yang diverifikasi	N/A	60.00		63.00		66.15		69.46		69.46		
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah kearifan. lokal yang diverifikasi	N/A	60.00		62.40		64.90		67.49		67.49		



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	N/A	5		7		9		11		11		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	N/A	65.00	189	67.60	500	70.30	500	73.12	500	73.12	1,689	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	Persen	N/A	70.00	250	72.80	250	75.71	250	78.74	250	78.74	1,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	16,042	100.00	16,134	100.00	16,596	100.00	17,072	100.00	65,843	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	74.23	81.65	800	89.82	816	98.80	832	100.00	849	100.00	3,297	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	N/A	50		60		70		80		80.00	-	
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen		100		100		100		100				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	N/A	70		80		90		100				DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
														KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	40.00	1,833	50.00	1,870	60.00	1,907	70.00	1,945	100.00	7,555	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen		100.00	352	100.00	300	100.00	300	100.00	300		1,252	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	15,672	100.00	15,985	100.00	16,305	100.00	16,631	100.00	64,594	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentasse Posyandu aktif	Persen	100.00	100.00	7,108	100.00	7,321	100.00	7,541	100.00	7,767	100.00	29,737	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen												
	Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok	127	134		141		149		157		157		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen	46.41	50.00	18,557	60.00	18,928	70.00	19,307	80.00	19,693	80.00	76,485	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri	Persen	0.00	0.29	1,231	0.46	1,477	0.63	1,773	0.80	2,127	0.80	6,608	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Persentase kampung maju	Persen	0.75	1.44		1.72		2.01		2.30		2.30		
	Persentase kampung berkembang	Persen	7.86	10.33		13.32		16.30		19.29		19.29		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	100.00	536	100.00	590	100.00	649	100.00	713	100.00	2,488	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persen	100.00	100.00	384	100.00	500	100.00	500	100.00	500	100.00	1,884	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	Persen	2.66	2.50		2.40	738	2.30	759	2.20	780	2.20	2,277	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	3.94	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persen	0.00	80.00		100.00	472	100.00	485	100.00	498	100.00	1,455	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	29.00	30.00		40.00	236	50.00	243	60.00	250	60.00	729	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perhubungan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	17,238	100.00	17,583	100.00	17,934	100.00	18,293	100.00	71,048	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Rasio konektivitas Provinsi	Persen	N/A	60.00	17,762	63.00	18,650	66.15	19,583	69.46	20,562	69.46	76,556	DINAS PERHUBUNGAN
	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Persen	N/A	45.00		47.25	49.61	52.09	52.09					



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen	N/A	35.00		36.75		38.59		40.52		40.52		
	Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen	N/A	75.00		78.75		82.69		86.82		86.82		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen	N/A	20.00	530	21.80	600	23.76	600	25.90	600	25.90	2,330	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	93,061,171	97,714,230	36,188	#####	36,912	#####	37,650	#####	38,403	#####	149,153	DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	450,602	473,132		515,714		562,128		612,720		612,720		
	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen	N/A	60.00		65.40		71.29		77.70		77.70		
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	N/A	17,000,000	5,289	18,530,000	5,553	20,197,700	5,831	22,015,493	6,123	22,015,493	22,796	DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah arus penumpang angkutan udara	arus penumpang	1,837,565.00	1,929,443		2,103,093		2,292,372		2,498,685		2,498,685		
Komunikasi dan Informatika														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	14,021	100.00	14,301	100.00	14,587	100.00	14,879	100.00	57,789	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	N/A	80.00	6,613	87.20	6,745	95.05	6,880	100.00	7,018	100.00	27,256	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	N/A	85.00	13,717	92.65	14,403	100.00	15,123	100.00	15,879	100.00	59,122	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)	Persen	40.18	60.00		80.00		90.00		100.00		100.00		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Terselenggaranya Penunjang	Persen	100.00	100.00	14,581	100.00	14,500	100.00	14,500	100.00	14,500	100.00	58,081	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Urusan Pemerintahan Daerah													
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	100	100	250	100	250	100	250	100	250			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50.00	53.00	1,249	45.00	1,311	50.00	1,377	55.00	1,446	55.00	5,383	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50.00	53.00		56.00		59.00		62.00		62.00		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persen	40.00	45.00	1,676	55.00	1,710	65.00	1,744	75.00	1,779	75.00	6,908	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen	N/A	45.00		55.00		65.00		75.00		75.00		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	7.71	7.86	500	8.02	500	8.18	600	8.35	700	8.51	2,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	60.00	65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	Persen			500		500		500		500		2,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen	45.00	50.00		55.00		60.00		65.00		65.00		
	Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	Persen	40.00	45.00		50.00		55.00		65.00		65.00		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	Persen	40.00	45.00	7,609	55.00	7,799	65.00	7,994	75.00	8,194	75.00	31,596	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	N/A	10.00		20.00		40.00		50.00		50.00		
	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	N/A	10.00		20.00		40.00		50.00		50.00		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	Persen	28.71	30.15	2,072	31.65	2,134	32.29	2,198	33.90	2,264	33.90	8,668	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penanaman Modal														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	11,991	100.00	12,291	100.00	12,598	100.00	12,913	100.00	49,793	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	Persen	100.00	100.00	500	100.00	515	100.00	530	100.00	546	100.00	2,092	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	Persen	67.25	70.25	679	73.25	1,000	76.25	1,150	79.25	1,161	79.25	3,989	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Sektor	7	8	500	9	1,500	10	1,500	11	1,500	11.00	5,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perijinan & non perijinan yang di keluarkan pertahun	Dokumen	2,204	2,210	500	2,215	1,591	2,216	1,632	2,220	1,714	2,220	5,437	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	Persen	84.00	85.00	1,000	90.00	1,000	95.00	1,000	100.00	1,000	100.00	4,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Kepemudaan, dan Olahraga														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	20,293	100.00	20,000	100.00	20,000	100.00	20,000	100.00	80,293	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persen	N/A	50.00	7,050	70.00	7,403	90.00	7,773	100.00	8,161	100.00	30,386	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persen			270		350		400		450		1,470	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	100.00	2,100	100.00	2,153	100.00	2,206	100.00	2,261	100.00	8,720	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Statistik														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	N/A	65.00	344	70.85	500	77.23	500	84.18	500	84.18	1,844	DINAS KOMUNIKAS INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Persandian														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	N/A	100.00	2,032	100.00	2,000	100.00	2,000	100.00	2,000	100.00	8,032	DINAS KOMUNIKAS INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Kebudayaan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	16,572	100.00	16,986	100.00	17,411	100.00	17,846	100.00	68,815	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	31.25	1,862	51.25	1,909	71.25	1,956	91.25	2,005	91.25	7,732	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	100.00	100.00	298	100.00	305	100.00	313	100.00	321	100.00	1,237	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	100.00	100.00	1,716	100.00	1,759	100.00	1,803	100.00	1,848	100.00	7,126	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	Persen	89.70	89.80	3,414	89.90	3,499	90.00	3,587	90.10	3,677	90.10	14,177	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Perpustakaan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	12,754	100.00	13,073	100.00	13,400	100.00	13,735	100.00	52,961	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	N/A	48.50	2,955	49.20	3,014	49.70	3,074	50.10	3,136	50.10	12,179	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Kearsipan														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen			250		300		300		300		1,150	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen	N/A	100.00	300	100.00	440	100.00	480	100.00	520	100.00	1,740	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	50.00	250	60.00	830	70.00	910	80.00	990	80.00	2,980	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Kelautan dan Perikanan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	100.00	33,074	100.00	33,735	100.00	34,410	100.00	35,098	100.00	136,318	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	100.00	6,183	100.00	6,307	100.00	6,433	100.00	6,561	100.00	25,484	BLUD KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	100.00	800	100.00	816	100.00	832	100.00	849	100.00	3,297	BLUD PENGELOLAAN KKP KAIMANA
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69.19	70.00	1,210	70.00	1,240	75.00	1,271	75.00	1,303	75.00	5,025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan	Persen	90.00	92.00		92.00		95.00		95.00		95.00		
	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Persen	N/A	50.00		70.00		80.00		90.00		90.00		
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	N/A	80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	72.50	78.00	6,640	80.00	7,598	85.00	8,250	90.00	9,124	90.00	31,612	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang di kelola	Ha	2,567,455.46	#####		#####		#####		#####		#####		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	46,000	46,500	6,182	47,000	7,344	48,000	7,930	49,000	8,662	49,000	30,118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	98.49	99.48		100.47		101.48		102.49		102.49		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	130,000	150,000	17,961	170,000	18,320	190,000	18,687	210,000	19,060	230,000	74,028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Nilai Tukar Nelayan (NTN	Indeks	95.565	96.52		97.49		98.46		99.45		99.45		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T Rp.	T Rp.	T Rp.	T Rp.	T Rp.						
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan	Persen	25.00	25.00	1,900	25.00	2,444	30.00	2,930	40.00	3,662	40.00	10,936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan untuk jenis makanan ikan	kg/kapita/bulan	2.93	3.08		3.23		3.39		3.56		3.56		
	Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian	Persen	5.71	5.80		5.88		5.97		6.06		6.06		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69.19	70.00	1,000	70.00	1,025	75.00	1,051	75.00	1,077	75.00	4,153	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pariwisata														
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen			2,250		2,363		2,481		2,605		9,698	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	Persen	N/A	10.00	2,672	15.00	3,125	20.00	3,281	25.00	3,445	25.00	12,523	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Persen	100.00	100.00	1,100	100.00	1,121	100.00	1,142	100.00	1,164	100.00	4,527	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang memperoleh pembinaan	Persen	N/A	20.00		25.00		30.00		40.00		40.00		
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	industri	N/A	10		15		20		25		25		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	Persen	62.07	67.07	2,802	72.07	2,872	77.07	2,944	82.07	3,017	82.07	11,635	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	1.60	1.62		1.63		1.65		1.66		1.66		



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah			
				2023		2024		2025		2026							
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)				
	Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	2.00	2.02		2.04		2.06		2.08		2.08					
Pertanian																	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	23,321	100.00	21,695	100.00	22,301	100.00	22,926	100.00	90,242	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen	80.00	80.00	1,177	85.00	2,000	90.00	2,000	100.00	2,000	100.00	7,177	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak	Persen	80.00	80.00	4,000	85.00	4,100	90.00	4,203	100.00	4,308	100.00	16,610	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	Produksi daging ternak besar:																
	1. Sapi	ton	1,762.86	1,851.00		1,943.55		2,040.73		2,142.77		2,142.77					
	2. Kambing	ton	59.37	60.56		61.77		63.00		64.26		64.26					
	3. Babi	ton	1,596.27	1,676.08		1,759.89		1,847.88		1,940.28		1,940.28					
	Produksi daging unggas																
	1. Ayam kampung	ton	672.61	686.06		699.78		713.78		728.05		728.05					
	2. Ayam petelur	ton	296.85	305.76		314.93		324.38		334.11		334.11					
	3. Ayam pedaging	ton	1,015.74	1,036.05		1,056.78		1,077.91		1,099.47		1,099.47					
	3. Itik/itik manila	ton	59.77	60.37		60.97		61.58		62.20		62.20					
	Produksi telur																
	1. Ayam kampung	ton	2,522.45	2,774.69		3,052.16		3,357.38		3,693.12		3,693.12					
	2. Ayam petelur	ton	3,303.75	3,634.13		3,997.54		4,397.29		4,837.02		4,837.02					
	3. Itik/itik manila	ton	722.23	794.45		873.89		961.28		1,057.41		1,057.41					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak	Persen	80.00	80.00	3,221	85.00	3,302	90.00	3,384	100.00	3,469	100.00	13,375	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya	Persen	N/A	50.00	500	60.00	513	70.00	525	80.00	538	80.00	2,076	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Cakupan tertanggulangnya pasca bencana alam bidang peternakan	Persen	N/A	80.00	500	80.00	550	90.00	605	100.00	665	100.00	2,320	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah				
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)					
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.							
BENCANA PERTANIAN																		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen	N/A	80.00	1,240	85.00	1,302	90.00	1,367	100.00	1,435	100.00	5,345	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	41,541	100.00	42,602	100.00	43,791	100.00	43,018	100.00	170,953	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	67	11.00	13,775	13.00	14,119	15.00	14,472	16.00	14,834	16.00	57,201	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
	Produktivitas Tanaman Pangan																	
	1. Padi	Ton/Ha	3.95	4.15		4.35		4.57		4.80		4.80						
	2. Kacang Tanah	Ton/Ha	1.10	1.16		1.21		1.27		1.34		1.34						
	3. Jagung	Ton/Ha	1.80	1.89		1.98		2.08		2.19		2.19						
	4. Ubi Kayu	Ton/Ha	11.40	11.97		12.57		13.20		13.86		13.86						
	5. Ubi Jalar	Ton/Ha	11.80	12.39		13.01		13.66		14.34		14.34						
	Produktivitas Tanaman Hortikultura																	
	1. Cabai Rawit	Ton/Ha	3.47	3.82		4.01		4.21		4.42		4.42						
	2. Tomat	Ton/Ha	2.91	3.20		3.36		3.53		3.71		3.71						
	3. Sawi	Ton/Ha	2.55	2.81		2.95		3.09		3.25		3.25						
	4. Bawang Merah	Ton/Ha	3.17	3.48		3.66		3.84		4.03		4.03						
	5. Wortel	Ton/Ha	0.84	0.92		0.97		1.02		1.07		1.07						
	6. Kangkung	Ton/Ha	3.51	3.86		4.06		4.26		4.47		4.47						
	7. Bayam	Ton/Ha	2.22	2.45		2.57		2.70		2.83		2.83						
	8. Kacang Panjang	Ton/Ha	2.27	2.50		2.63		2.76		2.90		2.90						
	9. Melon	Ton/Ha	2.26	2.49		2.61		2.74		2.88		2.88						
	10. Semangka	Ton/Ha	3.06	3.37		3.54		3.71		3.90		3.90						
	11. Alpukat	Kuintal/Ha	0.79	0.87		0.91		0.96		1.01		1.01						
	12. Durian	Kuintal/Ha	1.28	1.41		1.48		1.55		1.63		1.63						
	13. Mangga	Kuintal/Ha	1.44	1.59		1.67		1.75		1.84		1.84						
14. Nangka	Kuintal/Ha	1.40	1.54	1.61	1.69	1.78	1.78											
15. Pisang	Kuintal/Ha	2.52	2.78	2.91	3.06	3.21	3.21											
16. Nanas	Kuintal/Ha	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15											
17. Rambutan	Kuintal/Ha	0.56	0.62	0.65	0.68	0.72	0.72											



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	18. Jeruk Siam	Kuintal/Ha	2.20	2.41		2.54		2.66		2.80		2.80		
	19. Salak	Kuintal/Ha	0.44	0.48		0.51		0.53		0.56				
	20. Manggis	Kuintal/Ha	0.43	0.47		0.49		0.52		0.54				
	Produktivitas Perkebunan													
	1. Kelapa	Ton/Ha	0.87	0.96		1.06		1.16		1.28				
	2. Kopi	Ton/Ha	0.07	0.08		0.09		0.10		0.11				
	3. Kakao	Ton/Ha	0.08	0.09		0.10		0.11		0.12				
	4. Pala	Ton/Ha	0.07	0.07		0.08		0.09		0.10				
	5. Pinang	Ton/Ha	0.12	0.13		0.15		0.16		0.18				
	6. Sagu	Ton/Ha	0.89	0.98		1.08		1.18		1.30				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT))	Persen	1.50	1.70	17,326	1.90	17,759	2.00	18,203	2.10	18,658	2.10	71,946	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	N/A	30.00		50.00		60.00		80.00				
	Persentase irigasi pertanian terbangun	Persen	N/A	30.00		50.00		60.00		80.00				
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang diberdayakan	Persen	N/A	50.00	618	60.00	633	70.00	649	80.00	666	80.00	2,566	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan areal wilayah gagal panen yang tertangani	Persen	N/A	40.00	1,600	50.00	1,760	60.00	1,936	80.00	2,130	80.00	7,426	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Persen	N/A	70.00		80.00		90.00		100.00				
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha di bidang pertanian yang memiliki ijin	Persen	1.00	1.10	150	1.20	300	1.30	300	1.40	300	1.40	1,050	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Cakupan pelayanan penerbitan izin usaha pertanian	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Cakupan pelayanan penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
Perdagangan;														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Terselenggaranya Penunjang	Persen	100.00	100.00	24,063	100.00	25,739	100.00	26,458	100.00	27,199	100.00	103,459	DINAS PERINDUSTRIAN



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah		
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)			
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.					
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Urusan Pemerintahan Daerah													DAN PERDAGANGAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen	40.00	45.00	1,911	50.00	1,964	55.00	2,019	65.00	2,075	65.00	7,969	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Persentase Nilai ekspor non Migas	juta US \$	2077.37	2118.92				2161.30				2204.52				2248.61
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	Persen	65.00	70.00	3,823	75.00	3,861	80.00	3,900	85.00	3,939	85.00	15,523	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100.00	100.00	6,701	100.00	6,835	100.00	6,972	100.00	7,111	100.00	27,619	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persen	N/A	100.00				100.00				100.00				100.00
	Persentase Inflasi tahunan	Persen	3.47	3.35				3.30				3.25				3.25
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100.00	100.00	2,343	100.00	2,280	100.00	2,344	100.00	2,410	100.00	9,377	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Perindustrian																
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	Persen	50.00	60.00	1,147	75.00	1,170	80.00	1,193	90.00	1,217	90.00	4,727	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada/tidak ada	ada	ada				ada				ada				ada
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	40.00	50.00	2,423	55.00	2,423	60.00	2,423	65.00	2,423	65.00	9,692	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Persen	7.00	5.00				6.00				7.00				7.00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				538		549		560		571		2,219	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				1,147		1,170		1,193		1,217		4,727	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kehutanan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	99,432	100.00	106,839	100.00	109,823	100.00	112,900	100.00	428,994	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberberdayaan kehutanan	Jumlah orang	528.00	200	1,615	200	1,655	200	1,697	300	1,739	300.00	6,706	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha	7,140,930	1,206,596	35,209	1,396,484	36,969	1,474,263	38,818	1,529,818	40,759	1529818.00	151,755	DINAS KEHUTANAN
	Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	N/A	30.00		25.50		21.68		18.42				
	Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persen	N/A	22.26		24.26		26.44		28.82				
	Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen	N/A	30.00		34.50		39.68		45.63		45.63		
	Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3	789,182	804,966		821,065		837,486		854,236		854,236		
	Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha	N/A	20.00		21.80		23.76		25.90		25.90		
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen	N/A	75.00		81.75		89.11		97.13		97.13		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen	100	100.00	522	100.00	720	100.00	790	100.00	800	100.00	2,832	DINAS KEHUTANAN
	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	#REF!	#REF!	40.00		46.00		52.90		60.84				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen	N/A	20.00		23.00	2,920	26.45	2,955	30.42	3,037	30.42	8,912	DINAS KEHUTANAN
Energi dan Mineral														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	16,954	100.00	17,378	100.00	17,812	100.00	18,258	100.00	70,402	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan peningkatan ketenagalistrikan	Unit	1800	500	20,126	500	20,629	500	21,145	500	21,674	500	83,574	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	68.47	71.89		75.49		80.00		84.00		83.00		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan pembangunan energi terbarukan	Unit	1750	500	205	500	300	500	300	500	300	500	1,105	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Persen	83.40	85.40		87.40		89.40		91.40		91.40		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	30.00	40.00	233	50.00	556	60.00	572	70.00	588	70.00	1,949	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen	5.00	7.00		10.00		12.00		15.00		15.00		
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	N/A	50.00	527	70.00	600	80.00	600	100.00	600	100.00	2,327	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sekretariat Daerah														
BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	1,050	100.00	1,071	100.00	1,092	100.00	1,114	100.00	4,328	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan kebijakan dan model afirmasi perlindungan sosial OTSUS bagi OAP kontekstual Papua	ada/tidak ada	ada	ada	1,967	ada	2,065	ada	2,169	ada	2,277	ada	8,478	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persen	N/A	100.00	2,013	100.00	2,063	100.00	2,115	100.00		100.00	6,191	BIRO ADMINISTRAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persen	N/A	100.00	400	100.00		100.00		100.00		100.00	400	BIRO ADMINISTRAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kerjasama daerah	Persen	N/A	100.00	3,718	100.00		100.00		100.00		100.00	3,718	BIRO ADMINISTRAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/kota	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persen	N/A	100.00	5,605	100.00		100.00		100.00		100.00	5,605	BIRO ADMINISTRAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	1,311	100.00	1,442	100.00	1,586	100.00	1,745	100.00	6,084	BIRO ADMINISTRAS PEMBANGUNAN
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	10.00	10.00	986	25.00	1,006	40.00	1,026	55.00	1,046	55.00	4,064	BIRO ADMINISTRAS PEMBANGUNAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Layanan Administrasi pemerintahan desa	Persen	N/A	100.00	547	100.00	670	100.00	708	100.00	727	100.00	2,652	BIRO ADMINISTRAS PEMBANGUNAN
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Cakupan pelaporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persen	N/A	100.00	156	100.00	660	100.00	658	100.00	698	100.00	2,172	BIRO ADMINISTRAS PEMBANGUNAN
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	9,000	100.00	7,874	100.00	8,093	100.00	8,320	100.00	33,287	BIRO ADMINISTRAS PIMPINAN
BIRO HUKUM														



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	2,509	100.00	2,509	100.00	2,509	100.00	2,509	100.00	10,036	BIRO HUKUM
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	N/A	100.00	5,491	100.00	5,817	100.00	5,979	100.00	6,147	100.00	23,434	BIRO HUKUM
	Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	2,730	100.00	500	100.00	500	100.00	500	100.00	4,230	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat terutama OAP	Persen	N/A	100.00	66,851	100.00	70,000	100.00	70,000	100.00	70,000	100.00	276,851	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIRO ORGANISASI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	1,429	100.00	1,165	100.00	1,198	100.00	1,231	100.00	5,023	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	5,571	B	5,000	B	5,000	A	5,000	A	20,571	BIRO ORGANISASI
	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	B		B		B		A		A		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	B		B		B		A		A		
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	130	100.00	500	100.00	500	100.00	500	100.00	1,630	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rumusan kebijakan dan model penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan distrik yang dihasilkan	ada/tidak ada	ada	ada	8,201	ada	8,000	ada	8,000	ada	8,000	ada	32,201	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026				
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	1,250	100.00	1,250	100.00	1,250	100.00	1,250	100.00	5,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	N/A	75.00	6,750	80.00	7,000	85.00	7,000	90.00	7,000	90.00	27,750	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	N/A	50.00		60.00		70.00		80.00		80.00		
BIRO PEREKONOMIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	0	100.00	2,856	100.00	2,936	100.00	3,018	100.00	8,810	BIRO PEREKONOMIAN
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Persen	N/A	100.00	3,000	100.00	5,018	100.00	5,158	100.00	5,302	100.00	18,477	BIRO PEREKONOMIAN
	Presentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase Rumusan Kebijakan koperasi, ekonomi kreatif dan sumber daya alam	Persen	N/A	100		100		100		100		100.00		
BIRO UMUM														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	25,669	100.00	25,669	100.00	25,669	100.00	25,669	100.00	102,676	BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH														



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	Target	Rp (jutaan)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	160,581	100.00	184,804	100.00	189,595	100.00	196,500	100.00	731,480	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	N/A	100.00	326	100.00	485	100.00	498	100.00	512	100.00	1,821	SEKRETARIAT DAERAH
Penghubung Daerah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	12,290	100.00	11,936	100.00	12,282	100.00	12,638	100.00	49,147	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	Persen	100.00	100.00	2,990	100.00	3,065	100.00	3,141	100.00	3,220	100.00	12,416	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Sekretariat DPRP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	73,339	100.00	74,072	100.00	74,813	100.00	75,561	100.00	297,786	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPB	ada/tidak ada	N/A	ada	45,791	ada	46,249	ada	46,711	ada	47,179	ada	185,930	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPB untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada		
	Terintegrasi program-program DPRP untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRP	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada		ada		
PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjangkaran aspirasi	Persen	N/A	100.00	0	100.00	1,072	100.00	1,102	100.00	1,133	100.00	3,308	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP													RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretariat MRP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	12,415	100.00	12,749	100.00	13,105	100.00	13,472	100.00	51,742	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA BARAT	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan MRP	ada/tidak ada	N/A	ada	59,775	ada	56,493	ada	58,071	ada	59,698	ada	234,037	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Perencanaan Pembangunan Daerah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	25,832	100.00	26,349	100.00	26,876	100.00	27,413	100.00	106,469	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat				12,106		12,348		12,595		12,847		49,896	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah	Persen	100.00	100.00	10,500	100.00	10,763	100.00	11,032	100.00	11,307	100.00	43,601	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Ketersediaan Dokumen RKPD	ada/tidak ada	N/A	ada		ada		ada		ada				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	64,166	100.00	65,770	100.00	67,414	100.00	69,100	100.00	266,450	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Asset management	Ya/Tidak	Ya	Ya	5,800	Ya	6,380	Ya	7,018	Ya	7,720	Ya	26,918	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2,010,930	Tepat Waktu	2,051,149	Tepat Waktu	2,092,172	Tepat Waktu	2,134,015	Tepat Waktu	8,288,265	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu				
Pendapatan Daerah														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	58,532	100.00	58,106	100.00	59,729	100.00	61,402	100.00	237,769	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	N/A	5.00	2,657	6.00	3,132	7.00	3,219	8.00	3,309	8.00	12,317	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Rasio PAD	Persen	N/A	6.00										
	Persentase Peningkatan penerimaan PAD UPT Fak-Fak	Rp. Miliar	N/A	5	589	5	604	5	619	5	634	5	2,446	UPT SAMSAT KABUPATEN FAKFAK
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Kaimana	Rp. Miliar	N/A	5	597	5	612	5	627	5	643	5	2,479	UPT SAMSAT KABUPATEN KAIMANA
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari	Rp. Miliar	N/A	5	786	5	806	5	826	5	846	5	3,264	UPT SAMSAT KABUPATEN MANOKWARI
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Bintuni	Rp. Miliar	N/A	5	408	5	418	5	429	5	439	5	1,694	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Wondama	Rp. Miliar	N/A	5	531	5	544	5	558	5	572	5	2,205	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepegawaian Daerah														



Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	21,994	100.00	22,544	100.00	23,107	100.00	23,685	100.00	91,330	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	N/A	100.00	12,218	100.00	12,800	100.00	14,650	100.00	16,250	100.00	55,918	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Badan Pengembangan SDM														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	24,442	100.00	24,705	100.00	25,395	100.00	26,106	100.00	100,648	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	18,417	100.00	18,785	100.00	19,161	100.00	19,544	100.00	75,908	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	N/A	100.00	1,626	100.00	1,626	100.00	1,626	100.00	1,626	100.00	6,504	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Inspektorat														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	26,835	100.00	27,506	100.00	28,194	100.00	28,898	100.00	111,433	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	N/A	2	13,818	2	14,163	3	14,518	3	14,880	3.00	57,379	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	N/A	100.00	411	100.00	487	100.00	500	100.00	514	100.00	1,912	INSPEKTORAT
	Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	N/A	75.00		80.00		85.00		100.00				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
Penelitian dan Pengembangan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	10,800	100.00	11,070	100.00	11,347	100.00	11,630	100.00	44,847	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	Persen	100.00	100.00	2,770	100.00	2,825	100.00	2,882	100.00	2,940	100.00	11,417	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
	Cakupan publikasi ilmiah dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				
Kesatuan Bangsa dan Politik														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100.00	17,145	100.00	17,574	100.00	18,013	100.00	18,463	100.00	71,195	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina dan diawasi	Persen	100.00	100.00	133,451	100.00	136,120	100.00	138,842	100.00	141,619	100.00	550,033	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen	100.00	100.00	181	100.00	369	100.00	379	100.00	390	100.00	1,319	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100.00	100.00	3,000	100.00	3,000	100.00	3,000	100.00	3,000	100.00	12,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan DIini Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Persen	100.00	100.00	1,557	100.00	1,588	100.00	1,620	100.00	1,652	100.00	6,417	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Anggaran								Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah
				2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jutaan)	
			2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	100.00	100.00	8,964	100.00	10,907	100.00	11,212	100.00	11,526	100.00	42,610	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					5,504,869		5,662,220		5,789,530		5,918,108			





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu hierarki tujuan, sasaran dan program yang berwujud kedalam indikator kinerja outcome jangka menengah dari masing masing program

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Provinsi Papua Barat. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel VIII.1, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada Tabel VIII.2.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai



alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,09	62,26	65,89	66,55	67,21	67,89	68,57	68,57
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,02	66,41	66,46	66,54	66,67	66,80	66,94	66,94
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,91	13,13	13,21	13,79	14,14	14,49	14,85	14,85
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,60	7,69	7,84	8,40	8,78	9,17	9,58	9,58
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,34	83,00	83,61	84,28	84,95	85,63	86,32	86,32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,17	62,17	n.a	64,05	65,01	65,98	66,97	66,97
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50,83 (th 2018)	55,17	n.a	56,27	57,40	58,55	59,72	59,72
Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen	n.a	n.a	n.a	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	24,60	n.a	30,00	26,00	22,00	18,00	14,00	14,00
Cakupan OAP penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	n.a	n.a	n.a	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,76	-0,51	2,01	3,00	4,00	5,00	5,80	5,80
Tingkat Kemiskinan	Persen	21,37	21,84	21,33	21,00	19,00	18,50	18,00	18,00
Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita	Rp. Ribu	63.080	60.719	60.463	56.123	57.806	59.541	61.327	63.167
Indeks Gini	Indeks	0,376	0,381	0,381	0,373	0,369	0,366	0,362	0,358
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,55	70,34	68,55	69,24	69,93	70,63	71,33	71,33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,80	5,84	5,37	5,00	4,80	4,60	4,40	4,40
Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata	Rp Milyar	3166,03	3143,26	3298,43	3364,40	3431,69	3500,32	3570,33	3641,73
Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,03	7,23	7,43	7,50	7,63	7,83	8,03	8,03
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	31,16	30,60	30,87	31,02	31,18	31,34	31,49	31,49
Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,78	100,86	100,63	100,68	100,73	100,78	100,83	100,83
Nilai Investasi	Rp. Triliun	n.a	14.709,34	n.a	15.077,07	15.454,00	15.840,35	16.236,35	16.236,35
Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya per tahun	Persen	n.a	n.a	n.a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Persentase UMKM yang meningkat omzetnya per tahun	Persen	n.a	n.a	n.a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,23	5,20	5,40	5,56	5,73	5,90	6,08	6,08
Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	7,26	8,61	n.a	12,06	15,51	18,96	22,41	22,41



Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan sistem administrasi dan informasi kampung yang terhubung dengan Kabupaten dan Provinsi	Persen	10,79	40,18	61,65	65,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	130,59	130,59	124,82	122,32	119,88	117,48	115,13	115,13
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	59,11	68,98	73,23	76,89	80,74	84,77	89,01	89,01
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	78,71	77,89	73,52	81,09	82,31	83,54	84,79	84,79
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persen	63,87	77,66	n.a	80,01	81,21	82,43	83,66	83,66
Cakupan Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi	Persen	N/A	N/A	N/A	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	N/A	56,83	n.a	58,25	59,70	61,20	62,73	62,73
Cakupan wilayah yang sudah terakses internet telepon seluler	Persen	68,33	81,09	n.a	85,14	87,70	90,33	93,04	93,04
Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan wilayah kabupaten/kota pesisir yang terhubung dengan moda transportasi laut	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi udara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan non-PLN)	Persen	94,94	95,79	95,49	95,68	95,87	96,06	96,26	96,26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,8	79,25	84,22	77,82	78,45	78,45	78,45	78,45
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53.89 (th 2019)	56,15	62,00	56,25	56,35	56,35	56,35	56,35
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	n.a	77,17	89,30	91,98	94,74	97,58	100,00	100,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.64 (th 2019)	92,07	95,79	92,17	92,27	92,27	92,27	92,27
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100,00 (th 2019)	95,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	tCO2/th	5344043,00			3.740.830	3.206.426	2.672.022	2.137.617	2.137.617





Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal RPD			Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	Persen	100,00			70,00	60,00	50,00	40,00	40,00
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (th 2019)	C (th 2020)	n.a	B	B	B	A	A
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B	B	B	B	B	A	A
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2	3	3
Opini pengelolaan keuangan daerah	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	n.a	n.a	n.a	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Persentase Kab/ Kota yang Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	57,62 (th 2019)	61,76 (th 2020)	n.a	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	144,05	146,46	n.a	142,05	141,34	140,63	139,93	139,23
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	82,08 (th 2019)	n.a	n.a	82,10	82,92	83,75	84,59	84,59

Tabel VIII.2 Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Papua Barat 2023-2026

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi AkhirRPD
			2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,51	5,50	5,60	5,70	5,80	5,80
Pendapatan (PDRB ADHK) per Kapita	Rp. Ribu	52.979	56.123	57.806	59.541	61.327	63.167
Indeks Gini Rasio	Indeks	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37
Tingkat Kemiskinan	Persen	21,82	20,86	19,91	18,96	18,00	18,00
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,26	66,19	67,13	68,06	69,00	69,00
Angka melek huruf	persen	97,80	98,29	98,78	99,27	99,77	99,77
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,69	8,40	8,78	9,17	9,58	9,58
Harapan Lama sekolah	Tahun	13,13	13,79	14,14	14,49	14,85	14,85
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,14	66,27	66,40	66,54	66,67	66,80
Prevalensi balita stunting	persen	24,60	21,20	18,70	16,20	13,70	13,70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,34	71,75	73,18	74,65	76,14	76,14
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,15	85,42	86,70	88,00	89,32	89,32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,10	64,05	65,01	65,98	66,97	66,97
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,84	5,55	5,27	5,01	4,76	4,76
Peningkatan nilai PAD	Persen	2,40	2,42	2,45	2,47	2,50	2,50
Opini BPK terhdap laporan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Ketahanan pangan	Indeks	49,40	51,87	54,46	57,19	60,05	60,05
Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	12,36	12,66	12,96	13,26	13,56	13,56
Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,23	7,43	7,63	7,83	8,03	8,03
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	30,60	30,80	31,00	31,20	31,40	31,60
Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,20	5,22	5,24	5,26	5,28	5,28
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50,83	51,00	52,00	53,00	54,00	54,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Nilai Tukar Petani	Indeks	100,86	100,99	101,12	101,25	101,38	101,38
Nilai Investasi	Rp. Triliun	14.709	15.077	15.454	15.840	16.236	16.236
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	80,20	81,00	82,00	83,00	85,00	85,00
Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	8,61	12,06	15,51	18,96	22,41	22,41
Indeks Demokrasi	Indeks	61,76	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Persen	130,59	127,65	124,78	121,97	119,23	119,23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	79,25	77,82	78,45	78,45	78,45	78,45
Indeks Resiko Bencana	Indeks	144,05	142,05	140,05	138,05	136,05	136,05
Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	C	B	B	B	A	A
Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	3	3
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B	B	B	A	A
Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	N/A	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi AkhirRPD
			2023	2024	2025	2026	
ASPKE PELAYANAN UMUM							
PENDIDIKAN							
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	per satuan murid	5	5	5	5	5	5
Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		45,33	43,75	45,90	47,48	49,06	50,64
Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		57,75	61,52	65,43	67,43	69,43	69,43
Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	52,52	54,65	56,78	58,91	61,04
Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	60,81	63,89	66,97	70,05	73,13
Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Iklim Keamanan SDLB		76,40	84,00	88,22	92,22	96,22	100,22
Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB		60,00	83,10	85,72	88,22	90,72	93,22
Indeks Inkusisivitas SDLB		69,60	81,26	84,52	87,78	91,04	94,30
Indeks Iklim Keamanan SMPLB		N/A	86,43	89,86	93,29	96,72	100,15
Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB		N/A	77,63	79,86	82,09	84,32	86,55
Indeks Inkusisivitas SMPLB		N/A	94,90	98,00	98,50	99,00	99,50
Indeks Iklim Keamanan SMALB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Inkusisivitas SMALB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio guru/murid sekolah SDLB	Rasio per 10.000 murid	747	750	750	750	750	750
Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio per 10.000 murid	732	750	750	750	750	750
Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio per 10.000 murid	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Guru SLB yang tersertifikasi (SDGs)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Guru SDLB,SMPLB,SMALB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	dokumen	0	1	1	1	1	4
Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang meningkawt kompetensinya	orang	0	1	1	1	1	4
KESEHATAN							





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	2.1 : 1000	2.2 : 1000	2.3 : 1000	2.3 : 1000
Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	240,87	240,87	240,87	240,87	240,87	240,87
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	5,90	5,78	5,67	5,55	5,44	5,33
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	29,00	35,00	50,00	75,00	95,00	95,00
Prevalensi HIV	Persen	2,00	1,80	1,50	1,20	1,00	1,00
Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	5,53	4	3	2	1	1,00
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	51,20	60,00	75,00	90,00	100,00	100,00
Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14,00	20,00	35,00	55,00	75,00	75,00
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	3,00	5	8	11	13	13
Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	2.1 : 1000	2.2 : 1000	2.3 : 1000	2.3 : 1000
Cakupan pegawai rumah Sakit yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	95,00	95,30	95,50	95,80	96,00	96,00
Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Persen	N/A	0,00	0,00	33,33	66,67	66,67
Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	N/A	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	Persen	25,00	27,20	29,59	32,20	35,03	35,03
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	Persen	90,00	91,50	93,00	94,50	96,00	96,00
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi	Persen	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	41,67





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Rasio Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	4,27	10,15	16,39	23,02	30,07	30,07
jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	N/A	18,18	27,27	27,27	27,27	100,00
Rasio Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA Regional	Persen	N/A	25,00	27,50	30,00	33,00	33,00
Cakupan Pemukiman yang dibangun sesuai dengan rencana	persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	17,49	18,36	19,28	20,25	21,26	21,26
Persentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Persen	N/A	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	N/A	60,00	64,80	69,98	75,58	75,58
Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha Kab/Kota yang ditangani	Persen	N/A	80,00	86,40	93,31	100,00	100,00
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	N/A	65,00	70,20	75,82	81,88	81,88
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	PERSEN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah Atau Legal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sosial							
Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	N/A	30,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	30,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan makam yang terpenuhi pemeliharaannya di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tenaga Kerja							
Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	Per 1000 kasus	1,83	1,85	1,87	1,88	1,90	1,90
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek							
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persen	N/A	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja							
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	2,18	2,22	2,27	2,32	2,37	2,37
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	N/A	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persen	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00
Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Persen	N/A	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persen	N/A	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	N/A	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date pada 11 kabupaten/kota di Papua Barat	Persen	N/A	20,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Per 100 ribu perempuan	N/A	0	0	0	0	0
Rasio KDRT							
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	48,01	50,65	53,44	56,38	59,48	59,48
Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	20,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persen	N/A	20,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio kekerasan terhadap anak	per 10 ribu anak	N/A	0	0	0	0	0,00
Pangan							
Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	Persen	44,04	43,04	42,04	41,04	40,04	40,04
Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pangan segar yang sudah disertifikasi	Produk	80	25	25	25	25	180
PPH Ketersediaan pangan	Persen	89,17	91,00	93,00	97,00	100,00	100,00
PPH konsumsi pangan	Persen	77,80	83,30	88,80	94,30	100,00	100,00
Pertanahan							
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lingkungan Hidup							
Indeks Kualitas Air	Persen	53,89	60,00	63,50	65,00	67,50	67,50
Indeks Kualitas Udara	Persen	92,64	93,00	94,50	96,00	97,00	97,00
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persen	N/A	30,00	32,40	34,99	37,79	37,79
Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi AkhirRPD
			2023	2024	2025	2026	
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	N/A	75,00	81,00	87,48	94,48	94,48
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	N/A	75,00	81,00	87,48	94,48	94,48
Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	N/A	25,00	40,00	60,00	80,00	80,00
Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	Persen	N/A	65,00	70,20	75,82	81,88	81,88
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	N/A	5	7	9	11	11
Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	Persen	N/A	60,00	64,80	69,98	75,58	75,58
Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA yang diverifikasi	N/A	60,00	63,00	66,15	69,46	69,46
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah kearifan. lokal yang diverifikasi	N/A	60,00	62,40	64,90	67,49	67,49
Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	N/A	5	7	9	11	11
Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	N/A	65,00	67,60	70,30	73,12	73,12
Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	Persen	N/A	70,00	72,80	75,71	78,74	78,74
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	74,23	81,65	89,82	98,80	100,00	100,00
Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	N/A	50	60	70	80	80,00
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen		100	100	100	100	100
Rasio Cakupan Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	N/A	70	80	90	100	100
Pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	40,00	50,00	60,00	70,00	100,00
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
persentase Posyandu aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase peningkatan status desa mandiri	persen						





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok	127	134	141	149	157	157
Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen	46,41	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Persentase kampung mandiri	Persen	0,00	0,29	0,46	0,63	0,80	0,80
Persentase kampung maju	Persen	0,75	1,44	1,72	2,01	2,30	2,30
Persentase kampung berkembang	Persen	7,86	10,33	13,32	16,30	19,29	19,29
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	Persen	2,66	2,50	2,40	2,30	2,20	2,20
Laju pertumbuhan penduduk	Persen	3,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persen	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	29,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)							
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							
Perhubungan							
Rasio konektivitas Provinsi	Persen	N/A	60,00	63,00	66,15	69,46	69,46
V/C Ratio di Jalan Provinsi	Persen	N/A	45,00	47,25	49,61	52,09	52,09
Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen	N/A	35,00	36,75	38,59	40,52	40,52
Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen	N/A	75,00	78,75	82,69	86,82	86,82
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen	N/A	20,00	21,80	23,76	25,90	25,90
Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	93.061.171	97.714.230	106.508.510	116.094.276	126.542.761	126.542.761
Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	450.602	473.132	515.714	562.128	612.720	612.720
Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen	N/A	60,00	65,40	71,29	77,70	77,70
Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	N/A	17.000.000	18.530.000	20.197.700	22.015.493	22.015.493
Jumlah arus penumpang angkutan udara	arus penumpang	1.837.565,00	1.929.443	2.103.093	2.292.372	2.498.685	2.498.685
Komunikasi dan Informatika							
Presentase organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	N/A	80,00	87,20	95,05	100,00	100,00
Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	N/A	85,00	92,65	100,00	100,00	100,00





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)	Persen	40,18	60,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	100	100	100	100	100	
Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50,00	53,00	45,00	50,00	55,00	55,00
Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	62,00
Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persen	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00
Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen	N/A	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00
Persentase koperasi aktif	Persen	7,71	7,86	8,02	8,18	8,35	8,51
Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Presentase Koperasi yang berkualitas	Persen						
Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	65,00
Cakupan usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen						
Persentase pertumbuhan UMKM	Persen	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	N/A	10,00	20,00	40,00	50,00	50,00
Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	N/A	10,00	20,00	40,00	50,00	50,00
Persentase UMKM OAP yang berkembang	Persen	28,71	30,15	31,65	32,29	33,90	33,90
Penanaman Modal							
Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase peningkatan investasi	Persen						
Cakupan nilai realisasi investasi	Persen	67,25	70,25	73,25	76,25	79,25	79,25
Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Sektor	7	8	9	10	11	11,00
Jumlah perijinan & non perijinan yang di keluarkan pertahun	Dokumen	2.204	2.210	2.215	2.216	2.220	2.220
Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	Persen	84,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Kepemudaan, dan Olahraga							
Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persen	N/A	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Statistik							
Persandian							
Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kebudayaan							
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	31,25	51,25	71,25	91,25	91,25
Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	Persen	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	90,10
Perpustakaan							
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	N/A	48,50	49,20	49,70	50,10	50,10
Kearsipan							
Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Kelautan dan Perikanan							
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69,19	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	90,00	92,00	92,00	95,00	95,00	95,00
Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Persen	N/A	50,00	70,00	80,00	90,00	90,00
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	72,50	78,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang di kelola	Ha	2.567.455,46	2.887.680,79	2.673.847,66	3.090.496,56	3.023.034,33	3.023.034,33
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	46.000	46.500	47.000	48.000	49.000	49.000
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	98,49	99,48	100,47	101,48	102,49	102,49
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	130.000	150.000	170.000	190.000	210.000	230.000
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	95,565	96,52	97,49	98,46	99,45	99,45
Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan	Persen	25,00	25,00	25,00	30,00	40,00	40,00
Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan untuk jenis makanan ikan	kg/kapita/bulan	2,93	3,08	3,23	3,39	3,56	3,56
Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian	Persen	5,71	5,80	5,88	5,97	6,06	6,06
Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	69,19	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
Pariwisata							



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
Cakupan Sumberdaya OAP yang telibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang memperoleh pembinaan	Persen	N/A	20,00	25,00	30,00	40,00	40,00
Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	industri	N/A	10	15	20	25	25
Cakupan Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	Persen	62,07	67,07	72,07	77,07	82,07	82,07
Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	1,60	1,62	1,63	1,65	1,66	1,66
Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,08
Pertanian							
Cakupan kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak	Persen	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Produksi daging ternak besar:							
1. Sapi	ton	1.762,86	1.851,00	1.943,55	2.040,73	2.142,77	2.142,77
2. Kambing	ton	59,37	60,56	61,77	63,00	64,26	64,26
3. Babi	ton	1.596,27	1.676,08	1.759,89	1.847,88	1.940,28	1.940,28
Produksi daging unggas							
1. Ayam kampung	ton	672,61	686,06	699,78	713,78	728,05	728,05
2. Ayam petelur	ton	296,85	305,76	314,93	324,38	334,11	334,11
3. Ayam pedaging	ton	1.015,74	1.036,05	1.056,78	1.077,91	1.099,47	1.099,47
3. Itik/itik manila	ton	59,77	60,37	60,97	61,58	62,20	62,20
Produksi telur							
1. Ayam kampung	ton	2.522,45	2.774,69	3.052,16	3.357,38	3.693,12	3.693,12
2. Ayam petelur	ton	3.303,75	3.634,13	3.997,54	4.397,29	4.837,02	4.837,02
3. Itik/itik manila	ton	722,23	794,45	873,89	961,28	1.057,41	1.057,41
Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak	Persen	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Cakupan tertanggulangnya pasca bencana alam bidang peternakan	Persen	N/A	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Cakupan jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Cakupan produktifitas pertanian per hektar pertahun	persen						
Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	67	11,00	13,00	15,00	16,00	16,00
Produktivitas Tanaman Pangan							
1. Padi	Ton/Ha	3,95	4,15	4,35	4,57	4,80	4,80
2. Kacang Tanah	Ton/Ha	1,10	1,16	1,21	1,27	1,34	1,34
3. Jagung	Ton/Ha	1,80	1,89	1,98	2,08	2,19	2,19
4. Ubi Kayu	Ton/Ha	11,40	11,97	12,57	13,20	13,86	13,86
5. Ubi Jalar	Ton/Ha	11,80	12,39	13,01	13,66	14,34	14,34





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi AkhirRPD
			2023	2024	2025	2026	
Produktivitas Tanaman Hortikultura							
1. Cabai Rawit	Ton/Ha	3,47	3,82	4,01	4,21	4,42	4,42
2. Tomat	Ton/Ha	2,91	3,20	3,36	3,53	3,71	3,71
3. Sawi	Ton/Ha	2,55	2,81	2,95	3,09	3,25	3,25
4. Bawang Merah	Ton/Ha	3,17	3,48	3,66	3,84	4,03	4,03
5. Wortel	Ton/Ha	0,84	0,92	0,97	1,02	1,07	1,07
6. Kangkung	Ton/Ha	3,51	3,86	4,06	4,26	4,47	4,47
7. Bayam	Ton/Ha	2,22	2,45	2,57	2,70	2,83	2,83
8. Kacang Panjang	Ton/Ha	2,27	2,50	2,63	2,76	2,90	2,90
9. Melon	Ton/Ha	2,26	2,49	2,61	2,74	2,88	2,88
10. Semangka	Ton/Ha	3,06	3,37	3,54	3,71	3,90	3,90
11. Alpukat	Kuintal/Ha	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,01
12. Durian	Kuintal/Ha	1,28	1,41	1,48	1,55	1,63	1,63
13. Mangga	Kuintal/Ha	1,44	1,59	1,67	1,75	1,84	1,84
14. Nangka	Kuintal/Ha	1,40	1,54	1,61	1,69	1,78	1,78
15. Pisang	Kuintal/Ha	2,52	2,78	2,91	3,06	3,21	3,21
16. Nanas	Kuintal/Ha	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
17. Rambutan	Kuintal/Ha	0,56	0,62	0,65	0,68	0,72	0,72
18. Jeruk Siam	Kuintal/Ha	2,20	2,41	2,54	2,66	2,80	2,80
19. Salak	Kuintal/Ha	0,44	0,48	0,51	0,53	0,56	0,56
20. Manggis	Kuintal/Ha	0,43	0,47	0,49	0,52	0,54	0,54
Produktivitas Perkebunan							
1. Kelapa	Ton/Ha	0,87	0,96	1,06	1,16	1,28	1,28
2. Kopi	Ton/Ha	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11
3. Kakao	Ton/Ha	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
4. Pala	Ton/Ha	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
5. Pinang	Ton/Ha	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,18
6. Sagu	Ton/Ha	0,89	0,98	1,08	1,18	1,30	1,30
Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT))	Persen	1,50	1,70	1,90	2,00	2,10	2,10
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	N/A	30,00	50,00	60,00	80,00	80,00
Persentase irigasi pertanian terbangun	Persen	N/A	30,00	50,00	60,00	80,00	80,00
Persentase kelompok tani yang diberdayakan	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Cakupan areal wilayah gagal panen yang tertangani	Persen	N/A	40,00	50,00	60,00	80,00	80,00
Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Persen	N/A	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Persentase usaha di bidang pertanian yang memiliki ijin	Persen	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan pelayanan penerbitan izin usaha pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan;							
Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	65,00
Persentase Nilai ekspor non Migas	juta US \$	2077,37	2118,92	2161,30	2204,52	2248,61	2293,58
Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Inflasi tahunan	Persen	3,47	3,35	3,30	3,25	3,25	3,25
Persentase kinerja Realisasi Pupuk							
Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perindustrian							
Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	Persen	50,00	60,00	75,00	80,00	90,00	90,00
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Persen	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini							
Kehutanan							
Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberdayaan kehutanan	Jumlah orang	528,00	200	200	200	300	300,00
Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha	7.140.930	1.206.596	1.396.484	1.474.263	1.529.818	1529818,00
Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	N/A	30,00	25,50	21,68	18,42	
Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persen	N/A	22,26	24,26	26,44	28,82	
Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen	N/A	30,00	34,50	39,68	45,63	45,63
Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3	789.182	804.966	821.065	837.486	854.236	854.236
Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha	N/A	20,00	21,80	23,76	25,90	25,90
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen	N/A	75,00	81,75	89,11	97,13	97,13
Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	#REF!	#REF!	40,00	46,00	52,90	60,84	
Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen	N/A	20,00	23,00	26,45	30,42	30,42
Energi dan Mineral							
Cakupan peningkatan ketenagalistrikan	Unit	1800	500	500	500	500	500
Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	68,47	71,89	75,49	80,00	84,00	83,00





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan pembangunan energi terbarukan	Unit	1750	500	500	500	500	500
Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Persen	83,40	85,40	87,40	89,40	91,40	91,40
Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	15,00
Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	N/A	50,00	70,00	80,00	100,00	100,00
Pemerintahan Umum							
Rumusan kebijakan dan model afirmasi perlindungan sosial OTSUS bagi OAP kontekstual Papua	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kerjasama daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/kota	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	10,00	10,00	25,00	40,00	55,00	55,00
Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Layanan Administrasi pemerintahan desa	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelaporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian bantuan kepada masyarakat terutama OAP	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	B	B	A	A
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	B	B	B	A	A
Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	B	B	B	A	A
Rumusan kebijakan dan model penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan distrik yang dihasilkan	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Presentase Rumusan kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Rumusan Kebijakan koperasi, ekonomi kreatif dan sumber daya alam	Persen	N/A	100	100	100	100	100,00
Persentase fasilitasi Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPB	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPB untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Terintegrasi program- program DPRP untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRP	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan MRP	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perencanaan Pembangunan Daerah							
Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan Dokumen RKPD	ada/tidak ada	N/A	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah							
Asset management	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/D		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu





Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target IKD				Kondisi AkhirRPD
			2023	2024	2025	2026	
Pendapatan Daerah							
Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Presentase Rasio PAD	Persen	N/A	6,00				
Persentase Peningkatan penerimaan PAD UPT Fak-Fak	Rp. Miliar	N/A	5	5	5	5	5
Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Kaimana	Rp. Miliar	N/A	5	5	5	5	5
Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari	Rp. Miliar	N/A	5	5	5	5	5
Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Bintuni	Rp. Miliar	N/A	5	5	5	5	5
Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Wondama	Rp. Miliar	N/A	5	5	5	5	5
Kepegawaian Daerah							
Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengawasan Pembangunan Daerah							
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	N/A	2	2	3	3	3,00
Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	N/A	75,00	80,00	85,00	100,00	100,00
Penelitian dan Pengembangan							
Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan publikasi ilmiah dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kesatuan Bangsa dan Politik							
Persentase ormas yang dibina dan diawasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan DIni Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB IX

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah implementasi dan pedoman transisi RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.

RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi, RPJMN, RTRW Provinsi Papua Barat, Draft Rencana Induk Perecepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan lain yang diperintahkan peraturan dan/atau relevan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Perda tentang RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

9.1 KAIDAH IMPLEMENTASI

Dokumen RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua Barat dalam menyusun dokumen RPD maupun untuk perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Pelaksana Tugas Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.



3. Gubernur Papua Barat berkewajiban menyebarluaskan RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPD Provinsi Papua Tahun 2023-2026.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2023 sampai dengan 2026.
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJD Tahun 2023-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua Barat berpedoman pada RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua Barat.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Ini disebabkan RPJMD Provinsi Papua Barat akan berakhir pada tahun 2022 (2017-2022). Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada tujuan, sasaran pokok, arah kebijakan dan program RPD Provinsi Papua 2023-2026 ini, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyusun RKPD Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan Tahun 2022, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2022